KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PROFIL KESEHATAN INDONESIA

TAHUN 2019

KEMENKES RI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2020

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PROFIL KESEHATAN INDONESIA

TAHUN 2019

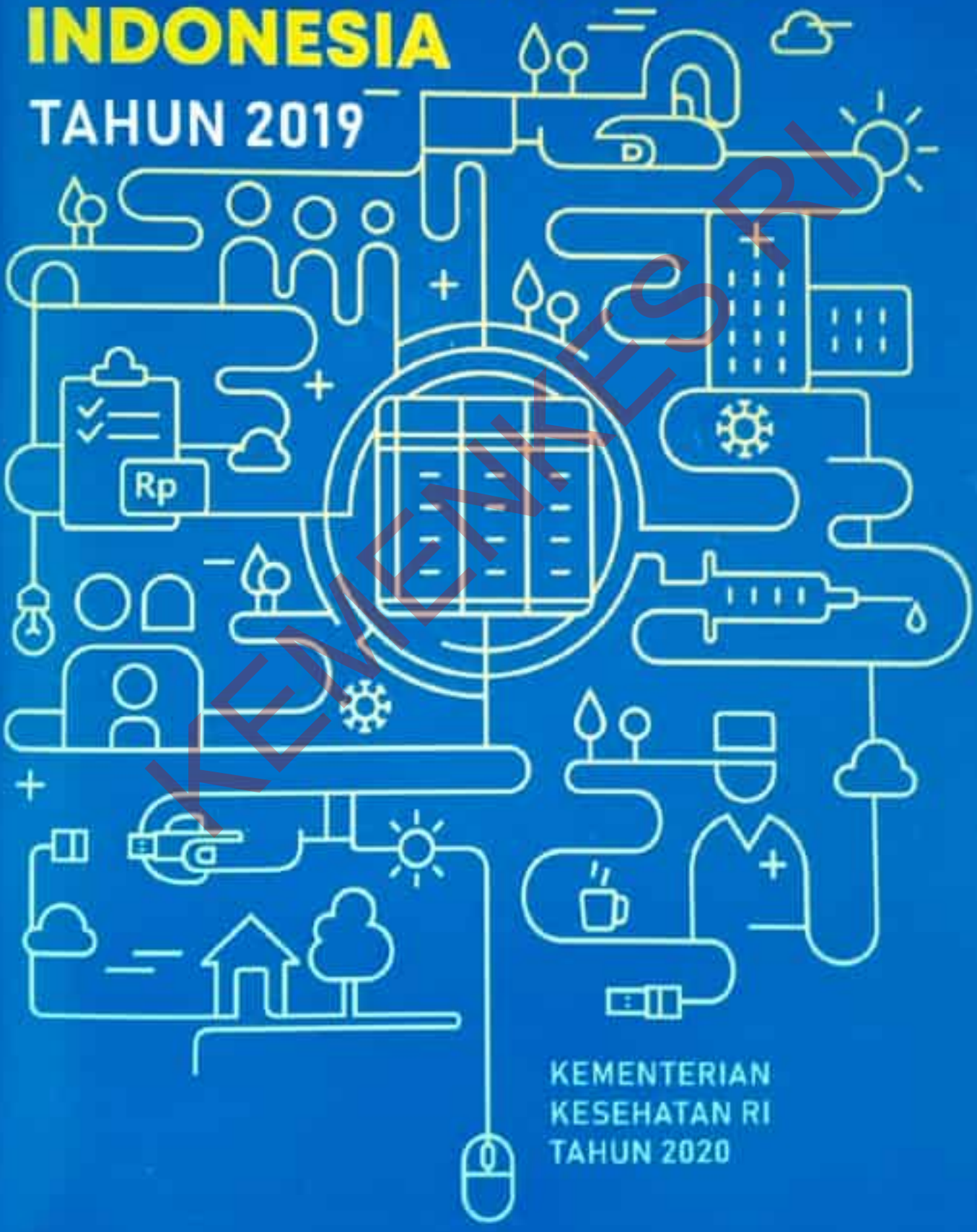

KEMENKES RI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2020

KEMENKES RI

351.077
Ind
p

PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2019

KEMENKES RI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2020

KEMENKES RI

351.077
Ind
p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. --
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-602-416-977-0
1. Judul I. HEALTH STATISTICS
II. HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Buku ini diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id
Website: http://www.kemkes.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah
drg. Oscar Primadi, MPH
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua
Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor
Boga Hardhana, S.Si, MM
Farida Sibuea, SKM, MSc.PH
Winne Widiantini, SKM, MKM

Anggota
dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Wardah, SKM, MKM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; Intan Suryantisa Indah, SKM, MKM; dr. Ellysa, M.Epid; Eka Satriani Sakti, SKM; Tri Wahyudi, S.Si; Dian Mulya Sari, S.Ds; Hira Ahmad Habibi, S.Sn; Hellena Maslinda; Prillia Syafira Liani, SKM; Rizqitha Maula, Amd.

Kontributor
Kementerian Dalam Negeri; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Kepegawaian; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional; Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Direktorat Kesehatan Keluarga; Direktorat Kesehatan Lingkungan; Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga; Direktorat Gizi Masyarakat; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KEMENKES RI

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2019 dan semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2019 ini.

Profil Kesehatan Indonesia ini disusun berdasarkan data rutin maupun data survei dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi yang disajikan meliputi data dan narasi tentang situasi demografi, fasilitas pelayanan kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, serta pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Profil ini menyajikan Gambaran nasional, perbandingan antar provinsi, tren dari tahun ke tahun dan narasi lainnya yang dipandang perlu disampaikan.

Buku Profil Kesehatan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* yang dapat diunduh melalui *website* www.kemkes.go.id. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada kami sebagai masukan untuk penyempurnaan profil kesehatan yang akan datang.

Jakarta, Juni 2020
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan

drg. Oscar Primadi, MPH

KEMENKES RI

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN RI

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Profil Kesehatan Indonesia yang terbit setiap tahun sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif diharapkan dapat menyediakan data dan informasi terkini sekaligus menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun. Profil Kesehatan ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Semoga terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2019 ini dapat memberikan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab bagi jajaran pemerintah maupun masyarakat.

Akhir kata saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Profil Kesehatan 2019 ini. Para pengelola data baik di pusat maupun daerah diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas data dari ketepatan waktu, validitas, kelengkapan dan konsistensi data, termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan sumber data utama.

Jakarta, Juli 2020
Menteri Kesehatan RI

Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI

KEMENKES RI

DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015 – 2019 (dalam Jutaan)	1
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	2
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2019	3
GAMBAR 1.4	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2019	3
GAMBAR 1.5	PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km2) DI INDONESIA TAHUN 2019	4
GAMBAR 1.6	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019 (dalam persen)	6
GAMBAR 1.7	GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	7
GAMBAR 1.8	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	7
GAMBAR 1.9	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2019	9
GAMBAR 1.10	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI TAHUN 2019	11
GAMBAR 1.11	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2015 – 2019 (dalam tahun)	12
GAMBAR 1.12	ANGKA MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 (dalam persen)	13
GAMBAR 1.13	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2016 – 2019	14
GAMBAR 1.14	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2016 – 2019	14
GAMBAR 1.15	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2019	15
GAMBAR 1.16	IPM INDONESIA TAHUN 2004 – 2019	16
GAMBAR 1.17	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	17

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	22
GAMBAR 2.2	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	22
GAMBAR 2.3	PETA RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	23
GAMBAR 2.4	PERSENTASE AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019	25
GAMBAR 2.5	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	25
GAMBAR 2.6	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DASAR DI INDONESIA TAHUN 2019	27

KEMENKES RI

GAMBAR 2.7	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2019	28
GAMBAR 2.8	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA BAGI ANAK SEKOLAH DASAR (SD) DI INDONESIA TAHUN 2019	28
GAMBAR 2.9	TREN JUMLAH PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2015-2019	30
GAMBAR 2.10	JUMLAH DAN PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2019	31
GAMBAR 2.11	PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES DI INDONESIA TAHUN 2019	31
GAMBAR 2.12	JUMLAH KLINIK PRATAMA PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	33
GAMBAR 2.13	JUMLAH KLINIK UTAMA PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	34
GAMBAR 2.14	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PENYELENGGARA DAN PROVINSI TAHUN 2019	35
GAMBAR 2.15	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	35
GAMBAR 2.16	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	36
GAMBAR 2.17	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	37
GAMBAR 2.18	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2019	38
GAMBAR 2.19	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2019	39
GAMBAR 2.20	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 - 2019	40
GAMBAR 2.21	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	40
GAMBAR 2.22	JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	41
GAMBAR 2.23	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	42
GAMBAR 2.24	PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2019	43
GAMBAR 2.25	PERSENTASE POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	44
GAMBAR 2.26	PERSENTASE POSBINDU PTM PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	45

KEMENKES RI

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1	REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	50
GAMBAR 3.2	JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2019	50
GAMBAR 3.3	JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019	51
GAMBAR 3.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	52
GAMBAR 3.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2019	53
GAMBAR 3.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2019	54
GAMBAR 3.7	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2018	55
GAMBAR 3.8	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019	56
GAMBAR 3.9	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA	57
GAMBAR 3.10	KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)	58
GAMBAR 3.11	PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN (DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PERAWAT, DAN BIDAN) DI DAERAH 3T TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2019	58
GAMBAR 3.12	JUMLAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2019	59
GAMBAR 3.13	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	60
GAMBAR 3.14	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	61
GAMBAR 3.15	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	62
GAMBAR 3.16	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	62
GAMBAR 3.17	JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2019	64
GAMBAR 3.18	PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2019	65
GAMBAR 3.19	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT HINGGA TAHUN 2019	66
GAMBAR 3.20	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU HINGGA TAHUN 2019	67
GAMBAR 3.21	JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2019	68
GAMBAR 3.22	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2019	70
GAMBAR 3.23	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	72
GAMBAR 3.24	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III RPL MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	73

KEMENKES RI

GAMBAR 3.25	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019	74
GAMBAR 3.26	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	75
GAMBAR 3.27	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2019	76

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2019	79
GAMBAR 4.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2019	80
GAMBAR 4.3	PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2019	81
GAMBAR 4.4	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2019	81
GAMBAR 4.5	REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	82
GAMBAR 4.6	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	83
GAMBAR 4.7	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	84
GAMBAR 4.8	TABELAN SKEMA PROPORSI DAN TOTAL PEMBIAYAAN BELANJA KESEHATAN TAHUN 2010-2017	87
GAMBAR 4.9	PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2019	88
GAMBAR 4.10	PERKEMBANGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2019	89
GAMBAR 4.11	ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2019	89
GAMBAR 4.12	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014-2019	90
GAMBAR 4.13	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS	90
GAMBAR 4.14	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.15	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.16	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.17	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019	91
GAMBAR 4.18	PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	92

KEMENKES RI

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1	ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991 – 2015	98
GAMBAR 5.2	TARGET PENURUNAN AKI DI INDONESIA	98
GAMBAR 5.3	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2006 – 2019	100
GAMBAR 5.4	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	100
GAMBAR 5.5	CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA WANITA USIA SUBUR DI INDONESIA TAHUN 2019	102
GAMBAR 5.6	CAKUPAN IMUNISASI Td2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2019	102
GAMBAR 5.7	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	104
GAMBAR 5.8	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	105
GAMBAR 5.9	PROPORSI TEMPAT PERSALINAN YANG DIMANFAATKAN OLEH PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018	106
GAMBAR 5.10	PROPORSI PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI PADA PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018	107
GAMBAR 5.11	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2019	108
GAMBAR 5.12	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	108
GAMBAR 5.13	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	110
GAMBAR 5.14	PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	111
GAMBAR 5.15	TREN PEMAKAIAN KONTRASEPSI PADA WANITA KAWIN SDKI 1991-2017	112
GAMBAR 5.16	CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2019	113
GAMBAR 5.17	CAKUPAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN TAHUN 2019	114
GAMBAR 5.18	PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA TAHUN 2019	114
GAMBAR 5.19	CAKUPAN PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	115
GAMBAR 5.20	PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	116
GAMBAR 5.21	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2019	117

KEMENKES RI

GAMBAR 5.22	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	118
GAMBAR 5.23	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	119
GAMBAR 5.24	TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA TAHUN 1991 – 2017	120
GAMBAR 5.25	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	120
GAMBAR 5.26	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2019	121
GAMBAR 5.27	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2019	121
GAMBAR 5.28	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2019	122
GAMBAR 5.29	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) TAHUN 2009-2019	123
GAMBAR 5.30	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	124
GAMBAR 5.31	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2011-2019	125
GAMBAR 5.32	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	126
GAMBAR 5.33	CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2009-2019	127
GAMBAR 5.34	AKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	177
GAMBAR 5.35	ANGKA DROP OUT IMUNISASI DPT/HB/HIB1-CAMPAK PADA BAYI TAHUN 2009-2019	128
GAMBAR 5.36	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	129
GAMBAR 5.37	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2015-2019	130
GAMBAR 5.38	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	130
GAMBAR 5.39	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB (4) PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	131
GAMBAR 5.40	CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	133
GAMBAR 5.41	CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	134
GAMBAR 5.42	CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	135
GAMBAR 5.43	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	136
GAMBAR 5.44	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	137
GAMBAR 5.45	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	138

KEMENKES RI

GAMBAR 5.46	PERSENTASE PENDEK DAN SANGAT PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	139
GAMBAR 5.47	PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	140
GAMBAR 5.48	PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018	141
GAMBAR 5.49	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN SANGAT KURUS DAN KURUS PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2018	142
GAMBAR 5.50	GRAFIK PROPORSI STUNTING (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI,SSGBI 2019	142
GAMBAR 5.51	CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	144
GAMBAR 5.52	CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	145
GAMBAR 5.53	PERSENTASE RERATA BALITA UMUR 6-59 BULAN DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	146
GAMBAR 5.54	CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	147
GAMBAR 5.55	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	148
GAMBAR 5.56	CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	149
GAMBAR 5.57	CAKUPAN BALITA KURUS MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	150

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1	PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	154
GAMBAR 6.2	*CASE DETECTION RATE (CDR)* TAHUN 2009-2019	155
GAMBAR 6.3	*CASE DETECTION RATE (CDR)* MENURUT PROVINSI 2019	155
GAMBAR 6.4	ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019	156
GAMBAR 6.5	ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	157
GAMBAR 6.6	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2009-2019	158
GAMBAR 6.7	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	158
GAMBAR 6.8	JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2009-2019	159

KEMENKES RI

GAMBAR 6.9	PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2019	160
GAMBAR 6.10	PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	160
GAMBAR 6.11	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2009-2019	161
GAMBAR 6.12	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	162
GAMBAR 6.13	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2019	163
GAMBAR 6.14	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	164
GAMBAR 6.15	PREVALENSI DIARE PADA BALITA BERDASARKAN DIAGNOSIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2018	165
GAMBAR 6.16	CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	166
GAMBAR 6.17	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2011-2019	167
GAMBAR 6.18	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI Indonesia TAHUN 2018 DAN 2019	168
GAMBAR 6.19	ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2019	169
GAMBAR 6.20	ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2019	169
GAMBAR 6.21	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2012-2019	170
GAMBAR 6.22	DISTRIBUSI KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI TAHUN 2019	171
GAMBAR 6.23	PROPORSI KASUS TETANUS NENONATORUM MENURUT FAKTOR RISIKO TAHUN 2019	172
GAMBAR 6.24	SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2018 DAN 2019	173
GAMBAR 6.25	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN DI INDONESIA TAHUN 2019	174
GAMBAR 6.26	PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA TAHUN 2019	174
GAMBAR 6.27	PROPORSI SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	175
GAMBAR 6.28	FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	176
GAMBAR 6.29	SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	177

KEMENKES RI

GAMBAR 6.30	PENCAPAIAN *NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK UMUR < 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 DAN 2019	179
GAMBAR 6.31	CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2019	180
GAMBAR 6.32	*NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2019	181
GAMBAR 6.33	PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 DAN 2019	182
GAMBAR 6.34	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT *AFP* MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	183
GAMBAR 6.35	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2019	184
GAMBAR 6.36	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2019	185
GAMBAR 6.37	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2019	186
GAMBAR 6.38	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2019	186
GAMBAR 6.39	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	187
GAMBAR 6.40	JUMLAH PROVINSI TERKENA KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2019	188
GAMBAR 6.41	INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2010-2018	189
GAMBAR 6.42	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	190
GAMBAR 6.43	*CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	191
GAMBAR 6.44	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2010-2019	192
GAMBAR 6.45	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 49 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2019	193
GAMBAR 6.46	ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2010-2019	193
GAMBAR 6.47	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2019	194
GAMBAR 6.48	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2010-2019	195
GAMBAR 6.49	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2019	196
GAMBAR 6.50	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	196
GAMBAR 6.51	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	197
GAMBAR 6.52	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN POPM FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	198
GAMBAR 6.53	CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2010-2019	198

KEMENKES RI

GAMBAR 6.54	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	199
GAMBAR 6.55	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2019	200
GAMBAR 6.56	ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE* /API) PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019	201
GAMBAR 6.57	ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE*/API) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	201
GAMBAR 6.58	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN *API*<1 PER 1.000 PENDUDUK ATAU BEBAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2019	202
GAMBAR 6.59	PERSENTASE PENGOBATAN *ACT ARTEMICIN-BASED COMBINATION THERAPY (ART)* MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	203
GAMBAR 6.60	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2019	204
GAMBAR 6.61	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2010 – 2019	205
GAMBAR 6.62	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2019	205
GAMBAR 6.63	CASE FATALITY RATE LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2019	206
GAMBAR 6.64	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019	208
GAMBAR 6.65	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019	209
GAMBAR 6.66	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN KTR MINIMAL PADA 50% SEKOLAH MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019	210
GAMBAR 6.67	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM MELALUI METODE INSPEKSI VISUAL ASAM (IVA) DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	211
GAMBAR 6.68	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 DI INDONESIA TAHUN 2019	212
GAMBAR 6.69	PERSENTASE PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2019	213
GAMBAR 6.70	PERSENTASE PENDERITA DIABETES MELLITUS MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	214
GAMBAR 6.71	JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI INDONESIA TAHUN 2019	215
GAMBAR 6.72	JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019	216
GAMBAR 6.73	PERSENTASE IPWL AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA	217
GAMBAR 6.74	JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA TAHUN 2011-2019	217
GAMBAR 6.75	JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS LAYANAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	218

KEMENKES RI

GAMBAR 6.76	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAN JIWA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	219
GAMBAR 6.77	CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2019	222
GAMBAR 6.78	JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (SELAMA OPERASIONAL HAJI DI ARAB SAUDI) TAHUN 2019	223
GAMBAR 6.79	JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019	223
GAMBAR 6.80	PERSENTASE JAMAAH HAJI MENURUT STATUS RISTI	224
GAMBAR 6.81	PERSENTASE JAMAAH HAJI RISTI MENURUT EMBARKASI TAHUN 2019	224
GAMBAR 6.82	PROPORSI 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN JAMAAH HAJI TAHUN 2019	225
GAMBAR 6.83	PROPORSI JEMAAH HAJI WAFAT TAHUN 2014-2019	226

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019	231
GAMBAR 7.2	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK TAHUN 2019	232
GAMBAR 7.3	PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2019	233
GAMBAR 7.4	PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2019	234
GAMBAR 7.5	CAPAIAN DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2015-2019	236
GAMBAR 7.6	PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019	237
GAMBAR 7.7	PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2019	238
GAMBAR 7.8	PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2019	239
GAMBAR 7.9	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT TAHUN 2019	241
GAMBAR 7.10	PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2019	243
GAMBAR 7.11	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019	244
GAMBAR 7.12	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS TAHUN 2019	245
GAMBAR 7.13	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN MINIMAL 5 TEMA KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2019	246

KEMENKES RI

DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019	5
TABEL 1.2	PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2019	8
TABEL 1.3	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2015-2019 (juta orang)	10

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

TABEL 2.1	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAANDI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	37

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2010-2017	86

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2019	188

KEMENKES RI

DAFTAR ISI

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Kata Sambutan iii
Daftar Gambar iv
Daftar Tabel xv
Daftar Isi xvi
Daftar Lampiran xxi

BAB I. DEMOGRAFI 1
A. KEADAAN PENDUDUK 1
B. KEADAAN EKONOMI 6
C. KEADAAN PENDIDIKAN 11

BAB II FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM 21
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 21
1. Akreditasi Puskesmas 24
2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap 25
3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga 26
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional 29
5. Ketersediaan Obat dan Vaksin 32
B. KLINIK, UTD, DAN LABORATORIUM KESEHATAN 37
C. LABORATORIUM 35
D. RUMAH SAKIT 36
1. Jenis Rumah Sakit 36
2. Tipe Rumah Sakit 38
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 39

KEMENKES RI

E. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 41
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang dan Alat Kefarmasian 41
2. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar 42
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 39
F. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 43

BAB III SDM KESEHATAN 49
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN 49
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas 51
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit 56
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) 57
B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN 59
C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN 63
1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT) 63
2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus 64
3. Penugasan KhususTenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat Tim) 65
4. Penugasan KhususTenaga Kesehatan Berbasis Individu (Nusantara Sehat Individu) 66
5. Program Internsip Dokter 68
6. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) 69
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN 70
1. Jumlah Lulusan Poltekkes 72
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi 73

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN 79
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 79
B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2018 81
C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN 81
1. Total Belanja Kesehatan/*Total Health Expenditure* (THE) 85
2. Jaminan Kesehatan 87
3. Dana Desa 92

KEMENKES RI

BAB V KESEHATAN KELUARGA 97

A. KESEHATAN IBU 97

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 99

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil 101

3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil 103

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 104

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 107

6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 109

7. Pelayanan Kontrasepsi 111

8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil 116

B. KESEHATAN ANAK 119

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal 122

2. Imunisasi 124

3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah 132

C. GIZI 135

1. Status Gizi Balita 135

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi 143

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT 153

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 153

1. Tuberkulosis 153

2. HIV 159

3. Pneumonia 161

4. Hepatitis 163

5. Diare 164

6. Kusta 167

KEMENKES RI

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) 170
1. Tetanus Neonatrum 170
2. Campak 172
3. Difteri 176
4. Polio dan *AFP (Acute Floccid Paralysis*/Lumpuh Layu Akut) 178
C. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA 184
D. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS 189
1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 189
2. Chikungunya 194
3. Filariasis 195
4. Malaria 199
5. Rabies 203
6. Leptospirosis 204
E. PENYAKIT TIDAK MENULAR 206
1. Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas 207
2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) 208
3. Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau 209
4. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 210
5. Pelayanan Skrining Usia Produktif 212
6. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 213
F. KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 215
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 216
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa 218
3. Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang Sederajat 220

KEMENKES RI

G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI 221
1. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 222
2. Kondisi Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi 223
3. Pola Morbiditas dan Mortalitas Jamaah Haji 224

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN 229
A. AIR MINUM 229
B. AKSES SANITASI LAYAK 232
C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) 234
D. TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN 237
E. TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) 239
F. TATANAN KAWASAN SEHAT 240
G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 242
H. PEMENUHAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN 243
I. KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 244
J. GERAKAN MASYARAKAT SEHAT 246
Daftar Pustaka 251
Gambar

KEMENKES RI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

LAMPIRAN 1	LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.a	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.b	ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), DAN JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.c	ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 2.d	ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.a	PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.b	ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF, DAN USIA NON PRODUKTIF MENURUT DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.c	JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2001 - 2019
LAMPIRAN 3.d	GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.e	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.f	INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2019
LAMPIRAN 3.g	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS TIPE DAERAH MARET 2019
LAMPIRAN 3.h	RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.i	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 3.j	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.k	ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015 - 2019

KEMENKES RI

LAMPIRAN 3.l ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 3.m ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.n ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 3.o ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019
LAMPIRAN 3.p ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 3.q INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN 3.r INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

LAMPIRAN 4.a JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 4.b JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2015 - 2019
LAMPIRAN 4.c RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.d AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.e JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019
LAMPIRAN 4.f JUMLAH PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.g JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.h JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.i AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.j PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.k JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.l JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 4.m JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 8.a JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 8.b JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019
LAMPIRAN 9.a PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

LAMPIRAN 9.b JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 9.c JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 9.d PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA (IFK) YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR TRIWULAN IV TAHUN 2019
LAMPIRAN 10 JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

BAB III. SDM KESEHATAN

LAMPIRAN 11.a JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.b JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.c JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.d JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.e KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.f JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR* MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.g JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.h JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017- 2019
LAMPIRAN 11.i JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM BATCH XII-XIV (PERIODE I-III TAHUN 2019)
LAMPIRAN 11.j JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XII SAMPAI DENGAN BATCH XIV/ PERIODE I SAMPAI DENGAN III TAHUN 2019) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.k JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-X TAHUN 2019 (BATCH XIII s/d XX)
LAMPIRAN 11.l JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-X TAHUN 2019 / BATCH XIII s/d XX) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.m JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSHIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 11.n JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 12.a JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 12.b JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN

KEMENKES RI

LAMPIRAN 12.c MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 12.d JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2019
LAMPIRAN 13.a JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 13.b JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 13.c JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 14.a JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 14.b JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 14.c JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 15.a JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 15.b JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 15.c JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.a JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.b JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.c JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.d JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.e JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.f JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.g JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.h JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 16.i JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

LAMPIRAN 17.a CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2019
LAMPIRAN 17.b FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 18 PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 19.a ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

KEMENKES RI

LAMPIRAN 19.b ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2019
LAMPIRAN 19.c ALOKASI DAN REALISASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN 19.d ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN 19.e ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN 19.f ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

BAB V KESEHATAN KELUARGA

LAMPIRAN 20 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 21 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 22 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 23.a CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 23.b PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 24 CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 25 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 26 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 27.a JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 27.b PERSENTASE REMAJA PUTRI MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 27.c PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 28.a PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 28.b JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 29 CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 30.a JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 30.b PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 30.c PERSENTASE IBU HAMIL HBsAg REAKTIF BERDASARKAN PEMERIKSAAN DARAH DENGAN MENGGUNAKAN TEST CEPAT HBsAg MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 31 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

KEMENKES RI

LAMPIRAN 32	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 33	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 34	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 35	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 37	CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 38	CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0-7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 39.a	CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-HiB 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 39.b	*DROP OUT RATE* CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 39.c	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 40.a	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 40.b	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 41	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 43	JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 44.a	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.b	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.c	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.d	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.e	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 44.f	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2018
LAMPIRAN 45	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
LAMPIRAN 48	PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF TAHUN 2019
LAMPIRAN 49	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 50	PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

LAMPIRAN 51.a	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 51.b	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 51.c	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 52	ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 53.a	PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 53.b	BALITA BATUK/ KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 54	JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.a	JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 55.b	JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN , KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.c	JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN , KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.d	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2019
LAMPIRAN 55.e	JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019
LAMPIRAN 55.f	JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 56	KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 57	KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 58	KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 59	JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 59.b	PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 60	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 61	KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.a	JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

LAMPIRAN 62.b	JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.c	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 20
LAMPIRAN 62.d	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.e	FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA SUSPEK KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 62.f	DISTRIBUSI KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 63	KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 63.b	JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 63.c	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHU 2019
LAMPIRAN 63.d	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 201
LAMPIRAN 64.f	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJ SEBELUM KEBERANGKATAN MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2018-2019
LAMPIRAN 64.g	PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN KLOTER HAJI TAHUN 2019
LAMPIRAN 64.h	JUMLAH JEMAAH HAJI WAFAT DI ARAB SAUDI BERDASARKAN PENYEBAB PENYAKIT TAHUN 2019
LAMPIRAN 64.i	JUMLAH DAN PROPORSI JEMAAH HAJI WAFAT TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN 64.j	JUMLAH JEMAAH HAJI YANG BERANGKAT (SETELAH OPERASIONAL HAJI) TAHUN 2019
LAMPIRAN 65.a	KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
LAMPIRAN 65.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019
LAMPIRAN 66.a	KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 66.b	JUMLAH KAB/KOTA DENGAN API<1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 66.c	ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2016-2019
LAMPIRAN 67.a	PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019
LAMPIRAN 67.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI < 1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINAS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 67.c	SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 67.d	JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE* (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 67.e	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN VEKTOR TERPADU (PVT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

LAMPIRAN 69 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.a REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.b JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.c JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.d JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KTR DI 50% SEKOLAH MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019
LAMPIRAN 70.e PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF TAHUN 2019
LAMPIRAN 71.a JUMLAH DAN PERSENTASE PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAH JIWA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 71.b JUMLAH KABUPATEN/KOTA MENYELENGGARAKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA DI INSTITUSI PENERIMA WAJB LAPOR (IPWL) DAN JUMLAH IPWL AKTIF

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN 72.a PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 72.b PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019
LAMPIRAN 73 JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 74 DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PER PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 75 PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.a TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.b KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.c KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.d PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.e KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS TAHUN 2019
LAMPIRAN 76.f JUMLAH KABUPATEN/KOTA* YANG MELAKSANAKAN MINIMAL 5 TEMA KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2017-2019

KEMENKES RI

Bab I
DEMOGRAFI

KEMENKES RI

KEMENKES RI

DEMOGRAFI

Indonesia terletak di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), diantara Benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 16.056 pulau, luas daratan sebesar 1.916.862,2 km^2 dan luas perairan sebesar 3.257.483 km^2 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.953 desa (Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 268.074.565 jiwa yang terdiri atas 133.136.131 jiwa penduduk laki-laki dan 133.416.946 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin. Penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2015 - 2016 dari 3,34 juta per tahun menjadi 3,24 juta per tahun (Lihat Gambar 1.1).

GAMBAR 1.1
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2015 – 2019 (dalam Jutaan)

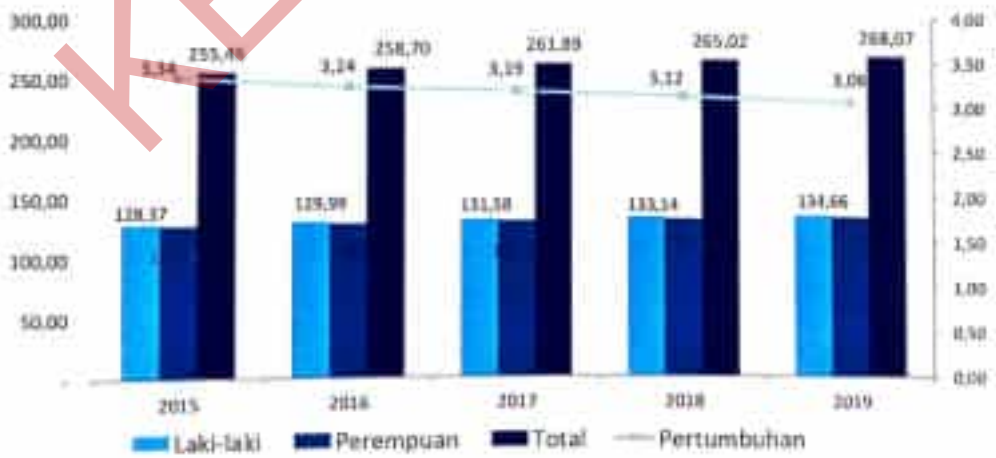

Sumber: Kepmenkes Nomor 117 Tahun 2017, Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI diolah dari Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010 (BPS); Hasil Estimasi Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019

KEMENKES RI

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat (49.316.712 jiwa), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kalimantan Utara (742.245 jiwa). Secara rinci data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

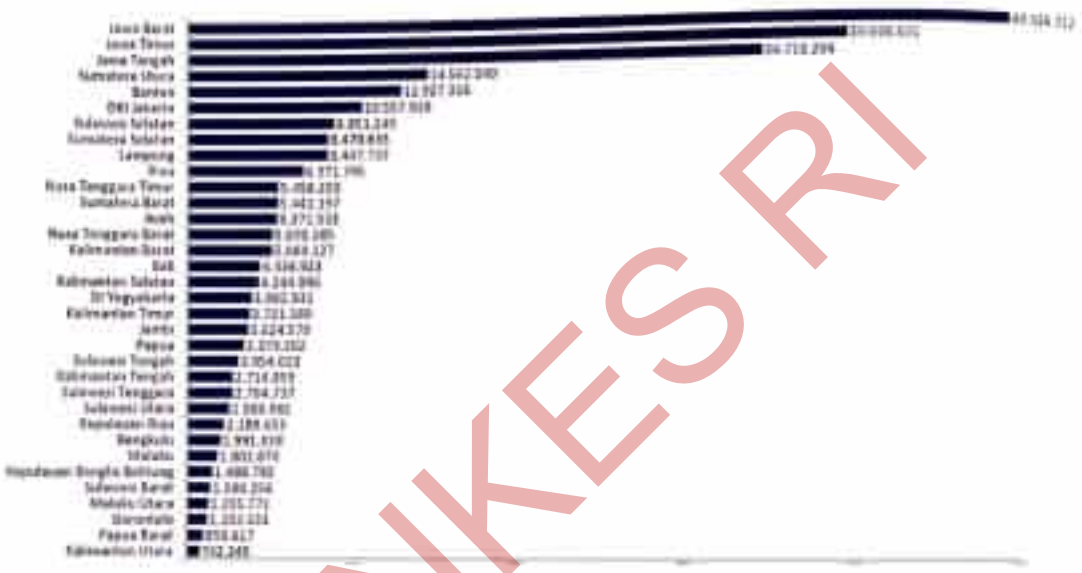

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019, Hasil Estimasi Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

Pulau Jawa (56,58%) merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Daerah timur yaitu Pulau Maluku (1,13%) dan Papua (1,60%) merupakan pulau dengan populasi penduduk paling sedikit. Data mengenai persebaran populasi penduduk beberapa pulau besar di Indonesia dapat dilihat secara rinci pada Gambar 1.3.

KEMENKES RI

GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2019

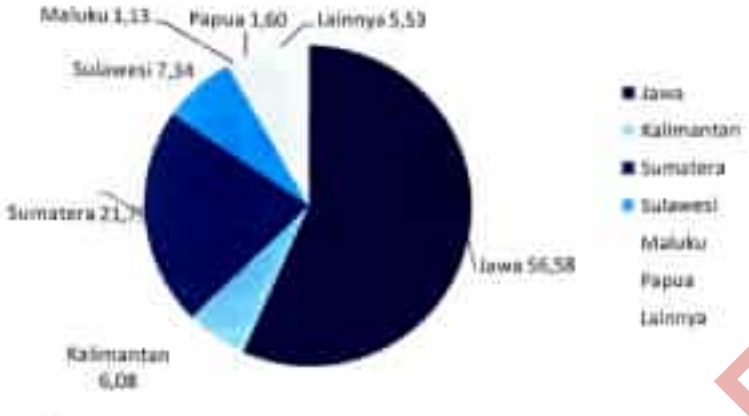

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019, Hasil Estimasi Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun sebuah piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan gambaran yang menyajikan komposisi data kependudukan suatu wilayah atau negara (kelompok umur dan jenis kelamin) dalam bentuk grafik batang yang digambarkan berlawanan arah dengan posisi horizontal. Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

GAMBAR 1.4
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2019

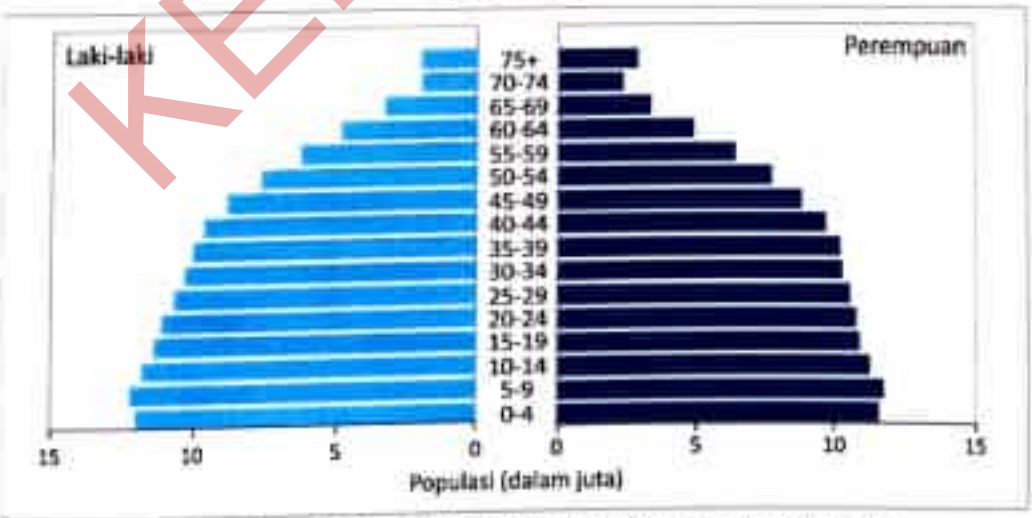

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2018, Hasil Estimasi Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

KEMENKES RI

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Grafik pada usia muda lebih lebar dibandingkan bagian di atasnya membuktikan bahwa penduduk Indonesia memiliki struktur muda. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek bahwa menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menujukkan tingkat persebaran penduduk suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2019 berdasarkan hasil estimasi sebesar 139,85 jiwa per km2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

GAMBAR 1.5
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km²) DI INDONESIA TAHUN 2019

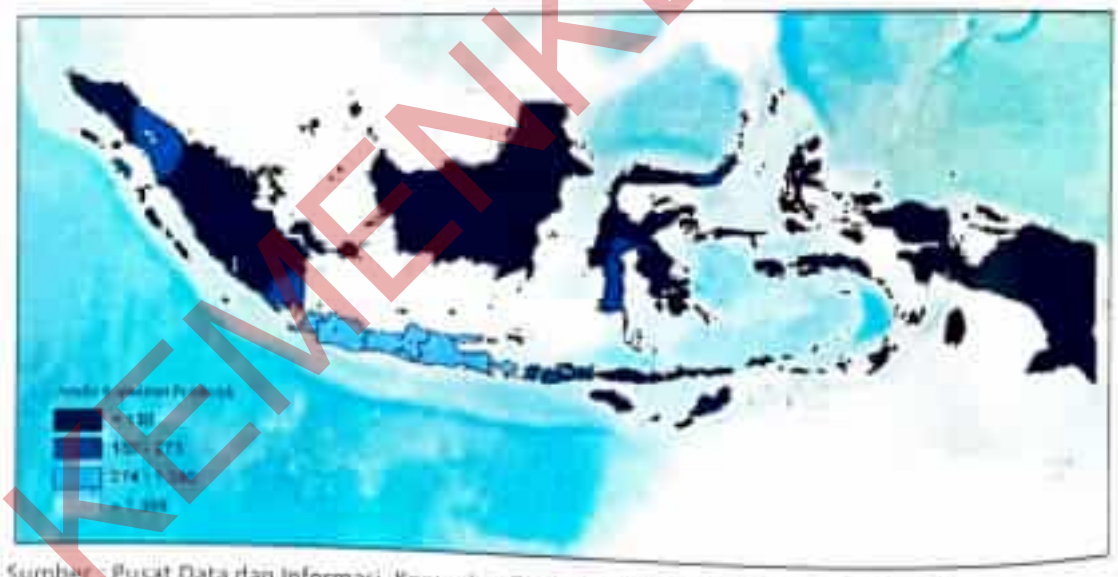

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2018, Hasil Estimasi Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010

Gambar 1.5 memperlihatkan kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 15.900,08 jiwa per km². Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Papua Barat sebesar 9,32 jiwa per km² (Lampiran 1).

Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) mensosialisasikan program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

KEMENKES RI

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebesar 47,82. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kuraang lebih 48 orang yang tidak produktif. Angka Beban Ketergantungan per provinsi secara detail dapat dilihat pada lampiran 3.b.

Tabel 1.1 memperlihatkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2019 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.b, 2.c, 2.d, dan 3.b.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Sasaran Program	Kelompok Umur/Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Lahir Hidup	-	-	-	4.778.621
2	Bayi	0 Tahun	2.396.105	2.295.398	4.691.503
3	Batita (di Bawah Tiga Tahun)	0 – 2 Tahun	7.202.686	6.908.164	14.110.850
4	Anak Balita	1 – 4 Tahun	9.648.742	9.264.678	18.913.420
5	Balita (di Bawah Lima Tahun)	0 – 4 Tahun	12.044.847	11.560.076	23.604.923
6	Pra Sekolah	5 – 6 Tahun	4.879.979	4.693.374	9.573.353
7	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 Tahun	2.451.873	2.360.183	4.812.056
8	Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 Tahun	14.501.206	13.837.844	28.339.050
9	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	36.103.790	34.532.093	70.635.883
10	Penduduk Usia Produktif	15 – 64 Tahun	91.108.081	90.246.841	181.354.922
11	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 Tahun	7.445.748	8.638.012	16.083.760
12	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	12.340.850	13.561.139	25.901.989
13	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 Tahun	4.108.217	5.243.716	9.351.933
14	Wanita Usia Subur (WUS)	15 – 49 Tahun	-	71.149.767	71.149.767
15	Wanita Usia Subur Imunisasi	15 – 39 Tahun	-	52.644.435	52.644.435
16	Ibu Hamil	1,1 X lahir hidup	-	5.256.483	5.256.483
17	Ibu Bersalin/Nifas	1,05 X lahir hidup	-	5.017.552	5.017.552

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019, Hasil Estimasi Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 (Diolah dari Sensus Penduduk 2010)

KEMENKES RI

B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US$4 174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kondisi perekonomian global serta haga komoditas yang berfluktuasi.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.

GAMBAR 1.6
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019
(dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Kemiskinan dalam arti luas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Menurut BPS, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan non makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

KEMENKES RI

konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Peningkatan garis kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2019 (Gambar 1.7). Batas kemiskinan atau tingkat pengeluaran per kapita per bulan tahun 2019 sebesar Rp425.250,00.

GAMBAR 1.7
GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

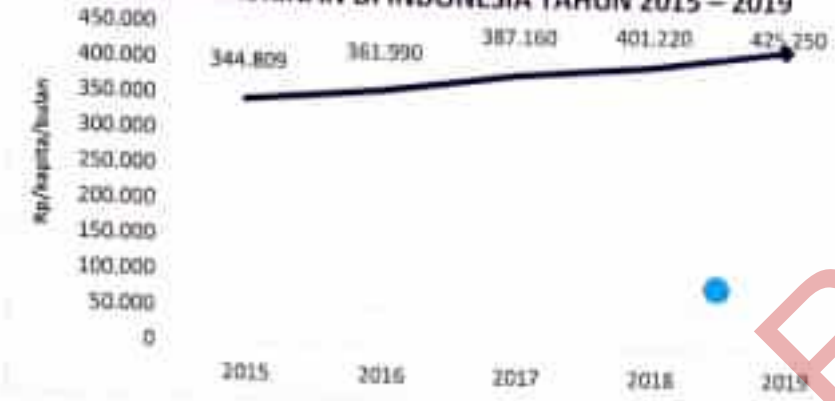

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang (9,41 persen), turun dibanding Maret 2018 yang sebesar 25,95 juta orang (9,82 persen). Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,15 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,65 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66% menurun menjadi 9,41% pada Maret 2019. Hal ini dikarenakan ada peningkatan upah riil buruh tani dan bangunan, inflasi yang stabil dalam periode September 2018-Maret 2019, dan adanya pelaksanaan program bantuan pangan non tunai. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat di lihat pada lampiran 3.c dan 3.d.

GAMBAR 1.8
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

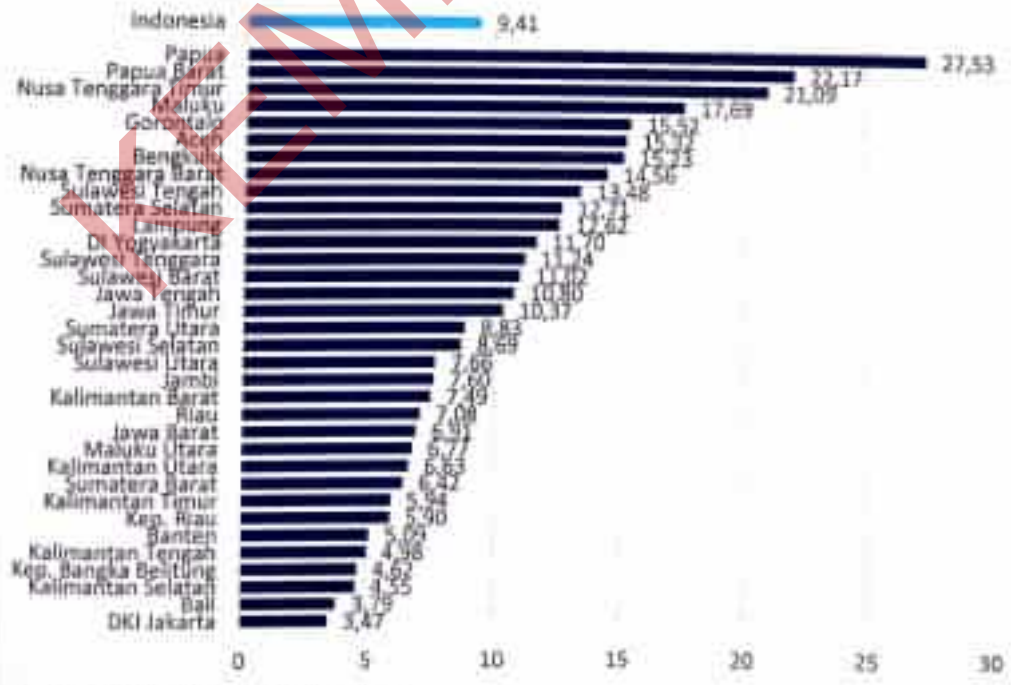

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

KEMENKES RI

Dari gambar 1.8, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, persentase kemiskinan terendah ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,47%, sementara yang tertinggi ada di Provinsi Papua yang mencapai angka sebesar 27,53%.

TABEL 1.2
PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2019

No	Kelompok Pulau	2016		2017		2018		2019	
		Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%	Jumlah (ribu)	%
1	Sumatera	6.214,90	22,4	5969,11	22,5	5.919,3	23,1	5.851,28	23,27
2	Jawa	14.832,80	53,4	13936,46	52,4	13190,22	51,4	12.723,12	50,60
3	Kalimantan	970,2	3,5	988,48	3,7	973,17	3,8	974,18	3,87
4	Bali dan Nusa Tenggara	2.111,60	7,6	2059,34	7,7	2038,07	7,9	2.046,13	8,14
5	Sulawesi	2.088,20	7,5	2107,63	7,9	2025,16	7,9	2.009,87	7,99
6	Maluku dan Papua	1.546,70	5,6	1521,98	5,7	1528,66	6,0	1.540,15	6,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel 1.2, setengah dari total penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa (50,60%). Walaupun pembangunan di Pulau Jawa merupakan yang paling cepat, namun proporsi penduduk paling besar berada di Pulau Jawa (56,58%) seperti terlihat pada gambar 1.3.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini/ Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan (pemerataan sempurna), sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna (ketimpangan sempurna). Pada tahun 2019, nilai Indeks Gini Indonesia adalah 0,38 dimana cenderung tetap bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian mengenai Indeks Gini secara detail dapat dilihat pada lampiran 3.f.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

KEMENKES RI

GAMBAR 1.9
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN
TAHUN 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2019, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan (49,14%) lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk non makanan (50,86%). Dari gambar 1.9 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (25,49%), makanan dan minuman jadi (17,26%) dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (12,40%).

Berdasarkan konsep dari *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*, penduduk terbagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu kelompok Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.3. Jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2016 sebanyak 127,67 juta orang menjadi 136,18 juta orang pada periode Februari 2019. Begitu pula dengan jumlah penduduk yang bekerja, meningkat dari 118,41 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 126,52 juta orang pada Agustus 2019. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

KEMENKES RI

mengalami kenaikan, dari 66,34% pada Agustus 2016 menjadi 67, 49% pada Agustus 2019. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Jumlah pengangguran terbuka nilainya fluktuatif tiap periode dan tahunnya. Pada periode Agustus 2016, jumlah pengangguran terbuka adalah 7,03 juta orang, meningkat menjadi 7,04 juta orang di periode Agustus 2017, menurun menjadi 7,00 juta orang di periode Agustus 2018, dan kembali meningkat menjadi 7,05 juta orang di periode Agustus 2019.

TABEL 1.3
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2015-2019
(juta orang)

Angkatan Kerja	2016		2017		2018		2019	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	127,67	125,44	131,54	128,06	133,94	131,01	136,18	133,56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,06	66,34	69,02	66,67	69,2	67,26	69,32	67,49
Jumlah Penduduk yang Bekerja	120,65	118,41	124,54	121,02	127,07	124,01	129,37	126,52
Jumlah Pengangguran Terbuka	7,02	7,03	7,01	7,04	6,87	7,00	6,82	7,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,61	5,33	5,50	5,13	5,34	5,01	5,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

KEMENKES RI

GAMBAR 1.10
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI
TAHUN 2019

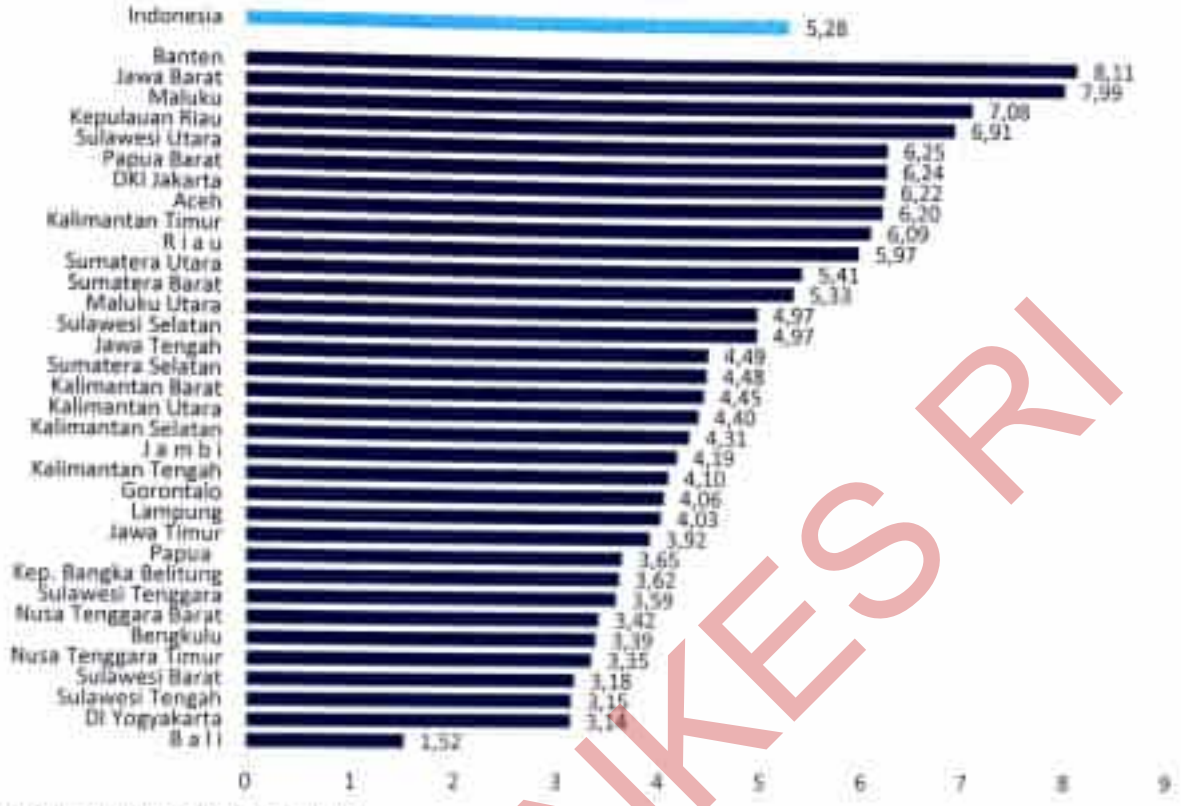

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2016 sebesar 5,33% mengalami penurunan di periode Agustus 2019 menjadi 5,28%. Padahal, jumlah pengangguran terbuka naik 0,02 juta orang pada periode Agustus 2016 ke Agustus 2019 tapi dibarengi juga dengan jumlah angkatan kerja yang naik tinggi sekitar 8 juta orang pada periode dan tahun yang sama. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja, atau perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang. Pendidikan bermutu sebagai hasil upaya tersebut akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

KEMENKES RI

GAMBAR 1.11
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
TAHUN 2015 – 2019 (dalam tahun)

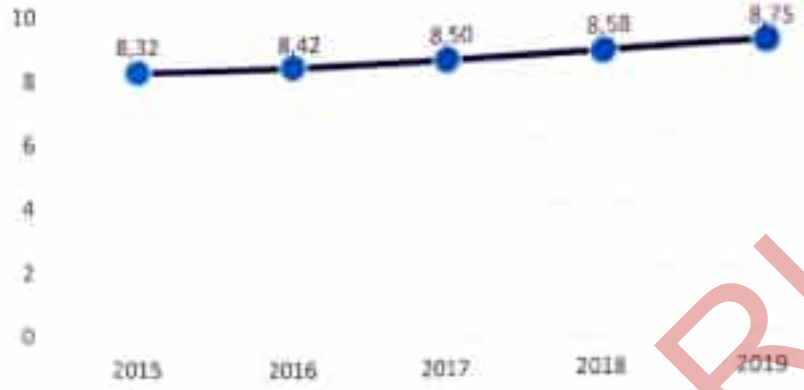

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari gambar 1.11, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berumur 15 tahun ke atas mengalami peningkatan walaupun belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan terlihat dari gambar yaitu RLS pada tahun 2015 sebesar 8,32 tahun menjadi 8,75 tahun pada tahun 2019.

Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki (9,08 tahun) cenderung lebih lama bersekolah dibandingkan perempuan (8,42 tahun). Rata-rata Lama Sekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,85 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 11,11 tahun. Sebanyak 16 (enam belas) provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai Rata-rata Lama Sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.j.

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Berdasarkan jenis kelamin, AMH laki-laki (97,48 %) lebih tinggi dari perempuan (94,33 %). Secara rinci dan detail, AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.k. Cakupan AMH per provinsi dapat dilihat seperti Gambar 1.12.

KEMENKES RI

GAMBAR 1.12

ANGKA MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 (dalam persen)

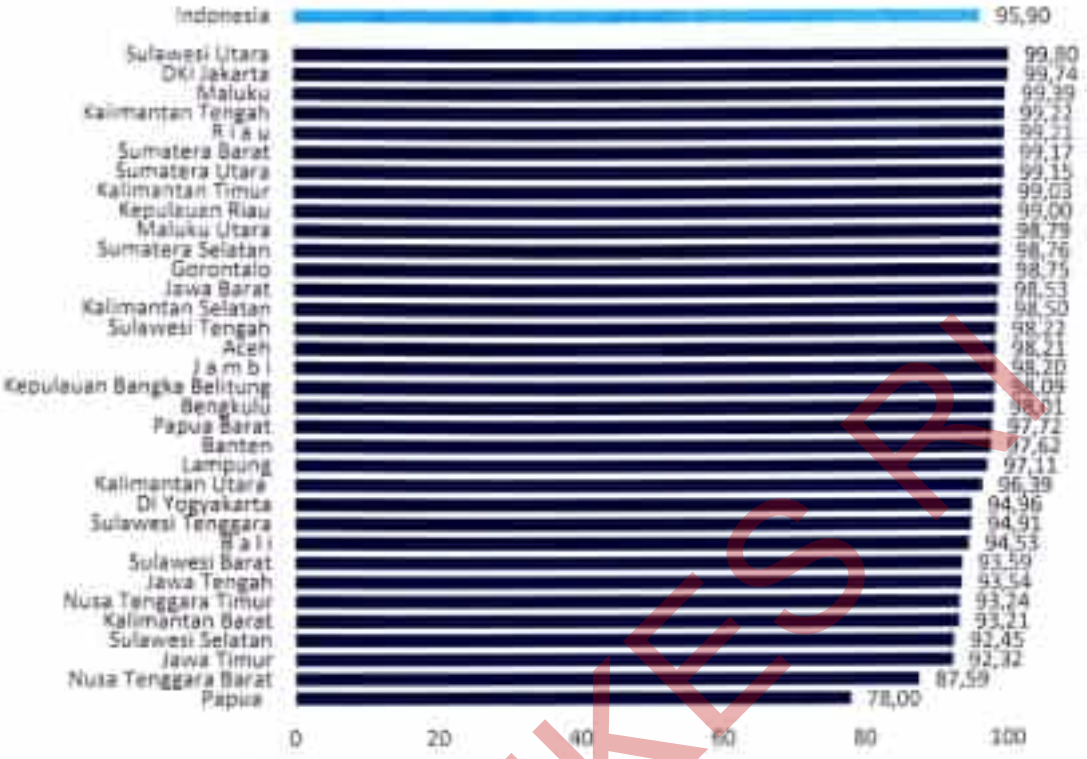

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Angka partisipasi adalah indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Nilai APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

KEMENKES RI

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2016 – 2019

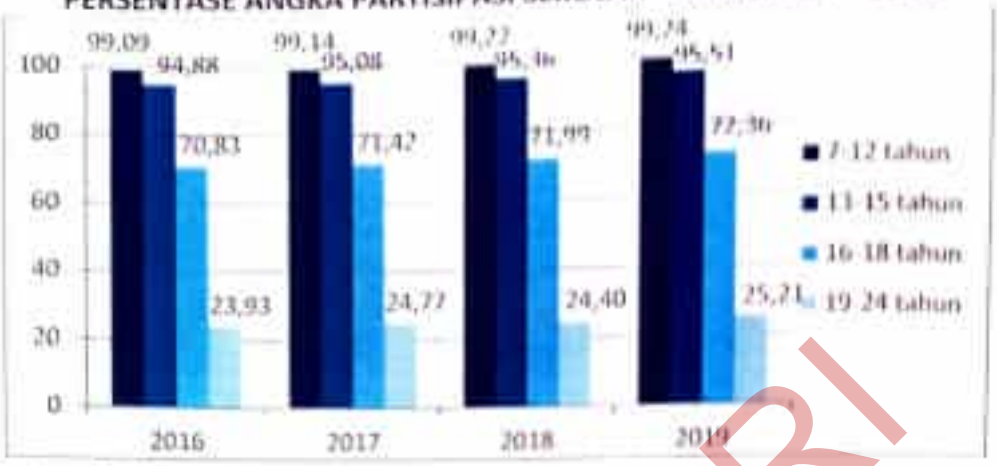

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar 1.13, persentase APS setiap tahunnya di setiap kelompok umur mengalami peningkatan. Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Hal ini dimungkinkan karena usia pada kelompok umur yang tinggi (16-18 tahun dan 19-24 tahun) masuk ke dalam angkatan kerja. Peningkatan persentase APS pada kelompok umur 7-12 tahun (setara SD/sederajat) dan 13-15 tahun (setara SMP/sederajat) dimungkinkan karena adanya program wajib belajar 9 tahun. Begitupula dengan peningkatan persentase APS pada kelompok 16-18 tahun (SMA/sederajat) yang terjadi karena adanya program wajib belajar 12 tahun.

Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

GAMBAR 1.14
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2016 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

KEMENKES RI

Nilai APK (Gambar 1.14) untuk SD/MI tahun 2016-2019 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat). Gambar 1.14 menunjukan bahwa dari tahun 2016-2019, nilai APK untuk SMA/sederajat mengalami kenaikan namun sempat turun sedikit di tahun 2018 dan naik kembali di tahun 2019. Hal ini cenderung meningkat dibandingkan nilai APK SD/MI dan SMP/MTs. Secara umum APK penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2019 terdapat pada Lampiran 3.0.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

GAMBAR 1.15
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2016 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tahun 2019 nilai APM untuk SD/sederajat sebesar 97,64%, SMP/sederajat sebesar 79,40% dan SMA/sederajat sebesar 60,84%. Kondisi ini terus meningkat pada semua jenjang pendidikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nilai APM lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah dibandingkan nilai APK. Rincian APM menurut provinsi tahun 2016-2019 terdapat pada Lampiran 3.p.

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

KEMENKES RI

Tahun 2014 terjadi perubahan metodologi IPM. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dengan metode lama dan metode baru. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. Nilai IPM Indonesia telah meningkat 5,35 poin, yaitu dari 66,53 tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89% per tahun dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" mulai tahun 2016. Pada Tahun 2019 IPM Indonesia naik sebesar 0,53 dari tahun sebelumnya yaitu 71,39.

GAMBAR 1.16
IPM INDONESIA TAHUN 2004 – 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I), lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX), lebih lama 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) sebesar 11,30 juta rupiah per tahun, meningkat 240 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya (lihat lampiran 3.r).

KEMENKES RI

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- IPM < 60 : IPM rendah
- 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang
- 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi
- ≥ 80 : IPM sangat tinggi

Berdasarkan pembagian tersebut, hanya Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai nilai IPM kategori sangat tinggi (80,76). Terdapat 22 provinsi dengan kategori IPM tinggi dan 11 provinsi masuk dalam kaegori IPM sedang.

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2018, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi di antara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta.

GAMBAR 1.17
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

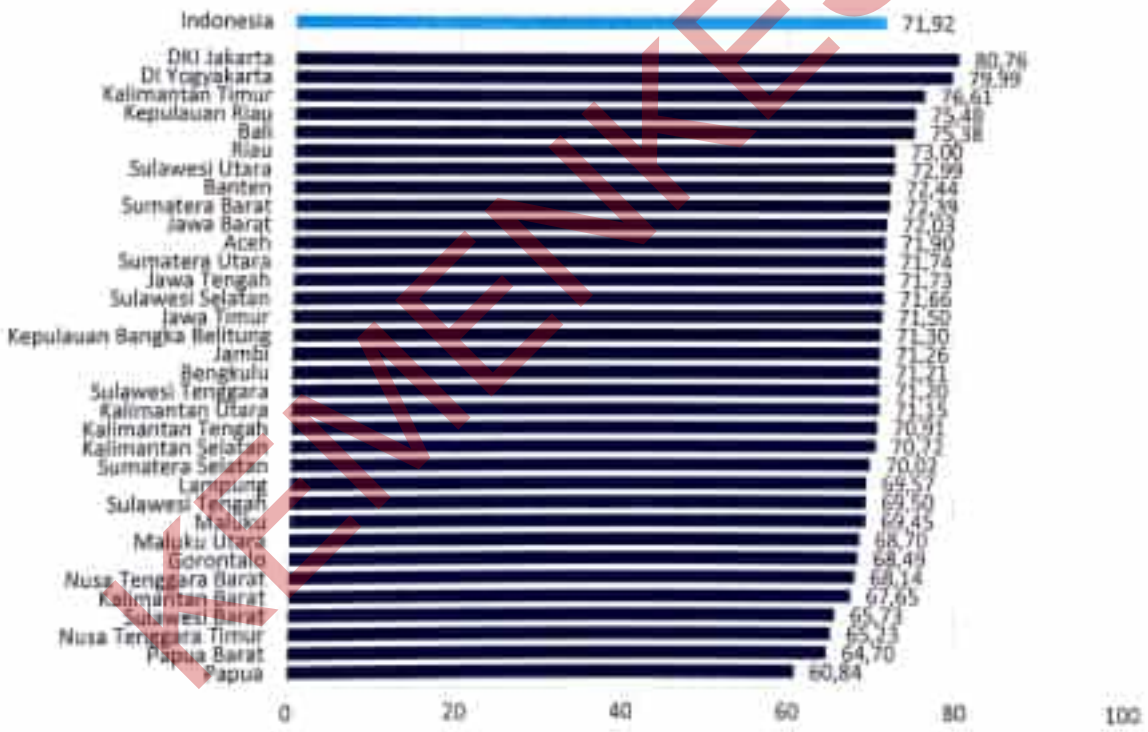

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

...

KEMENKES RI

KEMENKES RI

Bab II
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

KEMENKES RI

KEMENKES RI

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari FKTP/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter/dokter gigi perseorangan), FKTRL/Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), dan bab ini juga menjelaskan data Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Proses dalam mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal yang saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Salah satu faktor eksternal dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Peran fasilitator pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu menyelenggarakan UKBM secara mandiri dan menerapkan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS). Salah satu UKBM yang paling aktif dan dikenal masyarakat adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), selain itu terdapat beberapa jenis UKBM diantaranya Posyandu lansia, Pos UKK (Unit Kesehatan Kerja), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

KEMENKES RI

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Total jumlah Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2019 adalah 10.134 puskesmas, yang terdiri dari 6.086 Puskesmas rawat inap dan 4.048 Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 9.993, dengan jumlah Puskesmas

rawat inap sebanyak 3.623 puskesmas dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 6.3[illegible] puskesmas. Data mengenai jumlah Puskesmas ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 2.1.

GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

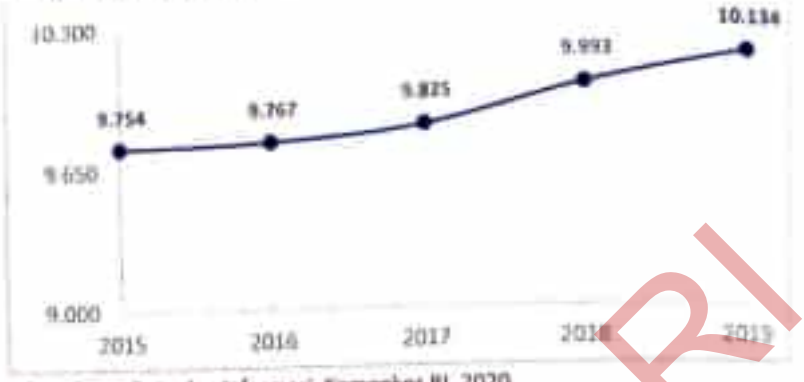

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2015 jumlah Puskesmas semakin meningkat, dari 9.754 unit menjadi 10.134 Puskesmas pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, peningkatan jumlah Puskesmas rata-rata 70 Puskesmas per tahun, yang dapat dilihat trennya pada Gambar 2.1. Peningkatan jumlah Puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2019 sebesar 1,4. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

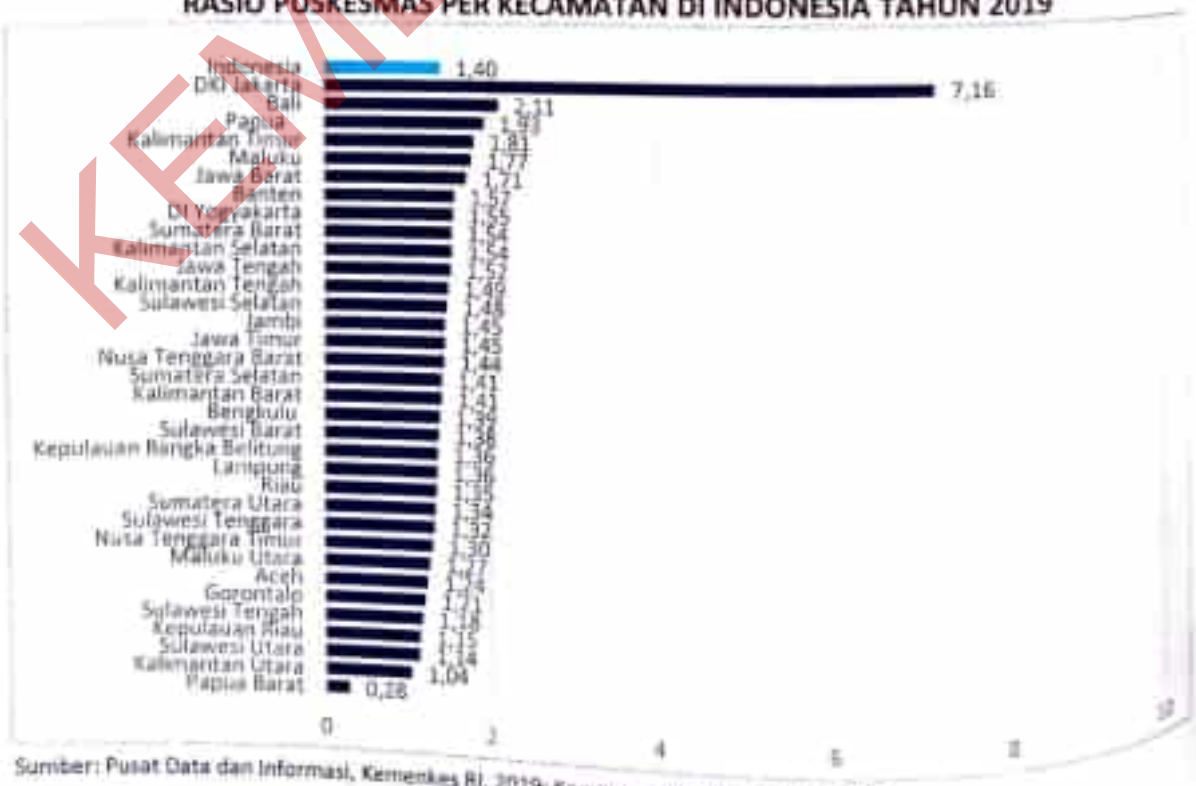

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019; Kementerian Dalam Negeri, 2020

KEMENKES RI

Gambar 2.2 menjelaskan provinsi dengan rasio Puskesmas terhadap kecamatan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,16 Puskesmas per kecamatan dan Provinsi Bali 2,11 Puskesmas per kecamatan, sedangkan Papua Barat memiliki rasio terendah yaitu sebesar 0,28 Puskesmas per kecamatan. Rasio Puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh, provinsi dengan rasio terendah di provinsi Papua Barat. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki puskesmas dan adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi, peta sebaran rasio puskemas dapat dilihat pada Gambar 2.3. Data mengenai rasio Puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

GAMBAR 2.3
PETA RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA
TAHUN 2019

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020; Kementerian Dalam Negeri, 2020

Dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer, terdapat tiga indikator yang terkait dengan penyelenggaraan Puskesmas pada RPJMN tahun 2015–2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, yaitu 1) Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi 2) jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar dan 3) jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan rumah sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

KEMENKES RI

1. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi merupakan suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk pelayanan FKTP. Sesuai Permenkes Nomor 46 Tahun 2015, akreditasi FKTP bertujuan untuk 1) meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, 2) meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi, dan 3) meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat. Dengan akreditasi puskesmas diharapkan dapat membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan melalui perbaikan tata kelola: 1) manajemen secara institusi, 2) manajemen program, 3) manajemen risiko, dan 4) manajemen mutu.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pasal 39 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Dan sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan dasar hukum yang mengatur teknis pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Tahun 2019, terdapat 9.153 Puskesmas yang telah terakreditasi atau sekitar 90,32% dari 10.134 Puskesmas (Gambar 2.4). Provinsi dengan persentase Puskesmas terakreditasi 100% adalah Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Utara dan DI Yogyakarta. Provinsi dengan persentase Puskesmas terakreditasi terendah adalah Papua (28,57%). Dari 10.134 Puskesmas yang terakreditasi sampai tahun 2019, untuk tingkat kelulusan akreditasi masih didominasi oleh status kelulusan madya dan dasar. Adapun distribusi tingkat kelulusan akreditasi Puskesmas adalah sebanyak 5.068 (55,37%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan madya, sebanyak 2.177 (23,78%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan dasar, 1.669 (18,23%) Puskesmas terakreditasi status kelulusan utama, dan 239 (2,61%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan paripurna. Data mengenai akreditasi Puskesmas dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.d.

KEMENKES RI

GAMBAR 2.4
PERSENTASE AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2019

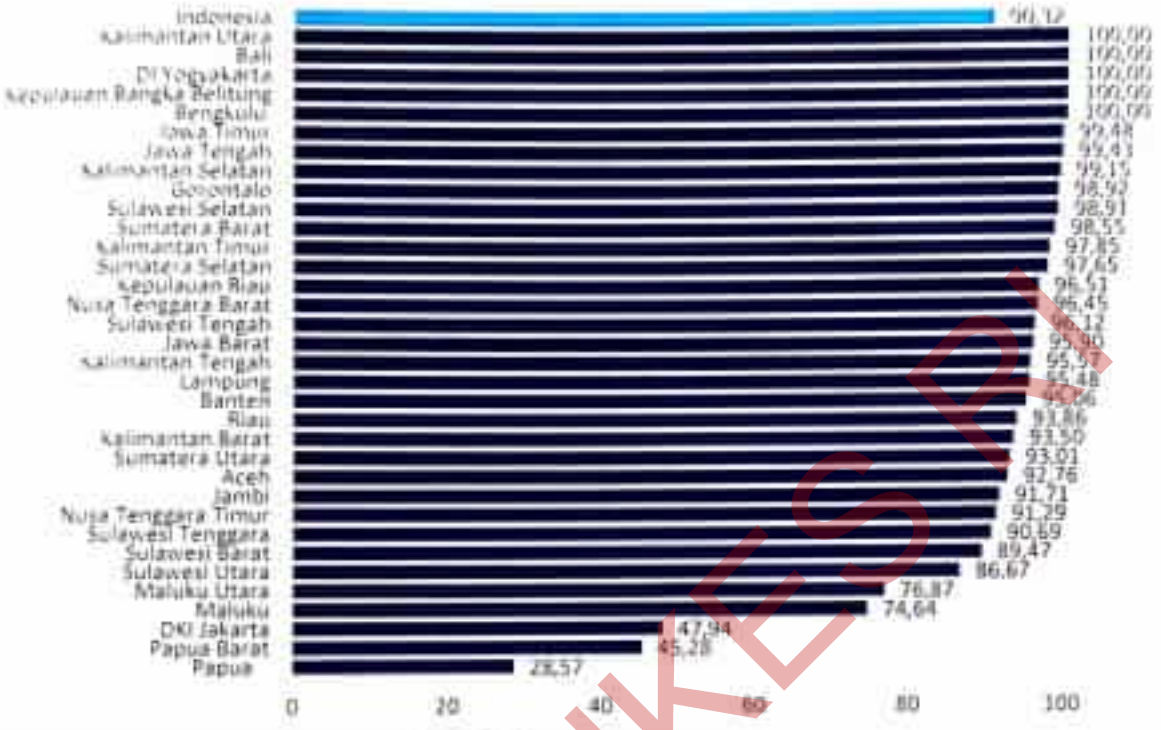

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori yaitu Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan perkembangan jumlah Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

GAMBAR 2.5
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA
TAHUN 2015 – 2019

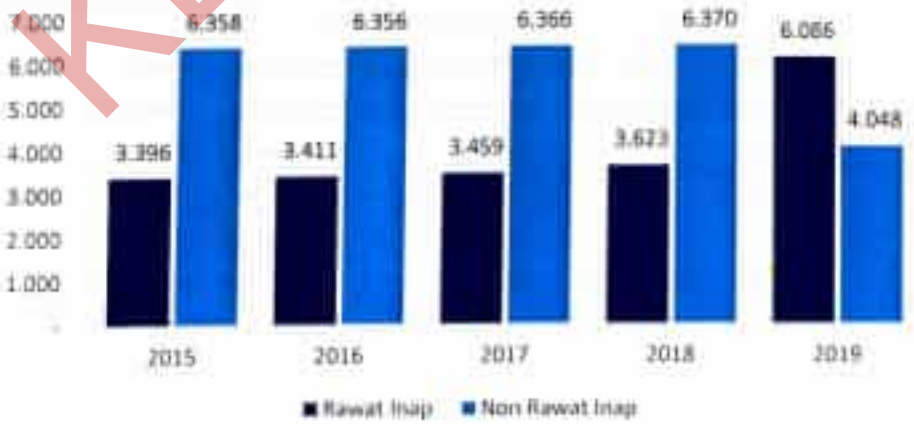

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Jumlah Puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 3.396 unit pada tahun 2015, lalu meningkat menjadi 6.086 unit pada tahun 2019 (Gambar 2.5).

KEMENKES RI

Puskesmas non rawat inap mengalami penurunan jumlah Puskesmasnya berdasarkan status pada tahun 2018 (6.370 puskesmas non rawat inap) dan pada tahun 2019 (4.048 puskesmas non rawat inap). Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis Puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.b.

3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dalam upayanya melibatkan dan membutuhkan dukungan kerjasama lintas sektor. Oleh karena itu, pencapaian tujuan kesehatan kerja dan olahraga bagi semua pekerja dan peningkatan produktivitas pekerja yang optimal membutuhkan kebijakan dan rencana strategi dalam rangka mengamankan kondisi kerja dan mempromosikan kesehatan kerja, serta paling utama melindungi pekerja pada kelompok berisiko seperti pekerja wanita, pekerja anak, pekerja usia lanjut dan pekerja yang terpajan bahan berbahaya.

Arah kebijakan dan strategi kesehatan kerja dan olah raga adalah berupaya membangun masyarakat yang sehat bugar dan produktif dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif. Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan LP/LS, dunia usaha, swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur. Strategi Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok pekerja berbasis masyarakat pekerja. Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga. Penguatan layanan kesehatan bagi pekerja. Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja dan olahraga. Penguatan sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014, pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga merupakan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. Namun demikian, upaya kesehatan masyarakat esensial juga dilakukan terhadap sasaran upaya kesehatan kerja dan olahraga, khususnya pekerja, anak sekolah, dan jemaah haji.

Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya kesehatan kerja kedua sektor tersebut, utamanya pada sektor informal. Upaya kesehatan kerja di Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas atau lokal spesifik. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di Puskesmas lebih dititikberatkan pada wilayah industri sehingga dapat menjangkau pekerja yang ada di Indonesia.

a. Upaya Kesehatan Kerja

Pada indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, kesehatan kerja memiliki target persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan/atau memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja di wilayah kerjanya, diantaranya melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).

Puskesmas yang telah melaksanakan kesehatan kerja dasar pada tahun 2019 mencapai 8.108 puskesmas atau sebanyak 80,01% lebih banyak dari tahun 2018 yang mencapai 6.963 atau sebanyak 69,68%. Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta dan Gorontalo merupakan provinsi dengan capaian 100% puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar.

KEMENKES RI

sedangkan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan capaian terkecil (rincian Gambar 2.6). Untuk capaian jumlah Pos UKK yang ada dan dibina Puskesmas pada tahun 2019 sebanyak 7.289 dengan jumlah sasaran sebesar 7.199.

Selain itu upaya kesehatan kerja juga dilakukan melalui pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya kesehatan kerja juga diimplementasikan di perusahaan, GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus dalam implementasinya. GP2SP dilaksanakan ditempat kerja terutama perusahaan yang didalamnya terdapat program. 1) Pelayanan kesehatan reproduksi , 2) Deteksi Dini PTM, 3) Pemenuhan Gizi Pekerja. 4) Peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja, dan 5) Pengendalian lingkungan kerja.

GAMBAR 2.6
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DASAR DI INDONESIA TAHUN 2019

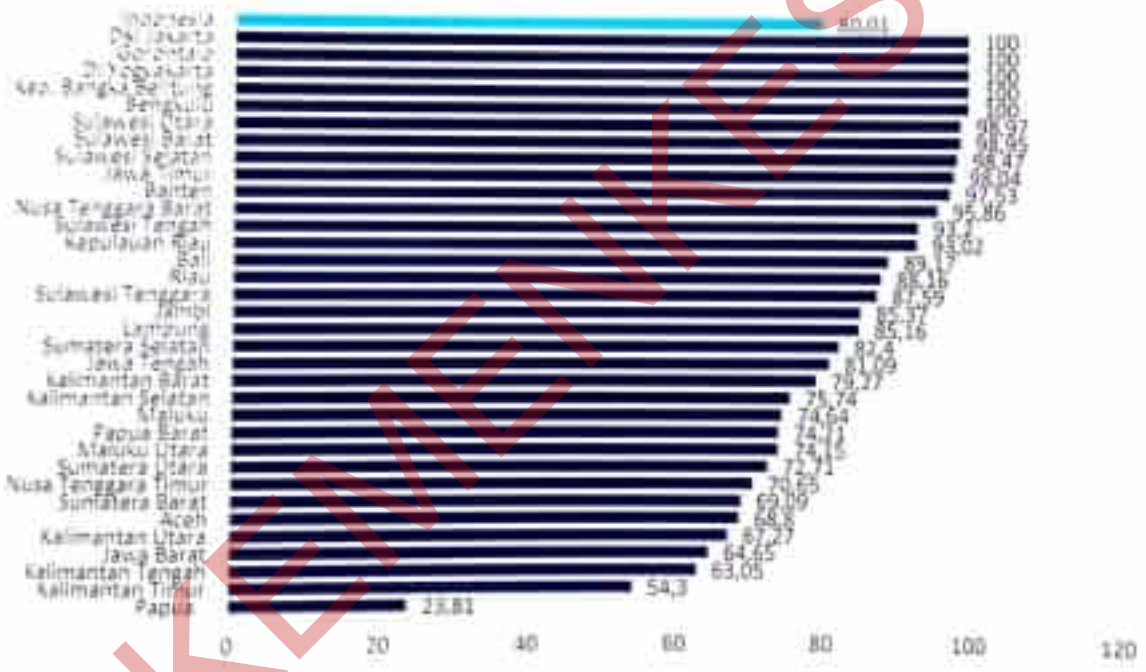

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2019

b. Upaya Kesehatan Olahraga

Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga di Puskesmas terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya pendataan, pembinaan, dan pelayanan kesehatan olahraga. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga adalah puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya. Pada tahun 2019 indikator persentase puskemas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya tercapai sebanyak 8.219 Puskesmas (80,96%). Dari 34 provinsi tersebut, provinsi dengan jumlah Puskesmas yang mencapai target 50% (target Renstra) berjumlah 24 provinsi, terdapat 3 provinsi dengan capaian 100%

KEMENKES RI

puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo, Dki Jakarta dan Kep. Bangka Belitung (Gambar 2.7).

GAMBAR 2.7
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2019

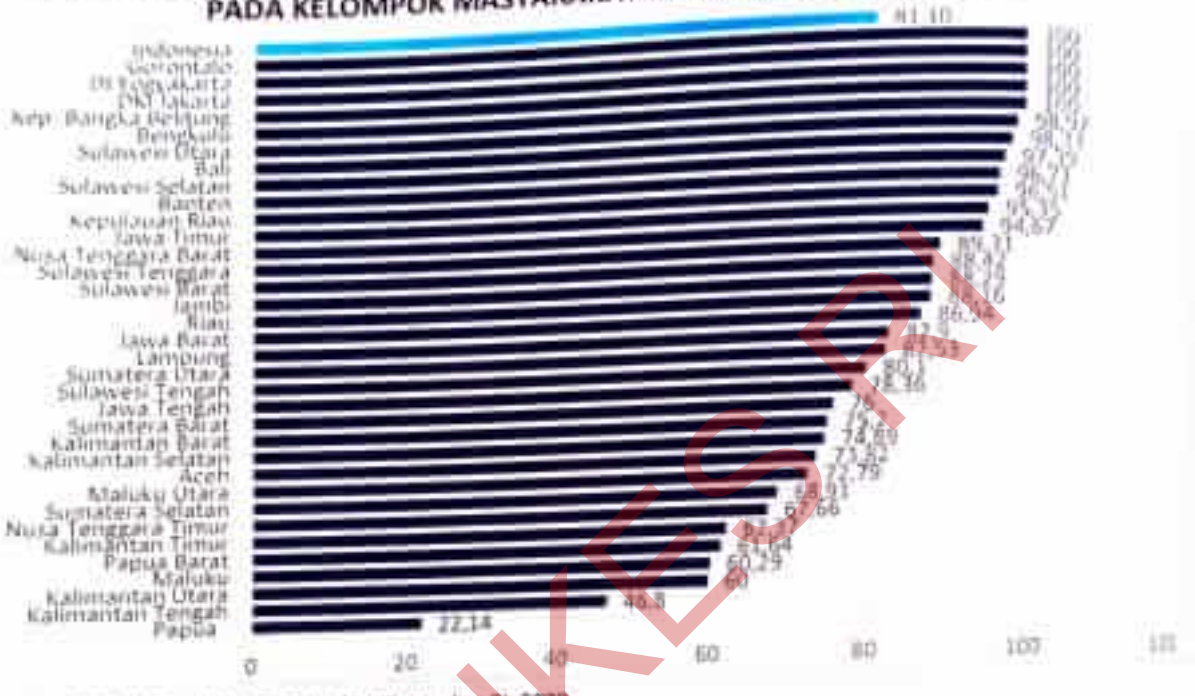

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

GAMBAR 2.8
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN OLAHRAGA BAGI ANAK SEKOLAH DASAR (SD) DI INDONESIA TAHUN 2019

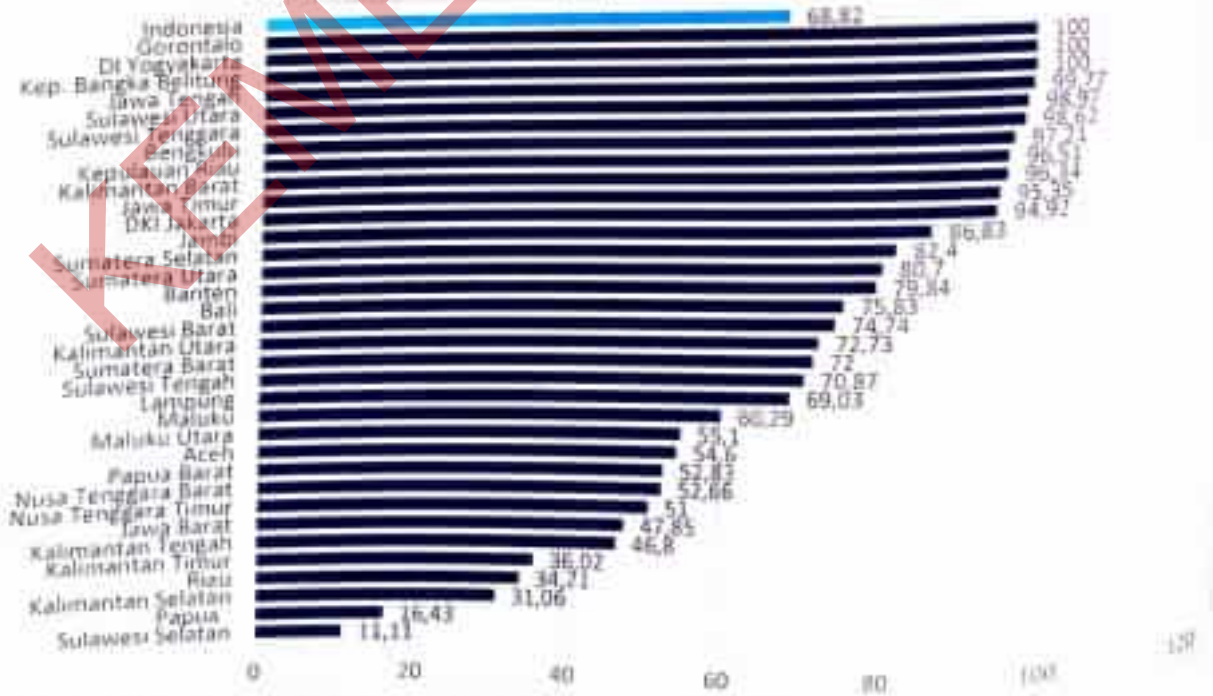

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD adalah Puskesmas yang melakukan penjaringan dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah melalui gerakan peregangan atau bermain pada jam istirahat. Tahun 2019 indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD mencapai 68,82% (6.974 Puskesmas) dari target 75% (7.325 Puskesmas). Provinsi dengan capaian tertinggi berdasarkan jumlah puskesmas adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan 3 provinsi dengan capaian 100% puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga bagi anak SD adalah Provinsi DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, dan Gorontalo (Gambar 2.8). Indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD diperoleh melalui integrasi laporan dengan kegiatan Kesehatan Keluarga dan laporan Puskemas yang melaksanakan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.

Data mengenai Puskemas dengan pelayanan pengembangan (jumlah Puskemas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, jumlah Puskemas yang melaksanakan kegiatan kesehatan OR pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya, jumlah Puskemas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD) secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.f.

4. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional diperkuat dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti Permenkes No 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Permenkes No 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, dan Permenkes No 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer serta peraturan lain yang mendukung.

Perkembangan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat dalam bentuk pemberdayaan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresure dapat dilihat pada hasil Riskesdas Tahun 2018, dimana proporsi nasional pemanfaatan TOGA sebesar 24,6% dengan proporsi tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 55,6%. Upaya pelayanan kesehatan tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbanyak dalam bentuk ramuan jadi (48%), ramuan buatan sendiri (31,8%), keterampilan manual (65,3%), keterampilan olah pikir (1,9%), keterampilan energi (2,1%). Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan tradisional masih didominasi oleh penyehat tradisional sebanyak 98,5% dan oleh Nakestrad masih terbatas sebesar 2,7%. Berdasarkan data proporsi rumah tangga yang memanfatkan upaya kesehatan tradisional, sudah 31,4% rumah tangga yang memanfaatkan Yankestrad, 12,9% rumah tangga yang melakukan upaya sendiri dan 55,7% rumah tangga yang tidak memanfaatkan yankestrad.

Salah satu strategi pembangunan kesehatan adalah mendorong masyarakat agar mampu memelihara kesehatannya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan.

Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan (akupresur) ini harus dilakukan dalam satu sistem pelayanan kesehatan dasar sebagai bagian dari program Indonesia Sehat sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Secara bertahap mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diharapkan 75% puskesmas di Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, termasuk didalamnya puskesmas melakukan pembinaan terhadap kelompok asuhan mandiri dalam memanfaatkan TOGA dan Keterampilan (akupresur) melalui pelaksanaan asuhan

KEMENKES RI

mandiri berarti kita telah berupaya merubah paradigma pengobatan kuratif menjadi promotif dan preventif, yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas bagi keluarga dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarganya. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, diharapkan kunjungan masyarakat ke Puskesmas merupakan kunjungan dalam rangka konsultasi kesehatan bukan untuk mengobati sakitnya.

Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 telah menetapkan indikator pencapaian target penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, yaitu jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Tren perekembangan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

GAMBAR 2.9
TREN JUMLAH PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA TAHUN 2015-2019

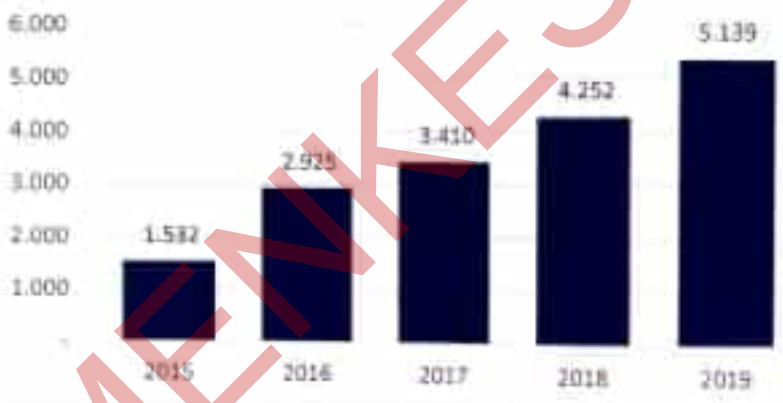

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayal kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:

a. puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional;
b. puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional ramuan dar keterampilan;
c. puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data pelayanan kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional

KEMENKES RI

GAMBAR 2.10
JUMLAH DAN PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2019

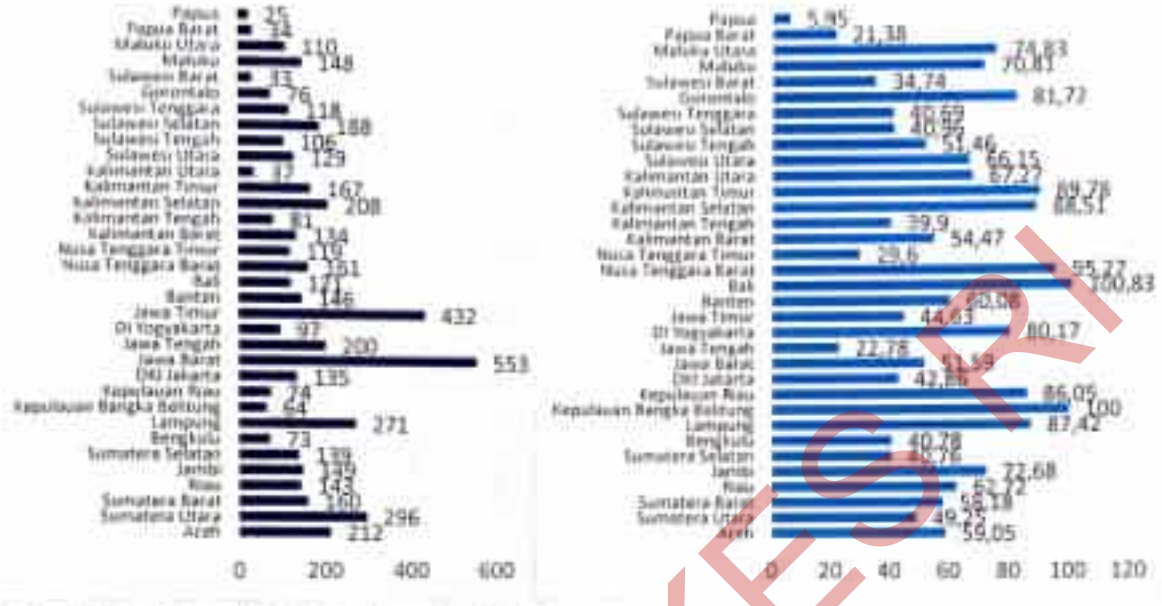

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Tahun 2019 terdapat 5.522 Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 mencapai 4.252 puskesmas. Provinsi dengan capaian jumlah puskesmas terbanyak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Sedangkan Provinsi dengan capaian 100% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan tradisional adalah Provinsi Bali (Gambar 2.10).

Pencapaian indikator Pelayanan Kesehatan Tradisional tersebut tidak terlepas dari upaya sosialisasi, advokasi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis secara berkala dan berkesinambungan baik di pusat maupun di daerah dengan lintas sektor terkait.

GAMBAR 2.11
PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Data tahun 2019, puskesmas yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional (HATRA) sebanyak 3.068 Puskesmas. Seperti tahun sebelumnya pada tahun 2018 provinsi Sulawesi Barat dan

KEMENKES RI

Papua belum terdapat puskesmas yang melakukan pembinaan penyehatan tradisional (HATRA). Data mengenai jumlah Puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dapat dilihat pada Lampiran 4.g.

5. Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2015-2019 terkait program kefarmasian dan alat kesehatan, yaitu meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Indikator tercapainya sasaran hasil ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan alat kesehatan tahun 2019 yaitu persentase Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilakukan terhadap 20 *item* obat indikator).

Pemantauan ketersediaan obat dan vaksin dilakukan untuk memperoleh gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah *item* obat yang dipantau adalah 20 *item* obat dan vaksin. Dari 10.134 puskesmas yang ada di Indonesia, sebanyak 9.480 puskesmas (93,5%) melapor mengenai ketersediaan obat dan vaksin di puskesmasnya. Dari jumlah puskesmas yang melapor tersebut, sebanyak 9.133 puskesmas atau sebesar 96,34% puskesmas memiliki 80% obat dan vaksin esensial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas telah mencapai target Renstra tahun 2018. Data dan informasi lebih rinci mengenai Puskesmas yang menyediakan 20 *item* obat dan vaksin terdapat pada Lampiran 9.a.

B. KLINIK, UTD, DAN LABORATORIUM KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, mendefinisikan klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dan/ atau spesialistik. Pada tahun 2019 di Indonesia terdapat 9.205 klinik yang terdiri atas 8.281 klinik pratama dan 924 klinik utama.

Provinsi dengan jumlah klinik pratama terbanyak adalah Sumatera Utara (980 klinik), DI Yogyakarta (934 klinik), dan Jawa Tengah (880). Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama terendah yaitu Provinsi Gorontalo (3 klinik), Kalimantan Utara (4 klinik), serta Sulawesi Barat dan Maluku Utara (6 klinik). Provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota terbanyak yaitu Provinsi Sumatera Utara (959 klinik). Sedangkan Provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota terendah yaitu Kalimantan Utara (1 klinik). Provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh TNI/Polri terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur (73). Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama yang dimiliki oleh TNI/Polri terendah berada di Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo (1 klinik). Data mengenai klinik secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.i.

KEMENKES RI

GAMBAR 2.12
JUMLAH KLINIK PRATAMA PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Jumlah klinik utama di provinsi terbanyak yaitu di Provinsi DKI Jakarta (207 klinik), DI Yogyakarta (168 klinik), dan Jawa Barat (109 klinik). Sedangkan 4 provinsi tidak memiliki klinik utama, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Semua klinik utama yang terdapat di tiap provinsi dimiliki dan dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota (tidak ada klinik utama yang dimiliki/dikelola oleh TNI/POLRI).

KEMENKES RI

GAMBAR 2.13
JUMLAH KLINIK UTAMA PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014). Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 458 UTD di 398 kabupaten/kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pada tahun 2019, provinsi dengan total jumlah unit transfusi darah (UTD) terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur (39 UTD), Jawa Tengah (36 UTD), dan Sumatera Utara (28 UTD). Sedangkan provinsi dengan total jumlah UTD terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta (3 UTD), Kalimantan Utara (4 UTD), dan Sulawesi Barat (4 UTD). UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (20 UTD). Terdapat 3 provinsi yang tidak memiliki UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Banten. Jumlah UTD yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur (37 UTD), sedangkan 4 provinsi hanya memiliki 1 UTD yang diselenggarakan oleh PMI, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, Jambi, dan Maluku. Data selengkapnya mengenai UTD dapat dilihat pada lampiran 4.k.

KEMENKES RI

GAMBAR 2.14
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PENYELENGGARA DAN PROVINSI
TAHUN 2019

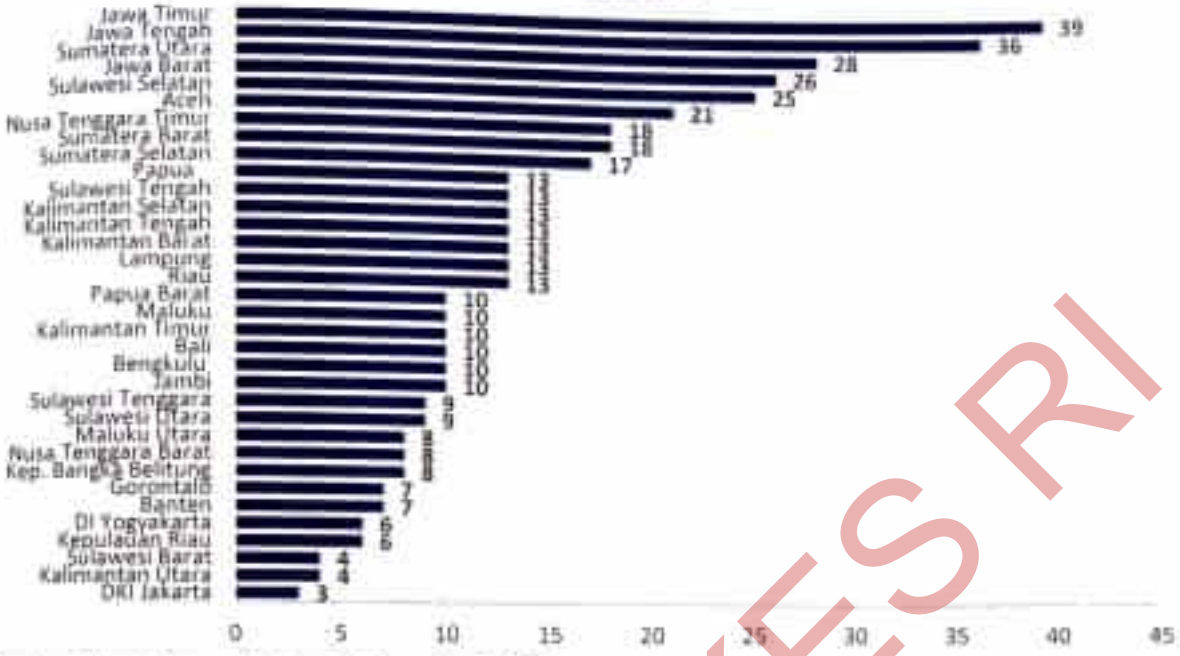

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesahatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah laboratorium kesehatan terbanyak dimiliki oleh swasta, yaitu sebanyak 1.056 laboratorium atau sebesar 81,7%. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke dua yaitu laboratorium pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 206 laboratorium atau sebesar 15,9%. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke tiga yaitu laboratorium milik pemerintah provinsi, yakni sebanyak 27 laboratorium atau sebesar 2,1%. Laboratorium kesehatan paling sedikit dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 4 laboratorium atau sebesar 0,3%.

GAMBAR 2.15
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI
TAHUN 2019

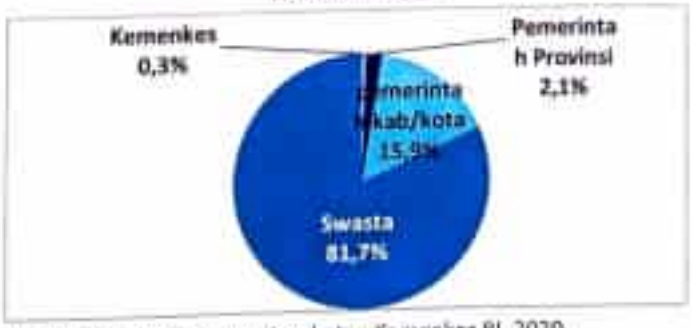

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 222 laboratorium. Provinsi terbanyak ke dua yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 194, dan terbanyak ke tiga yaitu Provinsi Jawa Tengah (194 laboratorium). Sebanyak 3 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat, yaitu sebanyak 2 laboratorium.

GAMBAR 2.16
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

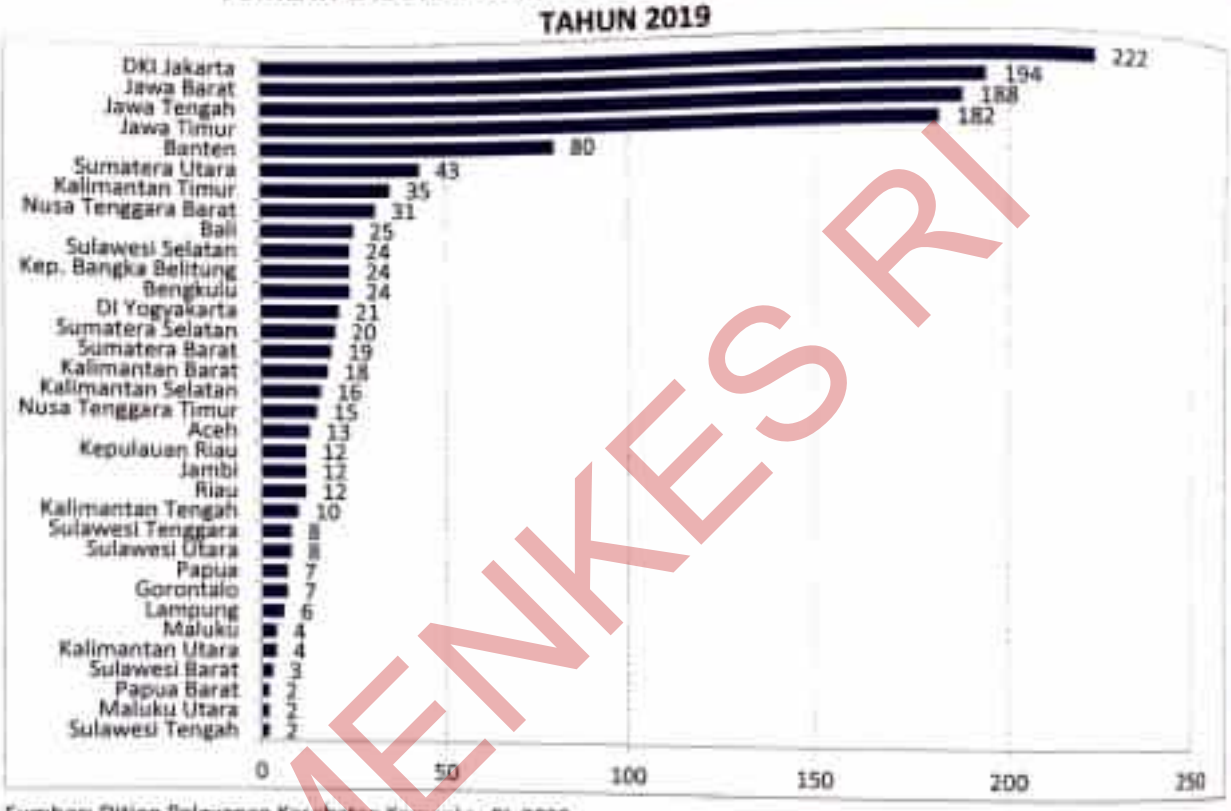

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

D. RUMAH SAKIT

Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

1. Jenis Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pengelompokan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan BUMN/Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan, pengecualian bagi Rumah Sakit Publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

KEMENKES RI

Rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan sebesar 13,52%. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 2.488 meningkat menjadi 2.877 pada tahun 2019. Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2019 terdiri dari 2.344 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 533 Rumah Sakit Khusus (RSK). Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.17.

GAMBAR 2.17
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

No	Penyelenggara	2015	2016	2017	2018	2019
PEMERINTAH						
1	Kementerian Kesehatan	14	14	14	15	18
2	TNI/POLRI	162	161	164	158	159
3	Kementerian Lain dan BUMN	61	67	14	55	51
Total		**237**	**242**	**192**	**228**	**228**
PEMERINTAH DAERAH						
1	Pemerintah Provinsi	68	75	87	91	92
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	553	564	585	614	640
Total		**621**	**639**	**672**	**705**	**732**
SWASTA		1.093	1.164	1.334	1.336	1.384
Total Keseluruhan		**1.951**	**2.045**	**2.198**	**2.269**	**2.344**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

RS Umum terdiri dari 8 jenis RS berdasarkan penyelenggaranya diantaranya 3 jenis oleh pemerintah pusat (Kemenkes, TNI/Polri, K/L, dan BUMN), 2 jenis oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) dan RS Umum milik swasta adapun rincian dapat dilihat pada Lampiran 4.h.

KEMENKES RI

2. TIPE RUMAH SAKIT

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C (1.484 RS) sebesar 51,6%, kemudian kelas D dan D Pratama (846 RS) sebesar 29,4%, kelas B (428 RS) sebesar 14,9%, serta masing-masing 2,1% pada kelas A dan RS yang belum ditetapkan kelas (60 dan 59 RS).

GAMBAR 2.18
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2019

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Pasal 3 menyatakan bahwa rumah sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah. Selain itu, pada pasal 5 juga dinyatakan bahwa klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan: (a) Pelayanan; (b) Sumber Daya Manusia; (c) Peralatan; (d) Sarana dan Prasarana; (e) administrasi dan manajemen

KEMENKES RI

Adapun persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas c yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2.19 berikut.

GAMBAR 2.19
PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2019

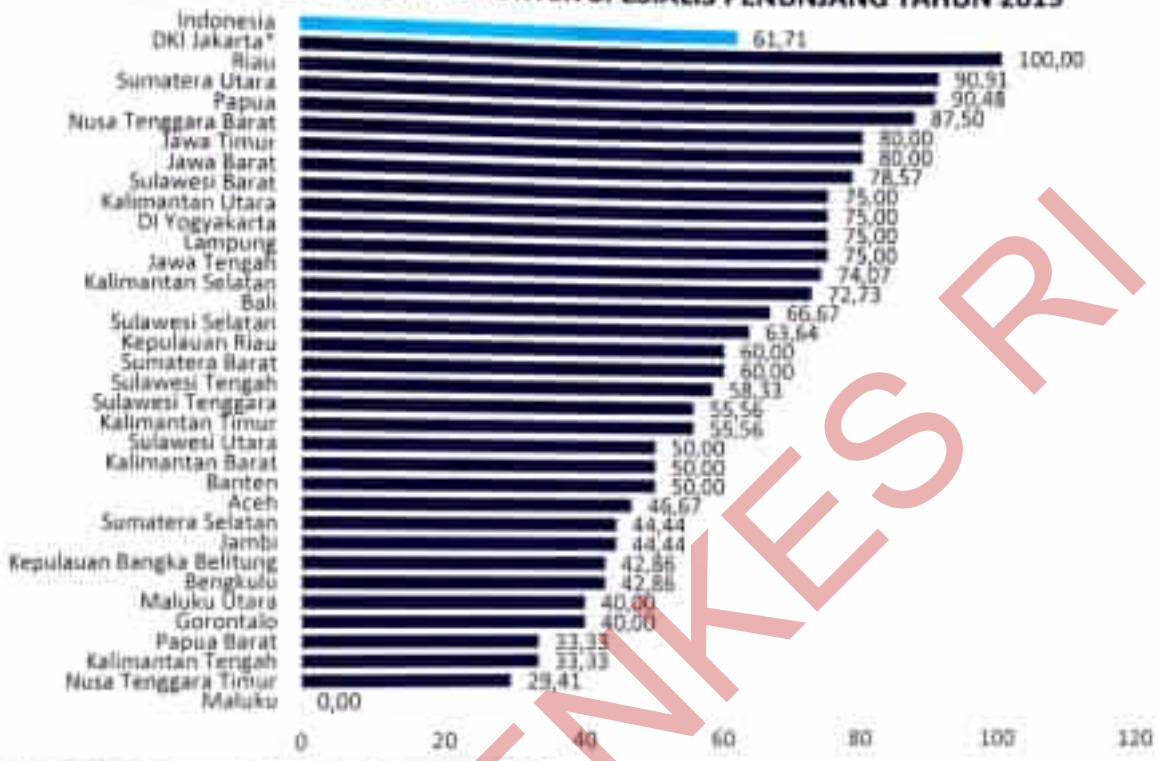

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

3. RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT

Dalam standar WHO, standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Sehingga, Jumlah tempat tidur di Indonesia sudah tercukupi menurut WHO. Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

KEMENKES RI

GAMBAR 2.20
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2014 - 2019

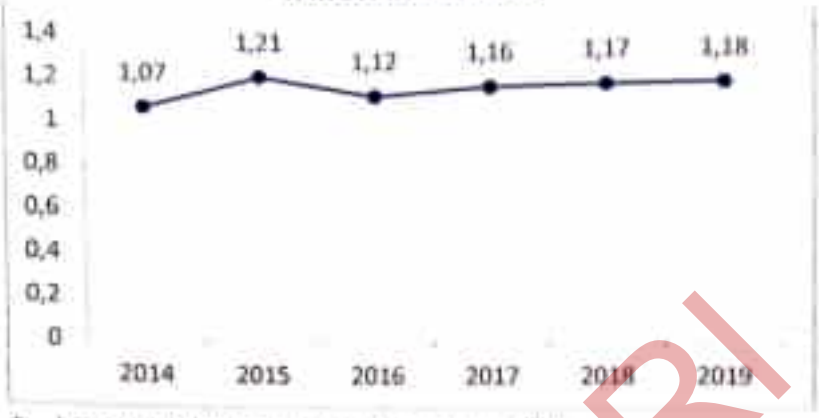

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

Secara nasional, rasio jumlah tempat tidur terhadap 1.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai standar minimal dari WHO. Meskipun demikian, terdapat 8 provinsi yang rasio tempat tidurnya belum dapat memenuhi standar ini, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (0,74), Nusa Tenggara Timur (0,83), Banten (0,87), Jawa Barat (0,87), Lampung (0,90), Sulawesi Barat (0,92), Kalimantan Tengah (0,94), dan Riau (0,98).

GAMBAR 2.21
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

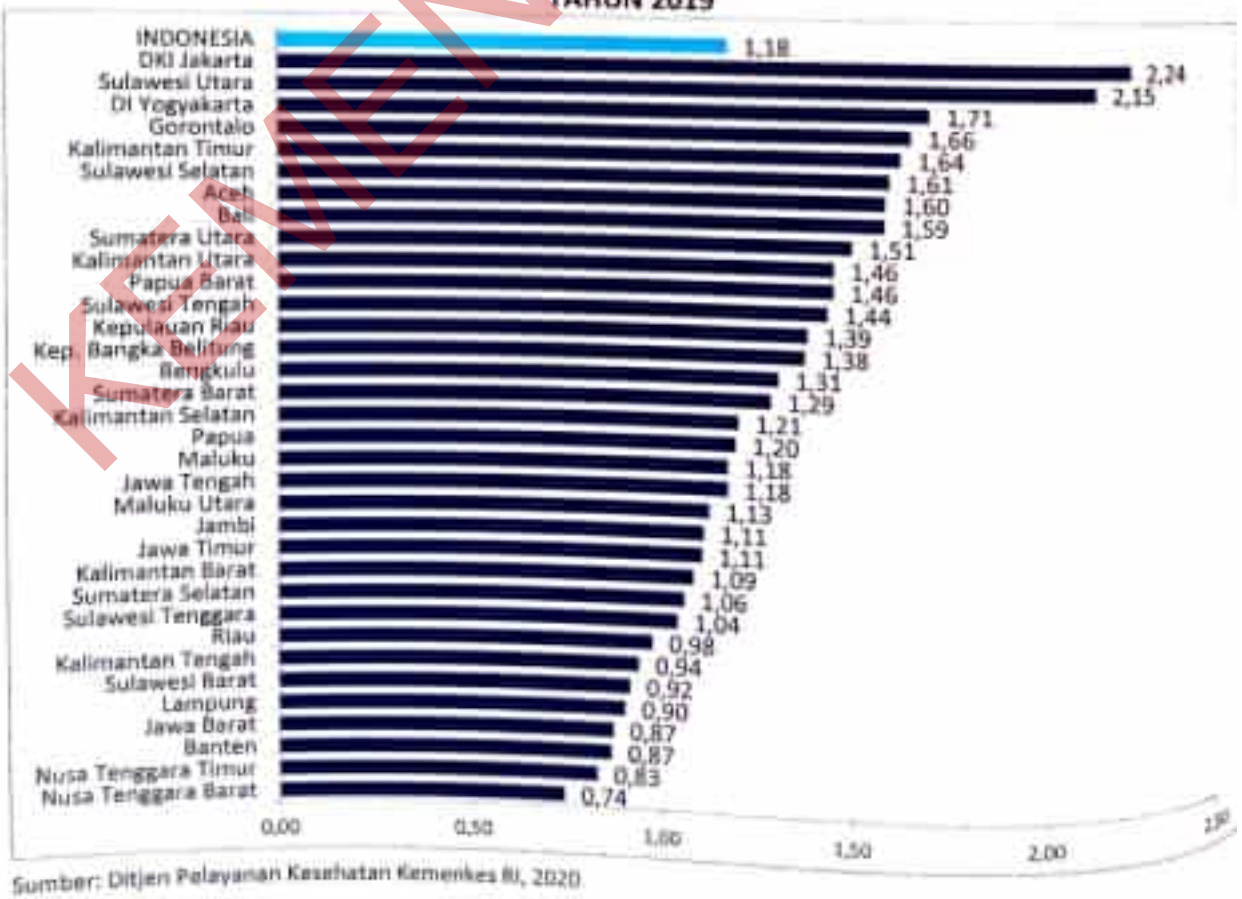

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

E. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika.

Jika ditelaah, sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa sebesar 94,25% sarana produksi dan 76% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pada tahun 2019 terdapat 3.685 sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.025 sarana produksi. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Namun, terdapat 8 provinsi yang tidak memiliki sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan jenis pada tahun 2019 terdapat pada Gambar 2.23 berikut.

GAMBAR 2.22
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Alat Kesehatan, dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 45.978 sarana. Provinsi dengan jumlah sarana distribusi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 7.332 sarana. Gambar 2.24 berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian pada tahun 2019.

GAMBAR 2.23
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

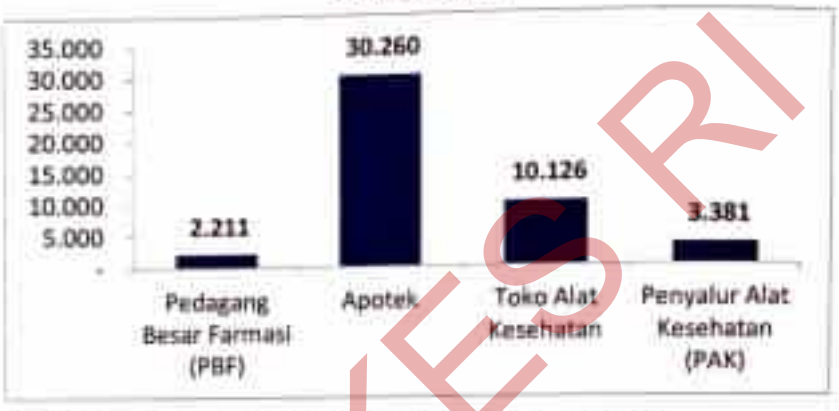

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2020

2. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar

Tahun 2019 di Indonesia terdapat 92,02% instalasi farmasi kabupaten/kota yang telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. Persentase tersebut telah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 75%. Pada Gambar 2.25 dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi telah memenuhi target 75% yaitu 31 provinsi. Terdapat 3 provinsi yang belum mencapai target Renstra 2019 dan terdapat 17 provinsi yang telah mencapai target 100%. Khusus Provinsi DKI Jakarta dari 6 instalasi farmasi kabupaten/kota tidak langsung melakukan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar namun pengelolaan dan pendistribusian dilakukan langsung pada Instalasi Farmasi Kecamatan melalui dana APBD. Data dan informasi lebih rinci mengenai instalasi farmasi kabupaten/kota yang telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.d.

KEMENKES RI

GAMBAR 2.24
PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR DI INDONESIA TAHUN 2019

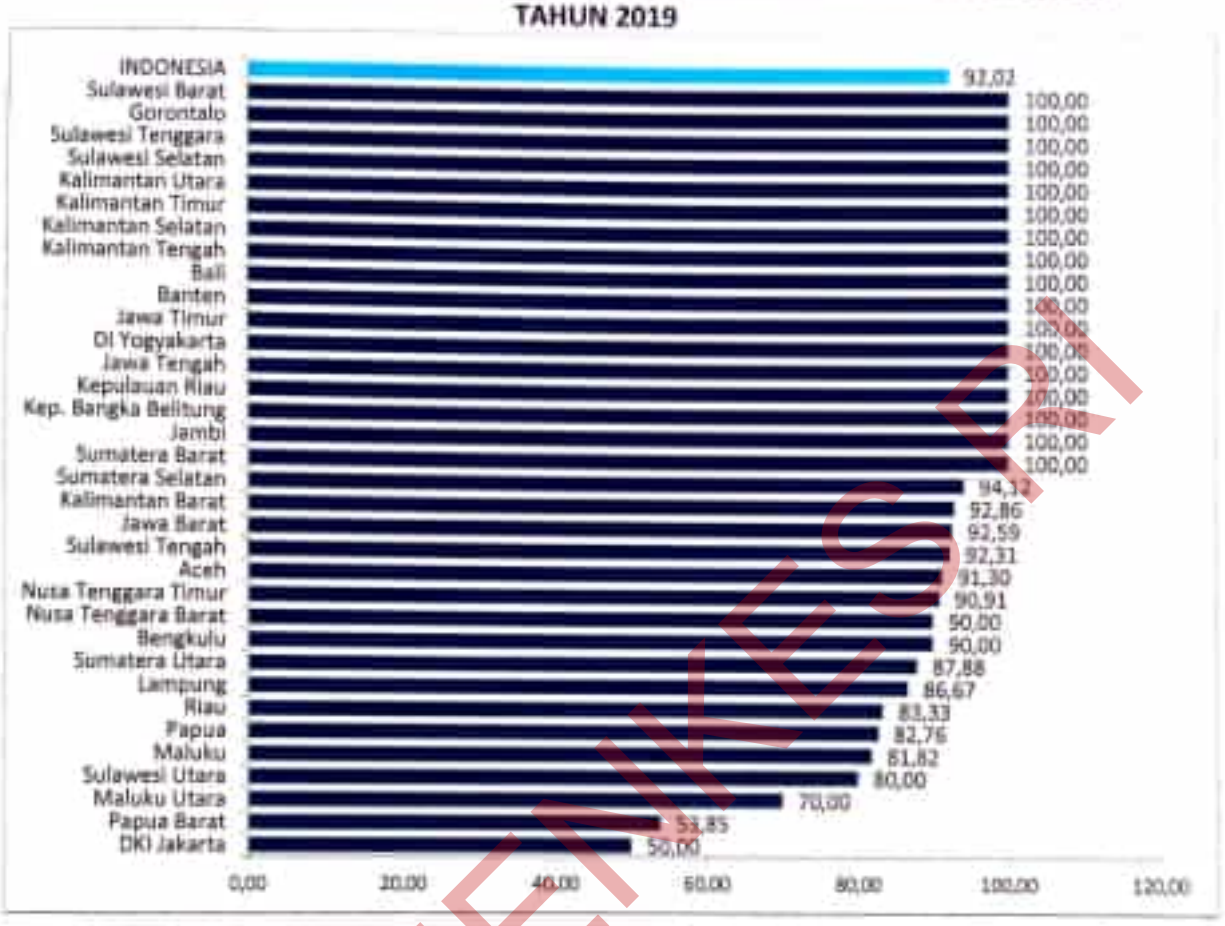

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2020

F. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita.

Pada tahun 2019, terdapat 296.777 Posyandu di seluruh Indonesia. Sebanyak 188.855 atau sekitar 63,6% posyandu diantaranya merupakan posyandu aktif. Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan. Data mengenai Posyandu secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 10.

KEMENKES RI

GAMBAR 2.25
PERSENTASE POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

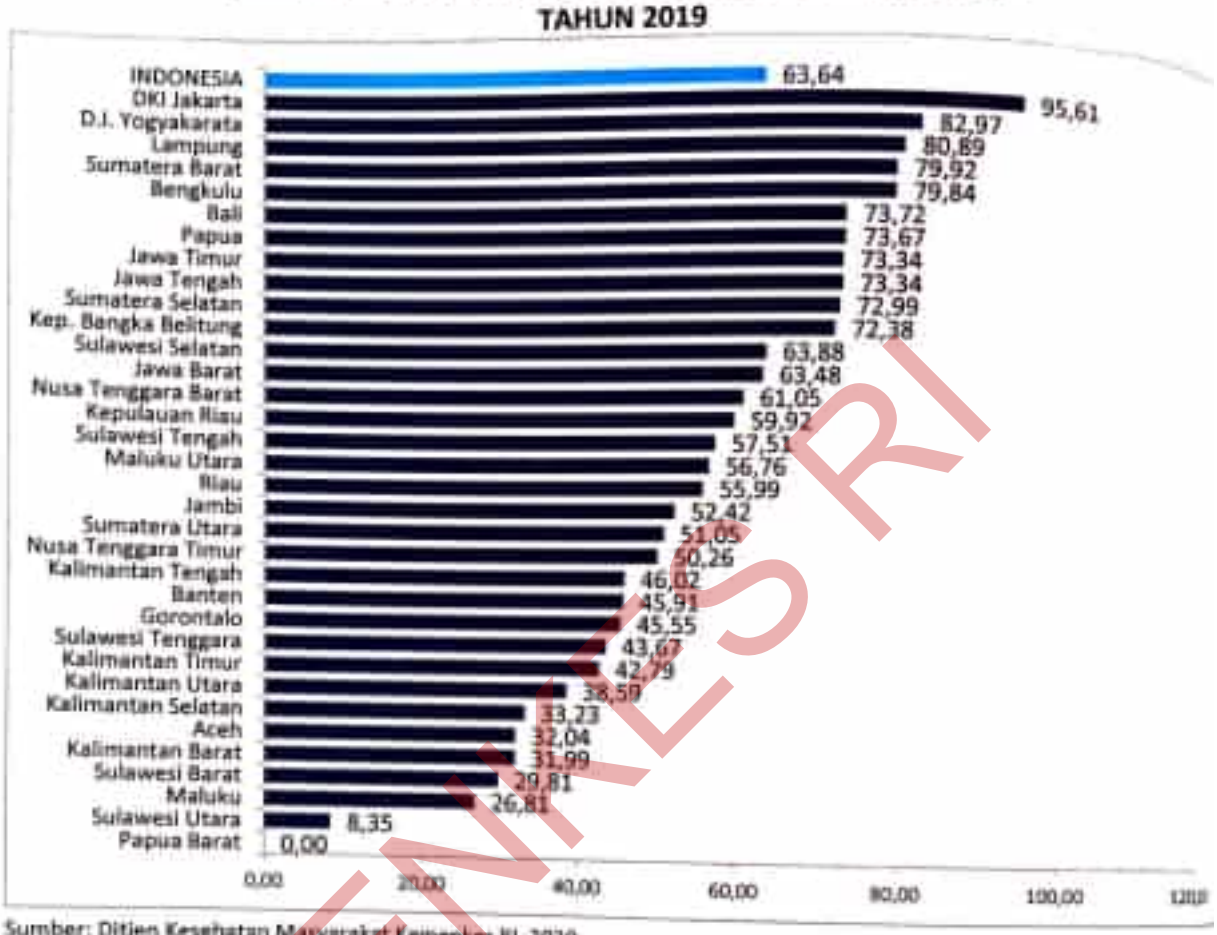

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, 2020

Selain Posyandu, terdapat beberapa jenis UKBM, yaitu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), Posyandu Lanjut Usia (Lansia), dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular). Pergeseran tipe penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular menjadikan peran Posbindu PTM menjadi sangat penting. Pada tahun 2019 di Indonesia terdapat 59.804 Posbindu PTM. Provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak yaitu Jawa Timur dengan 9.618 Posbindu dan provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terendah yaitu Kalimantan Utara (87 Posbindu).

KEMENKES RI

GAMBAR 2.26
PERSENTASE POSBINDU PTM PER PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

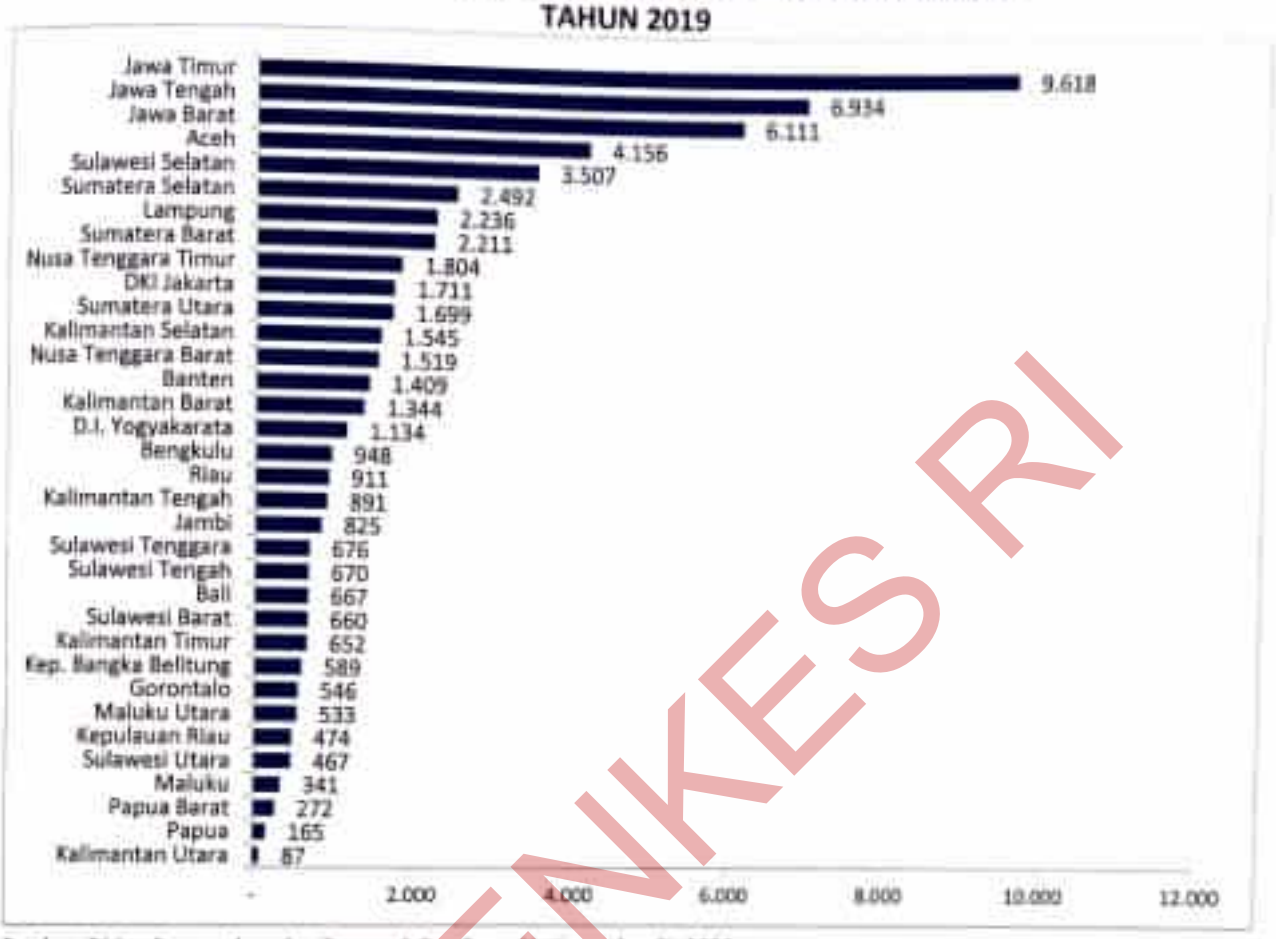

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, 2020

...

KEMENKES RI

KEMENKES RI

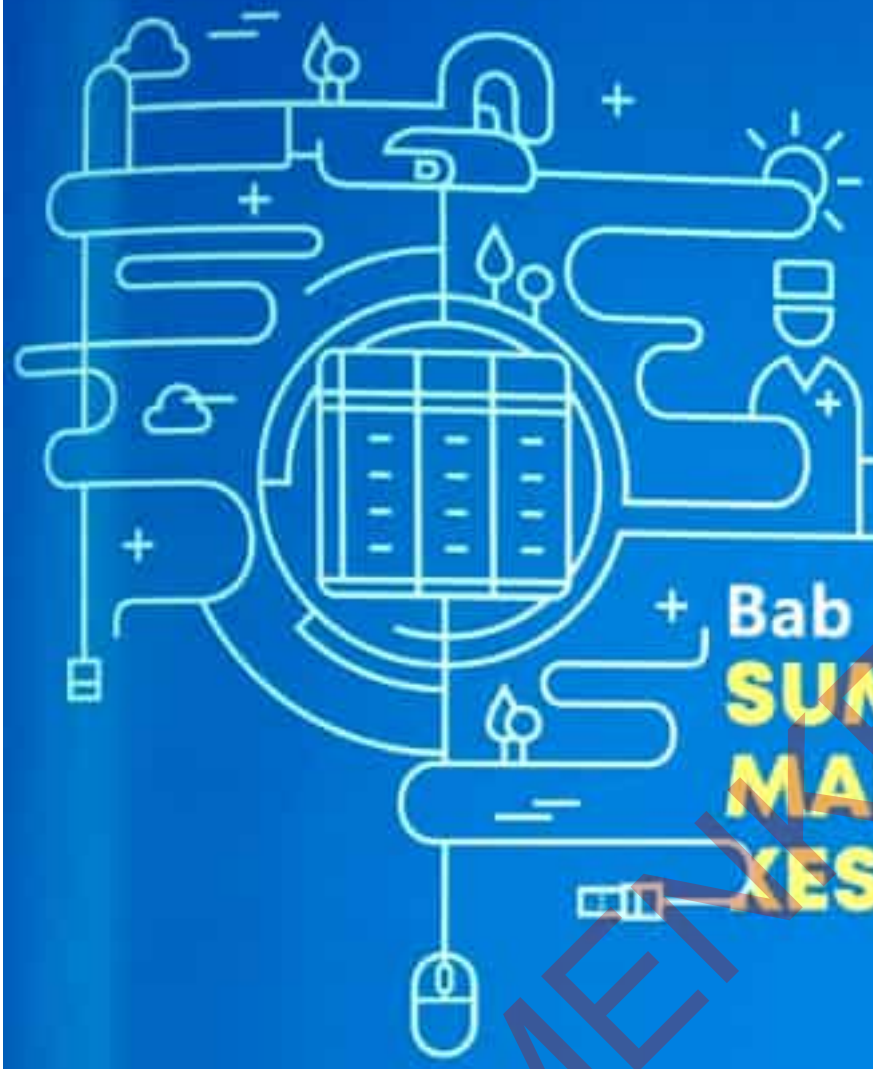

Bab III
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KEMENKES RI

KEMENKES RI

III. SDM KESEHATAN

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional. Komponen ini memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan. SDMK juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Pembahasan mengenai SDMK pada bab ini mencakup jumlah, rasio, registrasi, jumlah lulusan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan). Undang-Undang mengelompokkan tenaga kesehatan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) setiap tahunnya menggunakan pendekatan tugas dan fungsi SDMK dalam pengelolaan data SDMK. Jumlah SDMK di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 1.182.024 orang yang terdiri dari 864.410 orang tenaga kesehatan (73,13 %) dan 317.614 orang tenaga penunjang kesehatan (26,87%). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebanyak 29,23 % dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga kesehatan tradisional 0,06% dari total tenaga kesehatan. Sebagian besar SDM kesehatan terdistribusi di Pulau Jawa, secara khusus di Provinsi Jawa Timur sebanyak 158.128 tenaga (13,38%), Jawa tengah sebanyak 152.356 tenaga (12,89%) dan Jawa Barat sebanyak 122.558 tenaga (10,37%). Provinsi dengan jumlah SDM kesehatan paling sedikit yaitu Sulawesi Barat sebanyak 5.249 tenaga (0,44%), Kalimantan Utara sebanyak 6.020 tenaga (0,51%) dan Papua Barat sebanyak 6.252 tenaga (0,53%). Rincian lengkap mengenai rekapitulasi SDMK di Indonesia dapat dilihat di Lampiran 11-15.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.1
REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2019

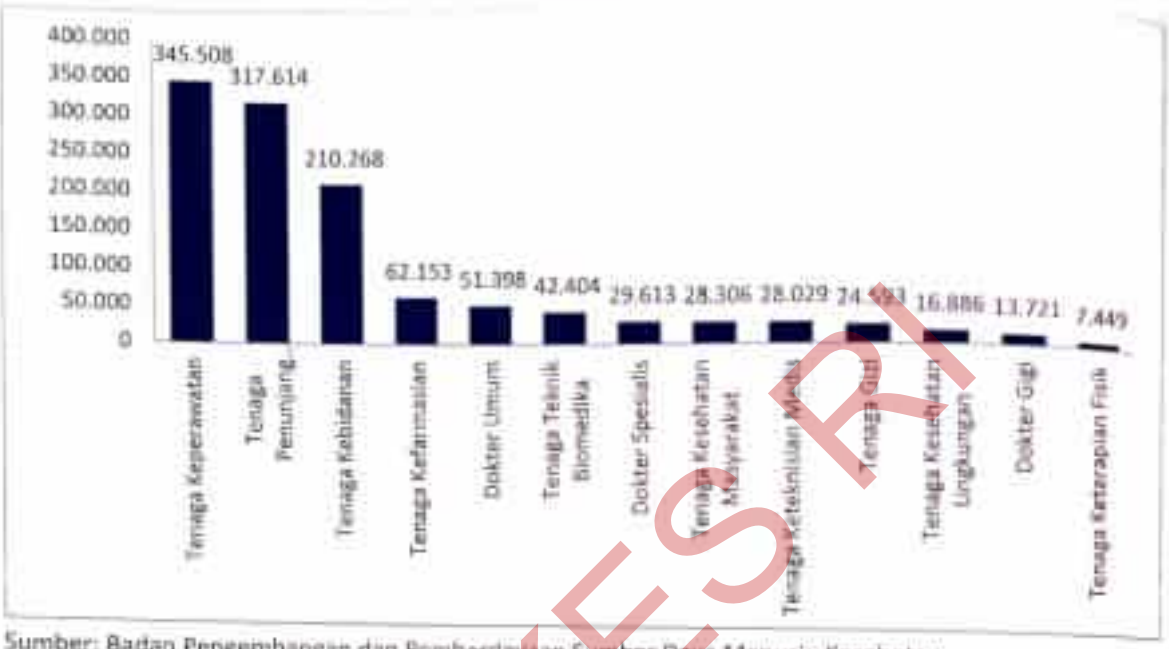

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id)

Tenaga medis yang dijabarkan pada bagian ini adalah tenaga yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai fungsinya. Proporsi tenaga medis terbanyak yaitu dokter sebanyak 53,16%. Sebanyak 57,2% tenaga medis berada di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta (13.887 orang), Jawa Timur (13.034 orang), dan Jawa Tengah (11.305 orang). Provinsi dengan tenaga medis paling sedikit adalah Papua Barat (342 orang), Maluku Utara (376 orang), dan Kalimantan Utara (400 orang).

GAMBAR 3.2
JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id)

KEMENKES RI

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

GAMBAR 3.3
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id)

Jumlah Tenaga Kesehatan yang bertugas di puskesmas di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 363.714 orang. Proporsi tenaga kesehatan di puskesmas terbanyak yaitu bidan sebesar 41,66% (151.529 orang), sedangkan proporsi tenaga kesehatan di puskesmas yang paling sedikit yaitu dokter gigi sebesar 2,16% (7.852 orang).

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga diatur pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Permenkes membedakan antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap, yaitu minimal satu orang dokter pada puskesmas non rawat inap, dan minimal dua orang dokter pada puskesmas rawat inap, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Secara nasional terdapat 19,97% puskesmas yang kekurangan dokter, 31,61% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup, dan 48,42% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.4

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

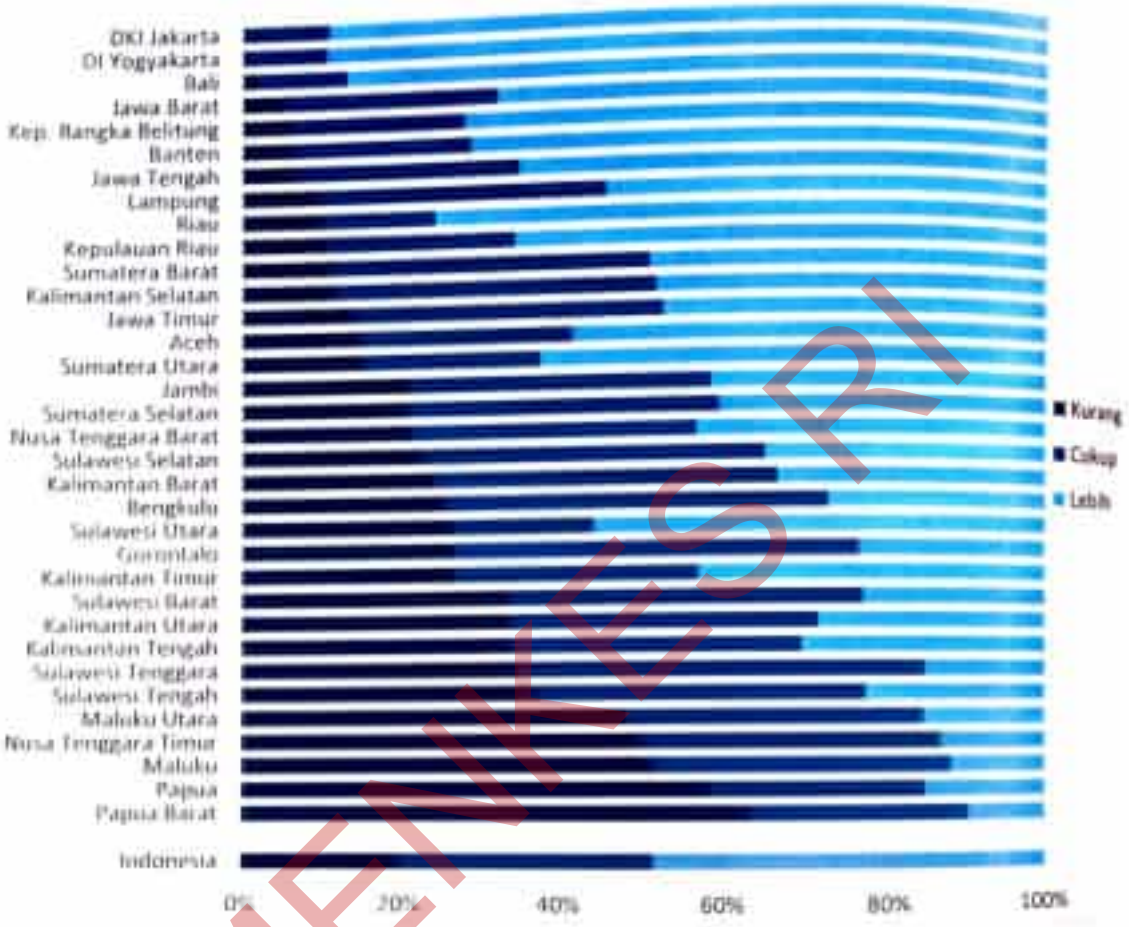

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

Dilihat dari proporsi puskesmas dengan kekurangan dokter terhadap puskesmas dengan status cukup dan lebih, sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kekurangan dokter di bawah 50%. Hanya tiga provinsi yang memiliki persentase kekurangan dokter di atas 50% yaitu Papua Barat (63,27%), Papua (58,22%), dan Maluku (51,66%). Sebaliknya, terdapat 13 provinsi dengan persentase puskesmas yang memiliki jumlah dokter berlebih terhadap total puskesmas di atas 50%, yaitu Di Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Riau, Kep. Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kep. Riau, Jawa tengah, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi utara, dan Lampung. Jika melihat angka nasional, proporsi puskesmas dengan jumlah dokter melebihi standar kebutuhan masih lebih tinggi dibandingkan proporsi puskesmas dengan jumlah dokter kurang dari standar.

Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dapat dilihat di Lampiran 11.e

KEMENKES RI

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Standar kecukupan dokter gigi di puskesmas adalah minimal satu orang, baik di puskesmas rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada tingkat nasional, terdapat 38,80% puskesmas memiliki dokter gigi dibawah standar minimal. Sedangkan proporsi sisanya yaitu 48,11% puskesmas dengan status jumlah dokter gigi cukup dan 13,09% puskesmas dengan jumlah dokter gigi melebihi standar minimal.

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA
TAHUN 2019

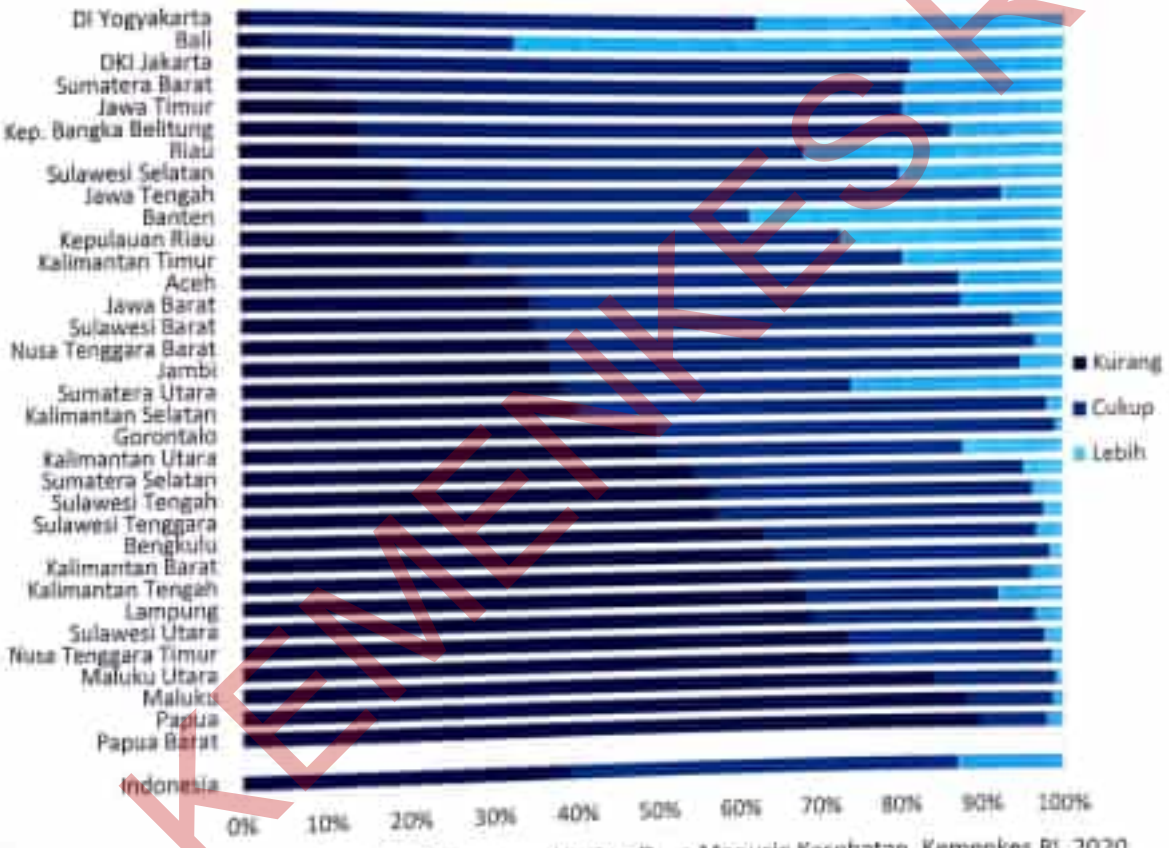

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

Gambaran kecukupan di tingkat provinsi menunjukkan bahwa terdapat 14 provinsi dengan persentase puskesmas lebih dari 50% memiliki dokter gigi kurang dari standar. Provinsi dengan persentase puskesmas memiliki dokter gigi kurang dari standar tertinggi adalah Papua Barat (89,80%), Papua (87,99%), dan Maluku (83,89%). Terdapat hanya satu provinsi dengan persentase di atas 50% puskesmas yang memiliki dokter gigi lebih dari standar minimal, yaitu Bali (67,50%). Secara nasional, provinsi dengan puskesmas memiliki dokter gigi kurang dari standar lebih tinggi dibandingkan puskesmas dengan dokter gigi cukup atau lebih dari standar.

Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dapat dilihat di Lampiran 11.e.

KEMENKES RI

c. **Kecukupan Perawat di Puskesmas**

Suatu puskesmas dianggap memiliki perawat yang cukup apabila memiliki minimal lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan minimal delapan perawat pada Puskesmas rawat inap. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Secara nasional pada tahun 2019, terdapat 77,90% Puskesmas memiliki jumlah perawat melebihi dari standar yang ditetapkan. Hanya 15,79% puskesmas dengan kategori kurang, dan 6,32% puskesmas dengan kategori cukup.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA
TAHUN 2019

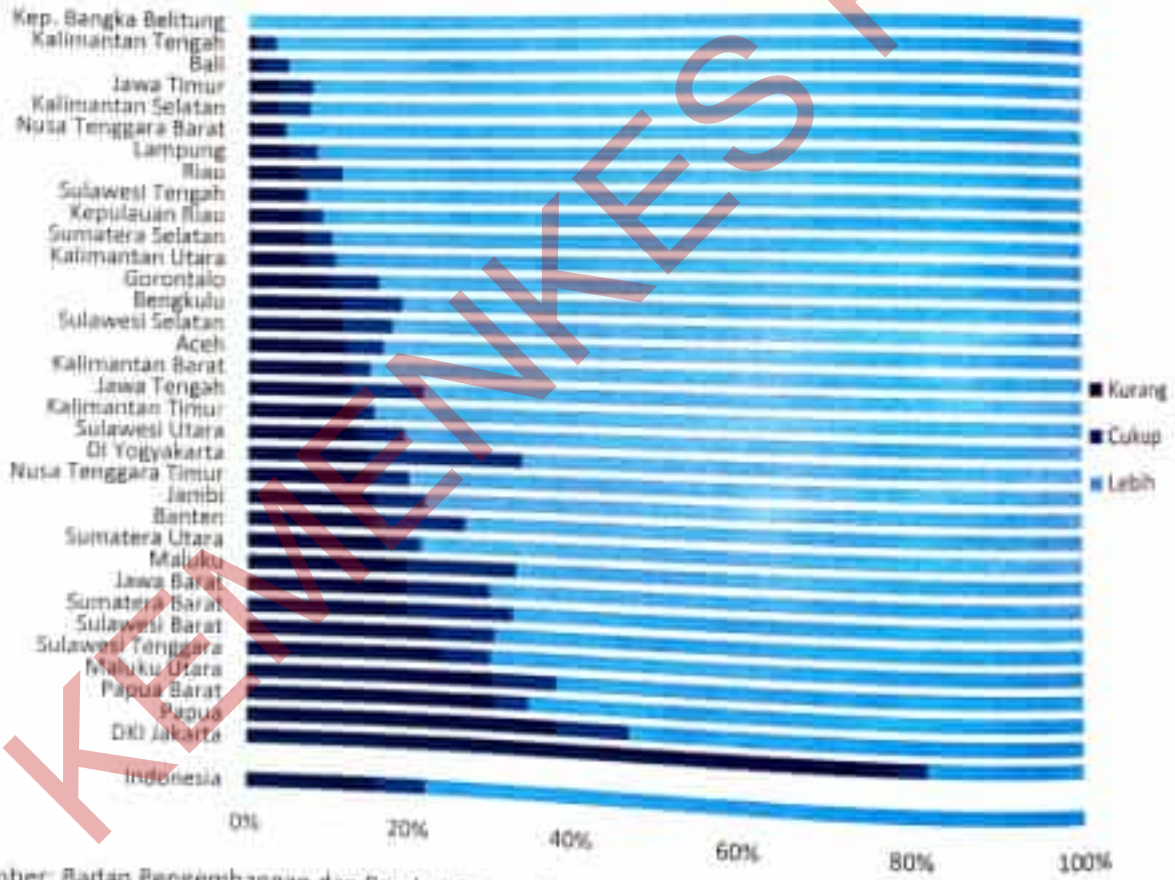

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

Sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kecukupan perawat berlebih. Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase puskesmas dengan kekurangan perawat yang tinggi (77,98%). Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta kekurangan perawat di puskesmas. Kekurangan ini dapat disebabkan karena sebagian besar puskesmas di Provinsi DKI Jakarta adalah "puskesmas kelurahan" yang setara dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) di provinsi lain, sehingga puskesmas-puskesmas tersebut tidak terlalu memperhatikan kecukupan jumlah tenaga perawat.

KEMENKES RI

Jika dilihat pada tingkat provinsi dengan puskesmas memiliki perawat lebih dari standar, semua provinsi menunjukkan persentase di atas 50%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu permasalahan distribusi perawat di Indonesia adalah berlebihnya jumlah perawat di sebagian besar puskesmas. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan perawat dapat dilihat di Lampiran 11.e.

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pada tingkat nasional, terdapat 83,53% Puskesmas memiliki jumlah bidan lebih dari standar yang ditetapkan. Hanya 12,91% puskesmas dengan kategori kurang, dan 3,56% puskesmas dengan kategori cukup.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA
TAHUN 2019

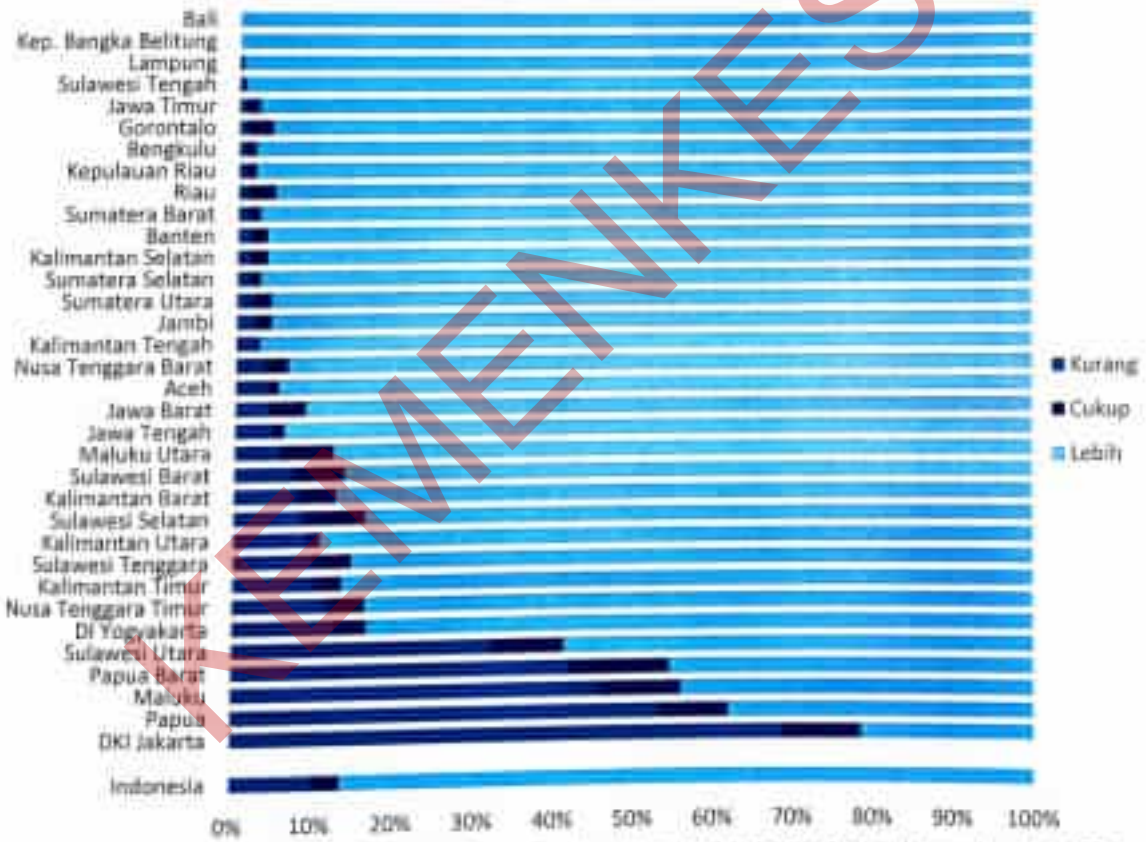

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id). Diolah oleh Pusat Data dan Informasi.

Pada kategori puskesmas yang memiliki jumlah bidan kurang dari standar minimal, sebagian besar provinsi memiliki persentase yang rendah (< 50%). Hanya dua provinsi memiliki persentase di atas 50%, yaitu DKI Jakarta sebesar 68,45% dan Papua sebesar 53,26%. DKI memiliki persentase

KEMENKES RI

rendah karena sebagian besar puskesmas di Provinsi DKI Jakarta adalah "puskesmas kelurahan" yang setara dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) di provinsi lain, sehingga puskesmas-puskesmas tersebut tidak terlalu memperhatikan kecukupan bidan.

Secara nasional, sebagian besar puskesmas memiliki bidan lebih dari standar minimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu permasalahan distribusi bidan di Indonesia adalah berlebihnya jumlah bidan di sebagian besar puskesmas. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan bidan dapat dilihat di Lampiran 11.e.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit). Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019

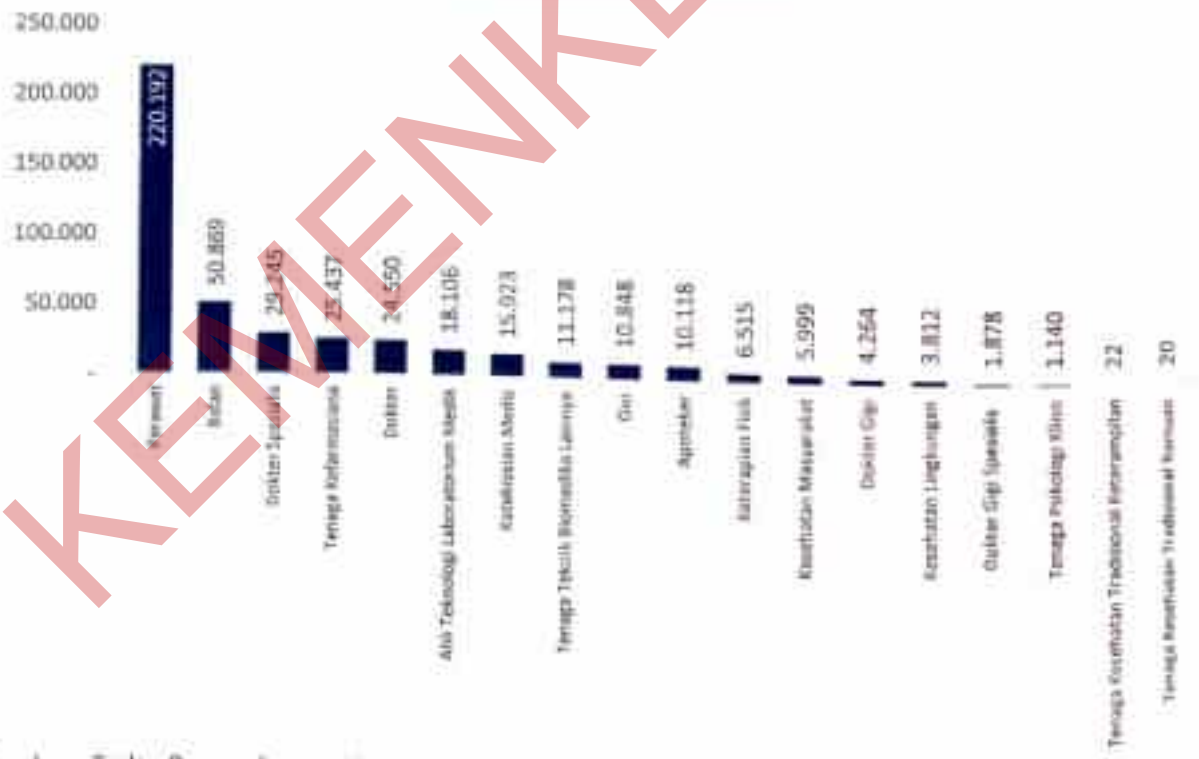

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,Kemenkes RI. 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id)

Terdapat 440.116 SDMK di rumah sakit. Proporsi tenaga kesehatan terbesar adalah perawat sebesar 50% sedangkan proporsi tenaga kesehatan paling rendah adalah tenaga kesehatan

KEMENKES RI

tradisional keterampilan dan tenaga Kesehatan tradisional ramuan. Rincian lengkap mengenai jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 11-16.

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan spesialis dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspesialis, dan spesialis gigi dan mulut. Pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, anak, dan bedah. Pelayanan spesialis penunjang meliputi pelayanan radiologi, anestesiologi, patologi klinik, patologi anatomi,dan rehabilitasi medik.

GAMBAR 3.9
JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA

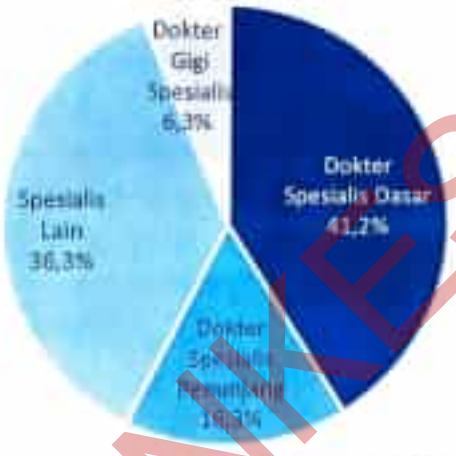

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id)

Jumlah dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 34.064 orang dengan proporsi terbanyak yaitu dokter spesialis dasar (41,2%) dan proporsi paling sedikit yaitu dokter gigi spesialis (6,3%). Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu dokter spesialis penyakit dalam dengan jumlah 4.227 orang (12,4%).

Provinsi dengan jumlah dokter spesialis terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu 6.174 orang dan Jawa Timur sebanyak 5.156 orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit adalah Sulawesi Barat (93 orang) dan Maluku (96 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 11.d.

3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)

Sebagai upaya percepatan pembangunan daerah, pemerintah pusat telah menetapkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai sasaran utama pembangunan. Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 2421/Dt.7.2/04/2015.

GAMBAR 3.10
KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)

KEMENKES RI

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENASNo 2421/Dt.7.2/04/2015

Daerah 3T mencakup 143 kabupaten/kota yang berada di 27 provinsi. Pemenuhan SDMK di daerah 3T tidak hanya membutuhkan peran pusat tetapi juga peran dinask esehatan provinsi dan dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan menganalisis kebutuhan wilayahnya dan mengajukannya kepada pemerintah pusat.

GAMBAR 3.11
PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN
(DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PERAWAT, DAN BIDAN) DI DAERAH 3T
TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2019

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 (http://bppsdmk.kemkes.go.id)

Proporsi kabupaten/kota dengan kategori 3T adalah 27,8% dari total kabupaten/kota. SDMK di daerah 3T tersebut sebesar 13,9% terhadap total SDMK secara nasional. Proporsi berdasarkan jenis tenaga kesehatan di daerah 3T terhadap total SDMK di Indonesia, yaitu dokter spesialis sebesar 5,4%, dokter sebesar 10,5%, dokter gigi sebesar 9,3%, perawat sebesar 15,3%, dan bidan sebesar

KEMENKES RI

18,7%. Provinsi dengan jumlah SDMK di daerah 3T terbanyak yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 19 jumlah kabupaten/kota 3T dan total SDMK sebanyak 19.986 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah SDMK di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tahun 2019 dapat dilihat di Lampiran 11.f.

B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 44 mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang. STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan setelah tenaga kesehatan yang mengajukan dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bertanggung jawab terhadap registrasi dokter dan dokter gigi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Registrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Selain itu dengan adanya registrasi, KKI memiliki pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter/dokter gigi.

GAMBAR 3.12
JUMLAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2019

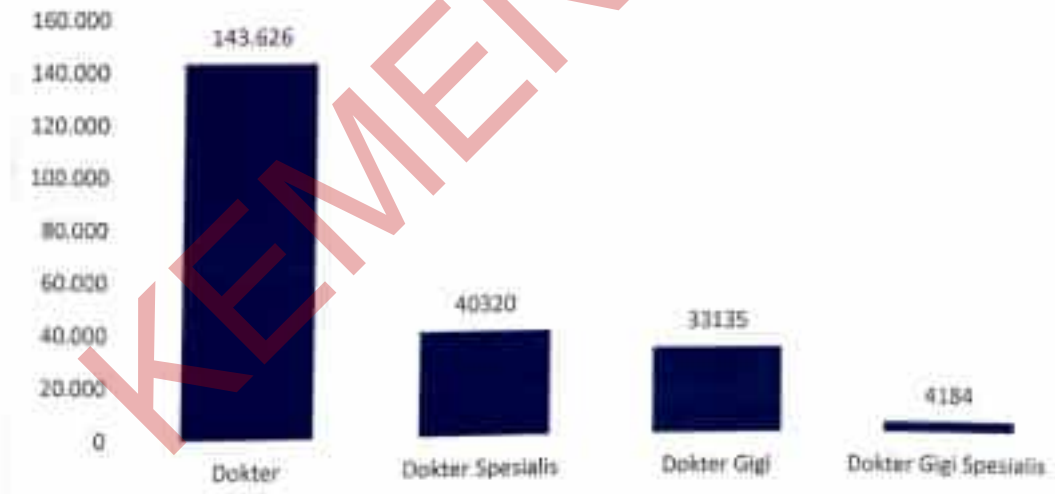

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2019

Jumlah tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 221.265 orang. Tenaga dokter merupakan tenaga medis yang paling banyak memiliki STR, yaitu sejumlah 143.626 orang. Sementara itu, tenaga dokter gigi yang memiliki STR sebanyak 4.184 orang. Walaupun jumlah dokter yang memiliki STR banyak, namun tidak semua tenaga ini bekerja sesuai fungsinya, yaitu di pelayanan medis. Hal ini dapat merupakan salah satu penyebab distribusi dokter yang kurang merata dan adanya kekurangan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa provinsi. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang memiliki STR dapat dilihat di Lampiran 11.g.

KEMENKES RI

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan mengatur kewenangan lembaga Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk mengelola registrasi tenaga kesehatan selain tenaga dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis. Dalam pasal 2 peraturan tersebut mengatur agar setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Untuk memperoleh izin dari pemerintah diperlukan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan berlaku secara nasional selama lima tahun. Setelah lima tahun, setiap tenaga Kesehatan harus melakukan registrasi ulang (re-registrasi) setelah memenuhi syarat.

KTKI menerbitkan STR bagi 26 jenis profesi kesehatan yang terdiri dari: Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Ahli Kesehatan Masyarakat, Promotor Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Fisioterapi, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Akupunktur Terapis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Refraksionis Optisien, Teknisi Gigi, Penata Anastesi, Terapis Gigi dan Mulut, Audiologis, Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetik, Tradisional Komplementer, dan Tenaga Psikolog Klinis.

Penerbitan STR terdiri dari pengajuan baru dan registrasi ulang bagi pemilik STR yang masa berlakunya telah habis. STR baru yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 140.301 surat. Proporsi terbanyak STR yang diterbitkan adalah untuk jenis tenaga perawat (50,8%) dan bidan (29,3%).

GAMBAR 3.13
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

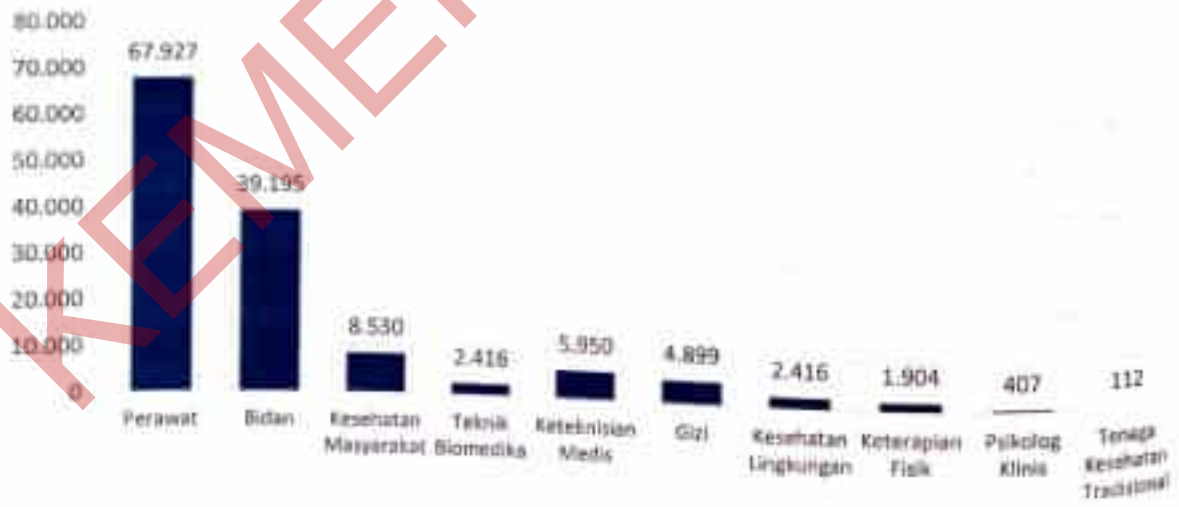

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2020

Jika dilihat distribusi penerbitan STR tenaga Kesehatan berdasarkan wilayah, Provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru adalah Jawa Timur sebanyak 19.672 orang, Jawa Barat sebanyak 17.700 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 14.268 orang. Secara umum provinsi-provinsi tersebut memiliki lulusan tenaga kesehatan terbanyak, oleh karena itu jumlah tenaga kesehatan yang melakukan registrasi baru lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.14

JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2019

Registrasi ulang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan surat tanda registrasi yang telah habis masa berlaku. Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan registrasi ulang tahun 2019 sebanyak 104.735 orang. Jumlah tenaga perawat dan bidan yang melakukan registrasi ulang hampir berimbang, yaitu perawat sebanyak 46.857 orang dan bidan sebanyak 45.144 orang. Sedangkan, tenaga psikologi klinis hanya sedikit yang melakukan registrasi ulang, yaitu sebanyak 9 orang.

GAMBAR 3.15

JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

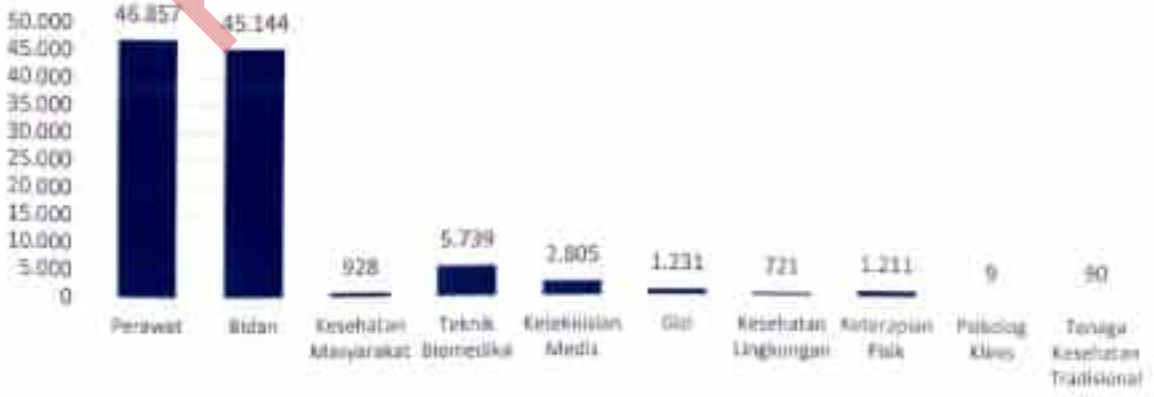

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Berdasarkan wilayah, provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 13.207 tenaga kesehatan dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.067 tenaga Kesehatan. Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah tenaga Kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru, berada pada urutan ke-5 terbanyak pada registrasi ulang tenaga Kesehatan. Rincian lengkap mengenai jumlah penerbitan STR baru dan STR ulang tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 12.b dan 12.c.

GAMBAR 3.16

JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

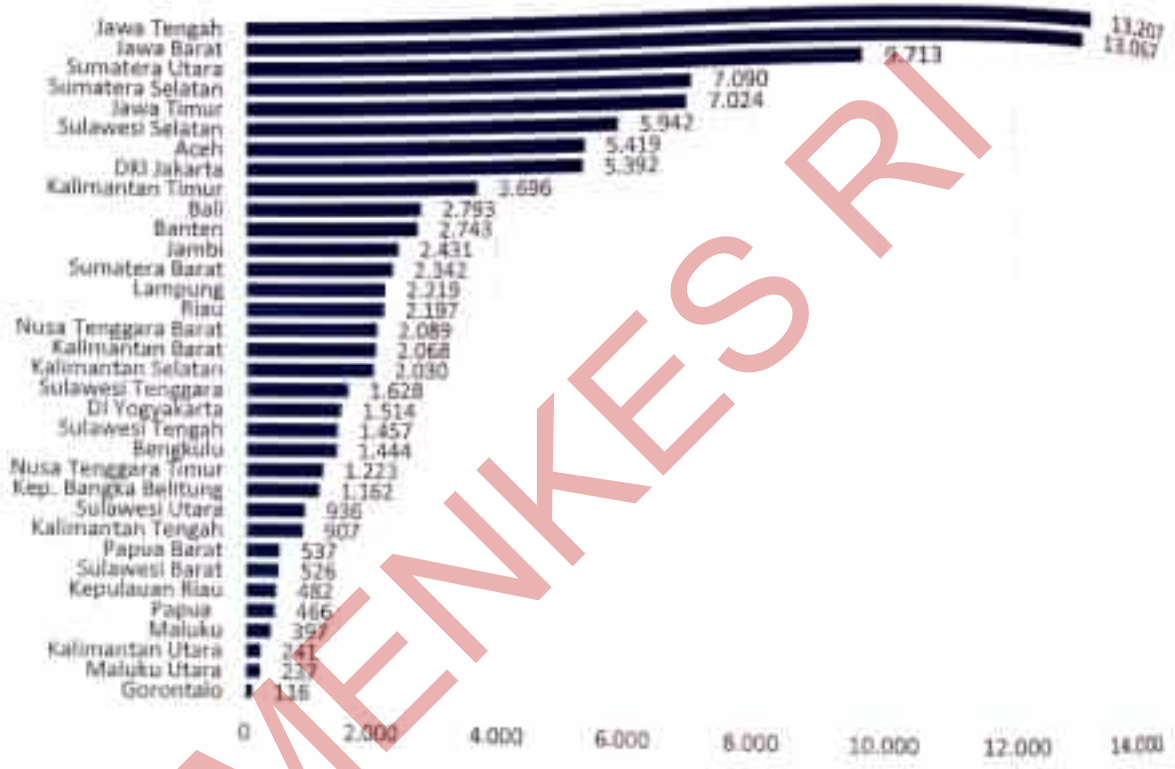

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2019

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Pengangkatan PTT dalam waktu tertentu bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap). Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengangkatan dan penempatan PTT dilakukan untuk dokter dan bidan. Tenaga dokter yang dimaksud adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah

KEMENKES RI

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dokter PTT dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa. Dokter PTT dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa penugasan.

Penempatan bidan PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan, tidak ada lagi pengangkatan baru tenaga kesehatan dengan status PTT sejak tahun 2016. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan berupa program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015.

Tenaga dokter yang masih bertugas PTT per 31 Desember 2019 berjumlah 4 orang dengan rincian lokasi penempatan (Kriteria Biasa: 2 orang, dan Kriteria Sangat Terpencil: 2 orang), dan dokter gigi berjumlah 2 orang dengan lokasi penempatan (Kriteria Terpencil: 1 orang, dan Kriteria Sangat Terpencil: 1 orang). Sementara itu, bidan yang bertugas per 31 Desember 2019 berjumlah 49 orang yang tersebar di 15 provinsi dengan lokasi penempatan (Kriteria Biasa: 23 orang, Kriteria Terpencil: 14 orang dan Kriteria Sangat Terpencil: 12 orang).

GAMBAR 3.17
JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2019

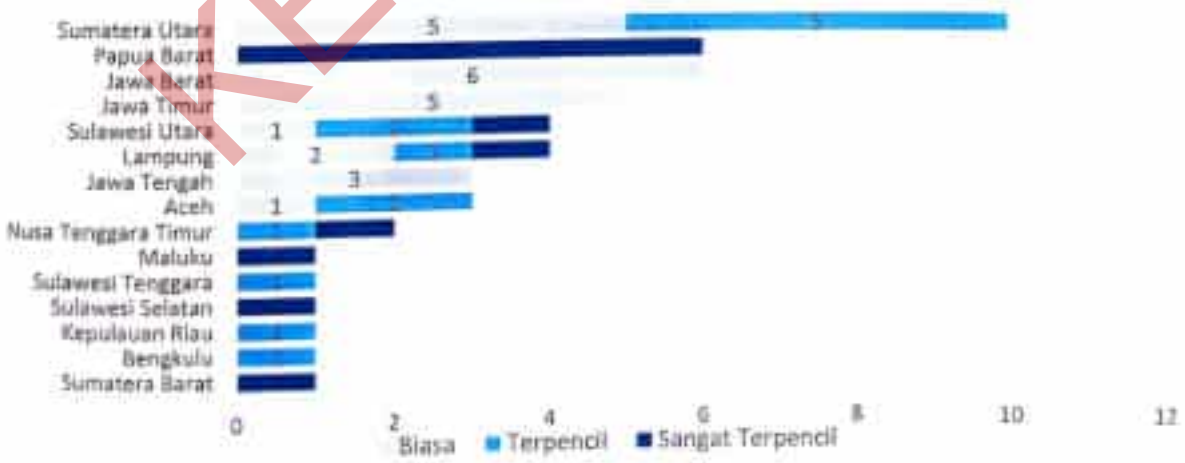

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2020.
Ket: Sebanyak 19 provinsi sudah tidak ada PTT

KEMENKES RI

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus

a. Penugasan Khusus Tenaga Residen

Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen.

Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior (pembiayaan pendidikan secara mandiri) dan residen pasca jenjang I (pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan). Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan, sedangkan residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Sebanyak 339 orang residen dokter spesialis dalam penugasan khusus di Indonesia tahun 2020. Selama tiga tahun terakhir jumlah ini terus menurun dimana pada tahun 2017 sebanyak 613 orang, dan 2018 sebanyak 490 orang. Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar di regional Sumatera sebesar 34,2%, diikuti oleh regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 22,4%, dan Jawa-Bali sebesar 21,5%. Residen dokter spesialis terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (34 orang), sedangkan di DKI Jakarta tidak terdapat residen dokter spesialis pada tahun 2020. Rincian lengkap mengenai jumlah peserta penugasan khusus residen dokter spesialis dapat dilihat di Lampiran 11.h.

GAMBAR 3.18
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2019

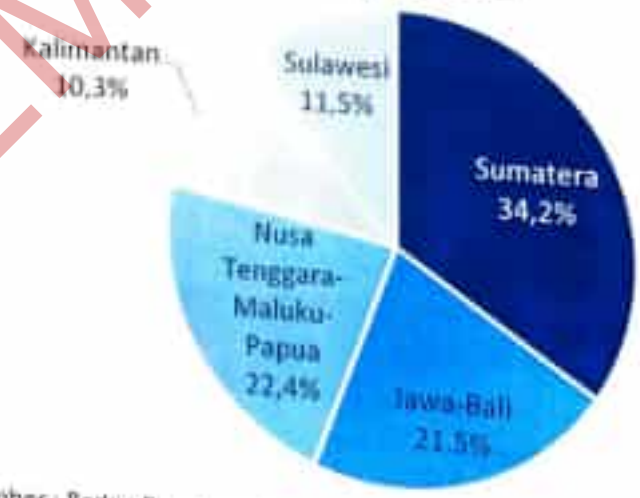

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

KEMENKES RI

b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individu. Landasan hukum program ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat. Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Program penugasan khusus ini bertujuan untuk: menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

3. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat Tim)

Penugasan Tenaga kesehatan Nusantara Sehat berbasis tim (tim NS) minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan dari sembilan jenis tenaga di puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Tim NS akan ditempatkan di puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masa tugas selama 2 tahun.

Penempatan Nusantara Sehat berbasis tim sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 14 batch. Batch I-II dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penempatan di 120 puskesmas. Batch III-V dilaksanakan pada tahun 2016, dengan penempatan di 131 puskesmas. Batch VI-VIII dilaksanakan pada tahun 2017 dengan penempatan di 188 puskesmas. Batch IX-XI dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penempatan di 156 puskesmas. Batch XII-XIV dilaksanakan tahun 2019 dengan penempatan tim NS yang masih aktif pada 173 puskesmas, 87 kabupaten/kota, dan 25 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.i.

Jenis tenaga yang paling banyak ditempatkan di tahun 2019 adalah perawat dan tenaga gizi, masing-masing sebanyak 160 orang (16,2%) dan tenaga yang paling sedikit adalah dokter sebanyak 24 orang (2,4%) dan dokter gigi sebanyak 8 orang (0,8%). Tim NS terbanyak ditempatkan di Aceh (119 orang) dan Sulawesi Tenggara (109 orang), sedangkan di Sumatera Barat hanya terdapat 5 tim NS. Sebanyak 9 provinsi lainnya (Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo) tidak mendapatkan penempatan tim NS pada tahun 2019. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.j.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.19
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT HINGGA TAHUN 2019

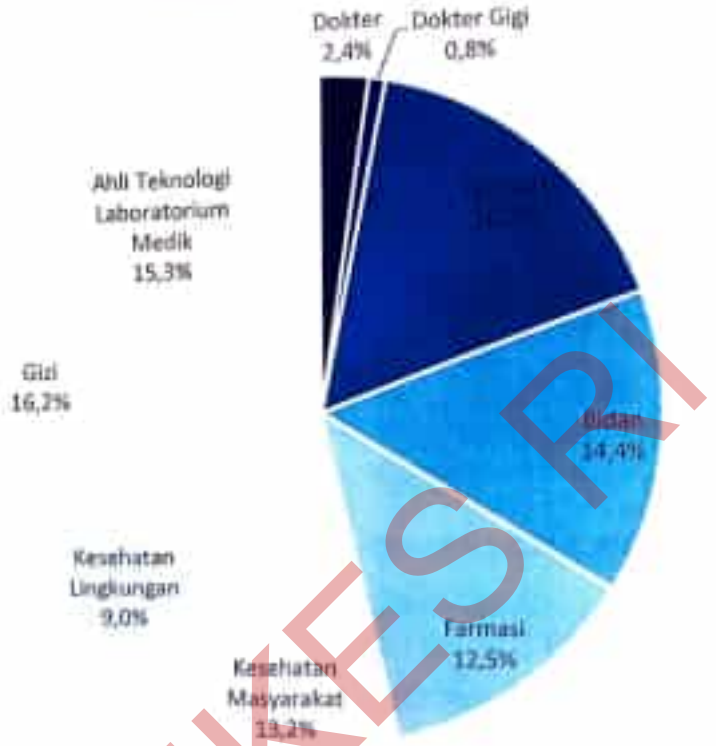

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

4. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individu (Nusantara Sehat Individu)

Penugasan Tenaga kesehatan Nusantara Sehat Individu (NS Individu) adalah penugasan khusus yang penempatannya berbentuk individu yang disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung Nusantara Sehat. Penugasan ini terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. NS Individu akan ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 2 tahun dengan evaluasi pada 1 tahun pertama penugasan.

Penempatan NS Individu sampai dengan tahun 2019 sebanyak 20 periode. Sampai dengan tahun 2019 terdapat NS Individu sebanyak 3.574 orang, dengan penempatan di 2.179 puskesmas, 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Nusantara Sehat Individu dapat dilihat di Lampiran 11.k.

Perawat merupakan jenis tenaga NS Individu yang paling banyak ditempatkan selama tahun 2019, yaitu sebanyak 644 orang (18,0%), diikuti oleh tenaga gizi sebanyak 564 orang (15,8%) dan ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 542 orang (15,2%), sedangkan dokter gigi merupakan tenaga NS paling sedikit, yaitu sebanyak 117 orang (5,0%). Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan penempatan tenaga NS Individu terbanyak, yaitu 505 orang, dan Kep. Bangka Belitung dengan

KEMENKES RI

tenaga NS individu paling sedikit, yaitu sebanyak 21 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada NS individu dapat dilihat di Lampiran 11.I.

GAMBAR 3.20
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU HINGGA TAHUN 2019

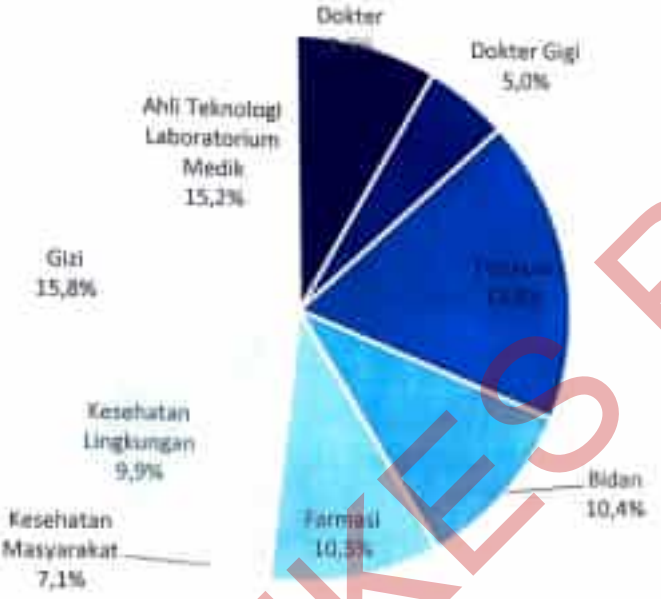

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Program Internsip Dokter

Program Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Penempatan dokter program internsip di fasilitas pelayanan kesehatan perlu disinergikan dengan program pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.

Peserta program internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku selama menjalani internsip.

Dokter peserta program internsip ikatan dinas ditempatkan selama satu tahun dan wajib melaksanakan tugas pasca internsip di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

KEMENKES RI

Pemberangkatan dokter peserta internsip dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Jumlah dokter peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari 2019 sebanyak 3.211 orang, bulan Mei-Juni sebanyak 2.057 orang, bulan September-Oktober sebanyak 3.207 orang, dan bulan November-Desember sebanyak 3.644 orang. Secara regional, proporsi terbesar dokter peserta internsip yaitu regional Jawa-Bali (50,5%) dengan jumlah dokter peserta internsip terbanyak adalah Jawa Timur (1.817 orang). Sulawesi Barat memiliki jumlah dokter peserta internship paling sedikit, yaitu 55 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta internsip tahun 2019 dapat dilihat di Lampiran 11.m.

GAMBAR 3.21

JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2019

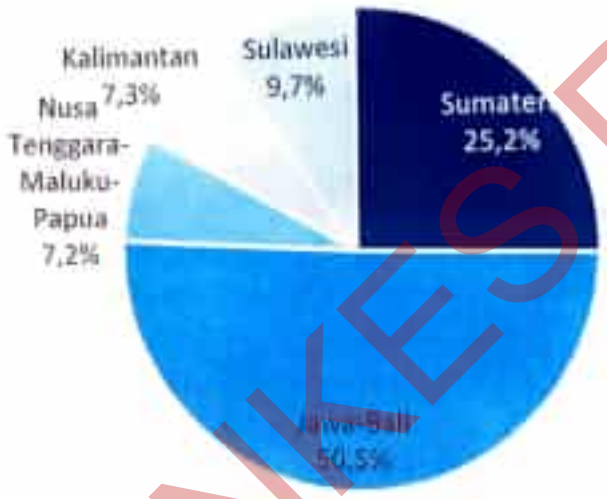

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

6. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelayanan Kesehatan spesialistik, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, pemerataan distribusi dokter spesialis, dan memastikan keberadaan dan ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit memenuhi standar minimal yang diterapkan maka ditetapkan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, maka Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut juga mencantumkan bahwa Peserta PGDS menerima bantuan biaya Pendidikan.

KEMENKES RI

Dalam menyelenggarakan program PGDS, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kolegium, organisasi profesi, dan institusi Pendidikan. Peran institusi dalam PDGS adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan, bertanggung jawab terhadap penyelenggaran PGDS; mulai dari proses rekrutmen hingga penempatan peserta (memberikan tunjangan, mengatur penempatan, pembinaan dan pengawasan dan, menyusun regulasi agar terlaksananya program PGDS secara optimal).
2. Pemerintah Daerah, bertanggungjawab memastikan kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, peralatan, obat-obatan, tempat tinggal/ rumah dinas, insentif daerah sesuai kemampuan daerah, dan jasa medik/jasa pelayanan sebagai hak dokter sesuai kinerja.
3. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), bertanggungjawab menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) peserta PGDS.
4. Fakultas Kedokteran, bertanggungjawab membuat mekanisme yang mensyaratkan calon PGDS menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program PGDS.
5. Ikatan Dokter Indonesia (ID), bertanggungjawab dalam mendukung kebijakan perhimpunan masing-masing demi terlaksananya program PGDS, mendorong MPPK dan MKKI untuk membahas lebih rinci peran masing-masing.

Sebanyak 605 dokter spesialis ditempatkan di RS milik pemerintah di 34 provinsi, termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI yang mengikuti program PGDS pada tahun 2019. Peserta PGDS terbagi menjadi peserta Tubel (tugas belajar) dan peserta mandiri. Sekitar setengah dari peserta PGDS merupakan peserta Tubel, yaitu sebanyak 318 orang, dan peserta mandiri sebanyak 287 orang. Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan penempatan tenaga kesehatan pada PGDS terbanyak, yaitu sebanyak 44 orang dan 43 orang. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki penempatan paling sedikit, yaitu sebanyak 3 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2019 dapat dilihat di Lampiran 11.n.

GAMBAR 3.22
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2019

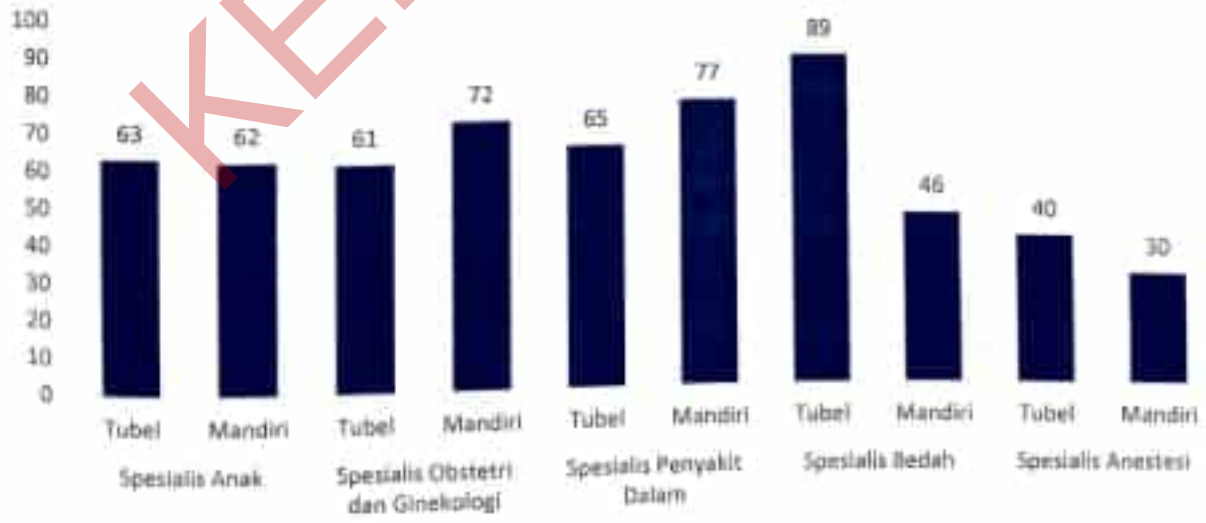

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

KEMENKES RI

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Pengadaan tenaga kesehatan ini dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui penjaminan mutu dan kompetensi lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012. Dengan demikian, pembinaan akademik Politeknik Kesehatan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun pengaturan di luar akademik, yaitu pembinaan teknis tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes. Sebanyak 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 34 provinsi. Poltekkes, diantaranya, memiliki jenjang pendidikan Diploma III, Diploma IV, dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), yang terdiri dari 270 program studi strata Diploma III (266 program studi reguler dan 4 program studi PJJ) dan 139 program studi strata Diploma IV. Kelompok jurusan di Poltekkes terdiri dari:

1. Keperawatan, yang terdiri dari Keperawatan dan Keperawatan Gigi;
2. Kebidanan;
3. Kefarmasian, yang terdiri dari Analis Farmasi dan Makanan dan Farmasi,
4. Kesehatan Tradisional;
5. Kesehatan Lingkungan;
6. Gizi;
7. Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Promosi Kesehatan;
8. Keterapian Fisik, yang terdiri dari Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, dan Akupunktur;
9. Keteknisan Medis, yang terdiri dari Teknik Gigi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Teknologi Bank Darah;
10. Teknik Biomedika, yang terdiri dari Analisis Kesehatan, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Elektromedik, dan Ortotik Prostetik.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 9, Kementerian Kesehatan mengadakan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan. Melalui program ini diharapkan pada tahun 2020 seluruh tenaga kesehatan yang ada

KEMENKES RI

dapat memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Diploma III. Salah satu cara yang diterapkan dalam program ini adalah dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan ini bertujuan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Jenis pendidikan dalam Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan terdiri dari 9 jenis pendidikan Diploma III bidang kesehatan yaitu Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Gizi, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah. Penyelenggara RPL adalah perguruan tinggi kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2018 sesuai dengan Kepmenristekdikti Nomor 181/M/KPT/2018 baik Poltekkes Kemenkes maupun perguruan tinggi kesehatan milik swasta dengan jumlah total 496 program studi yang pelaksanaannya dilakukan di seluruh Poltekkes Kemenkes dan 50 PTN/PTS lainnya. Masa studi RPL terdiri dari 2- 3 semester.

Program studi PJJ dibuka di Poltekkes Kupang dan Kalimantan Timur. Selain itu, Poltekkes juga membuka program studi Magister Terapan dan Profesi Terapan. Program studi Magister Terapan dibuka di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*). Sementara itu, program studi Profesi dibuka di Poltekkes Semarang, Surakarta, dan Palu.

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 19.323 orang lulusan Diploma III dan 8.847 orang lulusan Diploma IV. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 8.307 orang lulusan Diploma III dan 2.162 orang lulusan Diploma IV. Sementara itu, Kesehatan Tradisional merupakan program studi dengan lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 89 orang. Secara umum, hampir semua program studi memiliki lulusan lebih banyak untuk Diploma III dibandingkan dengan Diploma IV, kecuali pada program studi Keterapian Fisik dengan jumlah lulusan 484 orang lulusan Diploma III dan 351 orang lulusan Diploma III. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.e dan Lampiran 16.g.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.23

JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

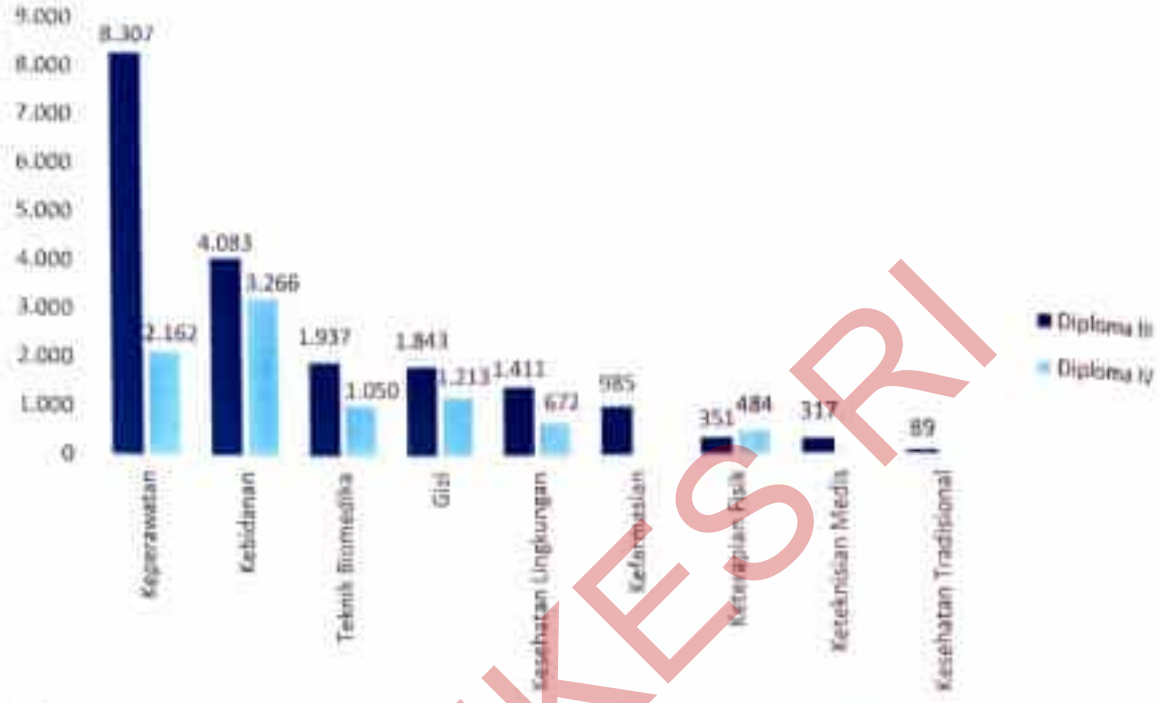

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

Poltekkes telah menghasilkan lulusan program studi Diploma III RPL sebanyak 8.709 orang pada tahun 2019. Lulusan terbanyak adalah dari program studi Keperawatan, yaitu 5.459 orang, sedangkan program studi keteknisian medis (perekam dan informasi Kesehatan) sejumlah 28 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III RPL Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.f.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.24
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III RPL
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kemenkes RI, 2020.

Selain jenjang Diploma, pada tahun 2019 Poltekkes juga menghasilkan lulusan program studi PJJ di Poltekkes Kupang sebanyak 397 orang dan Poltekkes Kalimantan Timur sebanyak 88 orang. Program studi Magister Terapan di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*) memiliki lulusan sebanyak 17 orang. Sedangkan, program studi Profesi memiliki lulusan sebanyak 165 orang di Poltekkes Semarang, 92 orang di Poltekkes Surakarta, dan 56 orang di Poltekkes Palu.

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Lulusan tenaga Kesehatan selain berasal dari Poltekkes Kementerian Kesehatan, juga banyak dihasilkan oleh perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019. Pendidikan tinggi akan selalu menjadi modal penting lahirnya generasi penerus yang memiliki keunggulan di dalam berbagai bidang. Karenanya, Ditjen Dikti akan terus memberikan pelayanan terbaik dalam ruang lingkup pendidikan tinggi, sehingga cita-cita untuk menjadikan Sumber Daya Manusia yang unggul dapat tercapai dengan baik.

Sampai dengan 31 Desember 2019, terdapat sebanyak 4.670 lembaga perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 27.779 program studi, 1.732.308 mahasiswa baru, 8.043.480 mahasiswa terdaftar, 1.247.116 lulusan dan 294.820 dosen. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, Profesi, S2, S2 Terapan, Spesialis 1, Spesialis 2, dan S3. Perguruan tinggi,

KEMENKES RI

khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang kesehatan, jumlah lulusan tenaga kesehatan pada tahun 2019 sebanyak 335.308 orang. Menurut jenis tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 138.206 orang, diikuti oleh bidan (58.199 orang), tenaga teknik kefarmasian (32.859 orang) dan dokter (25.636 orang). Sementara itu, lulusan perguruan tinggi untuk tenaga teknik biomedika paling sedikit, yaitu sejumlah 2.743 orang.

GAMBAR 3.25
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sejumlah 45.213 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 39.503 orang, dan Jawa Barat sejumlah 36.134 orang. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kep. Bangka Belitung jumlah lulusan perguruan tinggi bidang Kesehatan tidak mencapai 1.000 orang, yaitu Kalimantan Utara sebanyak 362 orang, dan Kep. Bangka Belitung sebanyak 656 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 16.h.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.26
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

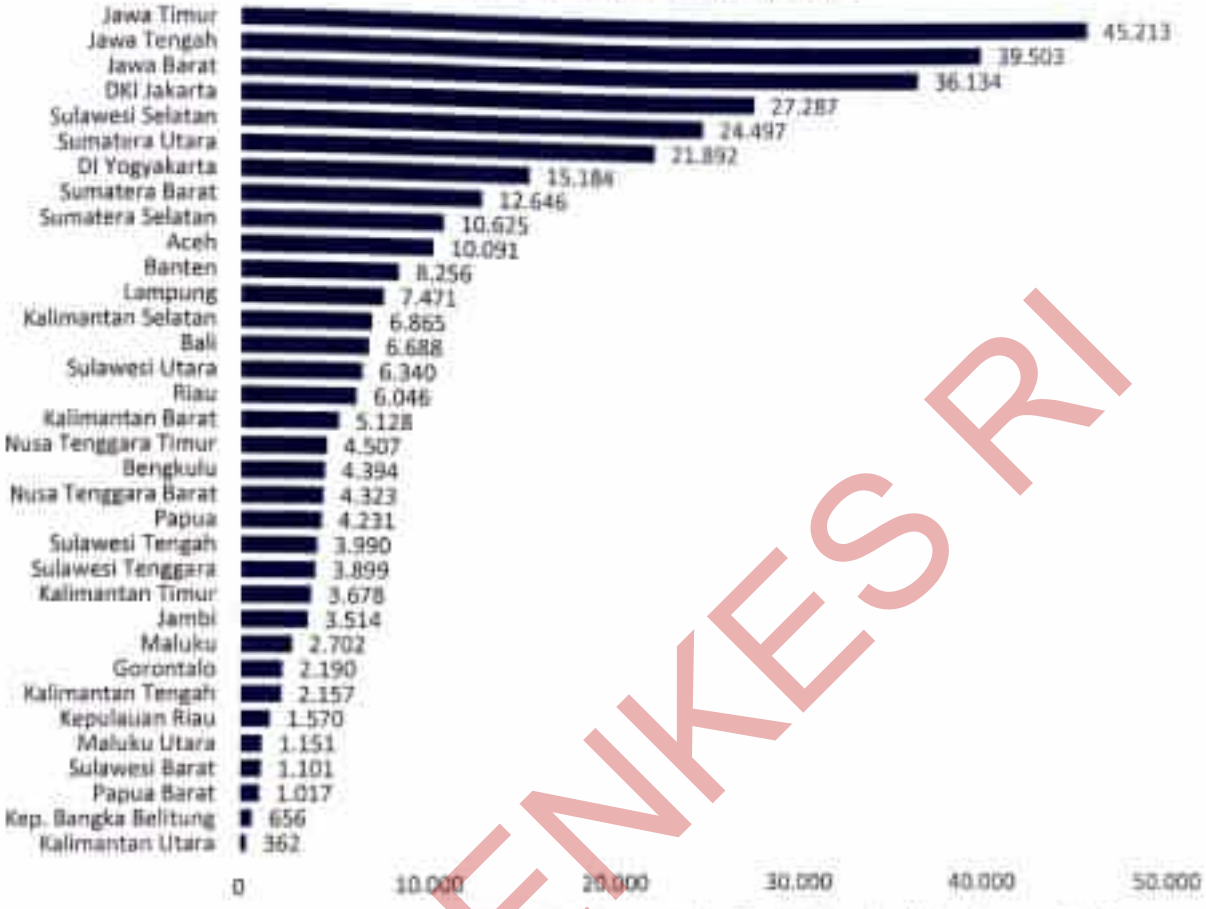

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Jumlah lulusan pergururan tinggi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tahun 2019 sebanyak 3.217 orang yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Lulusan dokter spesialis terbanyak adalah dokter spesialis bedah sejumlah 443 orang, diikuti oleh dokter spesialis penyakit dalam sejumlah 338 orang. Sementara itu, dokter spesialis lain, diluar yang disebutkan bidang spesialisasi secara spesifik berjumlah 1.056 orang, dan dokter gigi spesialis berjumlah 356 orang. Dokter spesialis lulusan tahun 2019 yang paling sedikit adalah dokter spesialis rehabilitasi medik sejumlah 11 orang.

KEMENKES RI

GAMBAR 3.27
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2019

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi dokter spesialis dan dokter spesialis gigi menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 16.i.

***

KEMENKES RI

Bab IV
PEMBIAYAAN KESEHATAN

KEMENKES RI

KEMENKES RI

IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat.

Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan baik di pusat maupun di daerah, anggaran kesehatan adalah anggaran kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Dana Desa.

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Alokasi anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 71,12 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 67,28 trilyun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu alokasi sebesar 61,86 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 57,35 triliun rupiah. Dilihat dari persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2019 mengalami kenaikan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 94,60%, naik dari tahun 2018 sebesar 92,70%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2010-2019

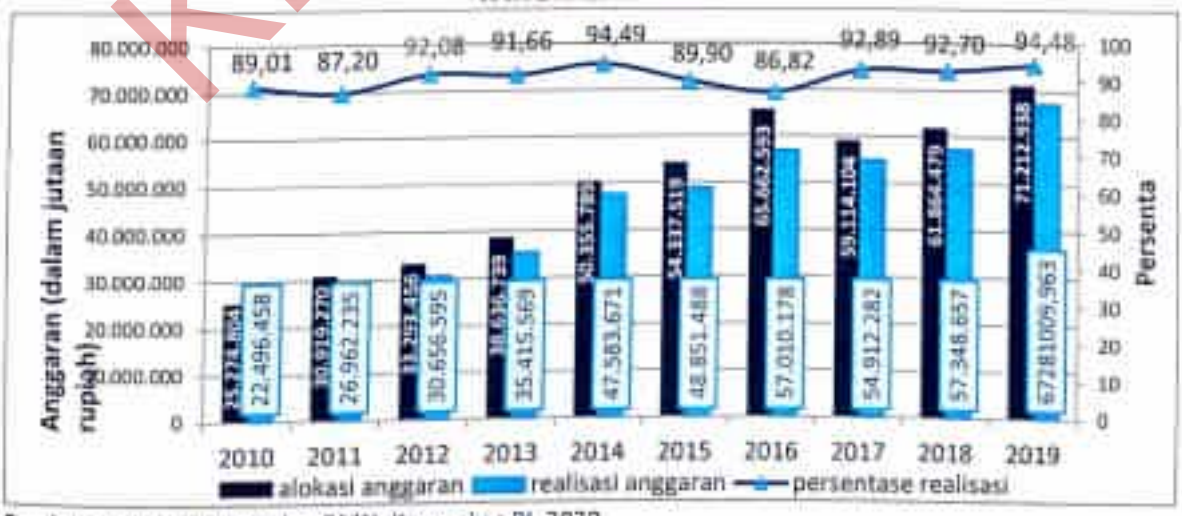

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Gambar 4.1 menunjukkan peningkatan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2010-2019, alokasi tertinggi pada tahun 2019.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I (Gambar 4.2) menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 38,07 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 118,17 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal sebesar 99,39%, sedangkan realisasi terendah adalah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) dengan persentase realisasi sebesar 69,32%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2019 terdapat pada Lampiran 19.b.

GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2019

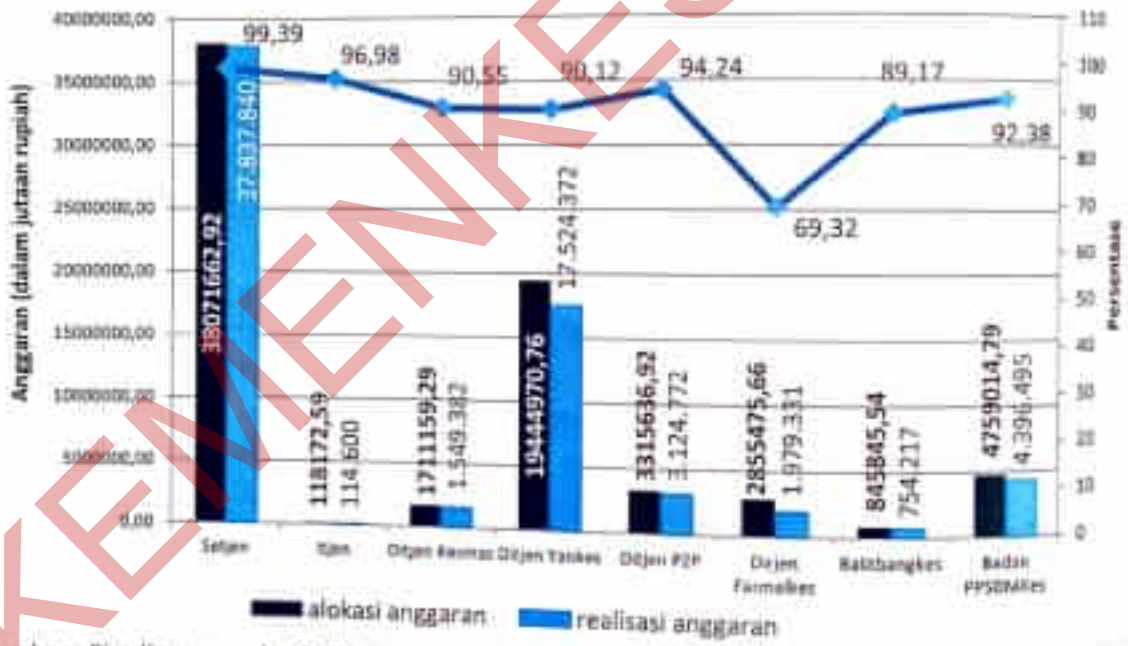

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 71,12 triliun rupiah, sebanyak 35,91 triliun rupiah atau sebesar 50,49% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran belanja bantuan sosial (bansos) Kementerian Kesehatan. Pada anggaran Kementerian Kesehatan lainnya dialokasikan untuk belanja barang, 35,27%, belanja pegawai sebesar 7,72%, dan belanja modal sebesar 6,51%. Untuk persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 99,62% dan yang paling rendah adalah belanja modal sebesar 81,89% (Gambar 4.3 dan 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran

KEMENKES RI

Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada Lampiran 19.C.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2019

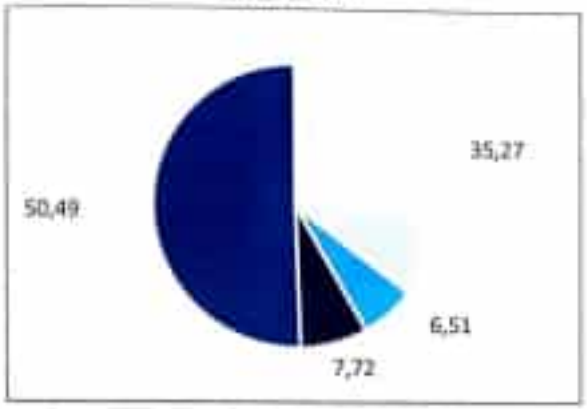

GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIBERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2019

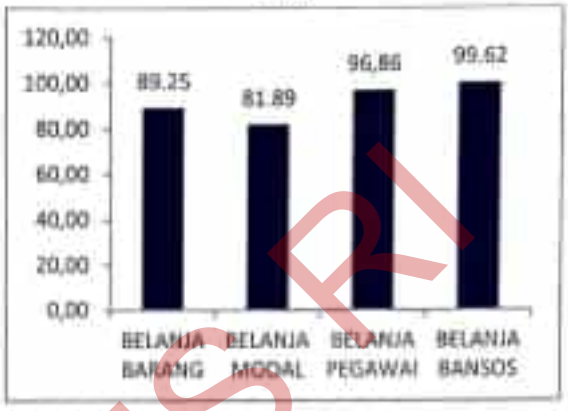

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Sesuai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010 untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/prioritas nasional, serta meningkatkan peran provinsi dalam kerangka *good governance* dalam mengawal pelaksanaan program kementerian/lembaga (K/L) di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Prinsip pendanaan dekonsentrasi adalah untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Sifat kegiatan yang didanai ialah kegiatan non-fisik seperti sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan,serta pengendalian. Proses penganggaran dana dekonsentrasi ini melalui beberapa tahap/mekanisme, di antaranya adalah: penetapan pagu alokasi dana dekonsentrasi pada masing-masing pemerintah daerah (dalam hal ini dinas kesehatan provinsi) oleh satuan kerja (satker) pengampu program di tingkat pusat; pengajuan usulan kegiatan oleh dinas kesehatan provinsi dengan mengacu pada menu dekonsentrasi yang telah ditetapkan sebelumnya; dan pemeriksaan terhadap usulan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit pusat terkait. Dana

KEMENKES RI

dekonsentrasi Kementerian Kesehatan hanya bisa dialokasikan kepada dinas kesehatan provinsi yang selanjutnya dikelola untuk membiayai kegiatan non fisik yang dimungkinkan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota. Data dan informasi lebih rinci alokasi dan realisasi anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan RI menurut provinsi tahun anggaran pada tahun 2019 disajikan pada Lampiran 19.e.

Pagu dan realisasi dana dekonsentrasi kesehatan menurut provinsi tahun 2019 disajikan pada Gambar 4.5. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi paling tinggi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 97,95%, sedangkan realisasi terendah adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 78,22%. Masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dekonsentrasi pada beberapa provinsi, termasuk di dalamnya analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi itu sendiri.

GAMBAR 4.5
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

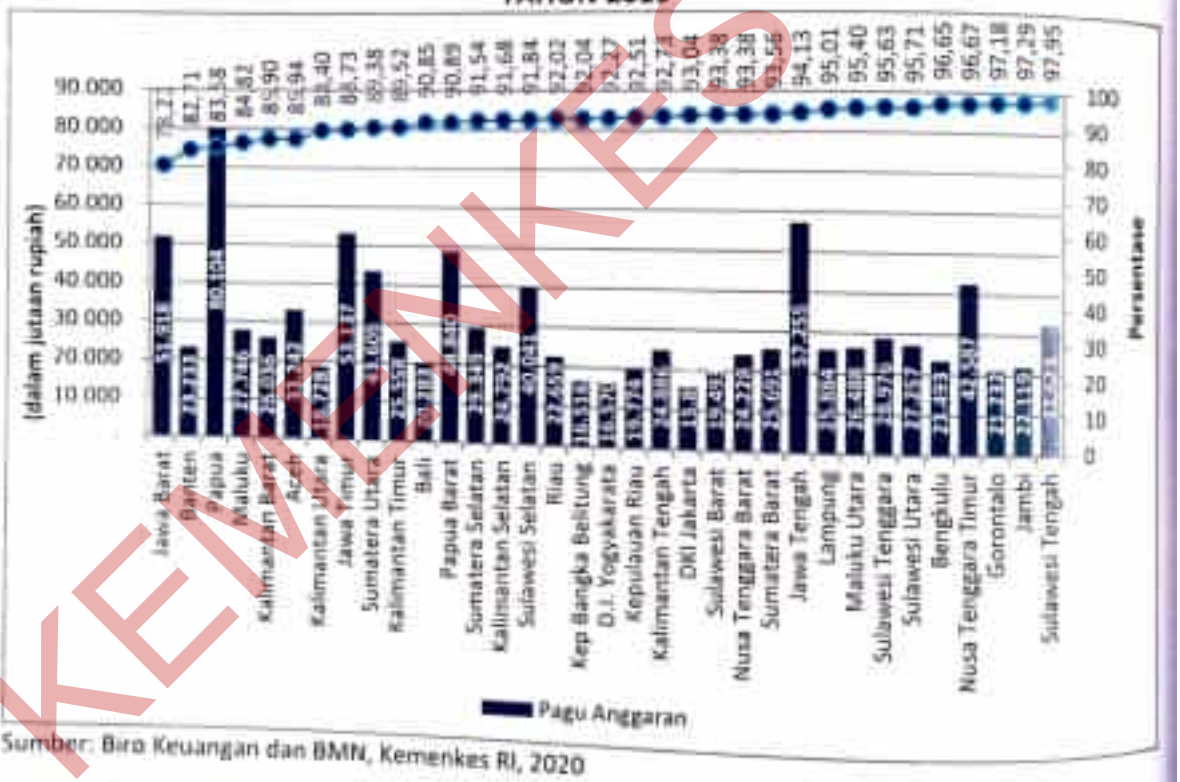

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi kedalam DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK fisik untuk membiayai kegiatan bersifat fisik sedangkan DAK nonfisik khusus untuk membiayai kegiatan yang bersifat operasional.

DAK bidang kesehatan tahun 2019 diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan TA 2019 dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan TA 2019. Dana ini diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai

KEMENKES RI

kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2019

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2019 terdiri atas:

a. DAK Fisik bidang kesehatan meliputi:
   - DAK Fisik Regular Bidang Kesehatan
   - DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan
   - DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan
b. DAK Non Fisik bidang kesehatan meliputi :
   - Bantuan Operasional Kesehatan
   - Jampersal
   - Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan) serta laporan tahunan. Sedangkan untuk data realisasi penggunaan anggaran dilaporkan melalui mekanisme yang berbeda yaitu DAK Fisik menggunakan aplikasi OM5PAN dan DAK Non Fisik menggunakan aplikasi e-renggar.

Pada tahun 2019, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019 secara nasional sebesar 62,17% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DI. Yogyakarta (87.60%) dan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (31,36%), seperti tampak pada Gambar 4.6 berikut.

GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

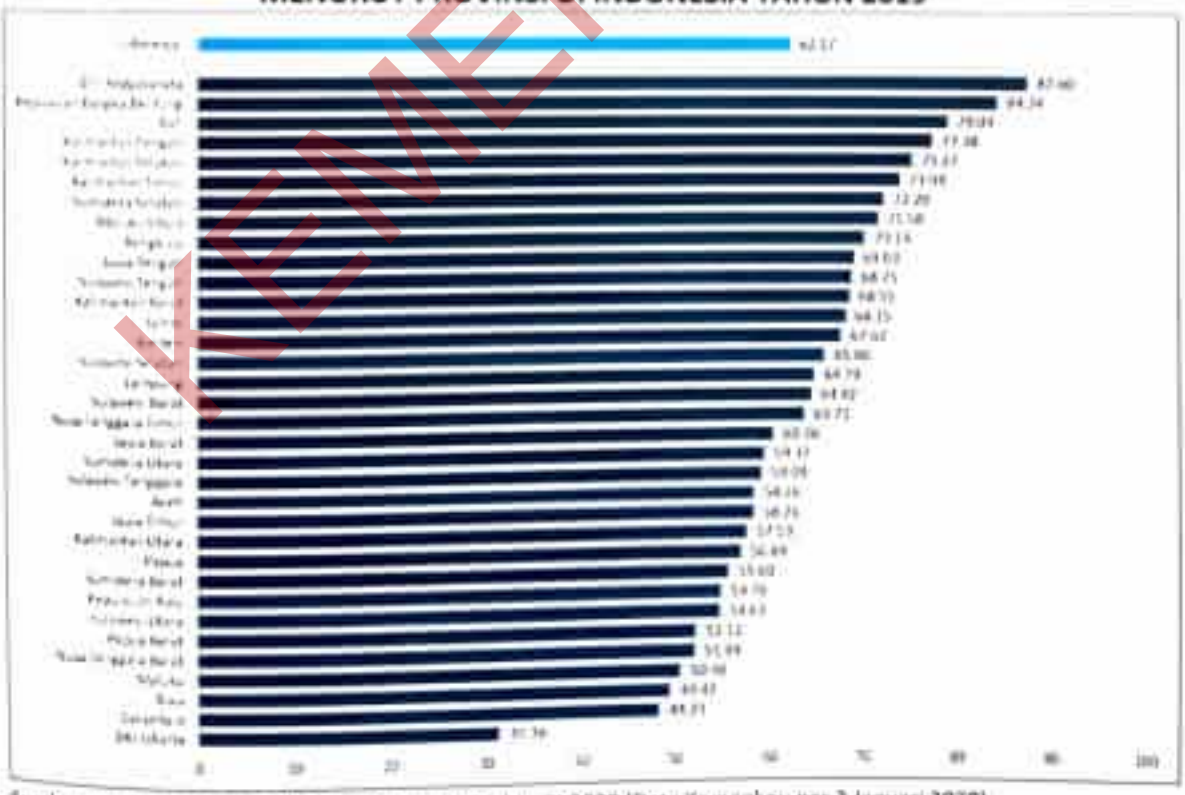

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran , Kemenkes RI,2020 (Data Kemenkeu per 2 Januari 2020)

KEMENKES RI

Untuk realisasi DAK Non Fisik Tahun 2019 secara nasional adalah 74,10% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan (93,19%) dan terendah adalah Provinsi Maluku (0,00%) seperti tampak pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

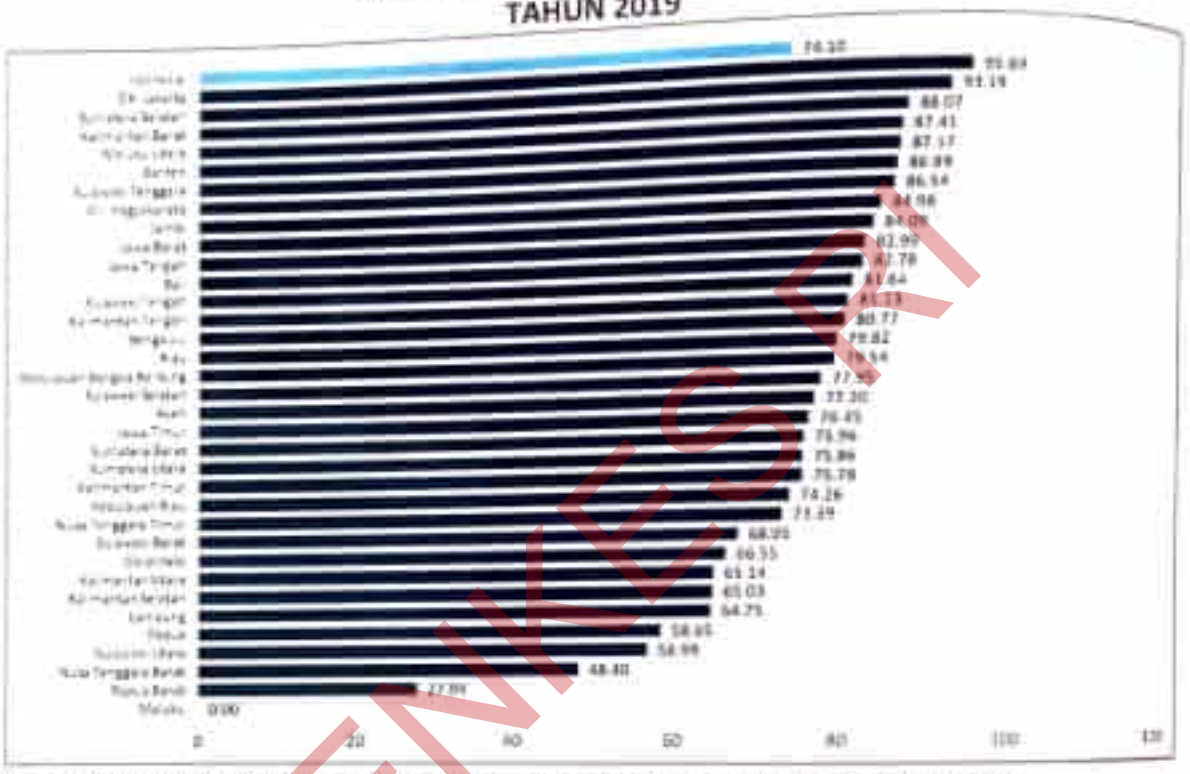

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2020 (Data e Renggar per 7 Februari 2020)

Penyebab utama rendahnya penyerapan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 adalah:

1. Regulasi
   - Keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD sehingga berpengaruh pada proses pelaksanaan kegiatan DAK.
   - Kurangnya pemahaman daerah terkait Permenkes tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik dan Petunjuk Teknis DAK Non Fisik bidang kesehatan Tahun 2019.
   - Adanya peraturan yang membatasi penggunaan uang transportasi dalam biaya operasional DAK Nonfisik oleh petugas di daerah
2. SDM
   - Keterlambatan penetapan tim pengelola keuangan seperti PPK dan KPA di daerah.
   - Tim pengadaan yang kurang berkompeten sehingga berpengaruh pada proses pengadaan yang terlambat atau gagal kontrak.
   - Keterlambatan penetapan Tim Pokja dan Tim ULP daerah.
   - Ketersediaan SDM daerah yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan di lapangan
   - Mutasi pejabat atau rotasi pegawai pada OPD yang sering terjadi di daerah
3. Proses Pengadaan
   - Adanya gagal kontrak yang sering terjadi di daerah sehingga proses realisasi terhambat

KEMENKES RI

Penyedia (Pihak Ketiga) khususnya obat-obatan terlambat menyediakan produknya karena adanya kebijakan penyedia untuk memenuhi kebutuhan produk pada pihak lain yang terlebih dulu membayar.
Kesulitan mendapatkan penyedia atau distributor di beberapa daerah
Kenaikan harga barang yang berbeda dari harga pada proses perencanaan.

4. Pelaksanaan
   - Mayoritas masyarakat sudah menjadi peserta JKN sehingga pelayanan bersumber Jampersal rendah.
   - Terdapat permasalahan manajemen kas keuangan daerah di beberapa daerah yang mengakibatkan adanya keterlambatan penyaluran keuangan ke OPD
   - Adanya sumber anggaran lain seperti NGO yang perlu dilaksanakan sehingga pelaksanaan kegiatan DAK terhambat.

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan memiliki komitmen untuk secara rutin mempublikasikan belanja kesehatan Indonesia yang digambarkan dalam National Health Accounts (NHA), saat ini sampai pada tahun 2017. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam proses produksi NHA terutama mengenai ketersediaan data yang masih terfragmentasi. Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (SHA) 2011 yang merupakan metode standar internasional, sehingga dapat melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara. Data NHA juga telah didistribusikan global dalam World Health Report yang setiap tahunnya dipublikasi oleh WHO.

Berbagai institusi telah memanfaatkan hasil estimasi NHA sebagai dasar informasi berbasis bukti dalam penyusunan atau penyempurnaan perencanaan dan kebijakan, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, DPR, dan akademisi. Sebagai negara dengan kebijakan single payer (hanya ada satu pengumpul premi dan sekaligus berfungsi sebagi badan penyelenggara) terbesar di dunia, banyak negara menaruh perhatian pada pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka menuju Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*).

Dari hasil NHA seri sebelumnya, diketahui bahwa perlindungan risiko finansial penduduk Indonesia masih relatif rendah. Peningkatan kesadaran secara eksplisit menjadi penting untuk memberikan nilai tambah bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan arah kebijakan yang tujuan akhirnya adalah tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta tersalurkan sesuai peruntukannya.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/*Total Health Expenditure* (THE)

Total belanja kesehatan Indonesia adalah penggabungan antara *Current Health Expenditure (CHE)* dan *Gross Capital Formation* (Belanja Modal) dimana di dalamnya termasuk biaya pendidikan dan biaya penelitian dan pengembangan kesehatan. Akan tetapi, belanja modal yang dapat dihitung hanya data dari sektor publik (meliputi Kementerian Kesehatan, K/L

KEMENKES RI

lainnya, dan sub nasional). Indikator umum yang digunakan pada skala internasional saat ini adalah CHE karena menggambarkan konsumsi akhir yang dapat dinikmati dalam setahun. Namun, dalam publikasi ini akan menggunakan THE untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

THE Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana belanja kesehatan menjadi Rp 436,5 triliun di tahun 2017 (kenaikan 106% dibanding 2010), dengan belanja kesehatan senilai Rp1,6 juta/kapita/tahun (Tabel 4.1). Selama 5 tahun ini, proporsi belanja kesehatan terhadap PDB hanya mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 0,1% yaitu dari 3,1% di tahun 2010 menjadi 3,2% di tahun 2017.

TABEL 4.1
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2010 – 2017

Tahun	Total Belanja Kesehatan (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US $)	% THE terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2010	211,2	885.571	97	3,1
2011	240,9	995.403	113	3,1
2012	261,0	1.063.490	113	3,0
2013	298,4	1.199.106	115	3,1
2014	341,9	1.355.852	114	3,2
2015	370,2	1.449.066	108	3,2
2016	413,2	1.597.106	120	3,3
2017	436,5	1.666.770	125	3,2

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan , Kemenkes RI, 2020

Klasifikasi menurut skema pembiayaan kesehatan memberikan informasi secara komprehensif mengenai pengaturan dan pengelolaan pembiayaan sehingga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan (SHA 2011). Skema pembiayaan kesehatan menggambarkan mekanisme pembiayaan yang menunjukkan aliran pendanaan dari sumber pembiayaan sampai pada agen pembiayaan. Sebagai contoh, dana BOK yang dialokasikan dari APBN (anggaran Kemenkes) diklasifikasikan dalam skema pemerintah pusat walaupun dana BOK tersebut dikelola oleh pemerintah kab/kota.

KEMENKES RI

GAMBAR 4.8
GAMBARAN SKEMA PROPORSI DAN TOTAL PEMBIAYAAN BELANJA KESEHATAN TAHUN 2010-2017

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan , Kemenkes RI, 2020

Gambar di atas menunjukkan proporsi belanja kesehatan yang mengalir melalui berbagai skema pembiayaan kesehatan, seperti skema pemerintah pusat, skema pemerintah daerah, skema asuransi kesehatan sosial, skema perusahaan, skema swasta lainnya dan skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Porsi belanja skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara tersebut. Selain itu menunjukkan bahwa peningkatan porsi belanja pada skema asuransi kesehatan sosial seiring dengan penurunan pada porsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 harus dimonitor terus menerus. Meskipun secara proporsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga menurun (dari 54,8% pada tahun 2010 menjadi 31,8% pada tahun 2017), namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2010 – 2017 (dari 211,2 triliun pada tahun 2010 menjadi 436,5 triliun pada tahun 2017). Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

2. Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2019, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun keenam. Harus diakui bahwa reformasi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan ini telah banyak memberi manfaat kepada berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Program JKN, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial, seperti pada kasus penyakit katastropis yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

KEMENKES RI

Akan tetapi, sebagaimana pengalaman berbagai negara yang telah mencapai Jaminan Semesta (*Universal Health Coverage*/ UHC), pelaksanaan JKN di Indonesia pada masa awal juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah adaptasi peserta dan pemberi pelayanan terhadap sistem baru, keseimbangan sisi suplai pemberi pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap strukturisasi pelayanan kesehatan berjenjang, penyesuaian pengelolaan program publik oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan), dan kesinambungan finansial dari program JKN. Beberapa isu yang sering mengemuka antara lain adalah ketidakakuratan sasaran kelompok PBI, peningkatan cakupan kepesertaan kelompok Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) yang mempunyai risiko kesehatan yang besar tetapi dengan kesinambungan pembayaran iuran kepesertaan yang rendah, luasnya cakupan manfaat dibandingkan dengan besaran iuran, pertanyaan tentang besaran tarif INA-CBG untuk RS swasta, dan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan primer serta isu mengenai *fraud*/kecurangan.

GAMBAR 4.9
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2019

Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2020

Sejak awal diluncurkan program JKN-KIS pada tahun 2014, cakupan kepesertaan program terus meningkat. Pada Tahun 2019, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 43,06%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun terjadi pada segmen non-PBI. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS sudah mencapai 224,1 juta jiwa.

KEMENKES RI

GAMBAR 4.10
PERKEMBANGAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2019

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Pada Tahun 2019, Menteri Sosial menetapkan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 96,8 juta jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2019. Penetapan ini termasuk bayi dari PBI Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2019.

Sejak pertengahan tahun 2018, Menteri Sosial menetapkan hasil verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan setiap bulannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

GAMBAR 4.11
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2019

Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2014 sampai dengan 2019 sehingga alokasi anggaran untuk iuran PBI telah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014-2015, besaran iuran sebesar Rp 19.225 sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pada tahun 2016, besaran iuran mengalami kenaikan menjadi Rp 23.000 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pada tahun 2018, terbit Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan yang memutuskan iuran PBI masih sebesar Rp 23.000. Kemudian, pada tahun 2019, besaran iuran PBI kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 42.000 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan .

Realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2014 sebesar 19,93 trilyun atau 100% dari alokasi yang dianggarkan. Pada tahun 2015, realisasi menjadi 97,69% mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2019, realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan mencapai 99,61% dari alokasi yang dianggarkan.

GAMBAR 4.12
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014-2019

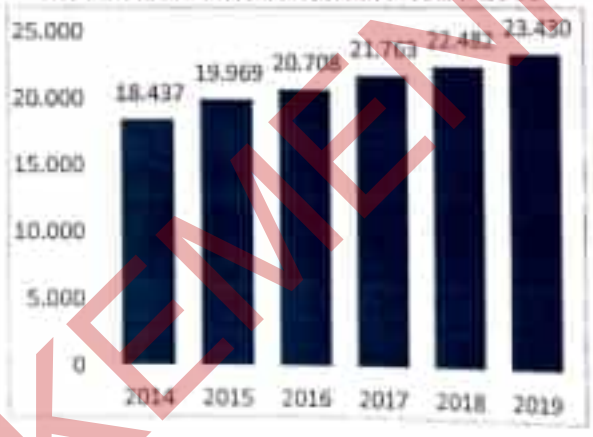

GAMBAR 4.13
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2019

Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2020

Perkembangan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama untuk FKTP terjadi peningkatan dari sebanyak 18.437 faskes pada tahun 2014 menjadi 23.430 faskes pada tahun 2019. Jenis FKTP terbanyak adalah Puskesmas sebesar 10.050 atau 42,89%, kemudian Klinik Pratama sebesar 6.766 atau 28,88% dari FKTP yang ada. Pada tahun 2019 Apotek sudah tidak menjadi bagian FKTP lagi, akan tetapi merupakan fasilitas penunjang. Data dan informasi lebih rinci mengenai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2019 yang disajikan pada Lampiran 19.a.

KEMENKES RI

GAMBAR 4.14
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019

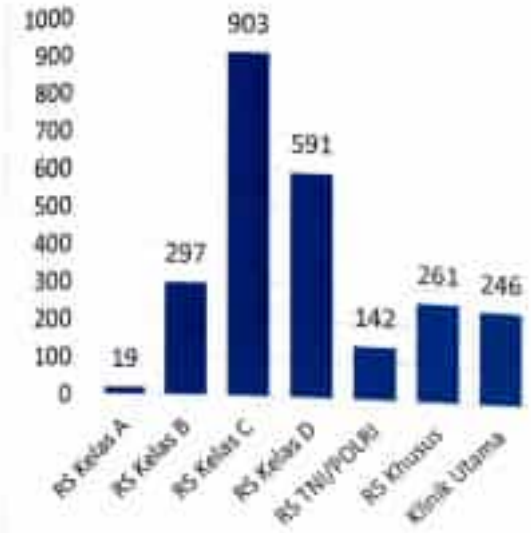

GAMBAR 4.15
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019

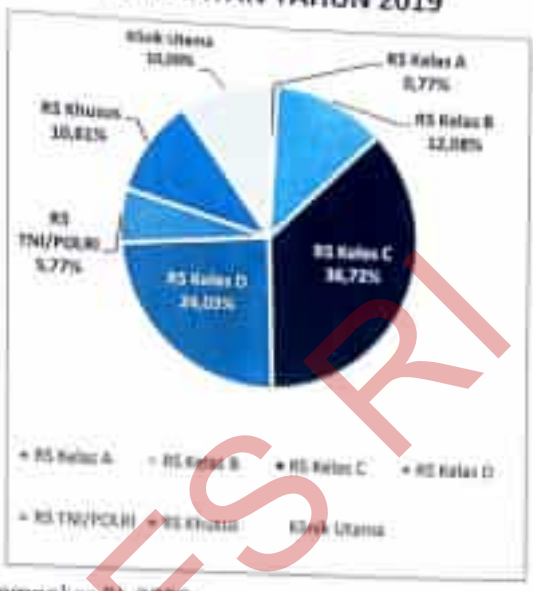

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Tahun 2019 terdapat 903 RS Kelas C yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau sebesar 36,72% diikuti RS Kelas D sebanyak 591 atau sebesar 24,03%.

GAMBAR 4.16
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019

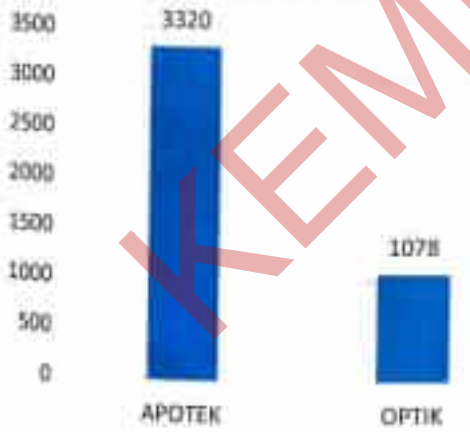

GAMBAR 4.17
PERSENTASE FASILTAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019

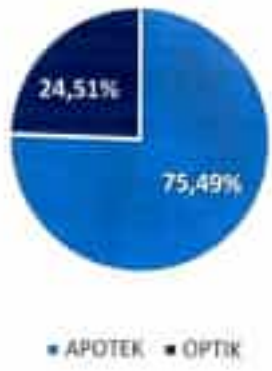

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Tahun 2019 terdapat 3320 Apotek (75,495) dan 1078 Optik (24,51%) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

KEMENKES RI

3. Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yag telah ada dan tumbu tumbu berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpiterterpisahkan dari tatanan kehidupana bangsa Indonesia.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombattombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahkesejahteraan rakyat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk duntuk diberikan kepada desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Baelanja Daerah Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyar masyaakat, dan pemberdayaan masyarakat

Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 10.964 unit Posyandu dll dalam periode 2015-2016.

Adapun persentase desa yang memanfaatkan Dana Desa terdapat pada gambar dibawah ini

GAMBAR 4.18

PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

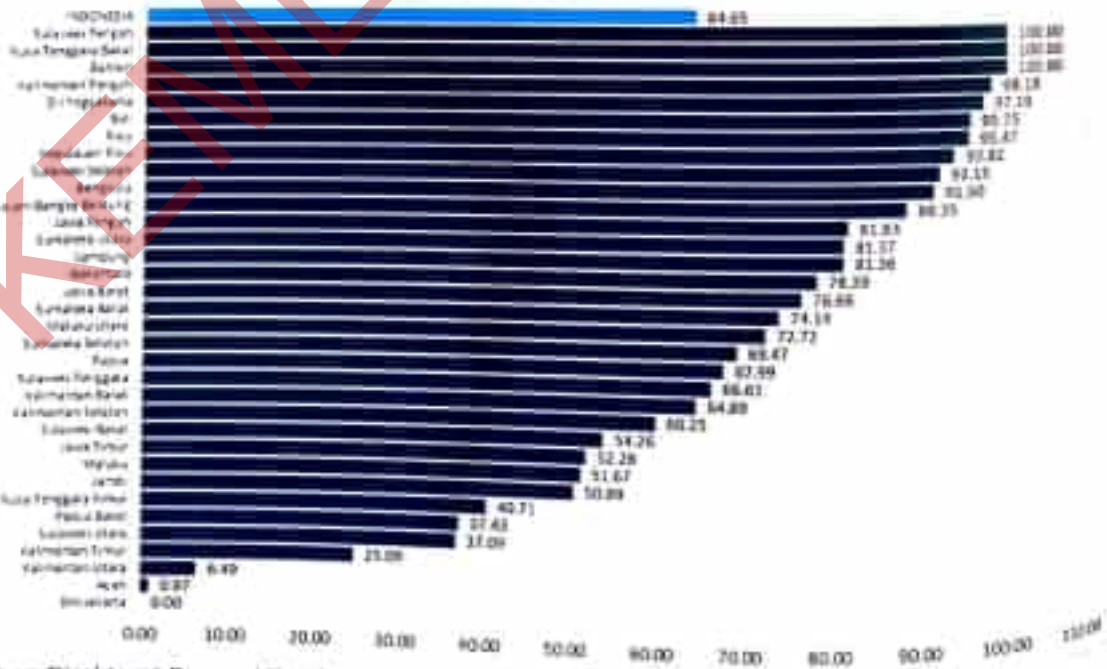

Sumber: Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2020

: Kementerian Dalam Negeri, 2020 (Permendagri 72 Tahun 2019),

KEMENKES RI

Berdasarkan gambar diatas persentase desa yang memanfaatkan dana desa terbesar pada tahun2019 adalah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Barat (100.0%). Dan secara lebih rinci bisa dilihat di lampiran 18.

•••

KEMENKES RI

KEMENKES RI

Bab V
KESEHATAN KELUARGA

KEMENKES RI

KEMENKES RI

V. KESEHATAN KELUARGA

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hasil supas tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat dibandingkan target MDGs. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.1

ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP

TAHUN 1991 – 2015

Sumber: BPS, SDKI 1991-2012

*AKI tahun 2015 merupakan hasil SUPAS 2015

Target penurunan AKI ditentukan melalui tiga model *Annual Average Reduction Rate* (ARR) atau angka penurunan rata-rata kematian ibu pertahun seperti Gambar 5.2 berikut ini. Dari ketiga model tersebut, Kementerian Kesehatan menggunakan model kedua dengan rata-rata penurunan 5,5% pertahun sebagai target kinerja. Berdasarkan model tersebut diperkirakan pada tahun 2024 AKI di Indonesia turun menjadi 183/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2030 turun menjadi 131 per 100.000 kelahiran hidup.

GAMBAR 5.2

TARGET PENURUNAN AKI DI INDONESIA

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2019

Jumlah kematian ibu menurut provinsi tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Lampiran 21 dimana terdapat penurunan dari 4.226 menjadi 4.221 kematian ibu di Indonesia berdasarkan laporan. Pada tahun 2019 penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan (1.280 kasus), hipertensi dalam kehamilan (1.066 kasus), infeksi (207 kasus) rincian per provinsi dapat dilihat di Lampiran 22.

KEMENKES RI

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan imunisasi Tetanus bagi wanita usia subur dan ibu hamil, (3) pemberian tablet tambah darah, (4) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (5) pelayanan kesehatan ibu nifas, (6) Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), (7) pelayanan kontrasepsi/KB dan (8) pemeriksaan HIV dan Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

KEMENKES RI

Capaian K4 tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.3
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA
TAHUN 2006 – 2019

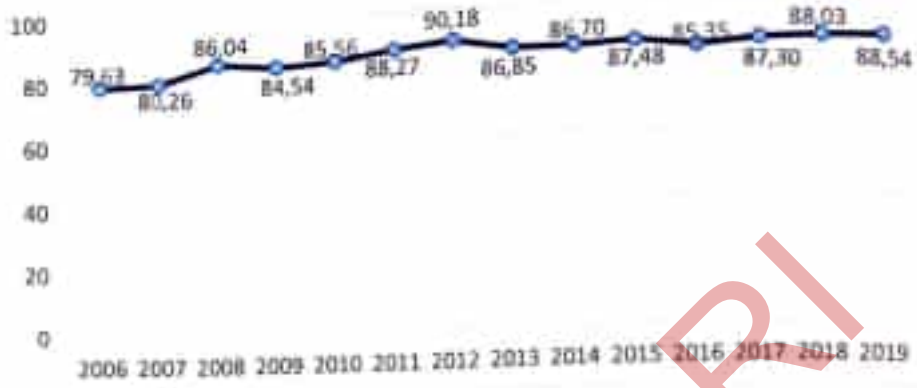

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Selama tahun 2006 sampai tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2019 yang sebesar 80%, capaian tahun 2019 telah mencapai target yaitu sebesar 88,54%.

Gambaran capaian kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2019 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.4
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

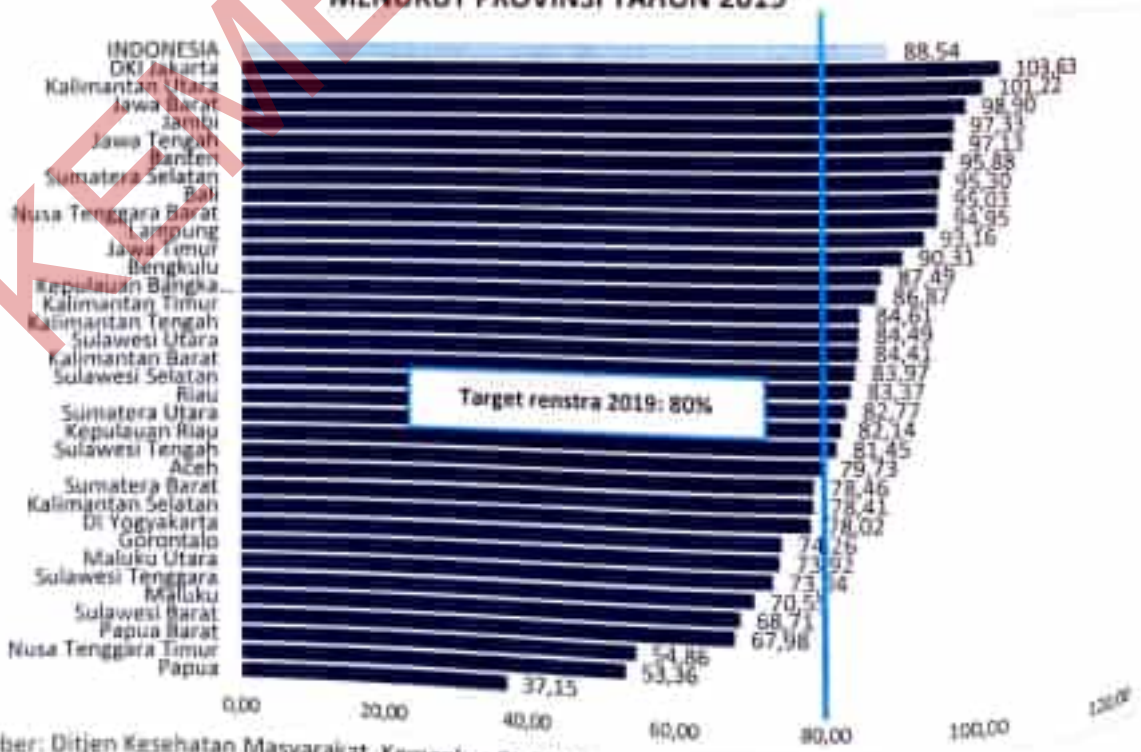

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2018

KEMENKES RI

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Dalam hal ketersediaan sarana kesehatan, hingga bulan Desember 2019, terdapat 10.134 puskesmas. Keberadaan puskesmas secara ideal harus didukung dengan aksesibilitas yang baik. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan aspek geografis dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi.

Dalam mendukung penjangkauan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas juga memiliki jaringan dengan menyediakan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di Desa. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 terdapat pada Lampiran 23.a.

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil *screening* mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.

Screening status imunisasi Td harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi Td5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+. Gambar 5.5 memperlihatkan cakupan imunisasi Td5 pada wanita usia subur dan cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.5
CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA WANITA USIA SUBUR DI INDONESIA TAHUN 2019

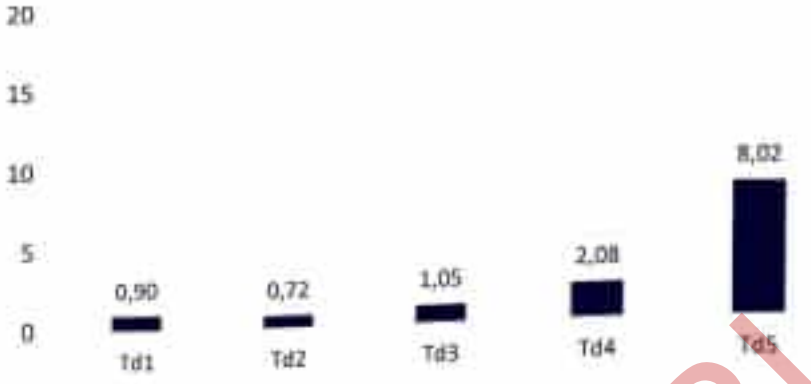

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

Pada gambar di atas diketahui cakupan imunisasi Td pada status Td1 sampai Td5 pada wanita usia subur tahun 2019 masih sangat rendah yaitu kurang dari 10% jumlah seluruh WUS. Cakupan Td5 sebesar 8,02% dengan cakupan tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebesar 51,61% dan terendah di Sumatera Utara sebesar 0,002%. Terdapat 4 provinsi yang belum melaporkan yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara.

GAMBAR 5.6
CAKUPAN IMUNISASI Td2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2019

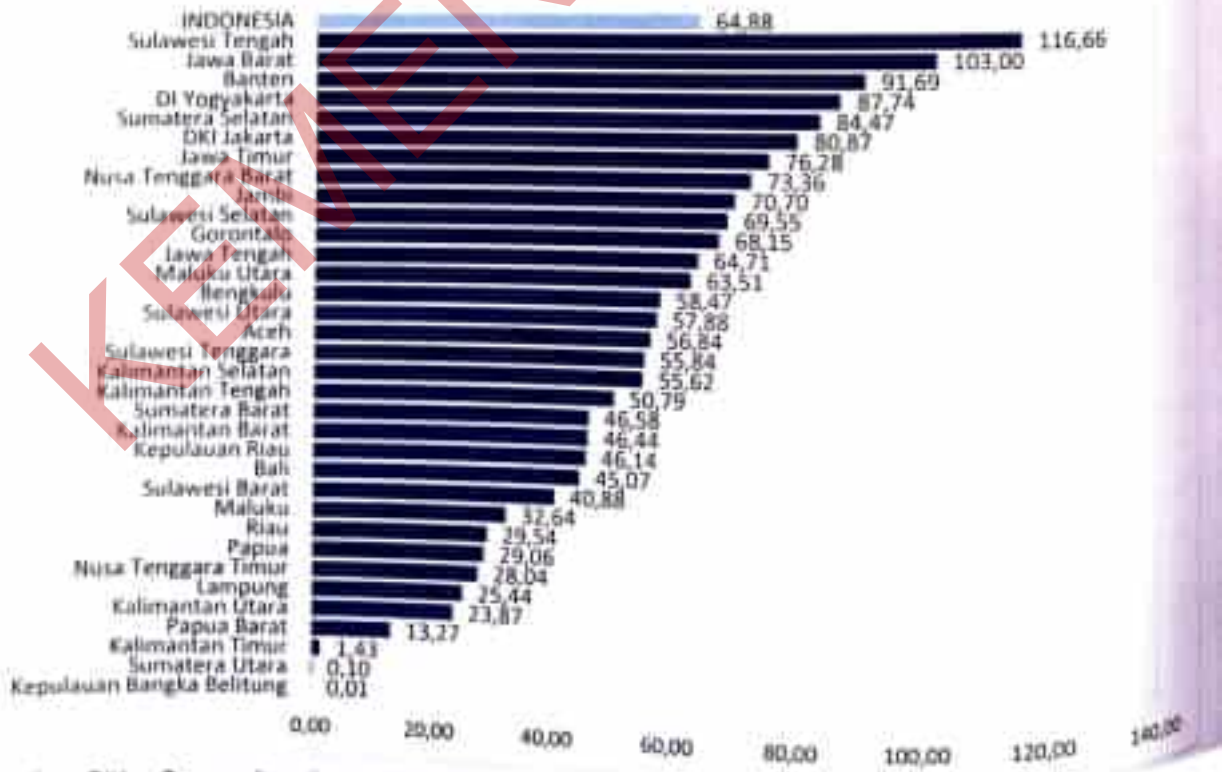

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

KEMENKES RI

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2019 sebesar 64,88%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 51,76%, juga lebih rendah sekitar 23,66% dibandingkan dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 yang sebesar 88,54%, sementara Td2+ merupakan syarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4.

Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DI Yogyakarta memiliki capaian imunisasi Td2+ pada ibu hamil tertinggi di Indonesia. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung (0,01%), Sumatera Utara (0,10%), Kalimantan Timur (1,43%), dan Papua Barat (13,27%). Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur dan ibu hamil dapat dilihat pada Lampiran 24 - 25.

3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Indonesia tahun 2019 adalah 64,0%. Angka ini belum mencapai target Renstra tahun 2019 yaitu 98%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Sulawesi Utara (100,1%), sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Sulawesi Selatan (1,7%). Terdapat satu provinsi yang sudah melampaui target Renstra tahun 2019 dan satu Provinsi tidak melaporkan data cakupan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil (Papua Barat). Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.a.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.7

CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

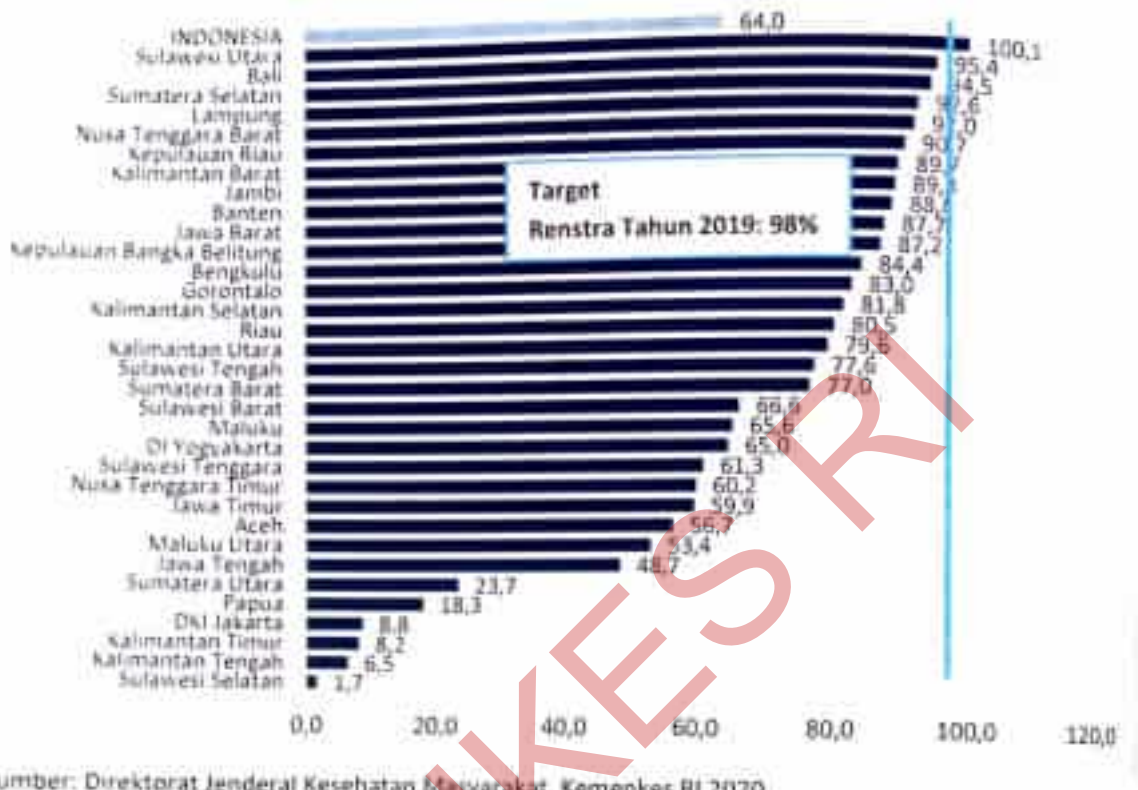

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.8 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2019.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.8
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

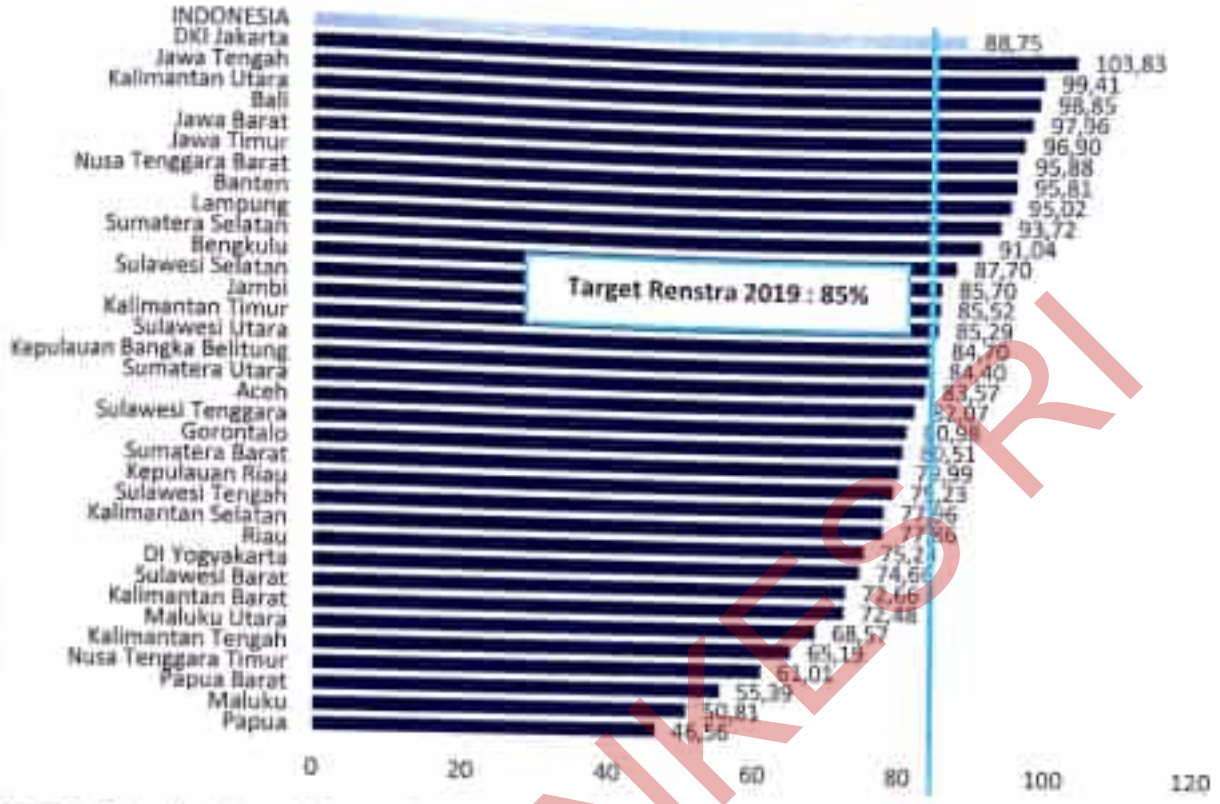

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 terdapat 90,95% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Sementara ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 88,75%. Dengan demikian masih terdapat sekitar 2,2% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan namun tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara nasional, indikator PF telah memenuhi target Renstra yang sebesar 85%. Terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah yaitu DKI Jakarta (103,83%) dan Papua (46,56%). Analisis kematian ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu.

Hasil Riskesdas 2018 memperlihatkan tempat persalinan paling banyak digunakan yaitu rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta) dan praktek tenaga kesehatan (nakes). Namun penggunaan rumah masih cukup tinggi sebesar 16,7%, yang menempati urutan ketiga tertinggi tempat bersalin.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.9
PROPORSI TEMPAT PERSALINAN YANG DIMANFAATKAN OLEH PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018

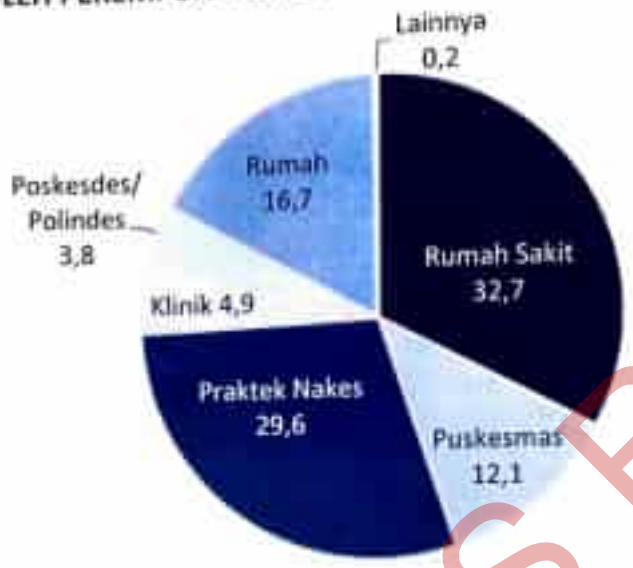

Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018, Balitbangkes, Kemenkes RI, 2019

Hasil Riskesdas 2018 juga memperlihatkan bahwa 62,5% rumah tangga mengetahui bahwa akses ke rumah sakit sulit. Begitu juga pengetahuan rumah tangga terhadap akses ke puskesmas/pustu/pusling/ bidan sebesar 60,8% dan akses ke klinik/praktek dokter/praktek dokter gigi/praktek bidan mandiri sebesar 62,6% dengan akses sulit.

Secara konsisten terlihat bahwa provinsi dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan rendah memiliki akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang relatif sulit. Oleh karena itu untuk daerah dengan akses sulit, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan.

Ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas), yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

Dari 34 provinsi, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah rumah tunggu kelahiran tertinggi, yaitu masing-masing sebanyak 397 dan 236. Provinsi lain memiliki jumlah Rumah Tunggu Kelahiran di bawah 90. Sebanyak 6 provinsi tidak memiliki Rumah Tunggu Kelahiran yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

KEMENKES RI

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menurut hasil Riskesdas 2018 sebesar 93,1% yang berarti hampir sama dengan hasil pencatatan rutin program kesehatan keluarga yang sebesar 90,32%. Berikut ini proporsi persalinan dengan kualifikasi tertinggi pada perempuan umur 10-54 tahun.

GAMBAR 5.10
PROPORSI PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI PADA PEREMPUAN UMUR 10-54 TAHUN, RISKESDAS 2018

Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018, Balitbangkes, Kemenkes RI, 2019

Proporsi terbesar penolong persalinan tertinggi yaitu bidan sebesar 62,7% dan dokter kandungan sebesar 28,9%. Berdasarkan karakteristik demografi, semakin tinggi pendidikan ibu bersalin semakin tinggi persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan di perkotaan lebih tinggi (96,7%) dibandingkan di perdesaan (88,9%). Provinsi Maluku (33,4%), Maluku Utara (26,1%) dan, Nusa Tenggara Timur (16,1%) merupakan provinsi tertinggi dengan proporsi persalinan oleh dukun.

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

a) pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
b) pemeriksaan tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
c) pemeriksaan lokhia dan cairan *per vaginam* lain;
d) pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
e) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana pasca persalinan;
f) pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Gambar 5.11 menyajikan cakupan kunjungan nifas di Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.11
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2019

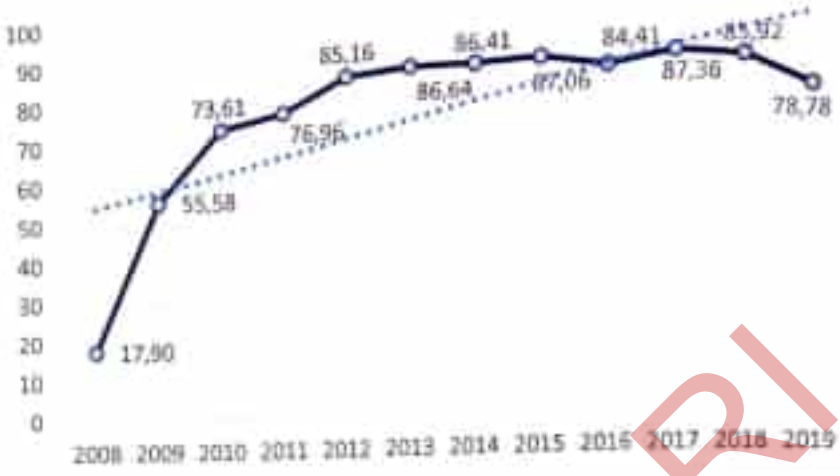

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, garis tren menunjukkan ada penurunan cakupan sejak 2 tahun terakhir. Capaian kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.12 berikut ini.

GAMBAR 5.12
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

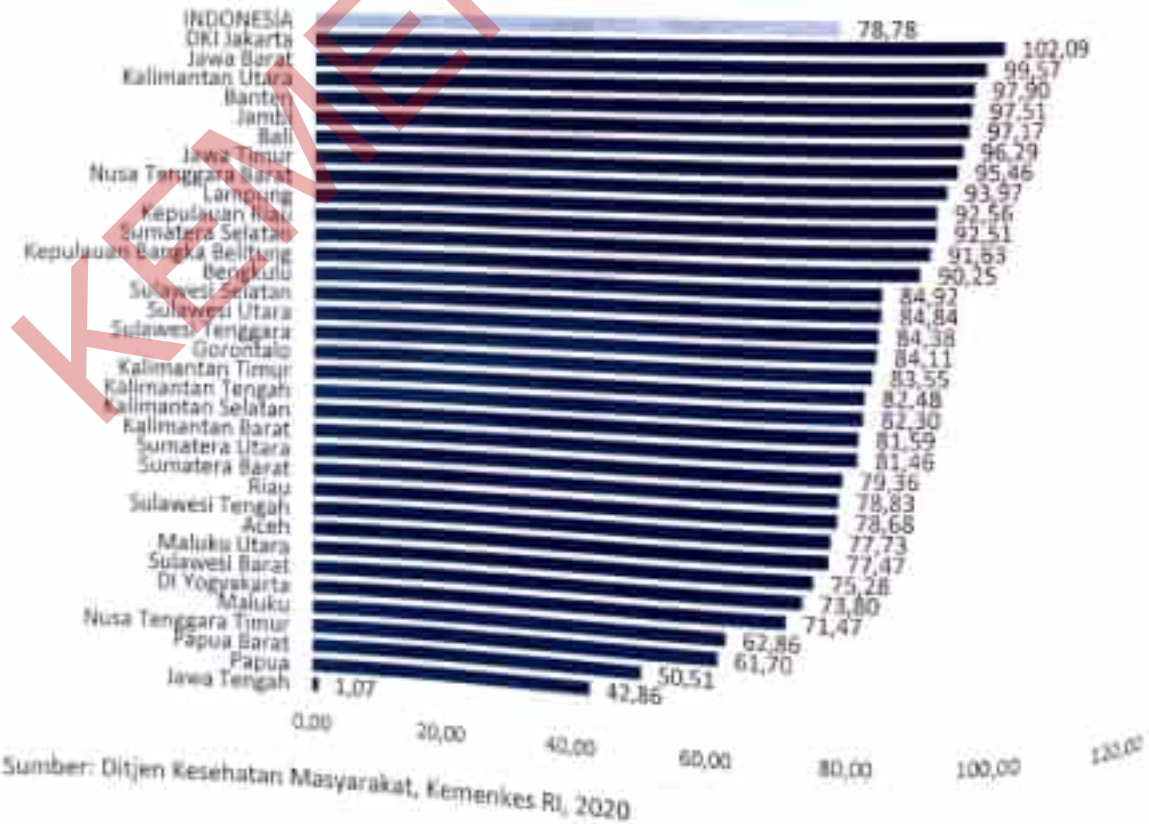

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Gambar di atas menggambarkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian kunjungan nifas lengkap (KF3) tertinggi yang diikuti oleh Jawa Barat dan Kalimantan Utara. Sedangkan provinsi dengan cakupan kunjungan nifas terendah yaitu Jawa Tengah, Papua, dan Papua Barat. Dari 34 provinsi yang melaporkan data kunjungan nifas, mencapai 62% provinsi di Indonesia telah mencapai KF3 80%. Kondisi pada tahun 2019 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 (60%).

6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kementerian Kesehatan menetapkan indikator persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan persentase Puskesmas melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai upaya menurunkan kematian ibu dan kematian anak.

Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dan keluarga mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil.

Cakupan Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil didapatkan dengan menghitung puskesmas yang telah melaksanakan kelas ibu hamil dibandingkan dengan jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kabupaten/kota. Puskesmas dikatakan telah melaksanakan kelas ibu hamil apabila telah melakukan kelas ibu hamil minimal sebanyak 4 kali.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.13

PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI

TAHUN 2019

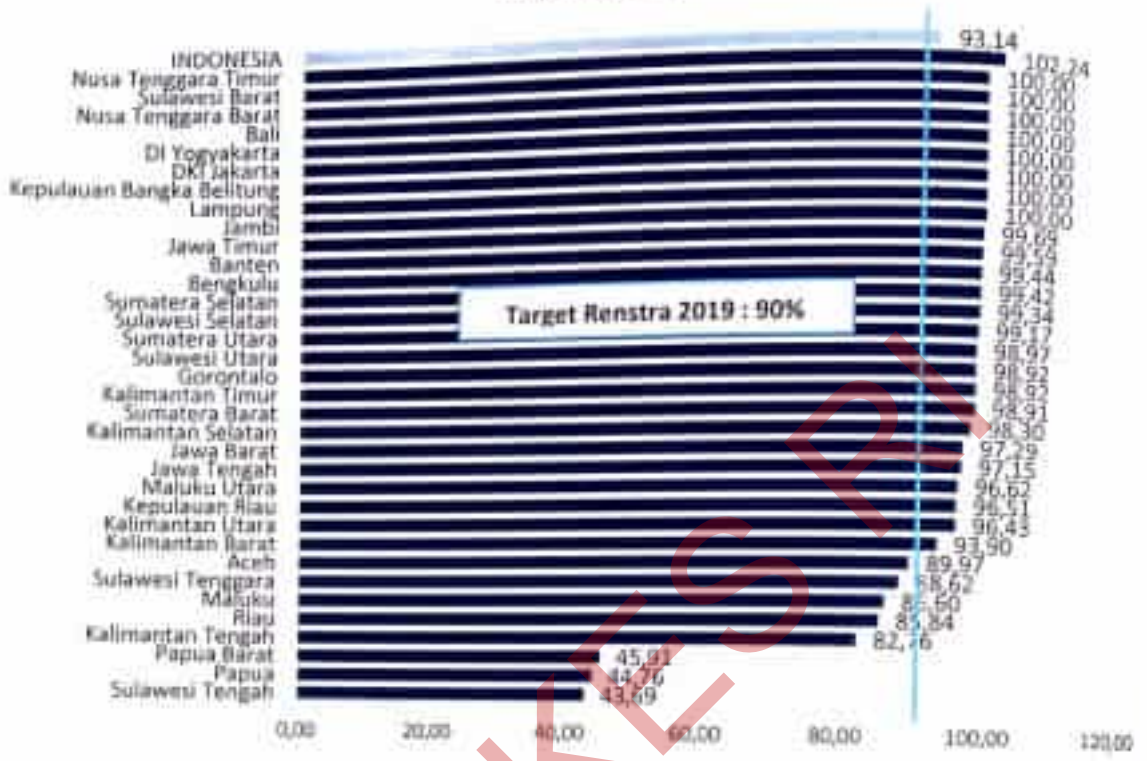

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Sebanyak 93,14% puskesmas di Indonesia telah melaksanakan kelas ibu hamil yang berarti telah mencapai target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2019 yang sebesar 90%. Sebagian besar provinsi yang telah mencapai target renstra tersebut. Terdapat 8 (delapan) provinsi belum mencapai target renstra yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Aceh.

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan suatu program yang dijalankan untuk mencapai target penurunan AKI. Program ini menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam monitoring terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas.

Indikator Puskesmas melaksanakan orientasi P4K menghitung persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K. Adapun yang dimaksud orientasi tersebut adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh puskesmas dengan mengundang kader dan/atau bidan desa dari seluruh desa yang ada di wilayahnya dalam rangka memberikan pembekalan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, ibu hamil serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.14
PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

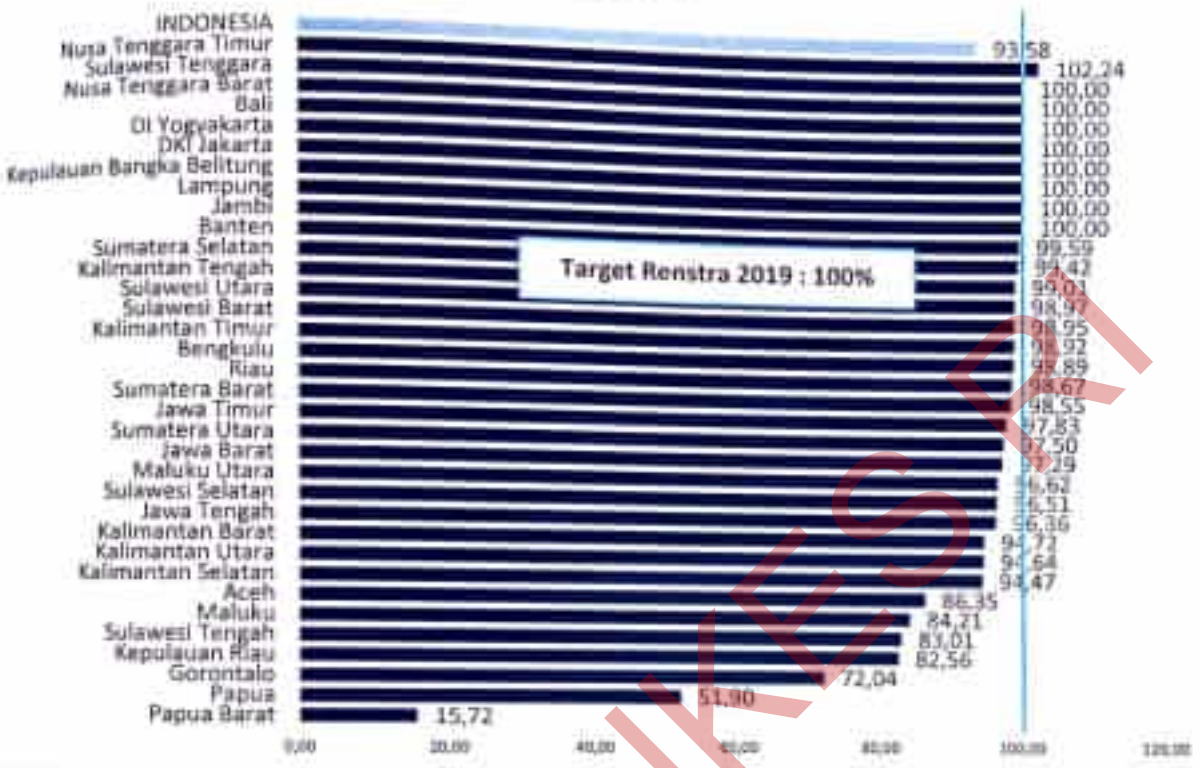

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 sebanyak 93,58% puskesmas teregistrasi telah melaksanakan orientasi P4K yang berarti belum mencapai target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2019 yang sebesar 100%. Sebanyak 9 (sembilan) provinsi telah mencapai target renstra melaksanakan orientasi P4K. Namun masih terdapat 25 provinsi yang belum mencapai target adapun provinsi dengan capaian dibawah 50% yaitu Papua Barat.

7. Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan meliputi pemberian KIE, konseling, penapisan kelayakan medis, pemberian kontarsepsi, pemasangan atau pencabutan, dan penanganan efek samping atau komplikasi dalam upaya mencegah kehamilan. Pelayanan kontrasepsi yang diberikan meliputi kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim, pelayanan tubektomi, dan pelayanan vasektomi. KB Pascapersalinan (KBPP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Beberapa studi menunjukkan pelayanan KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian ibu dengan cara mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi.

Salah satu faktor memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda melahirkan dibawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2). Persentase ibu meninggal yang melahirkan berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun adalah

KEMENKES RI

33% dari seluruh kematian ibu, sehingga apabila program KB dapat dilaksanakan dengan baik lagi, kemungkinan 33% kematian ibu dapat dicegah melalui pemakaian kontrasepsi.

Gambar 5.17 menunjukkan tren penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin sejak tahun 1991 sampai 2017. Terlihat adanya peningkatan prevalensi kontrasepsi dari 50 persen pada tahun 1991 menjadi 64 persen pada tahun 2017. Namun, ada perlambatan peningkatan sejak tahun 2002-2003 di mana selama lima belas tahun terakhir penggunaan kontrasepsi modern cenderung stagnan.

GAMBAR 5.15

TREN PEMAKAIAN KONTRASEPSI PADA WANITA KAWIN

SDKI 1991-2017

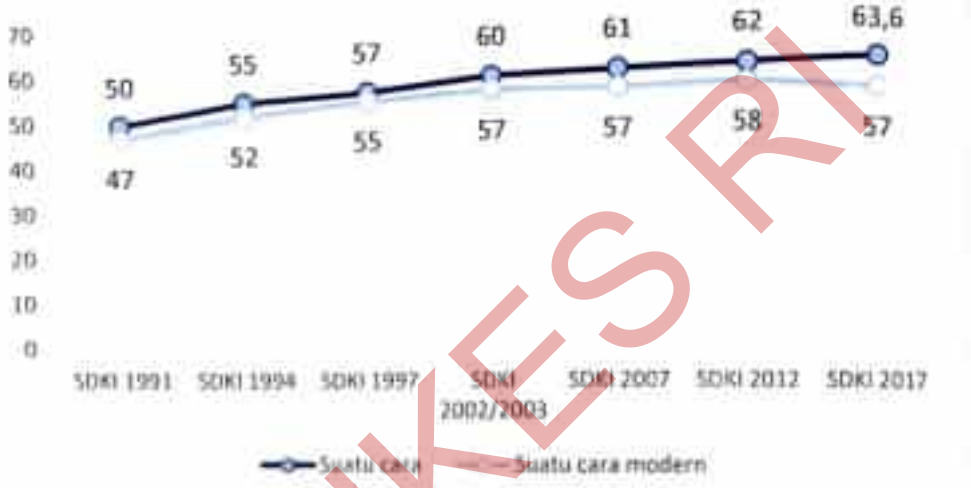

Menurut BKKBN, KB aktif di antara PUS tahun 2019 sebesar 62,5%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,27%. Sementara target RPJMN yang ingin dicapai tahun 2019 sebesar 66%. Hasil SDKI tahun 2017 juga menunjukan angka yang lebih tinggi pada KB aktif yaitu sebesar 63,6%.

KB aktif tertinggi terdapat di Bengkulu yaitu sebesar 71,4% dan yang terendah di Papua Barat sebesar 25,4%. Terdapat 11 (sebelas) provinsi dengan cakupan KB aktif mencapai target RPJMN 66% yaitu Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.16.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.16

CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2019

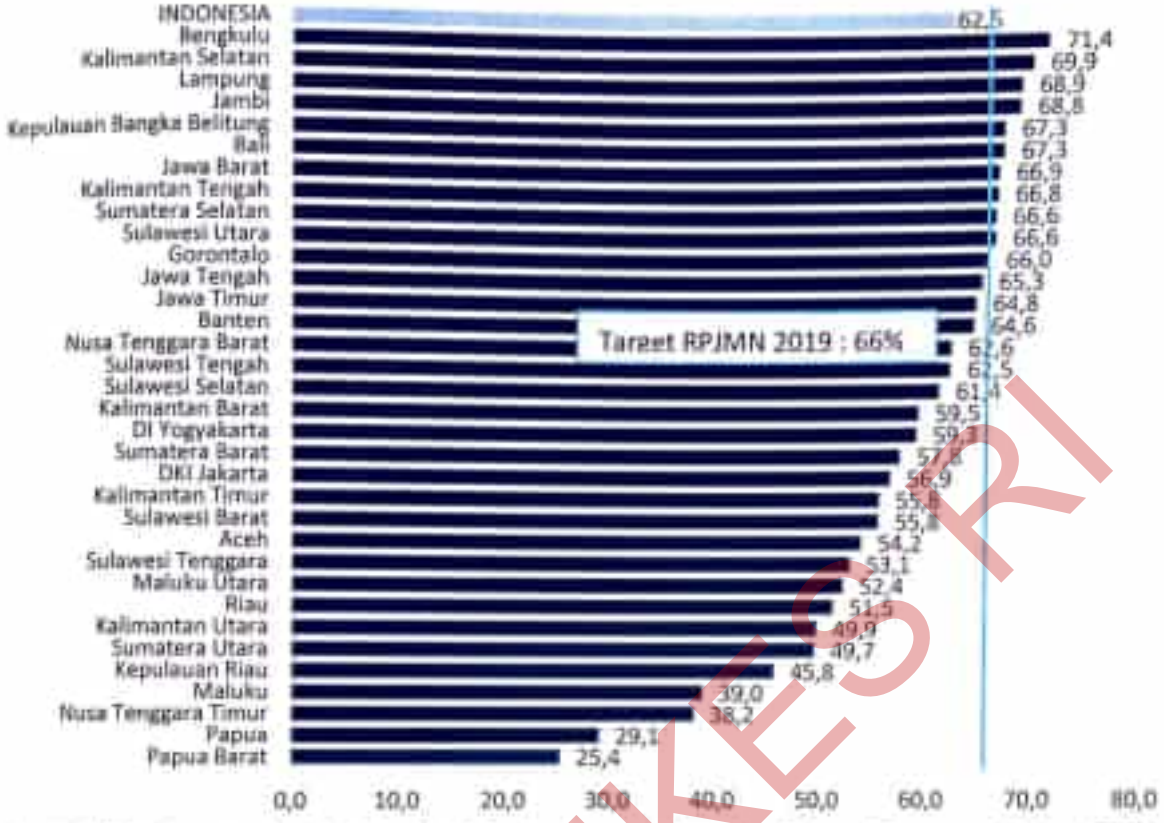

Sumber: Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019

Berdasarkan pola dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi seperti yang disajikan pada Gambar 5.17, sebagian besar peserta KB Aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi bahkan sangat dominan (lebih dari 80%) dibanding metode lainnya; suntikan (63,7%) dan pil (17,0%). Padahal suntikan dan pil termasuk dalam metode kontrasepsi jangka pendek sehingga tingkat efektifitas suntikan dan pil dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.17
CAKUPAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN
TAHUN 2019

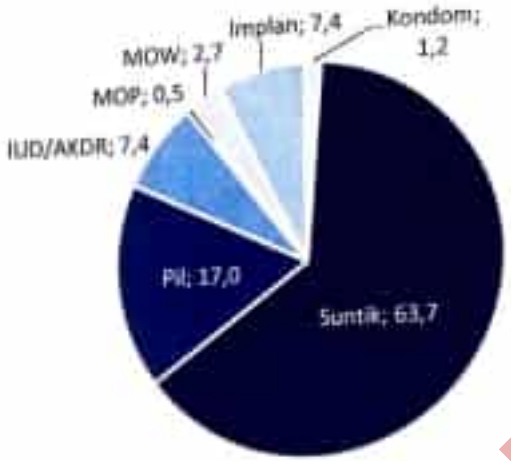

Sumber: Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019
Keterangan: MOW = Metode Operasi Wanita
MOW = Metode Operasi Pria

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.18 berikut ini.

GAMBAR 5.18
PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA
TAHUN 2019

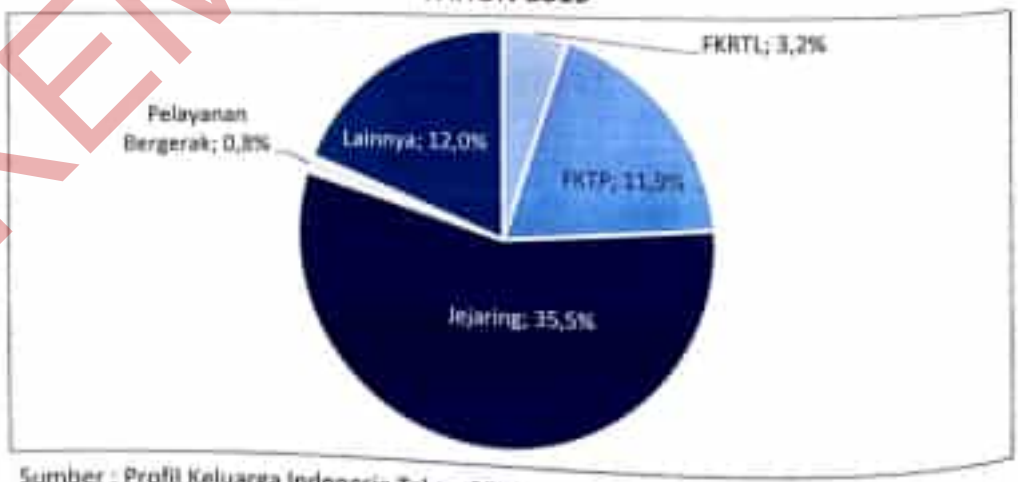

Sumber : Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019
Keterangan: FKRTL = Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
FKTP = Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

KEMENKES RI

Terdapat lima jenis tempat pelayanan KB yaitu FKRTL, FKTP, Jejaring, Pelayanan Bergerak, dan jenis tempat pelayanan KB Lainnya. Berdasarkan tempat pelayanan tersebut PUS paling banyak dilayani oleh Jejaring yaitu sebesar 35,5%. Jejaring tersebut terdiri atas Pustu/Pusling/Bidan Desa, Poskesdes/Polindes dan Praktek Bidan. Praktek Bidan memberikan pelayanan paling banyak yaitu sebesar 60,7% dari jumlah PUS yang dilayani oleh Jejaring. Provinsi dengan pengguna FKTP (puskesmas, klinik pratama, praktek dokter dan RS pratama) tertinggi sebagai tempat pelayanan KB yaitu Gorontalo, Papua, dan Sulawesi Utara.

Gambar 5.19 menyajikan cakupan peserta KB pasca persalinan menurut provinsi tahun 2019. KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. Cakupan KB pasca persalinan baru mencapai 35,1% tahun 2019 dengan jenis kontrasepsi suntik yang terbanyak yaitu 62,3%.

GAMBAR 5.19
CAKUPAN PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

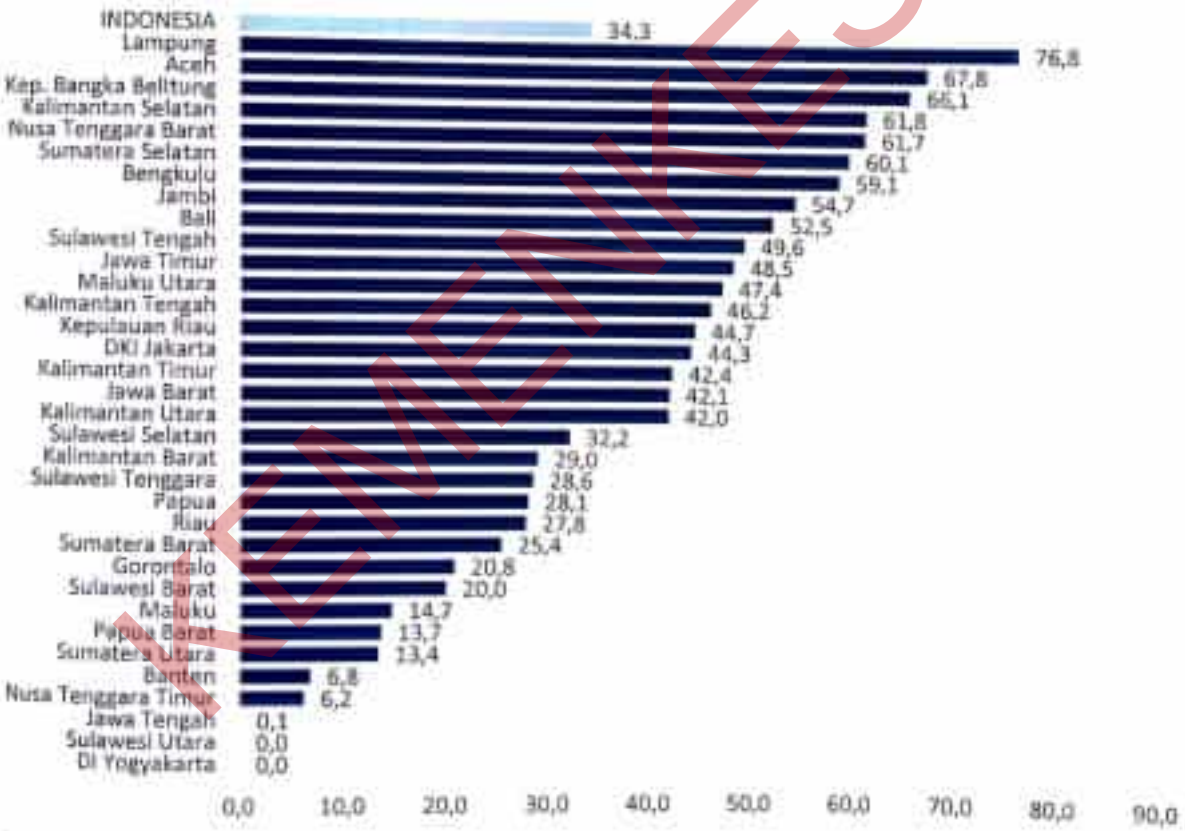

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KB pasca persalinan tertinggi terdapat di Provinsi Lampung yaitu sebesar 76,8% dan yang terendah di Jawa Tengah sebesar 0,1%. Terdapat dua provinsi yang belum melaporkan cakupan KB pasca persalinan yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Rincian data dapat dilihat pada Lampiran 29.

KEMENKES RI

8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang di lahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Selama tahun 2019 terdapat 2.370.473 ibu hamil yang di periksa HIV. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 6.439 (0,27%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara (3,06), Sulawesi Tenggara (1,44) dan Papua (1,12). Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 30.b

GAMBAR 5.20
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

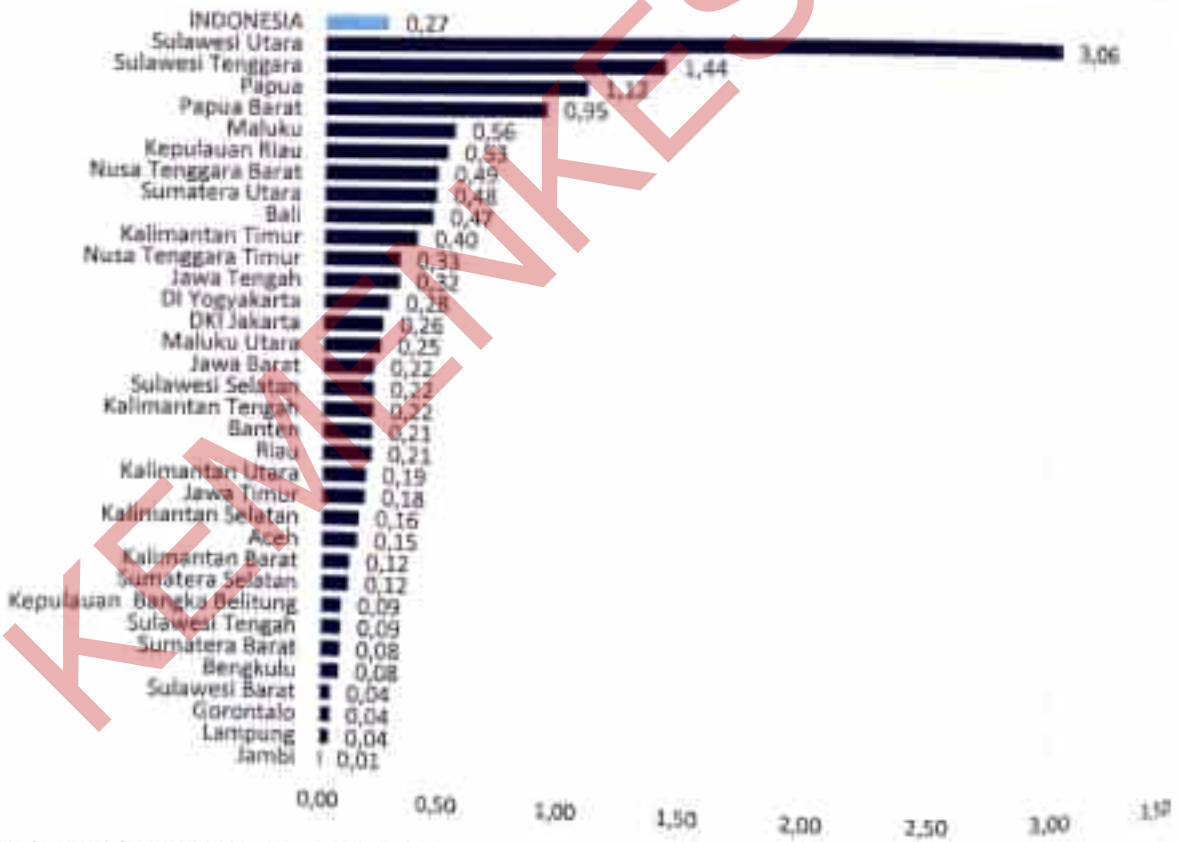

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

b. Hepatitis B

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% penularan Hepatitis B adalah secara vertikal yaitu dari Ibu yang Positif Hepatitis B ke bayi yang dilahirkannya. Sejak tahun 2015 telah dilakukan

KEMENKES RI

Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dilayanan Kesehatan dasar (Puskesmas) dan Jaringannya.

Pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah dengan menggunakan tes cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B. Bayi yang lahir dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif) diberi vaksin pasif yaitu HBIg (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 jam kelahiran disamping imunisasi aktif sesuai program Nasional (HB0, HB1, HB2 dan HB3). HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2015. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tiap tahun terdapat kenaikan target yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator dapat tercapai setiap tahunnya.

GAMBAR 5.21
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Target Kabupaten/kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B tahun 2019 sebanyak 80% (411 Kabupaten/kota). Tahun 2019 deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil/kelompok berisiko telah dilaksanakan di 464 kabupaten/kota atau sebesar 90,27% yang tersebar di 34 Provinsi.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.22

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

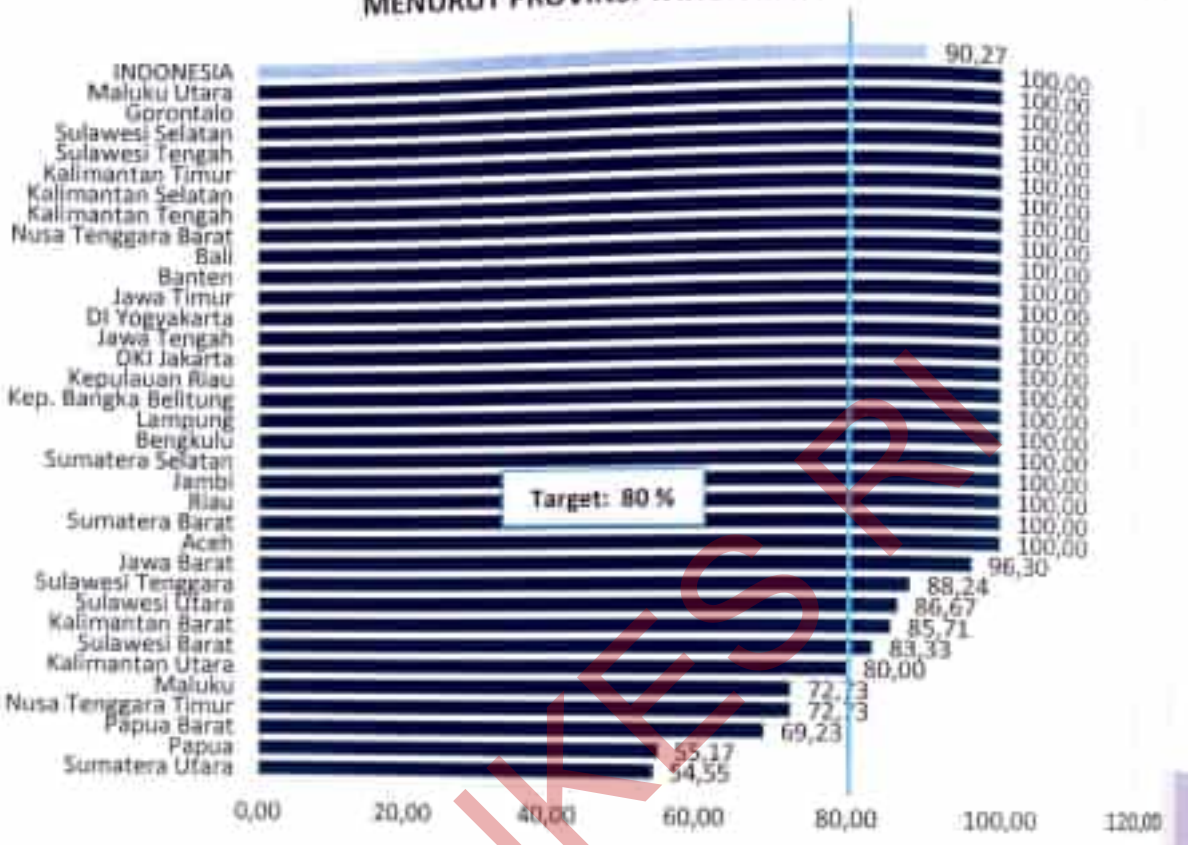

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan DDHB tampak pada gambar 5.22. Pada tahun 2019 terdapat 29 Provinsi yang sudah mencapai target. Provinsi dengan capaian tertinggi (100%) sebesar 23 provinsi sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Sumatera Utara (54,55%), dan Papua (55,17%).

Jumlah ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HbsAg tahun 2019 yaitu sebanyak 2.540.158 orang atau sebanyak 48,25% dari target ibu hamil. Hasil pemeriksaan RDT HbsAg menemukan bahwa sebanyak 46.064 (1,81%) ibu hamil terdeteksi HBsAg Reaktif (Positif).

KEMENKES RI

GAMBAR 5.23
PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

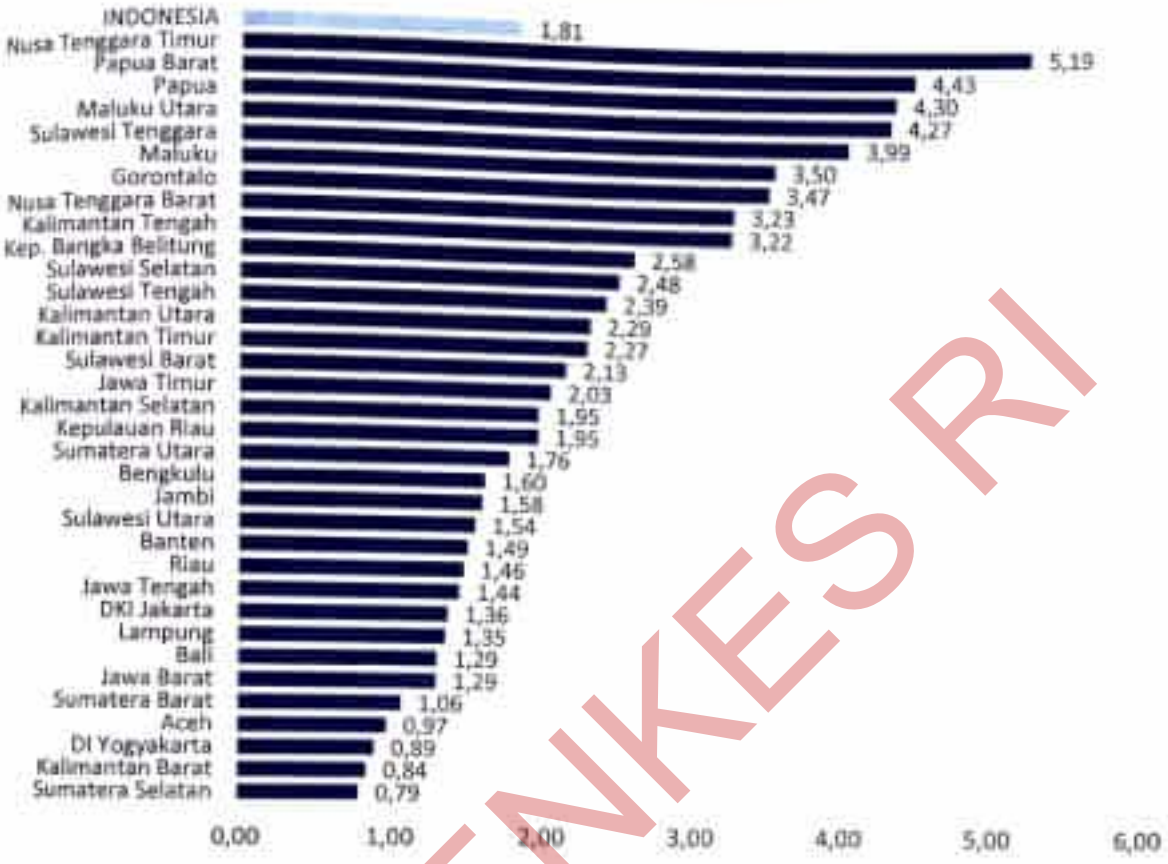

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Gambar 5.23 menunjukkan bahwa persentase ibu hamil HBsAg reaktif tertinggi yaitu Provinsi Nusa tenggara Timur (5,19%), Papua Barat (4,43%) dan Papua (4,30%). Data/informasi terkait penyakit Hepatitis B menurut provinsi terdapat pada Lampiran 30.c.

B. KESEHATAN ANAK

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.24
TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA
TAHUN 1991 – 2017

Sumber: SDKI tahun 1991-2017

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup (Gambar 5.22). Meskipun demikian, angka kematian neonatus, bayi, dan balita diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan AKN menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024. Sementara, sesuai dengan Target Pembangunan Berkelanjutan, AKABA diharapkan dapat mencapai angka 18,8 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030.

GAMBAR 5.25
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2019

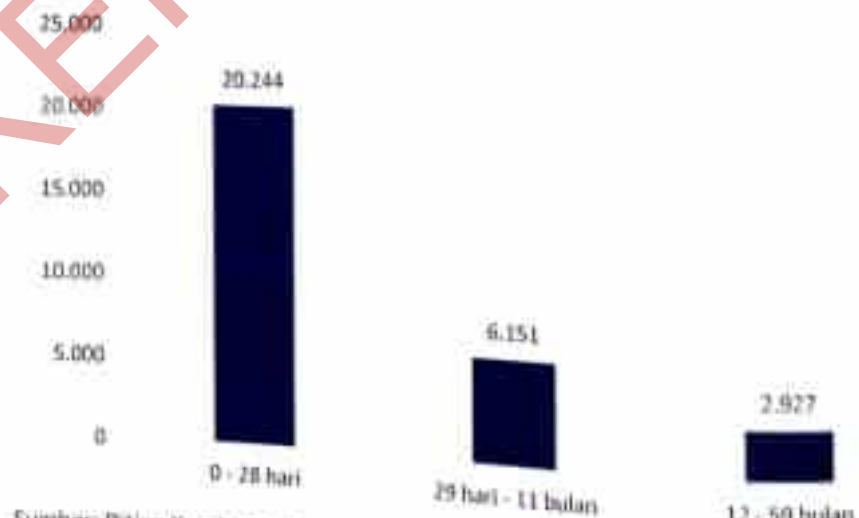

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Berdasarkan data yang dilaporkan kepada Direktorat Kesehatan Keluarga melalui komdat.kesga.kemkes.go.id, pada tahun 2019, dari 29.322 kematian balita, 69% (20.244 kematian) diantaranya terjadi pada masa neonatus (Gambar 5.25). Dari seluruh kematian neonatus yang dilaporkan, 80% (16.156 kematian) terjadi pada periode enam hari pertama kehidupan. Sementara, 21% (6.151 kematian) terjadi pada usia 29 hari – 11 bulan dan 10% (2.927 kematian) terjadi pada usia 12 – 59 bulan.

GAMBAR 5.26
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019, penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, kelainan bawaan, sepsis, tetanus neonatorium, dan lainnya.

GAMBAR 5.27
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Penyakit infeksi menjadi penyumbang kematian pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan. Berdasarkan data tahun 2019, pneumonia dan diare masih menjadi masalah utama yang meyebabkan 979 kematian (pneumonia) dan 746 kematian (diare). Penyebab kematian lain di antaranya adalah kelainan saluran cerna, kelainan saraf, malaria, tetanus, dan lainnya.

GAMBAR 5.28
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2019

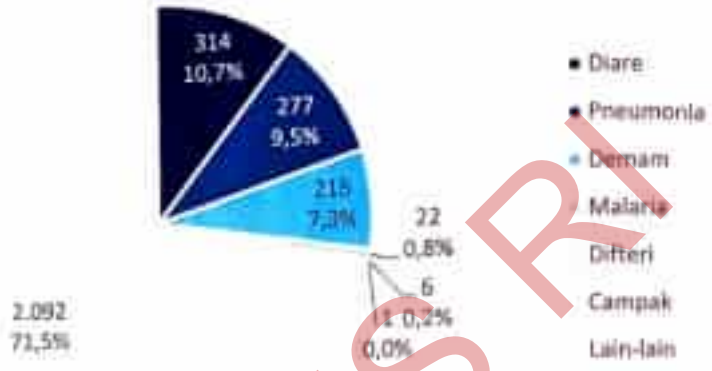

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) penyebab kematian terbanyak adalah diare. Penyebab kematian lain di antaranya pneumonia, demam, malaria, difteri, campak, dan lainnya.

Upaya kesehatan anak yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan perlindungan kesehatan anak. Dalam Profil Kesehatan Indonesia ini data dan informasi mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi: pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi rutin pada anak, pelayanan kesehatan pada anak sekolah, dan pelayanan kesehatan peduli remaja.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Salah satu pelayanan yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah penimbangan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh 25 provinsi kepada Direktorat Gizi Masyarakat, dari tahun 2019 bayi baru lahir yang dilaporkan ditimbang berat badannya, didapatkan sebanyak 111.827 bayi (3,4%) memiliki

KEMENKES RI

berat badan lahir rendah (BBLR). Sedangkan menurut hasil Riskesdas tahun 2018, dari 56,6% balita yang memiliki catatan berat lahir, sebanyak 6,2% lahir dengan kondisi BBLR. Kondisi bayi BBLR diantara disebabkan karena kondisi ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (*intrauterine growth restriction*). Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring dengan pertambahan usian. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk stunting dan mengidap penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat dewasa. Rincian data mengenai bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dapat dilihat pada Lampiran 33.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

GAMBAR 5.29
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
TAHUN 2009-2019

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Riskesdas, Kemenkes RI

Capaian KN1 Indonesia pada tahun 2019 sebesar 94,9%, lebih kecil dari tahun 2018 yaitu sebesar 97,4% (Gambar 5.29). Namun capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 90%. Sejumlah 16 provinsi (47,1%) telah memenuhi target tersebut. Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.30.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.30
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

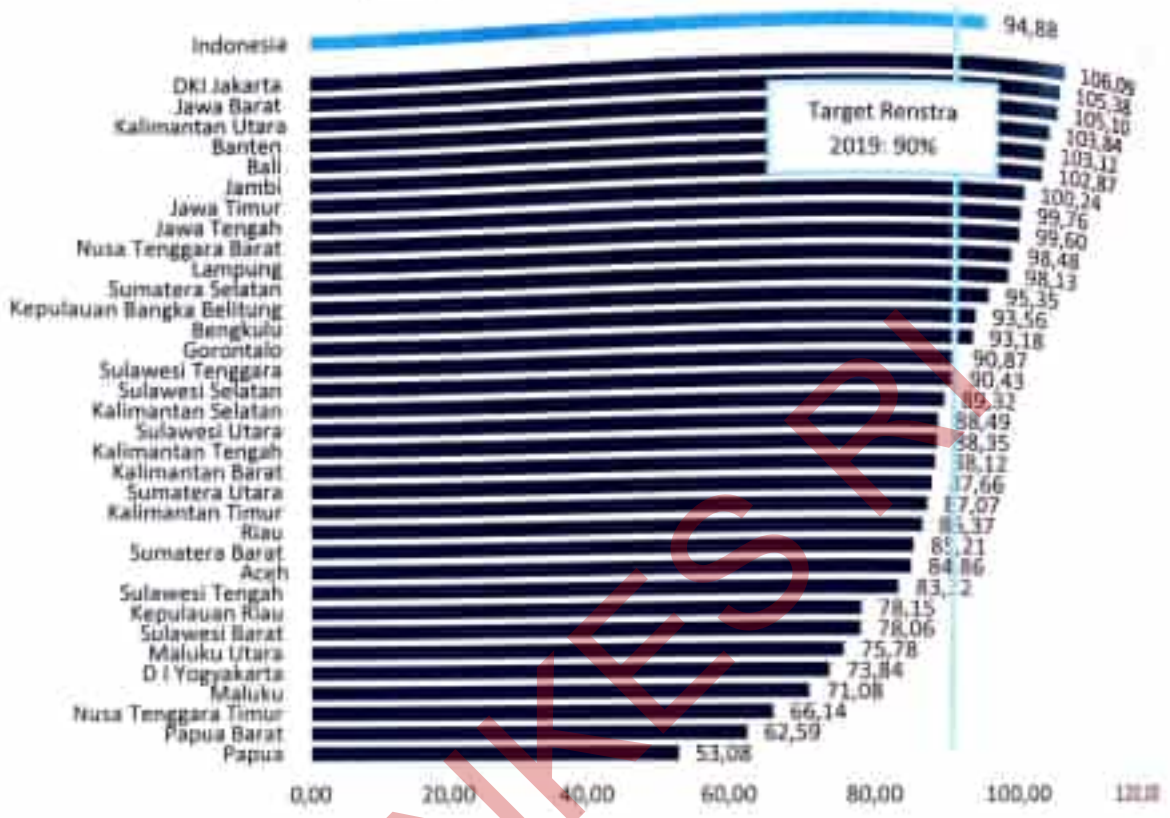

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Hasil capaian nasional per provinsi masih terdapat disparitas cakupan KN1 antar provinsi yang berkisar antara 53,08% di Papua dan 106,09% di DKI Jakarta. Beberapa provinsi mendapatkan cakupan lebih dari 100% dikarenakan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran riil yang didapatkan.

Sedangkan cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap), yaitu cakupan pelayanan Kunjungan Neonatal minimal tiga kali sesuai standar, pada tahun 2019 sebesar 87,1%. Empat provinsi cakupannya mencapai 100% yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Sedangkan provinai dengan cakupan terendah di Sulawesi Utara (8,53%), Papua (43,78%) dan Jawa Tengah (54,22%). Rincian data cakupan KN1 dan KN lengkap dapat dilihat di Lampiran 34.

2. Imunisasi

Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017.

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai

KEMENKES RI

penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling *cost-effective* (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya.

Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (baduta), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu.

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul.

GAMBAR 5.31
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
TAHUN 2011-2019

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Riskesdas, Kemenkes RI

KEMENKES RI

Pada tahun 2019 imunisasi dasar lengkap di Indonesia sebesar 93,7% (Gambar 5.31). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 93%. Sedangkan menurut provinsi terdapat 15 provinsi yang mencapai target Renstra tahun 2019.

GAMBAR 5.32
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

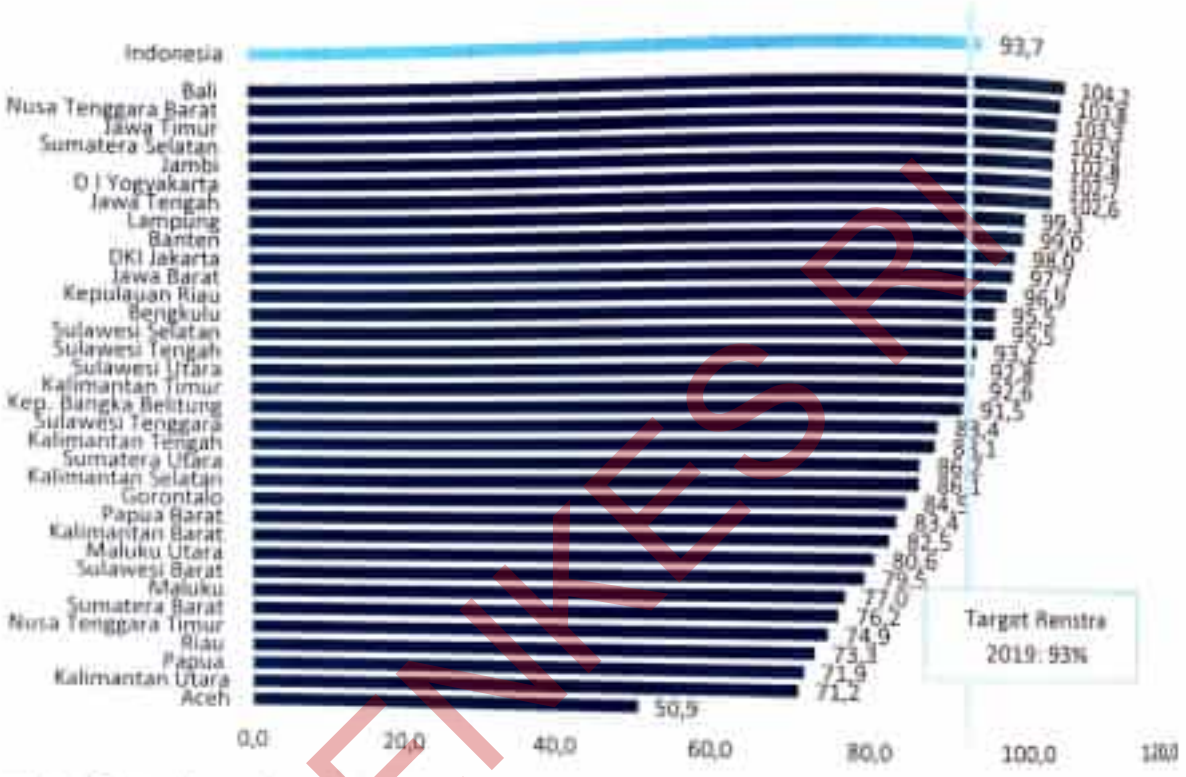

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Pada Gambar 5.32 di atas, diketahui bahwa seluruh bayi di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Aceh (50,9%). Rincian data mengenai imunisasi dasar pada bayi tahun 2019 terdapat pada Lampiran 39.a.

Dari imunisasi dasar yang diwajibkan tersebut, campak/MR menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubela pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubela menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubela. Dengan demikian pencegahan campak dan rubela memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.33
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI
DI INDONESIA TAHUN 2009-2019

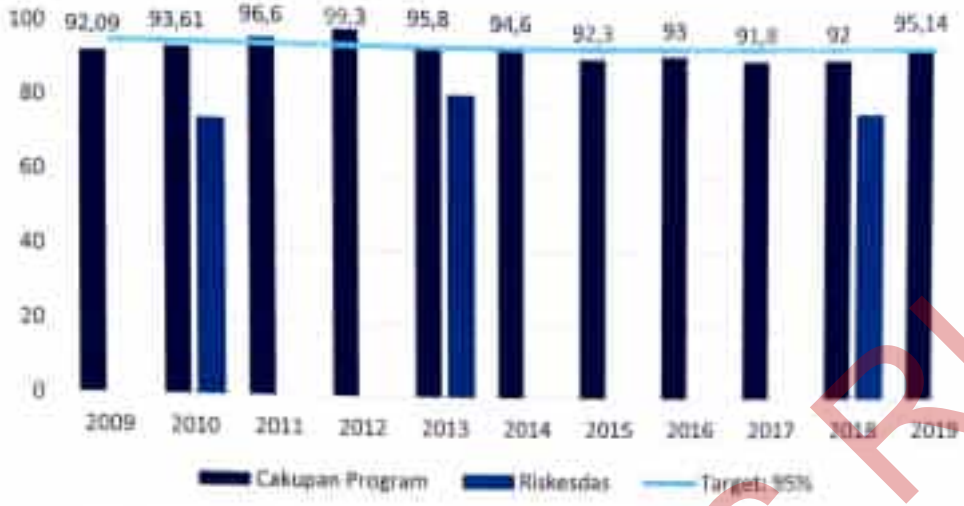

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Riskesdas, Kemenkes RI

Cakupan imunisasi campak program di Indonesia pada tahun 2019 adalah 95,14%. Angka ini sudah memenuhi target 95% (Gambar 5.33). Tren cakupan imunisasi campak pada 10 tahun terakhir selalu di atas 90%. Namun jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2018 terdapat perbedaan yaitu proporsi anak 12-23 bulan yang mendapat imunisasi campak yaitu hanya sebesar 77,3%.

GAMBAR 5.34
CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

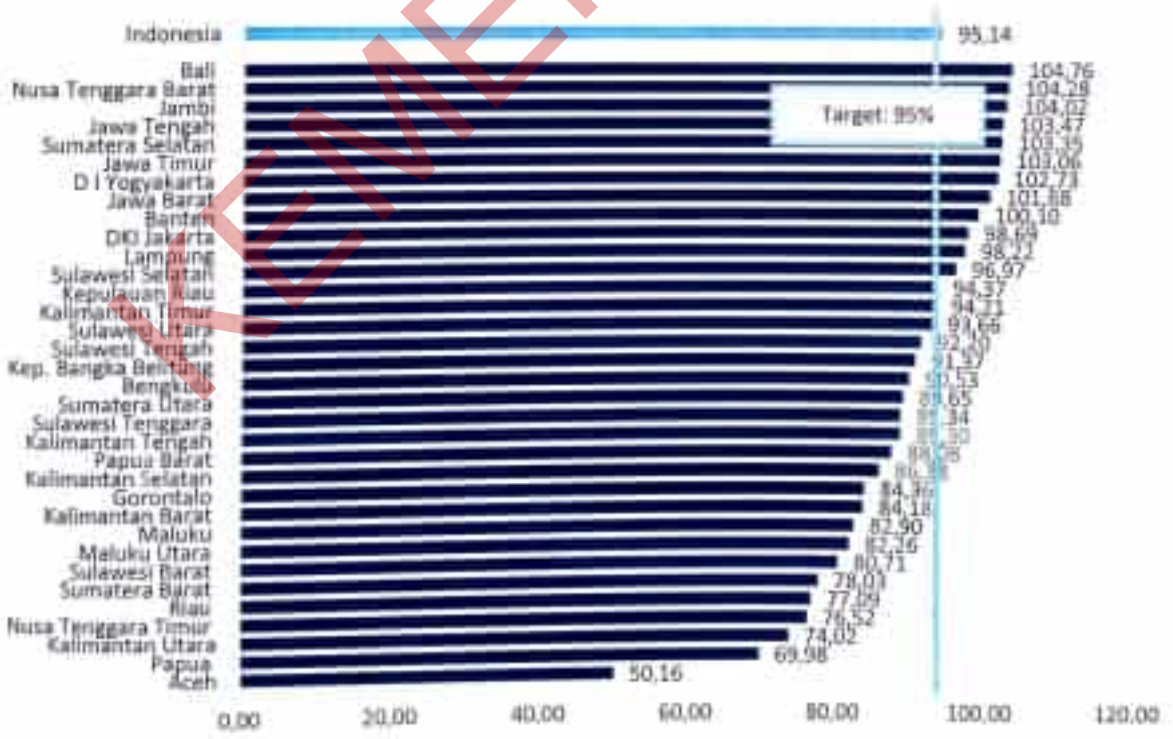

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Dua belas provinsi telah berhasil mencapai target cakupan imunisasi campak sebesar 95% dan 9 provinsi di antaranya telah mencakup seluruh bayi di wilayah masing-masing yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten (Gambar 5.34). Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Aceh (50,16%) dan Papua (69,98%).

b. Angka *Drop Out* Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak

Sebelum anak berusia satu tahun, imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan *drop out* (*DO*) imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi Campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1.

Drop out rate DPT/HB1-Campak diharapkan tidak melebihi 5%. Batas maksimal tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 yang asumsinya semakin banyak bayi yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan DO rate menjad 4,1% akibat semakin banyaknya kelompok anti vaksin yang menolak mengimunisasikan anaknya sehingga cakupan imunisasi menurun hampir di semua antigen. Angka *drop out* imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2018 kembali dapat ditekan sehingga menurun menjadi 2,5%. Pada tahun 2019, angka *drop out* kembali meningkat menjadi 3,1%. Hal ini disebabkan karena vaksin Campak-MR merupakan vaksin yang baru masuk ke dalam imunisasi rutin sehingga masih ada keraguan dari orangtua untuk memberikan vaksin MR kepada anaknya. Namun demikian angka *drop out* ini masih termasuk *drop out* kecil karena masih di bawah angka 5%. Tren dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 5.35
ANGKA *DROP OUT* IMUNISASI DPT/HB/HiB1-CAMPAK PADA BAYI
TAHUN 2009-2019

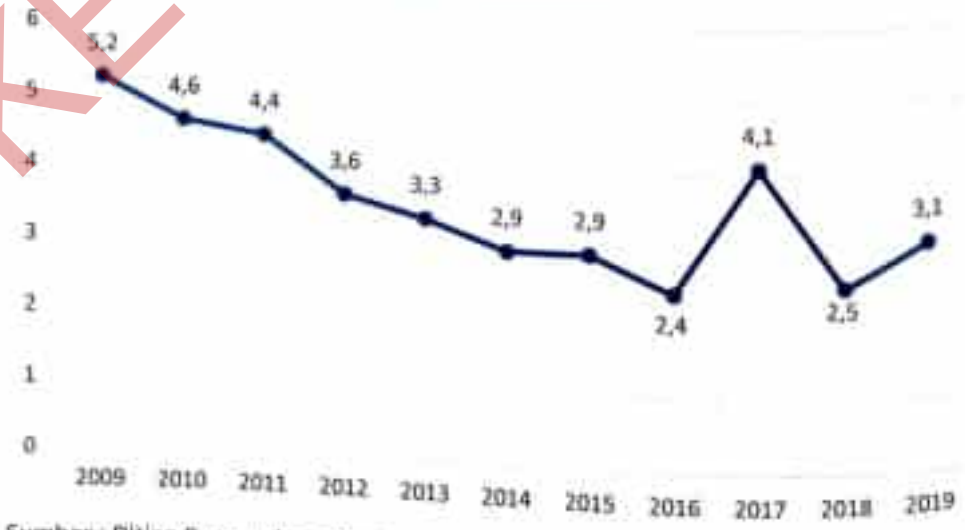

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Rincian data lengkap mengenai angka *drop out* cakupan imunisasi DPT/HB1-Campak dan DPT/HB(1)-DPT/HB(3) pada tahun 2017-2019 dapat dilihat di Lampiran 39.b.

c. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Pada tahun 2019 cakupan desa UCI di Indonesia sebesar 81,34%. Ada tiga provinsi yang telah mencapai 100% cakupan desa/kelurahan UCI yaitu Bali, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Aceh (23,76%) dan Papua (44,21%). Rincian lengkap mengenai cakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2019 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 37.

GAMBAR 5.36
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

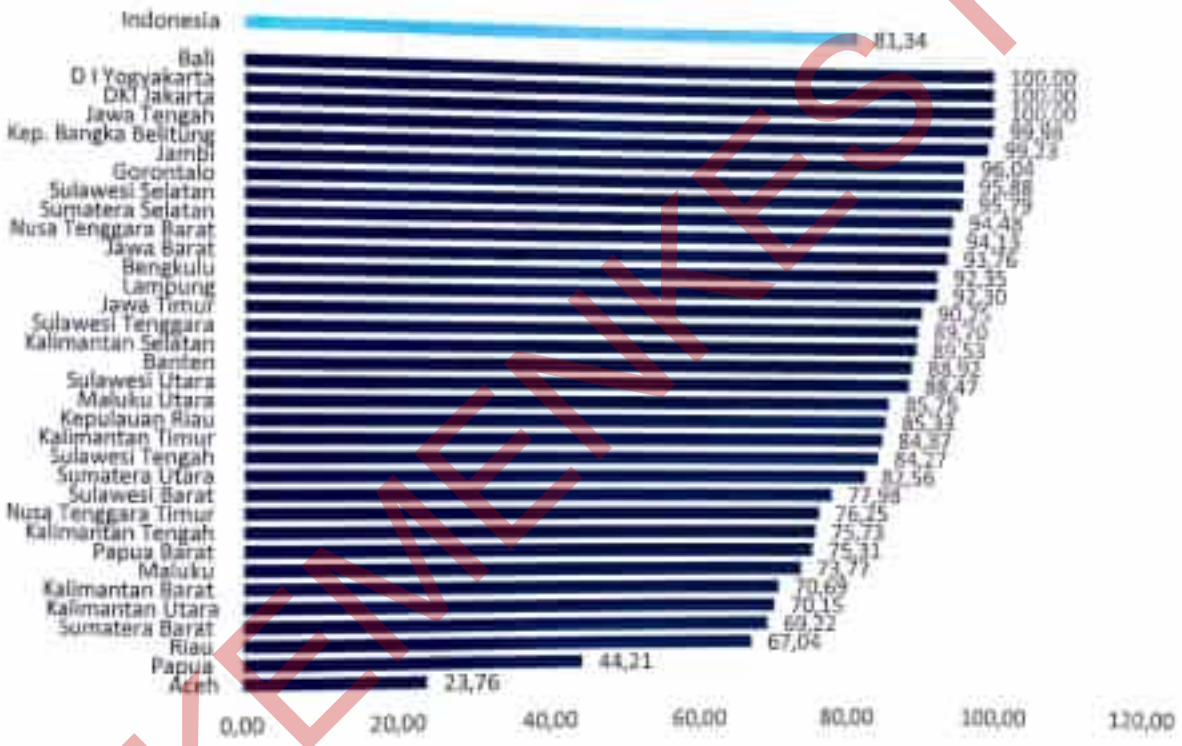

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

d. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan target 95% pada tahun 2019.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.37
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2015-2019

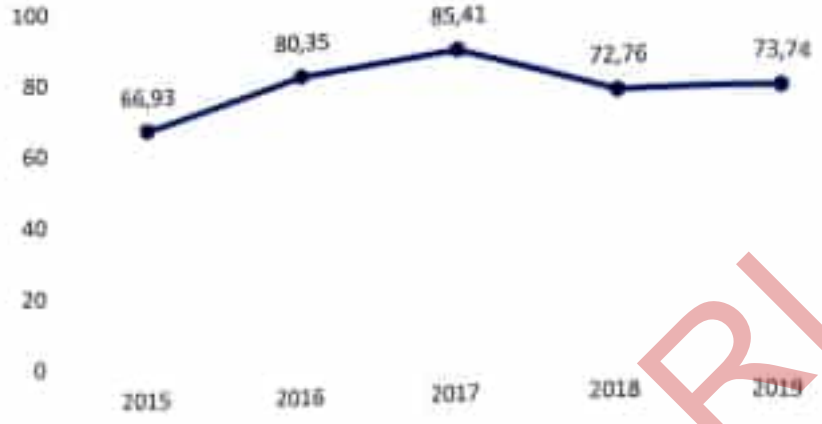

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2019

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 72,76%. Pada tahun 2019, terdapat 73,74% kabupaten/kota yang telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap, tetapi angka ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 95% (Gambar 5.37).

GAMBAR 5.38
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

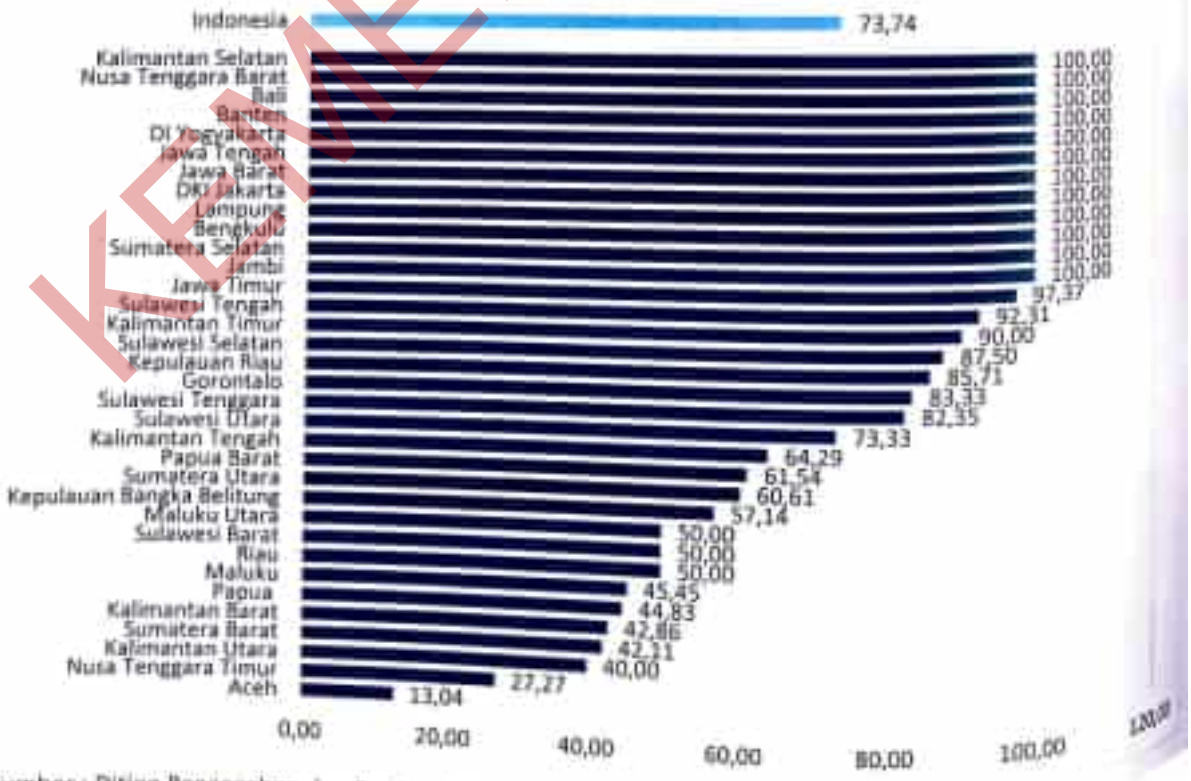

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Pada Gambar 5.35 diketahui bahwa ada dua belas provinsi yang 100% kabupaten/kotanya telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Aceh (13,04%) dan Nusa Tenggara Timur (27,27%). Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 39.c.

e. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan agar tetap tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Pemberian imunisasi pada anak perlu ditambah dengan dosis lanjutan *(booster)* untuk meningkatkan kekebalannya yang diberikan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan 1 dosis DPT-HB-HiB(4) dan campak/MR(2) kepada anak usia 18-24 bulan.

GAMBAR 5.39
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB (4) PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

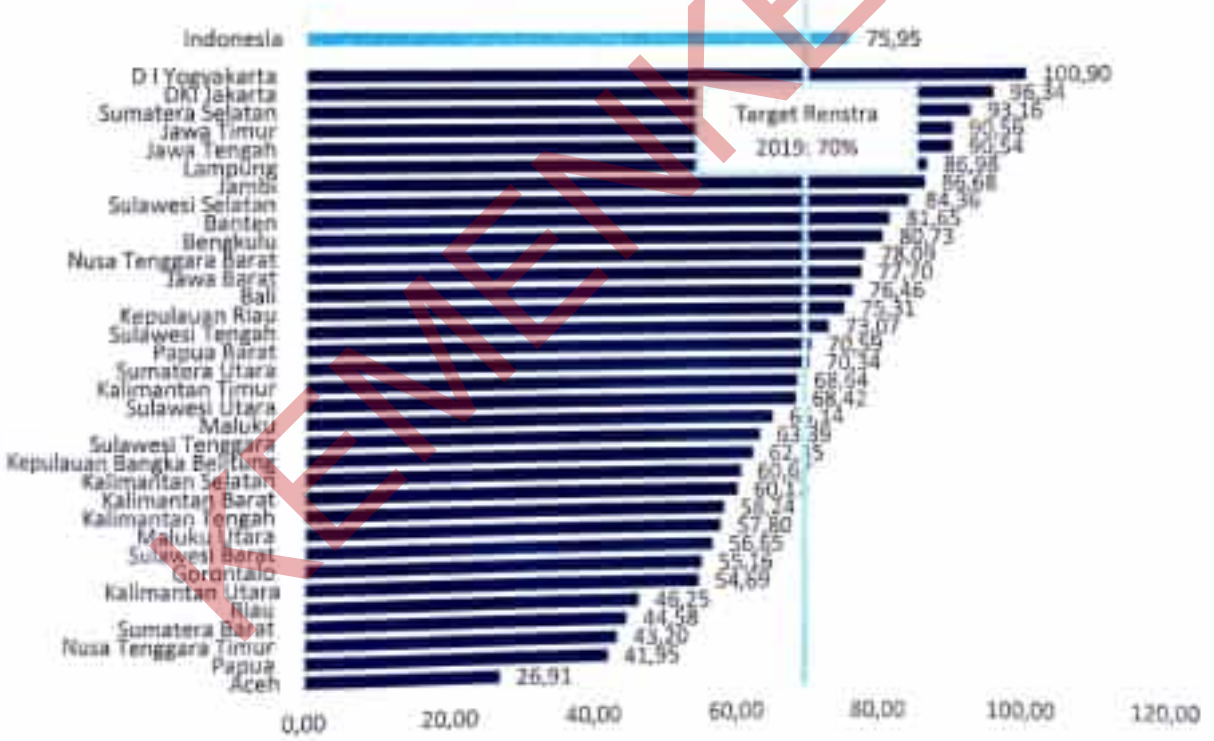

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

Cakupan anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib(4) pada tahun 2019 adalah 75,95%. Angka ini telah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 70%. Namun 50% provinsi masih belum dapat mencapai target. Provinsi dengan cakupan terendah adalah Aceh (26,91%), Papua (41,95%) dan Nusa Tenggara Timur (43,2%). Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-HIB (4) dan campak/MR (2) pada anak baduta dapat dilihat pada Lampiran 40.a.

KEMENKES RI

f. Imunisasi Anak Sekolah

Pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia sekolah dasar dan diberikan secara terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Imunisasi yang diberikan adalah imunisasi campak, tetanus dan difteri. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pemberian imunisasi pada BIAS yang sebelumnya diberikan pada anak kelas 1, 2 dan 3 SD berubah menjadi diberikan pada kelas 1 (campak dan DT), 2 (Td) dan 5 SD (Td). Pada tahun 2017-2018, pemberian imunisasi pada BIAS hanya dilakukan pada kelas 1 dan 2 saja, sedangkan kelas 5 SD akan dilakukan mulai tahun 2019.

Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1 SD tahun 2019 sebesar 89,4%, imunisasi DT pada anak kelas 1 SD sebesar 90,07%, dan imunisasi Td anak kelas 2 SD sebesar 90,71%. Rincian cakupan imunisasi anak sekolah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 40.b.

3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader kesehatan sekolah dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi bdan dan berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengaran.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di sekolah juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.40
CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

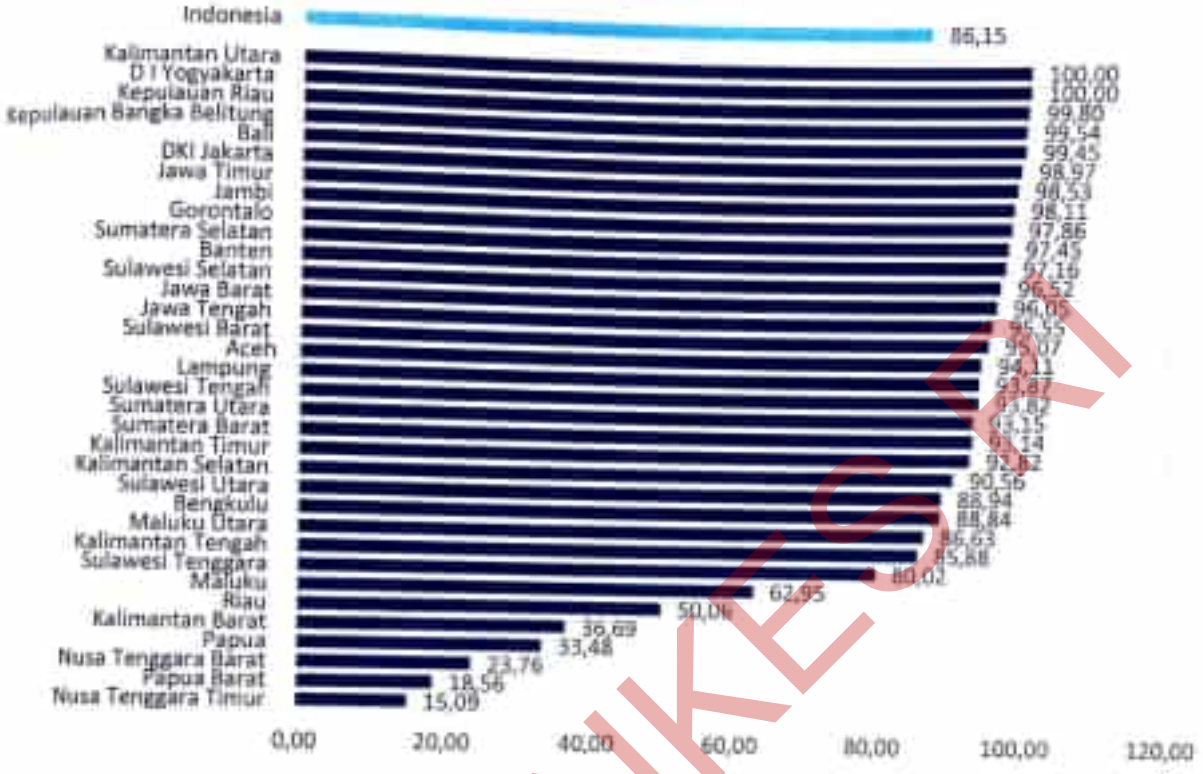

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 86,15% (Gambar 5.40). Ada dua provinsi yang seluruh sekolah SD/MI telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu Kalimantan Utara dan DI Yogyakarta. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Nusa Tenggara Timur (15,09%), Papua Barat (18,56%), dan Nusa Tenggara Barat (23,76%).

KEMENKES RI

GAMBAR 5.41

CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

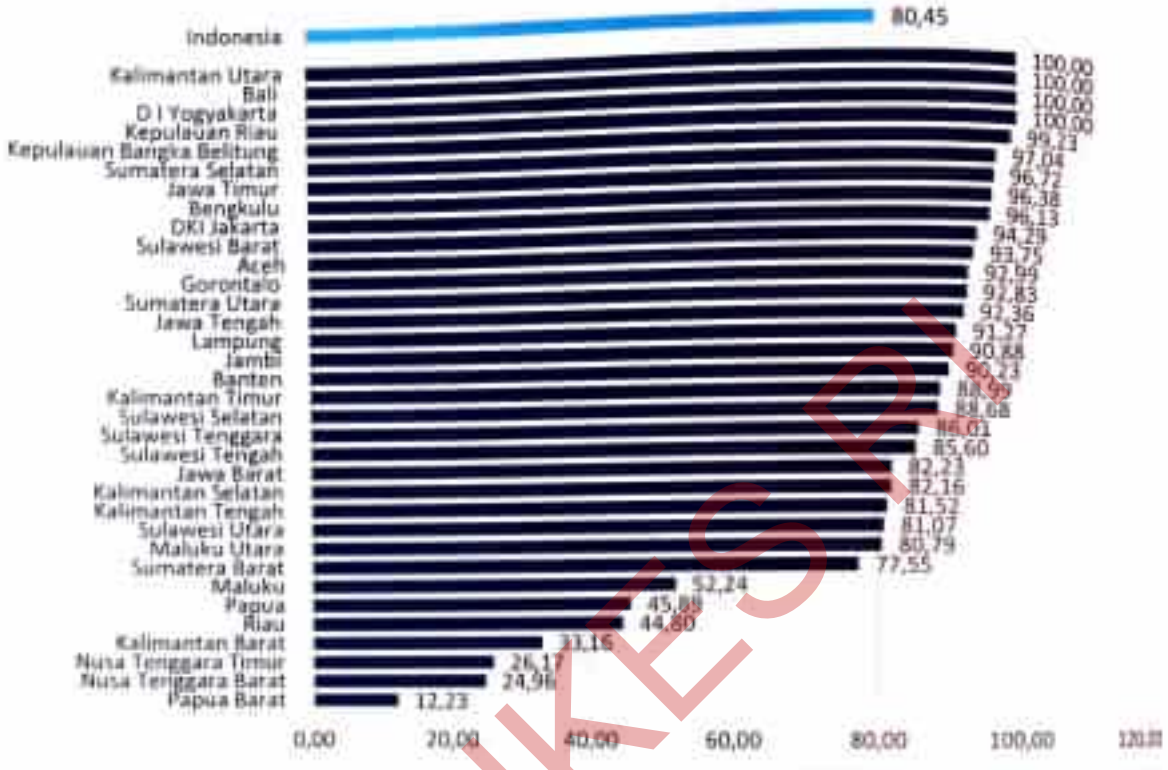

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 80,45% (Gambar 5.41). Ada empat provinsi yang seluruh sekolah SMP/MTs telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu Kalimantan Utara, Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Papua Barat (12,23%), Nusa Tenggara Barat (24,96%), dan Nusa Tenggara Timur (26,17%).

KEMENKES RI

GAMBAR 5.42
CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

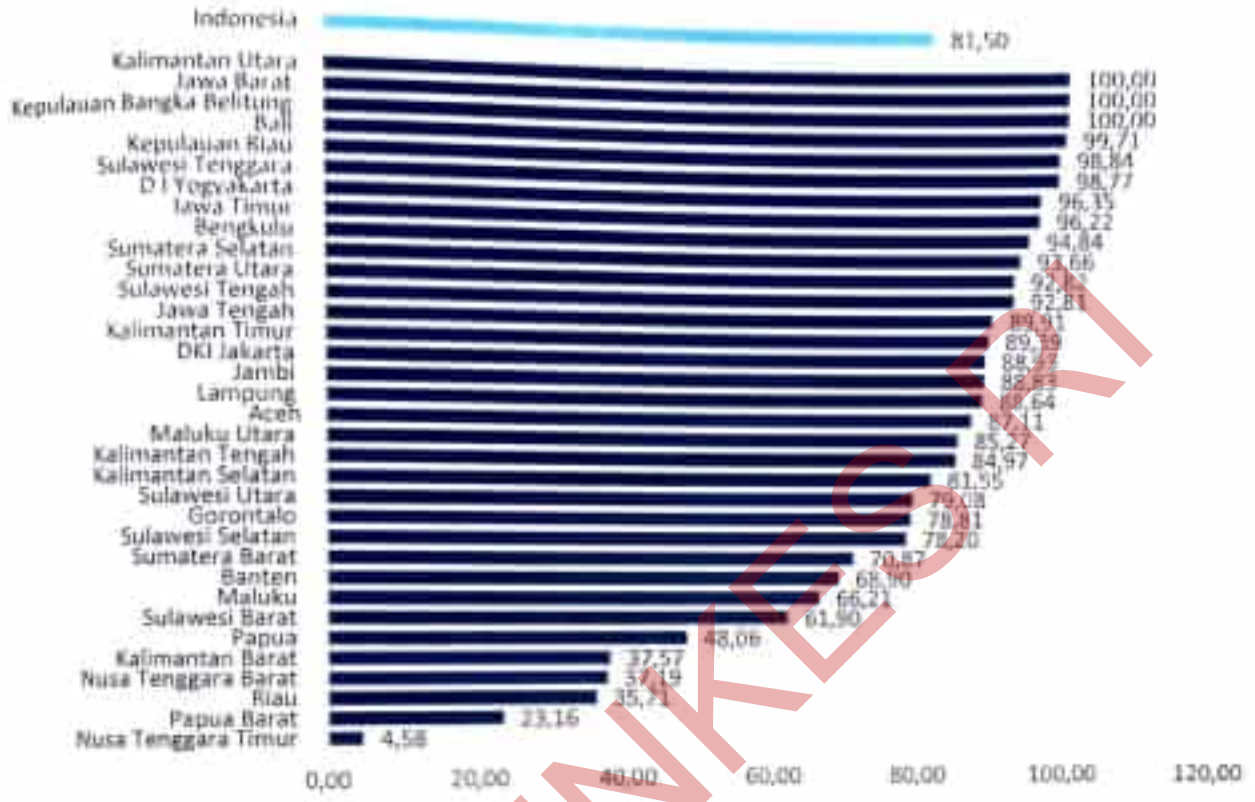

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Cakupan sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 81,5% (Gambar 5.41). Ada empat provinsi yang seluruh sekolah SMA/MA telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Nusa Tenggara Timur (4,58%), Papua Barat (23,16%), dan Riau (35,71%). Rincian lengkap mengenai cakupan pelayanan kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat dilihat pada Lampiran 45.

C. GIZI

Pada sub bab gizi ini akan dibahas terkait status gizi balita dan upaya pencegahan serta penanganan masalah gizi yaitu pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan balita kurus.

1. Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

KEMENKES RI

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 11,4%. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, yaitu persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan sebesar 3,5% dan persentase gizi kurang sebesar 11,3%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-23 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Jawa Barat.

GAMBAR 5.43
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018

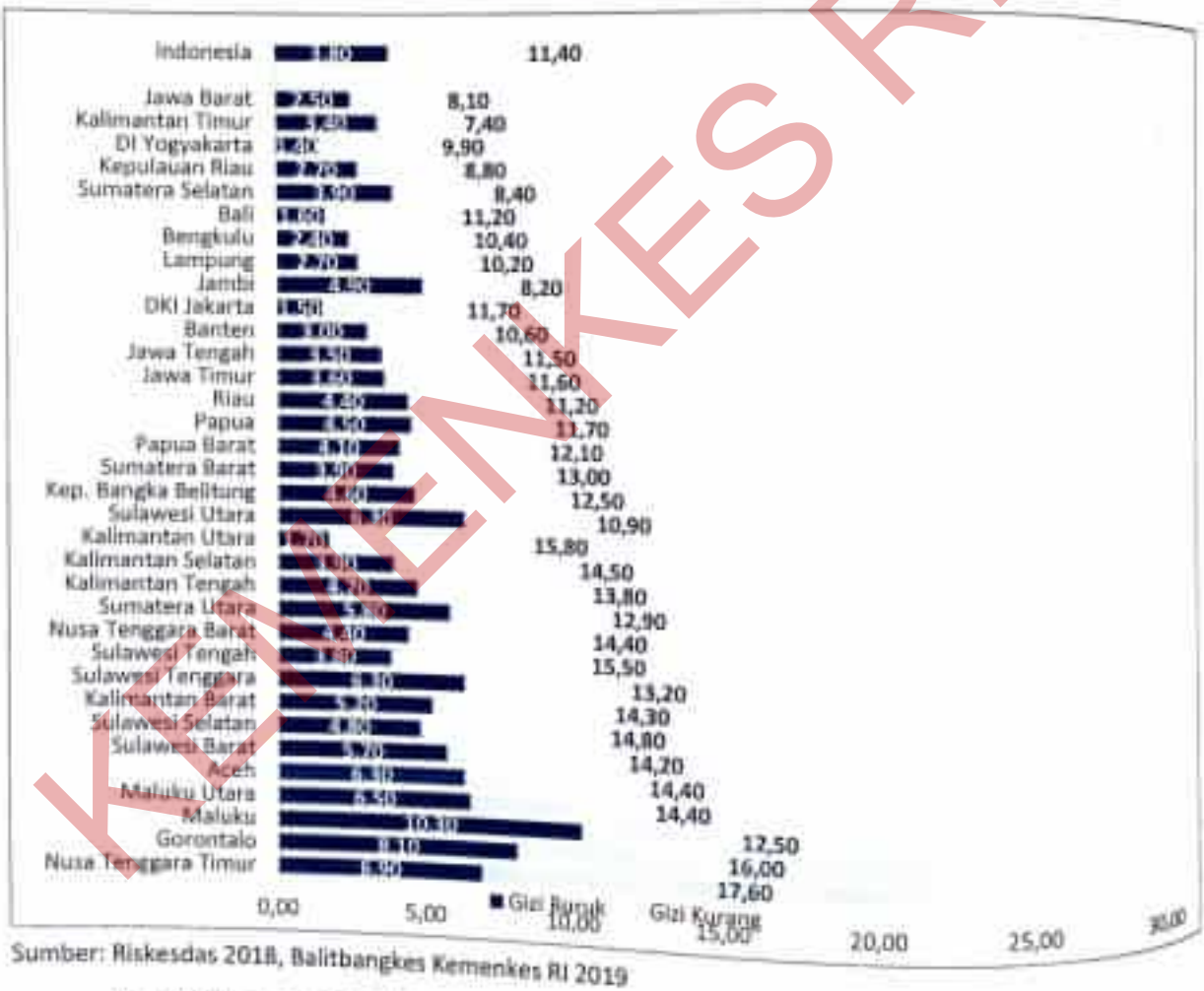

Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Pada balita usia 0-59 bulan, hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa persentase gizi buruk di Indonesia adalah 3,9%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 13,8%. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, yaitu persentase gizi buruk pada balita usia 0-59 bulan sebesar 3,8% dan persentase gizi kurang sebesar 14,0%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-59 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.44

PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018

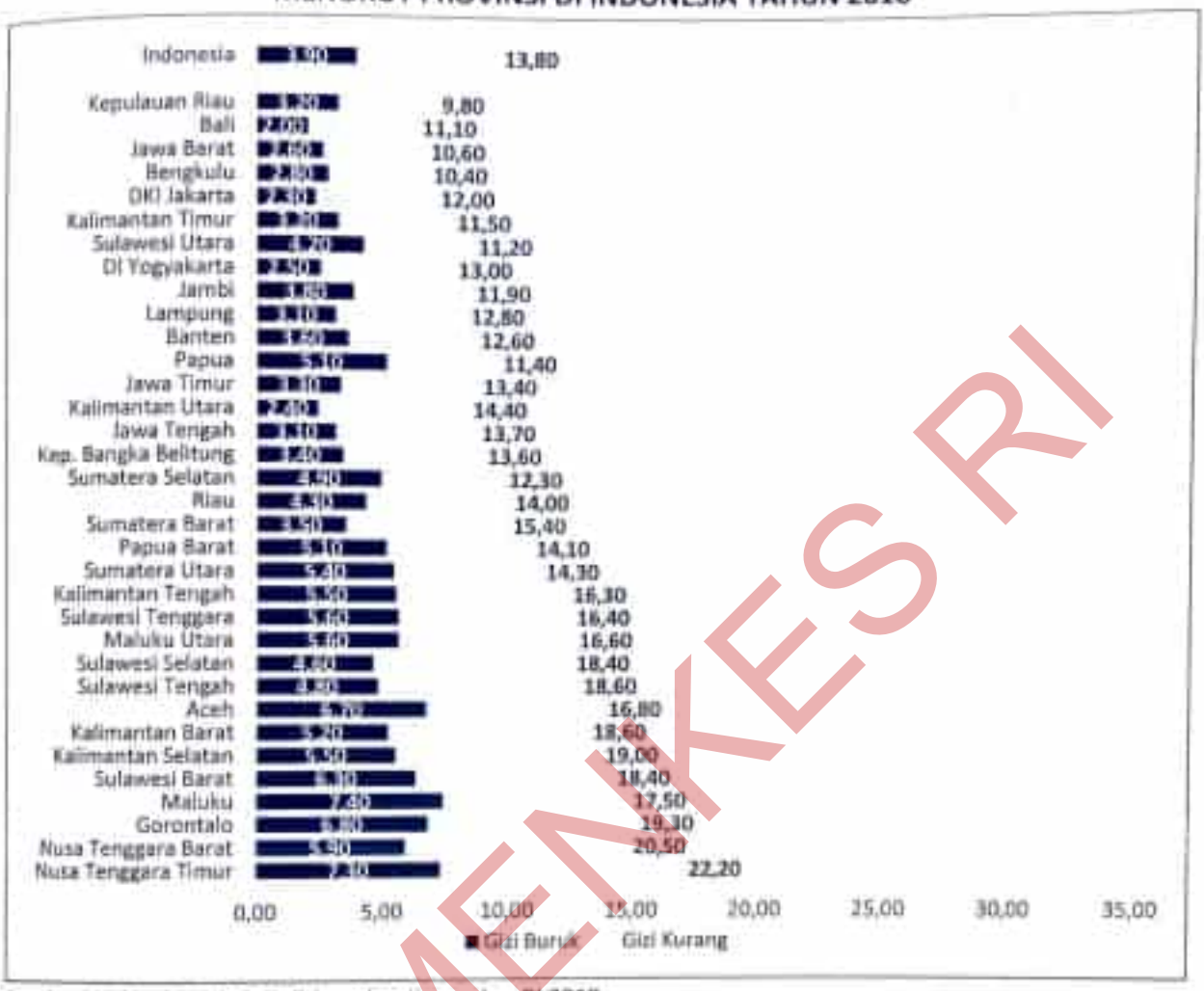

Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Pendek dan sangat pendek atau yang sering disebut sebagai *stunting* merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur. Persentase balita sangat pendek dan pendek usia 0-23 bulan di Indonesia tahun 2018 yaitu 12,8% dan 17,1%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana persentase balita sangat pendek yaitu sebesar 6,9% dan balita pendek sebesar 13,2%. Pada tahun 2018, Provinsi Aceh memiliki persentase tertinggi balita sangat pendek dan pendek usia 0-23 bulan, sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase terendah untuk kategori tersebut.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.45

PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018

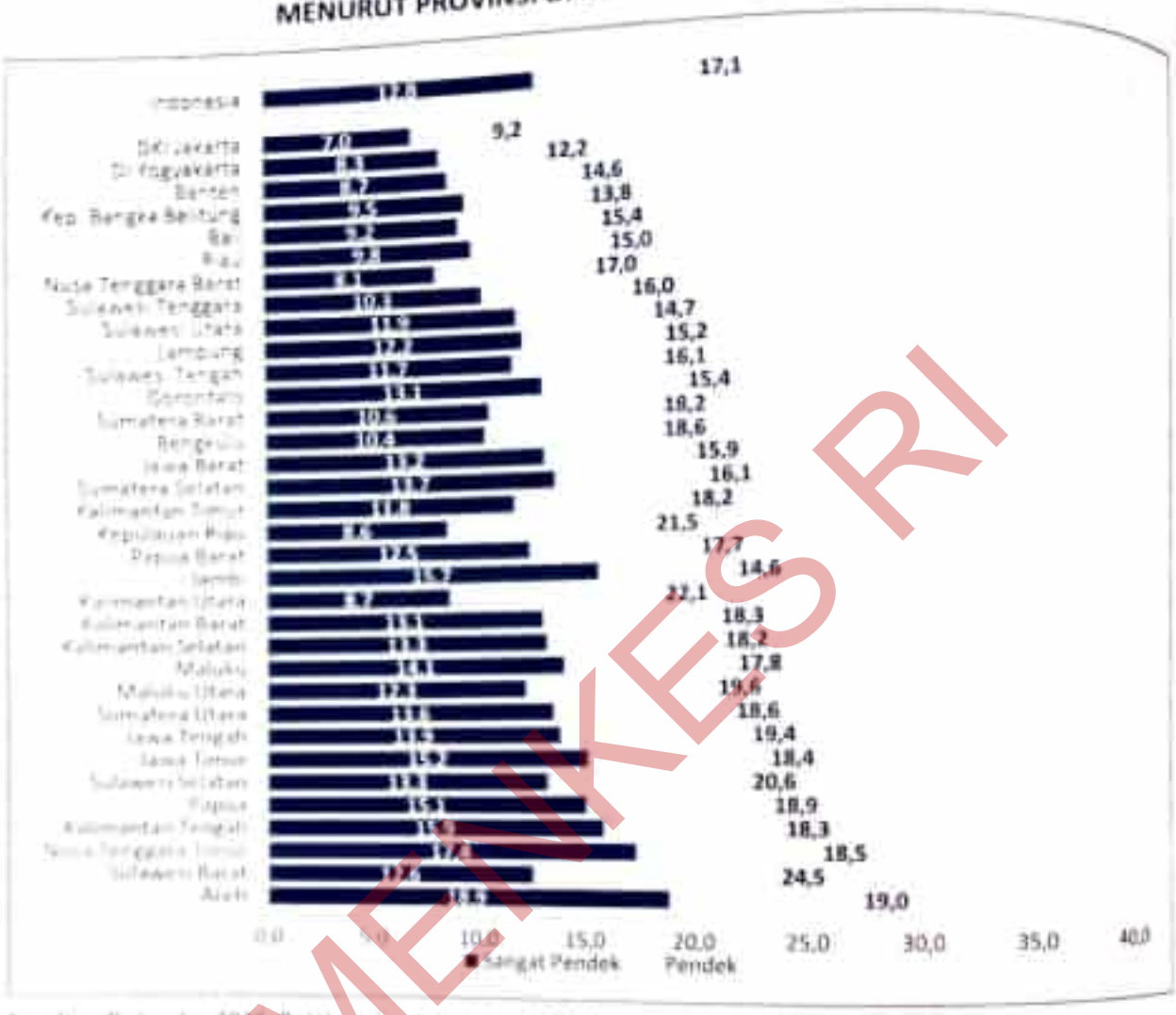

Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Persentase balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia tahun 2018 adalah 11,5% dan 19,1%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu persentase balita usia 0-59 bulan sangat pendek sebesar 9,8% dan balita pendek sebesar 19,8%. Provinsi dengan persentase tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0-59 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah DKI Jakarta.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.46

PERSENTASE PENDEK DAN SANGAT PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018

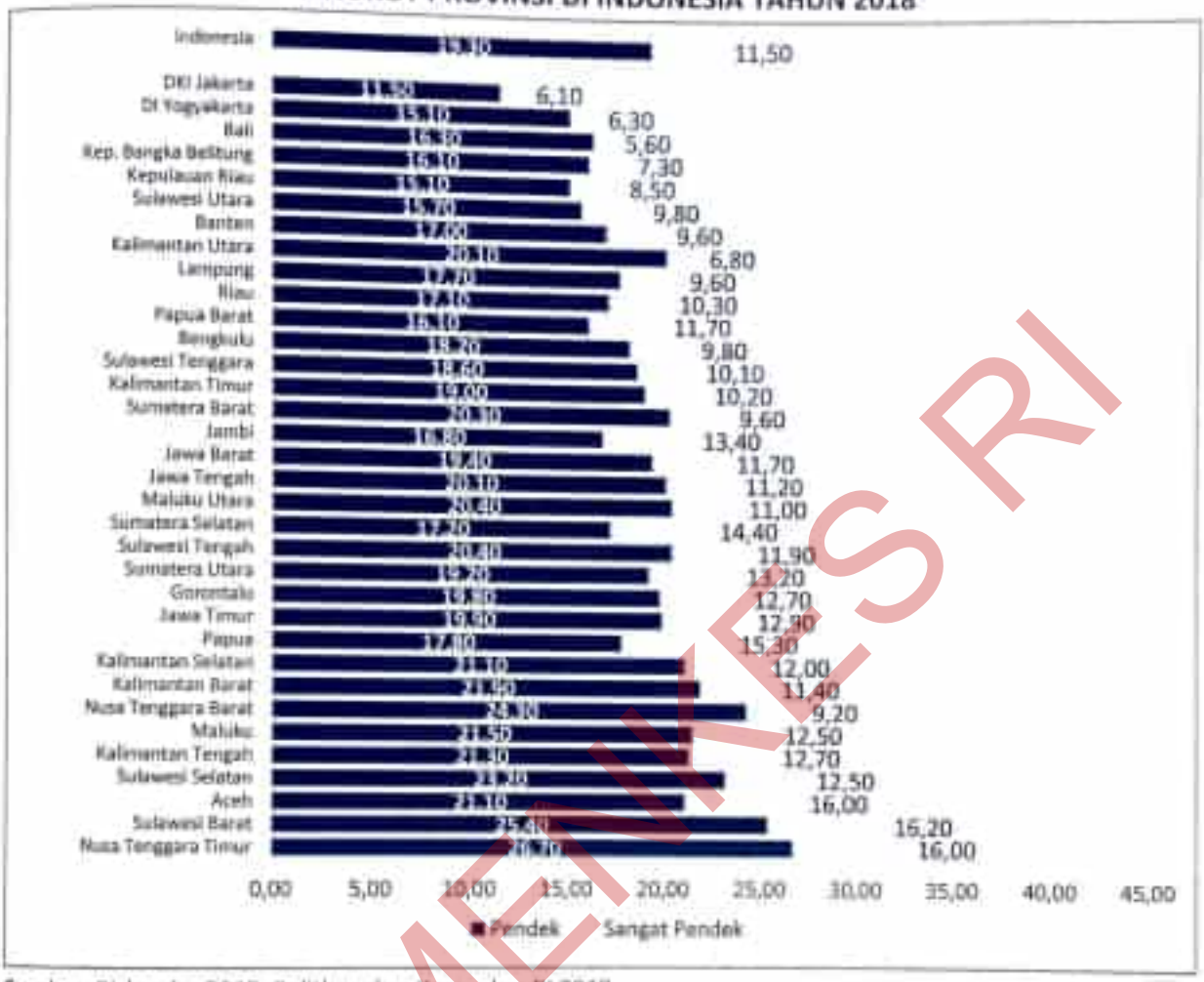

Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Kategori balita kurus dan sangat kurus merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Persentase balita sangat kurus dan kurus usia 0-23 bulan di Indonesia pada tahun 2018 adalah 4,5% dan 7,2%. Bila dijumlahkan, persentase ini cenderung turun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 dimana persentase balita sangat kurus dan kurus sebesar 3,9% dan 8,9%. Meski demikian, persentase balita sangat kurus usia 0-23 bulan tahun 2018 mengalami kenaikan. Provinsi Maluku memiliki persentase tertinggi balita sangat kurus dan kurus usia 0-23 bulan tahun 2018, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki persentase terendah balita usia 0-23 bulan sangat kurus dan kurus.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.47

PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018

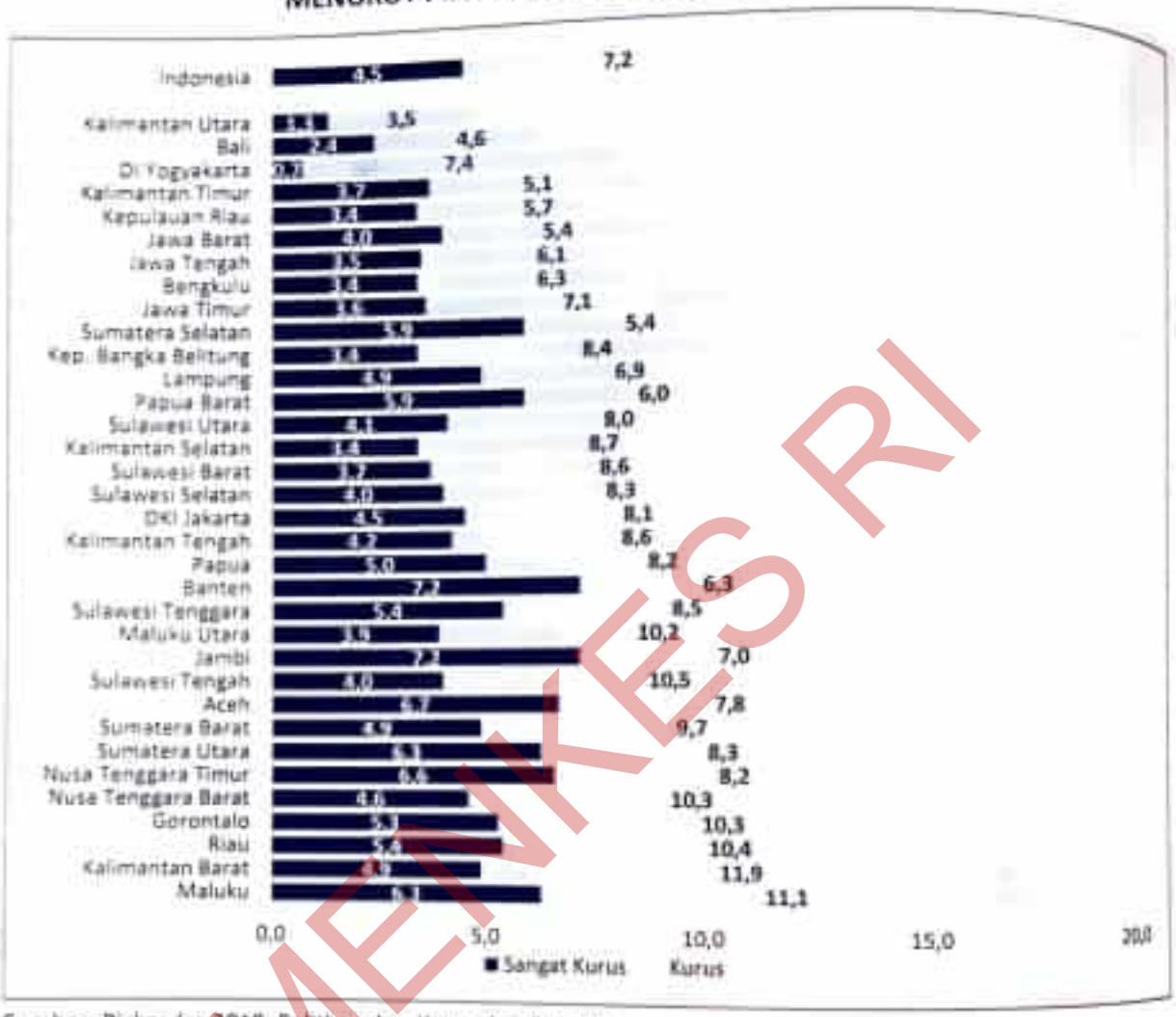

Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Persentase balita usia 0-59 bulan di Indonesia pada tahun 2018 sangat kurus yaitu sebesar 3,5% dan kurus sebesar 6,7%. Kondisi ini cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, dimana persentase balita sangat kurus sebesar 2,8% dan kurus sebesar 6,7% Provinsi dengan persentase tertinggi balita sangat kurus dan kurus usia 0-59 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah balita sangat kurus dan kurus adalah Kalimantan Utara. Data mengenai status gizi balita selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.22-5.27.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.48
PERSENTASE KURUS DAN SANGAT KURUS PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018

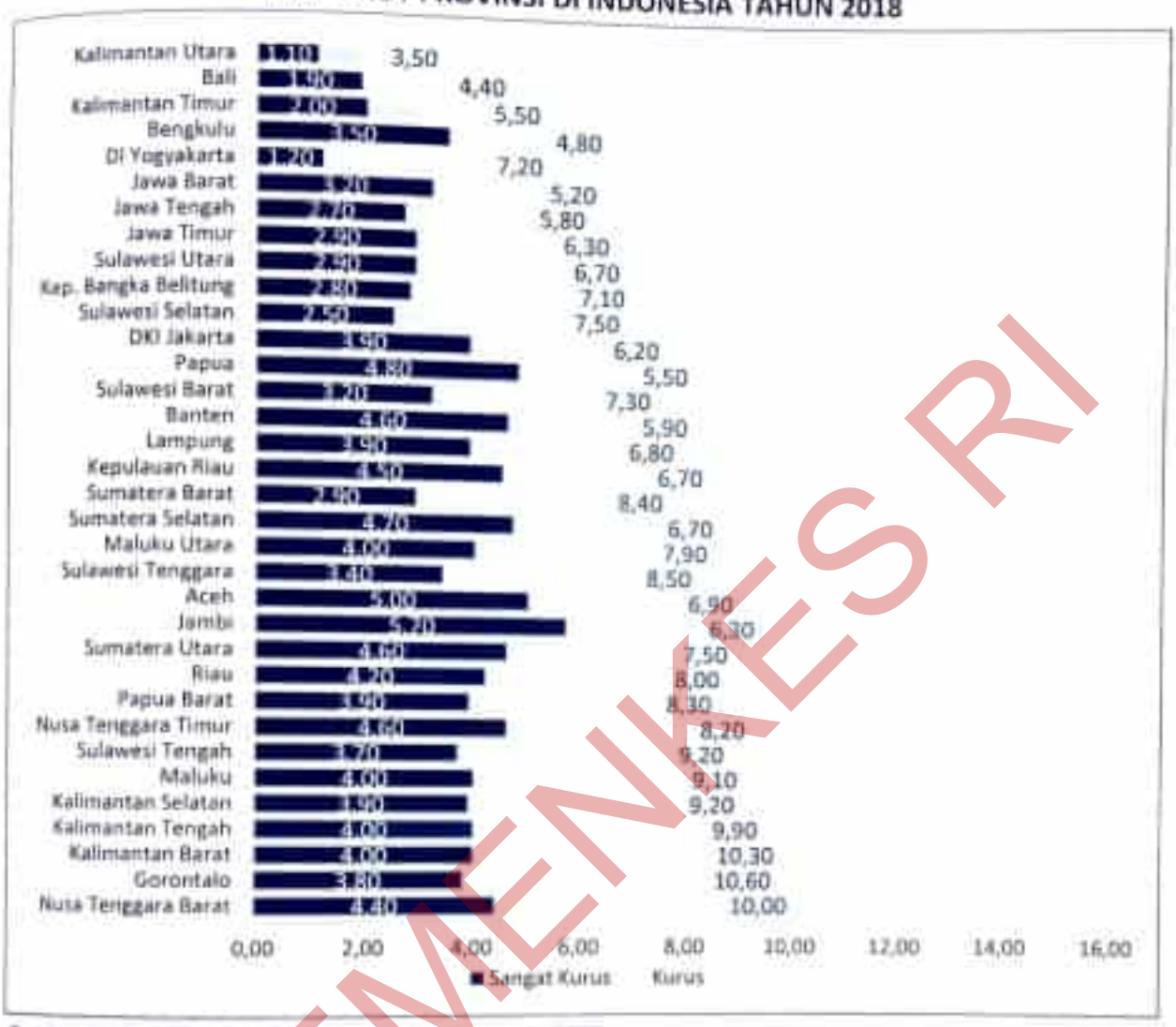

Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes Kemenkes RI 2019

Tren persentase pada balita usia 0-59 bulan sangat pendek dan pendek di Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung tidak mengalami perubahan yang berarti, dimana pada tahun 2014 persentasenya sebesar 28,9%, sedangkan pada tahun 2018 persentasenya sebesar 29,6%. Meski demikian, persentase pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu dari 37,2% menjadi 28,9% pada tahun 2014.

Tren persentase sangat kurus dan kurus pada balita usia 0-59 bulan di Indonesia sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 secara umum mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dimana pada tahun 2013 persentase balita sangat kurus dan kurus usia 0-59 bulan yaitu 12,1% menjadi 9,5% pada tahun 2018.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.49

PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN SANGAT KURUS DAN KURUS PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2018

Sumber: Riskesdas (tahun 2013 dan 2018), Balitbangkes Kemenkes RI
PSG (tahun 2014-2017), Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI

GAMBAR 5.50

GRAFIK PROPORSI STUNTING (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI,SSGBI 2019

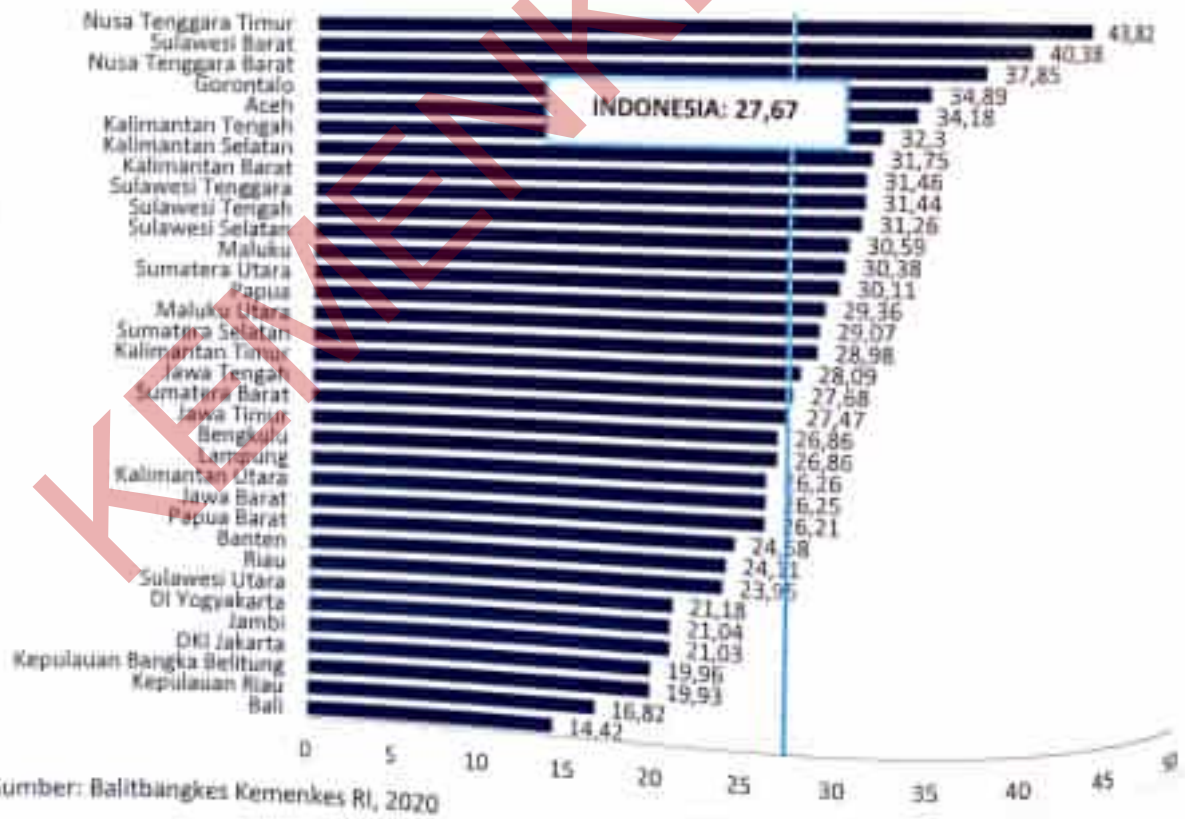

Sumber: Balitbangkes Kemenkes RI, 2020

Berdasarkan gambar 5.50 hasil Survei Status Gizi Balita Terintegrasi (SSGBI) oleh Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa proporsi stunting tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil ini hampir sama dengan Riskesdas tahun 2018, dimana proporsi stunting tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur.

KEMENKES RI

Sulawesi Barat, dan Aceh. Sedangkan untuk proporsi stunting terendah menurut SSGBI 2019 ada di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bali, menurut Riskesdas 2018 terdapat di Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Dalam rangka menerapkan upaya gizi seimbang, setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD.

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung *immunoglobulin*, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalorinya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Selain mengandung zat makanan, ASI juga mengandung enzim tertentu yang berfungsi sebagai zat penyerap yang tidak akan menganggu enzim lain di usus. Susu formula tidak mengandung enzim tersebut sehingga penyerapan makanan sepenuhnya bergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi.

Pada tahun 2019, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD yaitu sebesar 75,58%. Angka ini telah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 50,0%. Provinsi dengan persentase tertinggi bayi baru lahir mendapat IMD adalah Sulawesi Tenggara (94,92%) sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat (3,06%). Terdapat dua provinsi yang belum mencapai target Renstra tahun 2019 yaitu Maluku dan Papua Barat.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.51

CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2019 yaitu sebesar 67,74%. Angka tersebut sudah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu 50%. Persentase tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusif terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (86,26%), sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Barat (41,12%). Terdapat empat provinsi yang belum mencapai target Renstra tahun 2019, yaitu Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Cakupan bayi baru lahir mendapatkan IMD dan cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.28.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.52
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

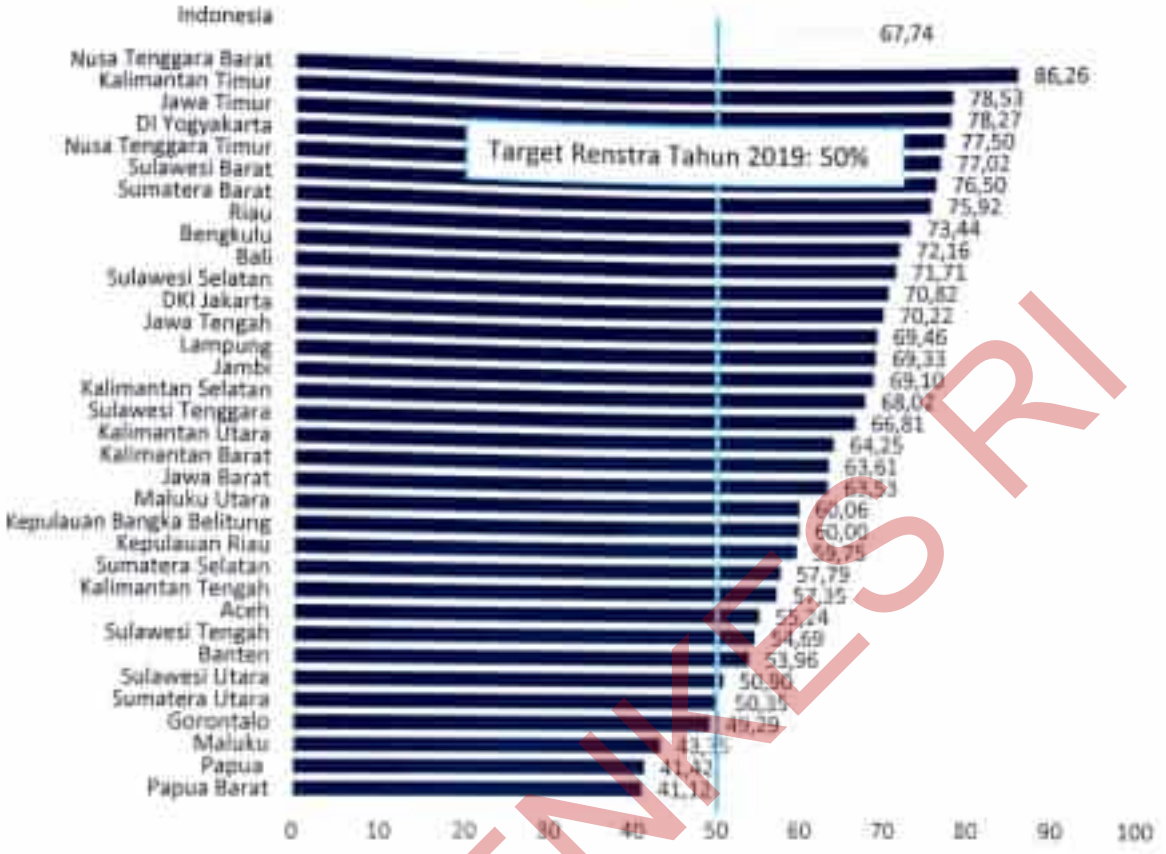

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

b. Penimbangan Balita

Penimbangan balita merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan bertujuan sebagai deteksi dini untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh kembang pada balita. Dengan rutin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Jika diketahui berat badan anak tidak naik atau jika ditemukan anak menderita suatu penyakit, dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan, agar tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin cepat ditangani. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi kurang atau gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan.

Persentase rata-rata balita umur 6-59 bulan yang ditimbang di Indonesia pada tahun 2019 adalah 73,86% anak per bulan. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 96,69%, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar 30,11%. Masih ada enam provinsi yang belum melaporkan datanya, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Data lebih lengkap mengenai rata-rata balita umur 6-59 bulan yang ditimbang per bulan dapat dilihat di lampiran 5.29.

KEMENKES RI

GAMBAR 5.53
PERSENTASE RERATA BALITA UMUR 6-59 BULAN DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

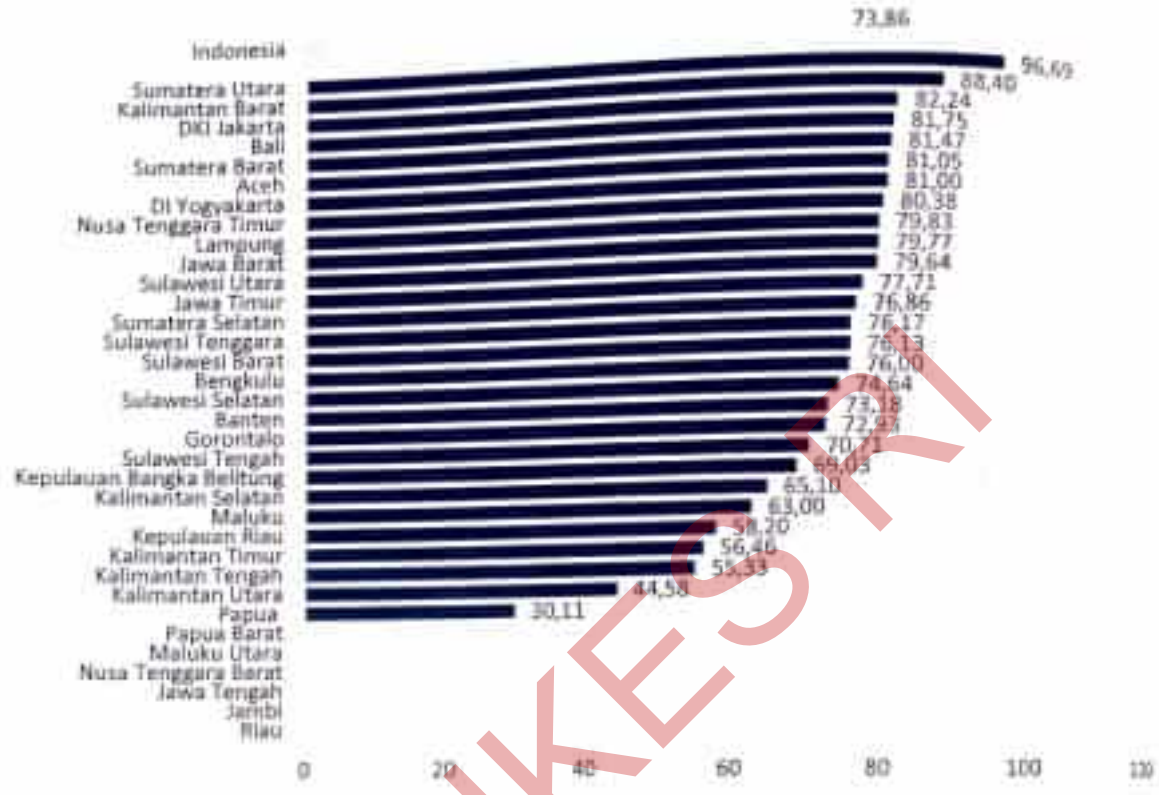

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

Vitamin A merupakan zat gizi penting yang sangat diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada anak serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Asupan vitamin A dari makanan sehari-hari masih cukup rendah sehingga diperlukan asupan gizi tambahan berupa kapsul vitamin A.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (*nipple*) yang dapat digunting, tidak transparan (*opaque*), dan mudah untuk dikonsumsi termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Kapsul vitamin A diberikan kepada bayi, anak balita dan ibu nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali. Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas dilakukan sebanyak 2 kali yaitu satu kapsul segera setelah saat persalinan dan satu kapsul lagi pada 24 jam setelah pemberian kapsul pertama.

KEMENKES RI

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Indonesia pada tahun 2018 adalah 46,56%. Hal ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 30%. Provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian TTD pada remaja putri adalah Bali (99,72%), sedangkan persentase terendah adalah Kalimantan Barat (13,03%). Masih ada empat provinsi belum memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Cakupan pemberian TTD pada remaja putri selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.30.

GAMBAR 5.55
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

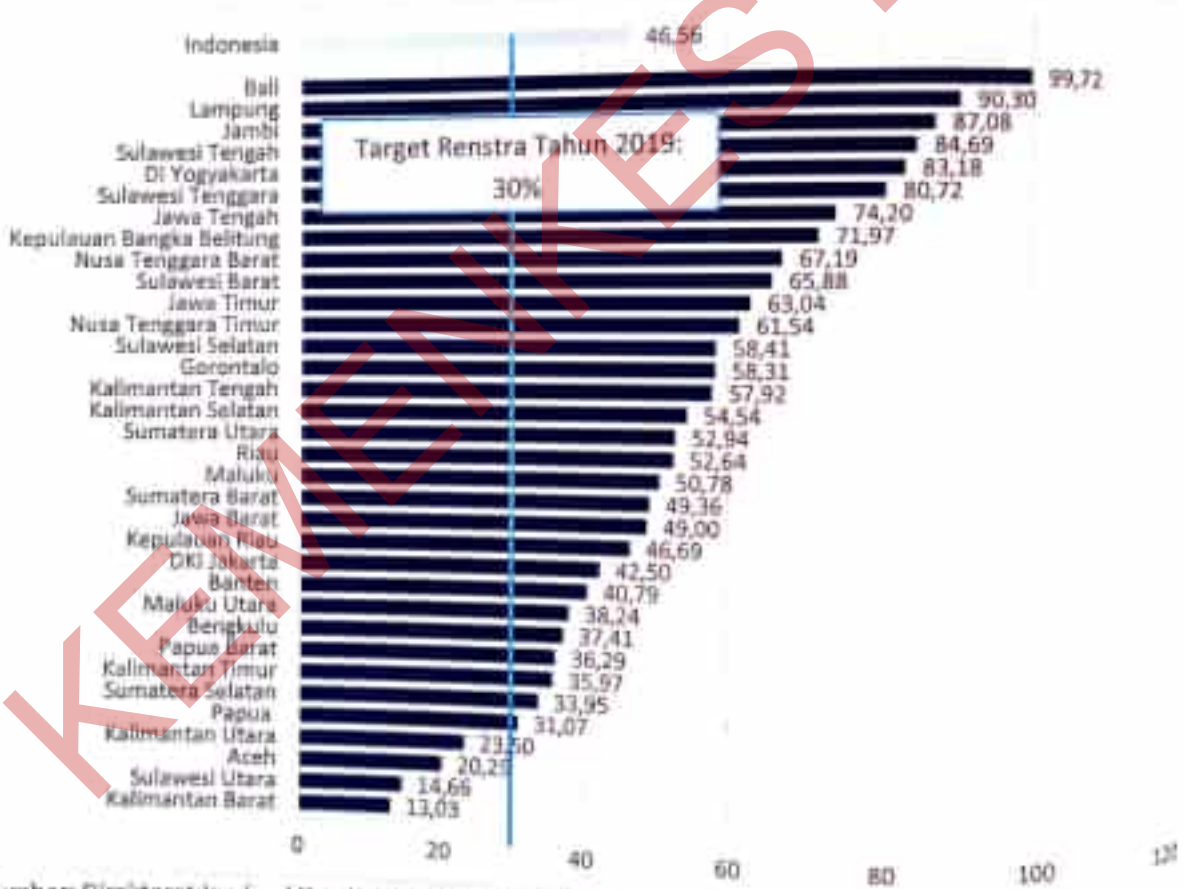

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020

e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus

Masa kehamilan memerlukan perhatian khusus karena merupakan periode penting pada 1.000 hari kehidupan. Ibu hamil termasuk salah satu kelompok yang rawan gizi. Asupan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Status gizi yang baik pada ibu hamil dapat mencegah terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan *stunting* (pendek).

KEMENKES RI

Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan Kurang Energi Kronis (KEK). Berdasarkan PSG tahun 2016, 53,9% ibu hamil mengalami defisit energi (<70% AKE) dan 13,1% mengalami defisit ringan (70-90% AKE). Untuk kecukupan protein, 51,9% ibu hamil mengalami defisit protein (<80% AKP) dan 18,8% mengalami defisit ringan (80-99% AKP). Salah satu identifikasi ibu hamil KEK adalah memiliki ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5cm.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki gizi pada ibu hamil KEK adalah dengan pemberian makanan tambahan. Bentuk makanan tambahan untuk ibu hamil KEK menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi adalah biskuit yang mengandung protein, asam linoleat, karbohidrat, dan diperkaya dengan 11 vitamin dan 7 mineral.

Secara nasional, cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT tahun 2019 adalah 90,52%. Namun angka tersebut belum memenuhi target Renstra tahun 2019 sebesar 95%. Provinsi dengan persentase tertinggi ibu hamil KEK mendapat PMT adalah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Gorontalo, sedangkan persentase terendah adalah Nusa Tenggara Barat (71,36%). Terdapat empat belas provinsi belum memenuhi target Renstra tahun 2019. Cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.31.

GAMBAR 5.56
CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

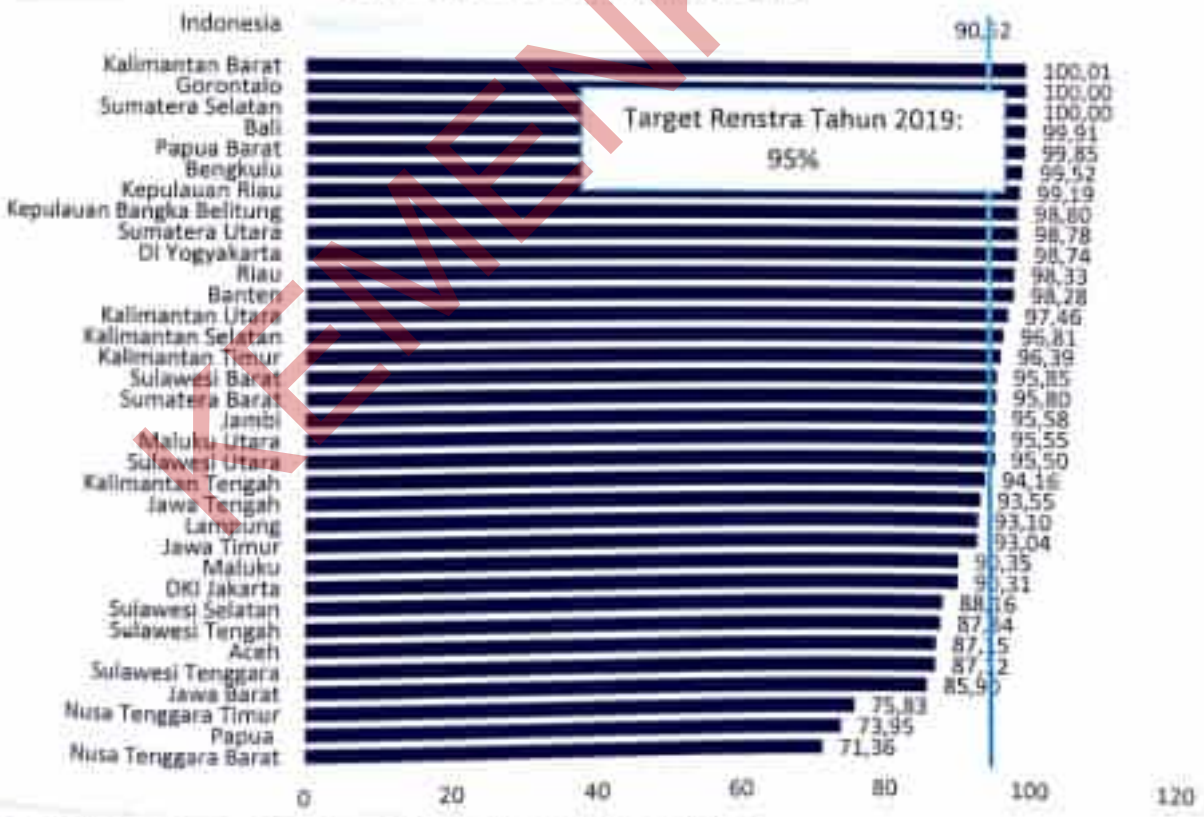

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2019

Balita kurus diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan sebesar minus 3 standar deviasi (-3SD) sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi (<-2SD). Balita kurus

KEMENKES RI

termasuk dalam kelompok rawan gizi yang membutuhkan suplementasi gizi dalam bentuk pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan diberikan pada balita usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 23 bulan 29 hari selama 90 hari berturut-turut. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus dapat diberikan berupa PMT lokal maupun PMT pabrikan seperti biskuit. Bila perbandingan berat badan terhadap tinggi badan telah mencapai minus 2 standar deviasi (-2 SD) atau lebih atau sesuai dengan perhitungan, maka MT balita kurus dihentikan. Selanjutnya balita tersebut dapat mengkonsumsi makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang serta dilakukan pemantauan berat badan secara rutin agar status gizi balita tidak kembali menjadi kurus.

Persentase balita kurus mendapat PMT di Indonesia tahun 2019 adalah 89,64%. Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 90%. Provinsi dengan persentase tertinggi balita kurus mendapat PMT adalah Gorontalo dan Jawa Timur dengan capaian 100%, sedangkan persentase terendah adalah Kalimantan Utara dengan capaian 69,53%. Terdapat 22 provinsi yang sudah memenuhi target Renstra tahun 2019. Cakupan balita kurus mendapat PMT selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.31.

GAMBAR 5.57
CAKUPAN BALITA KURUS MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

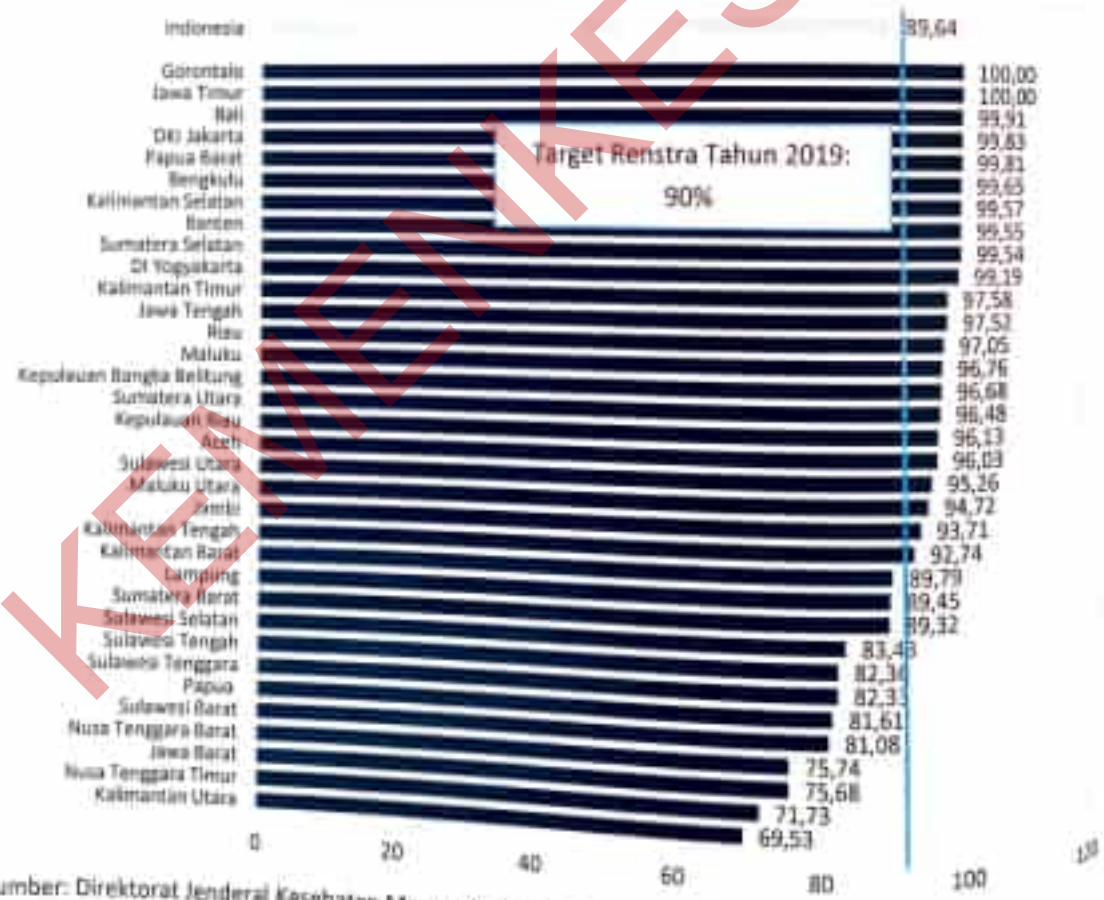

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2019

KEMENKES RI

Bab VI
PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENKES RI

KEMENKES RI

VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara ke 2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program.

Menurut *Global Tuberculosis Report* 2019 yang dirilis oleh WHO pada 17 Oktober 2019, dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Strategi END TB tahun 2020 yaitu mengurangi TB sebesar 20 persen dari jumlah kasus tahun 2015-2018. Namun, antara 2015 dan 2018, penurunan kumulatif kasus TB hanya sebesar 5,3%.

Begitu juga dengan penurunan jumlah total kematian akibat TB antara tahun 2015 dan 2018 secara global sebesar 11%, yang berarti kurang dari sepertiga target yang sebesar 35 persen pada tahun 2020. Kasus baru tuberkulosis secara global sebesar 6,4 juta, setara dengan 64% dari insiden tuberkulosis (10 juta). Tuberkulosis tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia yang menyebabkan kematian sekitar 1,3 juta pasien *(WHO, Global Tuberculosis Report, 2018)*.

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insiden, prevalensi, dan mortalitas/kematian.

a. Insiden Tuberkulosis

Angka insiden tuberkulosis Indonesia pada tahun 2018 sebesar 316 per 100.000 penduduk dan angka kematian penderita tuberkulosis sebesar 40 per 100.000 penduduk *(Global Tuberculosis Report WHO, 2018)*. Indikator yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019 merupakan prevalensi berbasis mikroskopis saja. Hal ini mengakibatkan angkanya lebih rendah dari hasil survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014

KEMENKES RI

yang telah menggunakan metode yang lebih sensitif yaitu konfirmasi bakteriologis yang mencakup pemeriksaan mikroskopis, molekuler dan kultur. Target prevalensi tuberkulosis tahun 2019 pada RPJMN sebesar ≤245 per 100.000 penduduk, dengan capaian yang dihasilkan dari pemodelan sebesar 254 per 100.000 penduduk maka target RPJMN telah tercapai.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2019 jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 543.874 kasus, menurun bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2018 yang sebesar 566.623 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut hampir mencapai setengah dari jumlah seluruh kasus tuberkulosis di Indonesia (45%).

Dibandingkan dengan perempuan, jumlah kasus tuberkulosis pada laki-laki lebih tinggi 1,4 kali yang terjadi di seluruh provinsi. Bahkan di Aceh dan Sumatera Utara kasus pada laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan.

GAMBAR 6.1
PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

c. Cakupan Pengobatan Semua Kasus Tuberkulosis (Case Detection Rate/CDR) Yang Diobati

Case Detection Rate (CDR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus baru tuberkulosis. *CDR* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.2
CASE DETECTION RATE (CDR)
TAHUN 2009-2019

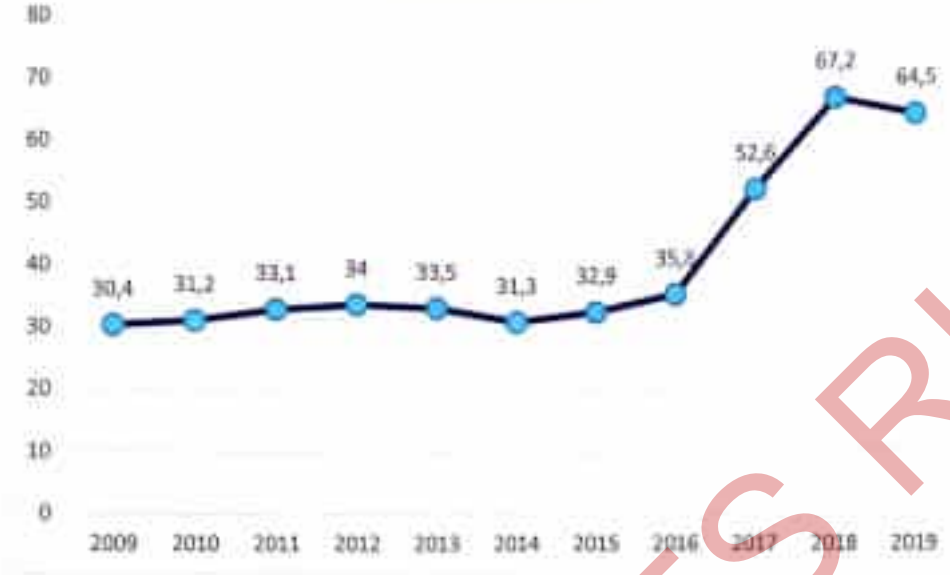

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa *Case Detection Rate* kasus tuberkulosis pada tahun 2019 sebesar 64,5% yang relatif meningkat jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya. Namun masih jauh dari angka CDR yang direkomendasikan oleh WHO yang sebesar ≥90%.

GAMBAR 6.3
***CASE DETECTION RATE (CDR)* MENURUT PROVINSI 2019**

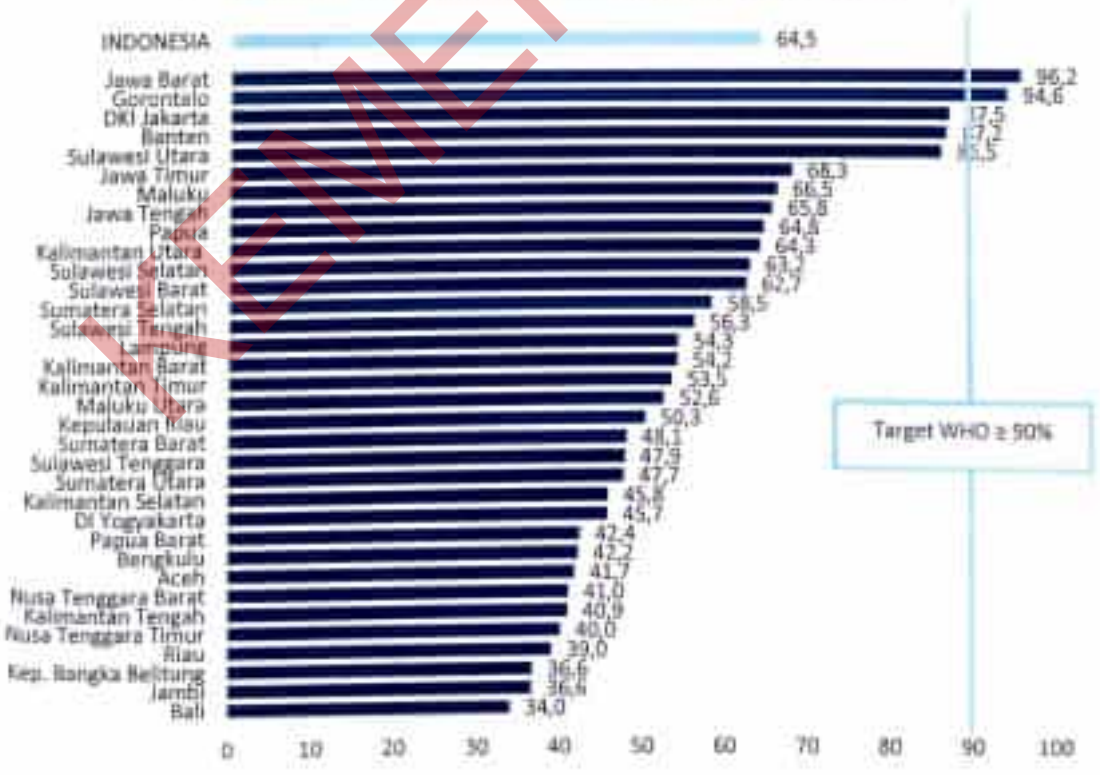

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Menurut provinsi, hanya Jawa Barat dan Gorontalo yang telah mencapai angka CDR 250%. Kisaran CDR di Indonesia antara 96,2% (Jawa Barat) dan 34% (Bali).

d. Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau Case Notification Rate (CNR)

CNR adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2009-2019 yang secara nasional memperlihatkan kecenderungan peningkatan CNR.

GAMBAR 6.4
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

CNR semua kasus tuberkulosis menurut provinsi tahun 2019 bervariasi antara 393(00 Jakarta) dan 97 (Bali) per 100.000 penduduk.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.5
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

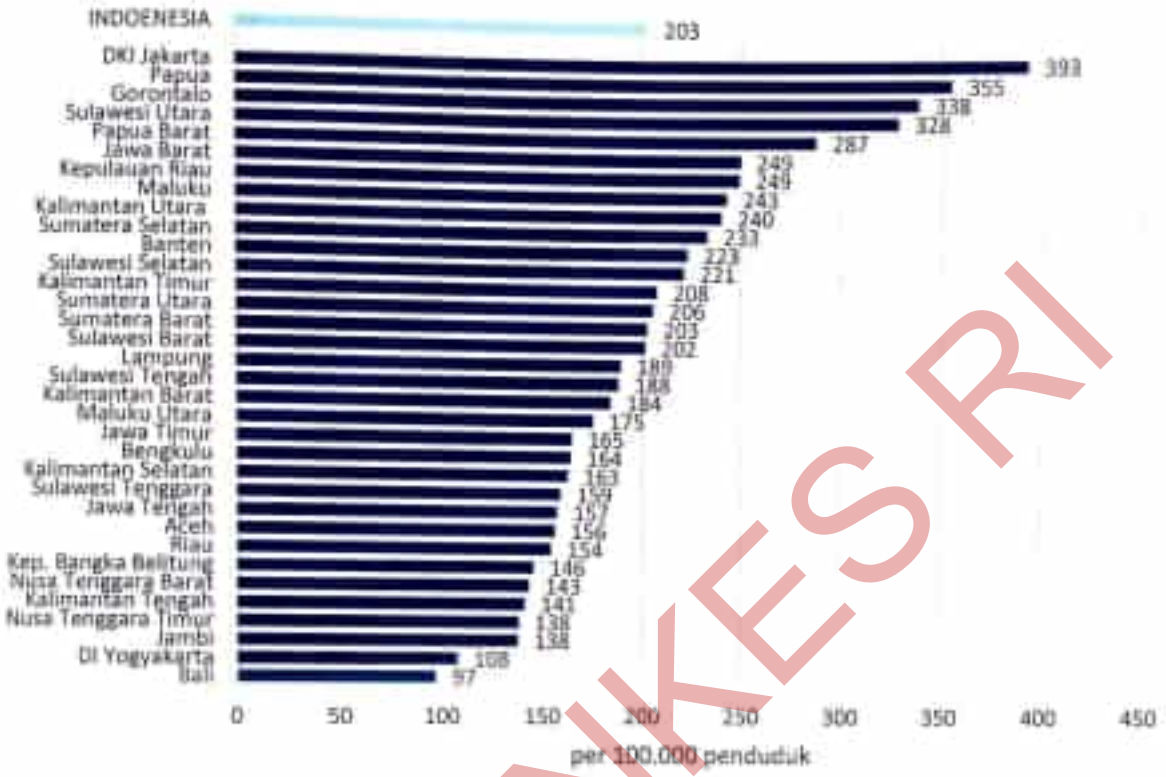

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

e. Angka Keberhasilan Pengobatan

Angka keberhasilan pengobatan *(Success Rate)* merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan yang mendapat pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.6
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2009-2019

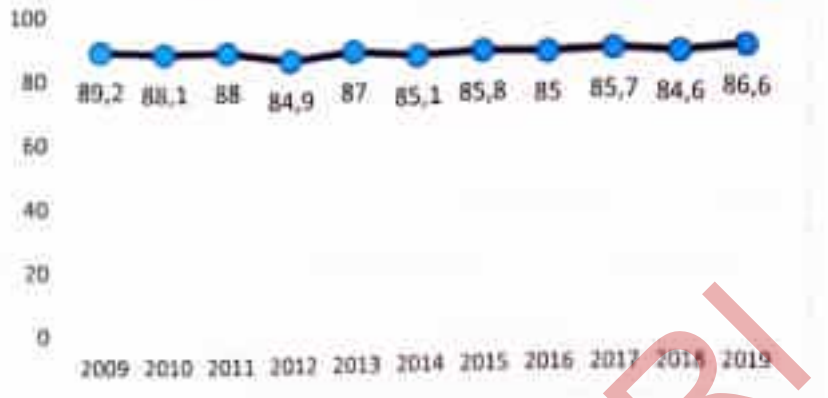

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Jika merujuk pada target yang ditetapkan rentsra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini yang sebesar 85%, maka secara nasional angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis telah tercapai termasuk pada tahun 2019 yang sebesar 86,6%. Sedangkan indikator pengobatan khusus untuk pasien tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis yaitu angka kesembuhan *(cure rate)* pada tahun 2019 sebesar 73,2%.

GAMBAR 6.7
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

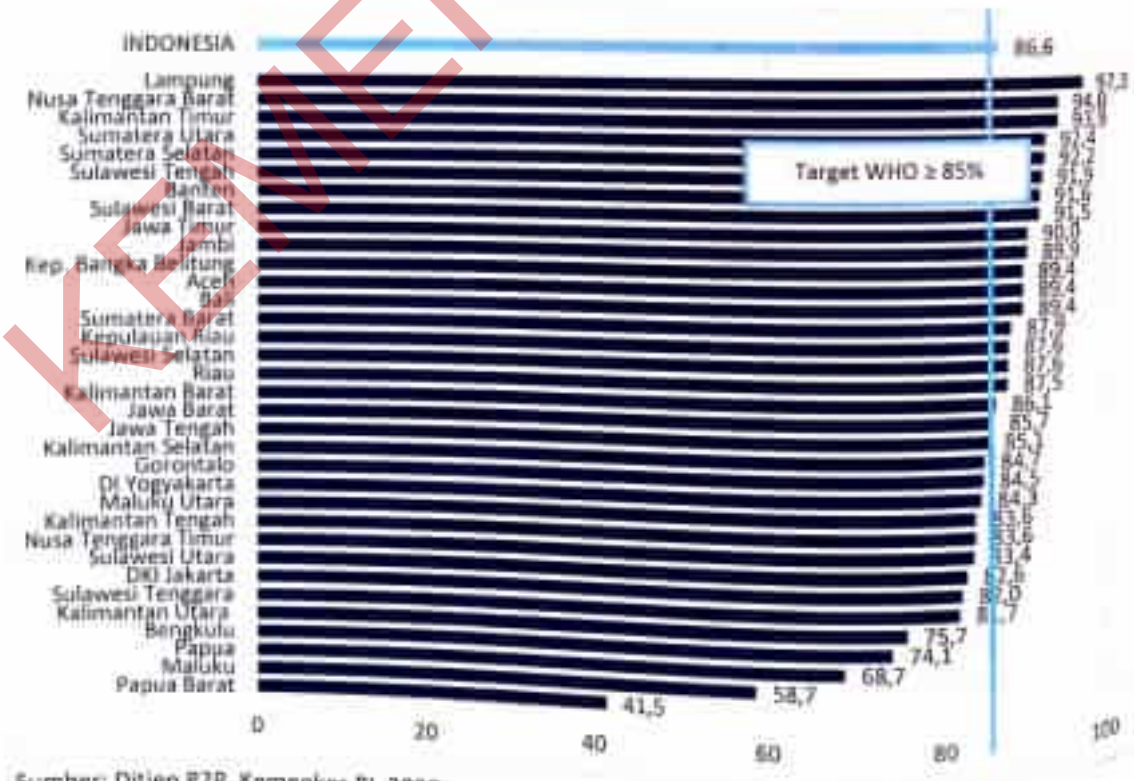

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 85% pada tahun 2019 sebanyak 20 provinsi (58,8%). Informasi mengenai tuberkulosis menurut indikator, jenis kelamin, dan provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 51-52.

2. HIV dan AIDS

HIV *(Human Immunodeficiency Virus)* adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan AIDS *(Acquired Immuno Deficiency Syndrome)* yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV.

Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Estimasi jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 641.675 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 46.372 orang dan kematian sebanyak 38.734 orang (Hasil Pemodelan Spectrum 2016).

Dari Gambar 6.8 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ketahun cenderung meningkat. Pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 50.282 kasus. Sebaliknya, dibandingkan rata-rata 8 tahun sebelumnya, jumlah kasus baru AIDS cenderung menurun, pada tahun 2019 dilaporkan sebanyak 7.036 kasus.

GAMBAR 6.8
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2009-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Terdapat sebanyak 6 provinsi yang tidak melaporkan data AIDS pada tahun 2019 yang diduga menjadi penyebab penurunan kasus AIDS pada tahun 2019. Keenam provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

KEMENKES RI

Baik pada HIV maupun AIDS, proporsi pada kelompok laki-laki lebih tinggi sekitar dua kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.9 berikut ini.

GAMBAR 6.9
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2019 menurut kelompok umur seperti digambarkan berikut ini.

GAMBAR 6.10
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Kelompok umur tertinggi pada kasus HIV dan AIDS yaitu kelompok umur produktif. Sementara itu masih ditemukan penularan HIV dari ibu ke anak yang di tunjukkan dengan adanya penemuan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia di bawah 4 tahun. Untuk mencapai tujuan nasional dan global dalam rangka *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

KEMENKES RI

3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan bakteri. Sampai saat ini program dalam pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas yaitu adanya nafas cepat, kadang disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK), dengan frekuensi nafas berdasarkan usia penderita:

- < 2 bulan : ≤ 60/menit,
- 2 - < 12 bulan : ≤ 50/menit,
- 1 - < 5 tahun : ≤ 40/menit.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2009-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 6.11
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2009-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Selama kurun waktu yang panjang, angka cakupan penemuan pneumonia balita tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 20%-30%. Namun sejak tahun 2015 hingga saat ini terjadi peningkatan cakupan dikarenakan adanya perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%. Selain itu terdapat peningkatan kelengkapan pelaporan dari 94,12% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2019.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.12
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

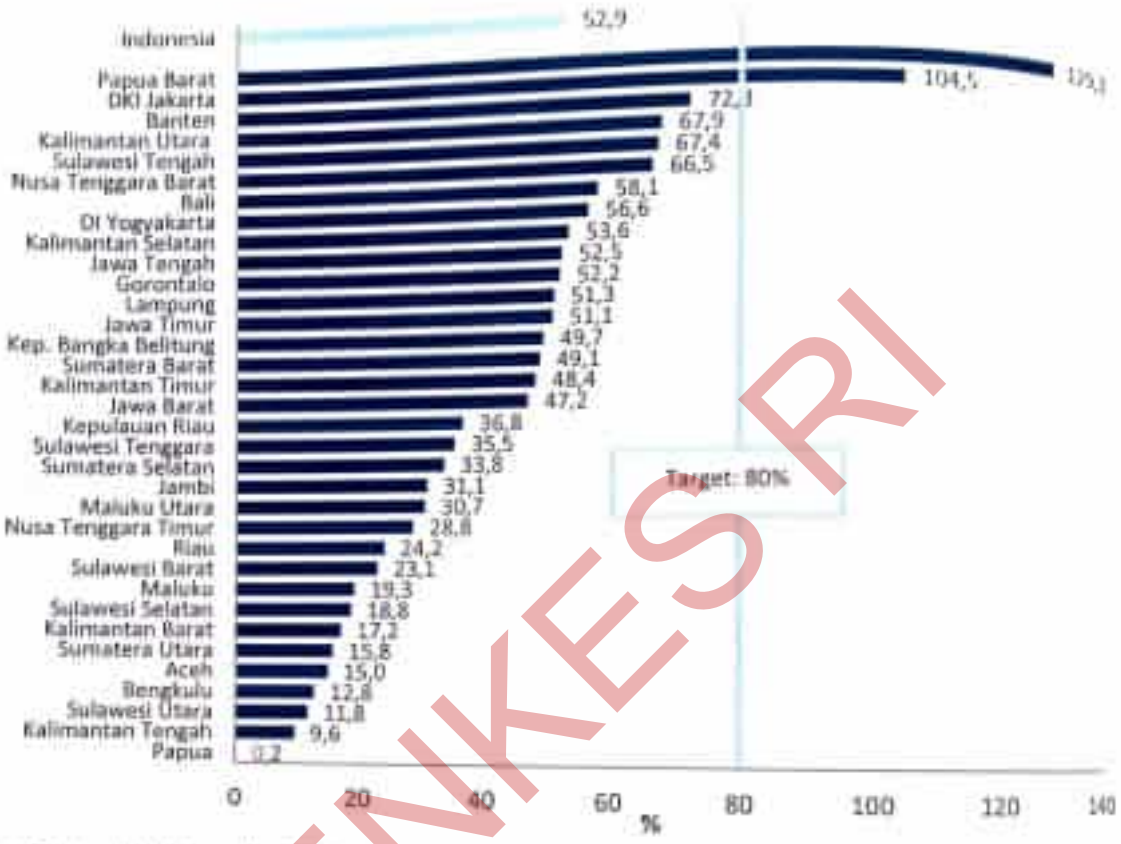

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 hanya Provinsi Papua Barat dan DKI telah mencapai target penemuan sebesar 80, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan program. Sedangkan Papua hanya mencapai 0,2% penemuan pneumonia dari target yang telah ditetapkan.

Indikator Renstra yang digunakan sejak tahun 2015 yaitu persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia baik melalui pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), maupun program P2 ISPA. Pada tahun 2019 Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia sebesar 57,2% yang berarti hampir mencapai target renstra tahun 2019 yang sebesar 60%.

Namun dari 34 provinsi terdapat empat provinsi yang puskesmas di seluruh kabupaten/kotanya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2019 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,12%. Angka kematian akibat Pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1 – 4 tahun. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 53a dan 53b.

KEMENKES RI

4. Hepatitis

Hepatitis yang merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati, disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah yang disebabkan oleh Virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Laporan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi KLB Hepatitis A, sedangkan untuk Hepatitis E jarang dilaporkan di Indonesia.

Menurut hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi hepatitis berdasarkan Riwayat diagnosis dokter sebesar 0,39% dengan disparitas antar provinsi sebesar 0,18% (Kep. Bangka Belitung) dan 0,66% (Papua). Berdasarkan kelompok umur, hepatitis menyebar hampir merata pada seluruh kelompok umur. Begitu juga dengan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Hepatitis B

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% penularan Hepatitis B adalah secara vertikal yaitu dari Ibu yang Positif Hepatitis B ke bayi yang dilahirkannya.

GAMBAR 6.13
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
TAHUN 2015-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2015. Gambar 6.13 menunjukkan kenaikan target per tahun yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator. Pada tahun 2019 capaian indicator sebesar 90,27% yang berarti telah mencapai target renstra tahun 2019 yang sebesar 80%. Selama lima tahun berturut-turut indicator renstra ini dilaksanakan selalu mencapai target.

KEMENKES RI

Sebanyak 23 dari 34 provinsi telah 100% kabupaten/kotanya melaksanakan deteksi dini hepatitis B.

GAMBAR 6.14

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

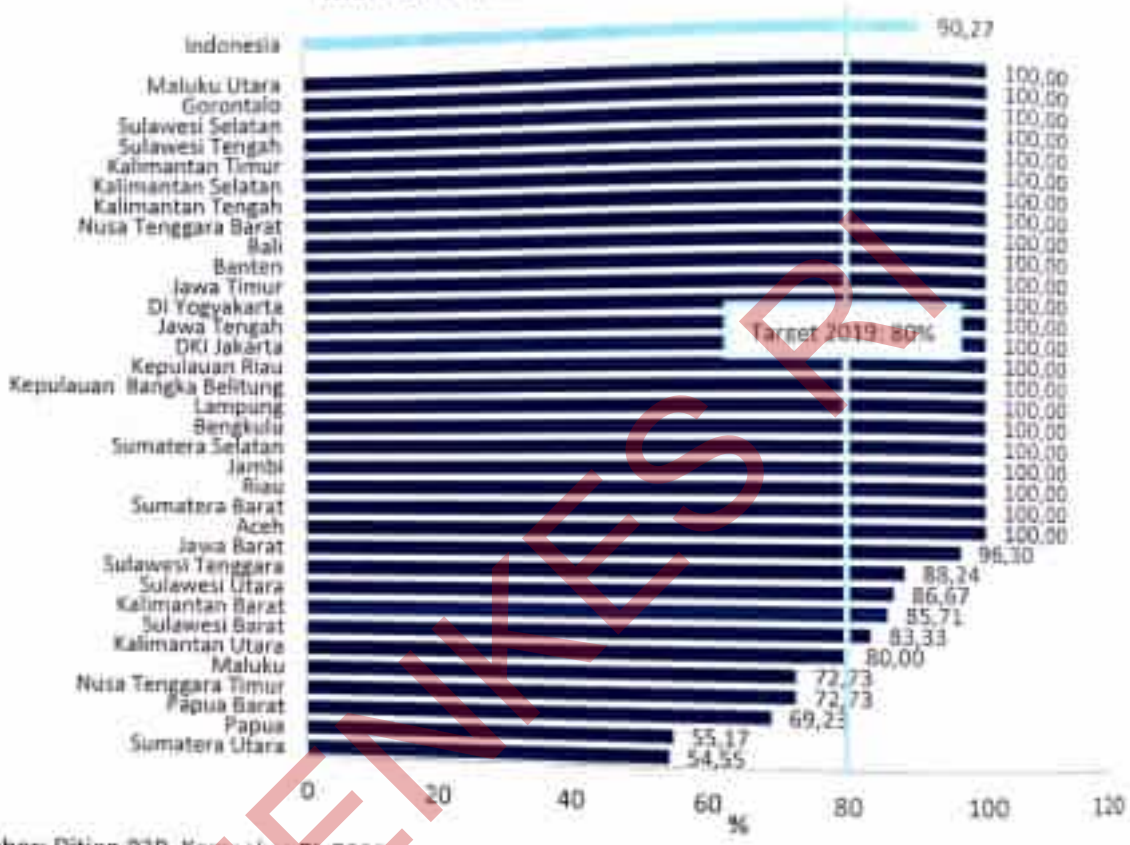

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

5. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia.

a. Prevalensi Diare

Menurut Riskesdas 2018, prevalensi diare berdasarkan diagnosis tenaga Kesehatan sebesar 6,8% dan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala yang pernah dialami sebesar 8%.

Kelompok umur dengan prevalensi diare (berdasarkan diagnosis tenaga Kesehatan) tertinggi yaitu pada kelompok umur 1-4 tahun sebesar 11,5% dan pada bayi sebesar 9%. Kelompok umur 75 tahun ke atas juga merupakan kelompok umur dengan prevalensi tinggi (7,2%). Prevalensi pada perempuan, daerah perdesaan, pendidikan rendah, dan nelayan relatif lebih tinggi dibandingkan pada kelompok lainnya.

Prevalensi diare pada balita (berdasarkan diagnosis tenaga Kesehatan) sebesar 11% dengan disparitas antar provinsi antara 5,1% (Kepulauan Riau) dan 14,2% (Sumatera Utara).

KEMENKES RI

GAMBAR 6.15
PREVALENSI DIARE PADA BALITA BERDASARKAN DIAGNOSIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2018

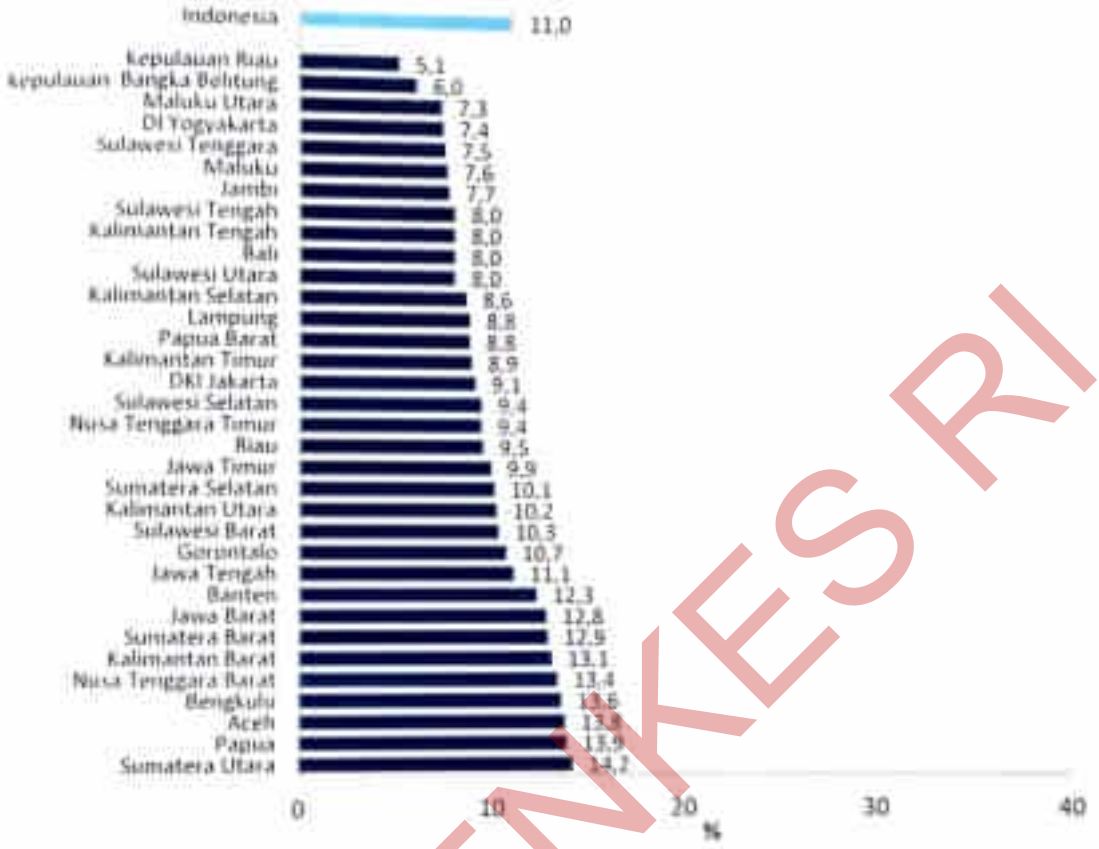

Sumber: Riskesdas 2018, Balitbangkes, Kementerian Kesehatan RI

b. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran pelayanan penderita diare semua umur sebesar 10% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.16
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

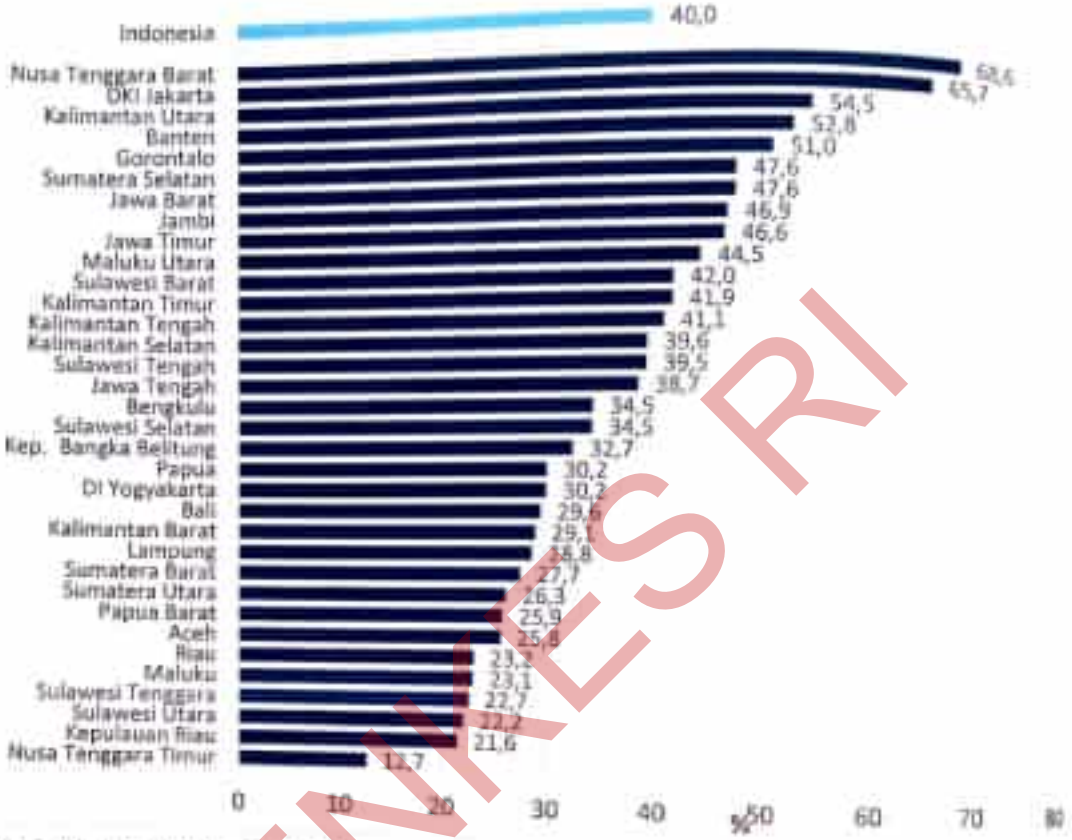

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 cakupan pelayanan penderita diare pada semua umur sebesar 61,7% dan pada balita sebesar 40% dari sasaran yang ditetapkan. Disparitas antar provinsi antara 12,7% (Nusa Tenggara Timur) dan Nusa Tenggara Barat (68,6%).

c. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit maka target penggunaan oralit adalah 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dan kader. Tahun 2019 secara nasional penggunaan oralit semua umur belum mencapai target yaitu sebesar 89,3%. Pemberian oralit pada balita relatif lebih tinggi yaitu sebesar 94,5%.

Tidak tercapainya target tersebut karena pemberi layanan di Puskesmas dan kader belum memberikan oralit sesuai dengan standar tata laksana yaitu sebanyak 6 bungkus/penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada tiga bulan berikutnya. Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2019 cakupan pemberian zink pada balita diare sebesar 94,7%.

KEMENKES RI

6. Kusta

Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab penyakit kusta. Penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta (prevalensi kusta <1 per 10.000 penduduk). Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0,74 kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 6,51 kasus per 100.000 penduduk. Tren Angka kejadian dapat dilihat pada Gambar 6.17. Selama sembilan tahun terakhir terlihat tren penurunan baik pada angka prevalensi maupun angka penemuan kasus baru kusta.

Pada tahun 2019 dilaporkan 17.439 kasus baru kusta yang 85% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (MB).

GAMBAR 6.17
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2011-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Berikut perubahan peta eliminasi tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019 sebanyak dua puluh enam provinsi telah mencapai eliminasi kusta, bertambah satu provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Kalimantan Utara. Provinsi yang belum mencapai eliminasi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.18
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2018 DAN 2019

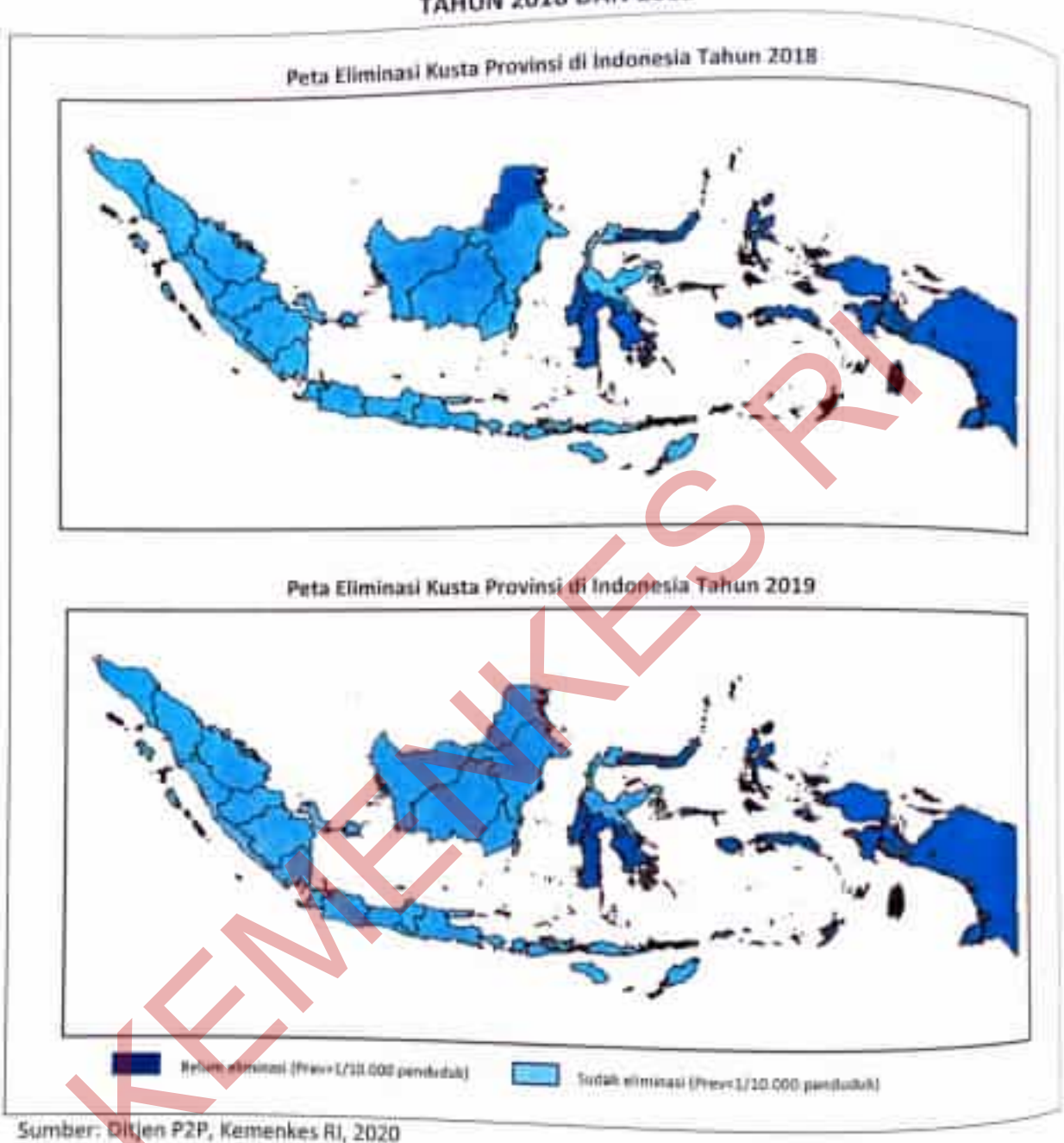

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Dapat terlihat pada Gambar 6.19 bahwa provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta terdapat di seluruh provinsi Indonesia bagian timur dan sebagian Indonesia bagian tengah.

b. Angka cacat tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini adalah angka cacat tingkat 2. Pada tahun 2019 angka cacat tingkat 2 sebesar 4,18 per 1.000.000 penduduk, cenderung menurun dibandingkan 7 tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan kegiatan penemuan kasus semakin ke arah dini dan keterlambatan kasus dapat dicegah.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.19
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK
TAHUN 2011-2019

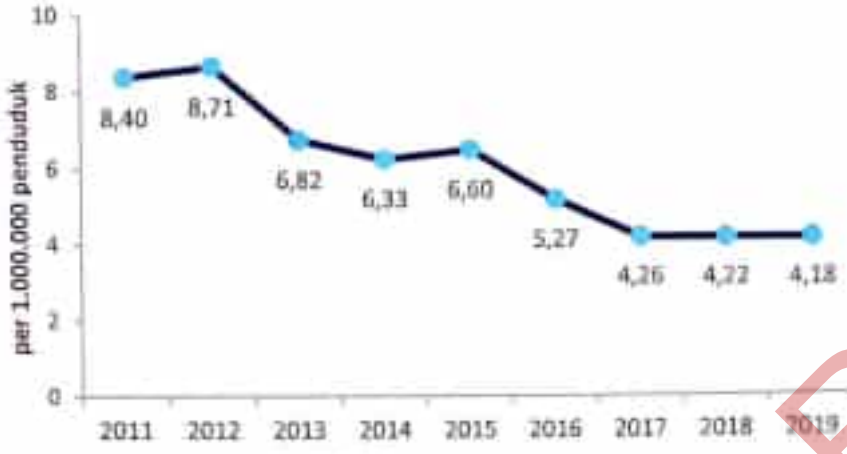

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Tidak ditemukan cacat tingkat 2 pada kasus baru tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebaliknya di Provinsi Papua Barat jauh melebihi provinsi yang lain yaitu mencapai 41,68 per satu juta penduduk.

GAMBAR 6.20
ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2019

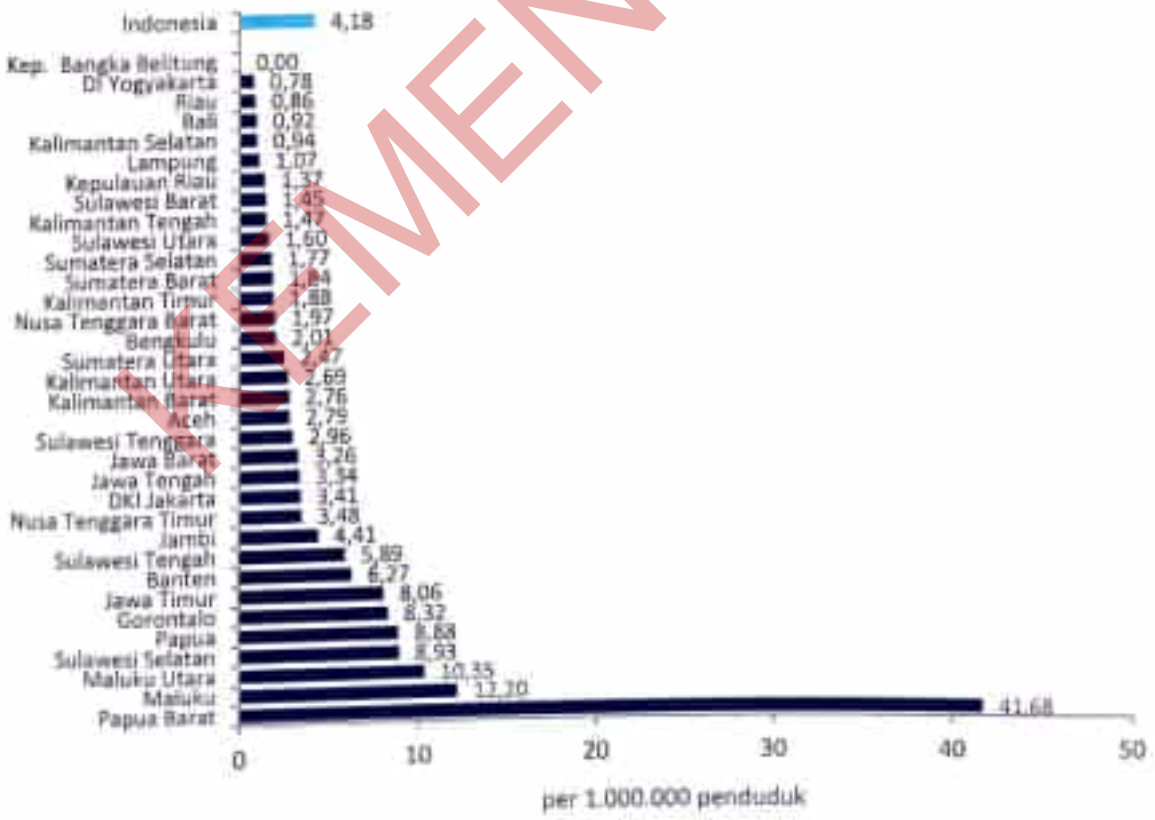

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

c. Proporsi kusta Multibasiler (MB) dan proporsi penderita kusta pada anak

Proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak (0-14 tahun) di antara penderita baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penularan di masyarakat.

GAMBAR 6.21
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
TAHUN 2012-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2012-2019. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2019 yaitu Gorontalo, Sumatera Utara, dan Lampung.

Begitu juga dengan proporsi kusta anak pada periode yang sama tidak banyak mengalami perubahan. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (29,21%), Papua (27,66%), dan Kepulauan Riau (20,83%). Data/informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 57 sampai Lampiran 59.b.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

1. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum merupakan penyakit tetanus yang menyerang bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir dapat terkena penyakit tetanus apabila Basil *Clostridium tetani* masuk ke dalam tubuhnya melalui luka. Infeksi ini dapat terjadi akibat pemotongan tali pusat dilakukan dengan alat yang tidak steril. Pada negara berkembang masih banyak ditemukan kasus tetanus neonatorum (TN) khususnya negara dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah.

Jumlah kasus TN meningkat pada tahun 2019, yaitu sebesar 17 kasus, dimana sebelumnya terdapat 10 kasus pada tahun 2018. Meski demikian, tahun 2019 jumlah kasus meninggal akibat TN menurun menjadi 2 kasus meninggal, dengan CFR sebesar 11,76%. Dari 7 provinsi yang terdapat kasus TN, 2 provinsi yang terdapat kasus meninggal yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Jumlah kasus TN terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yaitu sebanyak 5 kasus dengan CFR sebesar 20% (Sumatera Selatan). Penyebaran kasus TN dapat dilihat pada Gambar 6.22

KEMENKES RI

GAMBAR 6.22
DISTRIBUSI KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI
TAHUN 2019

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Berdasarkan faktor risiko penolong persalinan, sebanyak 9 kasus TN terjadi pada kelompok yang tidak diimunisasi, imunisasi TT2+ sebanyak 3 kasus, TT1 sebanyak 1 kasus, dan 4 kasus tidak diketahui status imunisasinya. Menurut penolong persalinan, terdapat 11 dari 17 kasus TN ditolong oleh penolong persalinan tradisional (misalnya dukun), 4 kasus tidak diketahui, dan 2 kasus yang persalinannya ditolong oleh bidan/perawat. Tetanus Neonatorum juga mungkin disebabkan oleh cara perawatan tali pusat dan/atau alat pemotong tali pusat yang tidak benar. Pada 2019, terdapat 9 kasus yang mendapatkan perawatan tali pusat dengan cara tradisional, 5 kasus dengen perawatan ain-lain, dan 3 kasus tidak diketahui. Sementara itu, berdasarkan alat yang digunakan untuk pemotongan tali pusat, terdapat 7 kasus TN yang tali pusatnya dipotong dengan menggunakan gunting, sedangkan 3 kasus menggunakan bambu, 4 kasus menggunakan alat lain, dan 3 kasus tidak diketahui alat yang digunakan.

GAMBAR 6.23
PROPORSI KASUS TETANUS NENONATORUM MENURUT FAKTOR RISIKO
TAHUN 2019

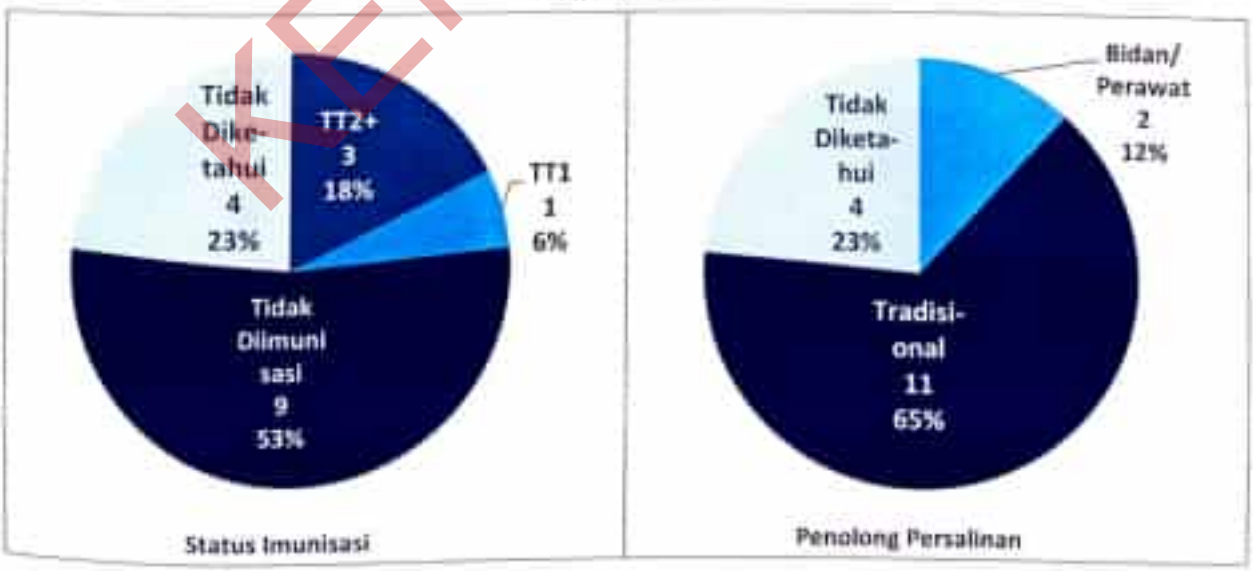

KEMENKES RI

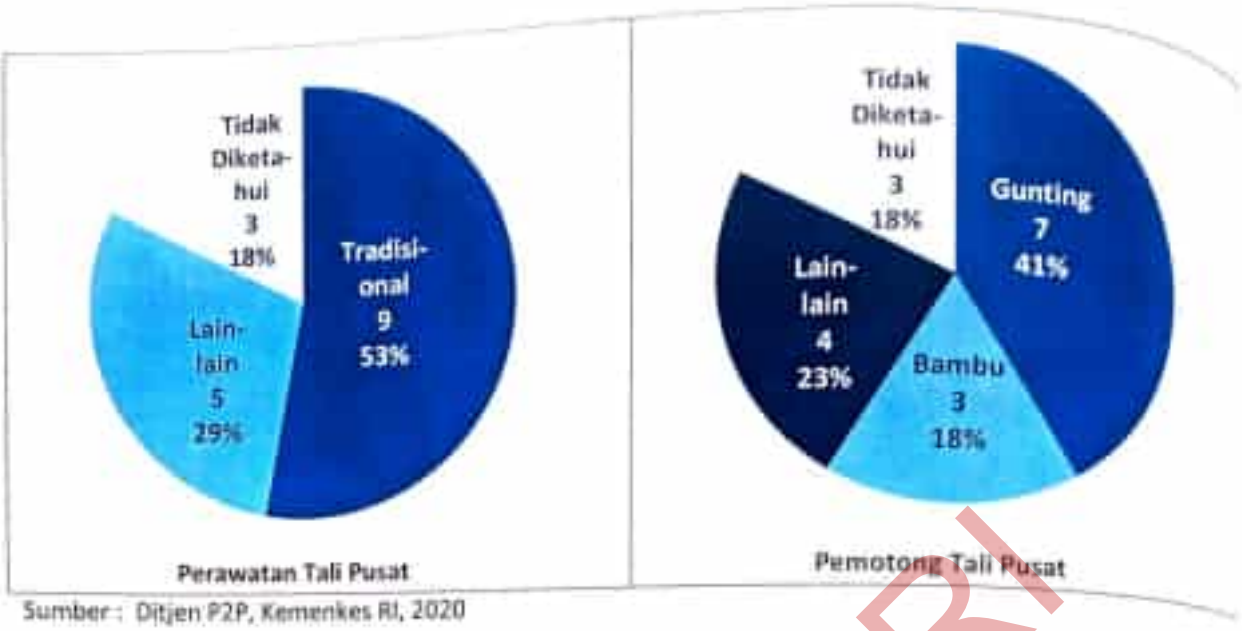

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

2. Campak

Penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus dari genus Morbillivirus dan termasuk golongan *Paramyxovirus*. Campak disebut juga *morbili* atau *measles*. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, ruam berkembang, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Penyebaran kasus suspek campak hampir terdapat di seluruh provinsi Indonesia, hanya 1 provinsi yang tidak terdapat kasus suspek campak. Pada tahun 2019, terdapat 8.819 kasus suspek campak, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 8.429 kasus. Kasus suspek campak terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah (1.562 kasus), DKI Jakarta (1.374 kasus), dan Aceh (372 kasus).

KEMENKES RI

GAMBAR 6.24
SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA
TAHUN 2018 DAN 2019

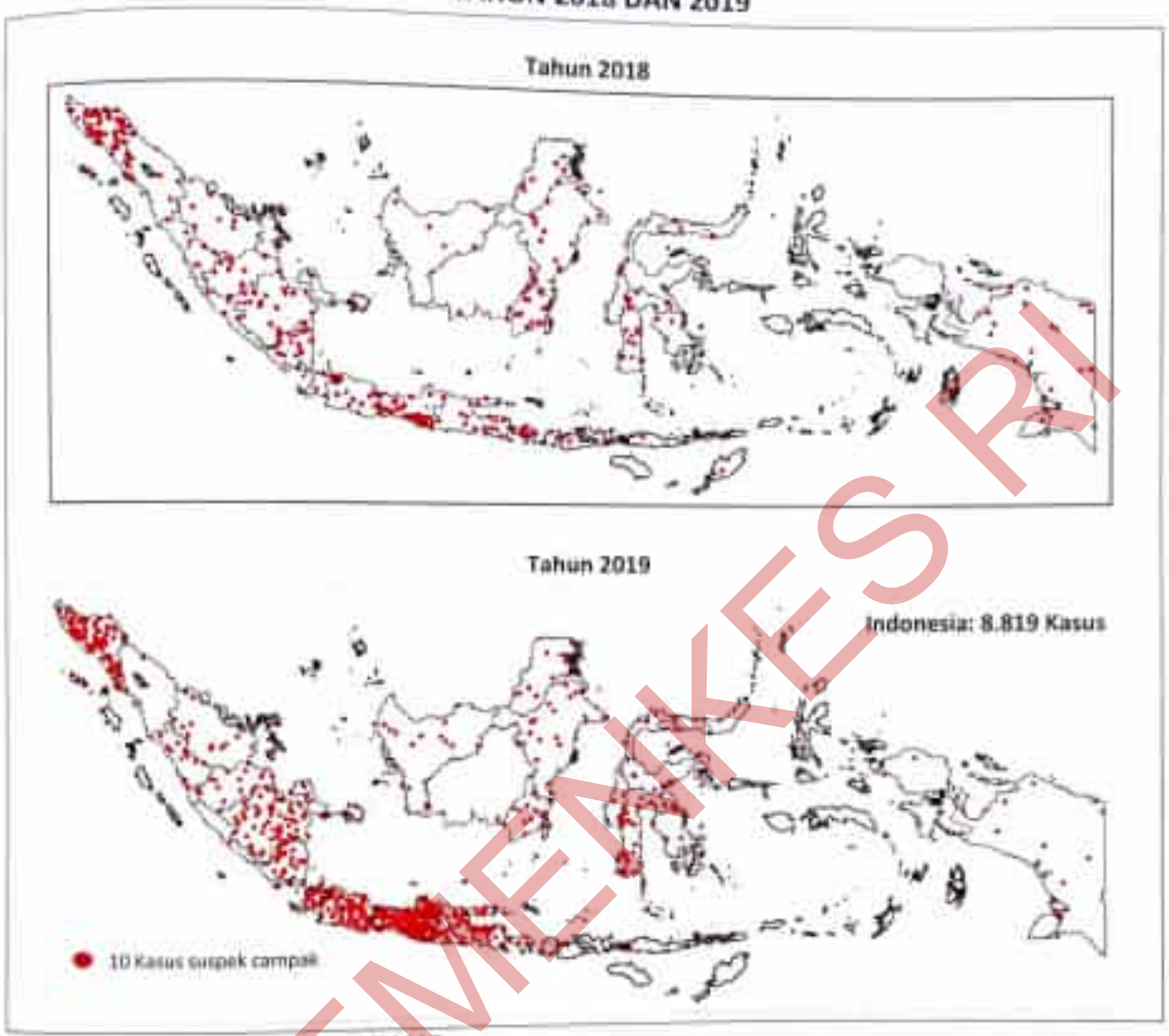

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Suspek campak pada tahun 2019 tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, *dengan Incidence Rate (IR)* sebesar 3,29 per 100.000 penduduk. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,18 per 100.000 penduduk. Walaupun jumlah kasus suspek campak meningkat pada tahun 2019, namun provinsi yang melaporkan tidak ada kasus suspek campak menurun menjadi 1 provinsi, yaitu Maluku Utara, dimana pada tahun 2018 terdapat 2 provinsi melaporkan tidak ada kasus suspek campak.

Jika dilihat distribusi kasus suspek campak per bulan pada tahun 2019 (Gambar 6.25), dapat diketahui bahwa tren kasus suspek campak cenderung tinggi pada awal tahun dan menurun pada pertengahan dan akhir tahun. Jumlah kasus suspek campak tertinggi pada bulan Januari (948 kasus), sedangkan jumlah terendah terdapat pada bulan Juni (417 kasus). Penurunan jumlah kasus ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans PD3I di daerah, meningkatnya penemuan kasus campak berbasis masyarakat atau *Case Base Measles Surveillance (CBMS)* dengan mengikutsertakan pelayanan swasta dalam menemukan dan melaporkan kasus campak, serta penguatan surveilans PD3I berbasis laboratorium.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.25
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Proporsi kasus suspek campak terbesar terdapat pada kelompok umur 1-4 tahun (29,3%), sedangkan proporsi kasus suspek terendah terdapat pada kelompok umur 10-14 tahun dan suspek dengan umur yang tidak diketahui, dengan persentase masing-masing sebesar 11,6% dan 2,2%. Suspek campak yang divaksinasi (menerima minimal satu dosis imunisasi campak) tahun 2019 sebanyak 3.962 orang, dengan proporsi sebesar 44,9%. Proporsi kasus suspek yang divaksinasi terhadap kasus suspek terbesar terjadi pada kelompok umur <1 tahun (93,1%). Gambar 6.26 memperlihatkan proporsi kasus suspek campak per kelompok umur. Rincian kasus suspek campak per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 62.a, 62.c, dan 62.d.

GAMBAR 6.26
PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA
TAHUN 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi dengan proporsi suspek divaksinasi terhadap total kasus suspek tertinggi yaitu Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kalimantan Utara. Sedangkan provinsi dengan proporsi terendah yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Gambar 6.27 memperlihatkan proporsi kasus suspek campak terhadap suspek yang divaksinasi menurut provinsi.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.27
PROPORSI SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

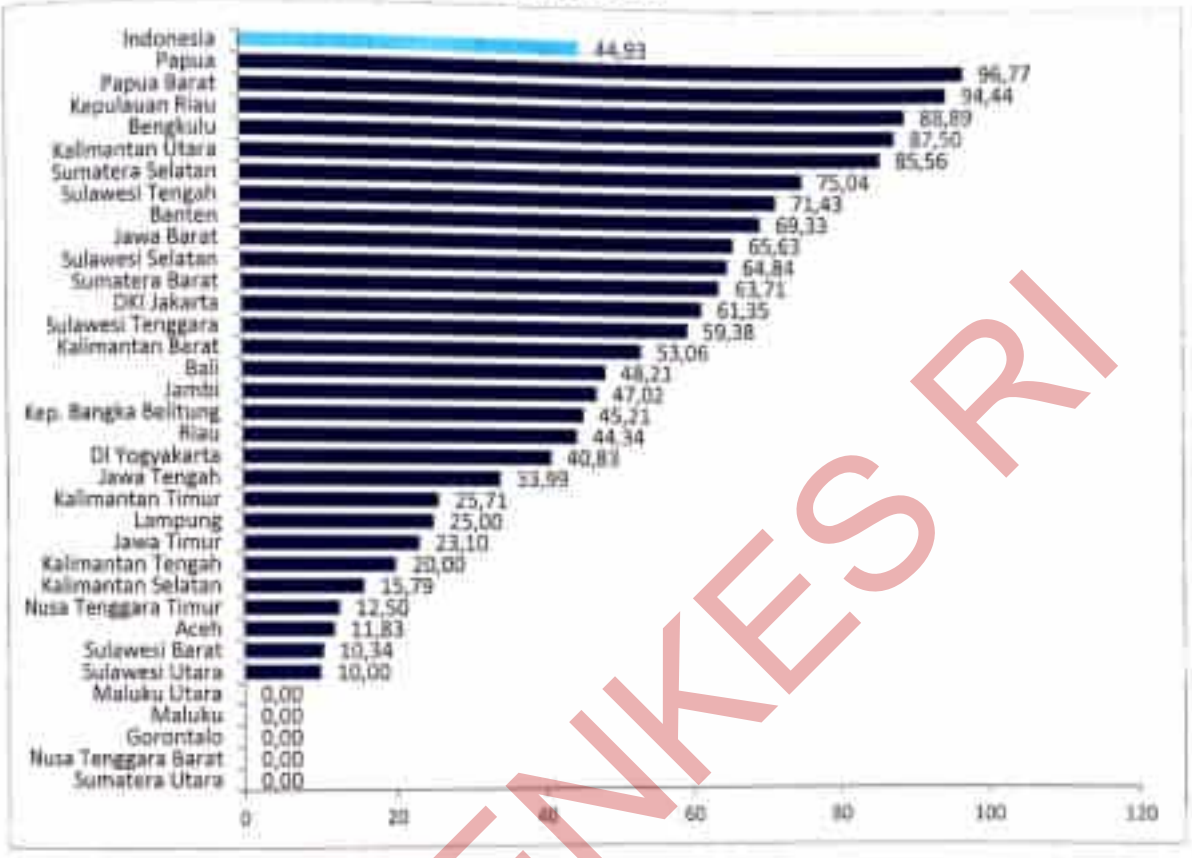

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Apabila terjadi 5 atau lebih kasus suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok, dan telah dibuktikan adanya hubungan epidemiologis di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan KLB suspek campak. Pada tahun 2019, dari 8.819 kasus suspek campak terdapat 32 kasus KLB suspek campak. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang terjadi sebanyak 85 KLB.

KEMENKES RI

b. Cluster II: Putaran I sebesar 41,6%, Putaran II sebesar 38,0% sedangkan Putaran III 2,7% dari Provinsi Aceh (Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe), Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang dan Kota Payukambuh), Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang), Provinsi Lampung (Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung), Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Bandung Barat), Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Sintang dan Kota Pontianak), Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Bajar Baru), dan Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang).
c. Cluster III: Putaran I sebesar 70,2%, Putaran II sebesar 72,4 % dan Putaran III sebesar 12,8% di Provinsi DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Pusat) dan Provinsi Banten (Kab. Lebak).
d. Cluster Jawa Timur (38 Kab/Kota): Putaran I sebesar 381%, Putaran II sebesar 95,6%, dan Putaran III sebesar 96,2%

4. Polio dan *AFP* (*Acute Flaccid Paralysis*/Lumpuh Layu Akut)

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. 1 dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara mereka yang lumpuh, 5% hingga 10% akan berakhhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan mereka.

Pada pertemuan tahunan bulan Mei 1988, the World Health Assembly (WHA), suatu forum sidang tertinggi yang diselenggarakan oleh organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO), telah mengeluarkan resolusi untuk membasmi penyakit polio dari dunia ini. Pada 27 Maret 2014, Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara *South East Asia Region* (*SEARO*) lainnya. Namun, masih ada 2 negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan yang masih endemik polio.

Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat VDPV tipe 1 di Yahukimo Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi sehingga kondisi ini dinyatakan sebagai KLB. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan bOPV. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layuh mendadak (AFP) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio liar dapat dilakukan melalui surveilans *AFP*, dimana semua kasus lumpuh layuh akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans *AFP* merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans *AFP* juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio liar sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

KEMENKES RI

Kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio adalah definisi dari *nonpolio AFP*. Kementerian Kesehatan menetapkan *non polio AFP rate* minimal 2/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2019, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 2,27/100.000 populasi penduduk <15 tahun. Hal itu berarti angka ini sudah mencapai standar minimal penemuan. *Non polio AFP rate* tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan tahun2018, yaitu sebesar 2,17/100.000 populasi penduduk <15 tahun.

Pada tahun 2019 ditemukan kasus NonPolio AFP di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 21 provinsi sudah mencapai standar minimal penemuan *non polio AFP rate* sebesar ≥2 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun, namun masih terdapat 13 provinsi dengan *non polio AFP rate* yang belum mencapai standar minimal penemuan.

GAMBAR 6.30
PENCAPAIAN *NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK UMUR< 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 DAN 2019

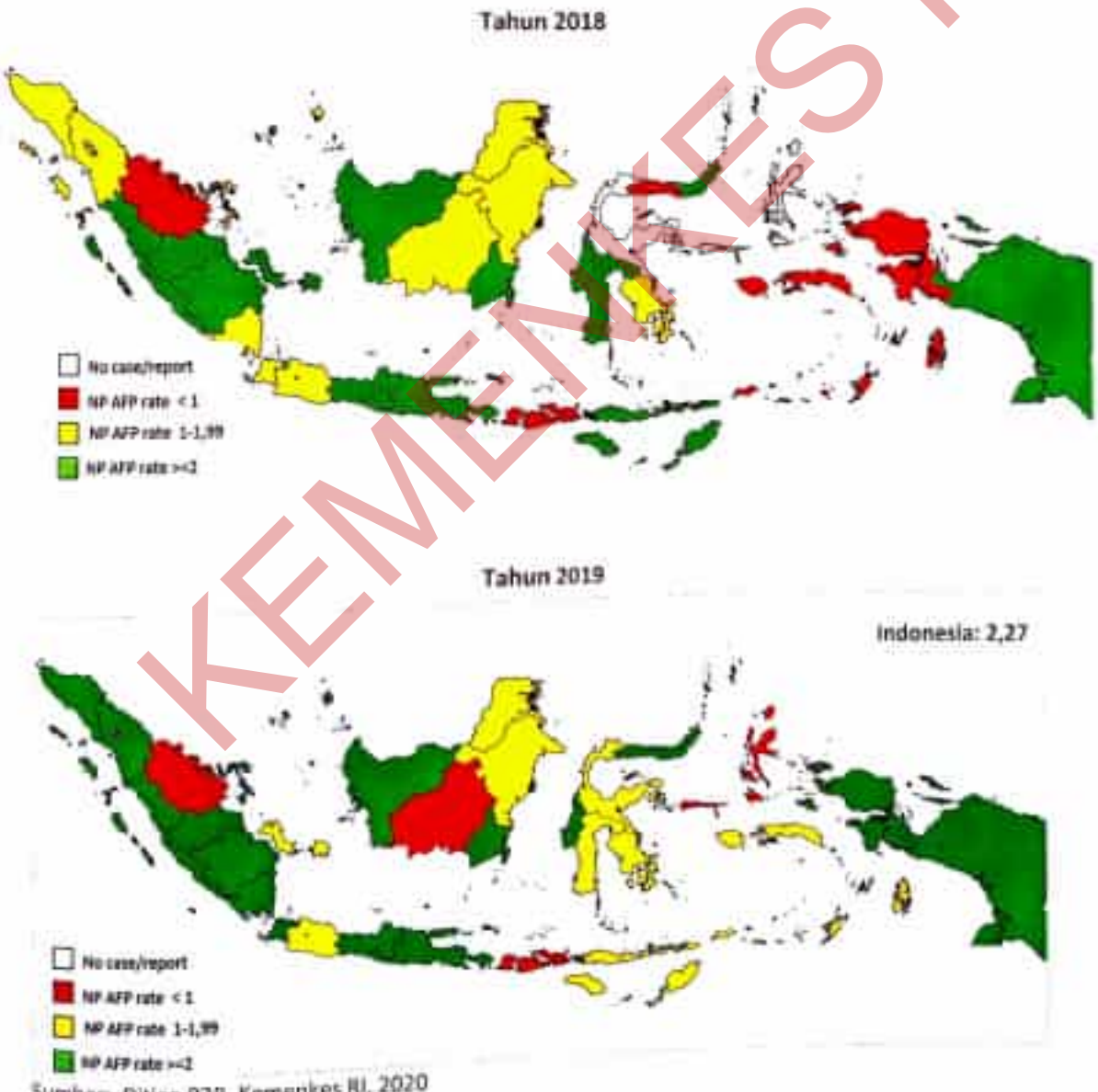

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Sejak tahun 2007 hingga 2019, secara umum target Non Polio AFP rate sebesar 2 per 100.000 penduduk berusia <15 tahun telah tercapai. Hanya pada tahun 2016 saja kinerja capaian tidak mencapai target. Selanjutnya pada tahun 2017 – 2019 standar minimal Non Polio AFP Rate sebesar ≥2 telah dapat dipenuhi. Begitu juga dengan persentase spesimen adekuat yang secara umum sejak tahun 2007 telah mencapai target sebesar 80%. Hanya pada tahun 2017 dan 2018 saja capaian kinerja berada sedikit di bawah target (79,5% dan 78,4%). Selanjutnya pada tahun 2019 standar minimal spesimen adekuat sebesar ≥80% telah dapat dipenuhi.

GAMBAR 6.31

CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2019

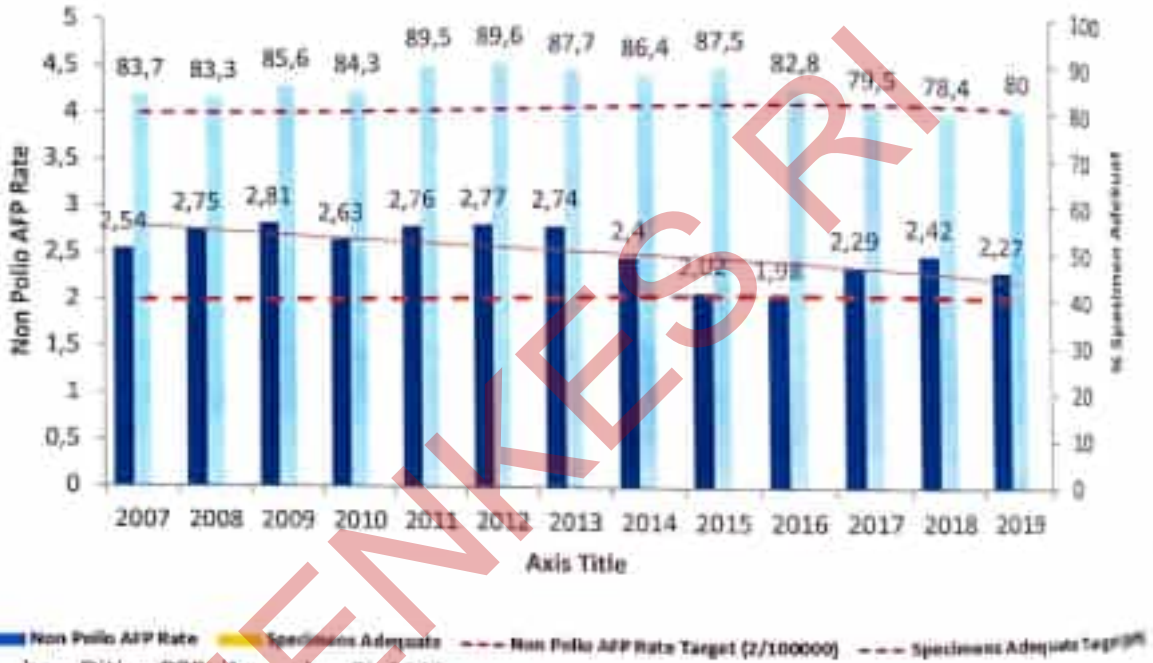

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan provinsi dengan *non polio AFP rate* per 100.000 penduduk umur <15 tahun tertinggi, yaitu sebesar 7,71 dan 6,5 per 100.000 penduduk, sedangkan provinsi terendah yaitu Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara yaitu sebesar 0,20 dan 0,49 per 100.000 penduduk.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.32

NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN

DI INDONESIA TAHUN 2019

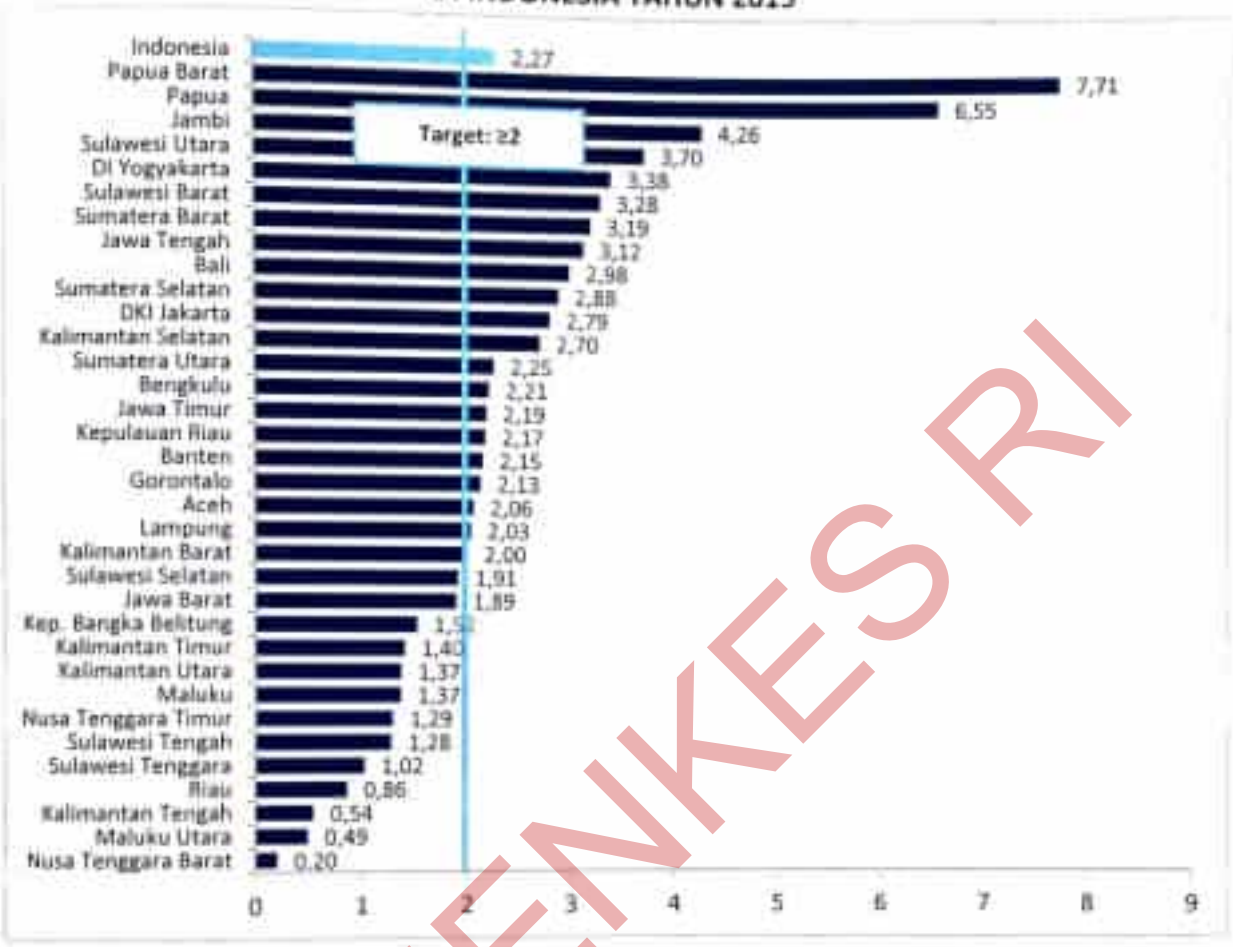

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar pada kasus *AFP* yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans. Namun, tidak semua kasus *AFP* yang dilacak harus dikumpulkan spesimen tinjanya. Pengumpulan spesimen tinja tergantung dari lamanya kelumpuhan kasus AFP. Oleh karena itu, diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan, yaitu diambil dalam kurun waktu 14 hari pertama setelah kelumpuhan dan suhu spesimen harus berada diantara 2°C - 8°C ketika sampai di laboratorium.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.33
PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2018 DAN 2019

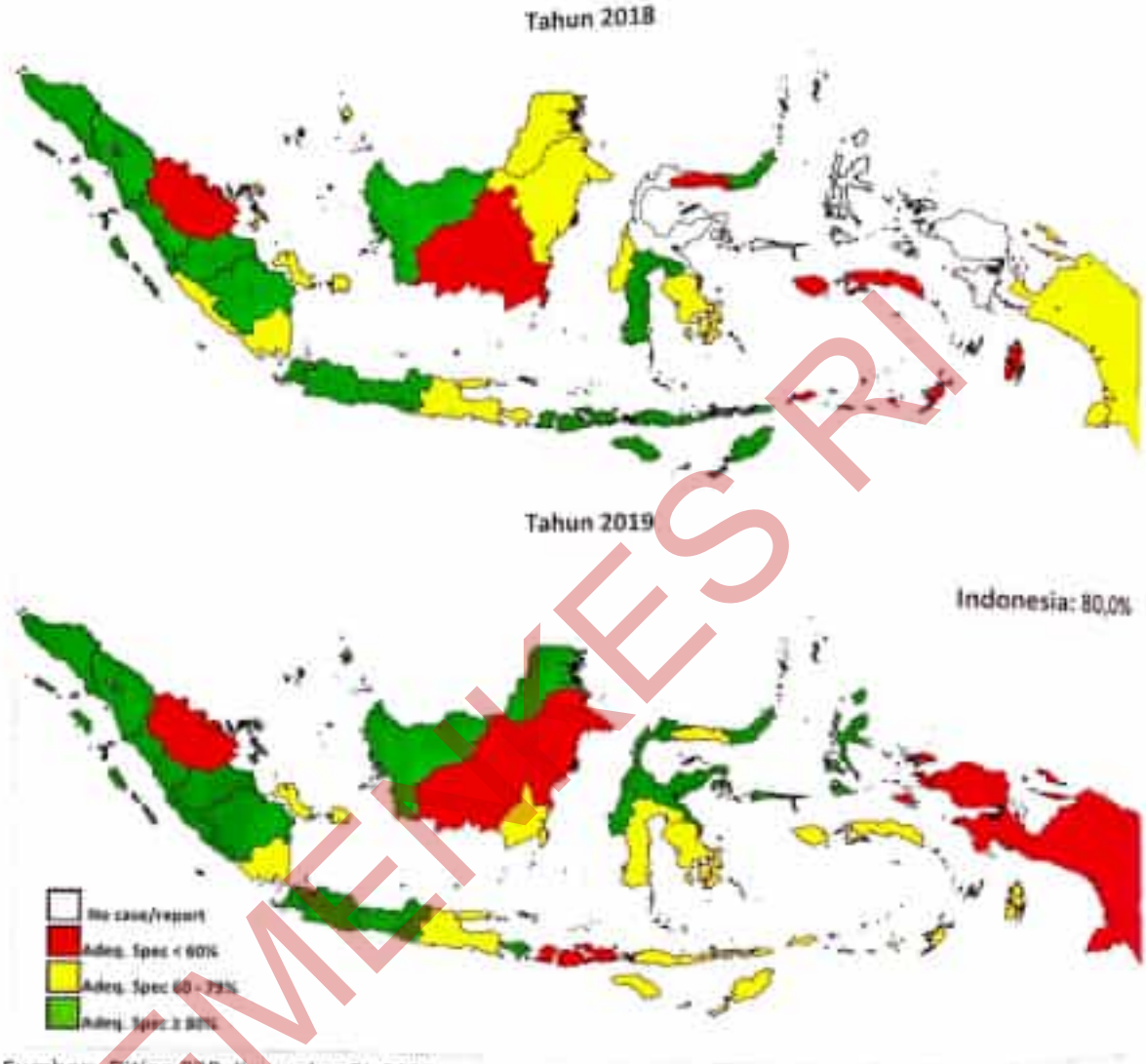

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Semua kasus *AFP* seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus *AFP* harus memenuhi standar spesimen adekuat. Spesimen dinyatakan adekuat jika dua spesimen tinja diperiksa dengan kuantitas yang mencukupi untuk analisi laboratorium, setidaknya pengumpulan spesimen tinja 1 dan tinja 2 dengan rentang waktu 24 jam dalam 14 hari pertama setelah kelumpuhan, dan dibawa ke laboratorium dengan menggunakan proses *cold chain* dan dokumen yang sesuai.

Spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2019 telah sesuai dengan standar, yaitu sebesar 80%. Meskipun demikian, sebanyak 17 provinsi belum mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2019, sedangkan 17 provinsi lainnya telah mencapai standar. Persentase spesimen adekuat *AFP* menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 6.34

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 61-63.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.34
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT *AFP*
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

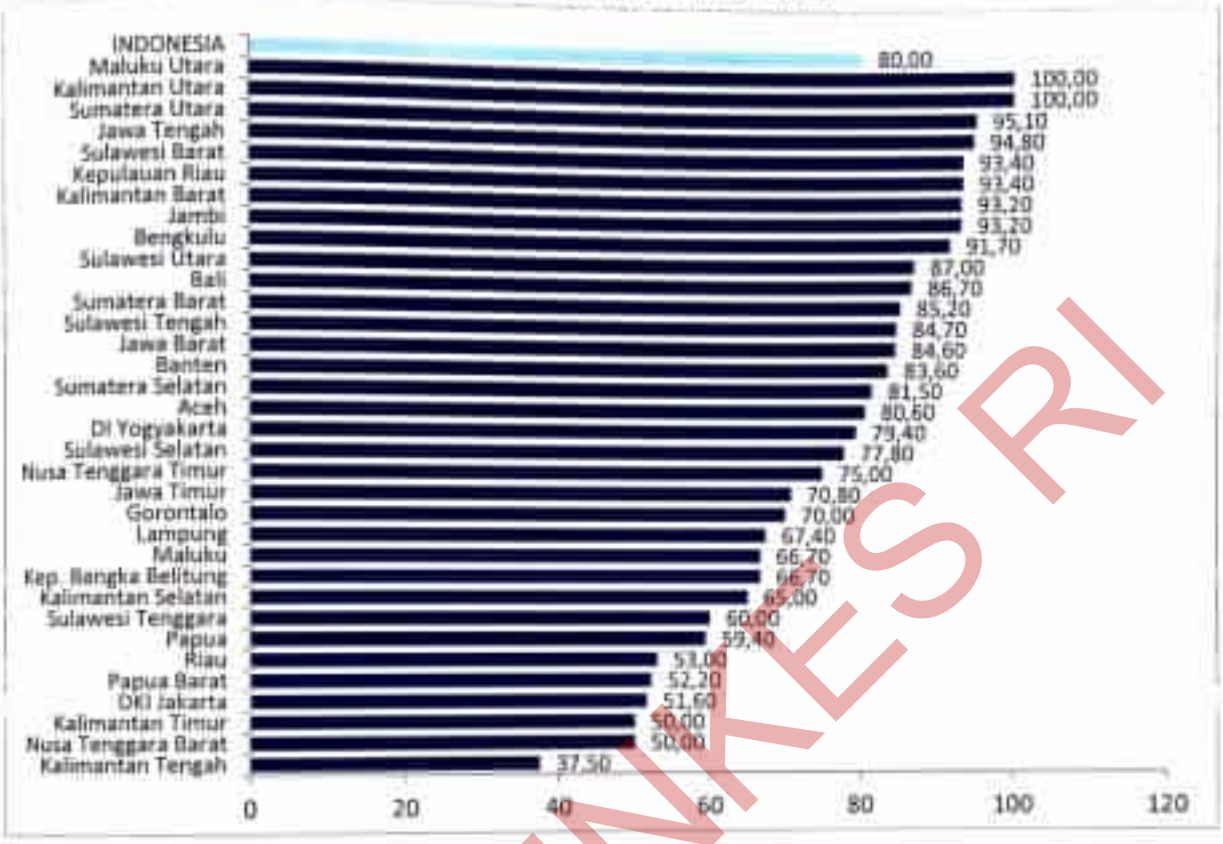

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), upaya-upaya tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
2. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan Imunisasi;
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas PD3I dalam rangka meningkatkan cakupan surveilans AFP dan Campak-Rubella serta pengendalian Difteri;
4. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk program surveilans PD3I;
5. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program surveilans PD3I;
6. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komisi Ahli (Komli) Difteri, Komli Campak-Rubella/CRS, Komli surveilans AFP dan Komli Eradikasi Polio (ERAPO), untuk membahas hal-hal penting dan mendesak dalam rangka pengendalian PD3I;
7. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium Difteri, Campak-Rubella/CRS, dan Polio;
8. Membentuk Posko Pendampingan Masalah Kesehatan di Papua dengan tugas utamanya adalah komando penanggulangan KLB Polio di Papua; dan
9. Melakukan pendampingan Penyelidikan Epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

KEMENKES RI

C. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Di Indonesia terjadi 448 krisis kesehatan selama tahun 2019. Jumlah kejadian krisis kesehatan tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2018, yaitu sebanyak 358 bencana. Pada tahun 2017 terdapat definisi baru untuk krisis kesehatan pada Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/pengungsi/fasilitas kesehatan rusak.

GAMBAR 6.35
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2019

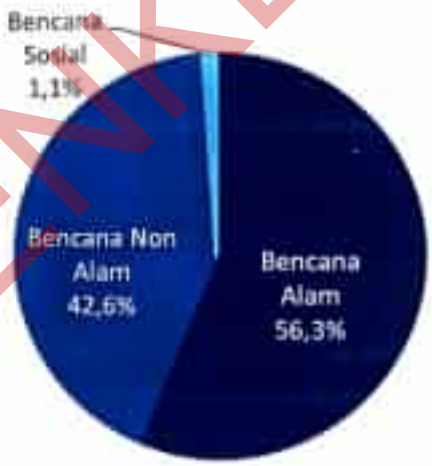

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Di Indonesia kejadian krisis kesehatan akibat bencana alam merupakan yang paling sering terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 56,3%. Sisanya, sebanyak 42,6% bencana non alam dan 1,1% bencana sosial.

Pada tahun 2019, banjir merupakan krisis kesehatan yang sering terjadi seperti tahun sebelumnya. Frekuensi banjir sebanyak 97 kejadian (22%) dan meliputi 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Kejadian terbesar kedua selama tahun 2019 adalah kebakaran hutan dan lahan sebanyak 89 kejadian (20%) yang meliputi 7 provinsi.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.36
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN
DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah krisis kesehatan akibat bencana alam tertinggi terjadi pada bulan Maret yang sebagian besarnya adalah banjir. Sedangkan jumlah bencana non alam tertinggi di bulan Agustus yang sebagian besarnya adalah kebakaran hutan dan lahan, hal ini terjadi karena cuaca panas dan kering di musim kemarau pada bulan Agustus. Selain itu, bencana sosial tertinggi terjadi pada bulan November. Secara keseluruhan, jumlah bencana terbanyak terjadi di bulan Agustus dan terendah di bulan Oktober.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.37

PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu bencana banjir (38,5%) diikuti angin punting beliung (25,8%), dan banjir dan tanah longsor (11,9%).

GAMBAR 6.38

PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

KEMENKES RI

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu kebakaran hutan dan lahan sebesar 46,6% dari total bencana non alam dan diikuti oleh kebakaran (27,2%) dan kejadian luar biasa (KLB) keracunan (16,8%).

Di antara kertiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2019 terjadi 5 bencana sosial yang terdiri dari 3 konflik atau kerusuhan sosial dan 2 aksi teror dan sabotase.

GAMBAR 6.39
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

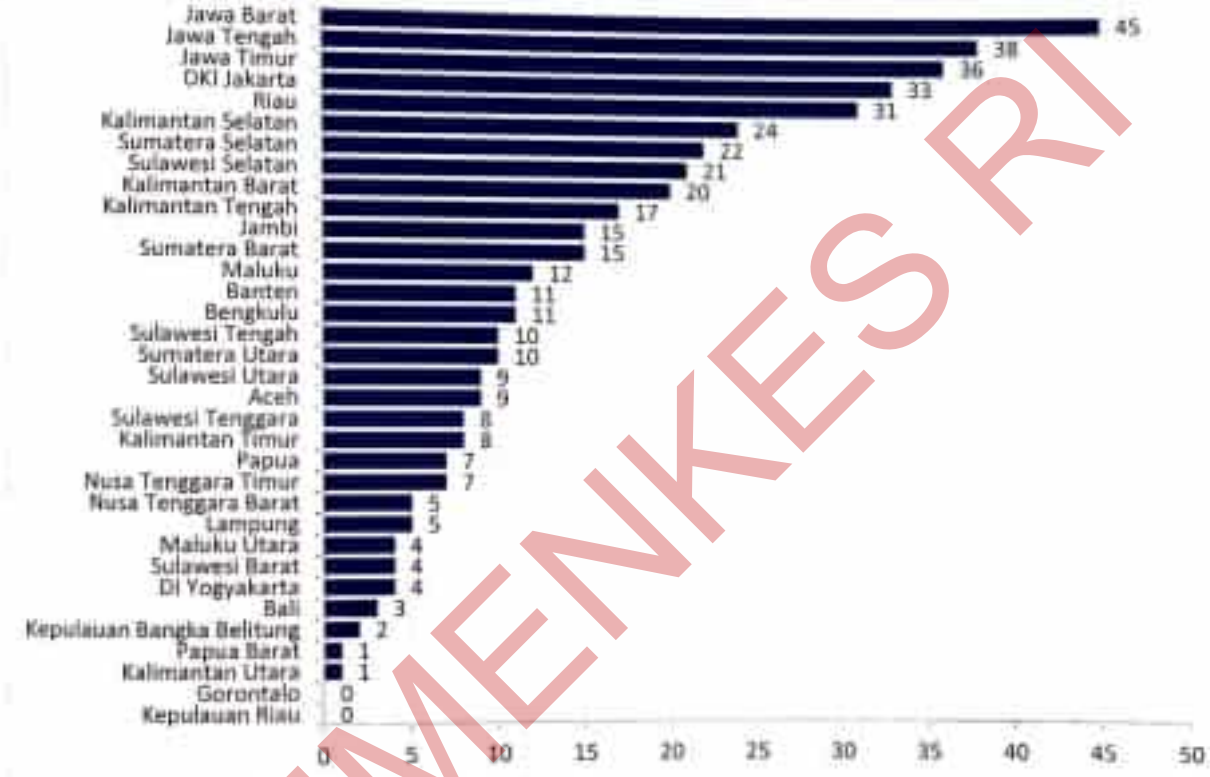

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana di tahun 2019 yaitu sebanyak 45 kejadian, diikuti Jawa Tengah dengan 38 kejadian dan Jawa Timur dengan 36 kejadian bencana. Pada tahun sebelumnya ketiga provinsi tersebut juga termasuk tiga provinsi tertinggi dengan kejadian bencana terbanyak di tahun 2018. Di Provinsi Gorontalo dan Kepulauan Riau tidak ada kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.40

JUMLAH PROVINSI TERKENA KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2019

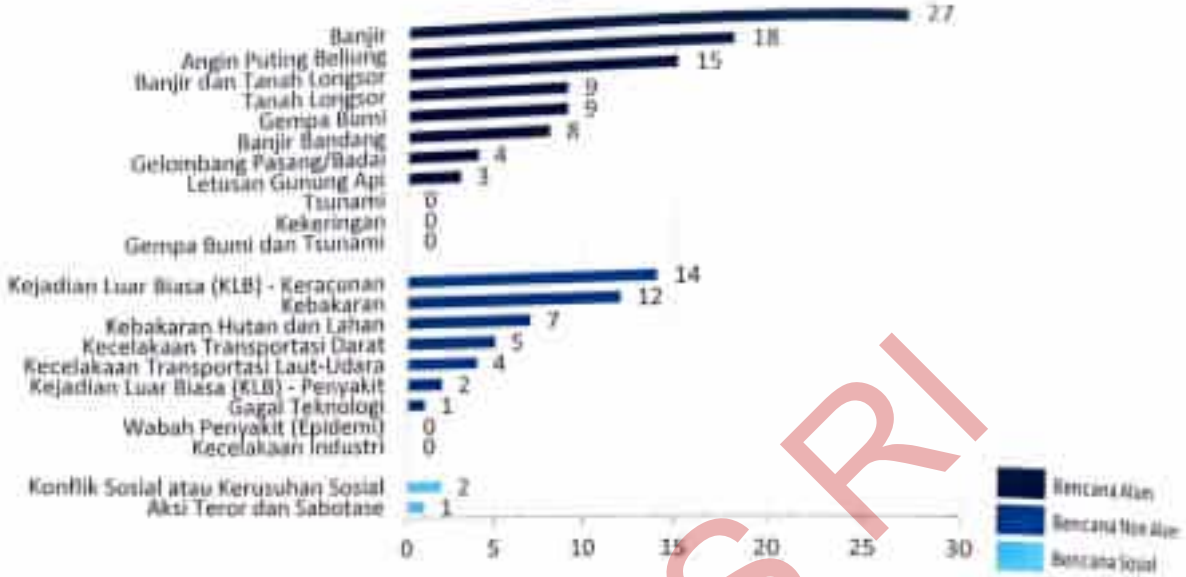

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Krisis kesehatan akibat bencana alam dengan jumlah provinsi paling banyak yaitu bencana banjir sebanyak 27 provinsi. Bencana non alam terbanyak yaitu kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang terjadi di 14 provinsi, sedangkan bencana sosial yang terjadi di 2 provinsi yaitu konflik atau kerusuhan sosial.

TABEL 6.1

JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2019

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Banjir	97	27	43	183	19.661	5	104.821
2	Letusan Gunung Api	4	3	0	0	713	0	280
3	Gempa Bumi	17	9	64	147	7.732	0	309.112
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	18	9	34	20	2	20	1.510
6	Banjir Bandang	17	8	109	157	11.921	92	29.164
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	65	18	4	36	146	0	6.138
9	Gelombang Pasang/Badai	4	4	0	0	31	0	437
10	Banjir dan Tanah Longsor	30	15	98	87	3.848	6	3.114
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Bencana Alam	**253**		**352**	**630**	**43.854**	**123**	**447.250**
1	Kebakaran	52	12	3	14	3.085	0	10.000
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	89	7	0	0	1.184.968	0	157
3	Kecelakaan Transportasi Darat	8	5	69	54	184	6	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	5	4	34	56	147	6	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	3	2	8	7	846	0	7
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	32	14	10	1.158	1.959	0	0
8	Gagal Teknologi	2	1	1	0	118	0	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Bencana Non Alam	**131**		**125**	**1.289**	**1.191.307**	**12**	**10.000**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	3	2	4	10	2	0	4.576
2	Aksi Teror dan Sabotase	2	1	3	8	0	0	0
	Jumlah Bencana Sosial	**5**		**7**	**18**	**2**	**0**	**4.576**
	Indonesia	**448**		**484**	**1.937**	**1.235.163**	**135**	**462.826**

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

KEMENKES RI

Pada tahun 2019 kejadian bencana yang paling banyak menyebabkan korban meninggal adalah bencana alam sebanyak 352 orang, dari bencana alam tersebut, banjir bandang menyebabkan kematian terbanyak sebesar 109 orang. Sedangkan, bencana yang paling banyak menimbulkan luka berat/rawat inap yaitu bencana non alam sebanyak 1.289 dan dan luka ringan sebanyak 1.191.307 orang. Dari bencana non alam tersebut KLB keracunan menyebabkan luka berat terbanyak sebesar 1.158 orang, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan luka ringan terbanyak sebesar 1.184.968 orang. Bencana alam juga menyebabkan jumlah orang hilang dan pengungsi paling banyak sebesar 123 orang dan 447.152 pengungsi. Banjir bandang menyebabkan orang hilang terbanyak sebesar 92 orang dan gempa bumi menyebabkan pengungsi terbanyak sebesar 306.412 pengungsi.

D. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesie *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Peran vektor dalam penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, beberapa studi menunjukkan bahwa DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD.

a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Kasus DBD ditegakkan dengan diagnosa yang terdiri dari gejala klinis dan hasil laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit ≤ 100.000/mm^3 dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit ≥ 20%. Kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 138.127 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 65.602 kasus. Kematian karena DBD pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 467 menjadi 919 kematian. Kesakitan dan kematian dapat digambarkan dengan menggunakan indicator incidence rate (IR) per 100.000 penduduk dan case fatality rate (CFR) dalam bentuk persentase.

GAMBAR 6.41
INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK
DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2010-2018

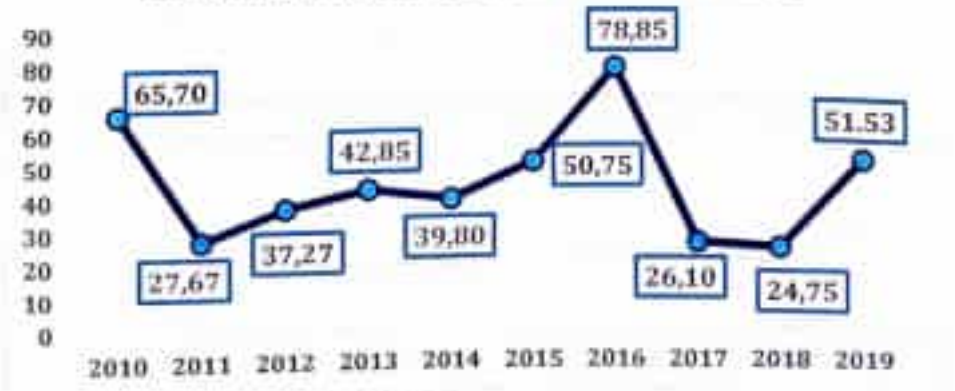

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019

KEMENKES RI

Incidence Rate DBD pada tahun 2019 sebesar 51,53 per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan 2018 berupa Incidence Rate DBD sebesar 26,1 dan 24,75 per 100.000 penduduk. Pada gambar tren IR DBD tahun 2010-2019 juga diketahui adanya tiga puncak IR DBD, yaitu pada tahun 2010, 2016, dan 2019.

GAMBAR 6.42

ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

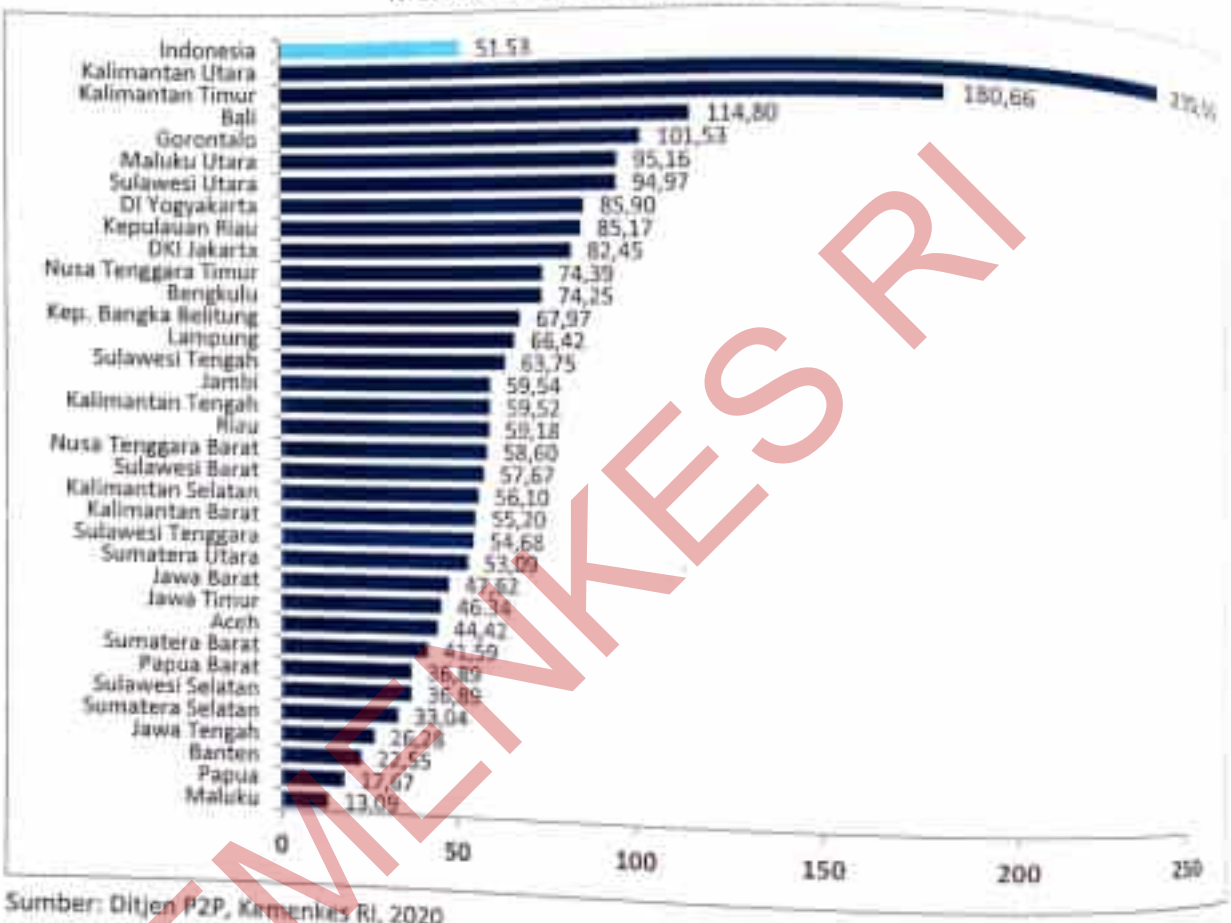

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Bali memiliki IR tertinggi di antara 34 provinsi lainnya, yaitu masing-masing sebesar 239, 180,66, dan 114,8 per 100.000 penduduk. Sedangkan provinsi dengan IR DBD terendah yaitu Maluku sebesar 13,09, Papua sebesar 17,67, dan Banten sebesar 22,55 per 100.000 penduduk. Perbandingan IR DBD tahun 2018-2019 menunjukkan sebagian besar provinsi mengalami peningkatan. Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku Utara mengalami peningkatan signifian sebanyak 10 kali lipat yaitu masing-masing dari 24,01 dan 8,02 pada tahun 2018 menjadi 239 dan 95,16 per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Pada tahun 2019 hanya tiga provinsi yang mengalami penurunan IR DBD, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku.

Selain angka kesakitan, besaran masalah DDB juga dapat diketahui dari angka kematian atau CFR yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. Secara nasional CFR menunjukkan sedikit penurunan dari 0,71% pada tahun 2018 menjadi 0,67% pada tahun 2019. Provinsi dikatakan memiliki CFR tinggi jika telah melebihi 1%. Pada tahun 2019 terdapat 10 provinsi dengan CFR di atas 1%, yaitu Maluku, Gorontalo, Kalimantan Tengah, NTT, Jawa Tengah, Maluku

KEMENKES RI

Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, dan Sulawesi Barat. Tingginya CFR memerlukan langkah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan jika ada anggota keluarganya yang memiliki gejala DBD. Hal ini menjadi penting sebagai pertolongan segera untuk mencegah keparahan dan komplikasi yang berujung pada fatalitas.

GAMBAR 6.43
***CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE**
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

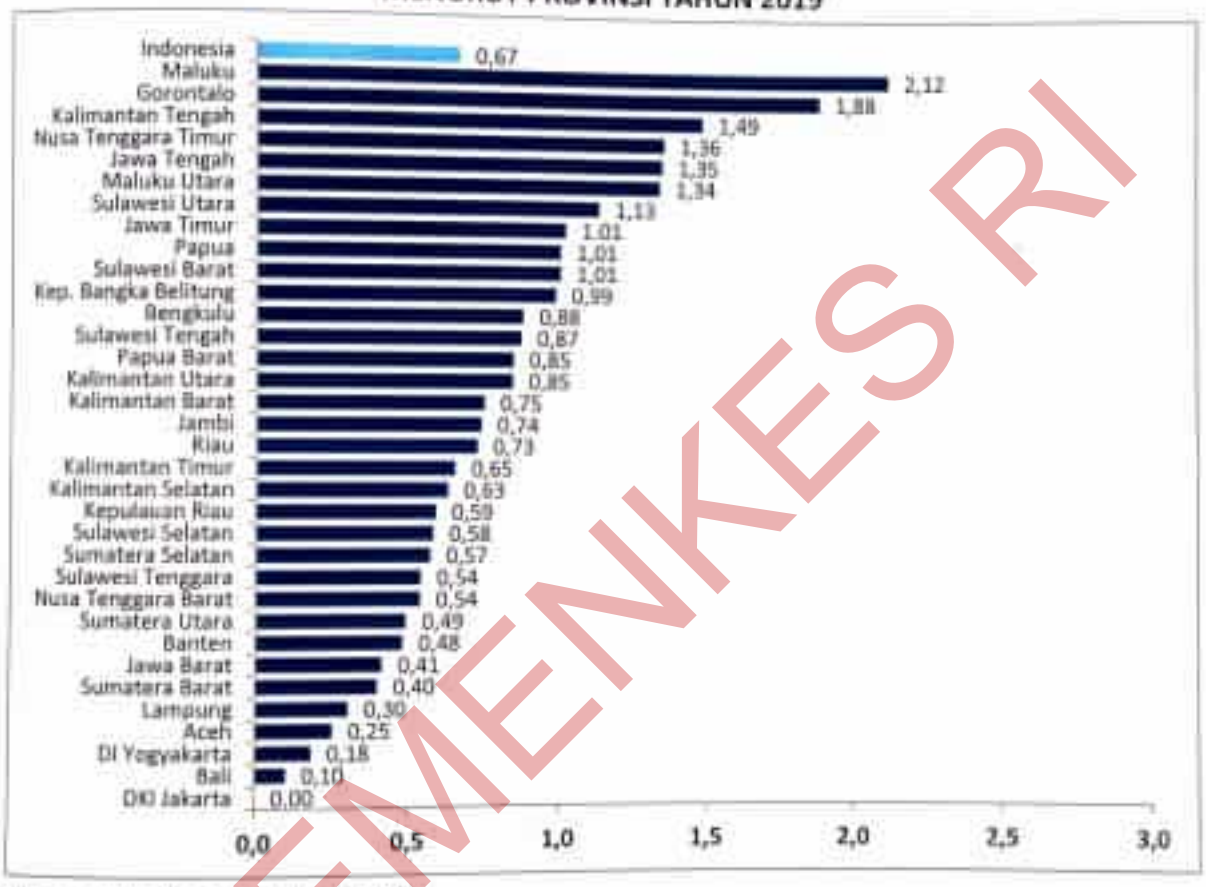

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Penyebaran penyakit DBD dapat diindikasikan dengan jumlah kabupaten/kota terjangkit. Jumlah kabupaten kota pada tahun 2018 sebanyak 481 atau 93,58% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD menujukkan kecenderungan peningkatan sejak tahun 2010 sampai dengan 2019.

GAMBAR 6.44
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Kementerian Kesehatan menetapkan salah satu indikator pada Rencana Strategis tahun 2015-2019, yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD < 49 per 100.000 penduduk.

Dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, terdapat 320 kabupaten/kota (62,26%) yang sudah mencapai IR DBD < 49/100.000 penduduk. Target program tahun 2019 adalah sebesar 68% kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk. Pada gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa terdapat 23 provinsi pada tahun 2019 yang tidak memeuhi target IR DBD < 49 per 100.000 penduduk. Provinsi-provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.45

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 49 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2019

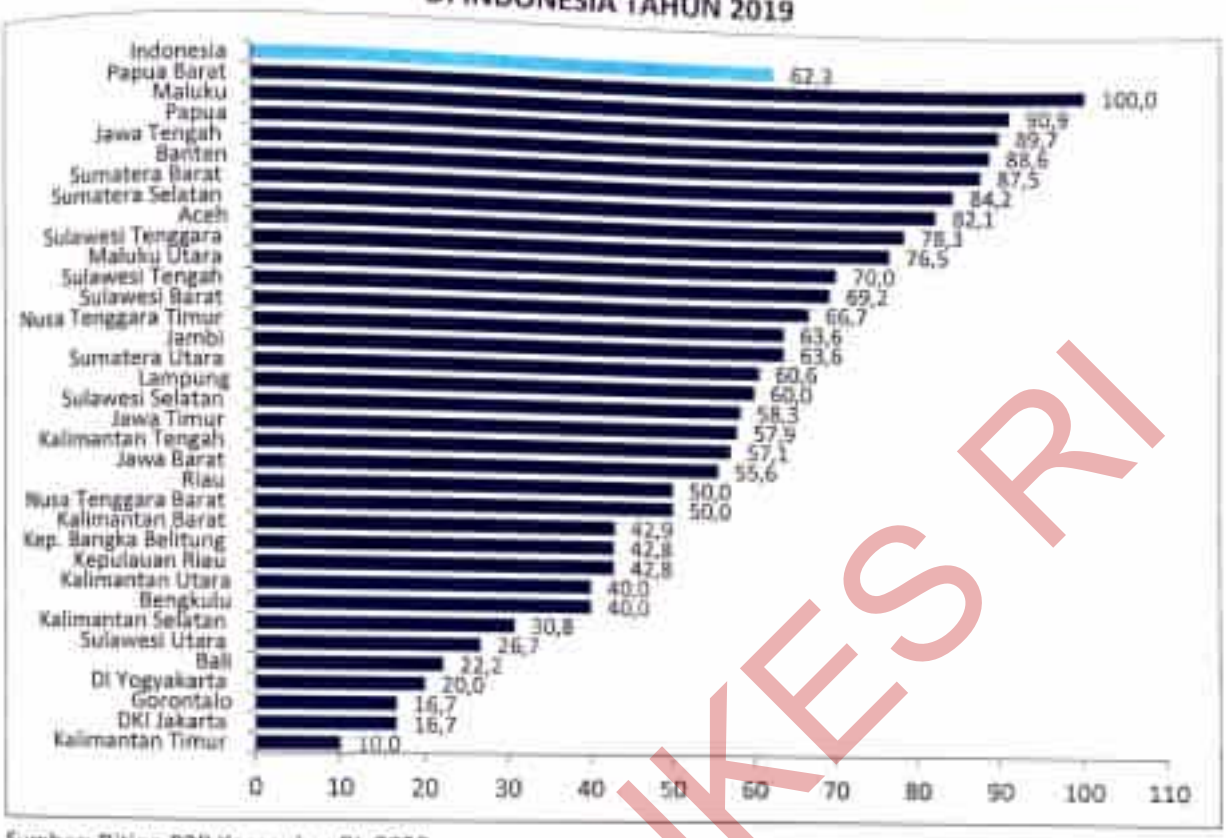

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

c. Angka Bebas Jentik

Angka Bebas Jentik (ABJ) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai upaya pengendalian DBD. Capaian indikator ini secara nasional pada tahun 2019 belum mencapai taraget program sebesar > 95%.

GAMBAR 6.46

ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

ABJ tahun 2019 sebesar 79,2%, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 31,5%. Indikator ini merupakan output yang diharapkan dari kegiatan "Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)". Dengan demikian diperlukan optimalisasi kegiatan tersebut dari seluruh kabupaten/kota, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemenuhan kebutuhan logistik yang mendukung pengendalian DBD, serta monitoring dan pembinaan kepada dinas Kesehatan provinsi dalam manajemen sistem pelaporan. Informasi lebih rinci mengeai penyakit DBD terdapat pada Lampiran 65.a dan 65.b.

2. Chikungunya

Gejala utama demam Chikungunya (demam chik) adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus dan Aedes aegypti yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD. Demam chik ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Pada tahun 2019 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 5.042 kasus.

GAMBAR 6.47
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2019

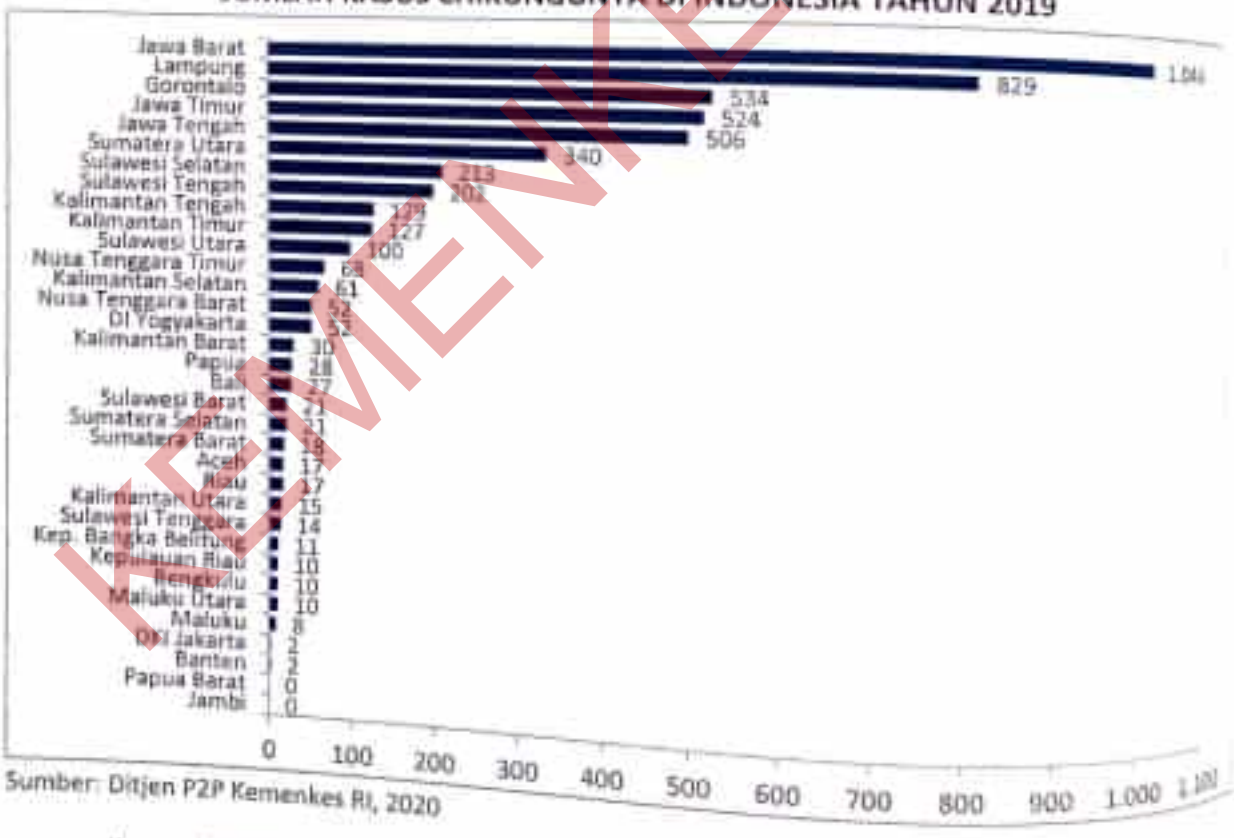

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Kasus demam Chikungunya paling banyak dilaporkan terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.044 kasus, Lampung sebanyak 829 kasus, dan Gorontalo sebanyak 534 kasus.

Kejadian demam chikungunya mengalami penurunan kasus yang sangat signifikan pada tahun 2010-2012, namun kembali meningkat cukup tinggi pada tahun 2013 dan turun kembali pada

KEMENKES RI

signifikan mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kembali. Kecenderungan kasus Chikungunya pada tahun 2010-2019 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.48
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

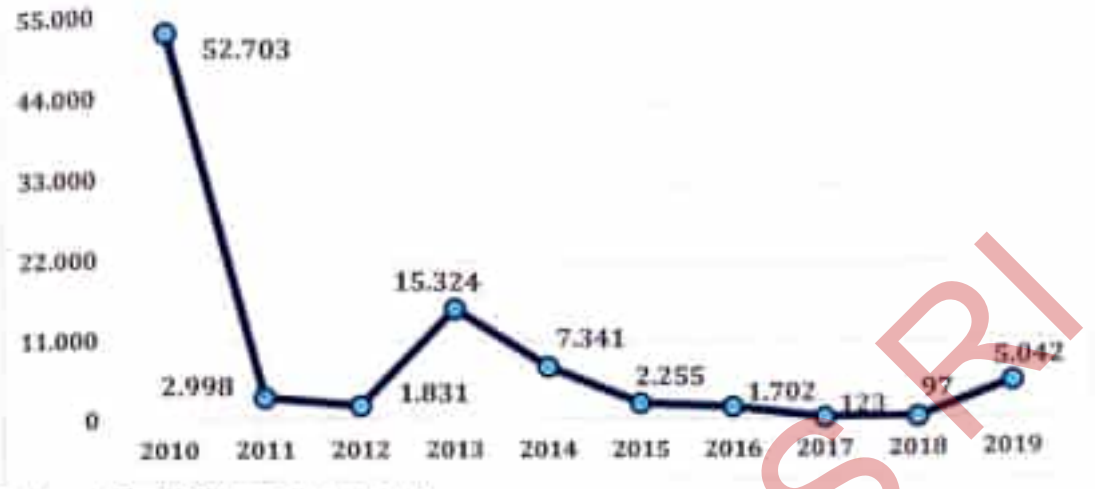

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya. Faktor penyebab meningkatnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yan tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit. Sebagian daerah tidak melaporkan kasus chikungunya.

3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, cacing filaria terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

WHO menetapkan kesepakatan global sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Saat ini di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan penyakit kaki gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara.

Di Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 10.758 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan peningkatan dan penurunan kasus filariasis di Indonesia sejak tahun 2010.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.49
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA
TAHUN 2010 – 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Filariasis merupakan penyakit yang termasuk ke dalam neglected diseases. Provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua sebanyak 3.615, Nusa Tenggara Timur 1.540 kasus, dan Papua Barat sebesar 1.089. Provinsi dengan kasus terendah antara lain Bali sebanyak 2 kasus, DI Yogyakarta sebanyak 3 kasus, Gorontalo sebanyak 5 kasus.

GAMBAR 6.50
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

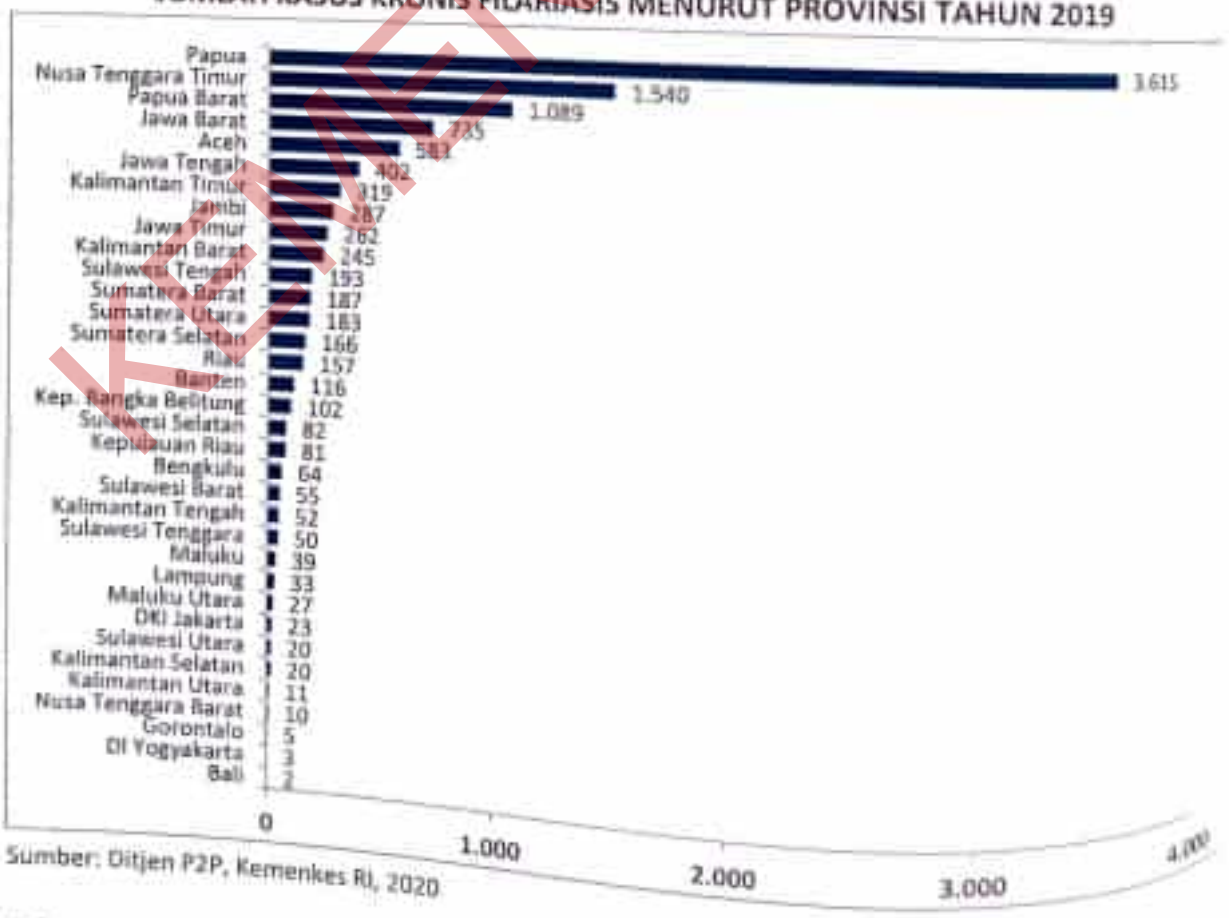

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Keberhasilan program pengendalian filariasis di antaranya dapat diketahui dengan jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Terdapat 236 kabupaten/kota yang merupakan wilayah endemis filariasis yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Secara nasional, jumlah kabupaten/kota non-endemis sebanyak 278 kabupaten/kota (54,1%).

GAMBAR 6.51
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA
YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

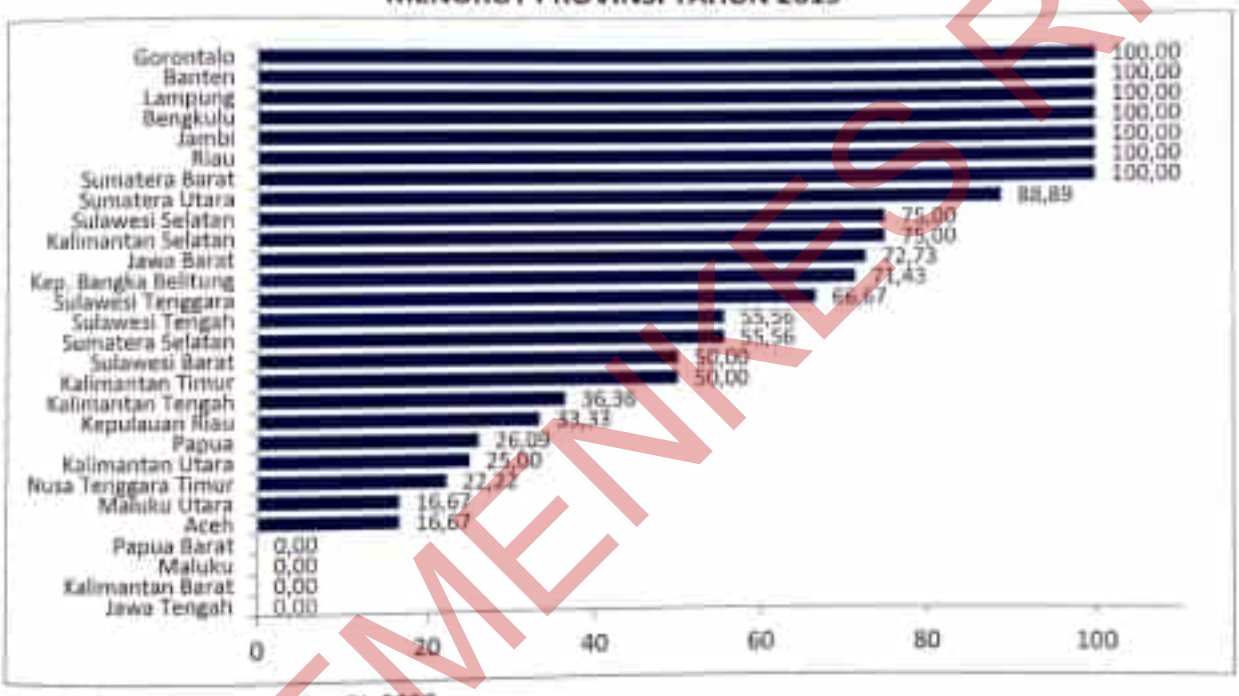

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator keberhasilan pengendalian filariasis yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% sebanyak 114 kabupaten/kota pada tahun 2019. Dengan demikian indikator renstra tersebut telah memenuhi target Renstra 2019 sebesar 75 kabupaten/kota. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 8 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menurunkan angka mikrofilaria < 1%, yaitu Gorontalo, Banten, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat.

Upaya lain dari pengendalian penyakit filariasis adalah Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Pada tahun 2019 tidak semua provinsi melaksanakan POPM filariasis karena termasuk daerah non-endemis atau seluruh kabupaten/kota endemis di provinsi tersebut sedang berada pada fase surveilans pasca POPM filariasis. Sebanyak enam provinsi merupakan daerah non-endemis seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, dan 7 provinsi seluruh kabupaten/kota endemisnya sedang menjalani surveilans pasca POPM filariasis, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Gorontalo.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.52

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN POPM FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

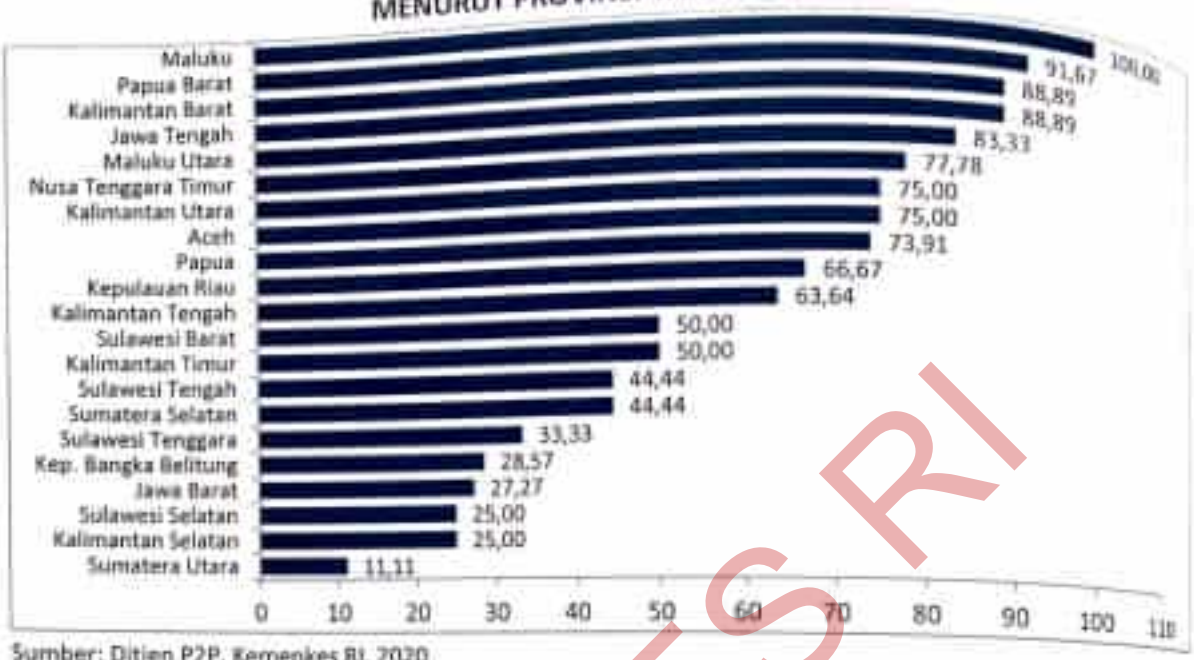

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Terdapat 118 kabupaten/kota yang melaksanakan POPM Filariasis. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebanyak 131 kabupaten/kota. Penurunan ini disebabkan beberapa kabupaten/kota endemis filariasis menyelesaikan putaran POPM Filariasis dan masuk pada masa surveilans pasca POPM Filariasis. Dari 21 provinsi yang masih melaksanakan POPM Filariasis, Provinsi Maluku memiliki persentase jumlah kabupaten melaksanakan POPM Filariasis tertinggi sebesar 100%, sedangkan Sumatera Utara memiliki persentase terendah sebesar 11,11%.

GAMBAR 6.53

CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2010-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Meskipun pada tahun 2019, hanya 50% jumlah kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis, namun tren cakupan POPM Filariasis dalam 10 tahun terakhir tetap menunjukkan peningkatan, persentase pada tahun 2010 hanya 39,4% dan

KEMENKES RI

pada tahun 2019 persentase cakupan POPM Filariasis 79,31% Informasi lebih rinci mengenai penyakit Filariasis terdapat pada Lampiran 67.a dan 67.b.

4. Malaria

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan Plasmodium yang terdiri dari banyak spesies, namun yang pada umumnya menyebabkan malaria adalah *Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae*, dan *Plasmodium ovale*. Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* yang di dalam tubuhnya mengandung *Plasmodium*. Penyebaran dan endemisitas Malaria sangat dipengaruhi oleh keberadaan tempat perindukan nyamuk Anopheles sebagai vektor penular.

Malaria menjadi salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkolusis yang pengendaliannya menjadi bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional program eliminasi malaria ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang "Eliminasi Malaria di Indonesia". Target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

Penilaian eliminasi malaria diawali dari tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2019 terdapat tiga provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Lima provinsi di Indonesia bagian timur belum memiliki kabupaten/kota yang berstatus eliminasi malaria, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Meskipun belum ada kabupaten/kota yang eliminasi di 5 provinsi tersebut namun sudah ada beberapa kabupaten yang mencapai endemis rendah dan bersiap menuju eliminasi malaria.

GAMBAR 6.54
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

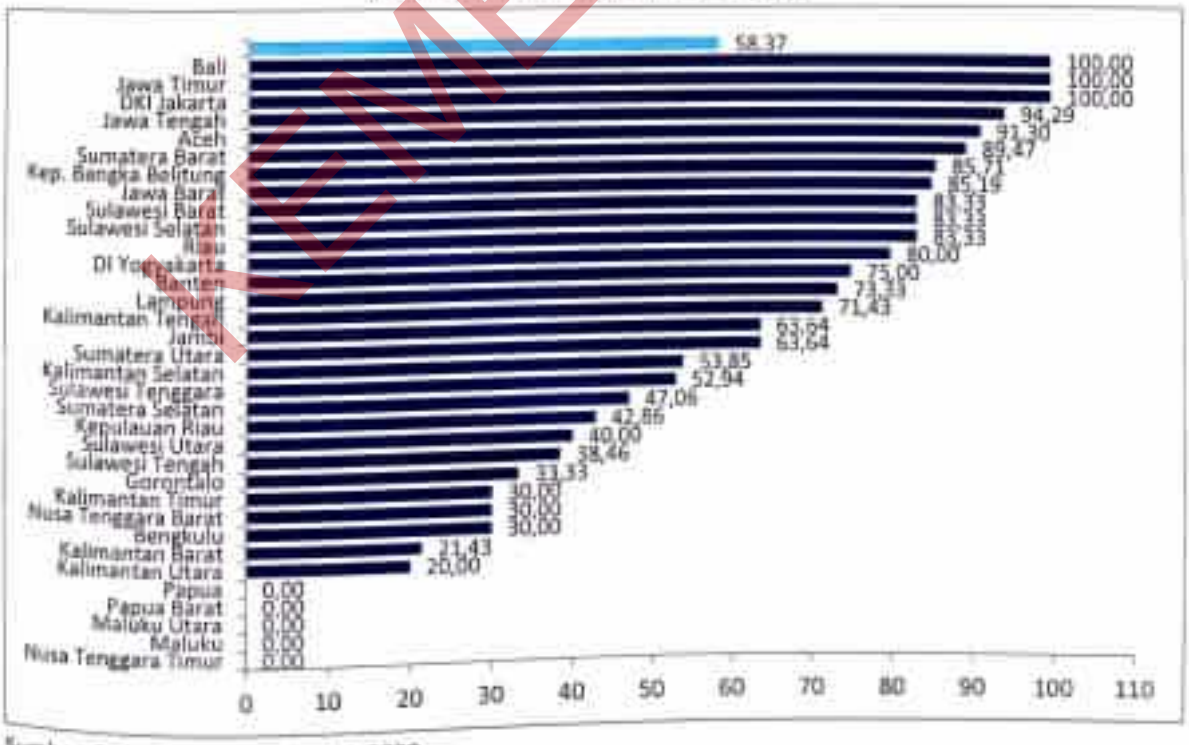

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Secara nasional, terdapat 300 kabupaten/kota yang telah dinyatakan bebas malaria pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 ketika 285 kabupaten/kota telah berstatus eliminasi malaria. Capain indikator lain seperti persentase konfirmasi kesediaan darah dan persentase pengobatan standar merupakan beberapa upaya yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian eliminasi malaria.

GAMBAR 6.55
PETA ENDEMISITAS MALARIA
TAHUN 2019

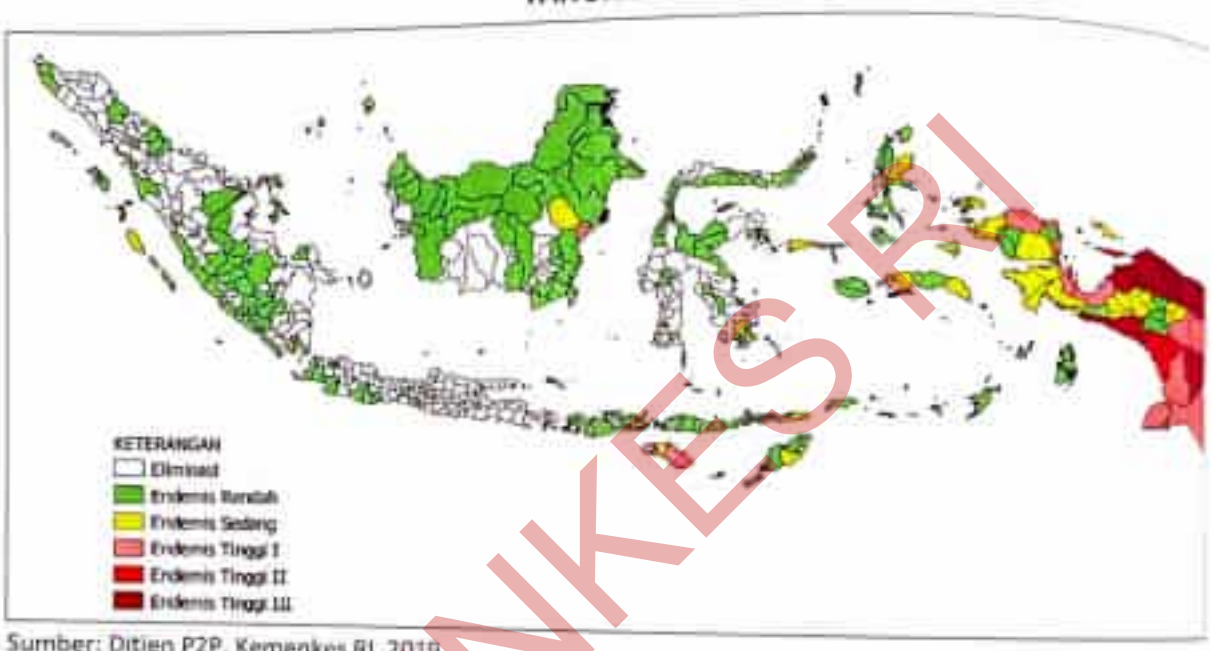

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019

Gambar di atas menunjukkan persebaraan kabupaten/kota endemis malaria pada tahun 2019 di seluruh Indonesia. Warna putih menunjukkan kabupaten/kota eliminasi. Tingkat endemisitas digambarkan dengan warna hijau, kuning dan gradasi merah.

a. Angka Kesakitan Malaria

Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, yaitu proprosi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tersebut dengan konstanta 1.000. API malaria di Indonesia pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 0,84 menjadi sebesar 0,93 per 1.000 penduduk. Namun demikian, API malaria di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2009.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.56
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE* /API)
PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2009-2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa API malaria pada tahun 2009 sebesar 1,8 per 1.000 penduduk menurun hingga angka terendah pada tahun 2018 sebesar 0,84 per 1.000 penduduk. Pada tingkat provinsi, Provinsi Papua, NTT dan Papua Barat menjadi penyumbang kasus terbanyak dan memiliki API malaria yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.57
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE*/API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

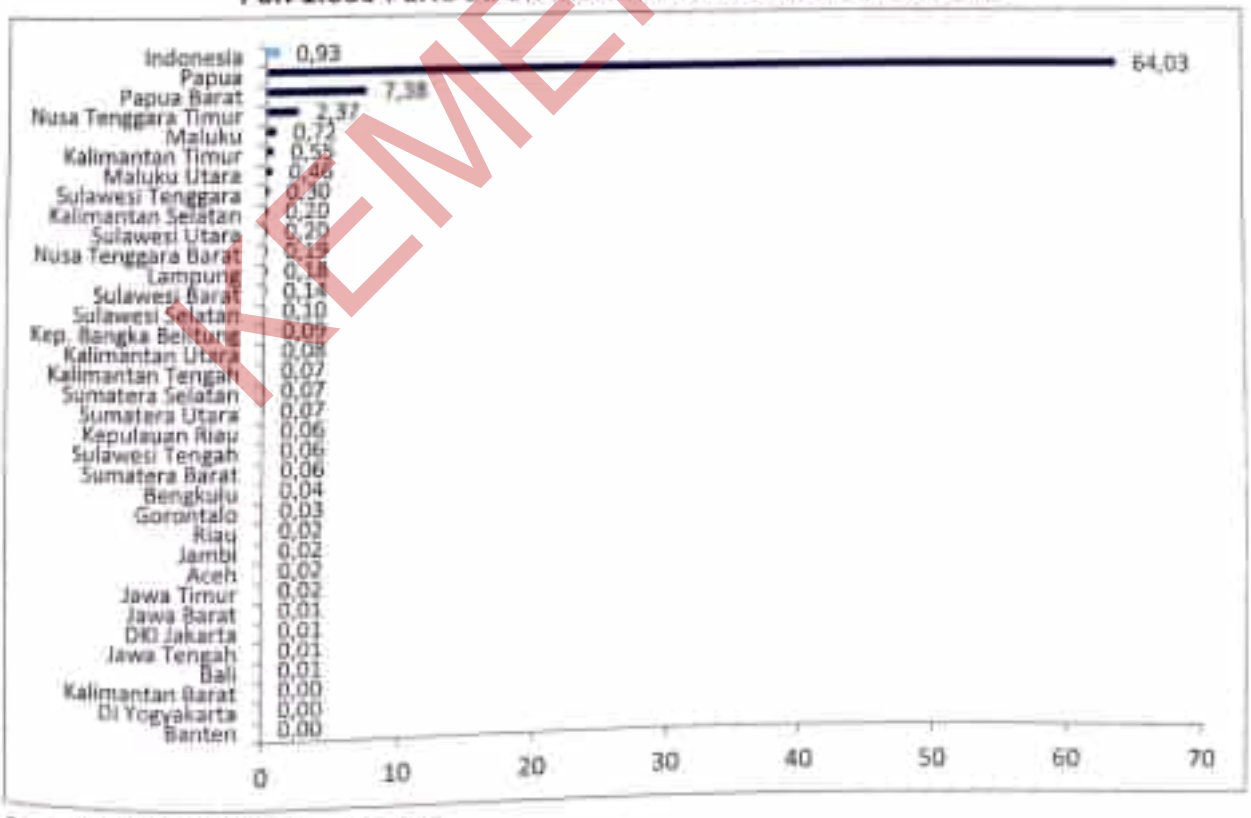

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki API malaria yang tinggi dibandingkan provinsil lainnya di Indonesia, yaitu sebesar 64,03, 7,38, dan 2,37 per 1.000 penduduk. Sebagian besar provinsi, yaitu 31 provinsi (91,2%) memiliki API malaria < 1 per 1.000 penduduk.

API malaria per 1.000 penduduk juga menjadi landasan tingkat endemisitas malaria meliputi rendah (< 1), sedang (1-5), dan tinggi (> 5). Pada tahun 2019 terdapat 160 kabupaten/kota (31,5%) endemis rendah, 31 kabupaten/kota (5,4%) endemis sedang, dan 23 kabupaten/kota (4,5%) endemis tinggi. Persentase kabupaten/kota berstatus endemis rendah menurut provinsi, disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.58

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN *API*<1 PER 1.000 PENDUDUK ATAU BEBAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2019

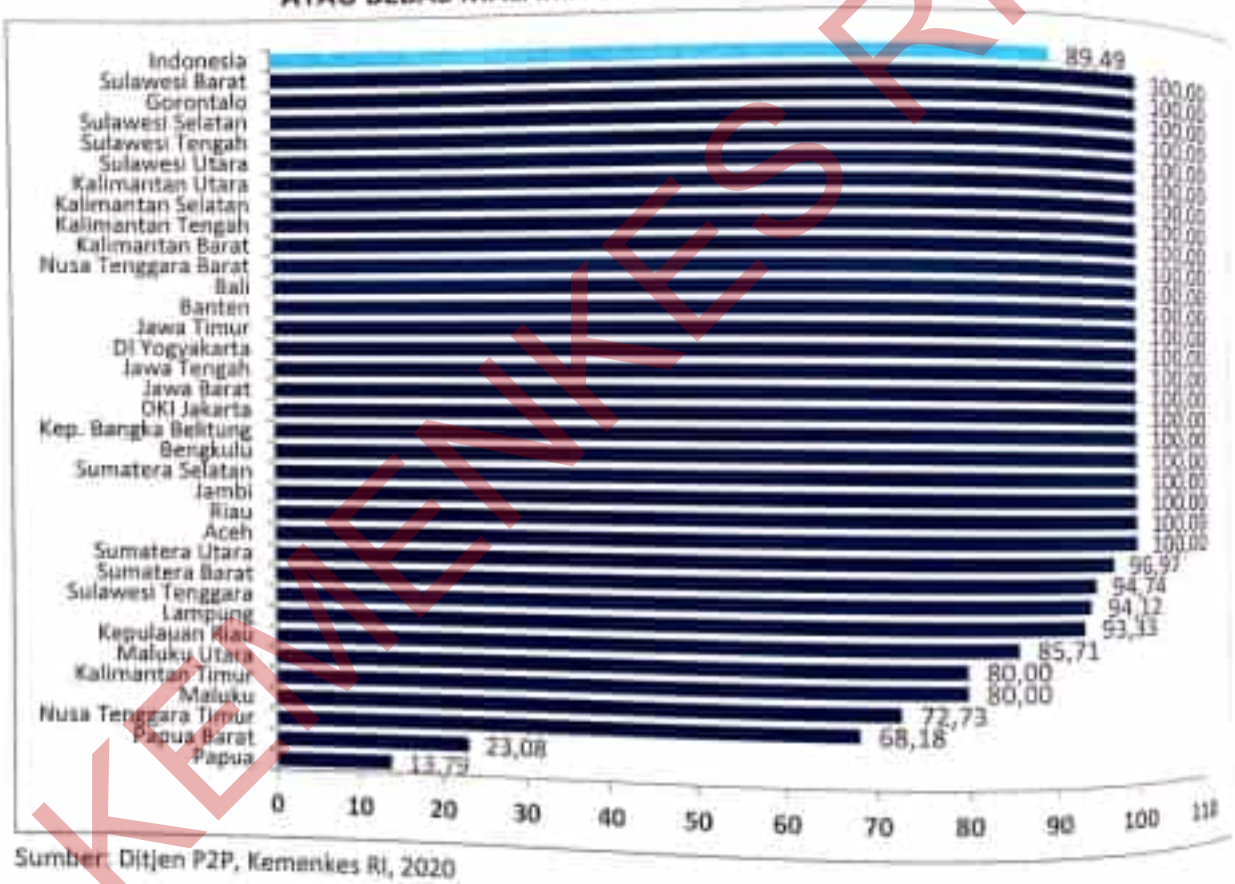

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia telah berstatus bebas malaria ataupun memiliki API < 1 per 1.000 penduduk. Hanya 11 provinsi yang belum memenuhi dua kriteria tersebut, Yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.

KEMENKES RI

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria secara efektif dilakukan dengan pemberian *ACT* (*Artemicin-based Combination Therapy*) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis. Persentase pengobatan *ACT* masuk dalam indikator prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden dengan target 90%.

GAMBAR 6.59
PERSENTASE PENGOBATAN *ACT ARTEMICIN-BASED COMBINATION THERAPY (ART)* MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

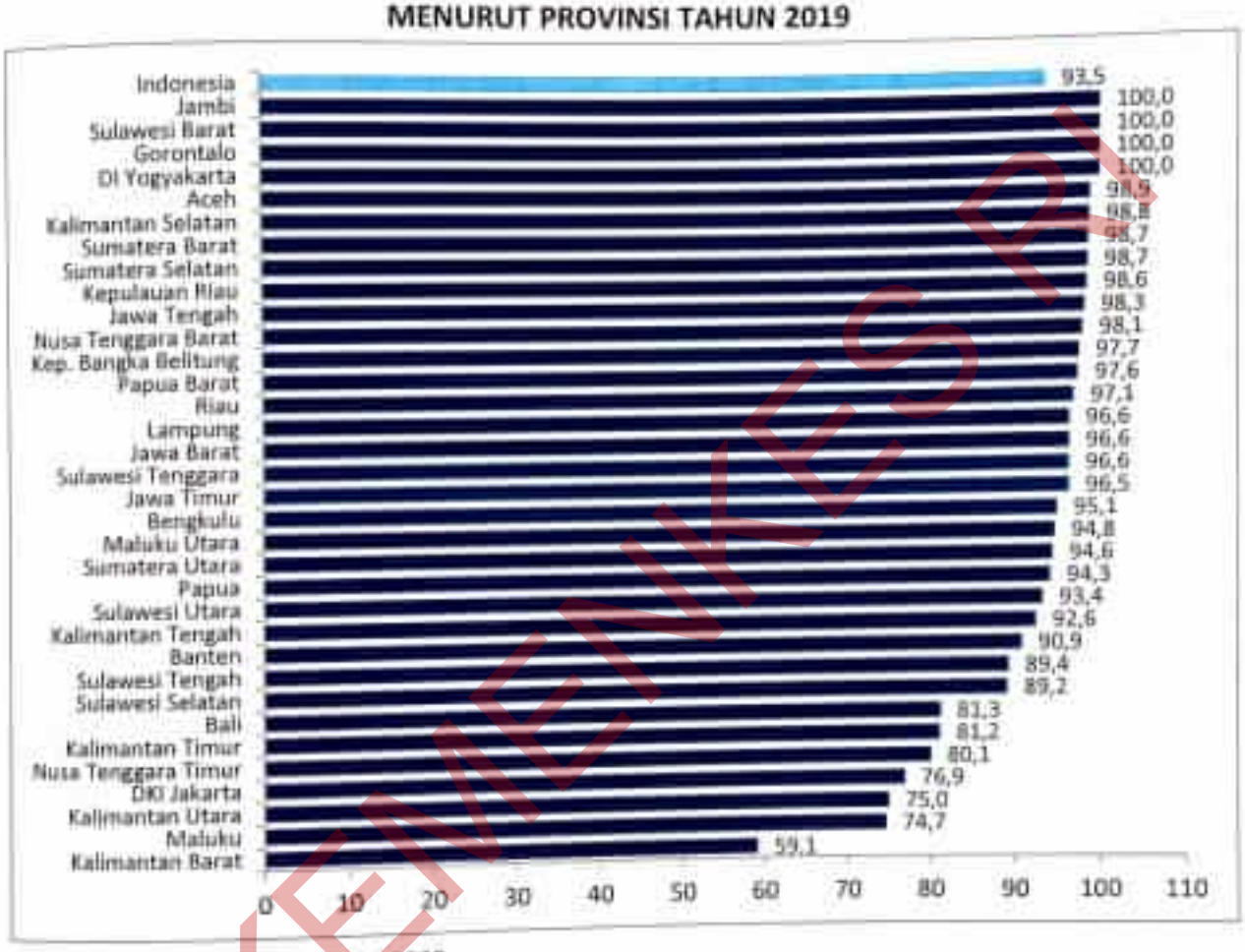

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa 25 provinsi (73,5%) memiliki persentase di atas 90% yang artinya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Data dan informasi lebih detail tentang penyakit Malaria, dapat dilihat pada Lampiran 66.a, 66.b, dan 66.c.

5. Rabies

Rabies adalah penyakit menular disebabkan oleh virus golongan Rhabdovirus yang ditularkan melalui gigitan hewan penular dan mematikan bagi hewan maupun manusia. Hewan penular rabies terdiri dari anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala.

Pada tahun 2019 kasus Rabies dilaporkan di 27 provinsi, dan 7 provinsi berstatus bebas Rabies, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.60
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) menunjukkan peningkatan dari 84.010 pada tahun 2011 menjadi 106.057 pada tahun 2019. Kasus kematian karena rabies (Lyssa) menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Provinsi yang melaporkan kasus GHPR tertinggi sepanjang tahun 2019 adalah Bali sebanyak 38.187 kasus, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebanyak 13.599 kasus, dan Sulawesi Utara sebanyak 8.163 kasus.

Kasus Lyssa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung menurun, namun meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 118 kematian, lalu mengalami penurunan menjadi 115 kematian pada tahun 2019. Kematian akibat rabies (Lyssa) paling banyak dilaporkan terjadi di Sulawesi Utara sebanyak 17 kasus, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebanyak 15 kasus, dan Kalimantan Barat sebanyak 14 kasus. Informasi lebih rinci mengenai penyakit Rabies terdapat pada Lampiran 67.c.

6. Leptospirosis

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan bakteri *Leptospira sp*. Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau tidak langsung dengan *urine* hewan yang terinfeksi. Banyak kasus leptospirosis yang tidak terlaporkan karena sulitnya diagnosa klinis dan mahalnya biaya pemeriksaan laboratorium.

Terdapat 9 provinsi yang melaporkan kasus leptopirosis pada tahun 2019, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Jumlah provinsi meningkat dibandingkan tahun 2018 ketika hanya 7 provinsi yang melaporkan kasus Leptospirosis. Secara nasional kasus Leptospirosis di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 920 kasus yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 894 kasus.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.61
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2010 – 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Meskipun jumlah kasus meningkat, jumlah kematian dan CFR menujukkan penurunan yaitu dari 148 dan 16,5% pada tahun 2018 menjadi 122 kematian dan 13,26% pada tahun 2019. Dalam kuurn waktu 2010-2019, kasus Leptospirosis memiliki titik puncak pada tahun 2011, 2013, 2016, 2018, dan 2019, dan CFR tertinggi pada tahun 2012, 2015, dan 2017.

GAMBAR 6.62
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Provinsi Jawa Tengah melaporkan kasus tertinggi pada tahun 2019 sebesar 458 kasus. Terdapat dua provinsi yang tahun sebelumnya tidak melaporkan kasus menjadi melaporkan kasus, yaitu Kalimantan Utara sebanyak 8 kasus dan Sulawesi Selatan sebanyak 1 kasus. Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan kasus signifikan dari 2 kasus menjadi 32 kasus. Sedangkan Provinsi Banten menunjukkan penuruan signfikan dari 115 kasus menjadi 52 kasus. Dari seluruh provinsi yang melaporkan kasus, hanya Banten dan Maluku yang melaporkan penurunan kasus.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.63

CASE FATALITY RATE LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2019

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh kasus yang dilaporkan, Provinsi Maluku memiliki CFR tertinggi sebesar 50% yang diikuti oleh Kalimantan Utara sebesar 37,5%, dan Banten sebesar 36,5%. DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan melaporkan tidak adanya kasus kematian akibat Leptospirosis.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam pengendalian leptospirosis antara lain surat edaran kewaspadaan leptospirosis setiap tahunnya; pengadaan *Rapid Test Diagnostic* (*RDT*) sebagai *buffer stock*, mendistribusikan media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) seperti buku petunjuk teknis, *leaflet*, poster, *roll banner*, dan lain-lain.

E. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Penyakit jenis ini bertanggungjawab terhadap sedikitnya 70% kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, *stroke*, dan penyakit sendi/rematik/encok.

Secara nasional hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi sebesar 34,11%. Prevalensi tekanan darah tinggi pada perempuan (36,85%) lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (31,34%). Prevalensi di perkotaan sedikit lebih tinggi (34,43%) dibandingkan dengan perdesaan (33,72%). Prevalensi semakin meningkat seiring dengan pertambahan umur.

Prevalensi obesitas (Indeks Massa Tubuh atau IMT ≥25 – 27 dan IMT ≥27) pada penduduk usia ≥ 15 tahun sebesar 35,4%, sedangkan penduduk *obese* dengan IMT ≥27 saja sebesar 21,8%. Pada penduduk usia ≥15 tahun yang obesitas, prevalensi lebih tinggi pada perempuan (29,3%) dibandingkan pada laki-laki (14,5%). Prevelansi lebih tinggi di perkotaan (25,1%) daripada perdesaan (17,8%). Sedangkan menurut kelompok umur, obesitas tertinggi pada kelompok umur 40-44 tahun (29,6%).

KEMENKES RI

Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan untuk mengendalikan faktor risiko PTM, melalui perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres. Cek kesehatan secara berkala yaitu pemeriksaan faktor risiko PTM dapat dilakukan melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM yang ada di desa/ kelurahan, dan di Puskesmas.

Upaya pengendalian PTM juga dilakukan melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok di sekolah-sekolah, hal ini sebagai upaya penurunan prevalensi perokok ≤ 18 tahun. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa dukungan seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menurunkan kecenderungan peningkatan kasus PTM tersebut, tentu saja dibutuhkan program pengendalian yang dalam hal ini telah dan terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

1. Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas

Puskesmas berada di garda terdepan dalam penyediaan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang di dalamnya mencakup pengendalian PTM. Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas dilakukan dengan membentuk Puskesmas Pandu PTM. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Sampai dengan tahun 2019, terdapat 7.465 puskesmas atau 73,66% dari total 10.134 puskesmas yang ada di Indonesia melaksanakan PTM secara terpadu melalui program Puskesmas Pandu PTM. Terdapat 3 provinsi yang seluruh puskesmasnya telah melaksanakan Pandu PTM, yaitu Sulawesi Barat, Bali, dan DI Yogyakarta. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 9,92% diikuti oleh Kalimantan Utara sebesar 27,27%, dan Papua Barat sebesar 37,11%.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.64

PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN TERPADU (PANDU) PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019

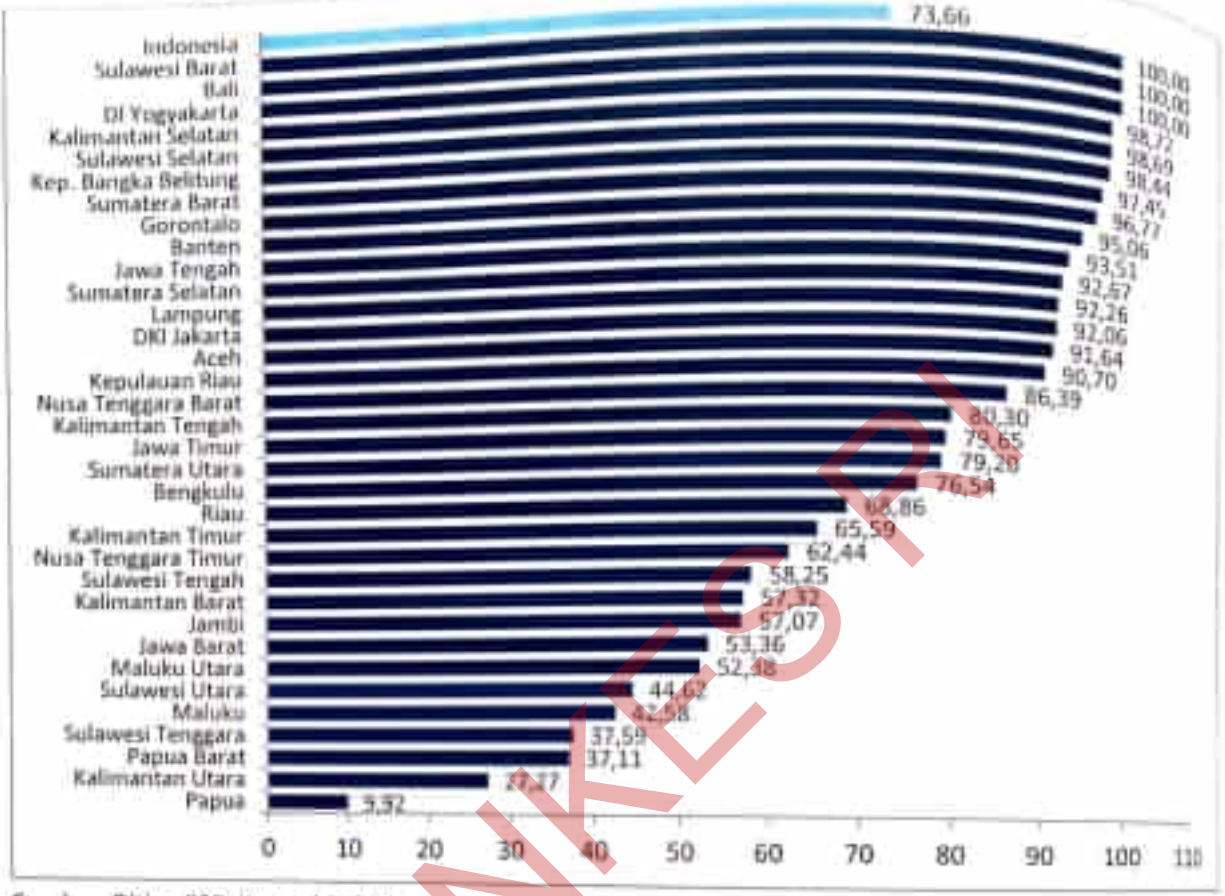

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) adalah Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM). Posbindu PTM memberdayakan masyarakat aktif melakukan upaya deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM. Ini berarti kegiatan posbindu merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat. Utamanya kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM menyasar kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas. Keterlibatan masyarakat pada Posbindu PTM dilakukan secara terintegrasi dan rutin di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif, di lingkugan tempat kerja ataupun di organisasi/ lembaga lainnya.

Gambar 6.65 menunjukkan jumlah desa/kelurahan di setiap Provinsi yang melaksanakan Posbindu PTM. Secara nasional desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM sebesar 60,71% (sejumlah 50.657 desa/kelurahan). Persentase ini sudah mencapai target pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2019 yaitu sebesar 50%. Terjadi peningkatan persentase pencapaian jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 43,9% (sejumlah 35.749 desa/kelurahan).

Terdapat dua (2) Provinsi yang seluruh desa/kelurahannya sudah melaksanakan Posbindu PTM, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Provinsi dengan desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM terbanyak lainnya (cakupan desa berposbindu ≥ 90%) adalah

KEMENKES RI

Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Sementara Provinsi dengan desa/kelurahan melakukan Posbindu yang paling sedikit adalah Papua (2,06%).

GAMBAR 6.65
PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019

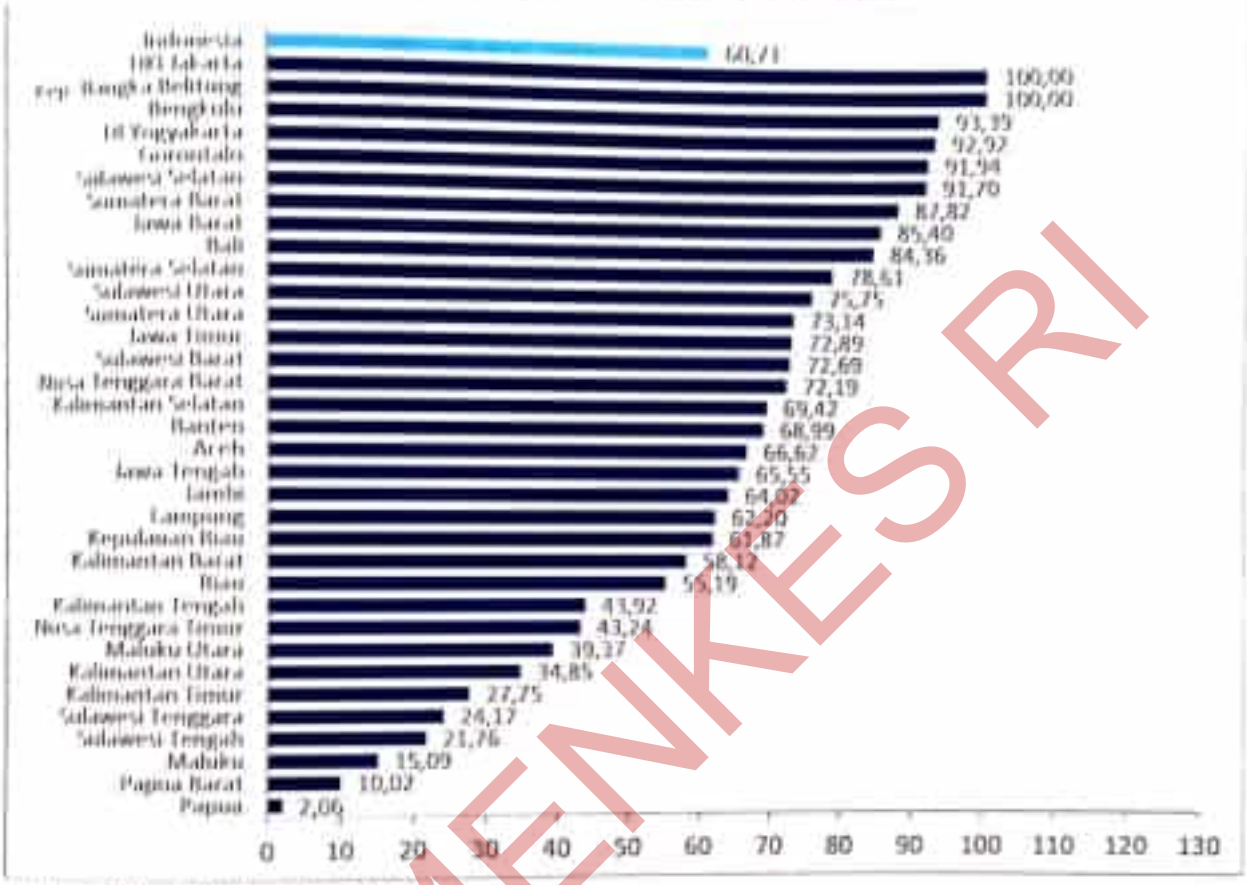

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

3. Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau

Beberapa upaya pengendalian konsumsi hasil tembakau yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut.

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok termasuk akibat merokok melalui iklan layanan masyarakat serta promosi kesehatan.
b. Menyediakan layanan upaya berhenti rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik primer dan sekunder maupun tersier. Selain itu juga, bagi masyarakat yang tidak sempat dan tidak dapat datang ke Fasyankes, disiapkan layanan konseling upaya berhenti merokok melalui telepon tanpa bayar.
c. Melakukan monitoring dan implementasi kebijakan pengendalian konsumsi hasil tembakau.
d. Perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok melalui pengembangan kawasan tanpa rokok dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya.

Sebagian besar provinsi di Indonesia sudah memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

KEMENKES RI

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, namun belum semua kabupaten/kota menerapkan peraturan KTR pada minimal 50% di sekolah.

GAMBAR 6.66
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN KTR MINIMAL PADA 50% SEKOLAH MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2019

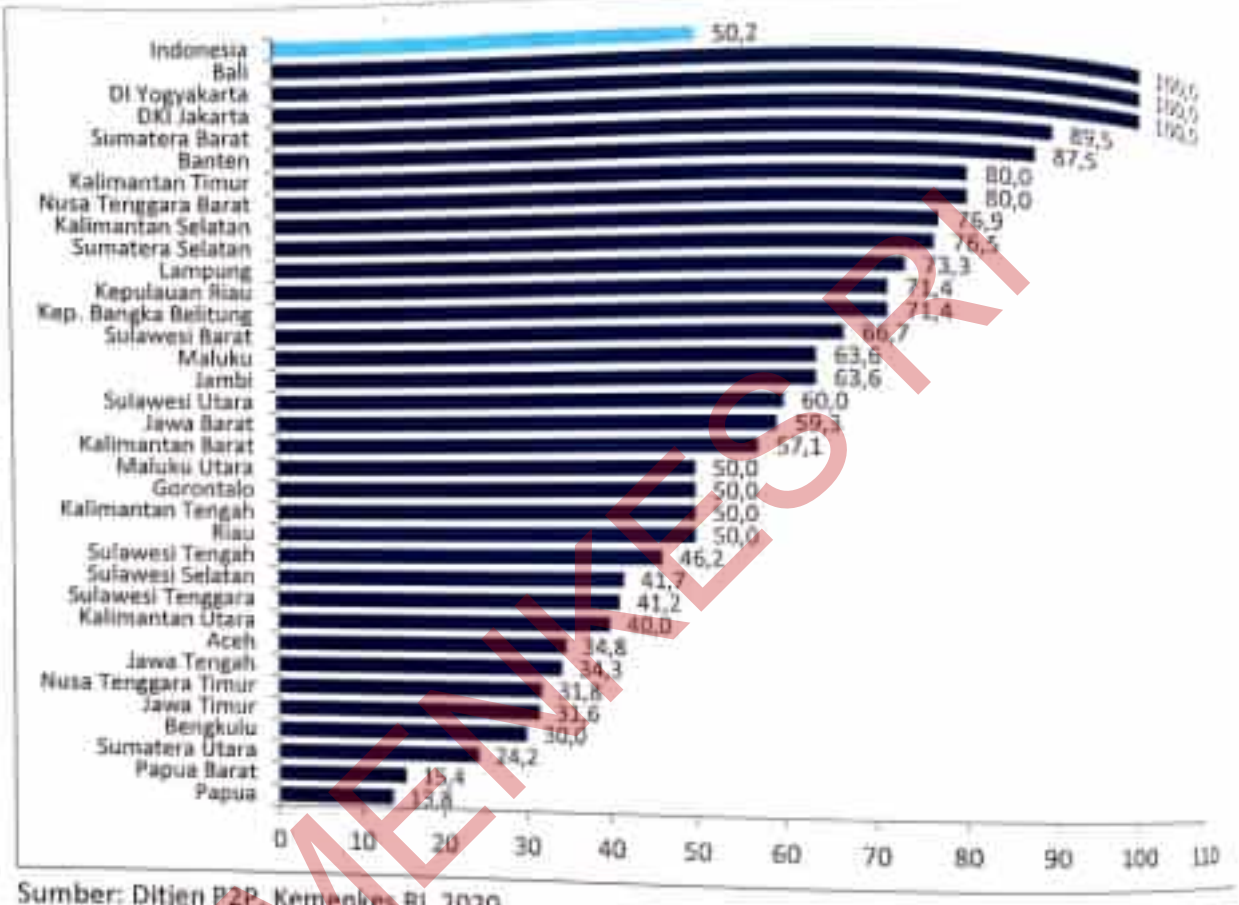

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 50,2% kabupaten kota yang melaksanakan KTR pada sedikitnya 50% sekolah di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 3 provinsi dengan persentase kabupaten kota menerapkan KTR di 50% sekolah sebesar 100%, yaitu Bali, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua sebesar 13,8%, Papua Barat sebeasr 15,4%, dan Sumatera Utara sebesar 24,2%.

4. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap prevalensi kanker pada perempuan di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan terlambatnya deteksi dini. Penyintas kanker payudara dan leher rahim pada umumya terdeteksi pada stadium lanjut. Kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum kanker (lesi prakanker) dengan metoda IVA dan papsmear. Deteksi dini dapat menekan angka kematian dan pembiayaan kesehatan.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.67
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM MELALUI METODE INSPEKSI VISUAL ASAM (IVA) DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

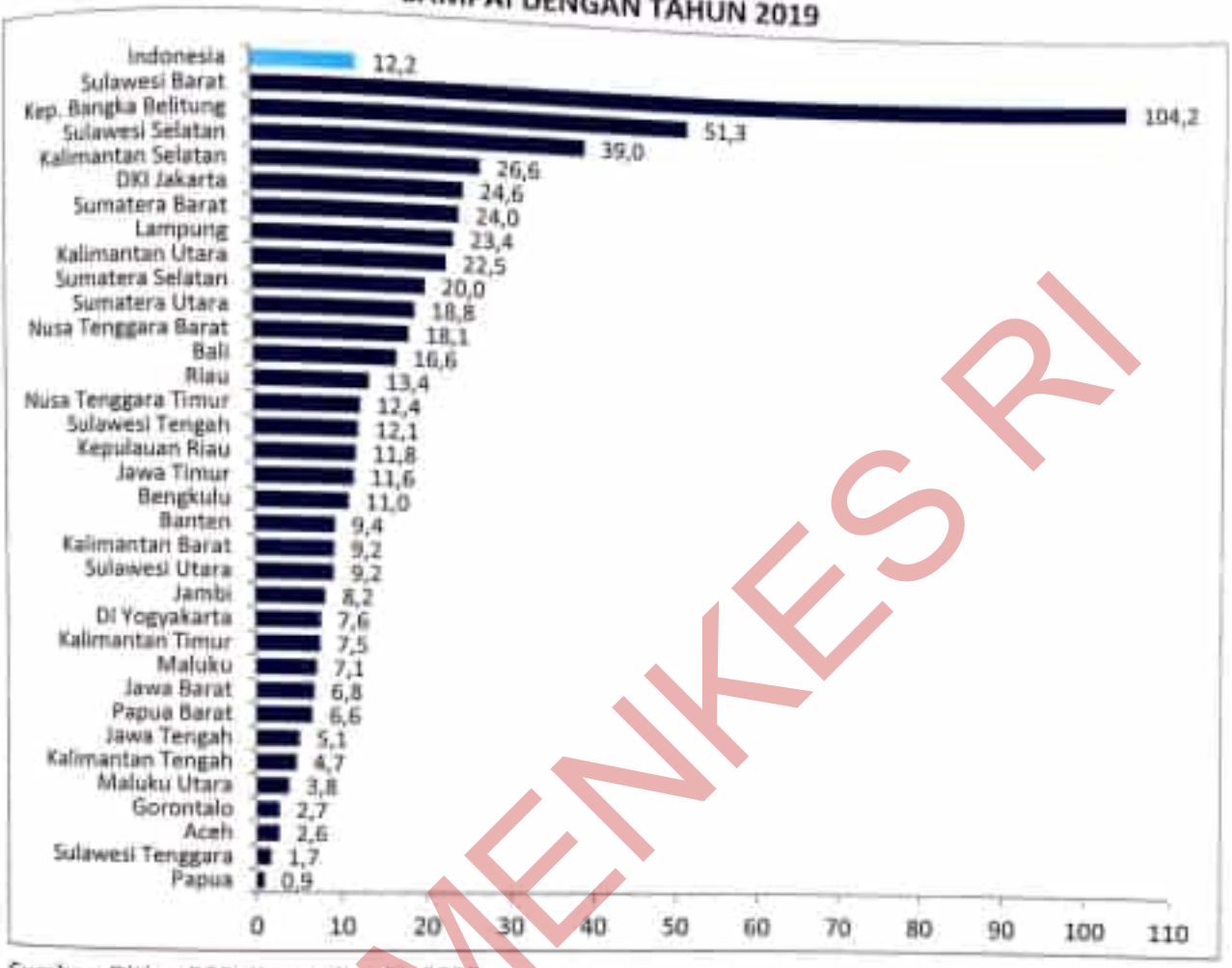

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Secara nasional, sebanyak 12,2% perempuan usia 30-50 tahun telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim melalui metode IVA. Provinsi dengan cakupan deteksi dini tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 104,2%, diikuti oleh Kep. Bangka Belitung sebesar 51,3%, dan Sulawesi Selatan sebanyak 39%. Sedangkan provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah adalah Papua sebesar 0,9%, Sulawesi Tenggara sebesar 1,7%, dan Aceh sebesar 2,6%.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.68

HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 DI INDONESIA TAHUN 2019

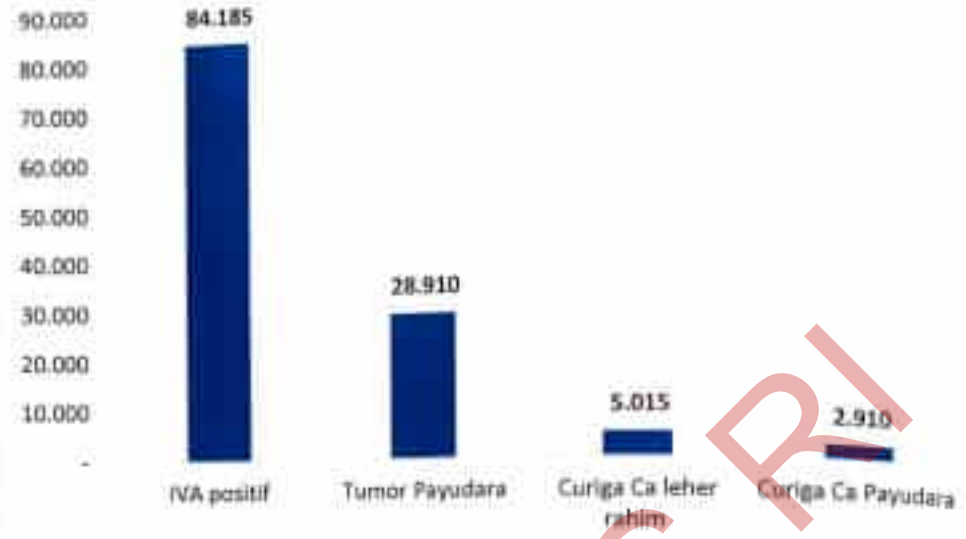

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Gambar menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 telah ditemukan 84.1859 IVA positif, 28.910 tumor payudara, 5.015 curiga kanker leher rahim, dan 2.910 curiga kanker payudara. Informasi lebih rinci mengenai pengendalian penyakit tidak menular, dapat dilihat pada Lampiran 69-Lampiran 70.

5. Pelayanan Skrining Usia Produktif

Pelayanan skring usia produktif merupakan Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa perilaku berisiko. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 6.69 menunjukkan persentase penduduk usia produktif yang telah diberikan pelayanan skrining usia produktif. Secara nasional data menunjukkan bahwa sebanyak 38.835.538 orang telah dilakukan skrining di Indonesia. Target pelayanan skrining usia produktif di setiap kabupaten/kota adalah 100%. Dari gambar terlihat bahwa provinsi dengan capaian skrining tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (65,8%) dan yang kedua adalah Provinsi Jawa Timur (60,8%). Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah berada di Provinsi Papua (0,0) dan Provinsi Sumatera Utara (0,2%).

KEMENKES RI

GAMBAR 6.69
PERSENTASE PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF
DI INDONESIA TAHUN 2019

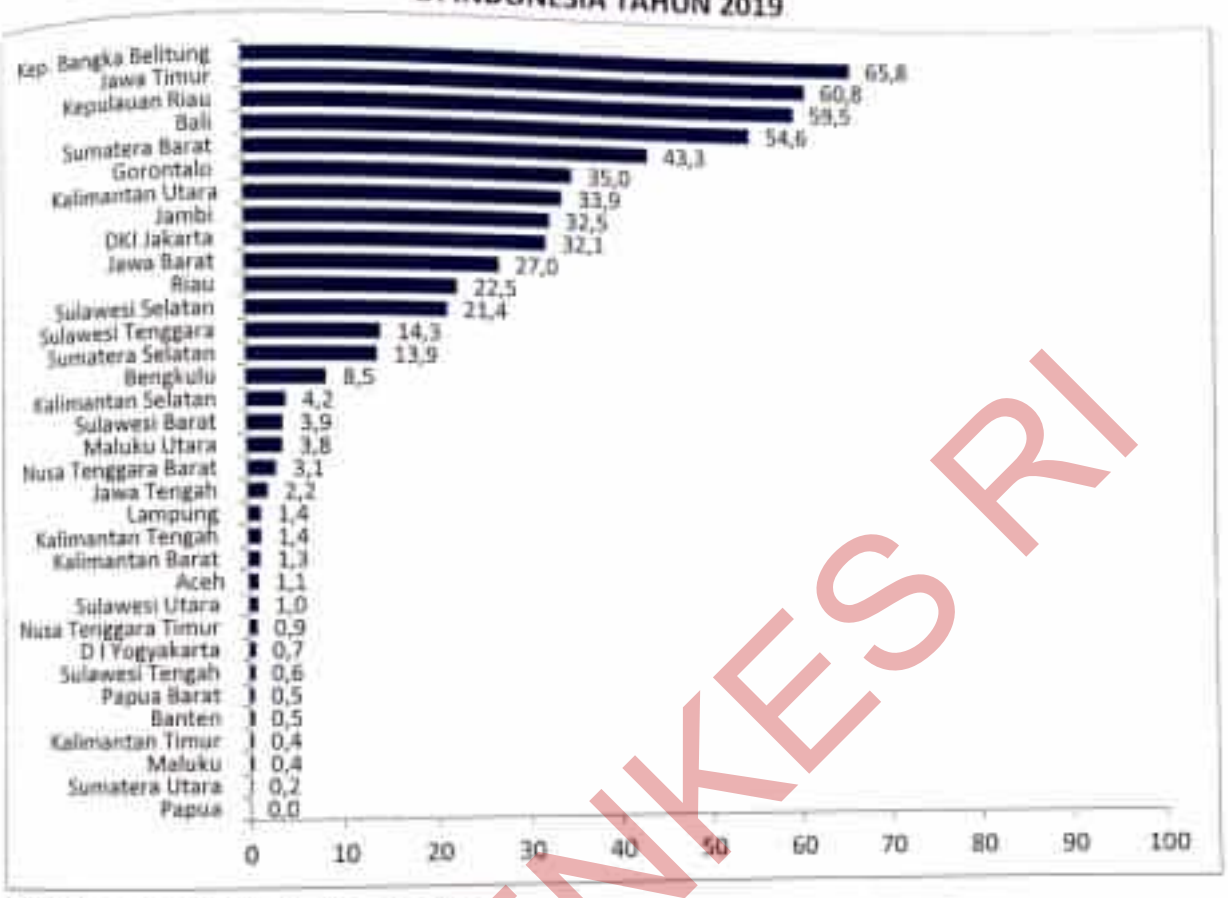

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

6. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi.

Gambar di bawah ini persentase penderita Diabetes Melitus yang telah diberikan pelayanan sesuai dengan standar. Secara nasional data menunjukkan bahwa sebanyak 2.687.994 orang telah diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Target capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus ditetapkan berdasarkan prevalensi Diabetes Mellitus yang telah ditetapkan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan / BPS.

Perhitungan capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yaitu Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikalikan dengan 100%.

KEMENKES RI

Provinsi dengan capaian tertinggi untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus adalah dengan capaian 100% yaitu Provinsi Sumatera barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Banten. Provinsi dengan capaian lebih dari 100% dilakukan oleh Provinsi Lampung (129%). Hal ini dapat disebabkan oleh karena saat penetapan target jumlah penderita diabetes mellitus masih sedikit namun setelah dilakukan skrining didapatkan jumlah penderita Diabetes Mellitus yang lebih dari target sehingga jumlah orang yang dilayani juga lebih dari 100%. Provinsi dengan capaian pelayan penderita Diabetes Mellitus sesuai dengan standar yang masih sangat rendah dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah (0%).

GAMBAR 6.70

PERSENTASE PENDERITA DIABETES MELLITUS MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

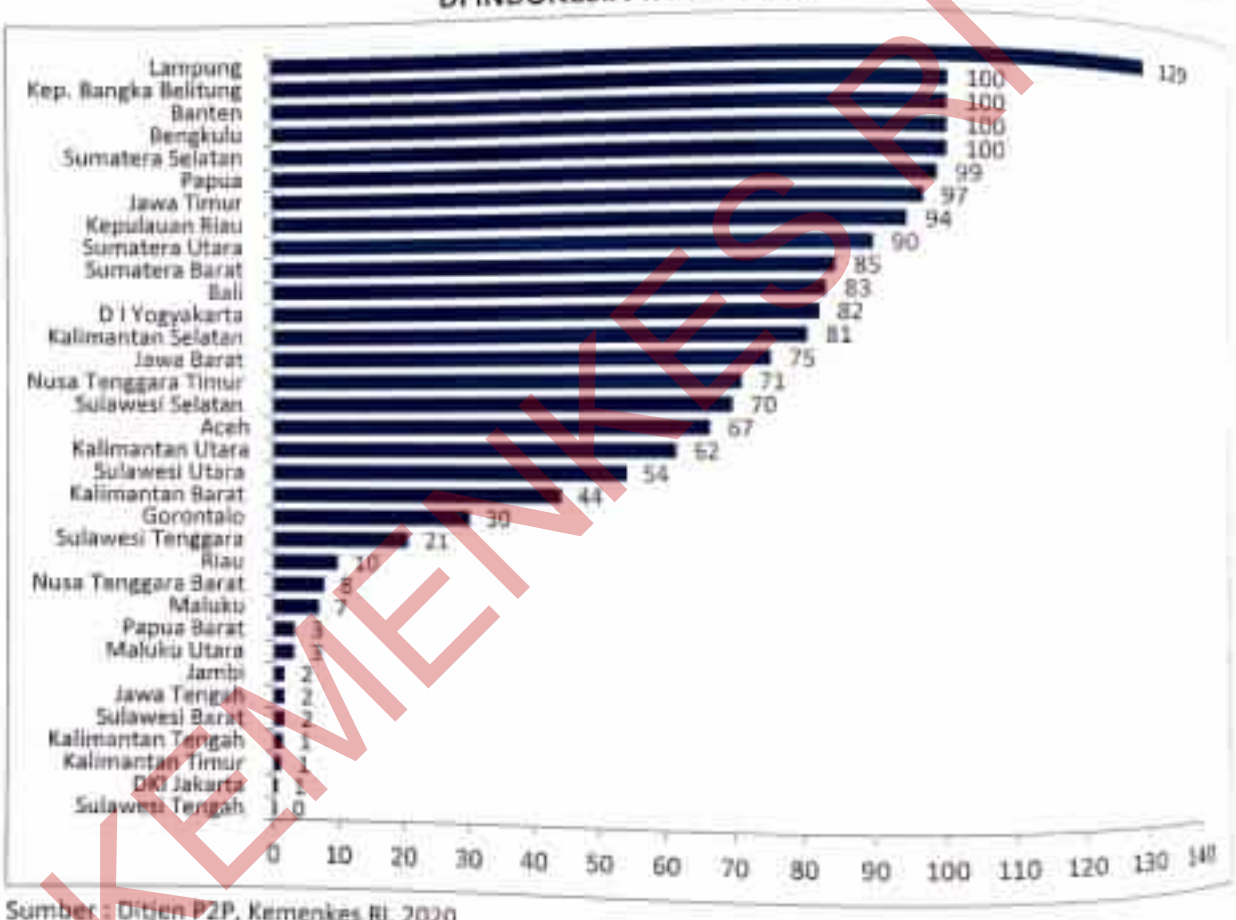

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

F. KESEHATAN JIWA DAN NAPZA

1. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan NAPZA Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Dasar hukum wajib lapor dan IPWL adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Permenkes Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, penyalahguna dan Korban penyalahgunaan Narkotika, Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Juknis Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis yang telah di revisi menjadi Permenkes Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

Tujuan dibentuknya IPWL adalah :

a. Untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,
b. Untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, dan
c. Untuk memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika.

Institusi penerima wajib lapor (IPWL) merupakan fasilitas kesehatan yang terdiri dari puskesmas, rumah sakit umum, BNN, POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN yang memberikan pelayanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dengan cara melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan / atau orang tua atau wali dari pencandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabiltasi medis.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 754 IPWL yang tersebat di 34 provinsi dan tersebar di beberapa fasilitas Kesehatan, berdasarkan Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes.701 tahun 2018.

GAMBAR 6.71
JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI INDONESIA
TAHUN 2019

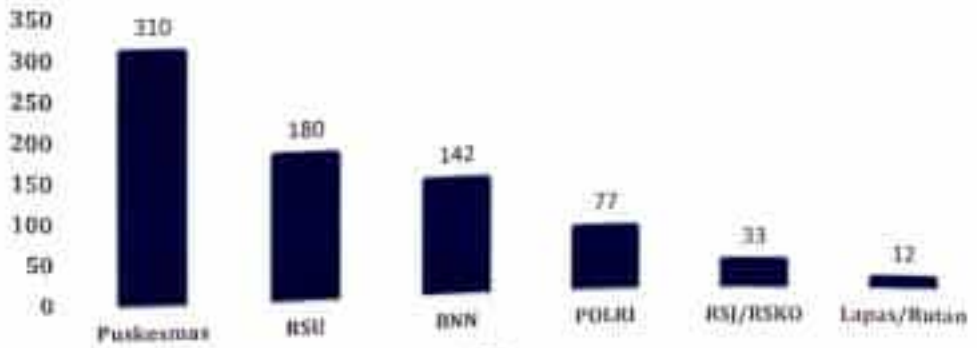

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

IPWL paling banyak adalah puskesmas, rumah sakit umum, dan unit yang kelola oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

GAMBAR 6.72
JUMLAH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

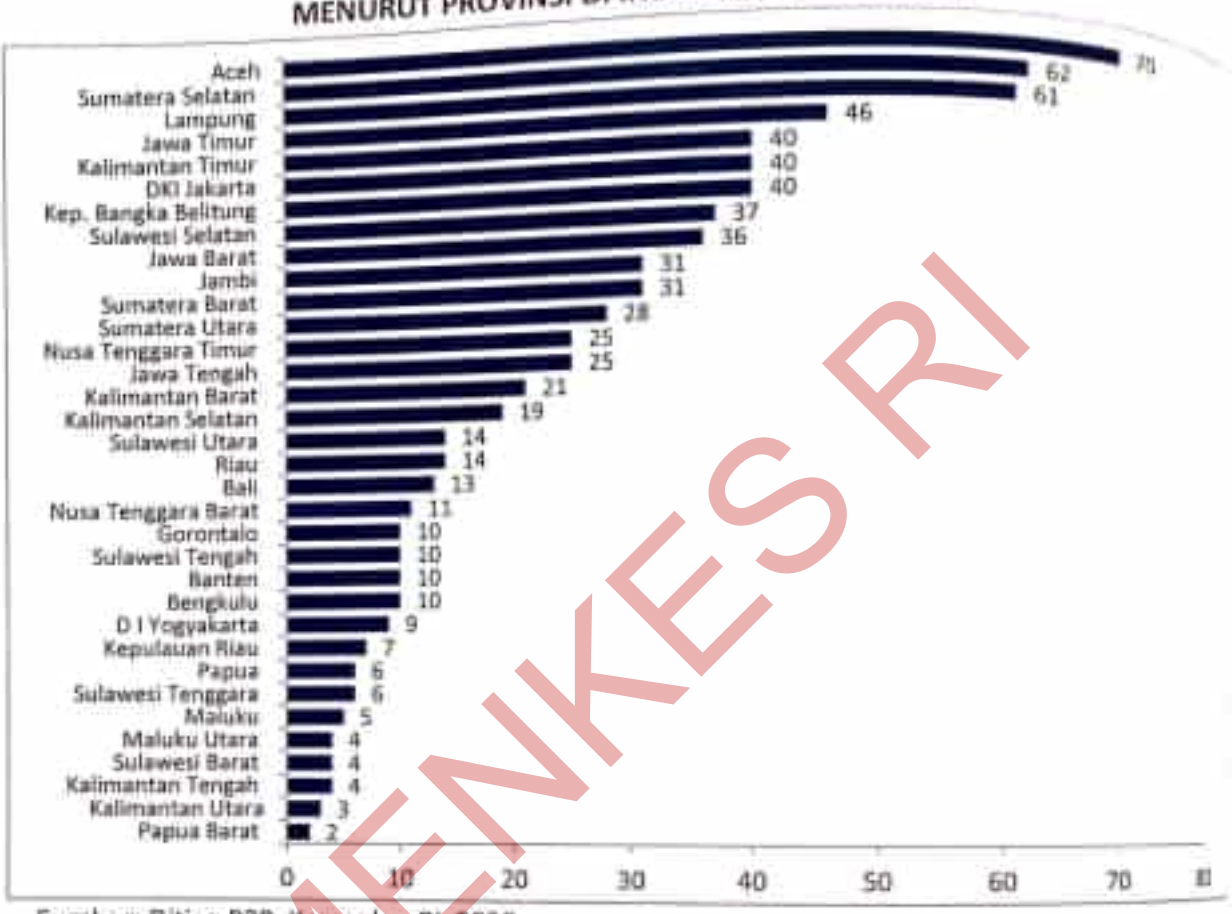

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Dalam hal jumlah fasilitas, Provinsi Aceh memiliki jumlah IPWL terbanyak yaitu sebesar 70, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 62, dan Lampung sebesar 61. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki jumlah IPWL terendah sebanyak 2 institusi.

Dari 754 IPWL yang telah di tetapkan, hanya 43,76.% atau 330 IPWL yang aktif melakukan pelayanan, hal ini disebabkan banyaknya pasien penyalahguna Napza yang mengakses pelayanan di IPWL, tersedianya SDM terlatih bidang Napza, dukungan yang cukup dari pemerintah daerah, serta keaktifan IPWL dalam pengajuan klaim IPWL.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.73
PERSENTASE IPWL AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

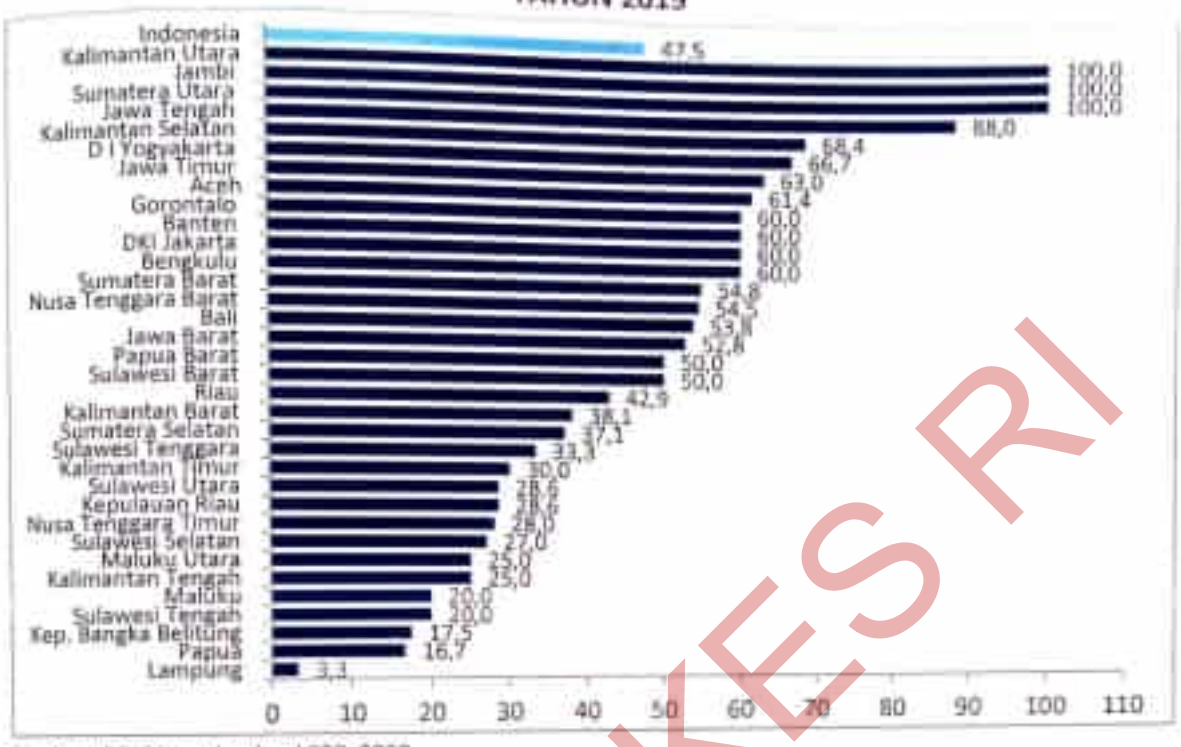

Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 provinsi dengan persentase IPWL aktif sebanyak 100% yang artinya seluruh IPWL yang ada merupakan IPWL aktif. Provinsi dengan IPWL aktif terendah antara lain Lampung sebesar 3,3%, Papua sebesar 16,7%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 17,5%.

Untuk jumlah pasien yang melakukan rehabilitasi medis, setiap tahunnya mengalami kenaikan atau peningkatan, hal ini di sebabkan oleh meningkatnya jumlah penyalahguna yang sadar akan kesehatannya, baik secara sukarela, anjuran orang tua maupun akibat putusan pengadilan untuk melakukan rehabilitasi medis yang meliputi rawat jalan, rawat inap, terapi rumatan dan terapi bufernorfin.

GAMBAR 6.74
JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA TAHUN 2011-2019

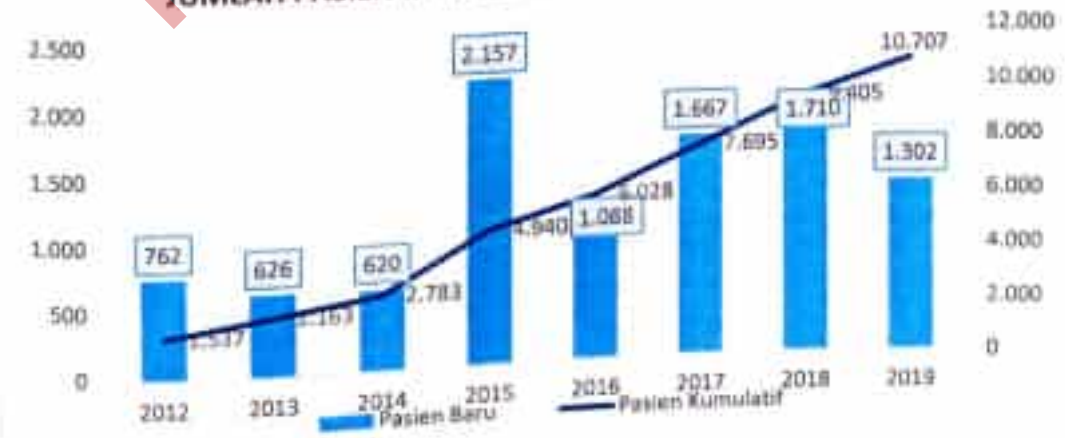

Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

KEMENKES RI

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah pasien kumulatif pada IPWL tertinggi dengan tahun 2019 sebesar 10.707 pasien dengan jumlah pasien baru terbanyak terjadi pada tahun 2015 sebesar 2.157 pasien.

Berdasarkan jenis layanan, sebagian besar pasien mengakses layanan rawat jalan dengan jumlah kumulatif sampai dengan tahun 2019 sebesar 5.672 pasien.

GAMBAR 6.75
JUMLAH PASIEN IPWL DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS LAYANAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

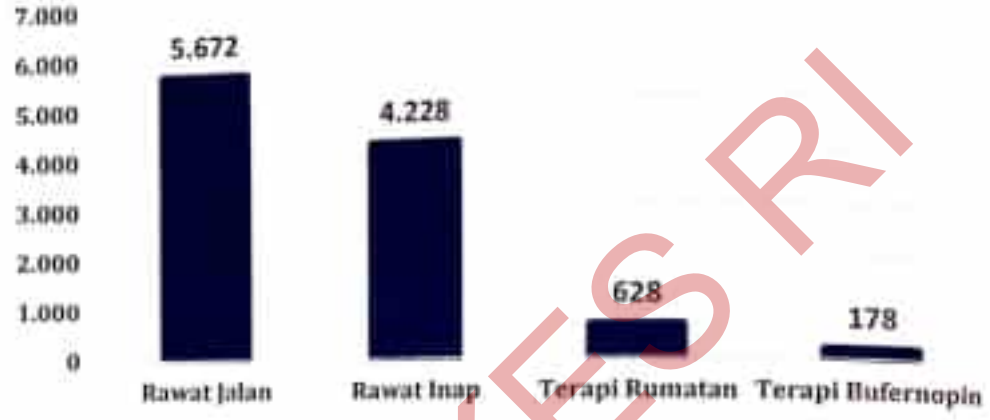

Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, pasien laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 8.138 pasien terhadap 2.573 pasien

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target PIS-PK dan SPM, sehingga diharapkan tenaga kesehatan di puskesmas dapat melakukan deteksi dini terkait masalah kejiwaan, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, adalah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 puskesmas di wilayahnya dengan kriteria:

1. Memiliki minimal 2 (dua) tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa (dokter dan perawat).
2. Melaksanakan upaya promotif kesehatan jiwa dan preventif terkait kesehatan jiwa yang teritegrasi dengan program kesehatan puskesmas lainnya,
3. Melaksanakan deteksi dini, penegakkan diagnosis, penatalaksanaan awal dan pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa.

Dalam sistem informasi puskesmas ada beberapa penyakit terkait gangguan jiwa seperti demensia, gangguan anxietas, gangguan depresi, gangguan psikotik, gangguan penggunaan napza, gangguan perkembangan dan perilaku pada anak dan remaja, insomnia. Selain itu dalam PIS-PK dan SPM terdapat indikator "Gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan", dan "pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat".

KEMENKES RI

Data WHO pada tahun 2016, secara global, terdapat sekitar 35 juta orang yang mengalami depresi, 60 juta orang dengan gangguan bipolar, 21 juta orang dengan Skizofrenia, dan 47,5 juta orang dengan demensia.

Dalam Pendekatan Indikator Sehat keluarga Sehat (PIS-PK) terdapat indikator Gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan. Berdasarkan data aplikasi keluarga sehat per Februari 2020 persentase keluarga yang memiliki penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan sebesar 36,75%. Angka tersebut diperoleh melalui kunjugan rumah yang berhasil mendata lengkap sebanyak 44.436.918 keluarga atau 51,9% terhadap total keluarga.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 7,1 ‰ rumah tangga yang memiliki penderita gangguan jiwa. Angka ini mengindikasikan terdapat 7 rumah tangga dengan penderita ODGJ di tiap 1.000 rumah tangga, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat. Dampak dari gangguan jiwa akan menimbulkan disabilitas dan bisa menurunkan produktivitas masyarakat dan beban biaya cukup besar. Secara nasional terdapat 5.218 ODGJ berat yang di pasung pada tahun 2019.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat 407 kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang tersebar di 34 provinsi, yang dapat di lihat pada grafik di bawah ini . Jumlah tersebut merupakan jumlah komulatif

GAMBAR 6.76
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
MEMILIKI PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAN JIWA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

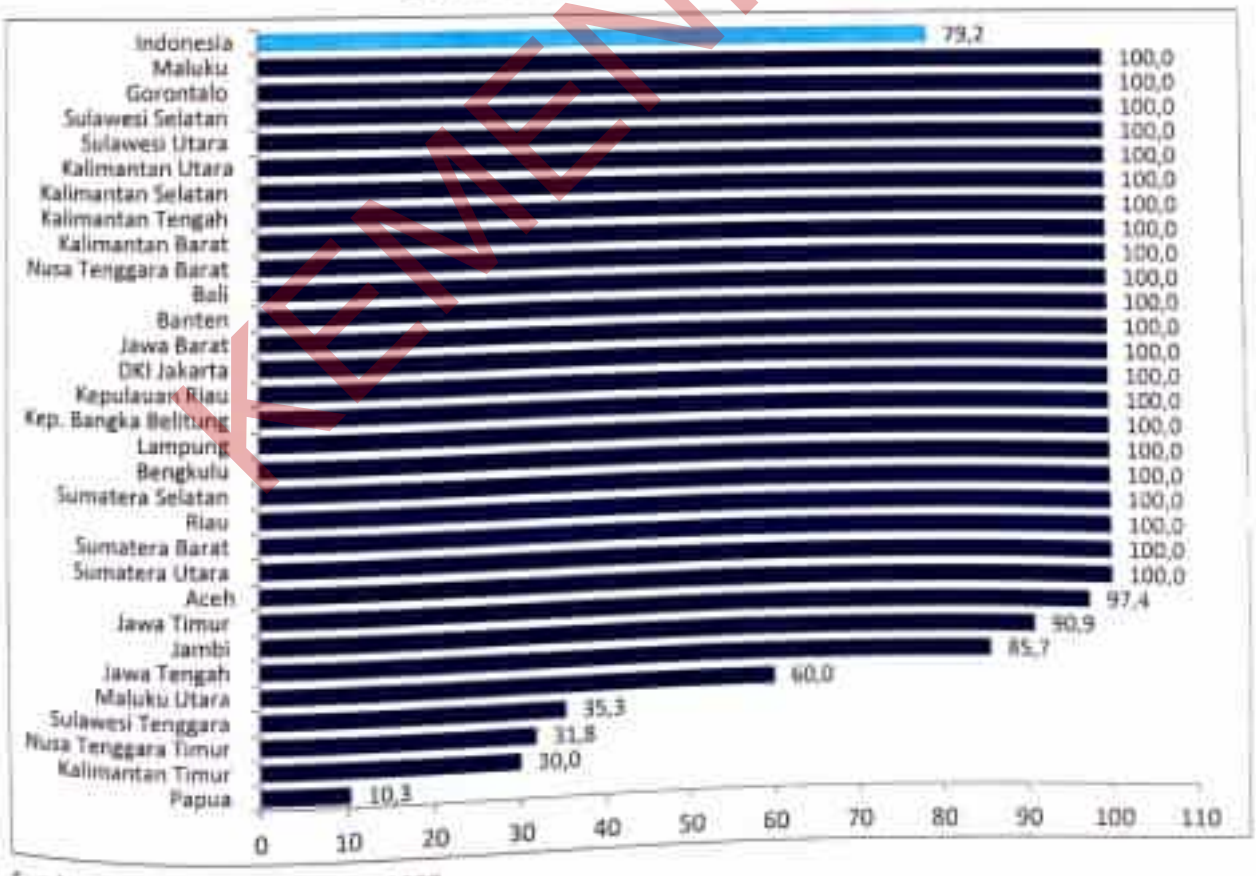

Sumber : Direktorat Jenderal P2P, 2020

KEMENKES RI

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi memiliki persentase 100%, yang artinya seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Hanya delapan provinsi dengan persentase kurang dari 100%. Terdapat empat provinsi yang belum melaporkan data, yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

3. Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang Sederajat

Dunia remaja rentan mengalami depresi. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa dimana seseorang akan mengalami banyak perubahan secara biologis, psikologis, maupun sosial. Masa ini terdiri dari dua fase, yakni masa remaja awal berkisar 10 sampai 14 tahun, dan remaja akhir di usia 14 sampai 17 tahun, pematangan fisik terjadi lebih cepat dibandingkan pematangan kejiwaan (psikososial). Kondisi inilah yang membuat remaja gampang mengalami depresi dan sedih berlebih.

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan jiwa yang ditunjukkan dengan gejala depresi pada usia 15 tahun ke atas mencapai 6,1%. Prevalensi rumah tangga dengan ART Gangguan Jiwa Skizofrenia/Psikosis pada Riskesdas 2018 adalah 6,7% atau sekitar 282 ribu orang. Sementara itu, sekitar 10% penderita gangguan mental emosional ada pada rentang usia 15-24 tahun yang di dalamnya termasuk usia remaja.

Berdasarkan survei kesehatan sekolah terakhir yang dilakukan Kemenkes mengenai kesehatan jiwa remaja pada tahun 2006, didapati fakta kekerasan menjadi salah satu faktor remaja mengalami gangguan mental. Dari survei tersebut menunjukkan kekerasan fisik terjadi di lingkungan sekolah. Sebanyak 40% siswa usia 13-15 tahun pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sebaya. Kaum lelaki menjadi korban kekerasan fisik tertinggi dengan jumlah 84%. Sedangkan perempuan yang mengalami kekerasan fisik mencapai 75%. Faktor lainnya adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru dan petugas sekolah. Sebanyak 45% siswa laki-laki dan 22% siswa perempuan pernah mendapatkan kekerasan dari guru dan petugas sekolah.

Sebenarnya, kekerasan bukan satu-satunya faktor yang membuat remaja rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Masih ada faktor lain yang menjadi pemicu, seperti penggunaan napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) pada remaja yang rentan mengganggu mentalnya. Hal tersebut tergambar dari 24% pelajar melakukan penyalahgunaan napza. Faktor kesendirian atau yang dikenal dengan bahasa remajanya 'jomblo' juga menjadi salah satu penyumbang remaja rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Di mana faktor kesepian pada laki-laki sebanyak 19,9% sedangkan untuk perempuan sebesar 11,4%.

Di antara faktor tersebut terdapat fakta yang mencengangkan di mana sebesar 50% remaja dengan usia 13-15 tahun mengalami gangguan kesehatan jiwa karena disebabkan perundungan atau *bullying* di sekolah yang dilakukan teman-teman sebaya. Karena masih kuatnya stigma di remaja sendiri, gangguan kejiwaan justru sering menjadi bahan olok-olok atau *bullying*.

KEMENKES RI

Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat adalah 30% dari jumlah sekolah yang ada di provinsi menyelenggarajan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza dengan kriteria adanya guru BP yang telah dilatih bidang kesehatan jiwa, adanya media KIE terkait kesehatan jiwa dan napza, dan melakukan konseling dan deteksi dini terhadap siswa yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan NAPZA. Sampai dengan tahun 2019, seluruh provinsi di Indonesia berhasil memenuhi target 30% tersebut dengan jumlah 10.317 sekolah.

G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada Jemaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan saja dari aspek umum dan ibadah, tetapi juga dari aspek kesehatan jamaah haji itu sendiri.

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan jutaan manusia yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan melakukan berbagai ritual ibadah fisik dan spiritual. Pada proses ini terjadi kerentanan terhadap kejadian morbiditas maupun mortalitas. Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 205.908 jamaah.

Dalam rangka menjamin kesiapan Jemaah sebelum keberangkatan, diperlukan adanya kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual. Sejak tahun tahun 2018, penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mulai menerapkan konsep *Istithoah* yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithoah* Kesehatan Jamaah Haji. Permenkes ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan *istithoah* kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten.

Kuota jamaah haji Indonesia Tahun 2019 M/1440 H terjadi peningkatan dari 221.000 pada tahun 2018 menjadi 231.000 orang pada tahun 2019. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, jumlah Jemaah memenuhi syarat Istithaah berjumlah 127.528, Memenuhi syarat *Istithoah* dengan pendampingan berjumlah 99.541, Tidak memenuhi syarat sementara 552, Tidak memenuhi syarat Istithaah 447

Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan yang terdiri dari Tim Asistensi, Tim Manajerial, Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP), Tim Gerak Cepat (TGC), serta Tim Pendukung Kesehatan (TPK).

Penyelenggaraan kesehatan haji oleh PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan paradigma penguatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan (kuratif) serta pola pendekatan deteksi dini kasus kesehatan dan pelayanan *emergency* respon. Penyelenggaraan

KEMENKES RI

kesehatan haji dengan konsep tersebut merupakan tindak lanjut dari konsep operasional kesehatan haji tahun 2016, 2017 dan 2018.

1. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji telah dimulai pada awal tahun 2019. Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah cakupan hasil pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji yang diinput kedalam Siskohatkes 1 bulan sebelum operasional haji.

Pada tahun 2019 Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap 214.756 orang Jemaah dengan capaian pemeriksaan 100,35%. Cakupan ini telah berhasil memenuhi target pemeriksaan tahun 2019 sebesar 85%. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Jawa Timur sebesar 103,04% dan terendah adalah Kalimantan Utara sebesar 73,07%. Capaian hasil pemeriksaan berdasarkan jemaah haji berdasarkan tempat pemeriksaan adalah sebagai berikut.

GAMBAR 6.77
CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2019

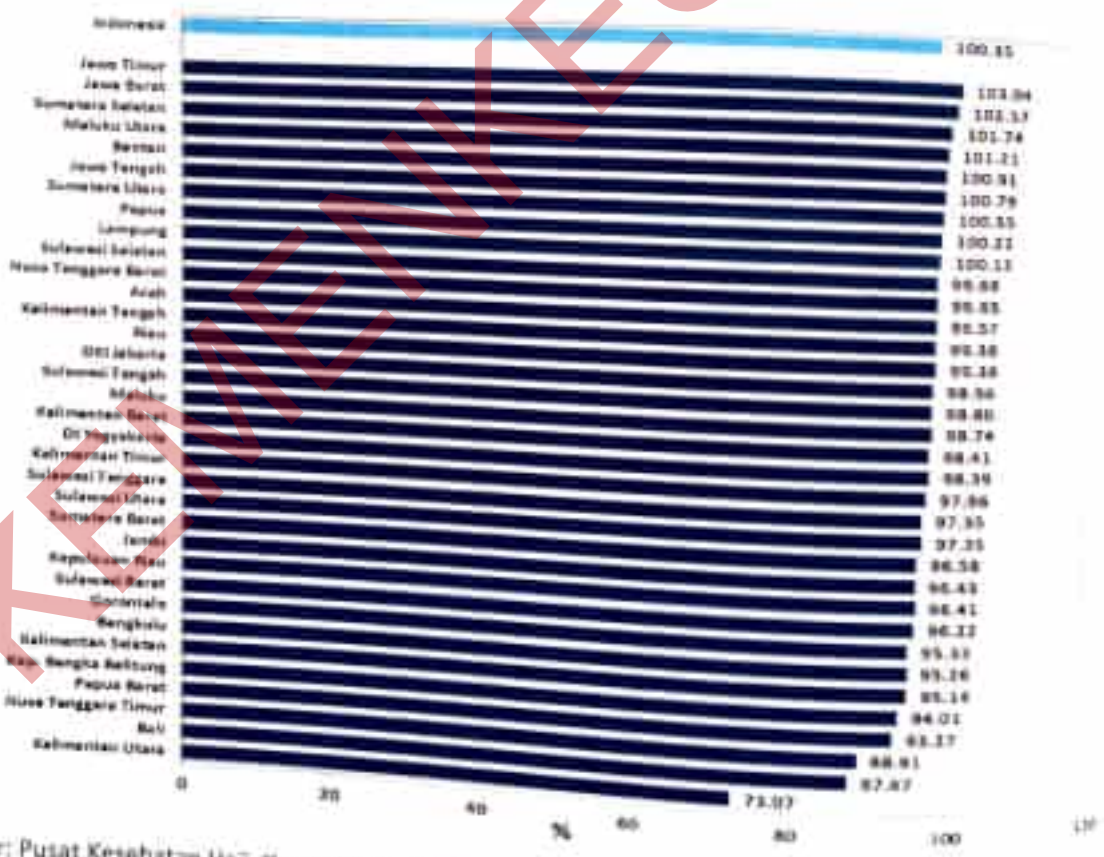

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Pemeriksaan terhadap calon Jamaah haji tahun 2019 dilakukan sejak enam sampai satu bulan sebelum keberangkatan. Dalam proses penghitungan cakupan pemeriksaan beberapa provinsi memiliki capaian di atas 100%. Hal ini disebabkan karena numerator yang digunakan adalah seluruh calon jamaah yang menjalani pemeriksaan, sedangkan denominatornya adalah kuota yang ditetapkan Kementerian Agama, sehingga jumlahnya lebih rendah dibandingkan calon jamaah haji

KEMENKES RI

yang diperiksa. Data dan informasi lebih rinci mengenai pemeriksaan Jemaah haji terdapat pada Lampiran 64.f.

2. Kondisi Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Jamaah haji Indonesia pada tahun 2019 (selama operasional haji di Arab Saudi) sebanyak 215.377 jamaah yang terdiri dari laki-laki sebanyak 96.130 jamaah (44,64%), dan perempuan sebanyak 119.236 jemaah (55,36%).

GAMBAR 6.78
JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (SELAMA OPERASIONAL HAJI DI ARAB SAUDI) TAHUN 2019

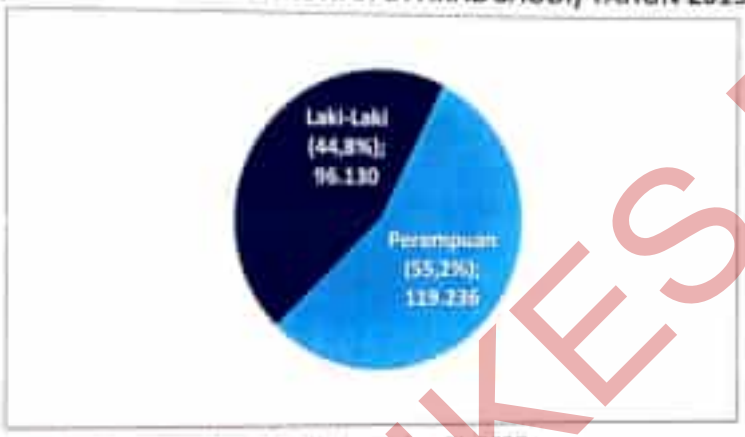

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Sedangkan menurut kelompok umur, sebagian besar jamaah berada pada kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 74.017 jemaah (34,37%).

GAMBAR 6.79
JAMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019

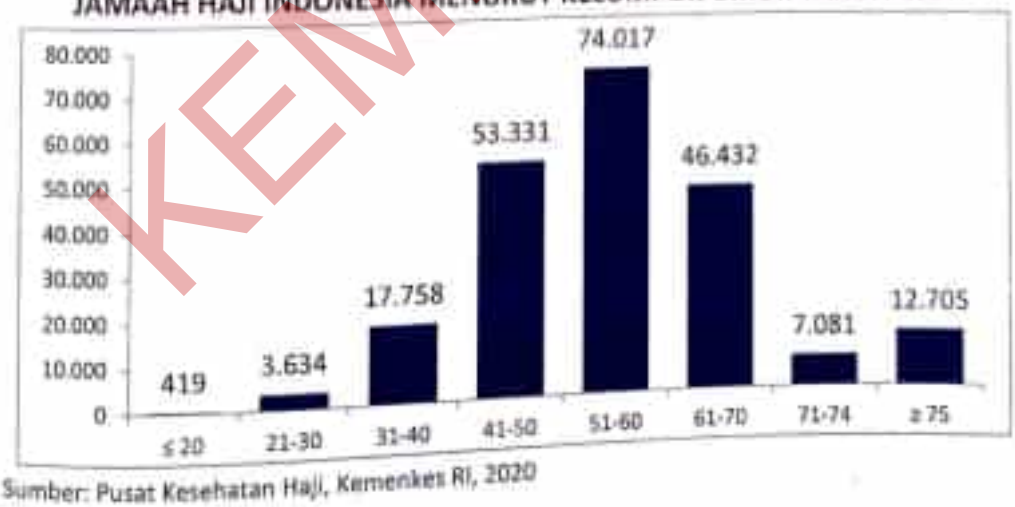

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Gambaran jemaah haji menurut karakateristik umur menunjukkan bahwa persentase terbanyak jamaah di usia 51-60 tahun (34,37%), 41-50 tahun (24,76%), dan 61-70 tahun (21,56%). Kelompok populasi pra-usila dan usila merupakan kelompok rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaran ibadah haji.

KEMENKES RI

3. Pola Morbiditas dan Mortalitas Jamaah Haji

Isthithooh Kesehatan Jamaah Haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. Pemerintah bertanggungjawab terhadap pembinaan *isthithooh* kesehatan haji yang merupakan kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur, diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Melalui implementasi *istithooh*, faktor risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, Jamaah haji tergolong risiko tinggi (risti) jika memenuhi tiga kriteria, yaitu berusia > 60 tahun dengan penyakit, berusia < 60 tahun dengan penyakit, dan berusia > 60 tahun tanpa penyakit.

GAMBAR 6.80
PERSENTASE JAMAAH HAJI MENURUT STATUS RISTI

Sumber : Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Secara umum Jamaah haji dengan kategori risti lebih banyak dibandingkan dengan jamaah tidak risti.

GAMBAR 6.81
PERSENTASE JAMAAH HAJI RISTI MENURUT EMBARKASI TAHUN 2019

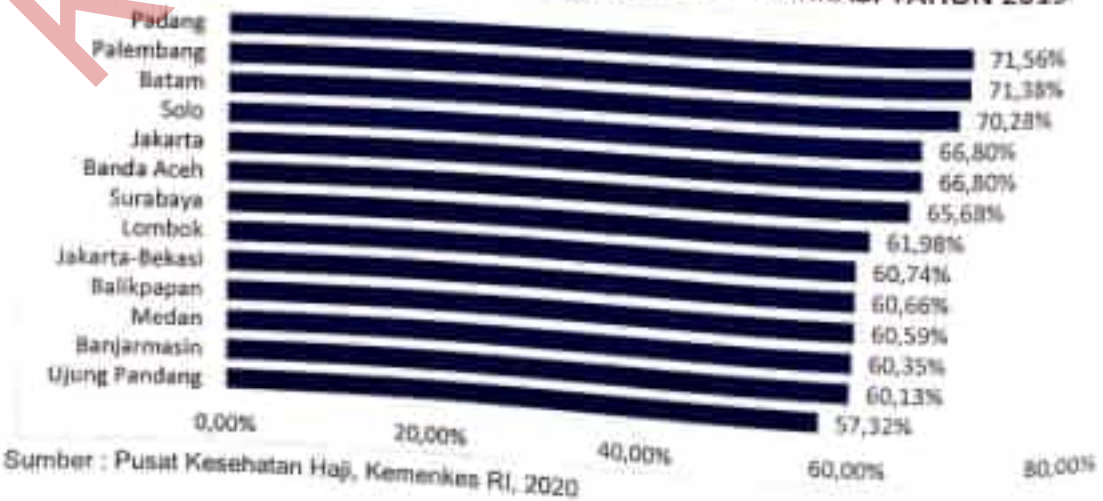

Sumber : Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Keberadaan Jamaah risti menjadi hal yang harus diperhatikan tidak hanya oleh petugas kesehatan yang mendampingi di tiap kloter, namun juga oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota yang menjadi asal daerah jamaah tersebut. Berdasarkan pembagian embarkasi, proporsi Jemaah risti terbanyak berasal dari embarkasi Padang (PDG sebesar 71,56%), disusul oleh Embarkasi Palembang (PLM) sebesar 71,38% dan Embarkasi Batam (BTH) sebesar 70,28%.

Faktor risiko yang telah dimiliki oleh Jemaah sejak keberangkatan dan kondisi cuaca di tanah suci berkontribusi terhadap tingkat kesakitan Jemaah selama proses penyelenggaran ibadah haji.

Jamaah haji yang mendapatkan rawat jalan kloter sejumlah 475.464 kunjungan. Kunjungan penyakit terbanyak adalah *acute nasopharyngitis (common cold)* sebesar 17,49%, diikuti oleh *essential (primary) hypertension* sebesar 12,26%, dan 7,4%. Data penyakit terbanyak rawat jalan dapat dilihat pada lampiran 64.g.

GAMBAR 6.82
PROPORSI 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN JAMAAH HAJI TAHUN 2019

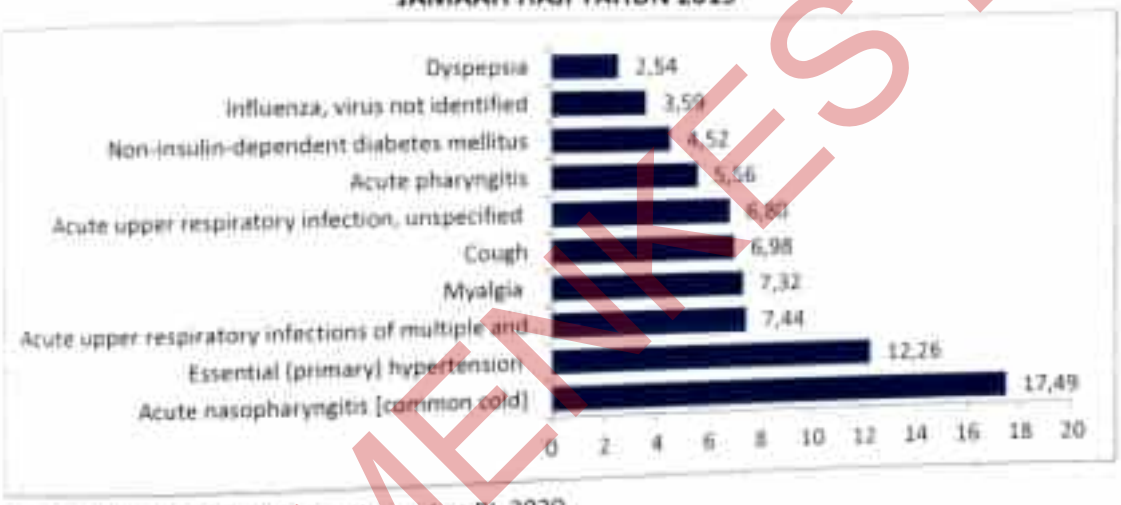

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2020

Selain berupaya untuk menekan angka kesakitan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk menurunkan angka kematian jamaah haji. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019, terdapat 493 jamaah haji yang wafat atau 0,23% terhadap total jemaah.

KEMENKES RI

GAMBAR 6.83

PROPORSI JEMAAH HAJI WAFAT TAHUN 2014-2019

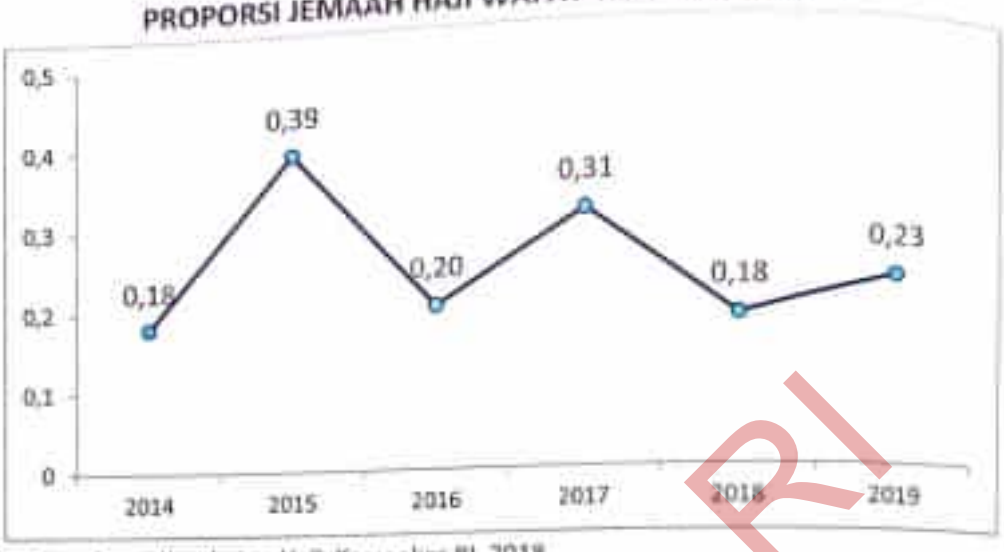

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2018

Proporsi jemaah haji wafat terhadap total jemaah dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tiap dua tahun sekali, yaitu pada tahun 2015 dan 2017. Sedangkan pada tahun 2014, 2016 dan 2018, proporsi jemaah wafat berada pada kisaran 0,18%-0,2%. Peningkatan tersebut terjadi karena insiden di Mina dan robohnya *crane* di Mekkah pada tahun 2015 dan peningkatan suhu ekstrem pada tahun 2017.

Data dan informasi lebih rinci terkait penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat pada lampiran 64.f-64.j.

***

KEMENKES RI

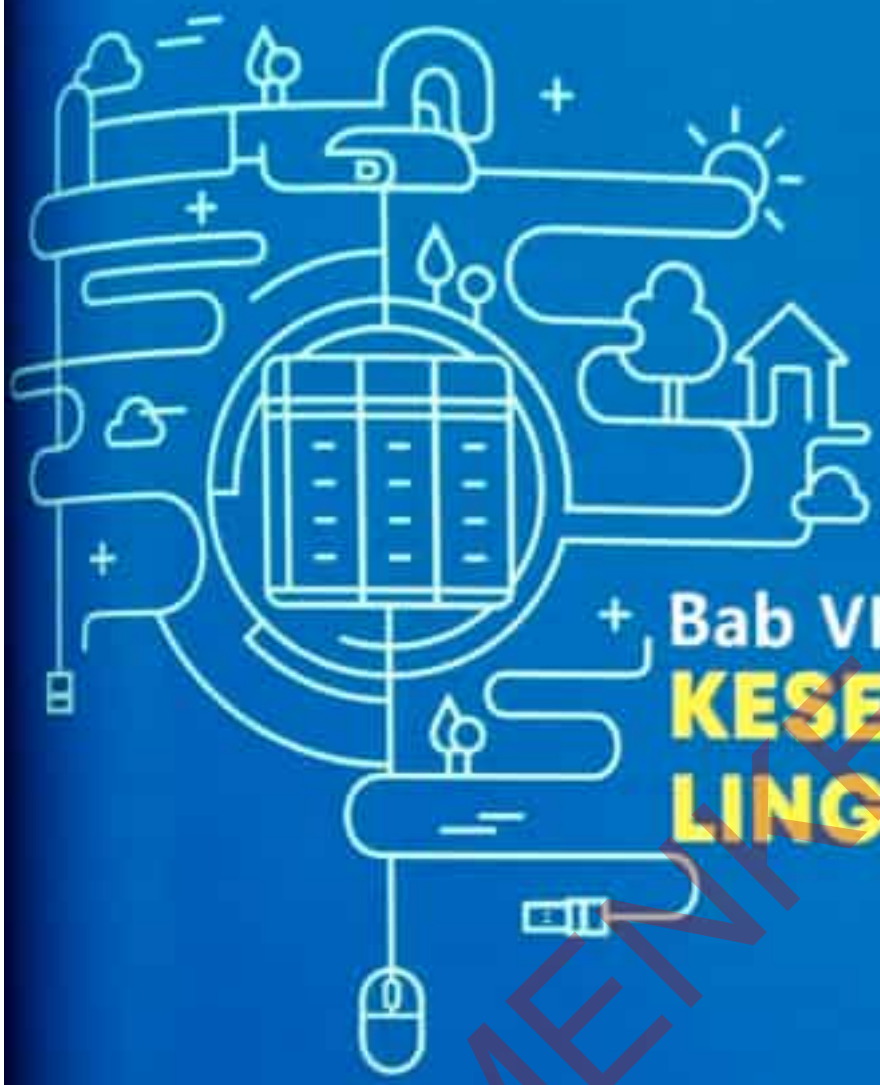

Bab VII
KESEHATAN LINGKUNGAN

KEMENKES RI

KEMENKES RI

VII KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi kesehatan.

Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Pekerjaan Umum- Perumahan Rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

A. AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

KEMENKES RI

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri *E.Coli* dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan secara internal dilakukan oleh penyedia air minum yaitu badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 pasal 4 ayat 4 meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum.

KEMENKES RI

GAMBAR 7.1

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019

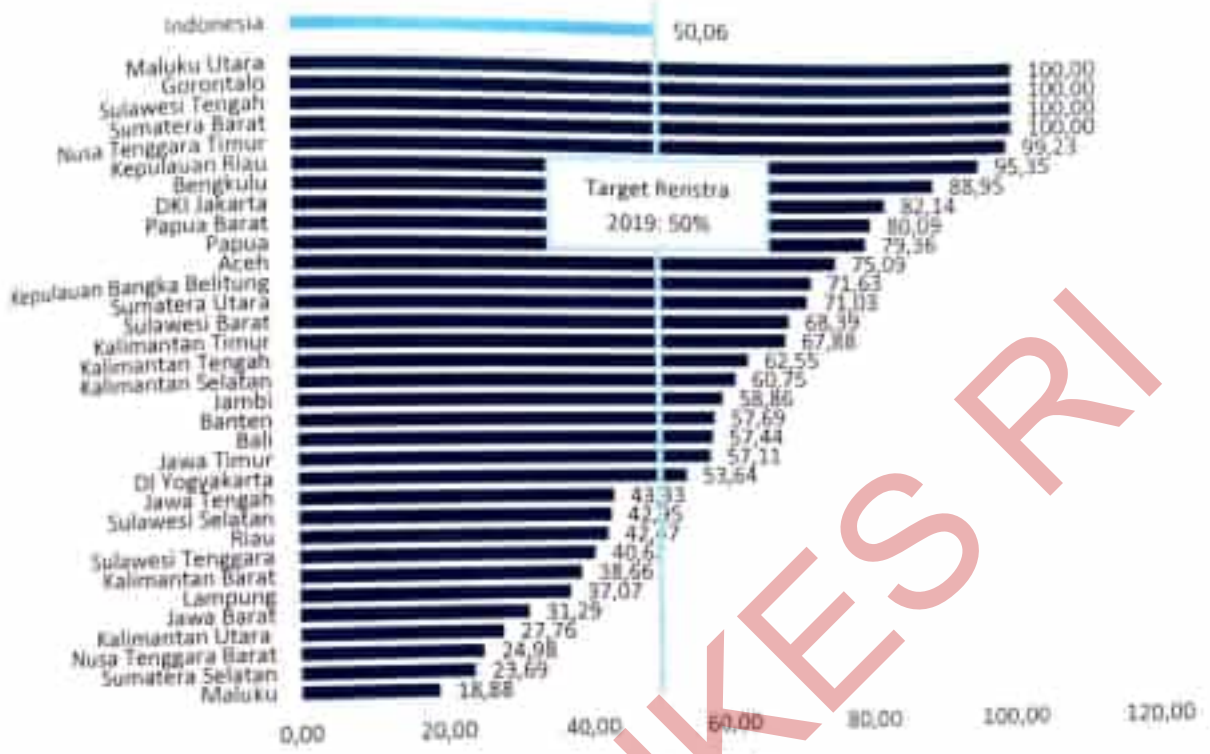

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019, sebanyak 55.546 sarana air minum dilakukan IKL. Dari jumlah tersebut, 50.787 sarana air minum beresiko rendah dan sedang. 6.221 sampel diambil untuk diperiksa dan hanya 3,97% yang memenuhi syarat kesehatan. Persentase sarana air minum yang dilakukan IKL di Indonesia sebesar 50,06% dan sudah memenuhi target Renstra pada tahun 2019 yaitu 50% (Gambar 7.1) . Ada empat provinsi yang memiliki persentase IKL sebesar 100% yaitu Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat. Provinsi dengan persentase IKL terendah adalah Maluku (18,88%), Sumatera Selatan (23,69%) dan Nusa Tenggara Barat (24,98%). Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 tidak melakukan pemeriksaan. Rincian lebih lengkap mengenai persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dapat dilihat di Lampiran 72.a.

Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak diantaranya adalah:

1. jenis sumber air utama yang digunakan untuk diminum;
2. jenis sumber air utama yang digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci;
3. jarak sumber air ke penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter.

Akses air minum yang layak dan bersih diperoleh dari sumber air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), hydrant umum, keran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor/pompa yang memiliki jarak minimal 10 meter dari sarana

KEMENKES RI

pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan tempat penampungan atau pembuangan sampah. Air kemasan, air yang diperoleh dari penjual keliling, serta air dari sumur atau mata air tak terlindung bukan termasuk dalam kriteria akses air minum layak dan bersih.

GAMBAR 7.2

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK TAHUN 2019

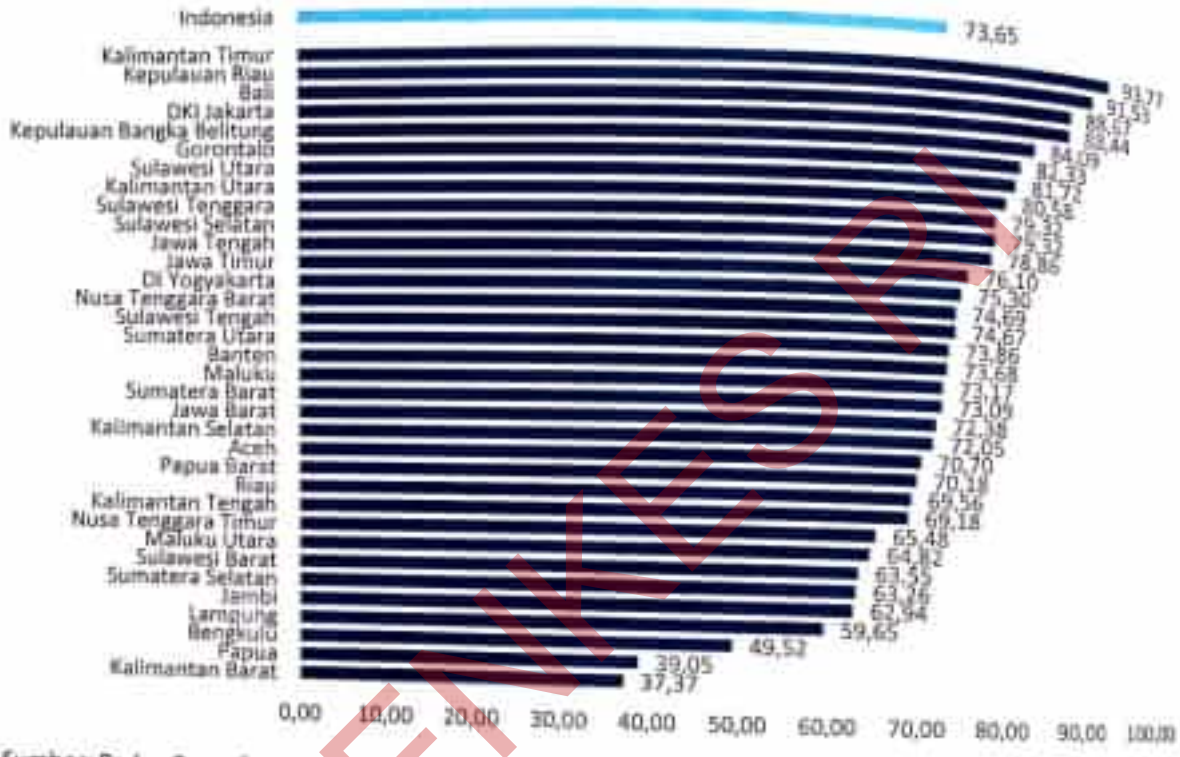

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Secara nasional persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 73,65% (Gambar 7.2). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu Kalimantan Timur (93,77%), Kepulauan Riau (91,53%) dan Bali (88,67%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga terendah adalah Kalimantan Barat (37,37%), Papua (39,05%), dan Bengkulu (49,52%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 72.b.

B. AKSES SANITASI LAYAK

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti *urine* dan *foeces*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higiene melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

KEMENKES RI

Menurut Panduan 5 Pilar STBM untuk Masyarakat, jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Bangunan jamban disebut sehat apabila memenuhi kriteria bangunan jamban sehat yang terdiri dari:

a. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)
   Bangunan atas jamban berfungsi untuk melindungi pengguna dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
b. Bangunan tengah jamban
   Lubang pembungan kotoran berbentuk leher angsa. Pada daerah sulit air, lubang dapat dibuat tanpa kontruksi leher angsa tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran pembuangan air bekas ke sistem pembuangan air limbah (SPAL).
c. Bangunan bawah
   Bangunan bawah sebagai penampung, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja. Bangunan bawah dapat berupa tangki septik dan cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di pedesaan dengan kepadatan penduduk rendah dan sulit air.

GAMBAR 7.3
PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2019

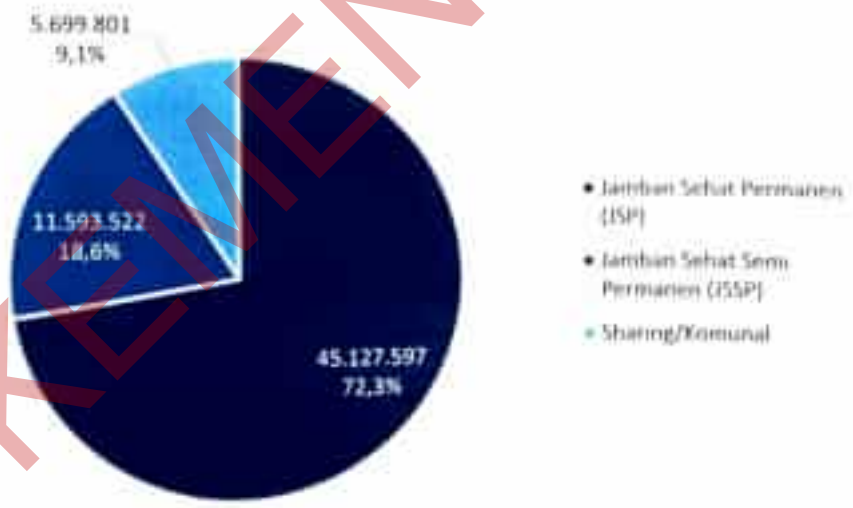

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Sarana jamban sehat dapat diklasifikasi menjadi jamban *sharing*/komunal, jamban sehat semi permanen (JSSP), dan jamban sehat permanen. Jamban *sharing*/komunal merupakan jamban yang digunakan Bersama dalam masyarakat (pengguna lebih dari satu keluarga). Jamban sehat semi permanen belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak di dalam rumah. Jamban sehat permanen adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak di dalam rumah. Pada tahun 2019, 72,3% keluarga di Indonesia sudah menggunakan

KEMENKES RI

jamban sehat permanen (Gambar 7.3). Sisanya 18,6% menggunakan jamban sehat semi permanen dan 9,1% menggunakan jamban *sharing*/komunal.

GAMBAR 7.4
PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2019

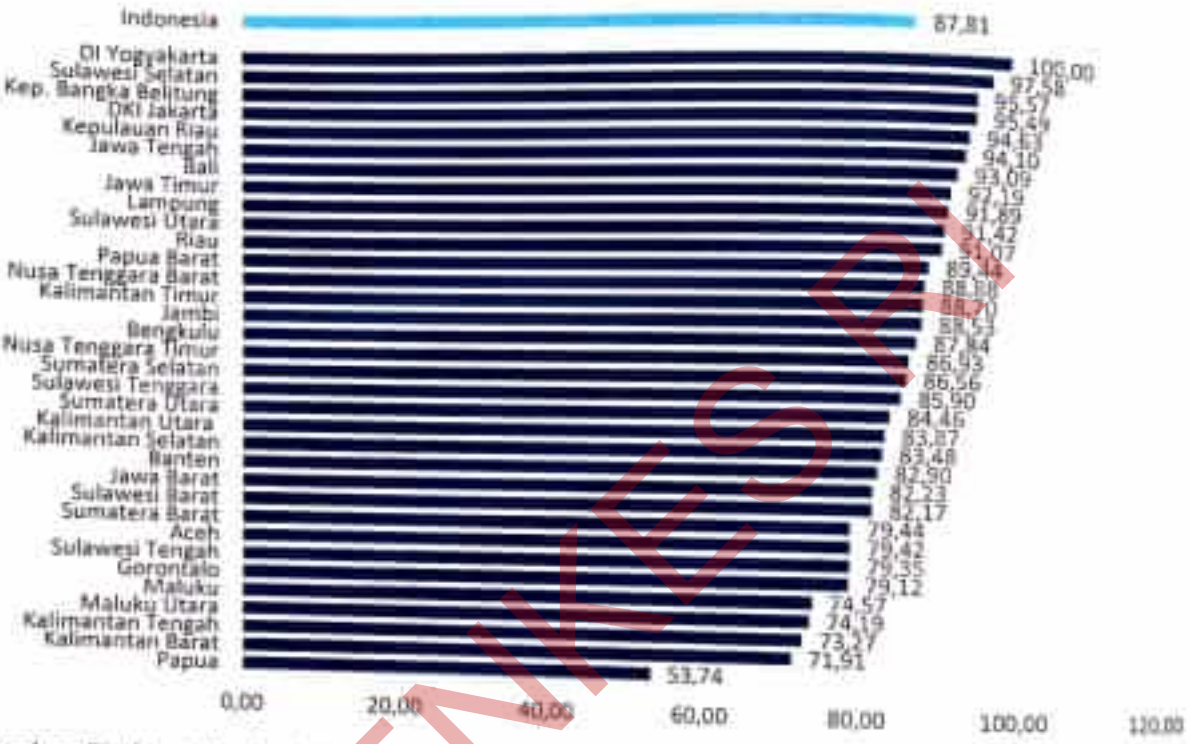

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia pada tahun 2019 adalah 87,81%. Provinsi dengan persentase tertinggi keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah DI Yogyakarta (100%), Sulawesi Selatan (97,58%), dan Kepulauan Bangka Belitung (95,57%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (53,74%), Kalimantan Barat (71,81%), dan Kalimantan Tengah (73,27%). Rincian lengkap mengenai keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dapat dilihat pada Lampiran 73.

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya peningkatan akses sanitasi. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan adalah melakukan perubahan arah kebijakan pendekatan sanitasi dari yang sebelumnya memberikan subsidi *(project driven)* menjadi

KEMENKES RI

pemberdayaan masyarakat yang fokus pada perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan menggunakan metode *CLTS (Community Led Total Sanitation)*. Belajar dari pengalaman implementasi *CLTS* melalui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah bersama NGO *(Non-Governmental Organization)*, maka pendekatan CLTS selanjutnya dikembangkan dengan menambahkan 4 (empat) pilar perubahan perilaku lainnya yang dinamakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), selanjutnya Pemerintah menetapkan STBM menjadi kebijakan nasional pada tahun 2008, yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM. Pendekatan ini telah berkontribusi pada percepatan perubahan perilaku masyarakat dan penyediaan layanan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, peningkatan rata-rata akses sanitasi dari tahun 1993-2006 mencapai 0,78% per tahun. Sejak penerapan *CLTS (Community Lead Total Sanitation)* pada tahun 2006 yang kemudian menjadi kebijakan nasional STBM pada tahun 2008 rata-rata peningkatan akses sanitasi per tahun mencapai 3,53%, dan berdasarkan penghitungan Pusat Data dan Informasi dari data BPS 2009-2017 rata-rata peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah 2,23% per tahun. STBM diharapkan mampu untuk berkontribusi secara nyata dalam pencapaian akses universal sanitasi di Indonesia pada tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019).

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Masyarakat yang didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak seperti LSM, swasta, perguruan tinggi, media, dan organisasi sosial lainnya merupakan pelaku utama STBM. Dukungan yang diberikan meliputi pengembangan kapasitas, pengembangan pilihan teknologi, memfasilitasi pengembangan mekanisme jejaring pemasaran, pengembangan media, fasilitasi pemicuan, dan pertemuan-pertemuan pembelajaran antar pihak. Berbagai dukungan tersebut telah terbukti mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun sarana sanitasi sesuai kemampuan. STBM digunakan sebagai sarana pemerintah dalam pencapaian akses sanitasi menuju *universal access* pada akhir tahun 2019.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang disebut dengan 3 Komponen Sanitasi Total adalah sebagai berikut.

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif *(enabling environment)*
   Tujuan: menciptakan lingkungan yang mendukung melalui sinergi lintas sektor dan lintas program, penguatan-penguatan melalui regulasi yang mendukung pelaksanaan STBM, dan membangun mekanisme pembelajaran antar daerah.
2. Peningkatan kebutuhan sanitasi *(demand creation)*
   Tujuan: meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana sanitasi yang dilakukan melalui kegiatan pemicuan, monitoring, dan penggunaan media komunikasi perubahan perilaku.

KEMENKES RI

3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi *(supply improvement)*
   Tujuan: meningkatkan penyediaan sarana sanitasi dengan pilihan yang bervariasi dan terjangkau masyarakat secara luas.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Telah dilakukan pemicuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berpusat pada pendekatan *CLTS (Community-Led Total Sanitation)*.
2. Telah memiliki *natural leader* (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Data dari Profil Nasional STBM per tanggal 8 Mei 2020 yang diakses melalui situs http://monev.stbm.kemkes.go.id/, memperlihatkan hasil bahwa dari 10.134 puskesmas per Desember 2019, 8.653 (85,39%) puskesmas sudah menjalankan program STBM, dan memiliki sumber daya manusia kesehatan khususnya sanitarian sebanyak 8.647 orang dan 2.070 orang (23,93%) diantaranya adalah sanitarian terlatih, dengan 77% fasilitator aktif.

GAMBAR 7.5
CAPAIAN DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2015-2019

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Pada tahun 2019, jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM sudah mencapai 57.935 dari total 83.441 desa/kelurahan di Indonesia. Hasil ini telah memenuhi target Renstra pada tahun 2019 yaitu sebanyak 45.000 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Tren capaian total desa/kelurahan yang melaksanakan STBM periode dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu melebihi target Renstra yang ditetapkan setiap tahunnya (Gambar 7.5).

KEMENKES RI

GAMBAR 7.6
PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

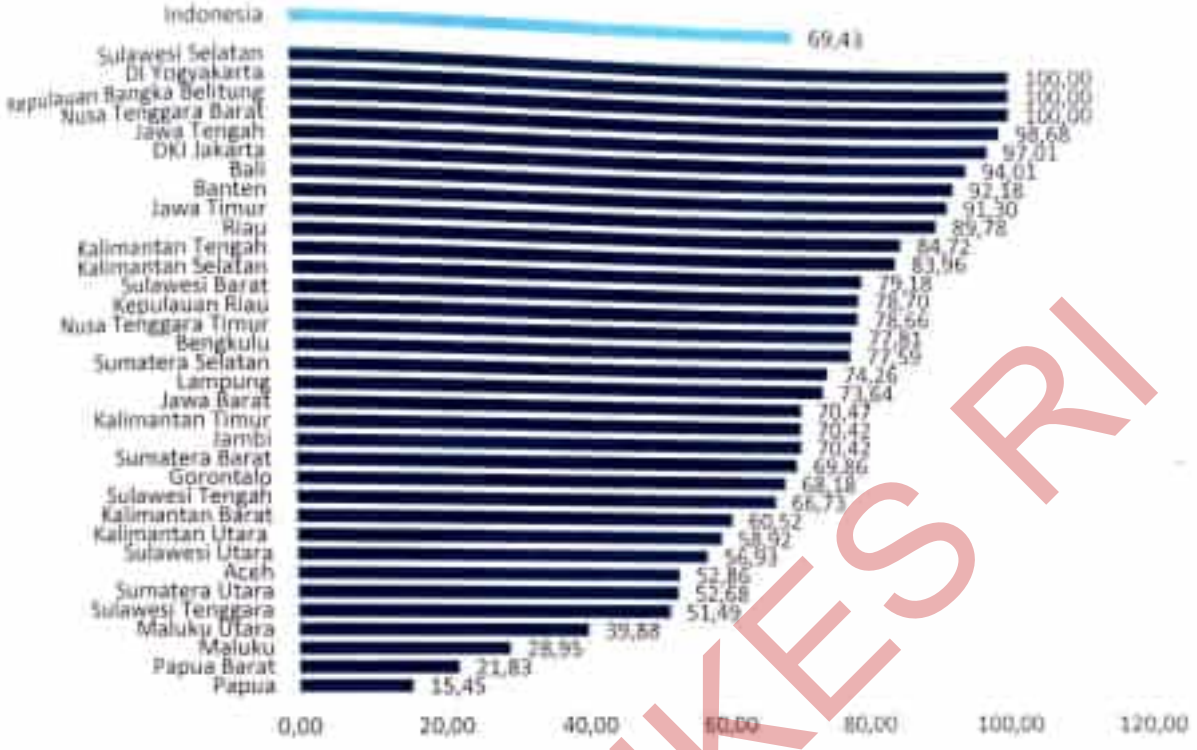

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Secara nasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2019 adalah 69,43%, meningkat dari capaian tahun 2018 yaitu 60,99% (Gambar 7.6). Ada tiga provinsi yang telah mencapai 100% desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM yaitu Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah Papua (15,45%), Papua Barat (21,83%) dan Maluku (28,95%). Lima provinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Jawa Tengah (8.306 desa/kelurahan), Jawa Timur (7.632 desa/kelurahan), Jawa Barat (4.198 desa/kelurahan). Rincian lengkap mengenai desa yang melaksanakan STBM tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 74.

D. TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya. TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan. TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Pemerintah Daerah minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum, yaitu:

KEMENKES RI

1. Sarana pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yang sederajat milik pemerintah dan swasta yang terintegrasi.
2. Pasar rakyat yang dimaksud adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, adanya proses tawar menawar di pasar, sebagian besar barang yang diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

GAMBAR 7.7

PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2019

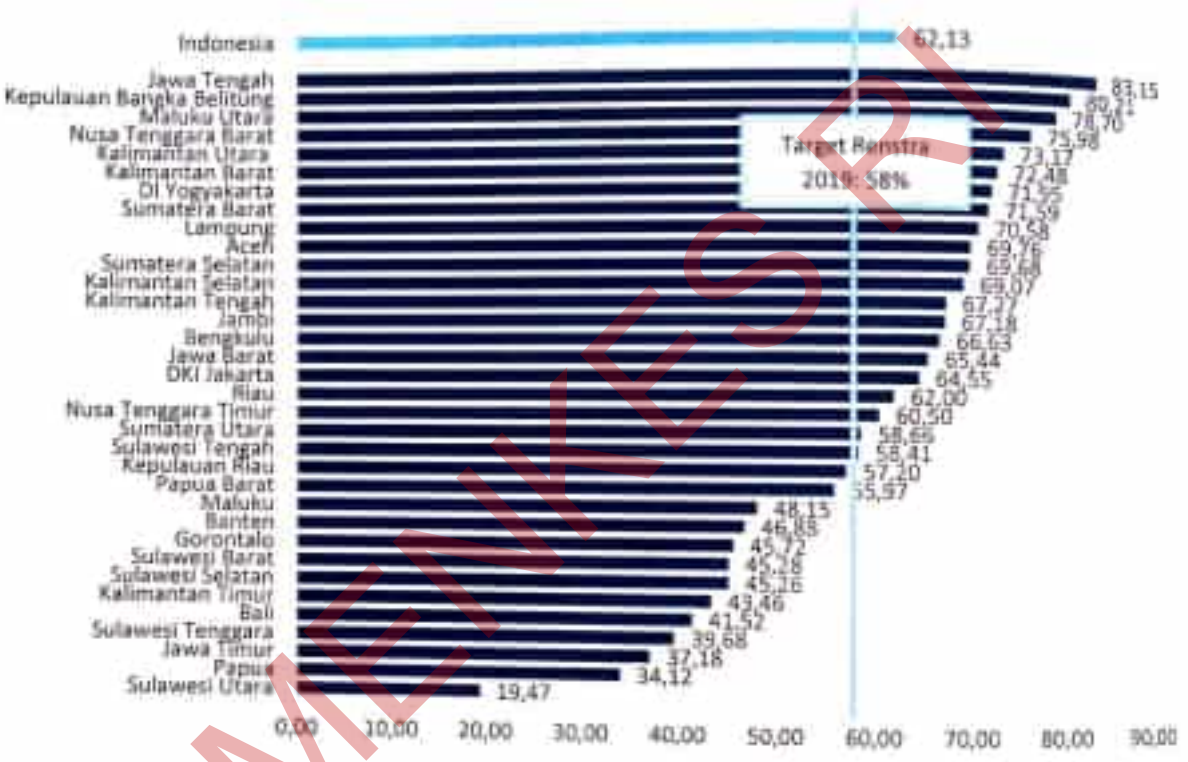

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Secara nasional persentase TTU yang telah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2019 adalah 62,13%. Angka ini telah mencapai target Renstra tahun 2019 yaitu 58%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Jawa Tengah (83,15%), Kepulauan Bangka Belitung (80,21%), dan Maluku Utara (78,70%). Provinsi dengan capaian terendah diantaranya Sulawesi Utara (19,47%), Papua (34,12%), dan Jawa Timur (37,18%). Pada provinsi Maluku data TTU yang dilaporkan hanya data pasar. Rincian lengkap tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 75.

KEMENKES RI

E. TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. TPM adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Persyaratan higiene sanitasi yang harus dipenuhi meliputi:

1. persyaratan lokasi dan bangunan,
2. persyaratan fasilitas sanitasi,
3. persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan,
4. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi,
5. persyaratan pengolahan makanan,
6. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi,
7. persyaratan penyajian makanan jadi,
8. persyaratan peralatan yang digunakan.

TPM yang dilakukan penilaian untuk memenuhi syarat kesehatan adalah TPM siap saji di antaranya Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum, dan Makanan Jajanan/Kantin/Sentra Makanan Jajanan yang dibuktikan dengan sertifikat layak higiene sanitasi.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN TAHUN 2019

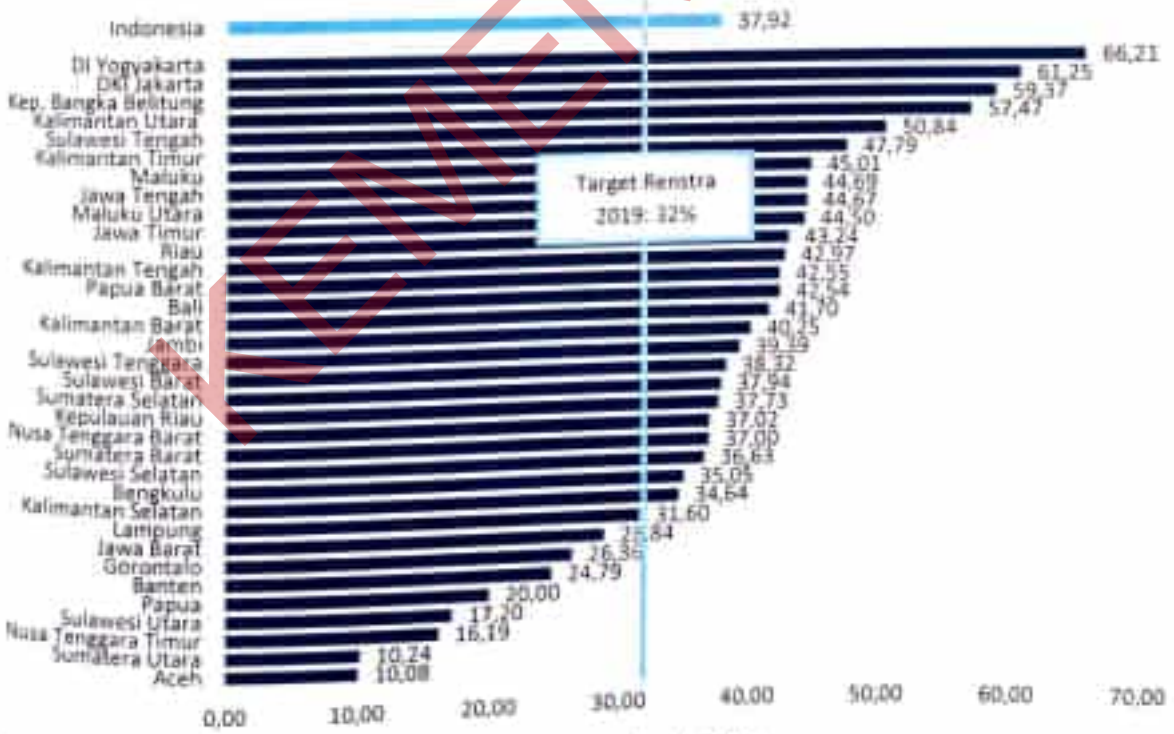

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

REVIEW KEMENKES RI

Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan secara nasional pada tahun 2019 adalah 37,92%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 26,41 pada tahun 2018. Capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2018 untuk TPM yang memenuhi syarat kesehatan yaitu sebesar 32%.

Provinsi dengan persentase tertinggi TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah Di Yogyakarta (66,21%), DKI Jakarta (61,25%), dan Kepulauan Bangka Belitung (59,37%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah Aceh (10,08%), Sumatera Utara (10,24%), dan NTT (16,19). Rincian lengkap tentang persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 76.a.

F. TATANAN KAWASAN SEHAT

Pengertian Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat, kelompok usaha, dan pemerintah daerah. Tatanan Kawasan Sehat merupakan salah satu indikator pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dalam Renstra 2015-2019. Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, Tatanan Kabupaten/kota Sehat dikelompokkan menjadi:

1. kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum,
2. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi,
3. kawasan pertambangan sehat,
4. kawasan hutan sehat,
5. kawasan industri dan perkantoran sehat,
6. kawasan pariwisata sehat,
7. ketahanan pangan dan gizi,
8. kehidupan masyarakat yang mandiri,
9. kehidupan sosial yang sehat.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat. Penyelenggaraan Kabupatan/Kota Sehat dilaksanakan melalui forum dan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum di kabupaten/kota disebut forum Kabupaten/Kota Sehat atau sebutan lainnya, tingkat kecamatan disebut forum komunikasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan tingkat desa/kelurahan disebut kelompok kerja atau sebutan lain. Kabupaten/Kota Sehat diselenggarakan dengan membentuk Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah. Tim pembina diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggota dari instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

KEMENKES RI

Kabupaten/kota sehat yang memenuhi kriteria akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi penghargaan ini dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi. Penilaian Kabupaten/kota sehat dapat dievaluasi oleh Tim Pembina pusat, sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat. Penghargaan ini terdiri dari 3 kategori, yaitu penghargaan Padapa diberikan kepada kabupaten/kota untuk taraf pemantapan, Wiwerda untuk taraf pembinaan, dan Wistara untuk taraf pengembangan.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN TATANAN KAWASAN SEHAT
TAHUN 2019

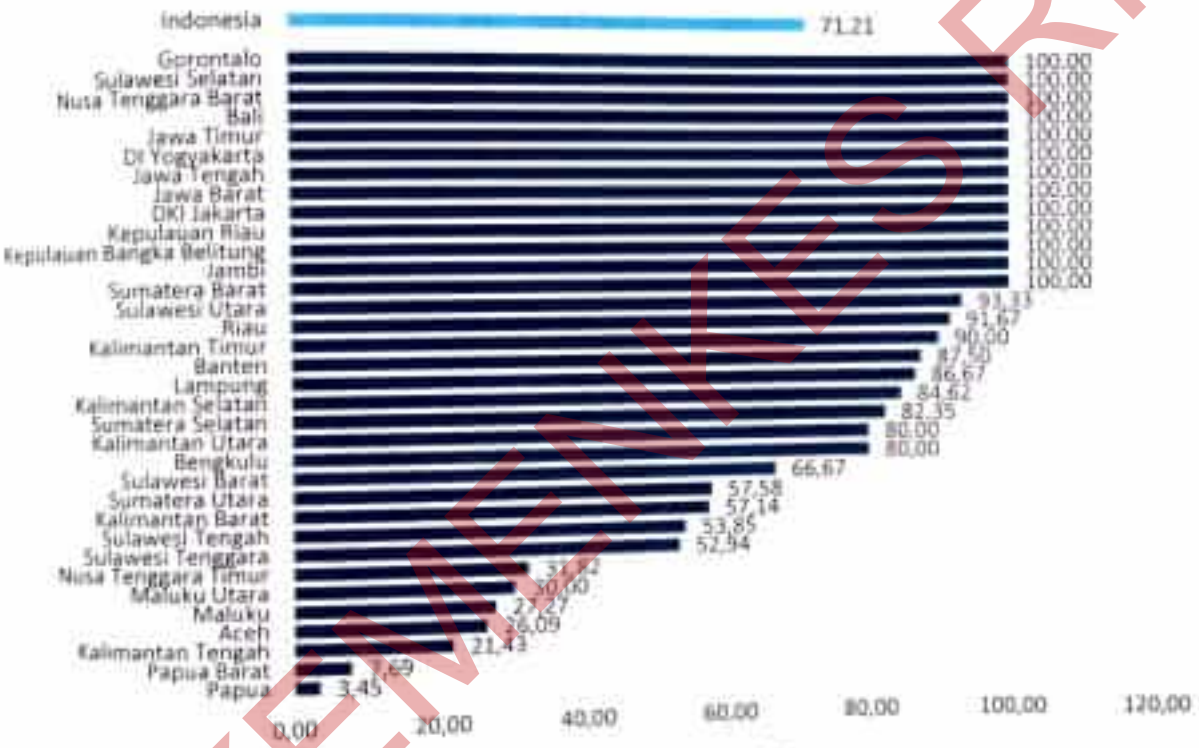

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat pada tahun 2019 sebanyak 366 kabupaten/kota (71,21%) (Gambar 7.9). Jumlah ini belum memenuhi target Renstra tahun 2016 yaitu 386 kabupaten/kota atau 75,1%. Ada 13 (tiga belas) provinsi yang mencapai 100% dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yaitu Gorontalo, Sulawesi Selatan, NTB, Bali, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Barat. Provinsi dengan persentase penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang masih rendah adalah Papua (3,45%) dan Papua Barat (7,69%) Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 76.b.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya (1) indikator perlu di update mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat, (2) masih sulitnya koordinasi Lintas Sektor Kementerian/Lembaga terkait dalam merespon kerja sama dengan

KEMENKES RI

Kemenkes untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat, (3) kurangnya sosialisasi dan komitmen pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan akibat seringnya mutasi kepegawaian di daerah, (4) kurang optimalnya fungsi tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta (5) masih kurangnya advokasi kegiatan Kab Kota Sehat di provinsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Definisi limbah medis adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radiaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Pengelolaan limbah medis berbeda dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Penempatan limbah medis dilakukan pada wadah yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Limbah medis yang telah terkumpul tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah medis yang berbentuk gas dilengkapi alat pereduksi emisi gas dan debu pada proses pembuangannya. Selain itu perlu dilakukan pula upaya minimalisasi limbah yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan *(reduce)*, menggunakan kembali *(reuse)*, dan daur ulang *(recycle)*. Penghijauan juga baik dilakukan untuk mengurangi polusi dari limbah yang berbentuk gas dan untuk menyerap debu.

Tata laksana pengelolaan limbah medis sesuai standar tertuang dalam pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan rumah sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 mengenai Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang diantaranya terdiri dari beberapa upaya disesuaikan dengan jenis limbah, upaya tersebut diantaranya:

1. upaya minimisasi limbah;
2. pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang;
3. tempat penampungan sementara;
4. transportasi (pengangkutan);
5. pengolahan, pemusnahan, dan pembuangan akhir limbah cair dan limbah padat.

Indikator yang mendukung pengamanan limbah medis adalah persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar. Rumah sakit melakukan pengelolaan limbah medis jika melakukan pemilahan dan pengolahan limbah medis sesuai standar.

KEMENKES RI

GAMBAR 7.10

PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2019

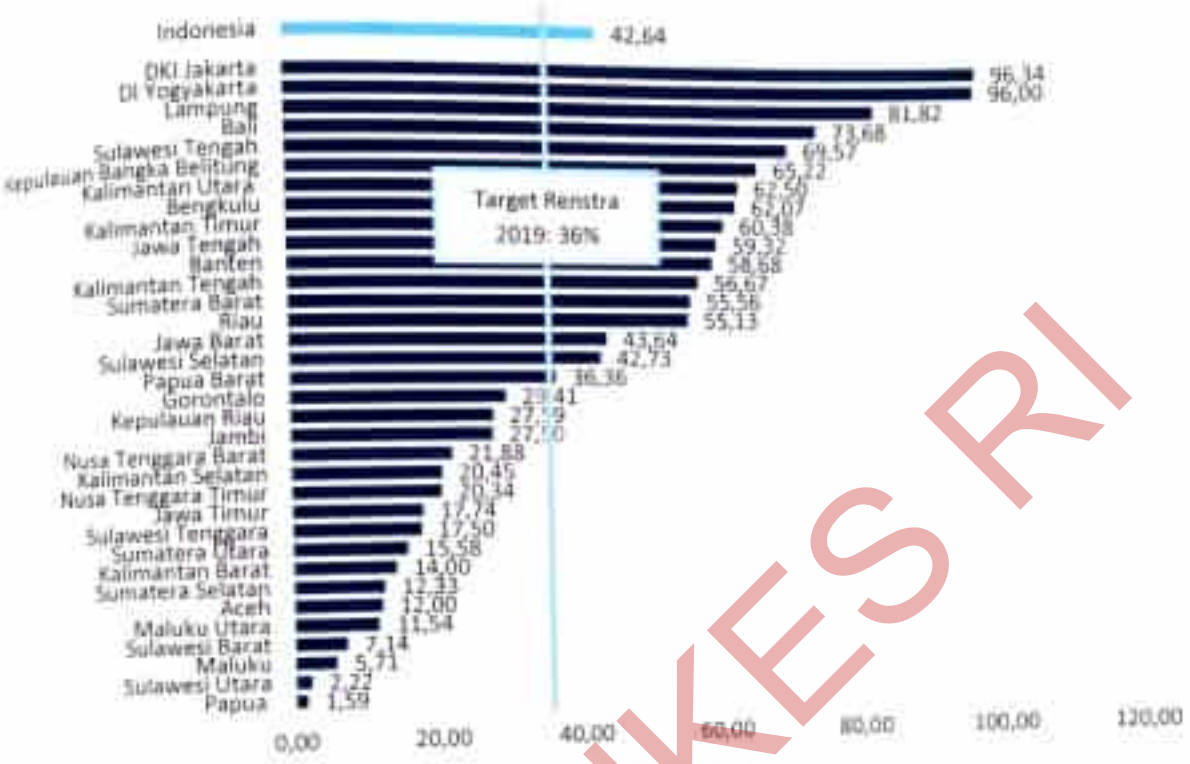

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020,
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Secara nasional persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2019 adalah 42,64% (Gambar 7.10). Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 33,63% dan sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 36%. Provinsi dengan presentase tertinggi adalah DKI Jakarta (96,34%), DI Yogyakarta (96%), dan Lampung (81,82%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (1,59%), Sulawesi Utara (2,22%), dan Maluku (5,71%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 76.d.

H. PEMENUHAN KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN

Pengertian kesehatan lingkungan yang adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Indikator kualitas kesehatan lingkungan menjadi indikator utama di Direktorat Kesehatan Lingkungan pada tahun 2016, indikator kualitas kesehatan lingkungan merupakan komposit dari 6 indikator pelaksana kesehatan lingkungan lainnya. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pada kabupaten/kota tercapai dengan terpenuhinya minimal 4 dari 6 kriteria yang meliputi:

1. memiliki desa/kelurahan melaksanakan STBM minimal 20%;
2. menyelenggarakan tatanan kabupaten/kota sehat;
3. melakukan pengawasan kualitas air minum minimal 30%;
4. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan minimal 8 %;

KEMENKES RI

5. Tempat Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat kesehatan minimal 30%;
6. rumah sakit melaksanakan pengelolaan limbah medis minimal 10%.

GAMBAR 7.11
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI KUALITAS KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019

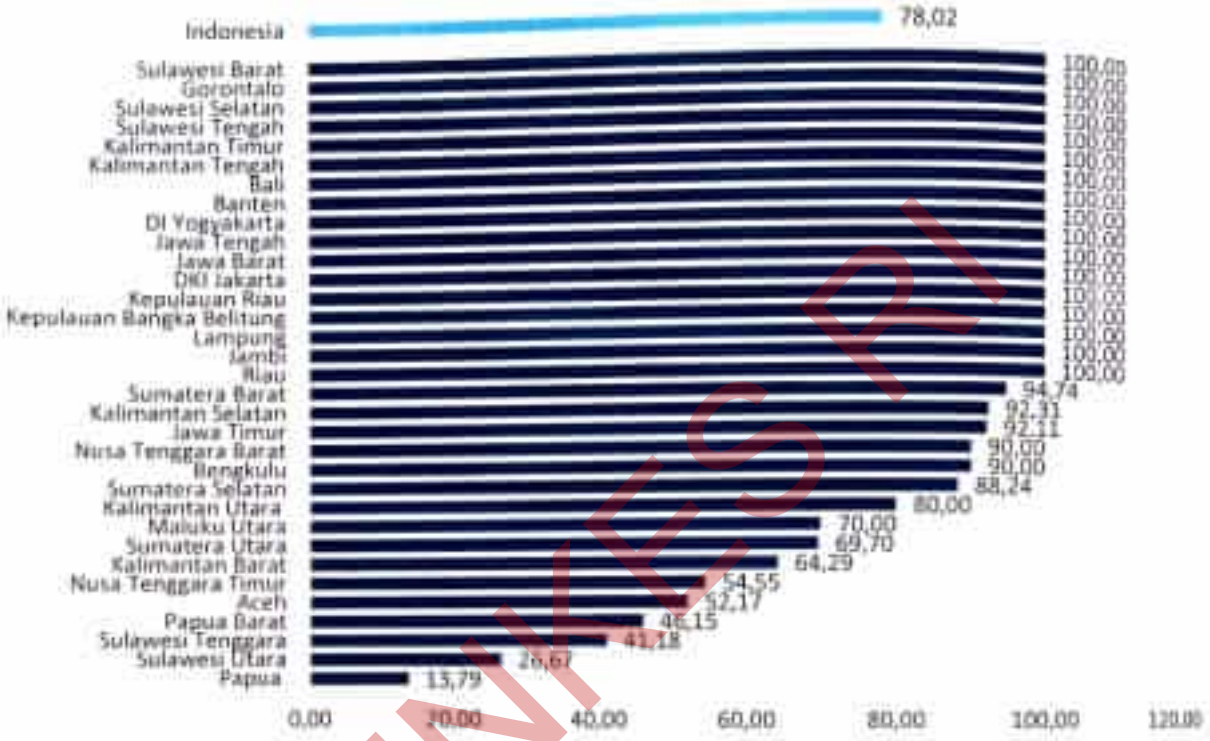

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 78,02% (Gambar 7.11). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2019 yaitu 40%. Ada 17 (tujuh belas) provinsi yang sudah mencapai 100% kabupaten/kota yang telah memenuhi kualitas kesehatan lingkungan. Masih ada satu provinsi yang belum masuk penilaian dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan yaitu Maluku karena provinsi tersebut belum memenuhi standar minimal 4 dari 6 kriteria kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan. Rincian lengkap mengenai jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dilihat di lampiran 76.c.

KEMENKES RI

I. KEBIJAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran individu untuk mencegah permasalahan kesehatan. PHBS dipraktikkan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya masih rendah. Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013 persentase rumah tangga di Indonesia yang memenuhi kriteria Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baru mencapai 32,3%. Dalam rangka mendorong

peningkatan penerapan perilaku hidup sehat oleh masyarakat, diperlukan dukungan regulasi melalui kebijakan yang mendukung PHBS di daerah.

Kebijakan PHBS menjadi komponen penting suatu daerah sebagai indikator suatu keberhasilan daerah untuk menurunkan kejadian penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Kebijakan yang mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota.

GAMBAR 7.12
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEBIJAKAN PHBS
TAHUN 2019

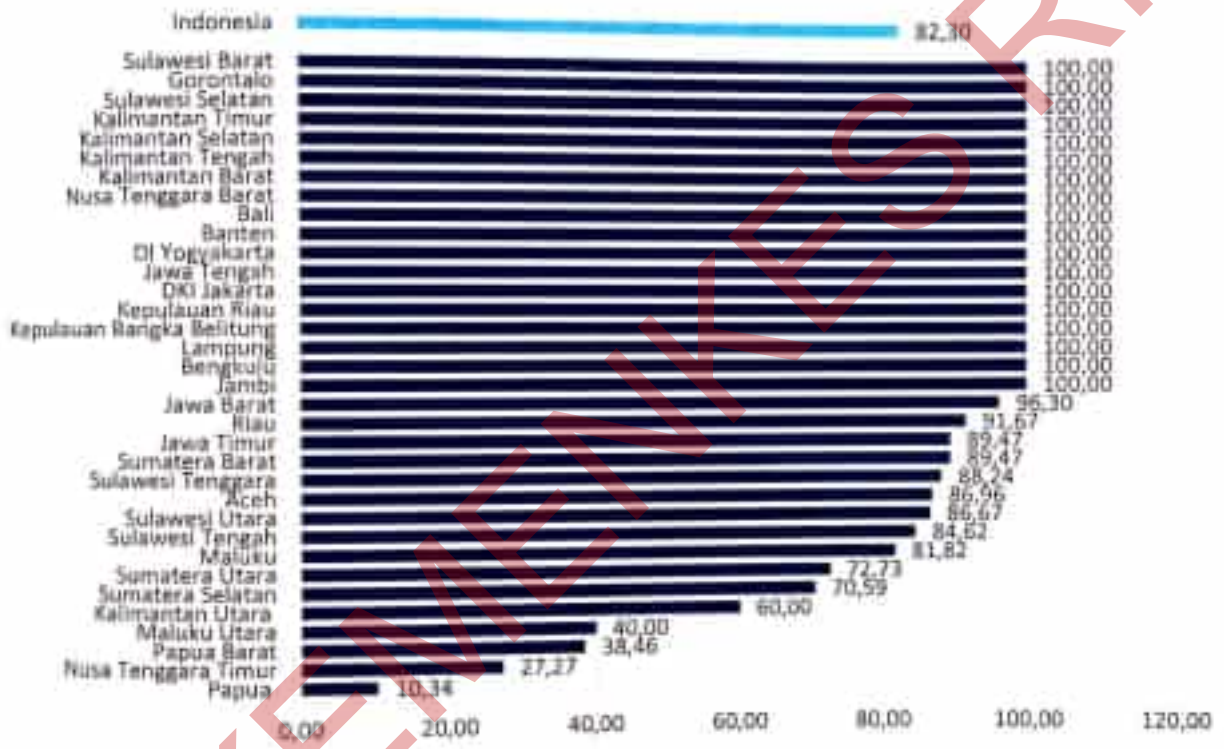

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS secara nasional pada tahun 2019 adalah 82,30% (Gambar 7.12), dimana angka ini sudah melampaui target Renstra 2019 sebesar 80% . Sebanyak 18 Provinsi sudah mencapai 100%. Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua 10,34%, Nusa Tenggara Timur 27,27%, dan Papua Barat 38,46%. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dapat dilihat pada lampiran 76.e.

KEMENKES RI

J. GERAKAN MASYARAKAT SEHAT

Pemerintah saat ini melakukan suatu gebrakan inovasi dengan mengeluarkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang melibatkan pemangku kepentingan, swasta, akademisi, LSM dan sektor-sektor lainnya agar dapat berperan dalam pembangunan kesehatan dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bertujuan antara lain 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan serta; 4) Penguatan sistem kesehatan; pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan berfokus pada pemerataan layanan.

Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan bukti dukungan pemerintah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Dalam inpres ini terlihat peran dari setiap sektor untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggerakkan seluruh elemen dari sektor pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat lainnya. Salah satu ukuran kinerja dalam Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

GAMBAR 7.13
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN MINIMAL 5 TEMA KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN 2019

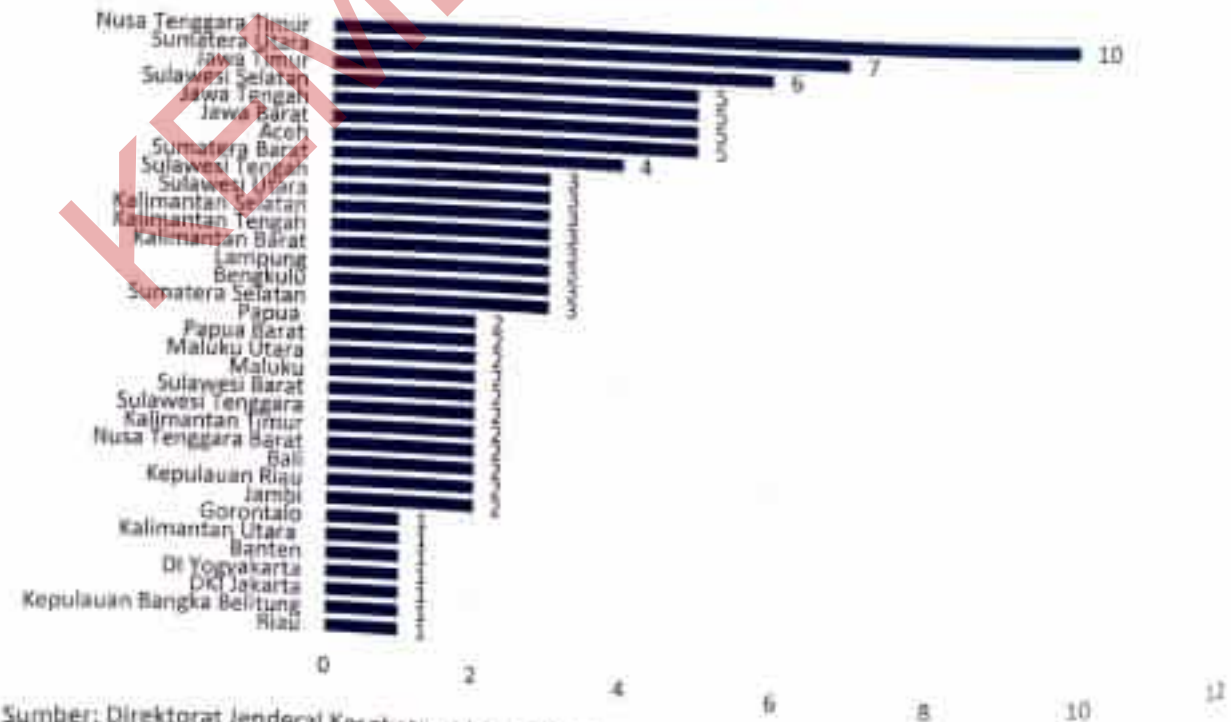

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Pada tahun 2019, jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye minimal 5 tema Germas adalah 100 kabupaten/kota. Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang paling banyak melaksanakan kampanye minimal 5 tema Germas adalah Nusa Tenggara Timur yaitu 10 dari 22 kabupaten/kota. Sebanyak tujuh provinsi hanya melaksanakan kampanye minimal 5 Tema Germas di 1 Kabupaten/Kota, yaitu provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau. Rincian lengkap mengenai jumlah kabupaten/kota dengan pelaksanaan minimal 5 tema kampanye Germas dapat dilihat pada Lampiran 76.f.

***

KEMENKES RI

KEMENKES RI

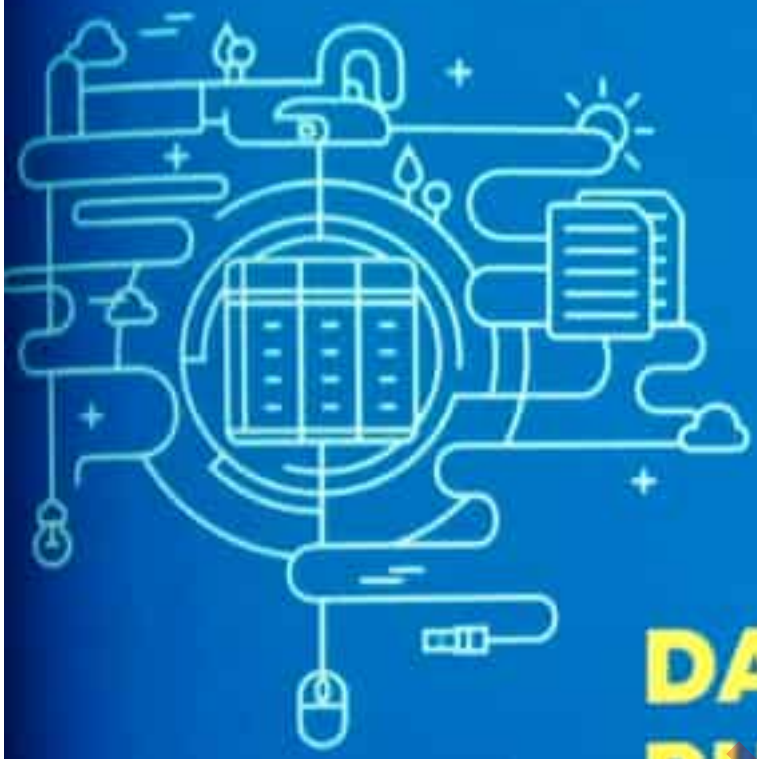

DAFTAR PUSTAKA

KEMENKES RI

KEMENKES RI

DAFTAR PUSTAKA

- Adioutomo, Sari Martiningsih dan Ghazy Mujahid. 2014. *Indonesia on The Threeshold of Population Ageing*. UNFPA Indonesia.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. *Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: UNPF.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik.2019. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. 2018. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2007. *Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

KEMENKES RI

- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33/MENKES/PER/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Petunjuk Teknis Surveilans Campak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

KEMENKES RI

- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

KEMENKES RI

- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*, Nomor 184. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases*.

KEMENKES RI

World Health Organization. 2019. *Global Tuberculosis Report 2019*.
World Health Organization . *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication*.
Kementerian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Kementerian Keuangan.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta :Kementerian Dalam Negeri.

* * *

KEMENKES RI

KEMENKES RI

LAMPIRAN

KEMENKES RI

KEMENKES RI

Lampiran 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Luas Wilayah	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
		(km²)											per km²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	57.956,06	18	5	23	289		6.497	2.685.828	2.687.504	5.373.332	100	92,68
2	Sumatera Utara	72.981,23	25	8	33	450	693	5.417	7.266.207	7.296.342	14.562.549	100	199,54
3	Sumatera Barat	42.012,89	12	7	19	179	236	929	2.711.771	2.729.825	5.441.597	99	129,55
4	Riau	87.023,66	10	2	12	169	248	1.591	3.574.842	3.396.803	6.971.645	105	80,11
5	Jambi	50.058,16	9	2	11	141	161	1.194	1.848.854	1.775.725	3.624.579	104	72,41
6	Sumatera Selatan	91.592,43	13	4	17	241	307	2.853	4.303.327	4.167.234	8.470.561	103	92,48
7	Bengkulu	19.919,33	9	1	10	129	172	1.341	1.016.919	974.920	1.991.839	104	100,01
8	Lampung	34.623,80	13	2	15	228	295	2.435	4.324.269	4.323.452	8.647.737	100	242,99
9	Kep. Bangka Belitung	16.424,06	6	1	7	47	82	309	774.523	716.269	1.488.792	100	90,65
10	Kepulauan Riau	8.201,72	5	2	7	75	142	275	1.111.761	1.073.888	2.185.652	104	266,47
11	DKI Jakarta	664,01	1	5	6	44	267		5.265.321	5.272.895	10.537.859	100	15.900,00
12	Jawa Barat	35.377,76	18	9	27	627	645	5.312	24.962.701	24.354.011	49.316.712	102	1.394,08
13	Jawa Tengah	32.800,69	29	6	35	573	753	7.809	17.212.455	17.205.749	34.718.204	98	1.058,80
14	DI Yogyakarta	3.133,15	4	1	5	78	46	392	1.901.739	1.941.197	3.842.932	98	1.226,59
15	Jawa Timur	47.803,49	29	9	38	666	777	7.724	19.600.776	20.097.033	39.698.671	98	830,45
16	Banten	9.662,92	4	4	8	155	313	1.238	6.103.895	6.243.833	12.907.336	104	1.335,83
17	Bali	5.780,06	8	1	9	57	80	636	2.164.119	2.132.869	4.296.923	101	735,32
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32	8	2	10	117	99	995	2.603.622	2.668.733	5.070.305	98	273,01
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10	21	1	22	309	327	[illegible]	2.702.264	2.753.939	5.456.203	98	112,00
20	Kalimantan Barat	147.307,00	12	2	14	174	99	2.031	2.378.120	2.490.999	5.069.127	103	34,41
21	Kalimantan Tengah	153.564,50	13	1	14	136	138	1.432	1.620.291	1.294.569	2.714.859	119	17,68
22	Kalimantan Selatan	38.744,23	11	2	13	153	144	1.864	2.151.738	2.093.208	4.244.946	103	109,54
23	Kalimantan Timur	129.066,64	7	3	10	103	197	841	1.930.803	1.770.306	3.701.109	110	28,81
24	Kalimantan Utara	75.467,70	4	1	5	53	91	447	348.543	348.950	742.343	113	9,84
25	Sulawesi Utara	13.892,45	11	4	15	171	332	1.507	1.278.019	1.228.161	2.506.181	104	180,36
26	Sulawesi Tengah	61.841,29	12	1	13	175	175	1.842	1.236.233	1.805.790	3.054.023	106	49,38
27	Sulawesi Selatan	46.717,48	21	3	24	311	792	3.255	4.216.469	4.214.931	8.431.346	96	189,46
28	Sulawesi Tenggara	38.067,70	15	2	17	219	477	1.911	1.360.733	1.344.024	2.704.727	101	71,05
29	Gorontalo	11.257,07	5	1	6	77	72	657	668.436	666.195	1.282.631	100	114,83
30	Sulawesi Barat	16.787,18	6	0	6	69	73	576	692.831	693.425	1.386.256	101	82,32
31	Maluku	46.914,03	9	2	11	118	33	1.190	906.756	894.334	1.802.870	102	38,63
32	Maluku Utara	31.982,50	8	3	10	126	118	1.061	640.352	615.379	1.255.771	104	39,26
33	Papua Barat	102.955,13	12	1	13	218	80	1.742	394.788	414.829	809.617	111	7,72
34	Papua	319.036,05	28	1	29	468	148	5.611	1.774.690	1.604.812	3.379.502	111	10,59
	Indonesia	**1.916.906,77**	**416**	**98**	**514**	**7.230**	**8.488**	**74.953**	**134.657.619**	**133.416.946**	**268.074.565**	**101**	**139,85**

Sumber: Kemendagri dalam Angka 2019 (Permendagri No. Tahun 2018)
Pusat Data dan Informasi, Agustus 30, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 2.a

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0 - 4	12.044.847	11.560.076	23.604.923	104,19
2	5 - 9	12.234.173	11.739.659	23.973.832	104,21
3	10 - 14	11.824.779	11.232.350	23.057.128	105,27
4	15 - 19	11.406.314	10.887.906	22.294.220	104,76
5	20 - 24	11.167.600	10.749.969	21.917.569	103,88
6	25 - 29	10.690.862	10.537.134	21.227.996	101,46
7	30 - 34	10.320.421	10.261.794	20.582.215	100,57
8	35 - 39	10.058.224	10.207.552	20.265.776	98,54
9	40 - 44	9.679.101	9.687.550	19.366.651	99,91
10	45 - 49	8.876.555	8.817.782	17.694.337	100,67
11	50 - 54	7.699.188	7.738.956	15.438.144	99,49
12	55 - 59	6.314.794	6.434.991	12.749.785	98,13
13	60 - 64	4.895.102	4.923.127	9.818.229	99,43
14	65 - 69	3.337.531	3.394.296	6.731.827	98,33
15	70 - 74	2.027.559	2.357.325	4.384.884	86,01
16	75+	2.080.658	2.886.391	4.967.049	72,09
Indonesia		**134.657.619**	**133.416.946**	**268.074.565**	**100,93**
Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)				**47,02**	

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 2.9

ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BALITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), DAN JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Bayi (0 tahun)			Jumlah Balita (0-2 tahun)			Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)			Jumlah Balita (0 - 4 tahun)		
			Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Aceh	115.422	58.699	55.712	114.781	174.886	167.399	342.285	231.454	227.636	459.190	289.933	279.098	567.913
2	Sumatera Utara	382.593	196.918	186.139	383.057	495.291	469.516	964.807	615.209	582.193	1.197.402	764.558	717.311	1.481.869
3	Sumatera Barat	109.431	54.723	52.518	107.241	164.021	157.771	321.792	216.969	210.926	427.895	274.692	263.459	537.142
4	Riau	154.870	77.345	74.136	151.481	229.083	220.613	449.696	302.187	290.299	592.486	379.485	364.605	744.090
5	Jambi	65.762	33.733	32.386	66.119	98.126	94.690	192.816	130.780	125.203	255.983	163.899	156.471	320.370
6	Sumatera Selatan	159.888	78.728	76.256	155.034	240.242	231.810	472.052	323.225	311.797	635.022	403.313	388.394	791.707
7	Bengkulu	37.101	18.635	17.906	36.540	55.405	53.309	108.714	74.186	71.002	145.188	92.621	89.207	181.828
8	Lampung	126.241	63.330	60.923	124.253	228.890	219.333	447.822	308.064	296.571	604.635	385.194	376.904	762.097
9	Kep. Bangka Belitung	27.429	13.727	13.162	26.889	41.246	39.759	81.005	54.771	52.669	107.444	68.502	65.831	134.333
10	Kep. Riau	41.050	20.977	20.169	41.146	64.098	62.830	126.928	88.587	85.123	174.098	109.562	105.682	215.244
11	DKI Jakarta	166.698	98.119	82.618	180.737	254.776	229.446	484.222	367.042	353.099	720.141	451.127	435.487	886.614
12	Jawa Barat	875.575	441.242	422.775	864.017	1.323.135	1.267.661	2.590.796	1.799.436	1.698.179	3.497.615	2.240.857	2.125.954	4.366.811
13	Jawa Tengah	547.473	266.550	253.391	519.941	793.210	760.547	1.553.757	1.081.209	1.021.594	2.102.803	1.347.759	1.279.947	2.627.706
14	DI Yogyakarta	54.127	27.828	26.241	54.069	80.402	80.716	161.119	114.151	109.223	223.374	141.980	135.820	277.799
15	Jawa Timur	566.399	285.635	274.552	560.187	827.866	793.866	1.621.732	1.152.248	1.107.053	2.259.301	1.437.883	1.380.421	2.817.304
16	Banten	240.174	120.993	116.332	237.325	346.273	324.238	670.511	496.092	478.189	974.281	616.975	594.271	1.211.246
17	Bali	64.241	32.237	31.195	63.432	96.094	94.179	190.273	135.967	130.886	266.853	168.448	162.031	330.479
18	Nusa Tenggara Barat	101.315	50.736	48.700	99.444	151.413	144.779	296.192	213.529	206.867	420.396	262.264	251.572	513.836
19	Nusa Tenggara Timur	139.130	67.936	65.294	133.230	199.733	192.999	392.732	280.145	272.274	552.419	348.079	338.068	686.147
20	Kalimantan Barat	109.232	49.606	47.843	97.451	150.026	144.073	294.099	208.773	192.989	401.762	258.601	240.832	499.433
21	Kalimantan Tengah	53.804	26.372	25.433	51.805	78.554	75.629	154.183	105.223	98.896	204.119	130.961	125.009	254.922
22	Kalimantan Selatan	80.440	39.827	38.228	78.055	120.126	113.594	233.720	162.998	156.202	319.271	201.890	194.831	396.721
23	Kalimantan Timur	74.917	36.108	34.513	70.621	107.042	101.139	208.181	145.659	136.123	279.782	180.767	171.636	352.403
24	Kalimantan Utara	22.135	10.821	10.455	21.276	23.065	22.772	45.837	31.809	29.809	61.618	39.732	38.944	79.676
25	Sulawesi Utara	40.892	20.212	19.432	39.644	61.034	59.499	120.533	82.906	80.399	163.305	102.938	99.956	203.874
26	Sulawesi Tengah	62.707	30.911	29.634	60.545	92.092	88.574	180.666	125.839	117.042	242.881	156.930	146.676	303.606
27	Sulawesi Selatan	166.785	83.859	80.954	164.813	251.799	241.636	493.435	346.836	323.670	670.506	430.695	404.614	835.309
28	Sulawesi Tenggara	62.366	31.040	29.891	60.926	92.467	88.532	180.999	133.244	121.312	254.556	153.279	146.903	300.182
29	Gorontalo	23.856	11.743	11.264	23.023	34.899	33.894	68.793	45.977	44.208	90.185	57.720	55.842	113.562
30	Sulawesi Barat	32.851	15.761	15.171	31.232	46.991	45.236	92.229	61.271	59.231	120.502	77.132	74.542	151.674
31	Maluku	46.610	23.691	23.017	47.119	69.957	68.643	138.600	93.068	90.241	183.309	116.249	113.598	229.847
32	Maluku Utara	29.195	14.767	13.709	28.476	42.744	41.126	83.870	56.563	54.504	111.067	70.928	68.295	139.223
33	Papua Barat	23.850	12.010	11.234	23.243	33.223	31.333	64.556	40.766	38.420	79.186	52.189	49.614	101.799
34	Papua	91.339	44.673	43.630	88.293	102.770	100.994	203.764	125.069	121.071	246.140	144.763	142.043	286.804
Indonesia		**4.778.621**	**2.396.185**	**2.295.298**	**4.691.483**	**7.203.486**	**6.908.164**	**14.110.650**	**9.648.742**	**9.264.870**	**18.913.612**	**12.044.847**	**11.580.876**	**23.625.723**

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, Bappenas RI 2019

KEMENKES RI

Lampiran 2.c

ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)			Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)			Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)									
1	Aceh	114.847	108.644	223.491	57.052	55.003	112.055	334.745	321.103	655.848
2	Sumatera Utara	314.367	304.081	618.446	150.042	143.793	293.835	934.119	896.379	1.830.498
3	Sumatera Barat	110.317	106.189	216.506	55.329	53.466	108.795	327.272	314.938	642.210
4	Riau	146.829	141.307	288.136	72.387	69.719	142.106	415.317	395.116	810.433
5	Jambi	65.587	61.047	126.634	32.867	31.621	64.488	195.205	188.889	384.094
6	Sumatera Selatan	164.179	158.574	322.753	82.371	79.610	161.981	485.099	462.085	947.184
7	Bengkulu	37.394	36.105	73.499	18.715	18.072	36.787	111.384	105.760	217.144
8	Lampung	161.171	155.747	316.918	81.978	79.222	161.200	482.702	459.857	942.559
9	Kep. Bangka Belitung	27.183	26.193	53.376	13.489	13.001	26.490	79.699	76.143	155.842
10	Kep. Riau	45.870	44.414	90.284	22.774	22.081	44.855	132.012	126.198	258.210
11	DKI Jakarta	193.347	186.654	380.101	97.238	93.926	191.164	535.667	512.395	1.048.062
12	Jawa Barat	888.369	851.790	1.740.158	445.322	427.426	872.748	2.619.928	2.488.473	5.108.393
13	Jawa Tengah	555.422	526.728	1.082.150	282.895	268.153	551.048	1.711.779	1.619.003	3.330.773
14	DI Yogyakarta	57.825	55.496	113.321	29.031	27.641	56.672	169.270	165.990	335.260
15	Jawa Timur	589.048	567.013	1.156.059	298.827	287.905	586.732	1.837.318	1.757.895	3.595.223
16	Banten	254.229	245.603	499.823	127.887	123.511	251.392	735.742	701.854	1.437.596
17	Bali	68.860	64.410	133.270	33.558	32.370	65.936	210.834	199.419	410.253
18	Nusa Tenggara Barat	101.541	98.232	199.773	51.073	49.414	100.427	304.049	291.402	595.451
19	Nusa Tenggara Timur	125.732	121.729	247.461	62.108	60.191	122.287	365.608	359.937	725.545
20	Kalimantan Barat	101.186	97.452	198.638	50.899	48.884	99.583	294.488	281.373	575.781
21	Kalimantan Tengah	50.573	49.038	99.611	25.004	24.268	49.272	146.958	139.945	286.903
22	Kalimantan Selatan	83.323	80.504	163.827	42.179	40.803	82.982	245.117	234.237	479.374
23	Kalimantan Timur	69.942	66.910	136.852	34.675	33.149	67.824	200.217	188.693	388.910
24	Kalimantan Utara	15.420	14.842	30.262	7.645	7.364	15.009	43.987	41.770	85.657
25	Sulawesi Utara	42.860	41.228	84.088	21.702	20.883	42.585	127.390	121.960	249.350
26	Sulawesi Tengah	60.398	58.246	118.644	30.207	29.160	59.367	173.144	164.855	337.999
27	Sulawesi Selatan	169.667	163.332	332.999	84.972	81.880	166.852	500.027	486.173	986.200
28	Sulawesi Tenggara	66.123	57.723	123.846	29.772	28.606	58.378	181.034	171.873	352.907
29	Gorontalo	22.525	21.678	44.203	11.136	10.724	21.860	66.060	63.062	129.038
30	Sulawesi Barat	29.494	28.632	58.126	14.463	14.053	28.516	84.593	80.589	165.182
31	Maluku	40.558	39.276	79.834	19.963	19.383	39.346	116.371	109.674	226.045
32	Maluku Utara	28.866	27.037	55.043	13.935	13.465	27.400	82.188	78.885	161.073
33	Papua Barat	19.453	18.937	38.392	9.558	9.319	18.877	56.630	53.609	110.667
34	Papua	64.888	64.545	129.433	32.606	32.059	64.739	193.914	189.888	383.594
	Indonesia	5.075.973	4.895.274	9.971.232	2.451.873	2.360.183	4.812.056	14.991.266	14.037.484	29.129.020

KEMENKES RI

Lampiran 2.d

ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	Jumlah WUS Imunisasi (15 - 39 tahun)	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin/ Nifas
1	Aceh	1.454.182	1.125.723	126.964	123.193
2	Sumatera Utara	3.746.948	2.852.184	333.818	317.883
3	Sumatera Barat	1.383.316	1.045.079	120.374	116.908
4	Riau	1.898.448	1.450.292	170.366	162.622
5	Jambi	997.505	748.993	73.338	69.050
6	Sumatera Selatan	2.260.064	1.707.341	175.999	167.903
7	Bengkulu	544.306	409.871	40.813	38.958
8	Lampung	2.193.253	1.614.766	165.289	157.757
9	Kepulauan Bangka Belitung	396.958	299.728	30.172	28.800
10	Kepulauan Riau	632.423	473.130	45.164	43.111
11	DKI Jakarta	2.966.180	2.224.310	183.366	175.031
12	Jawa Barat	13.271.172	9.810.433	968.932	917.254
13	Jawa Tengah	8.031.227	6.361.620	580.176	553.865
14	DI Yogyakarta	987.725	719.279	59.549	56.833
15	Jawa Timur	10.387.780	7.398.956	622.938	594.615
16	Banten	3.603.869	2.697.183	264.191	252.188
17	Bali	1.142.176	814.105	70.995	67.768
18	Nusa Tenggara Barat	1.407.862	1.076.371	112.646	108.481
19	Nusa Tenggara Timur	1.369.982	1.098.227	153.050	146.093
20	Kalimantan Barat	1.353.424	1.030.839	118.255	105.244
21	Kalimantan Tengah	743.771	557.536	59.184	56.494
22	Kalimantan Selatan	1.132.620	831.874	88.484	84.462
23	Kalimantan Timur	1.008.458	754.477	82.431	78.684
24	Kalimantan Utara	189.327	145.420	13.353	12.746
25	Sulawesi Utara	636.742	365.472	44.882	42.882
26	Sulawesi Tengah	808.481	601.509	68.970	65.842
27	Sulawesi Selatan	2.387.210	1.787.213	185.004	176.594
28	Sulawesi Tenggara	707.129	544.053	68.823	65.694
29	Gorontalo	330.151	248.745	26.247	25.049
30	Sulawesi Barat	374.433	281.739	36.116	34.494
31	Maluku	466.964	364.521	49.093	46.861
32	Maluku Utara	320.073	253.166	32.115	30.653
33	Papua Barat	259.359	201.920	24.035	22.942
34	Papua	948.172	714.162	70.473	74.906
	Indonesia	**71.149.767**	**52.644.435**	**5.256.483**	**5.017.552**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Semester II, 2019

KEMENKES RI

Lampiran [illegible]

PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2019

No	Variabel	Persentase		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]			
	Tidak pernah sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tidak punya ijazah SD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Paket A	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SDLB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Paket B	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMPLB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Paket C	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMLB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMK	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MAK	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D1/D2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	S1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Profesi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	S2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	S3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]			
	Tidak pernah sekolah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tidak punya ijazah SD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Paket A	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SDLB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Paket B	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMPLB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MTS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Paket C	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMLB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SMK	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MAK	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D1/D2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	S1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Profesi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	S2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	S3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

KEMENKES RI

Lampiran 3.9

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF, DAN USIA NON PRODUKTIF MENURUT DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)			Angka Beban Ketergantungan (ABK)
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Aceh	841.601	807.043	1.648.644	1.739.634	1.704.146	3.443.780	102.533	125.615	228.148	53.71
2	Sumatera Utara	2.300.873	2.228.932	4.529.805	4.660.104	4.704.423	9.364.527	299.230	374.987	674.217	55.21
3	Sumatera Barat	816.102	645.073	1.461.175	1.750.702	1.763.618	3.514.210	144.878	180.934	325.812	54.93
4	Riau	1.071.629	1.013.039	2.085.663	2.390.329	2.257.489	4.647.818	112.909	155.275	268.264	50.00
5	Jambi	669.703	672.608	1.342.311	1.278.510	1.220.163	2.498.672	90.641	82.954	163.595	43.00
6	Sumatera Selatan	1.298.163	1.316.315	2.564.478	2.902.466	2.797.854	5.700.320	192.678	213.307	405.985	48.60
7	Bengkulu	277.991	265.532	543.523	694.270	666.917	1.361.187	42.957	44.491	87.348	46.34
8	Lampung	1.330.435	1.324.390	2.654.825	2.915.877	2.761.651	5.677.528	227.975	232.411	460.386	48.79
9	Kep. Bangka Belitung	201.370	192.857	394.227	540.004	496.457	1.036.461	33.149	34.855	68.104	45.84
10	Kep. Riau	329.046	315.491	644.537	758.116	728.254	1.486.370	28.601	30.185	58.986	47.32
11	DKI Jakarta	1.335.857	1.278.934	2.614.791	3.772.593	3.738.047	7.510.640	229.911	204.708	434.619	43.54
12	Jawa Barat	6.568.963	6.261.796	12.830.759	14.340.019	14.294.959	28.634.978	1.355.720	1.305.375	2.661.095	44.67
13	Jawa Tengah	4.184.539	3.966.466	8.151.005	11.437.375	11.079.833	22.516.210	1.206.641	1.666.848	3.873.489	47.64
14	DI Yogyakarta	424.284	404.216	828.296	1.318.794	1.331.254	2.646.039	162.871	205.727	368.598	45.23
15	Jawa Timur	4.484.410	4.298.309	8.782.719	13.977.791	13.993.910	27.629.781	1.478.573	1.807.556	3.286.129	42.60
16	Banten	1.820.964	1.751.841	3.586.805	4.539.609	4.339.613	8.879.202	325.269	341.966	667.235	45.09
17	Bali	515.116	490.444	1.005.560	1.524.791	1.491.828	3.016.619	144.697	170.527	315.144	43.79
18	Nusa Tenggara Barat	754.035	721.567	1.475.602	1.994.729	1.948.281	3.943.010	122.868	143.785	266.673	52.44
19	Nusa Tenggara Timur	961.827	914.550	1.876.377	1.633.440	1.601.518	3.234.958	126.997	147.873	274.870	58.10
20	Kalimantan Barat	729.688	708.597	1.438.285	1.720.867	1.668.289	3.389.156	117.661	123.013	240.674	46.96
21	Kalimantan Tengah	375.430	359.843	735.273	998.033	969.423	1.967.456	66.836	85.310	152.146	43.69
22	Kalimantan Selatan	686.835	680.742	1.386.777	1.463.261	1.407.318	2.870.579	85.942	102.298	188.240	47.93
23	Kalimantan Timur	512.830	486.395	999.225	1.367.416	1.220.210	2.587.626	75.617	63.701	154.318	43.84
24	Kalimantan Utara	111.962	106.755	218.717	246.181	229.344	475.525	15.292	12.551	27.843	49.74
25	Sulawesi Utara	317.389	303.261	620.911	881.206	833.452	1.714.658	80.175	92.147	172.322	46.29
26	Sulawesi Tengah	448.554	423.935	872.489	1.082.662	996.278	2.078.940	75.017	78.577	153.594	49.78
27	Sulawesi Selatan	1.258.792	1.203.224	2.462.016	2.836.851	2.803.654	5.640.505	235.764	317.953	553.717	51.01
28	Sulawesi Tenggara	456.526	429.566	886.092	955.244	851.131	1.806.375	54.845	63.387	118.232	58.20
29	Gorontalo	167.991	160.640	328.631	407.566	407.040	814.606	25.827	32.307	58.134	47.63
30	Sulawesi Barat	217.905	209.015	427.010	448.218	447.143	895.451	26.228	31.563	57.791	54.14
31	Maluku	295.069	285.895	586.958	572.332	566.219	1.138.851	37.355	41.726	79.861	58.31
32	Maluku Utara	207.052	199.522	407.074	489.337	392.529	881.866	25.201	25.628	46.831	56.61
33	Papua Barat	165.631	139.249	295.230	366.988	304.186	670.274	15.069	13.042	28.111	47.57
34	Papua	457.816	480.631	977.647	1.243.411	1.098.161	2.341.572	34.263	25.828	60.091	44.31
	Indonesia	36.103.790	34.532.093	70.635.883	91.168.681	90.246.891	181.354.972	7.445.740	8.638.811	16.084.769	47.82

Sumber: Hasil Olah Data Intercensal, Kemendes RI, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 3.c

JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2001 - 2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
1	2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41	100.011,00	80.382,00
2	2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,10	18,20	130.499,56	96.512,00
3	2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42	138.803,00	105.888,00
4	2004	11,37	24,70	36,13	12,13	20,11	16,66	143.455,00	108.725,00
5	2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97	165.365,00	117.365,00
6	2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75	174.290,00	130.584,00
7	2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187.942,00	146.837,00
8	2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204.896,99	161.830,79
9	2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222.123,10	179.834,27
10	2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232.989,00	192.353,83
11	Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253.015,51	213.394,51
12	September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263.593,84	223.180,69
13	Maret 2012	10,63	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267.607,34	229.225,78
14	September 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66	277.381,99	240.441,35
15	Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289.042,00	253.273,00
16	September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308.626,00	275.779,00
17	Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318.514,00	286.097,00
18	September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326.853,00	296.681,00
19	Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342.541,00	317.881,00
20	September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356.378,00	333.034,00
21	Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364.527,00	343.647,00
22	September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372.114,00	338.428,00
23	Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385.621,00	361.496,00
24	September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400.995,00	370.910,00
25	Maret 2018	10,14	15,88	25,95	7,02	13,20	9,82	415.614,00	393.908,00
26	September 2018	10,13	15,54	25,67	6,89	13,10	9,66	425.770,00	392.154,00
27	Maret 2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41	442.063,00	404.398,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 3.d

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2019*

No	Provinsi	Semester I (Maret)								
		Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	511.617	168,11	9,60	479.569	651,23	18,01	486.935	819,34	15,32
2	Sumatera Utara	481.667	675,74	9,26	443.015	666,30	9,19	468.122	1.282,04	8,83
3	Sumatera Barat	476.308	133,43	4,76	483.934	226,87	7,80	503.652	348,22	6,42
4	Riau	514.779	375,91	6,28	491.291	313,79	7,62	500.612	689,72	7,08
5	Jambi	511.434	115,09	9,81	418.021	159,24	6,33	448.509	274,32	7,65
6	Sumatera Selatan	446.709	464,58	12,29	389.586	649,22	13,02	410.532	1.073,74	12,71
7	Bengkulu	530.500	94,72	11,79	481.910	205,78	15,49	499.660	302,50	15,23
8	Lampung	463.854	231,46	8,93	398.937	831,80	14,27	418.599	1.063,66	12,62
9	Kep. Bangka Belitung	671.054	25,31	4,85	605.833	45,07	6,79	677.716	70,38	6,02
10	Kep. Riau	597.894	104,24	6,38	556.248	24,25	11,04	594.059	128,46	6,96
11	DKI Jakarta	637.260	365,55	3,47	-	-	-	637.260	365,55	3,47
12	Jawa Barat	388.979	2.268,75	6,69	374.868	1.130,41	9,79	386.248	3.399,16	6,91
13	Jawa Tengah	372.882	1.633,96	8,29	361.027	2.149,26	12,44	369.581	3.783,23	10,80
14	DI Yogyakarta	452.628	288,66	10,84	378.073	143,81	13,09	422.826	448,47	11,76
15	Jawa Timur	411.731	1.499,27	6,84	361.437	2.662,90	14,45	397.607	4.112,25	10,37
16	Banten	494.610	370,72	4,12	412.007	275,73	7,81	462.726	654,46	5,29
17	Bali	600.791	97,99	3,29	581.316	65,87	4,66	600.624	163,85	3,79
18	Nusa Tenggara Barat	396.696	384,65	13,74	374.229	351,31	13,43	384.860	735,96	14,56
19	Nusa Tenggara Timur	441.620	114,12	8,84	353.604	1.032,39	24,91	373.972	1.146,52	21,09
20	Kalimantan Barat	456.525	83,69	4,60	429.229	284,71	7,20	438.555	370,41	7,04
21	Kalimantan Tengah	418.029	48,56	4,47	441.104	80,04	5,11	438.548	128,59	4,98
22	Kalimantan Selatan	476.294	70,52	3,59	443.928	186,81	4,87	457.222	257,48	4,55
23	Kalimantan Timur	614.223	167,67	4,31	597.851	113,28	5,31	609.155	280,95	3,94
24	Kalimantan Utara	675.460	22,88	5,10	609.733	25,90	9,03	651.436	48,78	6,65
25	Sulawesi Utara	564.608	65,49	6,04	472.594	105,20	10,91	571.293	191,70	7,80
26	Sulawesi Tengah	437.191	84,74	9,32	433.870	325,62	15,29	441.016	410,36	13,48
27	Sulawesi Selatan	530.947	170,19	6,44	522.223	597,69	11,92	529.865	767,88	9,69
28	Sulawesi Tenggara	536.877	72,82	6,81	521.997	350,76	14,89	527.852	402,58	11,24
29	Gorontalo	539.009	21,27	8,21	520.297	164,74	23,79	524.000	186,01	15,32
30	Sulawesi Barat	528.836	31,28	9,61	520.014	120,12	11,43	522.144	151,40	11,02
31	Maluku	528.990	45,60	5,84	499.701	272,09	26,01	508.777	317,69	17,69
32	Maluku Utara	474.175	15,32	4,27	432.815	65,28	7,78	444.637	80,60	6,77
33	Papua Barat	597.606	22,61	5,63	553.072	186,88	34,19	573.313	209,50	22,17
34	Papua	568.754	44,01	4,24	520.117	865,35	36,84	540.099	926,36	27,53
Indonesia		442.263	4.994,86	6,69	404.398	15169,91	12,85	425.250	25.164,72	9,41

Sumber : Survei Sosial Ekonomi, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 3.e

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Semester 1 (Maret)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)*			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	Aceh	1,59	3,15	2,64	0,38	0,80	0,66
2	Sumatera Utara	1,33	1,54	1,37	0,35	0,38	0,31
3	Sumatera Barat	0,77	1,09	0,94	0,20	0,22	0,21
4	Riau	0,81	1,37	1,13	0,19	0,33	0,27
5	Jambi	1,74	0,98	1,23	0,44	0,25	0,30
6	Sumatera Selatan	2,04	2,18	2,12	0,51	0,52	0,51
7	Bengkulu	2,44	2,50	1,48	0,53	0,63	0,58
8	Lampung	1,47	2,14	1,93	0,35	0,48	0,44
9	Kep. Bangka Belitung	0,38	0,74	0,51	0,06	0,15	0,10
10	Kep. Riau	0,59	1,58	0,69	0,10	0,34	0,12
11	DKI Jakarta	0,50		0,50	0,11		0,11
12	Jawa Barat	1,09	1,31	1,09	0,24	0,25	0,26
13	Jawa Tengah	1,32	1,73	1,53	0,27	0,31	0,30
14	DI Yogyakarta	1,73	1,78	1,74	0,41	0,32	0,38
15	Jawa Timur	1,15	2,51	1,80	0,29	0,65	0,45
16	Banten	0,63	3,10	0,76	0,15	0,25	0,18
17	Bali	0,49	0,64	0,53	0,11	0,13	0,11
18	Nusa Tenggara Barat	2,60	2,17	2,33	0,45	0,50	0,48
19	Nusa Tenggara Timur	1,16	5,09	4,15	0,21	1,41	1,13
20	Kalimantan Barat	0,76	1,35	1,14	0,17	0,30	0,26
21	Kalimantan Tengah	0,71	0,89	0,70	0,15	0,13	0,14
22	Kalimantan Selatan	0,60	0,79	0,70	0,14	0,16	0,15
23	Kalimantan Timur	0,61	1,53	0,91	0,13	0,39	0,21
24	Kalimantan Utara	0,85	1,63	1,38	0,24	0,42	0,31
25	Sulawesi Utara	0,77	1,63	1,18	0,16	0,35	0,25
26	Sulawesi Tengah	1,43	2,71	2,33	0,32	0,76	0,63
27	Sulawesi Selatan	0,63	2,07	1,45	0,13	0,51	0,34
28	Sulawesi Tenggara	1,35	2,79	2,23	0,34	0,74	0,59
29	Gorontalo	0,43	4,26	2,64	0,07	1,05	0,63
30	Sulawesi Barat	1,32	1,88	1,75	0,29	0,47	0,42
31	Maluku	0,72	5,33	3,32	0,12	1,47	0,88
32	Maluku Utara	0,59	1,03	0,89	0,09	0,24	0,20
33	Papua Barat	0,96	8,97	5,60	0,20	3,25	1,92
34	Papua	0,71	9,76	7,17	0,17	3,58	2,60
	Indonesia	1,05	2,18	1,33	0,24	0,55	0,37

Sumber : Rekap Pusat Nasional, 2019

Catatan :

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran nominal / nominal pendudukan terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pendudukan dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambar tentang penyebaran pengeluaran dari pendudukan miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi kesenjangan pengeluaran dari pendudukan miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa.

KEMENKES RI

Lampiran 3.1

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2019

No	Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	0,39	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32
2	Sumatera Utara	0,31	0,33	0,31	0,34	0,31	0,32
3	Sumatera Barat	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
4	Riau	0,38	0,37	0,35	0,33	0,35	0,33
5	Jambi	0,34	0,34	0,35	0,33	0,34	0,32
6	Sumatera Selatan	0,38	0,33	0,36	0,37	0,34	0,33
7	Bengkulu	0,36	0,37	0,35	0,35	0,36	0,34
8	Lampung	0,33	0,35	0,36	0,33	0,33	0,33
9	Kep. Bangka Belitung	0,30	0,28	0,29	0,28	0,27	0,27
10	Kep. Riau	0,44	0,34	0,35	0,36	0,34	0,34
11	DKI Jakarta	0,44	0,42	0,40	0,41	0,39	0,39
12	Jawa Barat	0,40	0,42	0,40	0,39	0,41	0,40
13	Jawa Tengah	0,39	0,38	0,36	0,37	0,36	0,36
14	DI Yogyakarta	0,44	0,42	0,43	0,44	0,42	0,42
15	Jawa Timur	0,40	0,40	0,40	0,42	0,37	0,37
16	Banten	0,42	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37
17	Bali	0,44	0,40	0,37	0,38	0,36	0,37
18	Nusa Tenggara Barat	0,39	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
20	Kalimantan Barat	0,40	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
21	Kalimantan Tengah	0,37	0,30	0,35	0,33	0,34	0,34
22	Kalimantan Selatan	0,33	0,33	0,35	0,35	0,34	0,33
23	Kalimantan Timur	0,36	0,32	0,33	0,33	0,34	0,33
24	Kalimantan Utara	-	0,33	0,31	0,31	0,30	0,30
25	Sulawesi Utara	0,44	0,37	0,36	0,39	0,37	0,37
26	Sulawesi Tengah	0,35	0,37	0,35	0,35	0,32	0,33
27	Sulawesi Selatan	0,45	0,40	0,40	0,43	0,39	0,39
28	Sulawesi Tenggara	0,40	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40
29	Gorontalo	0,45	0,40	0,41	0,41	0,42	0,41
30	Sulawesi Barat	0,38	0,38	0,37	0,34	0,37	0,37
31	Maluku	0,33	0,34	0,34	0,32	0,33	0,32
32	Maluku Utara	0,32	0,29	0,31	0,33	0,34	0,31
33	Papua Barat	0,41	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39
34	Papua	0,46	0,39	0,48	0,40	0,40	0,39
	Indonesia	**0,41**	**0,40**	**0,39**	**0,39**	**0,38**	**0,38**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Keterangan : Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menyatakan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan, nilai koefisien adalah 0 - 1
Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang

KEMENKES RI

Lampiran 3.g

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN TIPE DAERAH MARET 2019

No	Kelompok Barang	Persentase (%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	4,27	8,17	5,57
2	Umbi-umbian	0,37	0,77	0,51
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,51	4,63	3,89
4	Daging	2,14	2,11	2,13
5	Telur dan susu	2,81	2,73	2,78
6	Sayur-sayuran	2,76	4,23	3,25
7	Kacang-kacangan	0,86	1,17	0,97
8	Buah-buahan	2,30	2,46	2,36
9	Minyak dan kelapa	0,94	1,52	1,13
10	Bahan minuman	1,18	1,97	1,44
11	Bumbu-bumbuan	0,80	1,18	0,93
12	Bahan Makanan Lainnya	0,77	1,04	0,86
13	Makanan dan minuman Jadi	18,09	15,6	17,26
14	Rokok dan Tembakau	5,07	8,00	6,05
	Makanan	**45,90**	**55,59**	**49,14**
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	27,24	22,00	25,49
16	Aneka barang dan jasa	13,55	10,11	12,40
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	3,00	3,09	3,03
18	Barang tahan lama	5,14	4,85	5,04
19	Pajak, pungutan dan asuransi	3,20	2,64	3,01
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1,98	1,71	1,89
	Bukan Makanan	**54,10**	**44,41**	**50,86**
	Total Pengeluaran	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (Susenas Maret 2019)

KEMENKES RI

Lampiran 3.b

RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	Aneka komoditas dan jasa	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	Komoditas tahan lama	Pajak, pungutan dan asuransi	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	287.175	101.457	47.621	35.630	32.786	9.465	434.134
2	Sumatera Utara	237.309	129.397	38.020	36.550	34.446	11.919	487.641
3	Sumatera Barat	242.366	133.856	51.197	73.395	35.461	19.406	555.621
4	Riau	308.663	138.213	46.240	63.266	35.498	19.618	611.498
5	Jambi	259.744	109.477	41.767	50.175	29.430	17.852	508.445
6	Sumatera Selatan	242.911	104.738	27.567	39.354	28.954	16.365	459.889
7	Bengkulu	269.318	129.660	39.054	62.017	32.767	21.111	553.927
8	Lampung	218.527	102.127	32.130	49.176	26.915	15.349	444.224
9	Kepulauan Bangka Belitung	385.154	155.458	49.748	107.201	46.228	14.544	758.333
10	Kepulauan Riau	512.148	255.163	57.469	83.261	61.347	19.704	989.092
11	DKI Jakarta	726.430	311.237	57.931	75.992	73.521	33.584	1.278.665
12	Jawa Barat	316.857	161.569	37.731	68.203	34.178	26.598	637.136
13	Jawa Tengah	214.255	127.220	27.262	64.720	29.259	23.966	486.902
14	DI Yogyakarta	344.935	223.712	35.151	106.507	46.893	36.004	793.282
15	Jawa Timur	262.095	135.453	28.706	54.992	31.415	20.624	533.285
16	Banten	382.433	173.590	41.930	58.813	42.535	24.758	724.059
17	Bali	405.995	163.394	24.827	68.178	52.929	62.650	777.872
18	Nusa Tenggara Barat	225.894	118.188	33.042	71.892	27.402	14.049	489.587
19	Nusa Tenggara Timur	178.219	78.455	17.519	28.959	28.177	5.967	321.196
20	Kalimantan Barat	287.662	112.994	29.942	46.429	29.195	13.006	519.228
21	Kalimantan Tengah	347.001	134.856	31.294	65.747	37.018	20.526	636.442
22	Kalimantan Selatan	304.279	141.741	39.190	81.004	34.159	21.087	621.460
23	Kalimantan Timur	484.354	203.394	42.461	78.976	55.068	28.254	893.217
24	Kalimantan Utara	417.915	172.286	39.300	50.364	45.119	12.703	738.195
25	Sulawesi Utara	277.565	142.884	43.796	62.530	36.983	18.969	582.727
26	Sulawesi Tengah	247.717	108.292	32.692	49.608	30.826	17.817	478.032
27	Sulawesi Selatan	253.848	109.234	37.976	69.705	36.596	27.131	534.484
28	Sulawesi Tenggara	278.812	110.027	34.851	71.560	34.903	15.841	546.074
29	Gorontalo	275.787	124.988	39.220	50.842	33.560	17.501	549.906
30	Sulawesi Barat	190.471	77.761	27.418	60.388	26.732	12.816	395.586
31	Maluku	283.222	116.831	27.949	32.105	22.536	13.179	495.822
32	Maluku Utara	301.822	114.786	30.529	24.671	41.654	8.377	511.839
33	Papua Barat	397.828	166.816	29.588	49.809	38.662	18.141	780.836
34	Papua	341.191	119.407	24.358	31.837	21.674	10.959	549.426
	Indonesia	**297.019**	**144.517**	**35.303**	**58.764**	**35.091**	**21.996**	**592.690**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (Sesuai, Maret 2019)

KEMENKES RI

Lampiran 3.1

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Februari		Agustus		Februari		Agustus		Februari		Agustus	
		Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)	Jumlah	TPT (%)
1	Aceh	172.107	7,39	151.262	6,57	154.128	6,59	149.723	6,36	136.076	5,98	146.421	6,30
2	Sumatera Utara	439.297	6,61	371.290	5,60	403.959	5,99	396.027	5,84	416.216	5,96	382.686	5,41
3	Sumatera Barat	151.900	5,96	138.714	5,56	132.241	5,15	141.660	5,51	142.264	5,49	138.629	5,31
4	Riau	180.237	5,56	184.544	6,22	188.812	5,92	192.891	6,00	203.890	6,27	196.143	5,97
5	Jambi	65.799	3,67	64.829	3,57	67.466	3,65	65.071	3,46	64.670	3,42	72.987	4,19
6	Sumatera Selatan	161.332	5,80	185.122	6,59	175.658	6,02	175.307	6,03	173.038	5,86	192.916	6,48
7	Bengkulu	29.022	2,91	34.279	3,36	27.944	2,76	35.041	3,51	28.014	2,70	34.699	3,29
8	Lampung	189.062	6,93	176.257	6,34	190.442	6,93	171.089	6,06	174.509	6,09	171.850	6,02
9	Kep. Bangka Belitung	32.591	4,60	26.799	3,70	27.347	3,81	26.252	3,65	24.977	3,29	26.071	3,43
10	Kepulauan Riau	67.796	6,44	69.160	7,16	68.259	6,41	69.112	7,22	66.227	6,81	69.479	6,91
11	DKI Jakarta	292.793	5,35	346.945	6,34	298.218	5,34	314.641	6,24	279.588	5,12	329.901	6,21
12	Jawa Barat	1.921.907	8,99	1.859.420	8,57	1.877.615	8,56	1.846.234	8,57	1.841.756	7,79	1.991.488	7,99
13	Jawa Tengah	733.495	4,13	833.938	4,77	771.084	4,23	814.347	4,51	785.748	4,22	839.303	4,50
14	DI Yogyakarta	69.037	2,84	84.219	3,52	83.603	3,46	73.330	3,05	82.891	3,46	90.270	3,74
15	Jawa Timur	853.747	4,10	838.496	4,00	895.445	4,31	850.474	4,09	826.264	3,83	943.734	4,32
16	Banten	462.321	7,73	529.362	8,28	472.724	7,77	496.732	8,02	463.867	7,58	490.806	8,01
17	Bali	23.630	2,29	36.143	3,49	22.345	2,12	34.405	3,27	30.242	2,79	37.551	3,52
18	Nusa Tenggara Barat	87.224	3,86	79.449	3,52	83.210	3,70	83.257	3,72	81.295	3,57	94.316	3,82
19	Nusa Tenggara Timur	85.248	3,21	98.148	3,77	76.326	2,90	88.280	3,01	78.329	3,10	89.635	3,72
20	Kalimantan Barat	105.829	4,22	105.061	4,26	106.340	4,13	104.318	4,08	106.390	4,19	110.272	4,41
21	Kalimantan Tengah	42.965	3,11	33.962	2,53	44.434	3,19	54.199	4,01	47.189	3,33	36.790	2,71
22	Kalimantan Selatan	75.925	3,53	88.956	4,17	84.870	3,96	95.229	4,50	78.726	3,55	95.730	4,31
23	Kalimantan Timur	142.617	8,51	119.289	8,91	125.167	6,99	114.111	6,46	126.329	6,84	116.374	6,29
24	Kalimantan Utara	16.774	5,17	18.111	5,54	16.272	4,88	17.797	5,22	23.693	6,80	15.380	4,40
25	Sulawesi Utara	27.056	4,12	46.483	7,10	24.509	3,69	30.664	4,56	24.107	3,57	25.481	4,23
26	Sulawesi Tengah	46.317	2,97	54.369	3,81	50.082	3,19	57.481	3,61	54.942	3,54	66.902	3,93
27	Sulawesi Selatan	190.431	4,71	213.695	5,61	224.805	5,59	213.105	5,34	223.283	5,62	230.264	5,97
28	Sulawesi Tenggara	39.564	3,14	39.631	3,30	35.894	2,79	40.724	3,26	38.592	2,96	45.292	3,59
29	Gorontalo	21.524	3,65	23.450	3,29	22.551	3,62	23.387	4,03	21.850	3,47	23.869	4,06
30	Sulawesi Barat	19.332	2,98	19.744	3,21	16.244	2,48	20.227	3,16	9.682	1,81	23.004	3,58
31	Maluku	36.785	5,27	45.735	6,29	56.958	7,98	54.891	7,27	52.421	6,91	54.373	7,08
32	Maluku Utara	36.099	6,82	29.516	5,53	27.369	4,63	25.891	4,77	27.731	5,09	27.603	4,97
33	Papua Barat	31.219	7,52	27.912	6,69	24.129	5,67	29.066	6,59	24.322	5,28	28.644	6,24
34	Papua	69.868	3,96	63.739	3,62	53.958	2,91	58.756	3,20	61.860	3,42	67.173	3,69
	Indonesia	7.005.242	5,33	7.044.333	5,34	6.871.264	5,13	7.000.691	5,24	6.872.868	5,02	7.045.764	5,28

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 3.1

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
1	Aceh	9,79	9,40	9,59
2	Sumatera Utara	9,88	9,55	9,71
3	Sumatera Barat	9,19	9,25	9,22
4	Riau	9,52	9,17	9,35
5	Jambi	9,17	8,54	8,86
6	Sumatera Selatan	8,81	8,39	8,60
7	Bengkulu	9,28	8,87	9,08
8	Lampung	8,61	8,10	8,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,54	8,14	8,35
10	Kepulauan Riau	10,25	10,00	10,13
11	DKI Jakarta	11,46	10,82	11,11
12	Jawa Barat	9,15	8,46	8,79
13	Jawa Tengah	8,45	7,63	8,03
14	DI Yogyakarta	10,23	9,44	9,83
15	Jawa Timur	8,58	7,67	8,11
16	Banten	9,43	8,71	9,07
17	Bali	9,87	8,50	9,19
18	Nusa Tenggara Barat	8,58	7,43	7,98
19	Nusa Tenggara Timur	8,20	7,76	7,99
20	Kalimantan Barat	8,13	7,48	7,80
21	Kalimantan Tengah	9,07	8,57	8,83
22	Kalimantan Selatan	8,96	8,22	8,59
23	Kalimantan Timur	10,17	9,56	9,88
24	Kalimantan Utara	9,58	8,96	9,24
25	Sulawesi Utara	9,58	8,69	9,13
26	Sulawesi Tengah	9,11	8,54	8,98
27	Sulawesi Selatan	8,91	8,56	8,73
28	Sulawesi Tenggara	9,54	8,97	9,25
29	Gorontalo	7,80	8,43	8,14
30	Sulawesi Barat	8,37	8,08	8,22
31	Maluku	10,11	9,95	10,03
32	Maluku Utara	9,59	9,04	9,32
33	Papua Barat	10,24	9,52	9,92
34	Papua	7,45	6,18	6,85
Indonesia		**9,08**	**8,42**	**8,75**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 3.6

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2015 - 2019

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	98,75	99,02	99,02	98,99	99,03	96,53	96,51	96,89	97,09	97,41	97,63	97,74	97,94	98,03	98,21
2	Sumatera Utara	99,[illegible]	99,39	99,45	99,53	99,60	98,04	98,08	98,34	98,61	98,70	98,68	98,88	98,89	99,07	99,15
3	Sumatera Barat	99,29	99,37	99,47	99,46	99,48	97,80	98,27	98,25	98,69	98,87	98,56	98,81	98,85	99,07	99,17
4	Riau	99,55	99,56	99,53	99,55	99,53	98,16	98,56	98,79	98,88	98,88	98,87	99,07	99,17	99,20	99,21
5	Jambi	98,88	98,87	98,94	99,00	99,16	96,75	97,11	97,21	97,17	97,21	97,84	98,01	98,09	98,15	98,20
6	Sumatera Selatan	98,90	99,37	99,32	99,29	99,22	97,52	97,53	97,74	98,00	98,29	98,22	98,46	98,54	98,66	98,76
7	Bengkulu	98,94	99,07	99,06	99,06	99,11	96,27	96,37	96,79	96,82	96,86	97,63	97,75	97,90	97,91	98,01
8	Lampung	98,41	98,88	98,81	98,83	98,85	94,89	95,42	95,80	95,87	95,72	96,67	96,78	96,89	96,93	97,11
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,03	99,06	99,05	98,54	98,99	96,78	96,35	96,64	96,91	97,11	97,63	97,66	97,79	97,76	98,09
10	Kepulauan Riau	99,04	99,20	99,36	99,25	99,18	98,53	98,48	98,27	98,46	98,62	98,59	98,84	98,83	98,87	99,00
11	DKI Jakarta	98,84	99,05	99,05	99,09	99,11	96,33	99,43	99,59	99,55	99,57	99,59	99,64	99,67	99,72	99,74
12	Jawa Barat	98,00	98,91	99,02	99,14	99,14	97,14	97,51	97,43	97,81	97,90	98,01	98,22	98,23	98,48	98,53
13	Jawa Tengah	94,36	94,33	96,40	94,52	96,59	90,91	90,38	90,50	90,69	90,90	93,12	93,30	93,39	93,45	93,54
14	DI Yogyakarta	97,35	97,21	97,34	97,09	97,87	91,70	92,07	92,05	92,69	92,58	94,50	94,59	94,64	94,83	94,96
15	Jawa Timur	94,94	94,93	95,00	94,99	95,23	88,17	88,44	88,78	88,85	89,53	91,47	91,59	91,82	91,85	92,32
16	Banten	98,57	98,67	98,76	98,85	98,87	94,14	94,38	94,33	94,34	94,32	97,37	97,55	97,57	97,62	97,62
17	Bali	90,82	94,37	96,4	96,49	97,38	88,94	89,23	89,39	89,48	91,66	92,77	92,83	92,90	92,90	94,53
18	Nusa Tenggara Barat	92,84	91,12	91,07	91,86	92,12	83,50	83,47	83,59	83,42	83,49	86,97	87,06	87,14	87,42	87,59
19	Nusa Tenggara Timur	95,41	93,16	93,23	93,3	94,66	90,12	89,87	90,31	90,57	91,87	91,45	91,52	91,68	91,90	93,24
20	Kalimantan Barat	99,26	95,74	95,34	95,50	96,24	89,10	88,93	89,51	89,48	90,20	92,32	92,39	92,48	92,58	93,25
21	Kalimantan Tengah	99,23	99,52	99,53	99,48	99,54	98,85	98,36	98,56	98,91	98,86	98,88	98,97	99,08	99,21	99,22
22	Kalimantan Selatan	99,20	99,33	99,26	99,19	99,23	97,17	97,22	97,52	97,63	97,76	98,21	98,28	98,40	98,42	98,50
23	Kalimantan Timur	98,66	99,32	99,50	99,34	99,28	98,12	98,25	98,36	98,53	98,75	98,69	98,82	98,96	98,96	99,03
24	Kalimantan Utara	99,69	95,95	96,22	96,01	97,41	93,00	94,01	93,88	94,21	95,22	94,99	95,05	95,14	95,18	96,34
25	Sulawesi Utara	99,69	99,87	99,77	99,85	99,76	99,56	99,71	99,74	99,82	99,81	99,63	99,79	99,76	99,87	99,80
26	Sulawesi Tengah	98,24	98,11	98,29	98,3	98,54	96,41	96,88	97,07	97,22	97,20	97,34	97,51	97,69	97,87	98,22
27	Sulawesi Selatan	93,26	93,59	93,36	93,56	94,16	89,47	89,63	90,06	90,19	90,87	91,29	91,52	91,65	91,81	92,45
28	Sulawesi Tenggara	96,57	96,52	96,45	96,44	96,88	91,69	91,97	92,24	92,51	92,90	94,10	94,25	94,32	94,46	94,91
29	Gorontalo	98,02	98,49	98,33	98,48	98,91	98,45	98,39	98,55	98,77	98,60	98,24	98,44	98,44	98,63	98,75
30	Sulawesi Barat	94,44	94,22	93,8	94,49	94,75	90,88	91,31	91,72	91,23	92,45	92,64	92,75	92,79	92,85	93,59
31	Maluku	99,31	99,27	99,46	99,4	99,50	98,39	98,61	98,80	99,03	99,28	98,85	98,94	99,13	99,22	99,39
32	Maluku Utara	99,08	99,11	99,29	99,34	99,26	97,87	98,29	98,04	98,16	98,36	98,49	98,67	98,68	98,76	98,79
33	Papua Barat	98,07	98,00	98,10	98,28	98,63	95,50	95,97	95,89	96,34	96,78	96,88	97,03	97,16	97,37	97,72
34	Papua	75,59	76,72	79,22	81,69	82,36	65,47	64,60	67,86	71,26	71,07	70,81	71,02	73,89	76,79	78,00
	Indonesia	97,33	97,17	97,35	97,33	97,48	92,34	92,29	92,76	93,99	94,33	95,22	95,38	95,58	95,66	95,97

KEMENKES RI

Lampiran 3.1

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	2017				2018				2019			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
1	Aceh	99,85	98,09	82,15	34,20	99,86	98,49	82,92	32,59	99,75	98,52	83,26	32,54
2	Sumatera Utara	99,49	96,60	78,76	26,80	99,50	96,75	77,41	25,31	99,41	96,89	77,67	25,25
3	Sumatera Barat	99,50	96,29	82,86	35,45	99,51	96,37	83,08	33,87	99,52	96,23	83,63	35,66
4	Riau	98,98	94,78	76,52	27,28	99,07	94,95	77,27	27,19	98,86	95,37	77,29	28,16
5	Jambi	99,59	95,89	71,54	24,12	99,67	96,14	71,94	22,16	99,70	96,42	71,97	23,32
6	Sumatera Selatan	99,63	94,81	69,05	19,17	99,71	94,41	69,65	17,15	99,71	94,51	70,29	18,07
7	Bengkulu	99,08	97,20	79,07	29,90	99,07	97,36	79,33	29,15	99,77	97,18	79,39	30,71
8	Lampung	99,78	94,76	70,03	20,96	99,86	95,00	70,82	20,60	99,80	94,89	71,05	20,69
9	Kep. Bangka Belitung	99,64	92,41	66,99	14,99	99,85	92,70	67,11	15,99	99,76	92,67	67,79	17,01
10	Kep. Riau	99,33	99,08	82,80	35,13	99,52	99,20	83,78	38,24	99,48	98,50	84,04	38,98
11	DKI Jakarta	99,67	97,64	71,80	24,60	99,77	97,77	71,81	24,41	99,63	98,33	72,01	24,32
12	Jawa Barat	99,51	93,77	66,62	21,50	99,52	94,15	67,17	21,96	99,53	94,10	67,29	22,71
13	Jawa Tengah	99,62	95,48	68,48	22,13	99,76	95,79	69,82	21,42	99,77	96,11	69,65	22,41
14	DI Yogyakarta	99,87	99,63	87,61	37,81	99,90	99,72	88,39	51,69	99,90	99,56	88,97	51,85
15	Jawa Timur	99,57	96,77	71,51	23,74	99,62	97,02	72,10	22,86	99,65	97,43	72,74	24,80
16	Banten	99,31	95,67	67,77	21,33	99,39	95,79	68,35	20,42	99,44	95,79	68,72	21,43
17	Bali	99,44	97,72	82,16	26,56	99,56	97,92	82,35	27,24	99,74	97,72	82,83	27,86
18	Nusa Tenggara Barat	99,43	97,69	76,61	28,52	99,43	97,72	76,89	25,74	99,46	97,92	77,51	25,59
19	Nusa Tenggara Timur	98,27	94,76	74,65	27,80	98,28	94,95	74,03	28,27	98,47	95,11	75,36	29,27
20	Kalimantan Barat	98,84	93,51	67,53	25,88	98,43	92,84	68,32	23,06	98,52	92,85	68,37	23,69
21	Kalimantan Tengah	99,50	93,37	66,62	24,15	99,68	93,87	66,95	24,27	99,66	94,09	66,95	23,88
22	Kalimantan Selatan	99,33	92,33	68,30	23,53	99,64	92,43	68,66	23,82	99,53	92,83	69,19	24,34
23	Kalimantan Timur	99,67	98,79	81,32	30,04	99,76	98,89	81,57	29,86	99,68	98,83	81,81	29,89
24	Kalimantan Utara	98,34	96,04	75,12	30,72	98,24	96,30	75,62	23,04	98,82	96,58	76,06	23,11
25	Sulawesi Utara	99,37	94,91	73,04	24,22	99,36	95,00	73,57	21,43	99,39	95,18	74,04	22,53
26	Sulawesi Tengah	98,15	92,41	74,87	26,31	98,24	92,74	75,05	27,15	98,46	93,01	75,73	27,39
27	Sulawesi Selatan	99,16	93,09	70,60	32,16	99,23	93,13	70,91	33,72	99,23	93,22	70,85	34,44
28	Sulawesi Tenggara	99,32	94,00	72,94	30,03	99,28	94,29	73,47	30,01	99,13	94,78	74,03	31,27
29	Gorontalo	98,76	91,23	69,08	29,21	98,76	91,38	70,75	30,58	98,96	91,64	71,44	30,97
30	Sulawesi Barat	98,10	89,80	68,03	23,49	98,25	89,95	68,69	24,18	98,34	89,92	69,31	23,64
31	Maluku	99,72	96,86	79,98	30,28	99,71	97,05	79,12	27,92	99,61	97,29	79,65	28,58
32	Maluku Utara	99,19	97,24	78,06	32,10	99,08	97,47	76,36	31,34	98,97	96,97	76,41	31,23
33	Papua Barat	97,27	96,92	80,60	31,92	97,31	97,08	80,81	30,84	97,68	96,58	81,49	31,68
34	Papua	81,80	79,09	63,35	24,97	82,43	80,00	63,48	23,37	82,67	80,13	63,50	22,91
	Indonesia	**99,14**	**95,88**	**71,42**	**24,77**	**99,22**	**95,36**	**71,99**	**24,40**	**99,24**	**95,51**	**72,36**	**25,21**

Sumber : Susenas Maret Nasional, 2019

Keterangan : APS tahun 2013 - 2015 dihitung sesuai dengan rentang penduduk yang digunakan pemerintah pada periode tersebut

KEMENKES RI

Lampiran 3.xx

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
1	Aceh	99,02	97,88	82,62	31,23	99,67	99,17	83,91	33,89	99,35	98,52	83,26	32,54
2	Sumatera Utara	99,39	95,82	74,82	24,73	99,43	98,02	80,74	26,79	99,41	96,89	77,67	25,73
3	Sumatera Barat	99,55	94,47	78,78	24,29	99,58	97,90	80,50	27,13	99,57	96,23	80,01	25,66
4	Riau	99,38	94,57	75,14	25,91	99,37	96,16	79,66	30,54	99,36	95,37	77,29	28,16
5	Jambi	99,59	96,04	77,68	23,82	99,81	96,77	72,92	23,64	99,70	96,42	75,97	23,72
6	Sumatera Selatan	99,71	93,64	68,91	18,33	99,71	95,47	71,81	17,78	99,71	94,54	70,29	18,07
7	Bengkulu	99,86	96,39	77,09	30,08	99,69	98,08	81,87	31,43	99,77	97,19	79,39	30,72
8	Lampung	99,65	95,55	68,87	20,15	99,90	96,39	73,94	21,16	99,80	94,89	71,05	20,68
9	Kep. Bangka Belitung	99,61	92,19	65,37	13,95	99,91	93,60	76,30	19,27	99,76	92,87	67,79	17,55
10	Kepulauan Riau	99,43	98,32	83,83	37,45	99,52	98,69	84,30	39,32	99,48	98,50	84,04	38,39
11	DKI Jakarta	99,09	96,97	72,86	24,72	99,96	98,68	71,20	24,27	99,63	98,33	72,01	24,52
12	Jawa Barat	99,37	93,29	67,57	21,85	99,69	95,14	66,98	22,89	99,53	94,18	67,28	22,71
13	Jawa Tengah	99,75	95,52	68,26	20,43	99,79	96,74	71,09	21,87	99,77	96,11	69,65	21,41
14	DI Yogyakarta	99,86	99,51	97,06	53,81	99,93	99,09	90,09	49,00	99,90	99,56	88,97	51,85
15	Jawa Timur	99,67	97,24	71,87	24,91	99,84	97,65	73,66	24,69	99,65	97,43	72,74	24,80
16	Banten	99,27	94,96	68,85	19,71	99,71	96,69	68,58	23,22	99,84	95,79	68,72	21,43
17	Bali	99,07	97,63	83,96	28,89	99,84	97,81	82,29	26,75	99,74	97,72	83,83	27,86
18	Nusa Tenggara Barat	99,38	98,23	78,48	28,74	99,81	97,55	76,51	27,91	99,66	97,92	77,51	25,69
19	Nusa Tenggara Timur	98,07	93,47	73,64	29,47	98,88	96,60	77,19	29,96	98,47	95,11	75,36	29,27
20	Kalimantan Barat	98,39	93,16	67,92	23,59	98,86	92,55	68,83	23,60	98,62	92,85	68,37	23,59
21	Kalimantan Tengah	99,57	94,37	65,59	26,50	99,76	93,79	68,42	31,24	99,66	94,09	66,95	28,98
22	Kalimantan Selatan	99,55	92,23	67,96	23,89	99,52	93,30	73,41	24,80	99,53	92,80	69,19	24,34
23	Kalimantan Timur	99,68	96,23	82,07	27,99	99,87	94,21	81,52	32,16	99,80	95,83	81,81	29,84
24	Kalimantan Utara	99,32	95,24	77,90	23,82	99,52	97,08	76,83	22,32	99,82	96,50	76,86	23,21
25	Sulawesi Utara	99,15	94,19	73,83	21,14	99,64	96,23	77,37	24,80	99,29	95,10	74,84	22,53
26	Sulawesi Tengah	98,00	91,08	73,36	27,02	98,82	94,99	76,68	27,77	98,40	93,01	75,73	27,39
27	Sulawesi Selatan	98,87	92,62	68,75	20,80	99,61	93,85	72,59	28,14	99,23	93,23	70,85	24,44
28	Sulawesi Tenggara	98,86	94,28	71,82	29,91	99,41	95,34	76,81	32,67	99,13	94,78	74,38	31,27
29	Gorontalo	98,71	90,24	68,47	29,66	99,20	93,24	79,27	32,25	98,96	91,64	73,44	30,97
30	Sulawesi Barat	97,66	87,61	64,53	24,82	99,01	92,48	74,62	32,42	98,34	89,92	69,31	28,64
31	Maluku	99,59	96,63	78,41	36,23	99,63	97,98	81,08	35,26	99,61	97,29	79,65	36,18
32	Maluku Utara	98,89	96,34	75,08	28,35	99,05	97,60	78,96	34,43	98,97	96,97	76,91	31,25
33	Papua Barat	97,81	97,76	80,59	30,67	97,36	97,48	82,53	31,34	97,58	96,59	81,49	31,40
34	Papua	82,56	79,30	65,74	25,08	82,79	81,10	67,14	25,38	82,67	80,13	63,50	22,91
Indonesia		99,12	94,79	71,27	24,81	99,35	96,26	73,41	25,62	99,24	95,51	72,36	25,21

Sumber : Susenas Kor Maret, 2019 (Diolah)

KEMENKES RI

Lampiran 2.a

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019

No	Provinsi	2015			2016			2017			2018			2019		
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	113,36	97,80	81,53	111,26	89,15	87,47	110,31	98,74	87,32	113,03	99,30	84,80	109,93	97,42	90,09
2	Sumatera Utara	112,62	95,81	84,21	110,89	90,71	93,26	109,50	96,74	93,64	111,16	99,98	91,57	109,49	96,98	94,04
3	Sumatera Barat	113,25	90,94	81,42	110,89	91,05	84,79	110,46	96,40	88,39	110,99	90,81	82,97	109,31	91,41	88,06
4	Riau	110,46	94,24	76,16	110,04	93,84	78,30	108,30	92,40	85,05	106,92	94,10	83,87	106,82	93,95	84,17
5	Jambi	111,99	91,78	76,12	111,97	91,72	80,36	112,40	86,37	81,34	111,96	87,53	78,91	111,23	87,31	81,56
6	Sumatera Selatan	114,47	93,56	73,18	114,23	88,54	82,51	112,14	89,09	83,44	114,14	86,51	77,80	113,30	86,57	80,85
7	Bengkulu	110,26	98,79	82,79	111,31	94,38	85,56	112,71	90,32	87,10	113,53	92,09	85,57	109,99	89,50	95,89
8	Lampung	113,89	106,03	73,90	111,44	97,18	82,98	109,57	91,04	85,14	110,13	94,28	81,56	107,26	91,11	85,73
9	Kep. Bangka Belitung	111,03	87,46	76,81	111,75	84,50	75,10	110,50	84,53	82,80	111,15	86,93	82,21	108,44	85,34	97,11
10	Kep. Riau	108,27	92,98	95,29	108,36	90,40	89,47	106,02	90,65	95,79	107,30	92,44	90,99	107,64	92,82	86,40
11	DKI Jakarta	105,26	88,35	76,35	104,32	87,09	82,09	103,37	93,88	79,51	105,27	94,91	73,96	104,83	93,02	74,77
12	Jawa Barat	109,42	90,07	70,23	108,09	89,28	79,58	107,54	88,00	76,40	106,29	89,96	75,31	105,52	90,73	77,02
13	Jawa Tengah	110,56	91,40	82,15	109,46	89,96	86,27	108,44	91,09	84,55	108,16	91,96	84,15	107,74	91,79	88,70
14	DI Yogyakarta	106,69	97,08	82,64	105,75	93,31	91,87	106,29	94,77	91,30	105,84	86,89	87,43	106,18	95,06	89,07
15	Jawa Timur	108,64	91,23	80,01	108,17	92,34	83,23	106,79	91,22	91,43	106,69	94,91	79,21	105,56	94,24	84,80
16	Banten	112,07	92,27	69,76	109,05	92,17	71,69	109,56	91,14	75,89	109,56	91,71	71,70	107,91	91,61	72,62
17	Bali	105,00	94,92	86,61	104,97	96,19	84,91	104,91	96,29	90,04	103,02	96,14	87,74	103,52	97,26	87,96
18	Nusa Tenggara Barat	111,24	91,94	89,21	110,78	93,40	91,25	109,63	94,97	93,89	108,82	93,83	89,64	108,89	92,07	90,00
19	Nusa Tenggara Timur	115,46	88,56	71,54	114,12	89,56	79,54	114,05	91,22	78,61	116,56	88,21	77,81	114,91	87,82	84,61
20	Kalimantan Barat	114,81	82,30	81,86	113,75	79,79	87,05	113,26	83,28	82,40	116,97	83,04	79,25	112,50	83,26	82,40
21	Kalimantan Tengah	114,76	93,94	70,70	114,01	86,30	79,44	112,85	87,39	80,58	115,02	95,79	74,85	113,05	88,74	82,27
22	Kalimantan Selatan	111,14	82,81	73,88	111,63	85,29	74,88	110,50	85,20	77,44	110,23	86,17	75,60	108,69	83,83	78,86
23	Kalimantan Timur	112,61	97,50	90,35	110,04	93,20	95,38	108,07	93,96	99,51	108,02	92,17	96,08	106,94	93,03	94,96
24	Kalimantan Utara	101,06	100,48	83,77	103,96	96,60	89,85	103,86	98,52	87,60	102,51	102,93	89,23	101,17	98,25	87,81
25	Sulawesi Utara	113,23	91,56	96,30	110,35	89,50	86,32	108,76	89,22	91,51	109,02	88,47	82,25	108,12	89,22	86,66
26	Sulawesi Tengah	107,28	90,73	82,87	105,78	89,88	83,85	104,19	91,96	84,81	105,29	92,88	89,23	103,13	90,63	87,35
27	Sulawesi Selatan	112,23	89,36	78,93	109,71	89,26	83,04	109,63	89,97	85,14	110,28	86,97	81,74	108,86	84,22	86,79
28	Sulawesi Tenggara	113,56	87,95	81,59	109,96	86,76	81,81	112,10	88,86	84,21	110,81	85,23	84,83	109,25	85,34	86,81
29	Gorontalo	110,10	81,87	86,74	108,54	83,71	88,67	111,30	91,70	91,08	111,05	86,17	84,25	110,60	78,95	90,64
30	Sulawesi Barat	105,91	80,25	84,98	106,23	81,60	93,86	110,19	93,02	89,24	106,96	82,36	84,40	107,32	82,71	84,85
31	Maluku	112,89	88,92	91,13	110,39	90,61	92,12	112,07	94,89	89,71	112,25	91,58	87,35	112,19	90,60	95,29
32	Maluku Utara	113,41	93,90	94,61	113,70	89,13	93,67	113,14	87,95	91,56	113,74	91,18	89,04	109,73	86,03	93,17
33	Papua Barat	113,44	90,32	89,90	111,49	92,44	89,59	110,21	90,56	89,69	110,23	89,89	90,74	111,24	89,49	95,41
34	Papua	95,13	73,39	66,97	94,74	72,87	66,03	92,94	83,20	67,94	94,47	87,93	85,07	91,94	78,11	76,23
Indonesia		110,50	91,17	78,02	109,31	90,12	86,09	108,50	90,23	82,84	109,61	91,32	86,60	107,46	90,57	83,90

Sumber : Statistik Pusat Statistik, 2019

Keterangan : APK tahun 2015-2019 hasil olah dengan menggunakan angka penduduk tahun 2010-2035

KEMENKES RI

Lampiran 3.o

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/MI/Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	110,29	95,26	88,94	35,29	109,55	91,55	91,60	48,33	109,92	97,43	90,09	36,77
2	Sumatera Utara	110,00	91,95	83,24	25,15	108,98	88,73	90,44	28,33	109,49	90,30	94,04	25,70
3	Sumatera Barat	111,19	89,23	82,46	32,11	107,39	93,77	85,20	30,31	109,32	91,41	84,08	31,20
4	Riau	107,50	94,32	78,32	23,43	106,89	91,39	86,63	30,06	106,81	93,05	84,17	27,68
5	Jambi	111,55	97,02	82,45	23,58	110,64	87,55	79,37	27,96	111,11	97,31	82,56	25,79
6	Sumatera Selatan	113,28	87,46	78,29	26,18	113,31	86,34	83,74	21,89	113,30	86,92	80,85	20,91
7	Bengkulu	109,42	90,98	95,44	25,02	110,55	88,07	82,85	26,33	109,98	89,50	93,86	25,21
8	Lampung	107,24	87,38	84,81	16,64	107,40	95,31	86,62	20,03	107,36	91,31	85,73	18,39
9	Kep. Bangka Belitung	104,66	85,19	79,93	24,34	107,14	87,64	94,57	13,97	106,44	85,34	87,11	11,51
10	Kepulauan Riau	109,93	87,86	78,04	31,38	105,32	87,69	87,47	26,22	107,64	87,82	86,69	28,75
11	DKI Jakarta	103,78	90,92	76,19	31,01	103,95	91,12	73,49	32,69	104,03	91,02	74,71	31,87
12	Jawa Barat	105,05	92,10	76,98	19,97	106,24	89,56	79,46	22,31	105,52	90,75	77,82	21,15
13	Jawa Tengah	100,26	90,17	85,85	18,03	107,17	93,33	87,70	17,68	107,74	91,78	86,76	17,86
14	DI Yogyakarta	106,86	91,90	80,13	63,80	105,42	90,42	90,01	60,51	106,10	95,05	85,07	62,23
15	Jawa Timur	105,63	95,09	83,05	23,67	105,99	93,07	86,63	24,37	105,86	94,24	84,80	24,11
16	Banten	107,49	91,48	78,31	26,68	108,61	91,25	75,70	28,72	107,95	91,61	72,92	27,68
17	Bali	103,07	96,46	91,88	29,86	104,01	90,08	83,95	29,85	103,52	97,26	87,96	29,84
18	Nusa Tenggara Barat	106,06	92,78	93,94	26,97	108,14	91,29	89,74	24,40	108,50	92,87	90,86	25,76
19	Nusa Tenggara Timur	113,80	84,69	80,53	24,41	114,00	91,15	88,36	26,50	114,95	87,82	84,63	25,10
20	Kalimantan Barat	113,60	82,78	82,68	19,26	111,50	87,45	82,90	22,59	112,50	85,26	82,69	20,62
21	Kalimantan Tengah	110,43	87,50	82,38	22,93	109,66	90,08	82,22	19,29	110,05	88,74	82,37	21,18
22	Kalimantan Selatan	108,15	83,58	80,35	20,66	109,30	84,12	77,35	25,30	108,69	83,85	78,86	22,63
23	Kalimantan Timur	107,43	92,30	92,09	28,96	106,23	89,63	90,17	34,43	106,84	91,05	94,96	31,52
24	Kalimantan Utara	104,26	95,37	99,31	15,99	98,04	100,94	94,65	23,10	101,17	98,25	97,91	19,34
25	Sulawesi Utara	100,20	87,10	84,07	26,23	100,05	91,47	88,34	30,06	100,17	89,22	86,60	28,05
26	Sulawesi Tengah	106,51	90,91	78,10	31,68	103,70	90,36	96,21	33,46	105,13	90,63	87,35	32,07
27	Sulawesi Selatan	100,21	84,93	82,39	31,85	100,71	93,89	99,05	30,76	100,46	89,22	90,89	35,31
28	Sulawesi Tenggara	109,99	85,34	83,73	38,16	108,47	85,34	89,99	40,59	109,23	85,34	86,81	39,48
29	Gorontalo	111,74	78,24	79,19	28,07	110,00	79,64	95,27	32,95	110,89	78,95	88,64	30,73
30	Sulawesi Barat	107,00	83,62	74,42	25,24	106,84	81,71	94,64	24,96	107,32	82,71	84,19	25,07
31	Maluku	114,72	90,58	88,08	38,59	109,65	90,20	103,66	43,87	112,19	90,40	95,29	40,15
32	Maluku Utara	109,54	87,28	87,64	33,13	109,96	85,78	98,09	40,75	109,72	86,53	93,17	36,74
33	Papua Barat	114,00	87,84	89,62	30,29	108,48	89,20	104,21	28,37	111,24	88,49	96,81	29,37
34	Papua	91,98	77,65	84,06	18,49	91,91	78,63	88,19	16,87	91,94	78,13	76,53	17,73
	Indonesia	107,61	90,64	82,03	24,05	107,31	90,50	86,06	26,24	107,46	90,57	83,98	25,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (Susenas Maret 2019)

KEMENKES RI

Lampiran 3.p

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2015 - 2019

No	Provinsi	2015			2016			2017			2018			2019		
		SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SM/SMK/MA/Paket C
1	Aceh	97,95	80,21	60,02	98,14	85,73	70,09	98,54	86,91	70,15	99,10	86,39	70,24	99,13	89,48	74,20
2	Sumatera Utara	96,67	90,80	66,69	96,27	79,71	66,60	97,22	79,13	67,05	97,60	79,29	67,27	97,67	80,29	67,20
3	Sumatera Barat	93,13	73,00	64,56	96,84	74,19	67,12	98,84	76,47	67,34	99,06	77,39	67,48	98,67	79,01	69,31
4	Riau	96,53	78,33	62,98	96,79	78,03	65,79	97,06	78,07	63,02	97,26	79,22	63,47	97,53	79,94	63,02
5	Jambi	97,68	77,99	59,41	97,83	78,05	59,52	98,51	78,27	59,99	99,04	79,39	60,70	99,01	79,49	60,92
6	Sumatera Selatan	98,41	76,19	58,27	98,13	78,43	59,09	97,18	74,89	59,06	97,80	76,91	59,87	97,91	77,28	59,92
7	Bengkulu	98,19	76,88	64,91	98,12	77,52	61,25	98,69	77,80	62,13	98,62	78,60	61,45	98,64	78,97	61,23
8	Lampung	98,35	78,20	58,36	98,48	78,84	58,80	99,82	79,24	59,97	99,97	80,32	60,18	99,24	80,69	59,83
9	Kep. Bangka Belitung	94,99	73,42	57,92	96,91	77,21	57,23	97,92	73,66	57,69	97,71	72,96	57,06	97,73	74,22	58,41
10	Kep. Riau	98,68	83,77	73,23	98,82	80,96	71,78	98,85	84,28	72,88	99,22	84,34	72,90	99,23	85,54	72,97
11	DKI Jakarta	94,91	89,20	59,84	97,21	88,31	59,26	97,64	86,72	59,54	98,03	86,81	60,01	98,12	87,98	60,24
12	Jawa Barat	97,68	79,02	56,79	97,82	79,46	56,93	98,85	80,29	57,22	98,23	81,03	57,33	98,27	81,24	57,33
13	Jawa Tengah	98,27	79,64	58,27	98,09	78,84	58,44	97,15	79,73	59,29	97,75	79,91	59,31	97,77	79,84	59,30
14	DI Yogyakarta	99,23	85,86	68,66	99,21	85,87	68,96	99,29	86,05	69,64	99,09	85,65	70,33	99,23	84,84	70,44
15	Jawa Timur	97,28	81,16	60,31	97,49	81,05	60,77	97,77	81,52	61,49	97,99	81,98	61,51	98,01	82,84	61,77
16	Banten	96,98	79,04	57,84	97,32	79,09	57,03	97,16	80,59	57,88	97,97	80,91	58,72	97,98	82,83	58,80
17	Bali	95,44	84,79	71,03	95,75	84,89	71,71	96,84	85,32	72,90	96,73	86,05	73,69	96,81	86,71	73,92
18	Nusa Tenggara Barat	97,80	82,80	64,87	97,96	82,57	65,18	98,12	83,53	65,87	98,89	83,80	66,77	98,87	83,92	66,06
19	Nusa Tenggara Timur	94,00	66,32	53,51	94,24	66,96	53,87	94,66	67,16	53,31	96,11	68,14	53,67	96,24	69,17	53,68
20	Kalimantan Barat	95,89	84,55	59,92	96,23	84,69	59,83	96,60	85,19	59,96	97,84	85,91	59,56	97,69	86,89	59,82
21	Kalimantan Tengah	96,54	76,76	53,34	96,87	76,82	53,98	96,94	76,14	53,86	96,98	76,73	53,67	99,16	77,71	53,82
22	Kalimantan Selatan	97,73	72,53	59,28	98,85	73,79	59,91	97,46	73,97	59,33	98,99	73,84	57,79	98,83	74,84	57,82
23	Kalimantan Timur	97,16	79,06	61,78	97,13	79,20	67,91	97,41	79,56	68,23	98,46	79,69	68,43	98,41	80,42	68,59
24	Kalimantan Utara	91,83	72,35	62,94	92,58	77,46	64,80	92,44	77,98	65,13	92,72	78,20	64,09	93,33	78,82	64,39
25	Sulawesi Utara	92,97	75,92	62,23	94,11	75,11	62,50	94,44	75,87	62,81	94,91	76,18	62,83	94,91	78,30	62,98
26	Sulawesi Tengah	93,75	71,19	63,92	95,48	71,22	63,81	92,75	72,15	63,96	92,83	73,23	64,25	95,57	73,82	64,66
27	Sulawesi Selatan	96,48	73,92	59,47	96,09	73,67	59,92	97,93	74,98	59,89	98,03	75,13	60,01	98,09	75,85	60,13
28	Sulawesi Tenggara	96,13	75,43	60,23	96,21	75,14	60,60	96,62	76,44	60,77	97,91	78,68	62,87	97,93	76,90	62,92
29	Gorontalo	97,09	68,71	56,14	97,25	68,89	56,77	97,56	69,12	56,83	98,39	69,23	57,36	98,41	70,08	57,51
30	Sulawesi Barat	93,29	68,93	56,78	95,61	69,26	57,08	98,91	69,86	57,46	95,89	69,83	57,58	95,86	69,36	57,64
31	Maluku	94,29	73,29	63,67	96,30	73,66	63,49	95,56	73,89	63,69	97,08	74,08	63,68	96,23	74,69	64,23
32	Maluku Utara	96,68	75,08	63,39	96,75	75,68	63,43	97,01	76,06	63,52	97,98	76,81	63,88	97,09	76,29	63,95
33	Papua Barat	92,96	68,29	61,46	93,56	68,58	61,62	93,58	68,92	61,74	93,61	69,11	61,71	93,74	69,92	61,33
34	Papua	78,54	54,31	45,22	78,66	54,26	46,27	78,83	54,15	47,80	94,18	57,74	48,21	94,19	57,19	44,31
	Indonesia	**96,79**	**77,82**	**59,71**	**96,83**	**77,95**	**59,91**	**97,19**	**78,40**	**59,37**	**97,33**	**78,84**	**60,67**	**97,64**	**79,40**	**60,86**

Sumber : Susenas Kor, Maret, 2019

Keterangan : APM tahun 2015-2019 hitung sesuai dengan penyempurnaan definisi pendidikan sesuai kurikulum terbaru (2013)

KEMENKES RI

Lampiran 3.q

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2015-2019

No	Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019	
		IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
1	Aceh	69,81	13	70,00	11	70,60	11	71,19	11	71,90	11
2	Sumatera Utara	69,51	10	70,00	11	70,57	12	71,18	12	71,74	12
3	Sumatera Barat	69,36	9	70,73	9	71,24	9	71,73	9	72,29	9
4	Riau	70,84	6	71,20	6	71,79	6	72,44	6	73,00	6
5	Jambi	68,89	17	69,62	15	69,99	16	70,65	17	71,24	17
6	Sumatera Selatan	67,46	22	68,24	22	68,86	23	69,39	23	70,02	23
7	Bengkulu	68,59	16	69,33	17	69,95	18	70,64	18	71,21	18
8	Lampung	66,95	25	67,68	25	68,25	24	69,02	24	69,57	24
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,05	15	69,55	16	69,99	17	70,67	16	71,30	16
10	Kepulauan Riau	73,73	4	73,89	4	74,45	4	74,84	4	75,46	4
11	DKI Jakarta	78,99	1	79,60	1	80,06	1	80,47	1	80,76	1
12	Jawa Barat	69,50	11	70,05	10	70,69	10	71,30	10	72,03	10
13	Jawa Tengah	69,49	12	69,98	12	70,52	13	71,12	13	71,75	13
14	DI Yogyakarta	77,39	2	78,38	2	78,89	2	79,53	2	79,99	2
15	Jawa Timur	68,95	14	69,74	14	70,27	15	70,77	15	71,50	15
16	Banten	70,27	8	70,96	8	71,42	8	71,95	8	72,44	8
17	Bali	73,27	5	73,65	5	74,30	5	74,77	5	75,38	5
18	Nusa Tenggara Barat	65,19	30	65,81	29	66,50	29	67,30	29	68,14	29
19	Nusa Tenggara Timur	62,67	32	63,13	31	63,73	32	64,39	32	65,23	32
20	Kalimantan Barat	65,59	29	65,80	28	66,26	30	66,98	30	67,65	30
21	Kalimantan Tengah	68,53	21	69,13	20	69,79	21	70,42	21	70,91	21
22	Kalimantan Selatan	68,38	22	69,05	21	69,65	22	70,17	22	70,72	22
23	Kalimantan Timur	74,17	3	74,59	3	75,12	3	75,83	3	76,61	3
24	Kalimantan Utara	68,76	18	69,20	19	69,84	20	70,58	20	71,15	20
25	Sulawesi Utara	70,39	7	71,05	7	71,66	7	72,20	7	72,99	7
26	Sulawesi Tengah	66,76	26	67,47	25	68,11	26	68,98	25	69,50	25
27	Sulawesi Selatan	69,15	14	69,76	13	70,34	14	70,90	14	71,66	14
28	Sulawesi Tenggara	68,75	19	69,31	18	69,86	19	70,61	19	71,20	19
29	Gorontalo	65,86	28	66,29	27	67,01	28	67,71	28	68,49	28
30	Sulawesi Barat	62,96	31	63,60	30	64,30	31	65,10	31	65,73	31
31	Maluku	67,05	24	67,60	24	68,19	23	68,87	26	69,45	26
32	Maluku Utara	66,91	27	66,63	26	67,20	27	67,76	27	68,70	27
33	Papua Barat	61,73	33	62,21	33	62,99	33	63,74	33	64,70	33
34	Papua	57,25	34	58,05	34	59,09	34	60,06	34	60,84	34
Indonesia		69,55		70,18		70,81		71,39		71,92	

KEMENKES RI

Lampiran 2.c

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)		Capaian		Pertumbuhan
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	69,64	69,87	14,27	14,30	9,09	9,18	9.186	9.603	71,13	71,90	0,71
2	Sumatera Utara	68,61	68,95	13,14	13,15	9,34	9,45	10.391	10.649	71,18	71,74	0,56
3	Sumatera Barat	69,01	69,32	13,95	14,01	8,76	8,92	10.638	10.925	71,73	72,39	0,66
4	Riau	71,19	71,49	13,12	13,14	8,92	9,03	10.968	11.255	72,44	73,00	0,56
5	Jambi	70,89	71,08	12,90	12,91	8,23	8,45	10.257	10.592	70,55	71,26	0,61
6	Sumatera Selatan	69,41	69,65	12,36	12,39	8,00	8,19	10.852	10.937	69,39	70,02	0,63
7	Bengkulu	68,84	69,21	13,58	13,59	8,61	8,73	10.162	10.409	70,64	71,21	0,57
8	Lampung	70,18	70,53	12,61	12,63	7,83	7,92	9.858	10.114	69,02	69,57	0,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,18	70,50	12,87	12,94	7,84	7,98	12.068	12.959	70,67	71,30	0,63
10	Kepulauan Riau	69,64	69,80	12,82	12,83	9,81	9,99	13.976	14.466	74,84	75,48	0,64
11	DKI Jakarta	72,67	72,79	12,93	12,97	11,05	11,06	19.128	19.327	80,47	80,76	0,29
12	Jawa Barat	72,66	72,85	12,45	12,49	8,15	8,27	10.799	11.152	71,36	72,03	0,72
13	Jawa Tengah	74,39	74,23	12,63	12,64	7,35	7,53	10.777	11.102	71,12	71,73	0,61
14	DI Yogyakarta	74,82	74,92	15,54	15,58	9,32	9,39	13.946	14.394	79,53	79,99	0,46
15	Jawa Timur	70,97	71,18	13,10	13,14	7,39	7,59	11.388	11.739	70,77	71,50	0,73
16	Banten	69,66	69,84	12,85	12,89	8,65	8,74	11.994	12.267	71,95	72,44	0,49
17	Bali	71,68	71,95	13,23	13,27	8,65	8,84	13.884	14.146	74,77	75,38	0,61
18	Nusa Tenggara Barat	65,87	66,28	13,47	13,50	7,03	7,27	10.194	10.640	67,30	68,14	0,84
19	Nusa Tenggara Timur	64,38	64,85	12,16	12,19	7,40	7,55	7.546	7.769	64,29	65,23	0,94
20	Kalimantan Barat	70,18	70,56	12,53	12,58	7,12	7,31	8.860	9.055	66,90	67,65	0,67
21	Kalimantan Tengah	69,64	69,69	12,55	12,57	8,37	8,51	10.951	11.236	70,42	70,91	0,49
22	Kalimantan Selatan	68,23	68,49	12,50	12,52	8,20	8,30	10.692	10.953	70,17	70,72	0,55
23	Kalimantan Timur	73,96	74,22	13,67	13,69	9,48	9,70	11.917	12.359	75,83	76,61	0,78
24	Kalimantan Utara	72,50	72,54	12,92	12,94	8,87	8,94	9.643	9.948	70,56	71,15	0,59
25	Sulawesi Utara	71,26	71,38	12,68	12,73	9,24	9,43	10.731	11.115	72,20	72,99	0,79
26	Sulawesi Tengah	67,70	68,23	13,13	13,14	8,52	8,75	9.488	9.804	68,88	69,53	0,65
27	Sulawesi Selatan	70,09	70,43	13,34	13,36	8,02	8,26	10.814	11.118	70,90	71,66	0,76
28	Sulawesi Tenggara	70,72	70,97	13,53	13,55	8,89	8,91	9.292	9.436	70,61	71,22	0,59
29	Gorontalo	67,45	67,91	13,03	13,06	7,46	7,69	9.879	10.075	67,71	68,48	0,76
30	Sulawesi Barat	64,58	64,82	12,59	12,62	7,58	7,73	9.051	9.223	65,10	65,73	0,63
31	Maluku	69,59	69,82	13,92	13,94	9,56	9,81	8.721	8.947	68,87	69,45	0,58
32	Maluku Utara	67,86	68,18	13,62	13,63	8,73	9,00	7.988	8.308	67,76	68,70	0,94
33	Papua Barat	65,25	65,90	12,53	12,72	7,27	7,44	7.816	8.125	63,74	64,70	0,96
34	Papua	64,36	65,65	10,83	11,05	6,52	6,65	7.359	7.336	60,06	60,84	0,78
Indonesia		71,20	71,34	12,91	12,95	8,17	8,34	11.059	11.299	71,39	71,92	0,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (update Februari 2020)

KEMENKES RI

Lampiran 4.a

JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2015 - 2019

No.	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	339	340	341	348	359
2	Sumatera Utara	571	571	571	581	601
3	Sumatera Barat	264	264	269	275	275
4	Riau	212	213	215	216	228
5	Jambi	171	183	186	195	205
6	Sumatera Selatan	322	322	322	332	341
7	Bengkulu	180	180	180	180	179
8	Lampung	294	292	297	302	310
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	62	63	64	64
10	Kepulauan Riau	72	73	74	83	86
11	DKI Jakarta	340	340	340	321	315
12	Jawa Barat	1.050	1.050	1.056	1.069	1.072
13	Jawa Tengah	875	875	876	881	909
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	960	960	963	967	969
16	Banten	233	233	233	242	243
17	Bali	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	158	158	160	166	169
19	Nusa Tenggara Timur	371	371	372	381	402
20	Kalimantan Barat	238	238	241	244	246
21	Kalimantan Tengah	195	195	196	200	203
22	Kalimantan Selatan	230	230	230	233	235
23	Kalimantan Timur	174	175	179	183	196
24	Kalimantan Utara	49	49	49	56	55
25	Sulawesi Utara	187	188	189	193	195
26	Sulawesi Tengah	189	189	193	202	206
27	Sulawesi Selatan	448	448	451	458	459
28	Sulawesi Tenggara	269	269	274	284	290
29	Gorontalo	93	93	93	93	93
30	Sulawesi Barat	94	94	94	94	95
31	Maluku	199	199	199	208	209
32	Maluku Utara	127	128	129	134	147
33	Papua Barat	151	151	155	159	159
34	Papua	394	393	394	408	420
Indonesia		9.754	9.767	9.825	9.993	10.134

KEMENKES RI

Lampiran 4.b

JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2015 - 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	143	143	143	140	179	196	197	196	206	180
2	Sumatera Utara	164	164	163	175	184	407	407	408	406	417
3	Sumatera Barat	91	91	91	91	108	173	173	170	184	167
4	Riau	79	79	80	81	102	133	134	135	135	128
5	Jambi	68	68	71	74	81	108	115	115	121	124
6	Sumatera Selatan	95	95	95	95	96	227	223	227	227	243
7	Bengkulu	46	46	46	47	52	134	134	134	133	127
8	Lampung	112	112	115	119	136	179	186	182	183	174
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	21	21	21	21	41	41	42	43	43
10	Kepulauan Riau	28	28	28	32	36	44	45	45	51	50
11	DKI Jakarta	30	30	30	28	28	310	310	310	293	287
12	Jawa Barat	176	182	185	186	191	874	868	871	883	791
13	Jawa Tengah	320	320	322	361	368	555	555	554	520	510
14	DI Yogyakarta	43	43	43	49	49	78	78	78	72	72
15	Jawa Timur	519	519	520	534	553	441	441	443	433	413
16	Banten	56	56	56	56	92	177	177	177	166	162
17	Bali	35	35	35	38	42	85	85	85	82	78
18	Nusa Tenggara Barat	109	109	118	121	122	49	49	50	53	47
19	Nusa Tenggara Timur	137	137	137	137	143	234	234	235	230	229
20	Kalimantan Barat	95	95	95	110	125	143	143	146	126	121
21	Kalimantan Tengah	71	71	73	75	88	122	122	123	125	115
22	Kalimantan Selatan	60	60	59	50	59	104	100	100	103	105
23	Kalimantan Timur	95	95	96	97	102	79	80	83	86	84
24	Kalimantan Utara	32	32	32	32	34	17	17	17	24	20
25	Sulawesi Utara	92	92	92	92	94	95	96	97	101	101
26	Sulawesi Tengah	79	79	79	84	102	110	110	114	110	104
27	Sulawesi Selatan	227	227	257	259	301	221	221	194	189	158
28	Sulawesi Tenggara	80	82	84	82	93	188	188	193	202	197
29	Gorontalo	23	23	26	28	32	70	70	67	65	61
30	Sulawesi Barat	44	45	45	45	56	50	49	49	49	37
31	Maluku	64	64	64	64	77	135	135	135	144	132
32	Maluku Utara	27	27	27	36	45	100	100	102	96	102
33	Papua Barat	43	44	45	44	44	108	107	110	115	115
34	Papua	104	105	105	110	115	290	288	289	298	308
	Indonesia	3.396	3.411	3.459	3.623	4.048	6.358	6.356	6.366	6.379	6.056

Sumber: Profil Data Kesehatan Kemenkes RI 2019

KEMENKES RI

Lampiran 4.c

RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
1	Aceh	324	289	1,12
2	Sumatera Utara	441	450	1,34
3	Sumatera Barat	273	179	1,54
4	Riau	228	169	1,35
5	Jambi	205	141	1,45
6	Sumatera Selatan	341	241	1,41
7	Bengkulu	173	129	1,34
8	Lampung	310	228	1,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,36
10	Kepulauan Riau	98	75	1,31
11	DKI Jakarta	315	44	7,16
12	Jawa Barat	1,227	627	1,71
13	Jawa Tengah	870	576	1,52
14	DI Yogyakarta	121	78	1,55
15	Jawa Timur	968	666	1,45
16	Banten	283	155	1,57
17	Bali	120	57	2,11
18	Nusa Tenggara Barat	169	117	1,44
19	Nusa Tenggara Timur	402	309	1,30
20	Kalimantan Barat	246	174	1,41
21	Kalimantan Tengah	203	136	1,49
22	Kalimantan Selatan	235	151	1,54
23	Kalimantan Timur	186	103	1,81
24	Kalimantan Utara	55	53	1,04
25	Sulawesi Utara	195	171	1,14
26	Sulawesi Tengah	296	175	1,69
27	Sulawesi Selatan	459	311	1,48
28	Sulawesi Tenggara	290	219	1,32
29	Gorontalo	93	77	1,21
30	Sulawesi Barat	95	69	1,38
31	Maluku	209	110	1,77
32	Maluku Utara	147	116	1,27
33	Papua Barat	159	560	0,28
34	Papua	420	218	1,93
Indonesia		10.134	7.230	1,40

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2019.
Kondisi berdasarkan Keputusan Permendagri No. 137 tahun 2017.

KEMENKES RI

Lampiran 4.d

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kecamatan dengan Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
							Dasar	Madya	Utama	Purna	
1	Aceh	159	121	23	275	92,76	180	283	28	2	26
2	Sumatera Utara	481	515	33	406	93,01	236	293	29	1	42
3	Sumatera Barat	275	271	14	165	98,55	43	164	41	5	4
4	Riau	228	214	12	160	93,86	46	128	28	0	14
5	Jambi	205	188	11	129	91,71	54	112	19	3	17
6	Sumatera Selatan	341	333	17	232	97,65	90	198	42	5	8
7	Bengkulu	179	179	14	121	100,00	70	100	9	0	0
8	Lampung	310	296	23	220	95,48	25	208	59	4	14
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	44	100,00	8	50	19	1	0
10	Kepulauan Riau	96	81	7	66	86,21	20	41	20	1	3
11	DKI Jakarta	315	151	5	42	47,94	11	89	20	31	164
12	Jawa Barat	1.672	1.528	27	628	95,90	175	627	205	27	44
13	Jawa Tengah	878	873	31	171	99,43	97	467	270	39	5
14	DI Yogyakarta	121	121	5	78	100,00	0	43	64	14	0
15	Jawa Timur	968	963	30	660	99,48	71	536	316	45	5
16	Banten	248	235	9	142	95,00	44	138	47	2	12
17	Bali	120	120	9	57	100,00	11	66	31	10	0
18	Nusa Tenggara Barat	169	163	10	115	96,43	34	94	31	4	6
19	Nusa Tenggara Timur	402	367	22	200	91,29	100	150	71	0	35
20	Kalimantan Barat	246	220	14	164	89,44	68	133	24	5	16
21	Kalimantan Tengah	203	194	14	127	95,57	73	100	20	2	9
22	Kalimantan Selatan	235	233	13	158	99,15	73	125	32	3	2
23	Kalimantan Timur	186	182	10	103	97,85	20	102	58	6	4
24	Kalimantan Utara	55	55	5	41	100,00	25	24	5	1	0
25	Sulawesi Utara	195	169	11	123	86,67	78	73	19	1	26
26	Sulawesi Tengah	206	198	13	156	96,12	70	109	19	0	8
27	Sulawesi Selatan	459	454	24	296	98,91	85	235	118	21	5
28	Sulawesi Tenggara	290	263	17	201	90,69	94	144	17	2	27
29	Gorontalo	93	92	6	72	98,92	22	50	17	3	1
30	Sulawesi Barat	90	80	6	64	89,47	12	54	12	0	10
31	Maluku	209	156	11	83	74,64	69	77	10	0	53
32	Maluku Utara	147	113	10	94	76,87	42	64	6	1	34
33	Papua Barat	159	72	13	62	45,28	30	32	5	0	87
34	Papua	420	120	20	99	28,57	35	32	13	0	306
	Indonesia	**10.134**	**9.153**	**503**	**6.212**	**90,32**	**2.177**	**3.868**	**1.669**	**239**	**981**

Sumber: Sistem Penyusun Kredentasi Indonesia di 2019 per 22 April 2019

KEMENKES RI

Lampiran 4.e

JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019

No	Provinsi	2018		2019	
		Jumlah Puskesmas*	Jumlah Puskesmas Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif Preventif	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif Preventif
1	Aceh	345	179	359	163
2	Sumatera Utara	570	142	601	391
3	Sumatera Barat	276	133	275	172
4	Riau	232	99	228	95
5	Jambi	227	124	225	91
6	Sumatera Selatan	341	162	341	146
7	Bengkulu	180	72	176	56
8	Lampung	275	84	316	140
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	45	64	39
10	Kepulauan Riau	85	36	86	56
11	DKI Jakarta	143	32	315	43
12	Jawa Barat	1.070	237	1.072	406
13	Jawa Tengah	882	636	878	613
14	DI Yogyakarta	121	92	121	102
15	Jawa Timur	965	469	966	417
16	Banten	237	51	243	80
17	Bali	120	56	120	45
18	Nusa Tenggara Barat	165	113	169	110
19	Nusa Tenggara Timur	376	225	402	179
20	Kalimantan Barat	243	143	246	133
21	Kalimantan Tengah	200	89	205	80
22	Kalimantan Selatan	234	156	235	163
23	Kalimantan Timur	189	123	186	89
24	Kalimantan Utara	56	34	55	30
25	Sulawesi Utara	194	25	195	45
26	Sulawesi Tengah	200	83	206	100
27	Sulawesi Selatan	455	236	459	235
28	Sulawesi Tenggara	283	107	290	127
29	Gorontalo	93	42	93	53
30	Sulawesi Barat	95	61	95	42
31	Maluku	207	32	209	31
32	Maluku Utara	134	57	147	67
33	Papua Barat	158	36	159	41
34	Papua	402	66	420	73
	Indonesia	**10.017**	**4.029**	**10.134**	**4.485**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan Modul Jaris Informasi Sistem Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Desember 01, 2020

* Puskesmas yang terdaftar-data

KEMENKES RI

Lampiran 4.7

JUMLAH PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

Lampiran 4.g

JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas Puskesmasyang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan yang Telah Dilatih				Puskesmas yang melakukan Pemberian Pelayanan Tradisional (RAFTRA)
					Dilatih Konsore	Dilatih Akupresure	Dilatih Akupresur	Jenis Kesehatan (JAMU) Pemerintah DUKA, dan lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jawa	3304	1215	5535	21	107	2	167	73
2	Sumatera Utara	665	296	3525	44	74	0	31	161
3	Sumatera Barat	275	106	1210	10	46	0	47	34
4	Riau	228	149	4273	19	121	1	84	28
5	Jambi	185	145	1149	4	73	1	41	101
6	Sumatera Selatan	331	179	4570	9	72	6	38	81
7	Bengkulu	173	77	1035	11	51	1	23	19
8	Lampung	310	231	3183	24	85	0	28	167
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	44	1110	1	16	1	27	42
10	Kepulauan Riau	98	74	1625	10	78	4	39	22
11	DKI Jakarta	215	150	4230	15	43	4	12	133
12	Jawa Barat	1472	955	9138	12	89	3	5	386
13	Jawa Tengah	978	249	1350	10	141	1	94	60
14	DI Yogyakarta	121	87	4617	11	33	10	18	54
15	Jawa Timur	966	432	4461	27	194	14	147	158
16	Banten	249	146	4189	9	96	1	56	28
17	Bali	120	101	10051	10	114	1	50	97
18	Nusa Tenggara Barat	169	102	4527	8	80	9	53	143
19	Nusa Tenggara Timur	402	119	2540	8	33	3	19	29
20	Kalimantan Barat	184	134	3447	11	61	4	39	31
21	Kalimantan Tengah	203	91	2530	11	33	2	19	36
22	Kalimantan Selatan	235	208	4823	6	11	3	28	108
23	Kalimantan Timur	186	147	3478	7	41	1	41	121
24	Kalimantan Utara	70	47	1127	5	32	0	4	14
25	Sulawesi Utara	197	127	1610	22	73	0	46	21
26	Sulawesi Tengah	286	138	3146	10	67	0	33	74
27	Sulawesi Selatan	459	189	4034	10	157	4	21	75
28	Sulawesi Tenggara	260	118	4589	26	95	1	43	27
29	Gorontalo	97	76	1131	17	41	1	14	33
30	Sulawesi Barat	91	32	1474	10	28	1	1	9
31	Maluku	209	144	7181	23	98	1	31	114
32	Maluku Utara	147	113	1403	9	42	2	46	95
33	Papua Barat	159	94	1139	4	28	1	2	17
34	Papua	419	78	1445	13	33	0	7	2
Indonesia		10134	5139	9671	434	2419	81	1277	1366

Sumber: Bidang Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI (2019)

Keterangan: Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional

KEMENKES RI

Lampiran 4.8

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2019

KEMENKES RI

Lampiran 4.1

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	TOTAL RS PROVINSI	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
1	Aceh	69	32	33	65	65	94,20
2	Sumatera Utara	210	45	118	163	163	74,77
3	Sumatera Barat	78	28	37	65	65	83,33
4	Riau	74	21	41	62	62	83,78
5	Jambi	40	16	17	33	33	82,50
6	Sumatera Selatan	84	32	33	65	65	77,38
7	Bengkulu	24	15	6	21	21	87,50
8	Lampung	78	18	47	65	65	83,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	25	10	8	18	18	72,00
10	Kepulauan Riau	33	14	15	29	29	87,88
11	DKI Jakarta	190	54	113	167	167	87,89
12	Jawa Barat	361	68	254	322	322	89,20
13	Jawa Tengah	304	77	196	273	273	89,80
14	DI Yogyakarta	83	14	54	68	68	81,93
15	Jawa Timur	384	99	251	350	350	91,15
16	Banten	116	14	82	96	96	82,76
17	Bali	68	21	43	64	64	94,12
18	Nusa Tenggara Barat	37	18	14	32	32	86,49
19	Nusa Tenggara Timur	52	24	21	45	45	86,54
20	Kalimantan Barat	51	25	20	45	45	88,24
21	Kalimantan Tengah	26	10	12	22	22	84,62
22	Kalimantan Selatan	46	22	20	42	42	91,30
23	Kalimantan Timur	55	20	23	43	43	78,18
24	Kalimantan Utara	10	7	1	8	8	80,00
25	Sulawesi Utara	47	22	19	41	41	87,23
26	Sulawesi Tengah	38	20	10	30	30	78,95
27	Sulawesi Selatan	111	46	48	94	94	84,68
28	Sulawesi Tenggara	36	21	9	30	30	83,33
29	Gorontalo	14	8	4	12	12	85,71
30	Sulawesi Barat	12	8	1	9	9	75,00
31	Maluku	30	18	5	23	23	76,67
32	Maluku Utara	21	13	4	17	17	80,95
33	Papua Barat	19	11	3	14	14	73,68
34	Papua	44	26	6	32	32	72,73
Nasional		2.878	904	1.561	2.465	2.465	85,65

KEMENKES RI

Lampiran 4.1

PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C
YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang Melaporkan Data	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	%
1	Aceh	13	7	47
2	Sumatera Utara	21	19	90
3	Sumatera Barat	15	9	60
4	Riau	11	10	91
5	Jambi	9	4	44
6	Sumatera Selatan	9	4	44
7	Bengkulu	7	3	43
8	Lampung	12	9	75
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	43
10	Kepulauan Riau	5	3	60
11	DKI Jakarta*	1	1	100
12	Jawa Barat	18	11	79
13	Jawa Tengah	27	20	74
14	DI Yogyakarta	4	3	75
15	Jawa Timur	25	20	80
16	Banten	8	3	38
17	Bali	3	2	67
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	80
19	Nusa Tenggara Timur	17	5	29
20	Kalimantan Barat	12	6	50
21	Kalimantan Tengah	12	4	33
22	Kalimantan Selatan	11	8	73
23	Kalimantan Timur	9	5	56
24	Kalimantan Utara	4	3	75
25	Sulawesi Utara	10	6	60
26	Sulawesi Tengah	12	6	50
27	Sulawesi Selatan	22	14	64
28	Sulawesi Tenggara	9	5	56
29	Gorontalo	5	2	40
30	Sulawesi Barat	4	3	75
31	Maluku	9	0	0
32	Maluku Utara	5	2	40
33	Papua Barat	6	2	33
34	Papua	8	7	88
Indonesia		**350**	**216**	**62**

Sumber:
Catatan: *Tidak ada data

KEMENKES RI

Lampiran 4.3

JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah UTD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
1	Aceh	17	4	21
2	Sumatera Utara	20	8	28
3	Sumatera Barat	13	5	18
4	Riau	8	5	13
5	Jambi	9	1	10
6	Sumatera Selatan	12	5	17
7	Bengkulu	7	3	10
8	Lampung	6	7	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	3	8
10	Kepulauan Riau	3	3	6
11	DKI Jakarta	1	2	3
12	Jawa Barat	3	23	26
13	Jawa Tengah	0	16	16
14	DI Yogyakarta	1	5	6
15	Jawa Timur	2	37	39
16	Banten	0	7	7
17	Bali	0	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	3	5	8
19	Nusa Tenggara Timur	12	6	18
20	Kalimantan Barat	9	4	13
21	Kalimantan Tengah	10	3	13
22	Kalimantan Selatan	10	3	13
23	Kalimantan Timur	3	7	10
24	Kalimantan Utara	1	3	4
25	Sulawesi Utara	4	5	9
26	Sulawesi Tengah	8	5	13
27	Sulawesi Selatan	18	7	25
28	Sulawesi Tenggara	7	2	9
29	Gorontalo	4	3	7
30	Sulawesi Barat	3	1	4
31	Maluku	9	1	10
32	Maluku Utara	7	1	8
33	Papua Barat	8	2	10
34	Papua	9	4	13
Indonesia		234	224	458

KEMENKES RI

Lampiran 4.1

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama					
		Pemerintah Provinsi		TNI/POLRI		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Aceh	99	3	12	0	111	3
2	Sumatera Utara	959	60	21	0	980	60
3	Sumatera Barat	221	19	8	0	229	19
4	Riau	160	16	5	0	165	16
5	Jambi	137	9	2	0	139	9
6	Sumatera Selatan	236	12	7	0	243	12
7	Bengkulu	59	6	1	0	60	6
8	Lampung	278	6	5	0	283	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	57	14	5	0	62	14
10	Kepulauan Riau	216	13	18	0	234	13
11	DKI Jakarta	651	207	40	0	691	207
12	Jawa Barat	180	109	8	0	188	109
13	Jawa Tengah	850	22	30	0	880	22
14	DI Yogyakarta	919	168	15	0	934	168
15	Jawa Timur	793	41	33	0	866	41
16	Banten	731	28	3	0	734	28
17	Bali	152	24	5	0	157	24
18	Nusa Tenggara Barat	98	26	7	0	105	26
19	Nusa Tenggara Timur	95	4	6	0	104	4
20	Kalimantan Barat	91	8	3	0	94	8
21	Kalimantan Tengah	163	14	1	0	164	14
22	Kalimantan Selatan	40	6	4	0	44	6
23	Kalimantan Timur	271	6	3	0	274	6
24	Kalimantan Utara	3	0	3	0	4	0
25	Sulawesi Utara	23	3	8	0	31	3
26	Sulawesi Tengah	50	16	6	0	56	16
27	Sulawesi Selatan	220	67	14	0	234	67
28	Sulawesi Tenggara	59	0	9	0	68	0
29	Gorontalo	2	6	1	0	3	6
30	Sulawesi Barat	4	0	2	0	6	0
31	Maluku	17	3	9	0	26	3
32	Maluku Utara	3	0	2	0	5	0
33	Papua Barat	52	5	16	0	68	5
34	Papua	33	3	5	0	38	3
	Indonesia	**7.928**	**924**	**361**	**0**	**8.281**	**924**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 4.m

JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Pemilikan/Pengelola				
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	pemerintah kabupaten/kota	Swasta	Jumlah
1	Aceh	0	1	7	3	11
2	Sumatera Utara	1	1	5	39	46
3	Sumatera Barat	0	1	6	12	19
4	Riau	0	1	5	6	12
5	Jambi	0	1	5	6	12
6	Sumatera Selatan	1	0	8	11	20
7	Bengkulu	0	1	5	18	24
8	Lampung	0	1	4	3	8
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	3	20	24
10	Kepulauan Riau	0	1	9	12	12
11	DKI Jakarta	1	1	0	110	122
12	Jawa Barat	0	1	25	168	194
13	Jawa Tengah	0	1	36	131	169
14	DI Yogyakarta	0	1	4	16	21
15	Jawa Timur	1	0	29	152	182
16	Banten	0	1	8	71	80
17	Bali	0	1	4	20	25
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	9	26	31
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	7	6	15
20	Kalimantan Barat	0	1	5	12	18
21	Kalimantan Tengah	0	1	7	2	10
22	Kalimantan Selatan	0	1	4	11	16
23	Kalimantan Timur	0	1	5	29	35
24	Kalimantan Utara	0	0	4	0	4
25	Sulawesi Utara	0	1	1	6	8
26	Sulawesi Tengah	0	1	0	1	2
27	Sulawesi Selatan	1	0	10	13	24
28	Sulawesi Tenggara	0	1	5	2	8
29	Gorontalo	0	1	2	4	7
30	Sulawesi Barat	0	1	2	1	4
31	Maluku	0	1	2	1	4
32	Maluku Utara	0	0	1	1	2
33	Papua Barat	0	0	0	2	2
34	Papua	0	1	0	4	5
Indonesia		4	27	266	1.034	1.331

KEMENKES RI

Lampiran IX.e

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

Lampiran B.b

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2019

No	Provinsi	2018				2019			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2018	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2019	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
1	Aceh	5.281.918	67	3.440	1,66	5.371.532	69	3.576	1,66
2	Sumatera Utara	14.415.291	231	12.205	1,54	14.562.549	237	12.979	1,52
3	Sumatera Barat	5.380.614	77	7.697	1,31	5.441.197	79	7.043	1,29
4	Riau	6.814.908	73	6.652	0,98	6.971.745	74	6.811	0,98
5	Jambi	3.378.273	41	4.000	1,14	3.426.579	40	4.038	1,11
6	Sumatera Selatan	8.278.436	70	9.045	1,08	8.470.683	84	8.996	1,05
7	Bengkulu	1.960.350	27	2.546	1,19	1.991.818	24	2.618	1,31
8	Lampung	8.370.481	57	7.582	0,81	8.447.727	58	7.640	0,90
9	Kep. Bangka Belitung	1.439.873	24	1.829	1,22	1.486.792	23	1.961	1,29
10	Kepulauan Riau	2.136.521	33	2.881	1,34	2.189.603	32	3.048	1,35
11	DKI Jakarta	10.467.629	215	24.552	2,33	10.557.810	190	23.664	2,24
12	Jawa Barat	48.683.861	350	41.572	0,85	49.316.712	361	43.042	0,87
13	Jawa Tengah	34.499.033	290	39.822	1,15	34.718.204	304	40.923	1,18
14	DI Yogyakarta	3.802.872	80	4.005	1,05	3.842.932	81	4.070	1,71
15	Jawa Timur	39.500.951	395	42.256	1,07	39.699.631	394	44.569	1,11
16	Banten	12.689.736	152	12.038	0,87	12.927.310	134	11.222	0,87
17	Bali	4.292.154	61	6.595	1,54	4.336.921	68	6.913	1,59
18	Nusa Tenggara Barat	5.013.607	36	4.556	0,91	5.070.389	37	3.767	0,74
19	Nusa Tenggara Timur	5.371.239	50	6.365	0,85	5.456.203	52	4.521	0,83
20	Kalimantan Barat	5.001.684	46	5.153	1,03	5.069.127	51	5.807	1,09
21	Kalimantan Tengah	2.660.209	26	2.425	0,91	2.714.859	26	2.556	0,94
22	Kalimantan Selatan	4.182.693	44	4.781	1,14	4.244.096	46	5.130	1,21
23	Kalimantan Timur	3.648.932	54	6.791	1,86	3.721.389	55	6.095	1,64
24	Kalimantan Utara	716.867	10	1.000	1,41	742.245	10	1.000	1,40
25	Sulawesi Utara	2.484.391	46	5.275	2,10	2.506.981	47	5.370	2,15
26	Sulawesi Tengah	3.035.481	37	4.111	1,37	3.094.071	38	4.409	1,44
27	Sulawesi Selatan	8.771.970	106	13.589	1,53	8.855.240	117	14.233	1,61
28	Sulawesi Tenggara	2.653.654	34	3.871	1,08	2.704.737	36	3.812	1,04
29	Gorontalo	1.185.491	19	1.864	1,57	1.202.631	19	2.091	1,66
30	Sulawesi Barat	1.355.354	12	1.221	0,91	1.380.256	12	1.266	0,92
31	Maluku	1.773.770	28	2.471	1,39	1.802.870	30	2.126	1,18
32	Maluku Utara	1.232.602	20	1.355	1,10	1.255.771	21	1.418	1,13
33	Papua Barat	917.818	18	1.292	1,38	928.617	19	1.402	1,46
34	Papua	3.322.526	63	4.137	1,24	3.379.302	64	4.655	1,29
Indonesia		265.015.313	2.813	310.710	1,17	268.074.564	2.877	316.956	1,18

KEMENKES RI

Lampiran 9.a

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat & Vaksin Esensial*	
				Jumlah	%
1	Aceh	359	358	348	99,43
2	Sumatera Utara	601	569	545	95,78
3	Sumatera Barat	275	272	268	98,53
4	Riau	228	214	207	96,73
5	Jambi	205	183	183	100,00
6	Sumatera Selatan	241	280	253	90,36
7	Bengkulu	179	179	167	93,30
8	Lampung	310	301	283	94,02
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	100,00
10	Kepulauan Riau	96	87	86	98,85
11	DKI Jakarta	315	335	330	98,51
12	Jawa Barat	1.072	1.058	1.014	95,84
13	Jawa Tengah	828	760	729	95,92
14	D.I. Yogyakarta	121	121	121	100,00
15	Jawa Timur	968	689	685	99,42
16	Banten	243	234	229	97,86
17	Bali	120	120	120	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	169	170	170	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	482	399	329	82,46
20	Kalimantan Barat	246	245	244	99,59
21	Kalimantan Tengah	201	189	172	91,01
22	Kalimantan Selatan	235	235	235	100,00
23	Kalimantan Timur	186	181	186	99,47
24	Kalimantan Utara	55	50	50	100,00
25	Sulawesi Utara	195	188	188	100,00
26	Sulawesi Tengah	206	207	196	94,69
27	Sulawesi Selatan	459	448	446	99,55
28	Sulawesi Tenggara	290	283	253	91,52
29	Gorontalo	93	90	87	96,67
30	Sulawesi Barat	95	94	94	100,00
31	Maluku	209	199	199	100,00
32	Maluku Utara	147	128	127	99,22
33	Papua Barat	159	160	153	95,63
34	Papua	420	392	366	93,37
	Indonesia	**10.134**	**9.480**	**9.133**	**96,34**

Sumber: Dapat Kelamasan dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2019, per 18 Maret 2019

Keterangan: *) Lai dengan jumlah puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial 100%

KEMENKES RI

Lampiran 9.b

JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Industri Farmasi	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA)	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	Produksi Alat Kesehatan	Produksi Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)	Industri Kosmetika
1	Aceh	0	0	5	1	0	2
2	Sumatera Utara	1	1	151	11	16	26
3	Sumatera Barat	1	0	10	0	1	7
4	Riau	0	0	2	0	0	2
5	Jambi	0	0	2	0	2	1
6	Sumatera Selatan	2	1	3	2	2	1
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	13	0	4	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	3	0	2	2
11	DKI Jakarta	77	18	331	65	82	97
12	Jawa Barat	70	53	573	87	91	153
13	Jawa Tengah	29	21	240	45	39	76
14	DI Yogyakarta	1	1	45	5	4	21
15	Jawa Timur	33	17	209	47	62	132
16	Banten	18	20	79	42	58	96
17	Bali	0	1	11	1	1	41
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	12	1	0	3
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	5	1	0	3
21	Kalimantan Tengah	0	0	3	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	6	0	1	0
23	Kalimantan Timur	0	0	1	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	4	0	1	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	1	37	1	2	9
28	Sulawesi Tenggara	0	0	8	0	0	0
29	Gorontalo	0	1	2	0	0	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	25	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0
	Indonesia	225	137	1,955	317	368	683

Sumber: Unjar Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sumatera FL 2019, per 08 Maret 2019
Note: Jumlah sarana final dan didapat setelah Pertemuan Pemeriksaan Data Provinsi tanggal Jawa Barat

KEMENKES RI

Lampiran 9.c

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Alat Kesehatan	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	29	447	596	33
2	Sumatera Utara	82	1.406	1.552	97
3	Sumatera Barat	40	588	273	56
4	Riau	46	759	489	78
5	Jambi	32	407	177	30
6	Sumatera Selatan	57	591	192	76
7	Bengkulu	16	266	115	13
8	Lampung	51	672	138	75
9	Kepulauan Bangka Belitung	14	182	96	8
10	Kepulauan Riau	36	292	269	43
11	DKI Jakarta	295	2.238	555	1.103
12	Jawa Barat	299	4.855	1.787	391
13	Jawa Tengah	263	3.812	380	295
14	DI Yogyakarta	45	602	42	61
15	Jawa Timur	273	4.146	503	303
16	Banten	85	1.644	448	230
17	Bali	53	800	97	67
18	Nusa Tenggara Barat	27	409	114	23
19	Nusa Tenggara Timur	31	997	84	35
20	Kalimantan Barat	35	365	340	36
21	Kalimantan Tengah	7	299	132	8
22	Kalimantan Selatan	39	444	562	43
23	Kalimantan Timur	50	713	227	58
24	Kalimantan Utara	3	94	40	2
25	Sulawesi Utara	44	288	96	33
26	Sulawesi Tengah	22	440	214	24
27	Sulawesi Selatan	103	1.327	270	124
28	Sulawesi Tenggara	30	454	70	24
29	Gorontalo	14	169	52	7
30	Sulawesi Barat	0	132	57	0
31	Maluku	13	180	86	18
32	Maluku Utara	6	150	21	7
33	Papua Barat	16	168	10	4
34	Papua	49	375	54	72
	Indonesia	2.211	30.260	10.126	3.381

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2019, per 08 Maret 2019

Note: Jumlah sarana final akan didapat setelah Performance Penetrabilitas Data Nasional Sematif diawal bulan Maret

KEMENKES RI

Lampiran 9.d

PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA (IFK) YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR TRIWULAN IV TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah IFK	IFK Sesuai Standar	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	21	91,30
2	Sumatera Utara	33	29	87,88
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	10	83,33
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	16	94,12
7	Bengkulu	10	9	90,00
8	Lampung	15	13	86,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	3	50,00
12	Jawa Barat	27	25	92,59
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	20	90,91
20	Kalimantan Barat	14	13	92,86
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	12	80,00
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,31
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00
31	Maluku	11	9	81,82
32	Maluku Utara	10	7	70,00
33	Papua Barat	13	7	53,85
34	Papua	29	24	82,76
Indonesia		**514**	**473**	**92,02**

KEMENKES RI

Lampiran 4.8

JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kot*	Hasil Pendataan**										Posyandu Aktif***		Jumlah Posbindu PTM****
			Primatama		Madya		Purnama		Mandiri		Jumlah Posyandu	Rasio Posyandu Per 100 Balita	Jumlah	%	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%					
1	Aceh	23	699	5.1	5,199	38.1	3,851	28.2	2,916	21.4	13,665	1.74	11,349	83.0	8,106
2	Sumatera Utara	33	1,222	7.8	6,380	41.1	7,036	45.3	901	5.8	15,539	1.83	13,692	88.1	6,699
3	Sumatera Barat	19	371	3.7	3,382	34.4	5,316	54.0	1,772	18.0	9,841	1.83	6,998	71.1	2,333
4	Riau	12	746	9.2	3,931	48.6	3,544	43.8	904	11.2	8,085	1.74	6,096	75.4	411
5	Jambi	11	638	7.8	3,846	46.1	3,304	39.6	697	8.4	8,345	1.89	7,008	84.0	822
6	Sumatera Selatan	17	775	5.8	5,427	40.6	6,214	46.5	933	7.0	13,349	1.84	8,829	66.1	2,493
7	Bangka Belitung	7	181	4.8	1,844	49.2	1,719	45.8	208	5.5	3,752	1.77	3,618	96.4	748
8	Lampung	15	753	6.8	5,870	53.1	4,255	38.5	134	1.2	11,052	1.32	8,249	74.6	2,336
9	Kepulauan Riau	7	556	10.1	2,771	50.4	2,167	39.4	1,006	18.3	5,500	1.97	4,716	85.8	589
10	Bangka Belitung	7	225	5.6	1,948	48.3	1,840	45.6	1,429	35.4	4,037	1.67	3,861	95.6	674
11	DKI Jakarta	6	19	0.2	1,187	14.2	3,446	41.2	3,703	44.3	8,355	0.70	6,263	75.0	1,712
12	Jawa Barat	27	1,812	5.9	11,780	38.2	16,741	54.3	2,555	8.3	30,888	1.19	23,069	74.7	4,111
13	Jawa Tengah	35	1,812	5.9	11,951	39.0	15,891	51.9	1,944	6.3	30,598	1.68	26,222	85.7	6,946
14	DI. Yogyakarta	5	252	9.1	1,263	45.7	1,078	39.0	1,171	42.3	2,764	1.26	2,199	79.6	1,234
15	Jawa Timur	38	1,812	5.1	11,951	33.6	17,215	48.4	4,548	12.8	35,526	1.75	26,237	73.8	4,616
16	Bantan	8	1,031	18.5	2,488	44.6	2,188	39.2	880	15.8	5,587	1.88	4,804	86.0	1,265
17	Bali	9	6	0.1	2,664	37.5	3,370	47.5	1,057	14.9	7,097	1.89	2,540	35.8	667
18	Nusa Tenggara Barat	10	92	1.4	2,758	41.7	3,924	59.3	581	8.8	7,337	1.98	6,447	87.9	2,000
19	Nusa Tenggara Timur	22	1,606	18.2	6,018	35.2	8,726	49.2	913	5.1	14,558	1.59	12,196	83.8	1,804
20	Kalimantan Barat	14	519	13.6	2,822	39.1	3,821	47.8	356	4.5	8,118	1.84	2,828	34.8	2,344
21	Kalimantan Tengah	14	190	10.0	1,114	44.6	1,127	44.8	37	2.1	2,771	1.81	1,744	62.9	891
22	Kalimantan Selatan	13	369	9.0	2,233	54.3	2,244	40.9	91	2.2	3,960	2.05	3,906	98.6	2,260
23	Kalimantan Timur	10	598	13.2	1,974	43.5	1,446	31.9	516	11.4	4,534	1.75	3,724	82.1	432
24	Kalimantan Utara	5	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
25	Sulawesi Utara	15	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
26	Sulawesi Tengah	13	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
27	Sulawesi Selatan	24	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
28	Sulawesi Tenggara	17	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
29	Gorontalo	6	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
30	Sulawesi Barat	6	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
31	Maluku	11	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
32	Maluku Utara	10	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
33	Papua Barat	13	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
34	Papua	29	1,676	15.0	420	38.8	474	34.2	240	14.3	736	0.97	384	52.2	87
	Indonesia	514	17,716	4.9	90,144	38.6	120,291	51.2	50,344	21.4	236,777	1.26	190,892	63.6	59,606

KEMENKES RI

Lampiran 11.a

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter Spesialis *			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	330	342	672	963	1.350	2.313	1.293	1.692	2.985	3	10	13	67	301	368	70	311	381
2	Sumatera Utara	905	543	1.448	3.028	2.916	5.944	3.933	3.459	7.392	18	23	41	128	631	759	146	654	800
3	Sumatera Barat	464	331	795	1.317	1.324	2.641	1.781	1.655	3.436	7	11	18	69	378	447	76	389	465
4	Riau	349	220	569	1.031	1.053	2.084	1.380	1.273	2.653	9	8	17	60	310	370	69	318	387
5	Jambi	190	120	310	570	586	1.156	760	706	1.466	11	6	17	47	192	239	58	198	256
6	Sumatera Selatan	366	299	665	852	1.219	2.071	1.218	1.518	2.736	11	14	25	60	253	313	71	267	338
7	Bengkulu	97	76	173	330	486	816	427	562	989	3	5	8	21	100	121	24	105	129
8	Lampung	236	199	435	440	883	1.323	676	1.082	1.758	4	11	15	23	157	180	27	168	195
9	Kep. Bangka Belitung	44	43	87	201	217	418	245	260	505	3	5	8	22	69	91	25	74	99
10	Kepulauan Riau	212	119	331	204	396	600	416	515	931	14	9	23	82	128	210	96	137	233
11	DKI Jakarta	2.787	2.256	5.043	1.940	4.341	6.281	4.727	6.597	11.324	194	446	640	164	2.509	2.673	358	2.955	3.313
12	Jawa Barat	1.856	1.196	3.052	3.167	3.575	6.742	5.023	4.771	9.794	73	138	211	167	1.155	1.322	240	1.293	1.533
13	Jawa Tengah	1.224	1.058	2.282	2.832	3.733	6.565	4.056	4.791	8.847	65	156	221	155	1.061	1.216	220	1.217	1.437
14	DI Yogyakarta	542	458	1.000	481	932	1.413	1.023	1.390	2.413	69	90	159	82	319	401	151	409	560
15	Jawa Timur	2.716	1.791	4.507	2.373	3.716	6.089	5.089	5.507	10.596	126	209	335	419	1.441	1.860	545	1.650	2.195
16	Banten	418	496	914	724	1.286	2.010	1.142	1.782	2.924	29	41	70	72	474	546	101	515	616
17	Bali	727	297	1.024	766	785	1.551	1.493	1.082	2.575	27	16	43	139	363	502	166	379	545
18	Nusa Tenggara Barat	351	194	545	348	483	831	699	677	1.376	9	10	19	53	125	178	62	135	197
19	Nusa Tenggara Timur	69	71	140	218	181	399	287	252	539	1	6	7	28	111	139	29	117	146
20	Kalimantan Barat	162	90	252	301	397	698	463	487	950	8	13	21	38	98	136	46	111	157
21	Kalimantan Tengah	125	94	219	229	322	551	354	416	770	6	10	16	34	77	111	40	87	127
22	Kalimantan Selatan	286	161	447	264	528	792	550	689	1.239	13	16	29	79	162	241	92	178	270
23	Kalimantan Timur	270	197	467	299	583	882	574	779	1.353	11	24	35	62	199	261	73	223	296
24	Kalimantan Utara	42	36	78	107	181	288	149	217	366	3	8	11	14	32	46	17	40	57
25	Sulawesi Utara	226	176	402	333	632	965	559	811	1.370	7	9	16	50	99	149	57	108	165
26	Sulawesi Tengah	158	134	292	181	314	495	339	448	787	3	3	6	32	104	136	35	107	142
27	Sulawesi Selatan	646	388	1.034	474	1.029	1.503	1.120	1.417	2.537	22	55	77	119	368	486	141	423	563
28	Sulawesi Tenggara	180	97	277	192	366	558	372	463	835	8	9	17	27	150	177	35	159	194
29	Gorontalo	60	36	124	94	165	259	162	221	383	1	5	6	12	50	62	13	55	68
30	Sulawesi Barat	42	41	83	99	149	248	156	190	346	3	9	12	17	70	87	20	79	99
31	Maluku	49	40	89	90	224	314	139	264	403	1	1	2	13	40	53	14	41	55
32	Maluku Utara	65	39	81	93	150	243	158	189	324	2	1	3	13	33	46	15	34	49
33	Papua Barat	33	33	81	86	133	219	119	166	301	1	0	1	11	29	39	12	29	40
34	Papua	76	55	131	235	334	579	311	409	720	3	2	5	37	57	94	40	59	99
	Indonesia	**17.268**	**12.345**	**29.613**	**18.399**	**32.000**	**51.399**	**35.658**	**45.351**	**81.011**	**704**	**1.226**	**1.930**	**3.747**	**13.974**	**17.721**	**4.451**	**12.198**	**17.651**

Sumber : Laporan Nakertan 2019 Kabupaten Kota oleh Seksi/Unit Kerja Pengelola Data Ketenagaan Kesehatan Provinsi, Kemenkes RI, 2020

Keterangan : (*) Dokter Spesialis (1)

(1) Tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit milik swasta, dan rumah sakit milik TNI/Polri

(2) Fasilitas kesehatan selain rumah sakit pemerintah, rumah sakit milik swasta, dan rumah sakit milik TNI/Polri

KEMENKES RI

Lampiran 11.8

JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter Spesialis *			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	9	9	18	320	697	993	329	697	1011	4	1	5	88	237	325	85	238	330
2	Sumatera Utara	8	8	16	493	1.157	1.650	501	1.165	1.666	4	3	7	81	499	580	85	502	587
3	Sumatera Barat	2	2	4	110	444	554	112	446	558	1	1	2	36	190	226	37	191	228
4	Riau	3	5	8	204	524	728	207	529	736	0	0	0	42	341	383	42	341	383
5	Jambi	0	1	1	104	229	333	104	230	334	0	0	0	27	116	143	27	116	143
6	Sumatera Selatan	3	0	3	148	426	574	151	426	577	0	1	1	43	125	168	43	126	169
7	Bengkulu	0	0	0	70	147	217	70	147	217	0	0	0	12	64	76	12	64	76
8	Lampung	0	0	0	204	472	676	204	472	676	1	1	2	14	113	127	15	114	129
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	68	122	190	68	122	190	0	0	0	12	44	56	12	44	56
10	Kepulauan Riau	1	0	1	86	226	312	86	226	312	0	0	0	21	72	93	21	72	93
11	DKI Jakarta	6	6	12	370	1.410	1.780	376	1.416	1.792	0	0	0	82	414	496	82	414	496
12	Jawa Barat	5	5	10	752	3.437	4.189	757	3.442	4.199	0	0	0	134	729	863	134	729	863
13	Jawa Tengah	3	4	7	731	1.911	2.642	734	1.915	2.649	1	4	5	144	628	772	145	632	777
14	DI Yogyakarta	8	8	16	197	529	726	205	537	742	0	3	3	55	226	281	55	229	284
15	Jawa Timur	6	1	7	733	1.966	2.699	739	1.967	2.706	0	3	3	147	862	1.009	147	865	1.012
16	Banten	6	4	10	340	432	772	346	436	782	3	0	3	90	264	354	90	264	354
17	Bali	0	0	0	114	144	258	114	144	258	0	0	0	77	146	223	77	146	223
18	Nusa Tenggara Barat	6	6	12	130	218	348	136	224	360	0	0	0	21	90	111	21	90	111
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	1	141	339	480	141	340	481	0	0	0	33	84	117	33	84	117
20	Kalimantan Barat	1	0	1	200	232	432	201	232	433	0	1	1	33	71	104	33	72	105
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	101	166	267	101	166	267	0	0	0	15	42	57	15	42	57
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	129	298	427	129	298	427	1	1	2	46	107	153	47	108	155
23	Kalimantan Timur	0	0	0	116	293	409	116	293	409	0	0	0	41	141	182	41	141	182
24	Kalimantan Utara	0	0	0	40	56	96	40	56	96	0	0	0	12	22	34	12	22	34
25	Sulawesi Utara	1	1	2	142	339	481	143	340	483	0	0	0	21	47	68	21	47	68
26	Sulawesi Tengah	0	2	2	90	245	335	90	247	337	0	0	0	24	72	96	24	72	96
27	Sulawesi Selatan	5	4	9	184	616	800	189	620	809	0	1	1	74	402	476	74	403	477
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	93	229	322	93	229	322	0	0	0	29	199	228	29	199	228
29	Gorontalo	0	0	0	33	81	114	33	81	114	0	0	0	9	38	47	9	38	47
30	Sulawesi Barat	0	0	0	36	93	129	36	93	129	0	0	0	12	34	46	12	34	46
31	Maluku	0	0	0	81	110	191	81	110	191	0	0	0	7	27	34	7	27	34
32	Maluku Utara	0	1	1	42	74	116	42	75	117	0	0	0	8	28	36	8	28	36
33	Papua Barat	0	0	0	36	65	101	36	65	101	0	0	0	8	14	22	8	14	22
34	Papua	0	0	0	154	245	399	154	245	399	0	0	0	10	34	44	10	34	44
	Indonesia	77	77	154	6.587	14.797	21.384	6.664	14.874	21.538	19	21	40	1.499	6.852	8.351	1.518	6.873	8.391

KEMENKES RI

Lampiran 13.a

JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter Spesialis*			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	316	182	498	394	316	710	710	498	1.208	0	12	12	71	71	142	71	83	154
2	Sumatera Utara	932	553	1.464	1.064	913	1.977	1.996	1.467	3.463	48	36	84	80	155	235	128	191	319
3	Sumatera Barat	494	347	841	394	319	713	888	666	1.554	0	17	17	53	64	117	53	81	134
4	Riau	347	229	576	294	244	538	641	473	1.114	6	8	14	66	45	111	72	53	125
5	Jambi	143	111	254	121	113	234	264	224	488	14	4	18	15	34	49	29	38	67
6	Sumatera Selatan	366	295	661	334	338	672	700	633	1.333	22	24	46	23	94	117	45	118	163
7	Bangka Belitung	47	19	66	45	24	69	92	43	135	0	2	2	4	17	21	4	19	23
8	Lampung	396	284	680	294	206	500	690	490	1.180	8	18	26	22	28	50	30	46	76
9	Kep. Bangka Belitung	94	64	158	111	144	255	205	208	413	0	2	2	5	13	18	5	15	20
10	Kepulauan Riau	208	137	345	218	145	363	426	282	708	14	8	22	24	23	47	38	31	69
11	DKI Jakarta	2.731	2.044	4.775	958	1.746	2.704	3.689	3.790	7.479	150	414	564	124	492	616	274	906	1.180
12	Jawa Barat	3.882	3.378	7.260	4.998	5.484	10.482	8.880	8.862	17.742	75	114	189	94	348	442	169	462	631
13	Jawa Tengah	3.256	3.320	6.576	5.276	5.445	10.721	8.532	8.765	17.297	50	98	148	125	327	452	175	425	600
14	DI Yogyakarta	542	429	971	383	408	791	925	837	1.762	36	33	69	46	96	142	82	129	211
15	Jawa Timur	2.632	2.733	5.365	2.493	2.757	5.250	5.125	5.490	10.615	121	155	276	174	447	621	295	602	897
16	Banten	823	494	1.317	822	536	1.358	1.645	1.030	2.675	59	81	140	55	144	199	114	225	339
17	Bali	315	179	494	356	433	789	671	612	1.283	17	33	50	46	113	159	63	146	209
18	Nusa Tenggara Barat	199	142	341	239	223	462	438	365	803	0	14	14	6	57	63	6	71	77
19	Nusa Tenggara Timur	64	70	134	89	155	244	153	225	378	1	0	1	1	34	35	2	34	36
20	Kalimantan Barat	168	75	243	134	185	319	294	260	554	0	7	7	18	28	46	18	35	53
21	Kalimantan Tengah	127	94	221	122	143	265	249	237	486	4	6	10	10	31	41	14	37	51
22	Kalimantan Selatan	265	178	443	139	239	378	404	417	821	14	33	47	27	47	74	41	80	121
23	Kalimantan Timur	279	166	445	164	273	437	443	439	882	11	14	25	11	31	42	22	45	67
24	Kalimantan Utara	62	38	100	68	83	151	130	121	251	0	3	3	3	8	11	3	11	14
25	Sulawesi Utara	125	176	301	193	274	467	318	450	768	6	6	12	19	46	65	25	52	77
26	Sulawesi Tengah	106	221	327	107	248	355	213	469	682	3	9	12	9	33	42	12	42	54
27	Sulawesi Selatan	660	582	1.242	230	432	662	890	1.014	1.904	17	34	51	37	146	183	54	180	234
28	Sulawesi Tenggara	166	93	259	691	337	1.028	857	430	1.287	0	8	8	33	83	116	33	91	124
29	Gorontalo	44	34	78	57	77	134	101	111	212	1	1	2	3	11	14	4	12	16
30	Sulawesi Barat	42	41	83	39	38	77	81	79	160	1	5	6	8	14	22	9	19	28
31	Maluku	41	39	80	42	87	129	83	126	209	1	2	3	4	11	15	5	13	18
32	Maluku Utara	44	34	78	51	77	128	95	111	206	3	1	4	5	8	13	8	9	17
33	Papua Barat	48	12	60	54	74	128	102	86	188	1	0	1	7	12	19	8	12	20
34	Papua	74	54	128	119	164	283	193	218	411	1	1	2	18	19	37	19	20	39
	Indonesia	17.879	12.171	29.240	9.838	14.712	24.550	26.912	18.883	33.795	630	1.198	1.828	1.272	3.292	4.564	1.702	4.490	6.192

KEMENKES RI

Lampiran 13.F

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Kesehatan Anak dan Kesehatan Remaja	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
1	Aceh	118	79	84	94	59	51	43	4	8	250	30	726
2	Sumatera Utara	228	181	190	213	82	93	78	29	9	359	49	1.356
3	Sumatera Barat	106	64	83	74	31	32	47	17	3	211	19	512
4	Riau	98	87	95	97	29	26	36	13	3	213	14	630
5	Jambi	47	28	47	40	22	24	16	8	1	113	14	290
6	Sumatera Selatan	131	119	93	90	28	45	36	15	6	258	27	807
7	Bengkulu	38	31	31	47	8	21	10	7	0	45	9	196
8	Lampung	73	48	56	65	24	36	32	10	3	222	33	603
9	Kepulauan Bangka Belitung	24	15	20	20	9	15	14	6	0	57	11	197
10	Kepulauan Riau	38	48	41	58	17	21	24	9	3	108	27	394
11	DKI Jakarta	649	427	549	598	241	300	163	50	44	1.491	470	5.219
12	Jawa Barat	415	333	380	394	169	199	123	32	34	1.184	286	3.539
13	Jawa Tengah	563	447	467	482	191	179	123	41	24	1.422	187	4.017
14	DI Yogyakarta	138	134	132	130	58	70	85	24	8	654	146	1.549
15	Jawa Timur	567	385	430	514	191	277	199	81	41	2.001	351	5.116
16	Bantan	144	103	133	127	57	96	58	11	7	483	66	1.289
17	Bali	139	110	141	93	58	79	33	21	3	467	37	1.191
18	Nusa Tenggara Barat	68	58	91	91	37	44	32	4	5	144	24	598
19	Nusa Tenggara Timur	27	31	38	39	18	18	13	4	1	31	1	190
20	Kalimantan Barat	93	84	89	91	34	37	33	9	2	90	12	484
21	Kalimantan Tengah	53	44	51	59	17	21	16	3	3	76	19	312
22	Kalimantan Selatan	64	84	88	86	39	38	24	6	4	180	29	666
23	Kalimantan Timur	77	65	81	91	37	41	26	6	3	179	17	544
24	Kalimantan Utara	16	11	16	9	8	7	6	3	3	33	5	146
25	Sulawesi Utara	45	33	37	51	13	20	5	1	3	126	7	344
26	Sulawesi Tengah	38	38	35	39	14	13	10	3	4	112	4	309
27	Sulawesi Selatan	140	113	92	99	74	61	67	15	5	349	64	1.220
28	Sulawesi Tenggara	31	27	23	27	18	15	9	3	1	89	8	252
29	Gorontalo	21	13	16	11	5	3	5	1	1	43	3	126
30	Sulawesi Barat	16	12	9	13	4	6	5	0	0	39	3	93
31	Maluku	12	13	6	5	4	3	3	1	0	19	0	66
32	Maluku Utara	23	25	9	16	3	6	5	0	0	19	0	106
33	Papua Barat	20	16	12	11	3	3	3	0	0	10	0	104
34	Papua	12	20	28	14	3	6	3	0	0	17	1	93
											47	0	136
	Indonesia	6.227	4.854	5.085	5.287	1.934	2.192	1.213	472	245	11.354	2.121	34.984

KEMENKES RI

Lampiran 11.e

KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	28,55	14,97	56,47	54,24	32,77	12,99	4,52	12,15	83,33	2,41	3,95	93,63
2	Sumatera Utara	22,50	15,17	62,33	35,67	38,89	25,44	4,67	16,67	78,67	2,17	2,17	95,67
3	Sumatera Barat	39,57	11,51	48,92	69,78	10,43	19,78	12,95	19,78	67,27	1,44	1,44	97,12
4	Riau	14,09	9,87	75,94	53,65	14,34	32,19	6,01	3,50	90,41	3,43	1,29	95,28
5	Jambi	37,56	20,98	41,46	58,01	36,59	5,37	6,34	11,61	78,05	1,95	2,44	95,61
6	Sumatera Selatan	38,62	21,11	40,27	40,26	54,25	4,99	3,23	7,04	89,74	2,17	1,76	97,07
7	Bengkulu	46,93	25,70	27,37	34,38	62,57	3,35	7,82	11,17	81,01	1,12	1,12	97,77
8	Lampung	26,04	9,74	64,22	24,03	67,96	8,12	3,25	3,19	93,56	0,65	0,00	99,35
9	Kep. Bangka Belitung	21,89	6,25	71,88	71,88	14,06	14,06	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10	Kepulauan Riau	24,14	10,34	65,52	47,13	25,29	27,59	2,30	6,90	90,80	1,15	1,15	97,70
11	DKI Jakarta	10,71	0,30	88,99	76,79	4,17	19,05	3,87	77,90	18,15	10,12	68,45	21,43
12	Jawa Barat	26,01	5,44	67,65	52,90	34,70	12,72	10,23	19,63	70,14	4,52	4,24	91,24
13	Jawa Tengah	28,16	6,84	64,99	71,04	22,41	7,75	8,89	12,77	78,34	1,48	4,68	93,84
14	DI Yogyakarta	9,92	3,83	86,26	68,33	1,83	29,82	19,01	14,86	66,12	4,13	12,40	83,47
15	Jawa Timur	38,57	14,17	47,26	66,29	13,71	20,00	4,24	3,72	92,04	1,65	1,03	97,31
16	Bantee	22,31	6,61	71,07	59,26	21,30	19,44	11,16	15,76	73,14	2,07	1,65	96,28
17	Bali	11,67	1,67	86,67	20,17	3,33	76,50	3,33	1,67	95,00	0,00	0,00	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	35,50	21,30	43,20	60,36	36,09	3,55	3,59	4,14	95,27	2,96	3,55	93,49
19	Nusa Tenggara Timur	36,53	49,74	13,73	24,61	73,06	2,33	4,66	15,28	80,05	4,66	11,64	83,68
20	Kalimantan Barat	42,04	24,49	33,47	34,29	64,00	1,71	2,86	12,24	84,90	4,96	7,76	87,33
21	Kalimantan Tengah	35,47	33,99	30,54	29,56	66,50	3,94	3,94	0,99	96,55	0,49	2,46	97,04
22	Kalimantan Selatan	40,08	11,81	48,10	57,81	40,08	2,11	3,80	3,80	92,41	2,11	1,69	96,20
23	Kalimantan Timur	30,11	26,88	43,01	52,69	37,42	10,09	2,15	13,44	84,41	3,23	10,22	86,56
24	Kalimantan Utara	37,50	32,92	29,57	37,50	50,00	12,50	0,87	7,14	89,29	1,79	8,93	89,29
25	Sulawesi Utara	17,77	26,40	55,84	27,41	69,04	3,55	5,58	17,71	80,71	9,14	31,90	58,80
26	Sulawesi Tengah	46,29	36,89	22,82	39,81	56,31	3,88	6,49	6,06	92,72	0,00	0,97	99,03
27	Sulawesi Selatan	42,08	22,99	34,92	59,87	19,74	20,39	6,29	11,50	82,21	7,81	8,46	83,73
28	Sulawesi Tenggara	49,13	33,19	15,68	40,77	56,79	2,49	5,92	24,04	70,09	4,88	9,76	85,37
29	Gorontalo	49,46	26,88	23,66	49,46	49,46	1,08	6,45	9,68	83,87	3,23	1,08	95,70
30	Sulawesi Barat	43,16	33,68	23,16	58,95	34,74	6,32	7,37	23,16	69,47	6,32	7,37	86,32
31	Maluku	36,02	51,66	12,32	15,17	83,89	0,95	13,74	19,43	66,82	13,43	45,58	40,98
32	Maluku Utara	35,97	48,20	15,83	24,46	74,10	1,44	7,91	30,22	61,87	5,47	5,76	87,77
33	Papua Barat	26,53	61,27	12,20	9,16	89,80	2,04	4,08	30,61	65,31	12,93	45,58	41,38
34	Papua	26,11	58,22	15,67	10,76	87,99	1,21	9,08	38,12	52,80	6,62	53,24	38,12
	Indonesia	31,61	19,97	48,42	48,11	38,80	13,09	6,32	15,79	77,90	3,69	9,96	86,34

KEMENKES RI

Lampiran 13.7

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

Lampiran 11.g

JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	3.871	704	688	34	5.257
2	Sumatera Utara	11.191	2.520	2.053	146	15.910
3	Sumatera Barat	3.623	953	987	38	5.603
4	Riau	4.428	756	874	44	6.158
5	Jambi	1.949	317	289	15	2.570
6	Sumatera Selatan	5.728	1.070	638	38	8.534
7	Bengkulu	966	149	150	8	1.273
8	Lampung	2.862	500	302	18	3.682
9	Kepulauan Bangka Belitung	532	142	124	12	810
10	Kepulauan Riau	1.173	291	290	17	1.770
11	DKI Jakarta	19.660	7.013	5.867	1.127	34.267
12	Jawa Barat	22.083	5.160	4.986	692	33.144
13	Jawa Tengah	13.277	3.976	2.353	229	19.832
14	DI Yogyakarta	4.223	1.501	1.094	308	7.126
15	Jawa Timur	16.810	5.627	4.891	858	28.186
16	Banten	7.129	1.643	2.043	205	11.820
17	Bali	4.513	1.382	1.134	64	7.293
18	Nusa Tenggara Barat	1.486	296	230	17	2.029
19	Nusa Tenggara Timur	1.013	191	223	5	1.432
20	Kalimantan Barat	1.444	313	225	20	2.012
21	Kalimantan Tengah	881	198	143	12	1.234
22	Kalimantan Selatan	1.548	455	364	23	2.390
23	Kalimantan Timur	2.141	619	520	50	3.330
24	Kalimantan Utara	268	77	77	8	430
25	Sulawesi Utara	2.968	638	278	11	2.895
26	Sulawesi Tengah	1.011	209	156	4	1.380
27	Sulawesi Selatan	5.242	1.834	1.519	144	8.739
28	Sulawesi Tenggara	756	169	225	5	1.155
29	Gorontalo	324	106	56	3	499
30	Sulawesi Barat	171	47	77	7	302
31	Maluku	535	97	84	6	722
32	Maluku Utara	268	53	53	6	380
33	Papua Barat	340	75	52	2	469
34	Papua	1.145	214	123	8	1.490
	Indonesia	**141.626**	**40.220**	**33.135**	**6.184**	**221.265**

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 11.b

JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2017- 2019

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2017	2018	2019
1	Aceh	25	18	15
2	Sumatera Utara	58	43	34
3	Sumatera Barat	9	12	16
4	Riau	37	24	12
5	Jambi	8	10	5
6	Sumatera Selatan	22	22	8
7	Bengkulu	20	9	4
8	Lampung	7	11	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	8	8
10	Kepulauan Riau	9	3	0
11	DKI Jakarta	0	1	0
12	Jawa Barat	84	52	27
13	Jawa Tengah	19	7	13
14	DI Yogyakarta	1	1	1
15	Jawa Timur	26	11	14
16	Banten	13	6	6
17	Bali	6	9	12
18	Nusa Tenggara Barat	12	14	13
19	Nusa Tenggara Timur	24	21	14
20	Kalimantan Barat	15	11	6
21	Kalimantan Tengah	22	10	8
22	Kalimantan Selatan	17	20	11
23	Kalimantan Timur	8	5	5
24	Kalimantan Utara	13	11	7
25	Sulawesi Utara	11	8	4
26	Sulawesi Tengah	24	15	14
27	Sulawesi Selatan	26	14	10
28	Sulawesi Tenggara	27	24	6
29	Gorontalo	12	7	3
30	Sulawesi Barat	6	7	2
31	Maluku	25	5	7
32	Maluku Utara	17	23	15
33	Papua Barat	19	17	12
34	Papua	31	38	15
Indonesia		619	498	329

Sumber : Biro Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 11.i

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM
BATCH XII-XIV (PERIODE I-III TAHUN 2019)

No	Provinsi	Batch XII (Periode I Tahun 2019)		Batch XIII (Periode II Tahun 2019)		Batch XIV (Periode III Tahun 2019)	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1	7	4	9	2	5
2	Sumatera Utara	2	7	3	4	1	4
3	Sumatera Barat	0	0	1	1	0	0
4	Riau	0	0	1	4	0	0
5	Jambi	0	0	1	1	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	1	1	1	5	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	0	1	7	0	0
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	2	3	4	7	4	6
15	Kalimantan Barat	2	2	0	0	3	5
16	Kalimantan Tengah	2	2	0	0	1	1
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	0	0	0	0	2	3
20	Sulawesi Utara	1	1	0	0	3	6
21	Sulawesi Tengah	4	11	1	1	1	2
22	Sulawesi Selatan	0	0	2	2	0	0
23	Sulawesi Tenggara	4	5	4	9	2	5
24	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Barat	1	1	1	1	0	0
26	Maluku	2	5	3	6	2	6
27	Maluku Utara	1	1	3	5	1	2
28	Papua Barat	1	1	0	0	2	8
29	Papua	1	3	4	5	0	0
Indonesia		25	50	38	70	24	53

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 11.1

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XII SAMPAI DENGAN BATCH XIV / PERIODE I SAMPAI DENGAN III TAHUN 2019) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	0	0	20	16	13	17	11	21	21	119
2	Sumatera Utara	0	0	15	13	14	11	8	14	15	90
3	Sumatera Barat	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5
4	Riau	1	0	4	3	3	4	3	4	1	23
5	Jambi	1	1	3	2	2	2	2	3	2	18
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	1	6	6	4	6	3	5	3	34
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	0	3	4	6	6	5	7	6	37
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	4	0	16	13	12	14	5	14	14	92
15	Kalimantan Barat	0	0	7	6	6	4	2	7	7	39
16	Kalimantan Tengah	1	1	3	2	2	2	3	1	3	18
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	0	0	2	3	3	3	2	1	3	17
20	Sulawesi Utara	2	0	7	4	7	3	5	7	7	42
21	Sulawesi Tengah	3	2	14	11	9	5	11	12	13	78
22	Sulawesi Selatan	0	1	2	3	1	3	2	3	2	17
23	Sulawesi Tenggara	3	1	17	16	10	16	11	18	17	109
24	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Barat	1	0	2	2	1	1	0	2	1	10
26	Maluku	3	0	14	15	15	13	4	16	17	97
27	Maluku Utara	1	1	8	7	5	7	4	8	7	48
28	Papua Barat	1	0	9	8	7	8	4	8	8	53
29	Papua	2	0	8	8	4	7	3	8	4	44
Indonesia		**24**	**8**	**160**	**143**	**124**	**131**	**89**	**169**	**151**	**900**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, November 01, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 11.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDU
PERIODE I-X TAHUN 2019 (BATCH III-a/d XI)

No	Provinsi	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V		Periode VI		Periode VII		Periode VIII		Periode IX		Periode X	
		Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas
1	Aceh	1	4	4	21	2	9	1	1	4	9	1	1	5	15	19	65	17	63	4	16
2	Sumatera Utara	3	10	1	1	2	5	1	1	4	18	5	14	9	13	4	11	9	38	3	11
3	Sumatera Barat	3	3	0	0	3	14	0	0	4	8	1	1	1	1	19	44	11	45	8	16
4	Riau	1	2	2	2	3	13	0	0	1	2	2	2	1	1	3	11	4	17	3	9
5	Jambi	0	0	0	0	2	10	0	0	1	0	1	1	2	3	4	24	4	18	3	5
6	Sumatera Selatan	2	3	0	0	1	7	0	0	1	0	0	0	0	0	5	14	6	22	4	12
7	Bengkulu	4	5	1	3	2	8	0	0	1	1	1	1	4	14	0	0	0	1	0	0
8	Lampung	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10	2	12	2	10
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	1	6	1	4	2	2	3	3
10	Kepulauan Riau	2	2	2	3	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	9	1	3	1	1
11	Jawa Barat	1	7	1	2	1	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	1	10	1	6
12	Jawa Tengah	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	9	3	16	1	4
13	Jawa Timur	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	1	6	1	3
14	Bali	0	0	1	2	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	2	9	1	14	1	1
15	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	2	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	2	9	1	12	1	1
16	Nusa Tenggara Timur	4	7	3	11	4	24	1	2	2	16	0	23	4	12	3	9	5	12	1	5
17	Kalimantan Barat	2	12	3	8	1	3	1	1	2	3	0	12	3	13	1	1	4	1	0	0
18	Kalimantan Tengah	4	14	2	2	4	7	1	1	4	3	0	0	3	4	1	1	1	6	1	4
19	Kalimantan Selatan	1	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	8	1	4
20	Kalimantan Timur	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	1	1	1	3	0	0
21	Kalimantan Utara	1	4	0	0	1	4	0	0	2	0	0	0	2	7	1	1	1	2	1	1
22	Sulawesi Utara	1	1	0	0	1	4	1	1	1	0	0	0	1	1	1	5	0	0	1	1
23	Sulawesi Tengah	0	13	0	13	10	60	1	1	4	0	0	2	1	4	1	3	12	33	5	24
24	Sulawesi Selatan	4	11	1	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	7	40	6	25
25	Sulawesi Tenggara	0	28	0	25	7	24	0	0	3	4	0	17	1	22	4	1	3	15	2	7
26	Gorontalo	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	3	1	27	1	3	0	38	1	11
27	Sulawesi Barat	1	4	3	3	3	14	0	0	3	2	0	1	1	3	2	7	0	27	4	13
28	Maluku	1	4	1	2	1	10	1	2	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0	4	4
29	Maluku Utara	3	5	0	0	2	14	0	0	4	15	0	4	3	5	0	0	2	3	2	7
30	Papua Barat	1	1	2	9	2	8	0	0	0	0	0	2	1	22	1	10	0	36	4	9
31	Papua	0	0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1	5
	Indonesia	**64**	**181**	**46**	**125**	**75**	**245**	**11**	**16**	**56**	**161**	**63**	**184**	**65**	**215**	**75**	**303**	**123**	**515**	**74**	**236**

KEMENKES RI

Lampiran 11.1

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-X TAHUN 2019 / BATCH XIII s/d XX) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
1	Aceh	32	48	90	15	19	17	37	65	48	371
2	Sumatera Utara	19	8	18	26	22	8	29	39	21	190
3	Sumatera Barat	22	10	49	32	25	47	23	38	21	267
4	Riau	5	7	6	0	10	5	14	26	16	89
5	Jambi	16	14	4	3	14	14	9	32	16	122
6	Sumatera Selatan	2	0	2	0	7	7	12	22	16	68
7	Bengkulu	6	4	12	0	4	0	9	6	5	46
8	Lampung	1	0	6	2	12	4	10	20	8	63
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	3	5	1	1	3	3	5	21
10	Kepulauan Riau	5	0	9	1	3	6	2	9	3	38
11	Jawa Barat	10	11	0	0	4	3	3	11	10	52
12	Jawa Tengah	2	2	10	0	17	1	0	9	15	56
13	Jawa Timur	1	3	6	5	4	6	0	11	3	39
14	Nusa Tenggara Barat	1	1	5	12	0	6	3	3	4	35
15	Nusa Tenggara Timur	23	8	29	28	30	22	10	37	25	212
16	Kalimantan Barat	14	1	12	4	14	16	8	13	19	101
17	Kalimantan Tengah	8	1	4	10	6	3	11	10	15	68
18	Kalimantan Selatan	4	0	4	5	9	3	4	1	3	33
19	Kalimantan Timur	2	0	0	1	9	3	9	12	7	43
20	Kalimantan Utara	2	0	8	0	1	0	7	12	5	27
21	Sulawesi Utara	3	7	20	33	33	24	14	21	33	178
22	Sulawesi Tengah	26	9	50	37	23	3	28	62	67	325
23	Sulawesi Selatan	9	3	19	32	7	5	3	11	6	95
24	Sulawesi Tenggara	46	22	196	26	48	19	40	43	76	505
25	Gorontalo	5	7	11	0	6	4	8	8	34	83
26	Sulawesi Barat	14	7	15	20	3	6	7	1	5	78
27	Maluku	11	0	12	19	6	2	3	7	7	67
28	Maluku Utara	9	3	39	19	28	12	33	23	39	205
29	Papua Barat	0	1	14	13	7	8	14	6	7	70
30	Papua	0	0	9	3	6	1	2	3	3	27
Indonesia		**298**	**177**	**644**	**371**	**368**	**255**	**355**	**564**	**542**	**3574**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 11.m

JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSHIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Pemberangkatan				Jumlah
		Februari	Mei - Juni	September - Oktober	November - Desember	
1	Aceh	[illegible]	[illegible]	110	100	[illegible]
2	Sumatera Utara	127	70	101	104	540
3	Sumatera Barat	[illegible]	72	57	[illegible]	[illegible]
4	Riau	76	73	57	103	309
5	Jambi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Sumatera Selatan	105	61	133	144	423
7	Bengkulu	130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Lampung	10	83	71	78	250
9	Kepulauan Bangka Belitung	41	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]
10	Kepulauan Riau	18	59	57	74	208
11	DKI Jakarta	160	[illegible]	167	125	541
12	Jawa Barat	307	185	415	390	1.287
13	Jawa Tengah	119	250	471	441	1.281
14	DI Yogyakarta	36	54	69	137	296
15	Jawa Timur	719	221	419	464	1.817
16	Banten	121	40	154	78	393
17	Bali	135	73	133	210	541
18	Nusa Tenggara Barat	34	20	37	94	193
19	Nusa Tenggara Timur	115	24	89	72	300
20	Kalimantan Barat	55	31	68	29	183
21	Kalimantan Tengah	36	11	20	26	93
22	Kalimantan Selatan	61	30	45	81	217
23	Kalimantan Timur	75	52	74	122	323
24	Kalimantan Utara	17	0	32	20	69
25	Sulawesi Utara	72	35	44	40	191
26	Sulawesi Tengah	54	57	40	13	166
27	Sulawesi Selatan	119	106	89	158	472
28	Sulawesi Tenggara	46	29	48	53	176
29	Gorontalo	39	27	0	50	116
30	Sulawesi Barat	18	17	0	20	55
31	Maluku	53	23	28	[illegible]	[illegible]
32	Maluku Utara	11	8	15	31	65
33	Papua Barat	43	14	0	[illegible]	[illegible]
34	Papua	31	20	39	48	138
	Indonesia	3.211	2.057	3.207	3.644	12.119

Sumber: [illegible]

KEMENKES RI

Lampiran 11.n

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Spesialis Anak		Spesialis Obstetri dan Ginekologi		Spesialis Penyakit Dalam		Spesialis Bedah		Spesialis Anestesi		Total
		Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	Tubel	Mandiri	
1	Aceh	1	0	2	0	0	0	7	0	2	0	12
2	Sumatera Utara	4	0	2	5	1	1	5	4	0	0	22
3	Sumatera Barat	2	1	0	5	1	2	0	2	1	2	16
4	Riau	0	0	1	1	2	4	2	1	0	0	11
5	Jambi	1	0	1	0	1	2	1	2	3	1	14
6	Sumatera Selatan	0	4	0	2	0	1	3	2	5	4	29
7	Bengkulu	0	0	2	2	1	2	2		1	1	15
8	Lampung	1	3	3	2	3	0	6	1	1	0	20
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	6
10	Kepulauan Riau	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	5
11	DKI Jakarta	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
12	Jawa Barat	7	5	5	5	3	9	5	2	1	1	43
13	Jawa Tengah	2	3	1	4	3	2	6	1	0	0	22
14	DI Yogyakarta	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0	8
15	Jawa Timur	2	7	3	7	5	12	1	2	2	3	44
16	Banten	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	6
17	Bali	4	2	2	2	0	2	4	1	0	1	18
18	Nusa Tenggara Barat	5	5	1	3	1	3	2	2	1	2	25
19	Nusa Tenggara Timur	2	1	1	5	6	7	4	3	3	1	33
20	Kalimantan Barat	2	2	0	2	3	2	3	1	1	2	18
21	Kalimantan Tengah	3	4	4	6	3	3	0	1	1	1	26
22	Kalimantan Selatan	1	1	4	0	4	2	2	0	0	0	14
23	Kalimantan Timur	4	1	2	1	3	0	4	3	1	1	20
24	Kalimantan Utara	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6
25	Sulawesi Utara	1	2	0	2	0	2	2	2	0	2	13
26	Sulawesi Tengah	2	0	1	5	0	0	1	5	1	1	16
27	Sulawesi Selatan	5	1	1	1	1	2	5	2	4	0	22
28	Sulawesi Tenggara	0	2	2	1	1	3	3	1	1	2	16
29	Gorontalo	1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	7
30	Sulawesi Barat	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	8
31	Maluku	2	1	1	2	3	4	2	0	3	1	19
32	Maluku Utara	0	1	0	1	1	1	1	0	2	0	7
33	Papua Barat	1	2	0	1	1	0	0	1	1	0	7
34	Papua	4	0	3	1	3	2	2	3	1	0	19
35	TNI/POLRI	2	0	5	0	0	0	0	0	1	0	8
	Indonesia	63	62	61	72	65	77	89	46	48	30	603

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 12.a

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat*			Bidan	Perawat*			Bidan	Perawat*			Bidan	Perawat*			Bidan
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
1	Aceh	1.161	2.994	4.155	4.004	3.200	3.000	6.200	2.287	90	19	109	24	4.451	6.013	10.464	6.315
2	Sumatera Utara	3.691	8.702	12.393	14.438	3.871	5.758	9.629	2.925	90	120	210	110	7.652	10.580	18.240	17.363
3	Sumatera Barat	380	2.070	2.450	3.000	847	1.603	2.450	1.049	20	91	111	81	1.247	3.764	5.011	4.130
4	Riau	969	2.560	3.869	4.907	1.980	3.185	5.165	1.583	39	53	90	104	2.988	5.798	8.786	6.594
5	Jambi	772	1.696	2.468	3.126	595	2.581	3.176	952	169	147	316	269	1.536	4.424	5.960	4.347
6	Sumatera Selatan	1.831	4.285	6.116	9.472	1.336	5.259	6.595	2.060	59	81	140	89	3.226	9.625	12.851	11.621
7	Bengkulu	505	1.246	1.751	2.609	598	1.891	2.489	702	21	26	47	41	1.124	3.163	4.287	3.352
8	Lampung	1.651	2.489	4.140	6.864	1.329	3.228	4.557	1.560	59	86	145	144	3.039	5.803	8.842	8.568
9	Kep. Bangka Belitung	300	710	1.010	863	952	2.117	3.069	403	61	130	221	160	1.313	2.957	4.270	1.366
10	Kepulauan Riau	275	859	1.134	1.171	546	1.807	2.353	531	11	56	67	49	832	2.722	3.554	1.751
11	DKI Jakarta	999	1.424	2.423	1.778	6.391	16.569	23.094	2.907	614	640	1.254	774	7.139	21.633	28.772	5.535
12	Jawa Barat	4.498	5.780	10.278	14.906	7.674	16.943	24.617	5.058	320	524	852	1.025	12.500	23.243	35.743	20.989
13	Jawa Tengah	1.497	5.594	9.091	15.228	10.213	22.949	33.162	5.942	730	2.026	2.856	2.121	14.440	30.569	45.109	23.291
14	DI Yogyakarta	273	625	898	878	1.571	5.455	7.026	907	51	236	287	254	1.895	6.316	8.211	2.039
15	Jawa Timur	6.023	8.104	14.205	15.600	10.971	23.173	34.144	6.539	398	1.107	1.505	1.006	17.390	32.468	49.368	23.295
16	Banten	827	1.283	2.110	3.495	1.856	5.426	7.282	1.883	82	140	222	339	2.765	6.849	9.614	5.405
17	Bali	502	999	1.501	2.233	1.854	4.441	6.295	1.913	116	119	235	352	2.472	5.559	8.031	4.498
18	Nusa Tenggara Barat	1.365	2.045	3.410	3.119	1.265	2.266	3.531	1.065	69	67	136	55	2.699	4.378	7.077	4.239
19	Nusa Tenggara Timur	1.383	3.014	4.397	4.150	619	1.694	2.313	786	21	40	61	57	1.785	4.748	6.533	4.993
20	Kalimantan Barat	1.534	2.766	3.280	3.060	1.082	2.086	3.168	793	57	58	115	105	2.653	3.910	6.563	3.918
21	Kalimantan Tengah	1.430	1.940	3.376	2.749	716	1.414	2.130	599	72	55	127	53	2.226	3.411	5.637	3.191
22	Kalimantan Selatan	1.020	1.472	2.492	3.467	1.562	2.291	3.853	994	97	92	189	75	2.679	3.855	6.534	4.536
23	Kalimantan Timur	746	1.474	2.220	2.196	1.105	2.656	3.761	943	52	60	72	50	1.903	4.190	6.113	3.191
24	Kalimantan Utara	327	592	919	710	183	455	638	217	10	28	38	10	520	1.067	1.587	937
25	Sulawesi Utara	328	1.662	1.990	1.152	559	2.240	2.799	644	51	77	128	18	920	3.979	4.899	1.814
26	Sulawesi Tengah	862	1.956	2.818	3.630	618	2.023	2.641	939	51	69	120	54	1.531	4.048	5.579	4.623
27	Sulawesi Selatan	1.129	4.493	5.622	6.436	1.473	5.982	7.455	2.126	104	198	302	185	2.706	10.673	13.379	8.747
28	Sulawesi Tenggara	718	1.961	2.677	3.044	656	1.888	2.544	909	40	68	108	36	1.412	3.915	5.327	3.989
29	Gorontalo	258	681	939	1.062	318	899	1.209	361	25	46	71	13	593	1.626	2.219	1.436
30	Sulawesi Barat	222	641	863	986	143	500	643	157	12	32	44	35	377	1.173	1.550	1.178
31	Maluku	469	1.332	1.801	1.006	345	1.331	1.676	420	45	89	134	30	859	2.752	3.611	1.456
32	Maluku Utara	357	668	1.025	1.456	264	720	984	379	23	30	53	30	644	1.418	2.062	1.865
33	Papua Barat	424	858	1.282	854	233	660	893	276	12	21	33	12	669	1.539	2.208	1.142
34	Papua	1.071	1.731	2.802	1.762	513	1.320	1.833	470	45	46	91	46	1.629	3.097	4.726	2.278
	Indonesia	38.756	75.764	114.520	131.529	61.291	138.991	220.192	50.869	3.784	7.012	10.796	7.070	103.741	241.767	345.508	210.268

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan (telah lolos Sertifikasi Sistem Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020)

Keterangan : a) Jumlah termasuk S2;

b) Tenaga kesehatan yang berhagai di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

c) Fasilitas Kesehatan lainnya yaitu, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya

KEMENKES RI

KEMENKES RI

No	Provinsi	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik				Tenaga Keteknisian Medis								Tenaga Teknis Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Kesehatan Lainnya	Jumlah
			Epidemiologi Kesehatan	Promosi Kesehatan	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Biostatistik dan Kependudukan			Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Radiografer	Elektromedis	Analis Kesehatan	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Refraksionis Optisien	Otoriner Prosedik	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Terapi Gigi dan Mulut	Audiologi	Anggaran	Elektromedik	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Histologi Medik	Orotese Prosedik			
1	Aceh	3,312	652	209	4	9	9	1,881	61	0	0	0	0	0	12	1	4	83	0	1	20	0	0	0	0	0	1	3,471
2	Sumatera Utara	5,866	3,623	747	1	11	5	1,881	154	1	1	0	0	0	34	1	17	339	0	169	30	536	1	0	0	0	7	8,342
3	Sumatera Barat	3,002	949	194	0	1	1	913	177	14	1	3	0	0	34	1	3	112	0	23	12	61	0	0	0	0	0	3,270
4	Riau	3,359	986	217	0	5	0	1,881	362	11	0	0	0	0	16	1	2	12	1	33	4	138	0	0	0	0	4	2,279
5	Jambi	1,810	480	179	0	1	0	1,881	90	0	0	0	0	0	9	0	1	31	0	17	0	44	0	0	0	0	0	1,977
6	Sumatera Selatan	2,932	2,122	486	3	3	0	1,881	183	8	4	0	0	0	84	14	4	93	4	40	8	132	0	0	0	0	19	6,537
7	Bengkulu	724	539	109	0	0	1	1,881	21	0	0	0	0	0	2	0	1	5	0	14	1	19	0	0	0	0	0	1,515
8	Lampung	1,492	1,091	93	0	0	1	1,881	99	4	0	0	0	0	0	0	0	29	0	78	5	119	0	0	0	0	2	3,172
9	Kep. Bangka Belitung	344	224	42	0	1	1	1,881	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	18	0	0	0	0	0	614
10	Kepulauan Riau	554	352	39	3	3	4	1,881	33	0	0	0	0	0	3	0	1	8	0	3	1	38	0	0	0	0	0	1,084
11	DKI Jakarta	4,956	1,414	361	1	5	10	1,881	991	104	54	11	0	0	141	14	11	181	81	28	109	0	11	302	22	1,331	5	0	1	40	6,000
12	Jawa Barat	6,877	4,442	639	134	21	1	1,881	536	104	18	47	2	0	241	8	9	192	4	29	209	0	0	326	110	769	3	11	76	84	17,709
13	Jawa Tengah	1,671	2,731	380	11	20	1	1,881	434	16	67	17	12	0	464	4	23	141	4	5	151	0	0	91	27	66	1	1	8	36	9,164
14	DI Yogyakarta	1,738	881	232	31	18	1	1,881	226	44	6	8	0	0	224	8	185	22	15	1	24	0	0	116	139	1,819	0	0	11	61	3,879
15	Jawa Timur	8,241	6,107	721	14	1	5	1,881	745	142	34	71	14	0	229	9	2	43	17	11	136	0	0	84	6	93	1	0	4	30	11,672
16	Bantan	3,451	936	199	13	0	1	1,881	94	17	12	8	0	0	27	0	3	38	3	4	29	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2,923
17	Bali	3,493	706	179	1	3	0	1,881	226	47	1	4	1	0	12	0	0	3	1	1	47	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,911
18	Nusa Tenggara Barat	1,257	681	111	1	2	2	1,881	187	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	33	11	75	0	0	0	0	2,557
19	Nusa Tenggara Timur	1,164	1,340	174	1	1	0	1,881	116	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	155	2	0	0	0	3,210
20	Kalimantan Barat	3,833	886	185	4	0	0	1,881	49	10	1	0	0	0	16	1	0	16	1	0	29	0	0	24	0	54	0	0	4	14	3,997
21	Kalimantan Tengah	910	912	84	0	0	0	1,881	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	17	1	0	0	2	1,923
22	Kalimantan Selatan	1,185	980	169	3	0	0	1,881	56	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	31	41	89	0	5	8	11	2,280
23	Kalimantan Timur	671	564	140	4	0	0	1,881	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	125	1	0	0	1	3,424
24	Kalimantan Utara	338	78	85	0	0	0	1,881	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	1	232
25	Sulawesi Utara	1,956	1,017	94	0	0	0	1,881	79	71	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	14	0	0	4	0	4	0	0	0	0	1,417
26	Sulawesi Tengah	1,268	716	157	1	1	0	1,881	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	19	0	0	0	0	2,691
27	Sulawesi Selatan	3,936	2,446	426	11	30	7	1,881	74	14	1	1	1	0	194	21	1	0	0	30	194	0	0	11	0	411	3	2	0	1	5,866
28	Sulawesi Tenggara	2,037	844	296	2	24	1	1,881	54	8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	68	0	0	3	0	98	0	0	0	1	2,361
29	Gorontalo	367	724	14	0	0	0	1,881	99	13	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	32	0	0	0	0	1,644
30	Sulawesi Barat	804	254	18	0	11	0	1,881	43	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	651
31	Maluku	930	344	38	0	0	0	1,881	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	34	0	0	0	1	760
32	Maluku Utara	373	338	81	1	1	1	1,881	96	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	34	0	0	0	1	840
33	Papua Barat	346	114	44	0	0	0	1,881	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	467
34	Papua	1,449	938	120	0	0	0	1,881	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	3,553
	Indonesia	**67,927**	**39,192**	**7,886**	**395**	**240**	**108**	**3,762**	**4,899**	**1,267**	**297**	**301**	**229**	**0**	**2,705**	**0**	**278**	**765**	**165**	**0**	**2,707**	**13**	**2,952**	**680**	**4,282**	**40**	**44**	**113**	**407**	**140,387**

Lampiran 12a

JUMLAH PENGIRIMAN SURAT TUNDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN
RESULTAT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan Responsive						Tenaga Kesehatan Unit				Tenaga Kesehatan Mobile								Tenaga Tidak Diketahui					Tenaga Kesehatan Tidak Terdaftar		Total
				Kesehatan Responsive	Kesehatan Responsive	Kesehatan Responsive	Kesehatan Responsive	Tenaga Kesehatan Unit	Tenaga Kesehatan Unit	Tenaga Kesehatan Unit	Tenaga Kesehatan Unit	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Tenaga Kesehatan Mobile	Total
1	Aceh	1.080	3.120	60	0	0	0	70	10	21	0	0	0	30	0	0	0	0	0	101	0	11	28	69	0	0	0	0	1.404
2	Sumatera Utara	1.449	5.098	141	1	0	1	80	18	80	0	0	0	22	0	0	40	0	37	101	0	86	27	128	14	1	0	0	5.712
3	Sumatera Barat	912	1.252	14	1	0	0	55	55	30	0	0	0	26	0	0	24	0	10	1	0	36	0	94	0	0	0	0	2.002
4	Riau	903	983	32	4	2	4	5	37	36	0	0	0	47	0	0	5	1	10	19	0	35	30	88	0	0	0	0	2.201
5	Jambi	1.115	1.196	19	1	0	0	19	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	29	0	0	0	0	2.471
6	Sumatera Selatan	2.230	3.011	39	30	1	0	11	36	36	0	0	0	30	0	0	0	0	17	36	0	32	0	118	0	0	0	0	7.000
7	Bengkulu	712	722	0	0	0	0	10	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	127	0	0	0	0	1.444
8	Lampung	892	1.044	32	0	1	0	15	30	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	56	0	46	0	117	0	0	0	0	2.219
9	Kep. Bangka Belitung	675	361	0	0	0	0	0	55	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	1.140
10	Kepulauan Riau	223	190	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	30	0	0	0	0	482
11	DKI Jakarta	3.630	1.703	40	0	0	0	19	74	104	0	10	1	10	11	10	80	0	14	112	0	114	10	234	0	0	0	0	5.912
12	Jawa Barat	5.039	6.206	66	16	2	1	18	160	100	0	10	0	11	0	0	80	0	96	106	0	144	12	714	1	1	0	0	10.667
13	Jawa Tengah	7.030	4.238	19	16	0	0	156	159	100	0	10	11	117	0	0	81	0	15	100	0	474	0	254	11	10	0	0	10.207
14	DI Yogyakarta	351	412	27	50	0	0	11	37	31	0	0	0	65	0	0	0	0	0	56	0	34	0	287	0	0	0	0	1.214
15	Jawa Timur	1.016	1.085	44	0	0	0	15	11	51	0	0	0	28	0	0	10	10	11	21	0	36	30	470	0	0	10	0	1.000
16	Banten	2.049	104	8	1	0	0	0	19	12	0	0	0	20	0	0	19	0	1	44	0	30	0	40	1	0	0	0	2.740
17	Bali	1.446	1.421	10	0	0	0	10	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	45	0	114	0	0	0	0	2.740
18	Nusa Tenggara Barat	840	968	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	20	0	11	0	0	0	18	0	56	0	180	0	0	0	0	2.000
19	Nusa Tenggara Timur	310	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	170	0	0	0	0	1.510
20	Kalimantan Barat	876	500	13	0	1	0	91	21	17	0	1	0	15	0	0	0	0	0	47	0	40	0	30	0	0	0	0	3.000
21	Kalimantan Tengah	351	374	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	27	0	11	0	0	0	0	807
22	Kalimantan Selatan	1.020	712	17	0	1	0	0	40	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	80	0	50	0	80	0	0	0	0	2.000
23	Kalimantan Timur	2.107	940	0	0	1	0	16	21	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	12	0	10	0	100	0	0	0	0	3.000
24	Kalimantan Utara	37	100	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304
25	Sulawesi Utara	202	306	1	0	1	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	19	0	0	0	0	1.000
26	Sulawesi Tengah	802	410	11	0	0	0	0	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	98	0	0	0	0	1.007
27	Sulawesi Selatan	1.004	1.115	0	0	0	0	20	20	21	0	0	0	50	0	0	0	0	20	50	0	48	0	140	0	0	0	0	1.000
28	Sulawesi Tenggara	838	566	0	0	0	0	13	44	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	1.020
29	Gorontalo	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
30	Sulawesi Barat	167	201	2	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	500
31	Maluku	119	356	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	407
32	Maluku Utara	100	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	191
33	Papua Barat	366	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1.000
34	Papua	46	107	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	400
	Indonesia	34.477	95.148	485	104	99	90	753	1.285	1.000	10	17	14	420	11	58	314	11	311	1.133	0	1.480	112	1.912	40	20	90	0	134.751

Catatan : Jumlah Tenaga Kesehatan Unit Tenaga Kesehatan Mobile Tenaga Kesehatan Tidak Terdaftar

Dimanfaat : Jumlah Tenaga Kesehatan Unit Tenaga Kesehatan Mobile Tenaga Kesehatan Tidak Terdaftar

KEMENKES RI

Lampiran 12.d

JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2019

No	Provinsi	Jumlah Bidan sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	2	-	3
2	Sumatera Utara	5	5	-	10
3	Sumatera Barat	-	-	1	1
4	Riau	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	1	-	1
8	Lampung	2	1	1	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	1	-	1
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	6	-	-	6
13	Jawa Tengah	3	-	-	3
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	5	-	-	5
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	1	2
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1	2	1	4
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	1	1
28	Sulawesi Tenggara	-	1	-	1
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	1	1
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-
Indonesia		**23**	**14**	**12**	**49**

Sumber: Data Kepegawaian Kemenkes RI 2020
Keterangan : - = sudah tidak ada PTT lagi

KEMENKES RI

Lampiran 13.a

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	446	1.432	1.878	222	622	844	77	702	779
2	Sumatera Utara	808	1.617	2.025	219	434	653	106	970	1.076
3	Sumatera Barat	130	477	607	128	359	487	85	762	847
4	Riau	208	510	718	86	180	266	32	484	516
5	Jambi	171	348	519	149	266	415	51	370	421
6	Sumatera Selatan	387	1.159	1.546	135	573	708	61	678	739
7	Bengkulu	248	421	669	107	123	230	52	356	408
8	Lampung	258	527	785	196	346	542	86	443	529
9	Kepulauan Bangka Belitung	92	220	312	43	117	160	38	192	230
10	Kepulauan Riau	71	139	210	74	131	205	22	166	188
11	DKI Jakarta	94	283	377	186	336	522	179	1.115	1.294
12	Jawa Barat	816	1.486	2.302	461	799	1.260	280	1.674	1.954
13	Jawa Tengah	448	1.443	1.891	604	1.073	1.677	285	2.296	2.581
14	DI Yogyakarta	67	213	280	141	169	310	86	514	600
15	Jawa Timur	365	1.432	1.797	592	937	1.439	441	2.639	3.080
16	Banten	161	349	510	82	201	283	67	402	469
17	Bali	103	257	360	175	236	411	73	431	504
18	Nusa Tenggara Barat	160	286	446	167	366	533	117	555	672
19	Nusa Tenggara Timur	285	486	771	238	431	669	157	587	744
20	Kalimantan Barat	159	341	500	221	265	486	107	466	573
21	Kalimantan Tengah	140	253	393	86	138	224	57	398	455
22	Kalimantan Selatan	178	338	516	206	301	507	137	706	843
23	Kalimantan Timur	130	321	451	94	200	294	64	243	307
24	Kalimantan Utara	68	138	206	31	42	73	16	96	112
25	Sulawesi Utara	82	340	422	161	285	446	77	322	399
26	Sulawesi Tengah	394	1.073	1.467	185	322	507	59	373	432
27	Sulawesi Selatan	488	1.566	2.054	219	732	951	189	1.071	1.180
28	Sulawesi Tenggara	340	1.077	1.417	140	351	491	109	658	767
29	Gorontalo	105	501	606	72	151	223	61	343	404
30	Sulawesi Barat	51	190	241	42	85	127	15	142	157
31	Maluku	121	375	496	152	238	390	65	404	469
32	Maluku Utara	132	500	632	41	88	129	33	262	295
33	Papua Barat	62	150	212	46	50	96	25	159	184
34	Papua	156	336	492	150	178	328	65	220	285
	Indonesia	**7.514**	**20.792**	**28.306**	**5.761**	**11.125**	**16.886**	**3.294**	**21.299**	**24.593**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan semua pelayanan kesehatan lainnya

KEMENKES RI

Lampiran 13.b

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	253	999	1.252	137	468	605	46	422	468
2	Sumatera Utara	226	1.077	1.303	146	325	471	65	607	672
3	Sumatera Barat	67	315	382	82	256	338	26	386	412
4	Riau	131	323	454	63	122	185	18	237	255
5	Jambi	106	230	336	77	190	267	32	185	217
6	Sumatera Selatan	266	772	1.038	79	408	487	38	338	376
7	Bengkulu	158	379	537	62	85	147	27	161	188
8	Lampung	189	365	554	143	261	404	64	271	335
9	Kepulauan Bangka Belitung	50	127	177	23	75	98	26	115	141
10	Kepulauan Riau	28	80	108	39	76	115	8	80	88
11	DKI Jakarta	17	86	103	113	238	351	34	358	392
12	Jawa Barat	463	981	1.444	337	637	974	126	898	1.024
13	Jawa Tengah	267	999	1.266	368	744	1.112	145	1.006	1.151
14	DI Yogyakarta	46	129	175	63	91	154	36	163	199
15	Jawa Timur	212	808	1.020	296	593	889	238	977	1.215
16	Banten	100	194	294	51	152	203	25	201	226
17	Bali	39	93	132	116	123	239	32	146	178
18	Nusa Tenggara Barat	105	185	290	106	267	373	97	340	437
19	Nusa Tenggara Timur	201	347	548	183	351	534	133	414	547
20	Kalimantan Barat	109	232	341	166	209	375	74	322	396
21	Kalimantan Tengah	99	168	267	71	108	179	41	277	318
22	Kalimantan Selatan	124	250	374	133	236	369	99	480	579
23	Kalimantan Timur	95	249	344	58	153	211	48	141	189
24	Kalimantan Utara	38	79	117	26	30	56	8	52	60
25	Sulawesi Utara	45	216	261	116	220	336	50	224	274
26	Sulawesi Tengah	239	667	906	129	246	375	44	236	280
27	Sulawesi Selatan	276	861	1.137	136	510	646	64	621	685
28	Sulawesi Tenggara	234	714	948	96	256	352	86	455	541
29	Gorontalo	58	338	396	44	111	155	38	224	262
30	Sulawesi Barat	33	129	162	35	68	103	12	101	113
31	Maluku	51	185	236	106	147	253	44	244	288
32	Maluku Utara	64	290	354	27	61	88	27	151	178
33	Papua Barat	37	90	127	35	31	66	17	109	126
34	Papua	90	208	298	84	119	203	44	203	247
Indonesia		**4.516**	**13.185**	**17.701**	**2.746**	**7.967**	**11.713**	**1.913**	**11.145**	**13.057**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

KEMENKES RI

Lampiran 13.c

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Sumatera Utara	82	292	384	44	70	114	33	354	387
3	Sumatera Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Riau	42	124	166	13	42	55	13	236	249
5	Jambi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54	[illegible]	19	178	197
6	Sumatera Selatan	52	109	241	44	115	159	20	318	338
7	Bengkulu	44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	190	211
8	Lampung	31	91	122	28	63	91	21	170	191
9	Kepulauan Bangka Belitung	19	43	60	12	21	33	9	73	82
10	Kepulauan Riau	19	33	52	20	43	63	14	87	101
11	DKI Jakarta	76	189	265	74	99	173	144	756	900
12	Jawa Barat	268	345	605	92	136	228	157	768	925
13	Jawa Tengah	59	185	244	166	245	411	119	1.193	1.312
14	DI Yogyakarta	6	42	48	72	74	146	50	340	390
15	Jawa Timur	103	417	520	173	303	476	181	1.578	1.759
16	Banten	47	121	168	26	48	74	40	202	242
17	Bali	34	94	128	40	78	118	41	262	303
18	Nusa Tenggara Barat	20	57	77	29	63	92	15	199	214
19	Nusa Tenggara Timur	34	61	95	34	52	86	21	148	169
20	Kalimantan Barat	31	71	102	39	47	86	26	135	161
21	Kalimantan Tengah	15	31	46	12	23	35	14	108	122
22	Kalimantan Selatan	33	55	88	64	61	125	37	221	258
23	Kalimantan Timur	12	34	46	29	32	61	16	98	114
24	Kalimantan Utara	9	24	33	5	10	15	8	45	53
25	Sulawesi Utara	24	76	100	29	49	78	26	92	118
26	Sulawesi Tengah	83	260	343	37	53	90	14	124	138
27	Sulawesi Selatan	107	374	481	44	139	183	36	407	443
28	Sulawesi Tenggara	43	168	211	25	57	82	16	177	193
29	Gorontalo	11	72	83	10	19	29	13	97	110
30	Sulawesi Barat	7	28	35	4	9	13	2	40	42
31	Maluku	30	91	121	24	57	81	12	120	132
32	Maluku Utara	28	109	137	9	14	23	4	90	94
33	Papua Barat	13	35	48	11	15	26	6	49	55
34	Papua	25	59	84	51	37	88	16	108	124
	Indonesia	1.618	4.381	5.999	1.446	2.366	3.812	1.246	9.602	10.848

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

KEMENKES RI

Lampiran 14.a

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Aceh	81	753	834	212	206	418	64	239	303	177	747	924
2	Sumatera Utara	190	985	1.175	155	226	381	85	160	245	171	723	894
3	Sumatera Barat	140	812	952	211	163	374	60	132	192	226	1.102	1.328
4	Riau	108	641	749	93	124	217	38	116	154	147	406	553
5	Jambi	132	567	699	69	64	133	29	85	114	101	430	531
6	Sumatera Selatan	147	833	980	146	200	346	44	166	210	194	853	1.047
7	Bengkulu	88	300	388	87	60	147	10	29	39	58	152	210
8	Lampung	170	629	799	140	139	299	41	81	122	155	424	579
9	Kepulauan Bangka Belitung	82	243	325	80	45	125	14	65	79	71	221	292
10	Kepulauan Riau	38	211	249	75	61	136	22	40	62	80	162	242
11	DKI Jakarta	737	1.880	2.617	810	601	1.411	363	609	972	796	1.705	2.501
12	Jawa Barat	780	2.283	3.063	670	660	1.330	238	587	745	939	2.077	3.016
13	Jawa Tengah	800	3.152	3.952	954	791	1.745	462	868	1.330	996	3.060	4.056
14	DI Yogyakarta	169	660	829	209	182	391	121	213	334	230	868	1.098
15	Jawa Timur	794	3.279	4.073	826	806	1.632	239	563	802	1.017	2.279	3.296
16	Banten	173	632	805	181	174	355	73	196	269	181	419	600
17	Bali	167	462	629	242	113	355	68	59	127	151	448	599
18	Nusa Tenggara Barat	161	539	700	167	94	261	46	92	138	242	413	655
19	Nusa Tenggara Timur	175	490	665	78	69	147	25	67	92	191	567	758
20	Kalimantan Barat	182	438	620	105	48	153	23	57	80	228	441	669
21	Kalimantan Tengah	131	335	466	93	40	133	20	31	51	117	234	351
22	Kalimantan Selatan	174	620	794	130	71	201	27	52	89	193	551	744
23	Kalimantan Timur	159	461	620	99	63	162	41	78	119	111	204	315
24	Kalimantan Utara	41	94	135	38	21	59	8	13	21	48	59	107
25	Sulawesi Utara	66	132	198	76	35	111	32	57	89	65	280	345
26	Sulawesi Tengah	103	229	332	58	46	104	10	57	67	97	154	251
27	Sulawesi Selatan	218	890	1.108	103	279	472	56	197	273	223	899	1.122
28	Sulawesi Tenggara	110	350	460	54	59	113	17	61	78	96	286	382
29	Gorontalo	42	90	132	31	23	54	10	10	20	17	70	87
30	Sulawesi Barat	40	89	129	12	26	38	7	21	28	26	82	108
31	Maluku	33	137	172	33	21	54	3	25	28	29	65	93
32	Maluku Utara	49	175	224	23	49	72	9	19	28	30	48	78
33	Papua Barat	34	135	194	10	19	37	4	17	21	27	50	77
34	Papua	133	408	551	40	24	64	10	20	30	51	80	131
	Indonesia	**6.712**	**23.930**	**30.642**	**6.400**	**5.362**	**11.762**	**2.447**	**5.002**	**7.449**	**7.480**	**20.549**	**28.029**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan semua pelayanan kesehatan lainnya

KEMENKES RI

Lampiran 14.b

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	32	326	358	6	10	16	9	60	69	74	408	482
2	Sumatera Utara	73	413	486	4	9	13	9	15	24	59	427	486
3	Sumatera Barat	47	297	344	3	4	7	6	12	18	67	502	569
4	Riau	36	249	285	0	1	1	3	17	20	22	170	192
5	Jambi	48	205	253	1	0	1	2	6	8	40	236	284
6	Sumatera Selatan	53	334	387	2	10	12	3	16	19	49	403	452
7	Bengkulu	28	113	139	3	6	9	1	0	1	3	54	57
8	Lampung	66	257	323	7	4	11	0	3	3	77	293	370
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	90	117	2	1	3	1	0	1	26	106	132
10	Kepulauan Riau	14	63	77	1	0	1	0	0	0	8	58	66
11	DKI Jakarta	116	232	348	12	1	13	2	6	8	80	313	393
12	Jawa Barat	200	740	940	15	19	34	8	16	24	275	991	1.266
13	Jawa Tengah	217	878	1.095	29	28	57	50	141	191	289	1.092	1.381
14	DI Yogyakarta	37	167	204	2	7	9	16	21	37	60	284	344
15	Jawa Timur	225	960	1.185	24	26	50	33	54	87	279	779	1.058
16	Banten	27	131	158	5	6	11	1	9	10	39	131	170
17	Bali	35	99	134	3	1	4	3	2	5	71	199	270
18	Nusa Tenggara Barat	56	239	295	20	3	23	3	3	6	98	187	285
19	Nusa Tenggara Timur	114	308	422	4	7	11	6	15	21	101	365	466
20	Kalimantan Barat	90	217	307	3	2	5	1	1	2	125	273	398
21	Kalimantan Tengah	55	164	219	3	1	4	1	0	1	68	154	222
22	Kalimantan Selatan	63	280	343	1	2	3	3	5	8	98	345	443
23	Kalimantan Timur	45	203	248	0	0	0	1	3	4	43	105	148
24	Kalimantan Utara	18	38	56	0	1	1	0	1	1	24	31	55
25	Sulawesi Utara	24	28	52	1	1	2	6	16	22	37	208	245
26	Sulawesi Tengah	49	108	157	0	0	0	0	2	2	52	77	129
27	Sulawesi Selatan	67	366	433	4	9	13	5	15	20	120	480	600
28	Sulawesi Tenggara	47	144	191	1	4	5	3	12	15	37	134	171
29	Gorontalo	16	38	54	0	0	0	0	0	0	3	31	34
30	Sulawesi Barat	22	63	85	0	0	0	0	6	6	13	43	56
31	Maluku	8	44	52	2	1	3	1	5	6	12	26	38
32	Maluku Utara	24	82	106	1	3	4	1	3	4	8	27	35
33	Papua Barat	25	71	96	1	0	1	0	1	1	9	22	31
34	Papua	87	218	305	1	2	3	0	2	2	12	35	47
	Indonesia	2.889	8.165	10.254	161	169	330	178	468	646	2.986	8.989	11.975

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

KEMENKES RI

Lampiran 14.c

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medik		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	47	422	469	202	194	396	55	182	237	102	336	438
2	Sumatera Utara	99	518	617	148	220	368	75	151	226	108	295	403
3	Sumatera Barat	87	463	550	204	157	361	52	120	172	132	508	740
4	Riau	67	359	426	93	122	215	35	99	134	121	233	354
5	Jambi	67	300	367	67	64	131	27	79	106	50	181	231
6	Sumatera Selatan	94	491	585	144	189	333	41	150	191	144	449	593
7	Bengkulu	56	153	209	84	54	138	9	29	38	55	97	152
8	Lampung	99	352	451	150	134	284	41	77	118	80	133	213
9	Kepulauan Bangka Belitung	42	121	163	76	41	117	13	61	74	67	109	152
10	Kepulauan Riau	42	139	181	73	61	134	21	39	60	71	107	178
11	DKI Jakarta	584	1.484	2.068	789	585	1.374	328	542	870	687	1.292	1.979
12	Jawa Barat	522	1.359	1.881	628	423	1.051	223	476	699	633	1.052	1.685
13	Jawa Tengah	484	1.887	2.371	892	720	1.612	385	665	1.050	660	1.799	2.459
14	DI Yogyakarta	112	464	576	215	181	396	107	188	295	164	546	710
15	Jawa Timur	517	2.018	2.535	882	662	1.544	299	476	775	701	1.449	2.150
16	Banten	130	472	602	170	165	335	69	181	250	135	287	422
17	Bali	109	312	421	254	88	342	61	52	113	76	220	296
18	Nusa Tenggara Barat	93	256	349	147	88	235	38	80	118	138	211	349
19	Nusa Tenggara Timur	54	168	222	73	60	133	19	52	71	77	198	275
20	Kalimantan Barat	85	205	290	99	46	145	22	54	76	98	164	262
21	Kalimantan Tengah	66	143	209	86	39	125	19	31	50	40	80	120
22	Kalimantan Selatan	90	301	391	128	70	198	34	45	79	96	200	296
23	Kalimantan Timur	106	228	334	97	63	160	40	75	115	64	96	160
24	Kalimantan Utara	20	50	70	35	19	54	8	12	20	24	29	53
25	Sulawesi Utara	37	81	118	34	14	48	26	40	66	27	66	93
26	Sulawesi Tengah	51	119	170	50	45	95	10	54	64	44	76	120
27	Sulawesi Selatan	143	492	635	185	268	453	71	181	252	109	400	509
28	Sulawesi Tenggara	53	177	230	51	54	105	12	50	62	58	151	209
29	Gorontalo	24	48	72	30	23	53	10	10	20	9	36	45
30	Sulawesi Barat	17	25	42	12	26	38	7	15	22	13	38	51
31	Maluku	25	76	101	25	16	41	3	20	23	16	33	49
32	Maluku Utara	25	91	116	22	46	68	8	16	24	22	20	42
33	Papua Barat	30	54	84	18	18	36	4	14	18	17	26	43
34	Papua	57	144	201	39	21	60	10	18	28	39	45	84
	Indonesia	**4.134**	**13.972**	**18.106**	**6.182**	**4.996**	**11.178**	**2.181**	**4.334**	**6.515**	**4.881**	**11.042**	**15.923**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2019

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

KEMENKES RI

Lampiran 15.a

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian*			Apoteker			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	130	949	1.077	50	272	322	178	1.221	1.399
2	Sumatera Utara	183	1.384	1.567	100	445	545	283	1.829	2.112
3	Sumatera Barat	122	1.011	1.133	61	332	393	183	1.342	1.525
4	Riau	118	772	890	62	336	398	180	1.108	1.288
5	Jambi	88	642	730	59	278	337	147	920	1.067
6	Sumatera Selatan	190	1.103	1.293	82	309	391	272	1.412	1.684
7	Bengkulu	75	361	436	33	167	200	108	528	636
8	Lampung	140	547	687	73	238	311	213	785	998
9	Kepulauan Bangka Belitung	86	379	465	54	172	226	140	551	691
10	Kepulauan Riau	82	279	361	54	169	223	136	448	584
11	DKI Jakarta	847	3.807	4.654	324	1.325	1.649	1.221	5.082	6.303
12	Jawa Barat	980	4.013	4.993	591	1.840	2.431	1.571	5.853	7.424
13	Jawa Tengah	817	5.539	6.356	513	2.850	3.363	1.330	8.389	9.719
14	DI Yogyakarta	140	1.007	1.147	96	650	746	236	1.657	1.893
15	Jawa Timur	834	5.279	6.113	529	2.330	2.859	1.362	7.509	8.971
16	Banten	204	1.060	1.264	110	518	628	314	1.578	1.892
17	Bali	118	673	791	162	236	398	280	909	1.189
18	Nusa Tenggara Barat	180	376	556	86	241	327	266	617	883
19	Nusa Tenggara Timur	124	524	648	38	152	190	162	676	838
20	Kalimantan Barat	129	460	589	72	197	269	201	657	858
21	Kalimantan Tengah	99	323	422	57	214	271	156	537	693
22	Kalimantan Selatan	172	734	906	85	265	350	257	999	1.256
23	Kalimantan Timur	171	559	730	85	278	363	256	837	1.093
24	Kalimantan Utara	46	160	206	35	93	128	81	253	334
25	Sulawesi Utara	82	320	402	36	162	198	118	482	600
26	Sulawesi Tengah	106	539	645	65	225	290	171	764	935
27	Sulawesi Selatan	190	1.063	1.253	147	807	1.054	357	1.950	2.307
28	Sulawesi Tenggara	98	449	547	73	317	390	171	766	937
29	Gorontalo	30	186	216	25	106	131	55	292	347
30	Sulawesi Barat	26	130	156	33	90	123	59	220	279
31	Maluku	30	129	159	15	148	163	45	277	322
32	Maluku Utara	27	144	171	27	116	143	54	260	314
33	Papua Barat	28	93	121	23	98	120	53	188	241
34	Papua	109	265	374	66	171	237	143	436	581
Indonesia		6.799	35.238	42.037	3.982	14.136	18.118	10.781	51.372	62.153

Sumber : Survei Fasilitas DEN Kesehatan, untuk versi Sistem Informasi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2019 (Update per 31 Oktober 2019)

Keterangan : (1) Tenaga kefarmasian yang bekerja di fasilitas kesehatan, tempat tinggal, atau sarana produksi dan distribusi kefarmasian

*) Tenaga kefarmasian yang bekerja di fasilitas kesehatan, tempat tinggal, atau sarana produksi dan distribusi kefarmasian

KEMENKES RI

Lampiran 15.b

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian*			Apoteker			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	39	421	460	18	83	101	57	504	561
2	Sumatera Utara	66	578	644	26	154	180	92	732	824
3	Sumatera Barat	38	323	361	17	91	108	55	414	469
4	Riau	33	284	317	26	109	135	59	393	452
5	Jambi	25	226	251	12	63	75	37	289	326
6	Sumatera Selatan	64	425	489	27	104	131	91	529	620
7	Bengkulu	18	119	137	9	42	51	27	161	188
8	Lampung	52	207	259	20	88	108	72	295	367
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	98	111	22	45	67	35	143	178
10	Kepulauan Riau	17	71	88	20	64	84	37	135	172
11	DKI Jakarta	146	508	654	37	118	155	183	626	809
12	Jawa Barat	217	909	1.126	161	486	647	378	1.395	1.773
13	Jawa Tengah	161	881	1.042	104	447	551	265	1.328	1.593
14	DI Yogyakarta	24	142	166	13	99	112	37	241	278
15	Jawa Timur	136	900	1.036	79	317	396	230	1.197	1.427
16	Banten	31	124	155	29	150	179	60	274	334
17	Bali	28	122	150	27	55	82	55	177	232
18	Nusa Tenggara Barat	35	161	196	25	76	101	80	237	297
19	Nusa Tenggara Timur	73	311	384	14	58	72	87	369	456
20	Kalimantan Barat	45	213	258	30	81	111	75	294	369
21	Kalimantan Tengah	58	161	219	29	96	125	87	257	344
22	Kalimantan Selatan	64	273	337	41	122	163	105	395	500
23	Kalimantan Timur	54	234	288	16	113	149	90	347	437
24	Kalimantan Utara	14	58	72	14	33	47	28	91	119
25	Sulawesi Utara	36	140	176	17	53	70	53	193	246
26	Sulawesi Tengah	49	294	343	27	94	121	76	388	464
27	Sulawesi Selatan	50	403	453	41	289	330	91	692	783
28	Sulawesi Tenggara	44	220	264	34	135	169	78	355	433
29	Gorontalo	9	93	102	9	49	58	18	142	160
30	Sulawesi Barat	14	73	87	22	51	73	36	124	160
31	Maluku	7	53	60	2	48	50	9	101	110
32	Maluku Utara	13	61	74	14	48	62	27	109	136
33	Papua Barat	13	52	65	6	38	44	17	90	107
34	Papua	57	129	186	15	69	84	72	198	270
	Indonesia	**1.781**	**9.227**	**11.008**	**1.018**	**3.968**	**4.986**	**2.799**	**13.195**	**15.994**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kefarmasian dan Alat Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2019 (Update per 31 Desember 2019)

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi

b) Tenaga kefarmasian yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

KEMENKES RI

Lampiran 15.c

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian*			Apoteker			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	78	491	569	31	168	199	109	659	768
2	Sumatera Utara	96	755	851	68	257	325	164	1.012	1.176
3	Sumatera Barat	74	610	684	41	209	250	115	819	934
4	Riau	80	453	533	29	208	237	109	661	770
5	Jambi	47	325	372	24	135	159	71	460	531
6	Sumatera Selatan	111	633	744	54	185	239	165	818	983
7	Bengkulu	48	206	254	17	89	106	65	295	360
8	Lampung	76	320	396	46	129	175	122	449	571
9	Kepulauan Bangka Belitung	53	159	212	18	63	81	71	222	293
10	Kepulauan Riau	61	181	242	33	88	121	94	269	363
11	DKI Jakarta	615	2.795	3.410	206	767	973	821	3.562	4.383
12	Jawa Barat	594	2.429	3.023	210	829	1.039	804	3.258	4.062
13	Jawa Tengah	517	3.247	3.764	211	1.256	1.467	728	4.503	5.231
14	DI Yogyakarta	97	715	812	42	330	372	139	1.045	1.184
15	Jawa Timur	589	3.577	4.166	244	1.198	1.442	833	4.775	5.608
16	Banten	145	836	981	63	315	378	208	1.151	1.359
17	Bali	80	473	553	67	153	220	147	626	773
18	Nusa Tenggara Barat	116	211	327	52	143	195	168	354	522
19	Nusa Tenggara Timur	32	169	201	16	79	95	48	248	296
20	Kalimantan Barat	68	205	273	37	97	134	105	302	407
21	Kalimantan Tengah	30	131	161	26	106	132	56	237	293
22	Kalimantan Selatan	89	386	475	33	120	153	122	506	628
23	Kalimantan Timur	107	304	411	42	146	188	149	450	599
24	Kalimantan Utara	27	93	120	23	50	73	48	143	191
25	Sulawesi Utara	40	152	192	17	86	103	57	238	295
26	Sulawesi Tengah	48	224	272	18	116	149	81	340	421
27	Sulawesi Selatan	111	560	671	93	430	523	204	990	1.194
28	Sulawesi Tenggara	43	203	246	28	157	185	71	360	431
29	Gorontalo	20	86	106	12	46	58	32	132	164
30	Sulawesi Barat	11	39	50	10	36	46	21	75	96
31	Maluku	17	61	78	9	74	83	26	135	161
32	Maluku Utara	10	69	79	12	54	66	22	123	145
33	Papua Barat	15	32	47	10	30	40	25	70	95
34	Papua	44	118	162	19	87	106	63	205	268
	Indonesia	4.189	21.248	25.437	1.874	8.244	10.118	6.063	29.492	35.555

Sumber : Diolah berdasarkan SIPKN Kemenkes dan/atau Laporan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterangan : a) Tenaga kefarmasian yang bertugas di rumah sakit selain apoteker

b) Tenaga kefarmasian yang bertugas di rumah sakit selain apoteker dan tenaga teknis kefarmasian

KEMENKES RI

Lampiran 18.a

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

No.	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Petugas Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Aceh	580	506	1.086	2	8	10	3.132	3.520	6.652	3.634	4.034	7.668
2	Sumatera Utara	646	896	1.542	8	15	23	5.217	4.652	9.869	5.865	5.565	9.434
3	Sumatera Barat	357	597	1.014	1	9	10	2.332	3.347	5.679	2.690	4.053	6.943
4	Riau	356	439	795	2	5	7	2.889	3.165	6.054	3.247	3.609	6.856
5	Jambi	416	350	766	3	6	9	1.761	2.258	4.019	2.182	2.612	4.794
6	Sumatera Selatan	580	577	1.877	4	6	10	4.096	5.127	9.133	4.530	5.719	10.229
7	Bengkulu	301	289	594	3	3	6	1.184	1.421	2.525	1.414	1.713	3.127
8	Lampung	521	518	1.039	6	22	28	3.284	4.361	7.745	3.911	4.901	8.812
9	Kepulauan Bangka Belitung	191	232	423	0	2	2	1.554	1.767	3.321	1.745	2.001	3.746
10	Kepulauan Riau	266	248	514	10	12	22	1.556	1.730	3.286	1.832	1.990	3.822
11	DKI Jakarta	935	1.136	1.973	24	33	57	16.256	13.948	30.204	17.115	15.119	32.234
12	Jawa Barat	1.880	1.571	3.371	4	23	27	16.796	14.202	30.998	18.680	15.793	34.397
13	Jawa Tengah	1.026	1.098	3.636	71	96	167	20.941	20.692	41.633	22.010	22.946	45.434
14	DI Yogyakarta	303	384	687	6	11	17	3.934	4.054	7.988	4.243	4.449	8.692
15	Jawa Timur	1.729	2.102	3.831	61	48	109	21.893	21.687	44.580	24.683	23.837	48.520
16	Banten	356	500	856	2	1	3	4.210	3.923	8.133	4.568	4.426	8.994
17	Bali	418	346	764	4	7	11	4.299	5.119	9.407	4.710	5.472	10.182
18	Nusa Tenggara Barat	508	255	763	59	87	146	3.298	2.425	5.823	3.865	2.767	6.732
19	Nusa Tenggara Timur	366	600	766	1	0	1	1.745	1.678	3.423	2.112	2.678	4.210
20	Kalimantan Barat	622	241	863	2	2	4	1.922	2.241	4.163	2.546	2.484	4.830
21	Kalimantan Tengah	399	242	632	1	1	2	1.565	1.825	3.390	1.956	2.066	4.022
22	Kalimantan Selatan	546	349	895	17	6	23	2.818	2.956	5.774	3.381	3.312	6.692
23	Kalimantan Timur	411	378	829	2	1	3	2.660	3.009	5.849	3.293	3.388	6.681
24	Kalimantan Utara	121	130	251	1	0	1	845	862	1.807	1.067	972	2.039
25	Sulawesi Utara	211	349	560	1	6	7	926	1.448	2.374	1.138	1.803	2.941
26	Sulawesi Tengah	286	297	583	3	13	16	1.438	1.010	3.368	1.747	2.220	3.967
27	Sulawesi Selatan	597	720	1.317	0	3	3	2.460	1.138	3.606	3.065	2.861	6.926
28	Sulawesi Tenggara	356	372	726	3	5	8	966	1.335	2.241	1.263	1.712	2.975
29	Gorontalo	130	180	310	1	1	3	796	1.232	2.031	931	1.417	2.352
30	Sulawesi Barat	131	154	285	0	0	0	347	381	728	478	535	1.013
31	Maluku	142	205	347	2	1	3	825	667	1.492	819	1.075	1.894
32	Maluku Utara	186	165	351	0	0	0	279	336	955	565	741	1.306
33	Papua Barat	214	150	364	0	0	0	364	542	1.126	778	712	1.490
34	Papua	453	311	764	6	4	10	1.446	2.943	3.967	1.902	1.797	3.699
	Indonesia	16.909	17.482	34.391	299	443	742	139.597	142.884	282.481	156.805	160.809	317.614

KEMENKES RI

Lampiran 16.b

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Aceh	14	68	82	0	0	0	0	4	4
2	Sumatera Utara	2	28	30	0	2	2	0	6	6
3	Sumatera Barat	6	30	36	0	0	0	0	0	0
4	Riau	2	34	36	2	0	2	0	0	0
5	Jambi	4	14	18	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	14	66	80	10	6	16	0	8	8
7	Bengkulu	0	10	10	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	12	16	0	0	0	0	22	22
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	14	18	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	2	12	14	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	14	128	142	42	54	96	58	112	170
12	Jawa Barat	12	84	96	0	0	0	12	2	14
13	Jawa Tengah	30	188	218	4	2	6	2	14	16
14	DI Yogyakarta	6	130	136	0	12	12	0	2	2
15	Jawa Timur	36	158	194	10	44	54	10	42	52
16	Banten	2	4	6	0	0	0	0	0	0
17	Bali	8	38	46	2	0	2	0	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	4	32	36	2	0	2	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	2	8	10	2	4	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	8	20	26	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	4	10	14	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	6	54	60	0	0	0	8	4	12
23	Kalimantan Timur	2	8	10	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	2	8	10	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	14	18	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	12	22	34	0	0	0	0	2	2
27	Sulawesi Selatan	6	8	14	0	2	2	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	4	14	18	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	4	8	12	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	2	4	6	0	0	0	0	4	4
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	2	4	6	0	2	2	56	68	124
	Indonesia	220	1.240	1.460	74	134	208	166	300	466

KEMENKES RI

Lampiran 16.c

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Aceh	4	8	12	0	0	0	0	4	4
2	Sumatera Utara	0	12	12	0	2	2	0	2	2
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	6	6	0	0	0
4	Riau	0	4	4	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	6	6	12	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	2	4	6	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	2	2	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	12	0	12	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	2	2	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	6	128	134	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	14	2	16	10	48	58	10	48	58
16	Banten	0	2	2	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	4	4	2	0	2	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	2	4	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	12	12	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	6	6	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	4	6	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	2	10	12	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	2	2	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	2	0	2	0	2	2	56	68	124
	Indonesia	54	208	262	14	54	68	66	114	180

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian RI, 2020.

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

KEMENKES RI

Lampiran 16.d

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Aceh	5	46	51	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	2	16	18	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	6	30	36	0	0	0	0	0	0
4	Riau	2	30	32	2	0	2	0	0	0
5	Jambi	4	14	18	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	8	60	68	10	8	18	0	0	0
7	Bengkulu	0	6	6	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	10	14	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	14	14	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	12	12	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	2	128	130	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	12	64	76	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	30	180	210	0	0	0	0	2	2
14	DI Yogyakarta	0	2	2	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	22	156	178	0	2	2	0	0	0
16	Banten	2	2	4	0	0	0	0	0	0
17	Bali	6	34	40	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	4	28	32	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	2	8	10	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	6	8	14	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	2	10	12	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	6	54	60	0	0	0	8	4	12
23	Kalimantan Timur	2	6	8	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	2	2	4	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	10	12	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	10	8	18	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	4	4	8	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	4	14	18	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	4	8	12	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	2	2	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	Indonesia	162	978	1.140	12	8	20	8	14	22

KEMENKES RI

Lampiran 16.4

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019

No	Nama Poltekkes	Program Studi																		
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Analis Farmasi dan Makanan	Farmasi	Jamu	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analis Kesehatan	Teknik Gigi	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Perekam dan Informasi Kesehatan	Teknik Elektro Medik	Orotik Prosetik	Total
1	Aceh	250	116	83	-	81	-	34	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713
2	Medan	155	303	85	-	87	-	91	87	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	902
3	Padang	189	134	71	-	-	-	76	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
4	Riau	76	39	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
5	Jambi	57	36	37	-	28	-	46	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	223
6	Palembang	283	155	85	-	73	-	-	77	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	749
7	Bengkulu	156	122	-	-	-	-	85	69	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	522
8	Tanjung Karang	284	177	48	-	34	-	78	45	-	-	-	-	92	24	-	-	-	-	724
9	Tanjung Pinang	60	76	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202
10	Pangkal Pinang	71	29	-	-	30	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
11	Jakarta I	80	76	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
12	Jakarta II	-	-	-	74	133	-	66	74	-	-	-	-	-	41	43	-	37	-	484
13	Jakarta III	196	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	451
14	Bandung	205	203	79	-	55	-	62	71	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	756
15	Tasikmalaya	153	79	75	-	39	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	336
16	Semarang	853	243	86	-	-	-	92	73	-	-	-	-	83	-	142	88	-	-	1489
17	Surakarta	98	94	-	-	-	89	-	-	96	99	66	45	-	-	-	-	-	44	633
18	Yogyakarta	78	36	88	-	-	-	79	88	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	368
19	Surabaya	263	199	36	-	-	-	118	77	-	-	-	-	79	-	-	-	69	-	744
20	Malang	468	145	-	-	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	822
21	Banten	92	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	260
22	Denpasar	186	57	110	-	-	-	26	56	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	482
23	Mataram	133	59	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	310
24	Kupang	439	186	118	-	117	-	78	89	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	1128
25	Pontianak	94	50	125	-	-	-	39	63	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	426
26	Palangkaraya	151	11	-	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284
27	Banjarmasin	39	42	35	-	-	-	90	51	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	301
28	Kalimantan Timur	118	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	260
29	Manado	86	54	67	-	69	-	44	50	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	453
30	Palu	172	117	-	-	-	-	61	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
31	Makassar	247	98	64	-	80	-	42	41	43	-	-	-	40	-	-	-	-	-	617
32	Bandari	73	84	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	254
33	Gorontalo	143	132	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
34	Mamuju	27	27	-	-	-	-	15	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
35	Maluku	272	227	-	-	-	-	102	67	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	777
36	Ternate	88	81	-	-	-	-	43	51	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	300
37	Jayapura	438	184	-	-	61	-	61	18	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	805
38	Sorong	191	115	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341
	Total	6.979	4.053	1.329	74	911	89	1.411	1.843	141	99	66	45	1.822	67	183	256	86	66	19.523

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI 2019
Catatan : --- tidak ada program studi di poltekkes

KEMENKES RI

Lampiran 16.f

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2019

No	Nama Poltekkes	Program Studi								Total
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Analis Kesehatan	Perekam dan Informasi Kesehatan	
1	Aceh	443	168	103	79	14	13	-	-	820
2	Medan	107	144	72	48	36	57	89	-	553
3	Padang	42	-	107	-	26	41	-	-	216
4	Riau	78	-	-	-	-	-	-	-	78
5	Jambi	146	13	86	-	23	-	-	-	268
6	Palembang	260	44	86	44	-	20	79	-	533
7	Bengkulu	73	-	-	-	1	-	123	-	197
8	Tanjung Karang	161	65	60	29	-	-	-	-	315
9	Tanjung Pinang	13	8	-	-	-	-	-	-	21
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Jakarta I	32	-	194	-	-	-	-	-	226
12	Jakarta II	-	-	-	84	-	10	-	-	94
13	Jakarta III	21	-	-	-	-	-	40	-	61
14	Bandung	106	18	34	40	57	59	21	-	333
15	Tasikmalaya	106	19	29	-	-	-	-	-	154
16	Semarang	141	37	99	-	-	2	20	28	327
17	Surakarta	83	13	-	-	-	-	-	-	96
18	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Surabaya	111	101	148	-	-	52	25	-	437
20	Malang	83	4	-	-	-	-	-	-	87
21	Banten	76	16	-	-	-	-	-	-	92
22	Denpasar	49	-	22	-	-	13	41	-	127
23	Mataram	94	-	-	-	-	-	66	-	160
24	Kupang	183	216	103	26	39	9	25	-	601
25	Pontianak	77	17	16	-	9	-	-	-	119
26	Palangkaraya	29	-	-	-	-	43	-	-	72
27	Banjarmasin	67	-	50	-	33	13	-	-	169
28	Kalimantan Timur	40	13	-	-	-	-	8	-	61
29	Manado	163	47	62	99	83	32	34	-	462
30	Palu	183	67	-	-	32	-	-	-	282
31	Makassar	149	13	97	85	7	24	73	-	418
32	Bandari	150	-	-	-	-	19	-	-	169
33	Gorontalo	69	-	-	-	-	-	-	-	69
34	Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Maluku	204	100	-	-	10	-	-	-	314
36	Ternate	77	-	-	-	-	14	-	-	91
37	Jayapura	301	132	-	22	-	-	66	-	521
38	Sorong	146	-	-	-	-	-	-	-	146
Total		4.062	1.255	1.394	486	369	465	712	28	8.709

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Desember 31, 2019

Catatan : - = tidak ada program studi di poltekkes

KEMENKES RI

Lampiran 19.8

JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan	Keperawatan Gigi	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Analis Kesehatan	Teknik Elektromedik	Teknik Kedokteran Diagnostik dan Radioterapi	Orotik Prosetik	Jumlah
1	Aceh	104	94	130	65	87	-	-	-	-	-	-	-	-	480
2	Medan	131	47	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	275
3	Padang	148	-	-	57	66	-	-	-	-	-	-	-	-	253
4	Riau	70	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
5	Jambi	116	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
6	Palembang	35	43	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	114
7	Bengkulu	65	34	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	142
8	Tanjung Karang	77	36	-	35	-	-	-	-	-	36	-	-	-	184
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jakarta I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
12	Jakarta II	-	-	-	62	88	-	-	-	-	-	38	62	-	188
13	Jakarta III	77	-	-	-	-	83	-	-	-	37	-	-	-	197
14	Bandung	-	-	-	41	75	-	-	-	-	84	-	-	-	200
15	Tasikmalaya	156	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
16	Semarang	323	97	121	39	96	-	-	-	-	-	-	194	-	868
17	Surakarta	159	88	-	-	-	106	64	42	88	-	-	-	48	567
18	Yogyakarta	132	39	81	66	80	-	-	-	-	76	-	-	-	474
19	Surabaya	133	37	30	52	-	-	-	-	-	86	72	-	-	410
20	Malang	314	86	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	463
21	Banten	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
22	Denpasar	37	75	-	72	95	-	-	-	-	-	-	-	-	299
23	Mataram	46	88	-	-	62	-	-	-	-	84	-	-	-	276
24	Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pontianak	177	75	-	88	73	-	-	-	-	117	-	-	-	992
26	Palangkaraya	127	48	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	203
27	Banjarmasin	34	42	34	39	44	-	-	-	-	49	-	-	-	232
28	Kalimantan Timur	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
29	Manado	104	48	-	72	46	-	-	-	-	-	-	-	-	250
30	Palu	93	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
31	Makassar	71	93	134	82	104	129	-	-	-	112	-	-	-	691
32	Bandar	182	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	200
33	Gorontalo	124	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
34	Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Ternate	36	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
37	Jayapura	76	43	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	159
38	Sorong	44	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
Total		3.266	1.821	641	672	1.213	318	64	42	88	828	110	294	66	8347

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Catatan : - = tidak ada program studi di poltekkes

KEMENKES RI

Lampiran 16.h

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jenis Tenaga Kesehatan														Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Keterawatan	Apoteker	
1	Aceh	543	110	6.732	2.003	717	387	271	185	65	39	523	639	0	27.091
2	Sumatera Utara	2.432	362	6.619	5.897	1.716	202	441	566	272	210	437	2.423	295	21.892
3	Sumatera Barat	1.083	367	4.352	2.544	719	300	573	522	382	111	679	1.037	261	13.846
4	Riau	215	0	3.227	1.468	674	0	263	166	0	102	177	662	0	6.146
5	Jambi	277	0	1.366	900	294	149	71	17	0	71	119	142	0	3.314
6	Sumatera Selatan	402	139	4.071	2.815	702	165	202	429	89	116	377	878	0	12.425
7	Bengkulu	120	0	1.781	1.132	177	109	245	268	0	0	35	420	0	4.256
8	Lampung	1.329	0	2.969	1.680	183	240	105	337	54	0	223	337	0	7.471
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	343	137	61	0	38	0	0	0	0	37	0	616
10	Kepulauan Riau	240	0	774	408	0	131	0	12	0	0	0	0	0	1.565
11	DKI Jakarta	6.441	1.193	7.132	3.109	2.009	304	954	371	474	543	1.161	2.470	1.838	27.597
12	Jawa Barat	2.080	360	16.047	5.381	1.177	298	830	1.036	315	268	1.799	4.336	1.289	36.134
13	Jawa Tengah	2.301	471	16.987	4.397	1.620	391	1.009	1.713	857	1.549	1.202	6.940	1.464	39.819
14	DI Yogyakarta	1.526	627	4.651	1.774	741	244	631	486	149	487	843	1.877	1.824	15.104
15	Jawa Timur	3.316	1.449	21.693	6.582	1.182	475	1.542	1.093	243	440	1.303	3.277	1.324	42.213
16	Banten	721	0	4.592	1.721	528	0	0	124	11	0	224	335	0	8.256
17	Bali	682	212	2.962	522	281	196	283	237	179	230	321	890	124	6.600
18	Nusa Tenggara Barat	306	0	2.130	666	54	25	271	438	0	0	132	321	0	4.323
19	Nusa Tenggara Timur	128	0	2.099	1.093	200	147	151	140	0	0	240	311	2	4.507
20	Kalimantan Barat	113	0	2.206	1.166	318	96	167	278	9	0	267	482	117	5.128
21	Kalimantan Tengah	84	0	843	781	0	0	118	118	0	0	0	213	0	2.157
22	Kalimantan Selatan	159	61	2.873	848	386	249	244	388	33	35	386	1.076	115	6.865
23	Kalimantan Timur	90	5	1.792	739	300	56	0	182	0	0	0	321	113	3.678
24	Kalimantan Utara	0	0	254	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
25	Sulawesi Utara	393	93	3.450	680	366	249	173	133	0	10	231	330	0	6.340
26	Sulawesi Tengah	410	0	1.543	1.052	455	94	55	0	0	0	0	381	0	3.990
27	Sulawesi Selatan	1.344	294	10.252	4.423	1.362	266	364	757	0	395	1.053	2.414	675	24.697
28	Sulawesi Tenggara	25	0	1.421	1.061	672	0	171	299	0	0	116	435	0	3.899
29	Gorontalo	0	0	1.131	546	247	0	96	25	0	0	28	123	0	2.100
30	Sulawesi Barat	0	0	583	329	89	24	37	0	0	0	0	39	0	1.101
31	Maluku	1	0	1.442	459	178	270	154	197	0	0	0	0	0	2.702
32	Maluku Utara	0	0	360	377	159	80	87	74	0	0	0	14	0	1.151
33	Papua Barat	0	0	695	220	46	0	56	0	0	0	0	0	0	1.017
34	Papua	699	0	1.943	984	108	109	180	237	0	0	0	261	0	4.231
	Indonesia	33.436	5.933	190.206	88.199	18.199	5.276	9.729	12.651	2.765	6.642	12.505	32.859	8.940	335.388

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kemenristekdikti dan Kemenkes RI, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 19.1

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
1	Aceh	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7
2	Sumatera Utara	3	5	0	10	0	0	0	7	0	22	16	67
3	Sumatera Barat	24	6	11	6	0	0	7	2	0	35	0	91
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	16	22	9	26	0	18	0	4	0	18	0	113
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	87	65	59	111	33	49	9	12	11	209	79	724
12	Jawa Barat	21	17	25	94	28	33	15	15	0	148	69	465
13	Jawa Tengah	25	34	16	22	23	30	30	5	0	144	0	329
14	DI Yogyakarta	33	28	28	40	19	11	14	7	0	96	68	326
15	Jawa Timur	66	13	43	65	19	19	13	7	0	217	89	551
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	30	16	28	10	6	13	0	3	0	74	0	182
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	14	12	26	13	0	0	0	0	0	32	0	97
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	19	20	21	35	21	21	19	11	0	61	35	263
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indonesia	338	238	266	443	133	194	109	73	11	1.056	356	3.217

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kemenristekdikti dan Kebudayaan, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 17.a

CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PBI APBN	Penduduk yang Didaftarkan Pemda	Bukan PBI			Total	%
					Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.274.871	3.134.262	2.352.607	845.304	40.938	137.913	5.584.929	100,82
2	Sumatera Utara	14.799.532	4.722.225	1.560.781	2.417.670	2.079.745	314.015	11.094.436	75,45
3	Sumatera Barat	5.496.751	1.810.058	634.689	846.261	828.497	120.254	4.429.758	80,56
4	Riau	7.128.235	1.098.128	690.212	1.412.871	867.810	61.637	4.610.658	64,68
5	Jambi	3.577.894	932.254	319.768	631.707	630.089	48.276	2.588.194	72,37
6	Sumatera Selatan	8.267.923	2.789.023	1.570.744	1.235.148	854.970	119.816	6.474.699	73,57
7	Bengkulu	2.015.840	738.200	163.002	336.831	320.859	26.173	1.585.243	78,68
8	Lampung	8.321.201	3.034.771	868.217	946.230	918.223	113.163	6.419.804	77,69
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.317.350	227.108	291.246	289.956	321.643	19.681	1.119.684	73,79
10	Kepulauan Riau	2.342.198	524.767	236.128	776.619	380.648	17.324	1.727.476	77,84
11	DKI Jakarta	10.644.986	3.888.477	3.354.397	9.691.840	1.691.894	257.889	17.991.401	104,22
12	Jawa Barat	49.935.858	16.628.976	4.221.997	8.411.225	6.427.362	868.347	36.557.397	73,21
13	Jawa Tengah	34.940.078	15.793.737	3.383.203	5.298.847	3.737.963	682.855	28.896.605	82,70
14	DI Yogyakarta	3.882.288	1.496.455	522.628	970.893	373.696	146.482	3.215.916	85,41
15	Jawa Timur	39.872.295	15.334.869	3.045.147	5.691.346	3.888.906	953.408	29.032.971	72,81
16	Banten	13.160.496	3.269.082	2.111.442	3.441.218	1.571.816	145.436	10.538.214	80,07
17	Bali	4.380.834	871.903	1.313.171	1.129.031	561.990	85.230	4.162.689	95,02
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.632	2.687.029	523.250	534.243	310.629	54.878	4.310.019	84,09
19	Nusa Tenggara Timur	5.041.394	2.980.813	385.883	372.378	259.191	85.205	4.476.391	88,78
20	Kalimantan Barat	5.134.760	1.807.911	343.952	998.810	616.121	72.530	3.823.337	74,46
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	524.789	606.574	767.572	276.770	38.259	2.414.959	87,20
22	Kalimantan Selatan	4.305.979	995.288	309.877	869.113	684.789	73.817	3.072.886	71,38
23	Kalimantan Timur	3.793.152	723.610	419.825	1.381.766	672.258	96.224	3.443.663	90,79
24	Kalimantan Utara	768.583	168.154	171.336	187.811	128.278	6.914	641.982	83,54
25	Sulawesi Utara	2.528.794	670.542	803.275	436.296	406.084	34.137	2.595.235	102,63
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	1.219.243	654.189	483.901	383.505	42.828	2.783.626	89,88
27	Sulawesi Selatan	8.928.204	3.448.123	2.532.574	1.218.320	1.086.116	221.338	8.506.471	95,28
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	1.209.218	584.213	398.623	280.324	36.982	2.509.360	87,44
29	Gorontalo	1.219.376	560.857	369.215	156.665	56.888	17.328	1.159.745	93,43
30	Sulawesi Barat	1.405.012	646.256	343.343	168.755	179.582	20.005	1.357.941	93,09
31	Maluku	1.831.880	764.628	236.717	380.345	184.972	43.667	1.658.129	79,60
32	Maluku Utara	1.278.764	370.409	257.786	223.822	65.109	14.900	932.134	72,89
33	Papua Barat	981.822	784.356	250.826	223.879	57.273	14.590	1.331.009	135,53
34	Papua	3.435.430	2.847.894	513.249	322.313	127.018	32.046	3.842.717	111,86
Total		271.852.473	96.334.326	38.842.476	63.224.446	38.240.211	5.111.366	224.141.255	82,69

Sumber : BPJS Kesehatan, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 17.b

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2019

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama					Total
		Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	
1	Aceh	82	170	353	0	3	616
2	Sumatera Utara	189	563	586	2	9	1.279
3	Sumatera Barat	115	150	274	2	36	577
4	Riau	91	269	227	0	24	611
5	Jambi	84	73	196	0	16	369
6	Sumatera Selatan	247	218	341	0	46	852
7	Bengkulu	95	43	179	1	17	335
8	Lampung	137	185	310	0	10	642
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	92	64	1	5	197
10	Kepulauan Riau	13	127	81	0	1	222
11	DKI Jakarta	18	349	324	0	1	692
12	Jawa Barat	536	1358	1086	0	67	3.023
13	Jawa Tengah	1156	704	870	1	306	3.045
14	D I Yogyakarta	112	158	121	0	37	388
15	Jawa Timur	756	777	967	0	222	2.722
16	Banten	53	424	202	0	3	682
17	Bali	334	119	122	4	91	668
18	Nusa Tenggara Barat	100	93	166	1	12	332
19	Nusa Tenggara Timur	94	84	408	1	32	614
20	Kalimantan Barat	85	86	245	0	13	427
21	Kalimantan Tengah	75	48	201	0	7	331
22	Kalimantan Selatan	163	104	234	0	40	541
23	Kalimantan Timur	126	152	185	2	14	479
24	Kalimantan Utara	30	21	51	1	8	111
25	Sulawesi Utara	168	48	191	0	30	444
26	Sulawesi Tengah	47	38	205	4	12	310
27	Sulawesi Selatan	214	215	450	1	42	972
28	Sulawesi Tenggara	66	40	286	1	10	403
29	Gorontalo	28	33	93	0	7	161
30	Sulawesi Barat	36	20	94	1	8	159
31	Maluku	58	24	208	0	9	299
32	Maluku Utara	38	23	136	2	10	209
33	Papua Barat	25	21	155	0	3	204
34	Papua	54	84	413	0	13	564
	Total	5.334	6.796	10.308	32	1.219	25.439

Sumber: BPJS Kesehatan, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 18

PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Desa		
		Jumlah	Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	6.497	63	0,97
2	Sumatera Utara	5.417	4.408	81,37
3	Sumatera Barat	928	688	74,14
4	Riau	1.591	1.519	95,47
5	Jambi	1.399	712	50,89
6	Sumatera Selatan	2.853	1.982	69,47
7	Bengkulu	1.341	1.227	91,50
8	Lampung	2.435	1.981	81,36
9	Kepulauan Bangka Belitung	309	273	88,35
10	Kepulauan Riau	275	258	93,82
11	DKI Jakarta	-	-	0,00
12	Jawa Barat	5.312	4.072	76,66
13	Jawa Tengah	7.809	6.390	81,83
14	D I Yogyakarta	392	381	97,19
15	Jawa Timur	7.724	4.038	52,28
16	Banten	1.238	1.238	100,00
17	Bali	636	609	95,75
18	Nusa Tenggara Barat	995	995	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	3.026	1.232	40,71
20	Kalimantan Barat	2.031	1.318	64,89
21	Kalimantan Tengah	1.432	1.406	98,18
22	Kalimantan Selatan	1.864	1.123	60,25
23	Kalimantan Timur	841	211	25,09
24	Kalimantan Utara	447	29	6,49
25	Sulawesi Utara	1.507	559	37,09
26	Sulawesi Tengah	1.842	1.842	100,00
27	Sulawesi Selatan	2.255	2.078	92,15
28	Sulawesi Tenggara	1.911	1.273	66,61
29	Gorontalo	657	515	78,39
30	Sulawesi Barat	575	312	54,26
31	Maluku	1.198	619	51,67
32	Maluku Utara	1.063	773	72,72
33	Papua Barat	1.742	652	37,43
34	Papua	5.411	3.679	67,99
INDONESIA		74.953	48.455	64,65

Sumber: Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2020

KEMENKES RI

Lampiran 19.a

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	**APBN PUSAT**	71.121.947.000.000	57,80
	a. Rupiah Murni	55.737.300.000.000	
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	448.662.000.000	
	c. Badan Layanan Umum (BLU)	14.018.900.000.000	
	d. Pinjaman Luar Negeri PLN)	282.500.000.000	
	e. Hibah Langsung Luar Negeri (HLL)	634.585.000.000	
2	**DANA DEKONSENTRASI**	1.040.240.000.000	0,85
3	**DANA ALOKASI KHUSUS**	29.502.000.000.000	23,97
	a. DAK Fisik	19.243.400.000.000	
	b. DAK Nonfisik	10.258.600.000.000	
4	**SUMBER PEMERINTAH LAIN***	21.391.400.000.000	17,38
	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN (Rp.)	123.055.602.624.050	
	TOTAL APBN (Rp.)	2.461.112.052.481.000,00	
	% APBN KESEHATAN THD APBN INDONESIA		5%
	ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA	**Rp** 453.992	

Sumber: Sistem Informasi Monitoring Anggaran Pemerintah Biro Keuangan dan KMN dan Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes 2020

KEMENKES RI

Lampiran 19.b

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT ESELON I TAHUN 2019

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan											
		Kantor Pusat			Kanwil Daerah			Dekonsentrasi			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Sekretariat Jenderal	3797195276706000	97.747.587.286.101	94,41	-	-	0,00	95.757.231.000	90.331.491.493	99,00	38.971.942.910.000	37.817.839.789.291	99,29
2	Inspektorat Jenderal	128.172.389.000	119.895.192.184	94,90	-	-	0,00	-	-	0,00	128.172.389.000	114.686.193.101	94,48
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1500019360389,00	1.229.710.994.717	89,00	21.641.866.000	21031999191.0,00	97,27	329.236.009.000	298.633.176.221	93,26	1.711.239.287.000	1.249.365.439.061	90,93
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	727.590.102.000	426.790.868.427	97,27	16.963.242.157.000	16859771245755,0,00	99,21	44.400.500.000	39.179.894.795	91,80	16.944.970.759.000	17.322.930.668.857	94,12
5	Ditjen Pengembangan dan Pemanfaatan Farmasi	1875262707000,00	1.791.429.538.495	90,00	1.831.971.374.000	1824273300389,0,00	91,27	341.298.183.000	319.779.123.000	87,27	3.317.030.916.000	3.124.494.457.816	94,24
6	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2.783.475.661.000	1.922.440.952.814	68,78	-	-	0,00	61.000.000.000	57.882.138.780	93,26	2.855.475.661.000	1.979.322.271.099	69,32
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	602867466666,00	572.871.472.621	97,89	294.467.901.000	182.401.264.444,0,00	91,83	-	-	0,00	841.841.566.000	754.214.630.693	89,17
8	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1.300.139.000.000	1.230.707.299.000	91,00	3.291.926.294.000	3012779388000,0,00	91,59	138.938.000.000	119.044.814.314	92,61	4.759.014.792.000	4.396.531.452.294	92,38
	Kementerian Kesehatan	**48.846.972.732.000**	**44.222.237.291.970**	**90,54**	**23.234.714.171.000**	**21.785.183.076.922**	**93,82**	**1.240.241.121.000**	**943.895.139.217**	**76,79**	**73.321.928.025.000**	**67.279.121.507.109**	**91,75**

Sumber : Biro Perencanaan dan KIPK Kementerian RI, 2019

KEMENKES RI

Lampiran VII.C

RINCIAN PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Jenis Belanja	Gaji dan Tunjangan	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pembayaran Kewajiban	Belanja PNBP	Belanja Perhatian	Belanja Lainnya	Belanja BLU	Total
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	1.234.798.034.000	48.396.434.000	69.481.452.000	2.347.461.282.000	339.274.744.000	36.116.701.000	176.218.199.000	1.109.106.853.000	5.493.285.644.000
	Realisasi	1.130.344.000.775	48.156.456.991	68.931.238.917	2.260.645.217.971	320.984.726.173	34.077.506.069	171.234.685.247	1.064.930.906.188	5.305.523.717.332
	%	94,26	99,50	99,19	96,33	94,57	94,33	97,17	95,98	96,56
b.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	917.138.586.000	76.091.271.000	1.633.347.248.000	13.614.116.892.000	2.402.819.920.000	3.887.907.301.000	564.954.635.000	3.869.980.681.000	25.386.410.925.000
	Realisasi	844.570.842.781	72.594.098.010	1.676.183.925.911	13.120.931.975.894	2.260.838.599.011	3.934.829.092.000	488.623.614.681	3.807.389.610.714	22.391.825.709.708
	%	92,09	95,40	99,23	91,07	93,59	98,90	86,87	93,43	99,239
c.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	96.933.396.000	1.800.804.000	6.318.387.000	5.401.272.204.000	955.537.227.000	11.401.679.000	104.672.704.000	574.525.258.000	4.629.483.891.000
	Realisasi	77.709.379.833	1.601.637.198	6.286.240.233	1.791.871.864.993	916.979.113.633	10.433.472.625	94.368.533.967	524.188.016.392	3.791.517.841.979
	%	80,82	88,94	99,52	78,84	95,92	91,52	90,14	91,23	81,90
d.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	35.912.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	35.912.800.000.000
	Realisasi	35.777.142.674.000	0	0	0	0	0	0	0	35.777.142.674.000
	%	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	TOTAL									
	Anggaran	38.071.662.918.000	126.172.509.000	1.711.159.087.000	19.964.570.378.000	3.215.636.916.000	3.935.471.681.000	845.845.538.000	4.759.614.792.000	71.121.918.469.000
	Realisasi	37.827.839.786.391	124.485.192.199	1.749.301.410.061	17.224.577.058.857	3.214.772.437.816	3.979.331.071.694	754.226.620.895	4.396.693.633.294	67.281.209.963.014
	%	99,36	98,68	98,32	86,27	94,56	99,32	89,17	92,36	94,60

Sumber: Data Keuangan Unit KPA, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 1%.d

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Sesjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen P2P	Ditjen PP	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
A.	KEMENKES RI (001)									
	Anggaran	38.654.219.099.000	116.172.289.000	1.689.142.212.000	5.748.428.942.000	2.819.233.793.000	2.833.641.043.000	927.975.026.000	2.843.996.541.000	15.737.237.947.000
	Realisasi	37.928.720.683.338	114.698.192.101	1.528.349.074.711	5.370.927.600.472	2.671.636.194.973	1.938.379.274.170	726.760.249.869	3.372.985.933.139	22.274.394.228.819
	%	98,09	98,73	90,47	93,43	94,74	68,41	78,32	118,62	94,72
B.	PENJAMINAN LUAR NEGERI									
	Anggaran			280.000.000.000					100.000.000	380.000.000.000
	Realisasi			240.344.000.000					0,00	240.344.000.000
	%	0,00	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
C.	PENGEMBANGAN KAWASAN BERIKAT PINJAR									
	Anggaran	9.899.161.000		1.017.137.000	16.486.102.000	125.746.230.000	13.073.000.000	2.871.007.000	270.000.289.000	446.661.713.000
	Realisasi	8.695.873.903		1.014.256.276	16.017.098.615	119.000.376.723	14.056.670.679	2.468.381.640	261.049.561.123	462.732.796.621
	%	99,91		99,72	71,87	95,06	99,93	98,22	89,17	89,76
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran									
	Realisasi									
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	HIBAH LUAR NEGERI									
	Anggaran									
	Realisasi									
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLN)									
	Anggaran	6.434.500.000		20.579.696.000	1.117.326.000	388.731.915.000	6.500.638.000	15.194.995.000	1.946.041.000	439.284.895.000
	Realisasi	6.434.219.340		19.810.571.014	1.117.173.718	341.109.663.120	6.445.261.746	15.037.772.000	1.946.040.999	391.901.271.670
	%	100,00		96,30	99,99	87,77	99,20	98,97	100,00	89,20
	TOTAL									
	Anggaran	38.671.662.918.000	116.172.289.000	1.711.239.207.000	15.865.979.739.000	3.213.426.941.000	3.853.475.041.000	945.041.028.000	6.759.014.791.000	71.121.910.844.000
	Realisasi	37.977.824.760.241	114.698.192.101	1.549.382.419.841	17.504.373.890.807	3.134.771.427.816	1.979.221.871.599	754.216.403.641	6.396.045.433.296	67.291.099.953.814
	%	98,19	98,73	90,53	98,13	94,14	68,33	88,17	92,38	94,62

KEMENKES RI

Lampiran 19.e

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019

No	Provinsi	Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	33.242.305.000	28.569.217.834	85,94
2	Sumatera Utara	43.604.874.000	38.972.632.479	89,38
3	Sumatera Barat	25.690.656.000	24.036.368.821	93,56
4	Riau	22.658.675.000	20.851.025.117	92,02
5	Jambi	22.119.474.000	21.520.917.498	97,29
6	Sumatera Selatan	29.348.520.000	26.866.682.899	91,54
7	Bengkulu	23.492.877.000	22.706.273.681	96,65
8	Lampung	25.883.687.000	24.591.753.613	95,01
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.516.239.000	15.201.342.854	92,04
10	Kepulauan Riau	19.773.751.000	18.292.778.436	92,51
11	DKI Jakarta	15.897.847.000	14.790.679.991	93,04
12	Jawa Barat	51.917.659.000	40.610.116.154	78,22
13	Jawa Tengah	57.254.827.000	53.896.387.641	94,13
14	D.I. Yogyakarata	16.569.846.000	15.288.186.388	92,27
15	Jawa Timur	53.136.951.000	47.146.177.651	88,73
16	Banten	23.232.724.000	19.215.801.030	82,71
17	Bali	20.283.135.000	18.428.069.157	90,85
18	Nusa Tenggara Barat	24.228.463.000	22.625.354.122	93,38
19	Nusa Tenggara Timur	42.587.160.000	41.187.778.651	96,67
20	Kalimantan Barat	26.036.079.000	22.365.223.427	85,90
21	Kalimantan Tengah	24.886.158.000	23.075.846.336	92,73
22	Kalimantan Selatan	24.791.847.000	22.728.485.778	91,68
23	Kalimantan Timur	25.558.493.000	22.878.769.213	89,52
24	Kalimantan Utara	18.728.004.000	16.554.798.753	88,40
25	Sulawesi Utara	27.257.139.000	26.087.382.000	95,71
26	Sulawesi Tengah	32.622.857.000	31.954.815.610	97,95
27	Sulawesi Selatan	40.041.303.000	36.773.715.342	91,84
28	Sulawesi Tenggara	28.975.753.000	27.709.715.414	95,63
29	Gorontalo	21.231.903.000	20.633.455.431	97,18
30	Sulawesi Barat	19.492.195.000	18.201.814.511	93,38
31	Maluku	27.745.546.000	23.532.557.868	84,82
32	Maluku Utara	26.488.492.000	25.269.387.621	95,40
33	Papua Barat	48.840.223.000	44.391.333.367	90,89
34	Papua	80.104.443.000	66.950.785.429	83,58
Dekonsentrasi Kemenkes		**1.040.241.155.000**	**943.885.630.117**	**90,74**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 19.I

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	DAK Fisik			DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	718.158.039.000	418.432.442.441	58,26	361.086.086.000	278.750.624.093	77,20
2	Sumatera Utara	808.177.881.000	479.851.227.811	59,37	596.872.694.000	452.792.713.811	75,86
3	Sumatera Barat	717.228.956.000	398.746.360.953	55,60	277.372.982.000	210.698.758.687	75,96
4	Riau	510.997.918.000	252.511.663.460	49,42	243.149.636.000	194.072.943.090	79,82
5	Jambi	286.367.199.000	195.155.950.767	68,13	198.053.157.000	168.305.696.216	84,98
6	Sumatera Selatan	435.543.081.000	314.441.410.283	72,20	335.488.344.000	312.657.268.271	93,19
7	Bengkulu	413.765.854.000	304.241.946.047	70,14	180.094.895.000	145.461.557.068	80,77
8	Lampung	328.170.834.000	212.629.944.421	64,79	298.979.106.000	193.589.365.425	64,75
9	Kepulauan Bangka Belitung	183.730.990.000	154.962.854.709	84,34	69.539.472.000	55.310.067.939	79,54
10	Kepulauan Riau	304.041.567.000	166.478.306.900	54,76	88.924.384.000	66.033.118.899	74,26
11	DKI Jakarta	5.924.532.000	1.230.845.809	51,36	20.075.000.000	19.209.619.041	95,69
12	Jawa Barat	997.250.448.000	601.954.770.733	60,36	942.416.934.000	792.457.167.262	84,09
13	Jawa Tengah	956.315.496.000	661.550.997.921	69,03	797.353.751.000	661.689.126.833	82,99
14	D.I. Yogyakarta	153.128.625.000	134.145.079.020	87,60	114.621.234.000	99.195.999.296	86,54
15	Jawa Timur	1.129.686.420.000	658.173.080.040	58,26	853.515.638.000	652.545.243.566	76,45
16	Banten	296.689.434.000	200.613.571.276	67,62	203.687.075.000	177.554.123.737	87,17
17	Bali	194.504.022.000	153.737.637.399	79,04	114.407.592.000	94.775.525.195	82,78
18	Nusa Tenggara Barat	1.026.023.223.000	533.454.568.614	51,99	191.499.525.000	92.679.558.073	48,40
19	Nusa Tenggara Timur	1.078.926.390.000	687.398.797.897	63,71	528.433.353.000	387.795.652.758	73,39
20	Kalimantan Barat	840.607.241.000	576.237.510.295	68,55	429.014.927.000	281.852.740.155	88,07
21	Kalimantan Tengah	336.110.415.000	258.547.354.286	77,30	246.360.019.000	200.031.635.962	81,13
22	Kalimantan Selatan	420.260.652.000	316.340.648.626	75,27	241.511.455.000	157.065.814.704	65,03
23	Kalimantan Timur	257.322.599.000	190.263.595.805	73,94	197.239.099.000	149.476.276.185	75,78
24	Kalimantan Utara	115.885.993.000	66.666.927.773	57,53	75.363.973.000	49.089.450.124	65,14
25	Sulawesi Utara	572.456.387.000	312.707.594.227	54,63	223.632.206.000	127.449.069.924	56,99
26	Sulawesi Tengah	860.337.262.000	591.509.157.088	68,75	256.278.602.000	209.233.374.996	81,64
27	Sulawesi Selatan	948.134.712.000	621.131.711.723	65,86	502.884.333.000	391.864.576.315	77,95
28	Sulawesi Tenggara	537.611.721.000	317.679.525.626	59,09	313.910.076.000	272.752.943.428	86,89
29	Gorontalo	291.860.123.000	145.756.920.580	49,23	111.073.700.000	73.924.652.897	66,55
30	Sulawesi Barat	325.281.220.000	209.557.911.340	64,42	124.123.185.000	84.466.549.949	68,05
31	Maluku	497.625.767.000	251.111.763.094	50,46	273.994.706.000	0	0,00
32	Maluku Utara	561.537.470.000	401.940.001.563	71,58	178.826.848.000	156.313.457.248	87,41
33	Papua Barat	539.153.011.000	281.010.553.298	52,12	206.529.019.000	57.701.941.957	27,94
34	Papua	1.589.386.341.000	904.141.361.313	56,89	571.279.208.000	335.029.691.632	58,65
TOTAL		19.251.211.000.000	11.969.314.339.413	62,17	10.258.632.745.000	7.601.911.285.336	74,10

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan RI 2019

KET:

1. Data Alokasi dan Realisasi DAK Fisik 2019 berdasarkan data dari Kemenkeu per 28 Januari 2020
2. Data Alokasi dan Realisasi DAK Fisik 2019 merupakan gabungan tahap tersalurkan dan KB
3. Data Realisasi DAK Fisik 2019 masih dapat bergerak hingga 31 Juli 2020
4. Data Realisasi DAK Non Fisik 2019 berdasarkan data dari e-Monggat (Biro Perencanaan dan Anggaran) per 7 Februari 2020

KEMENKES RI

Lampiran 2P

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	115.422	603	116.025
2	Sumatera Utara	302.555	618	303.173
3	Sumatera Barat	109.431	516	109.947
4	Riau	154.878	447	155.325
5	Jambi	65.762	220	65.982
6	Sumatera Selatan	159.908	412	160.320
7	Bengkulu	37.103	189	37.292
8	Lampung	150.245	469	150.714
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.429	163	27.592
10	Kepulauan Riau	41.058	186	41.244
11	DKI Jakarta	166.696	256	166.952
12	Jawa Barat	873.575	2.170	875.745
13	Jawa Tengah	527.433	2.450	529.883
14	DI Yogyakarta	54.127	273	54.400
15	Jawa Timur	566.300	1.995	568.295
16	Banten	240.174	402	240.576
17	Bali	64.541	336	64.877
18	Nusa Tenggara Barat	103.315	800	104.115
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	709	139.845
20	Kalimantan Barat	100.232	583	100.815
21	Kalimantan Tengah	53.804	333	54.137
22	Kalimantan Selatan	80.440	389	80.829
23	Kalimantan Timur	74.937	472	75.409
24	Kalimantan Utara	12.139	124	12.263
25	Sulawesi Utara	40.802	144	40.946
26	Sulawesi Tengah	62.707	622	63.329
27	Sulawesi Selatan	168.185	913	169.098
28	Sulawesi Tenggara	56.906	478	57.384
29	Gorontalo	23.856	231	24.087
30	Sulawesi Barat	32.851	285	33.136
31	Maluku	44.630	416	45.046
32	Maluku Utara	29.195	326	29.521
33	Papua Barat	21.850	123	21.973
34	Papua	71.339	503	71.842
Jumlah (Indonesia)		**4.772.961**	**19.156**	**4.792.117**
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)			**4,0**	

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 11 Februari 2020)

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

KEMENKES RI

Lampiran 21

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2018 - 2019

No	Provinsi	2018		2019	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	116.118	141	115.422	157
2	Sumatera Utara	805.925	186	802.555	202
3	Sumatera Barat	110.146	111	109.431	116
4	Riau	154.379	100	156.870	119
5	Jambi	66.106	46	65.762	59
6	Sumatera Selatan	161.571	120	159.988	105
7	Bengkulu	37.237	39	37.103	35
8	Lampung	152.016	102	150.245	111
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.764	43	27.429	36
10	Kepulauan Riau	41.629	51	41.058	41
11	DKI Jakarta	170.265	98	166.696	100
12	Jawa Barat	878.472	700	873.573	684
13	Jawa Tengah	532.242	421	527.433	416
14	DI Yogyakarta	54.193	35	54.127	36
15	Jawa Timur	570.819	522	566.300	520
16	Banten	242.512	247	240.174	212
17	Bali	64.771	35	64.541	43
18	Nusa Tenggara Barat	104.166	99	103.315	97
19	Nusa Tenggara Timur	137.715	141	139.136	118
20	Kalimantan Barat	101.045	86	100.232	117
21	Kalimantan Tengah	53.774	81	53.804	74
22	Kalimantan Selatan	81.296	79	80.440	63
23	Kalimantan Timur	74.904	74	74.917	79
24	Kalimantan Utara	12.160	10	12.139	21
25	Sulawesi Utara	41.123	52	41.002	51
26	Sulawesi Tengah	62.927	82	62.707	97
27	Sulawesi Selatan	169.207	139	168.187	164
28	Sulawesi Tenggara	62.386	60	62.566	66
29	Gorontalo	23.810	29	23.856	40
30	Sulawesi Barat	32.661	60	32.851	49
31	Maluku	44.440	61	44.430	52
32	Maluku Utara	29.134	49	29.195	47
33	Papua Barat	21.694	44	21.850	44
34	Papua	71.291	75	71.139	66
Jumlah (Indonesia)		4.816.130	4.226	4.778.621	4.221

Sumber : Direktur Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (Data per 27 Maret 2020)

KEMENKES RI

Lampiran 27

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu					
		Perdarahan	Hipertensi Dalam Kehamilan	Infeksi	Gangguan Sistem Peredaran Darah *	Gangguan Metabolik**	Lain-lain
1	Aceh	47	38	6	10	1	53
2	Sumatera Utara	62	48	7	7	3	75
3	Sumatera Barat	23	22	4	7	6	54
4	Riau	38	32	2	8	2	37
5	Jambi	18	14	0	6	1	29
6	Sumatera Selatan	38	28	4	9	1	25
7	Bengkulu	16	6	0	3	0	10
8	Lampung	29	31	3	4	1	43
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	9	3	0	1	10
10	Kepulauan Riau	17	10	0	0	0	14
11	DKI Jakarta	26	20	9	3	1	61
12	Jawa Barat	226	218	23	65	12	160
13	Jawa Tengah	105	117	18	0	0	176
14	DI Yogyakarta	6	6	3	0	0	21
15	Jawa Timur	125	162	38	0	72	123
16	Banten	64	51	11	32	6	48
17	Bali	12	8	0	0	6	19
18	Nusa Tenggara Barat	22	39	4	0	12	18
19	Nusa Tenggara Timur	49	11	10	9	0	39
20	Kalimantan Barat	35	24	7	6	0	45
21	Kalimantan Tengah	30	20	2	3	2	17
22	Kalimantan Selatan	18	18	4	1	5	17
23	Kalimantan Timur	22	18	2	4	1	30
24	Kalimantan Utara	3	7	1	2	0	8
25	Sulawesi Utara	16	8	0	0	0	27
26	Sulawesi Tengah	21	21	7	18	1	37
27	Sulawesi Selatan	47	41	5	0	13	38
28	Sulawesi Tenggara	26	12	5	3	2	14
29	Gorontalo	7	0	0	0	1	32
30	Sulawesi Barat	18	11	1	0	2	17
31	Maluku	23	5	4	2	2	16
32	Maluku Utara	21	2	2	3	1	18
33	Papua Barat	25	3	12	0	0	9
34	Papua	32	6	8	2	0	18
Jumlah (Indonesia)		**1.200**	**1.066**	**207**	**200**	**157**	**1.311**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 27 Maret 2020)

* Jantung, Stroke, dll

** Diabetes Melitus, dll

KEMENKES RI

Lampiran 23.a

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Ibu Hamil				Ibu Bersalin											
		Jumlah	K1		K4[1]		Jumlah	Persalinan Fasilitas Kesehatan		Persalinan di Fasyankes[2]		K1[3]		K4[3]		K6[3]		Ibu Nifas Mendapat Yan. K
			Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	128.904	114.836	89,0	99.614	77,2	121.100	100.784	83,2	93.440	82,1	100.108	82,7	90.260	81,0	83.084	77,3	99.211	82,2
2	Sumatera Utara	390.810	359.270	88,9	321.268	80,1	317.800	271.330	85,0	265.495	85,6	259.149	79,7	240.675	78,3	222.127	74,4	235.866	74,2
3	Sumatera Barat	120.274	109.307	87,9	94.705	78,4	114.900	91.081	81,0	82.909	84,0	93.146	81,1	92.235	80,3	90.341	78,8	91.334	79,6
4	Riau	190.896	168.502	87,9	141.010	83,0	182.832	133.319	80,0	122.999	73,2	134.677	82,8	129.139	79,2	127.944	78,7	126.586	82,8
5	Jambi	72.336	75.955	102,1	70.409	97,2	69.850	67.297	97,6	55.055	85,5	68.075	99,6	67.062	98,2	67.899	97,2	68.668	98,0
6	Sumatera Selatan	175.899	172.663	98,2	167.664	95,7	167.900	154.016	91,0	151.885	91,0	158.777	94,5	158.052	94,1	153.848	91,6	158.591	94,5
7	Bengkulu	48.913	39.762	96,4	35.758	87,5	38.998	34.243	87,8	34.164	87,7	34.736	89,2	34.149	87,6	34.691	89,9	34.831	89,4
8	Lampung	165.569	161.466	98,0	153.971	93,0	155.757	146.534	94,1	147.085	94,7	148.895	94,6	148.296	93,9	146.013	92,6	147.096	93,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	39.172	38.110	97,2	35.139	89,4	39.896	35.240	91,1	34.104	89,6	34.554	91,3	34.159	90,0	35.991	90,3	35.205	91,0
10	Kepulauan Riau	95.168	99.337	102,9	94.787	97,3	93.111	91.719	96,8	94.159	99,2	91.225	96,0	91.259	95,6	90.882	92,5	95.503	96,3
11	DKI Jakarta	189.390	192.144	104,2	190.058	97,6	179.981	181.907	104,0	181.734	103,9	180.259	103,4	179.111	103,3	179.681	102,1	179.347	102,6
12	Jawa Barat	968.932	1.004.398	103,6	930.898	98,0	917.324	816.854	94,9	868.780	94,9	826.801	101,0	822.246	100,2	763.264	93,6	889.861	97,0
13	Jawa Tengah	580.176	579.932	99,9	563.039	97,1	575.993	525.229	94,8	553.164	99,6	5.914	1,1	5.911	1,1	5.920	1,1	5.931	1,1
14	DI Yogyakarta	39.840	49.682	85,6	46.216	74,3	38.818	34.968	76,7	42.935	74,7	42.430	74,7	41.957	73,6	40.617	71,3	42.219	74,3
15	Jawa Timur	603.930	622.930	94,9	566.337	90,5	594.027	537.623	89,0	530.128	90,9	6	0,0	6	0,0	567.635	95,5	529.749	89,1
16	Banten	264.191	268.127	101,5	253.511	95,9	251.189	246.587	97,8	239.417	95,8	251.199	95,8	251.991	99,8	245.988	97,9	236.582	93,8
17	Bali	70.991	72.252	100,8	67.866	95,0	67.760	66.629	98,0	66.994	99,0	65.591	96,0	66.027	97,4	65.231	96,2	65.607	97,1
18	Nusa Tenggara Barat	113.999	121.281	106,2	107.966	94,9	108.981	101.936	93,5	102.031	93,8	102.896	94,8	101.958	93,2	101.965	94,0	102.102	94,2
19	Nusa Tenggara Timur	154.018	149.339	69,9	81.691	53,4	146.049	91.721	62,8	99.135	91,0	10.093	64,2	92.311	62,9	90.139	61,7	93.144	63,8
20	Kalimantan Barat	110.233	103.971	93,3	93.383	84,8	105.244	86.862	82,5	76.283	72,5	69.228	84,8	87.866	83,3	85.737	81,5	84.507	80,1
21	Kalimantan Tengah	59.196	54.255	91,7	50.956	84,5	56.894	44.581	78,3	34.830	61,2	46.253	81,8	47.338	84,1	46.451	82,3	46.844	83,1
22	Kalimantan Selatan	88.489	82.346	93,1	69.034	78,0	84.462	71.846	85,1	65.781	77,9	71.281	84,4	78.605	83,6	68.913	81,8	70.658	83,6
23	Kalimantan Timur	83.431	79.858	96,4	71.746	86,0	78.004	69.684	89,3	67.331	86,3	69.890	89,8	67.268	86,9	64.896	83,2	67.965	87,1
24	Kalimantan Utara	15.310	17.299	114,3	13.210	101,2	12.746	12.211	103,6	12.004	98,8	13.251	104,8	13.036	102,8	12.476	97,9	13.188	103,4
25	Gorontalo	44.882	46.726	97,6	37.886	84,6	42.942	35.776	85,8	35.286	84,7	37.045	99,4	36.861	98,8	34.113	90,4	37.069	98,9
26	Sulawesi Tengah	68.930	61.289	90,0	54.998	79,7	65.880	59.891	91,2	51.323	78,8	53.246	81,3	52.899	80,8	51.185	77,7	51.781	84,2
27	Sulawesi Selatan	181.094	167.310	90,3	154.256	83,4	170.194	152.892	96,0	151.276	95,2	152.930	89,6	150.552	89,1	149.819	84,8	151.204	86,4
28	Sulawesi Tenggara	48.829	38.244	84,6	48.534	73,3	39.463	32.193	87,9	48.196	91,2	32.431	98,3	32.145	118,1	44.968	84,3	32.386	85,0
29	Sulawesi Utara	26.242	24.467	94,9	24.307	73,5	23.890	22.130	98,3	20.267	85,5	21.268	87,7	21.728	86,6	20.931	83,6	21.952	87,6
30	Sulawesi Barat	36.136	33.907	84,2	28.664	68,8	34.498	25.878	72,7	25.864	72,3	25.838	73,7	25.335	72,9	25.896	70,8	25.189	73,6
31	Maluku	30.693	27.840	83,2	25.776	68,7	26.851	20.041	91,2	23.007	78,8	20.194	84,8	29.501	83,1	29.433	82,9	31.201	94,4
32	Maluku Utara	32.113	28.223	88,9	25.857	79,8	31.055	25.191	79,9	21.219	68,6	24.022	78,6	23.858	77,8	23.877	75,5	25.668	77,1
33	Papua Barat	29.035	20.145	85,8	23.186	56,9	22.592	17.571	67,8	12.297	55,6	14.331	64,2	12.872	56,1	11.587	50,3	13.899	60,6
34	Papua	78.672	68.454	80,9	59.049	57,1	74.856	58.715	83,8	54.870	80,6	36.630	68,9	34.611	63,9	32.201	62,9	34.833	66,9
	Jumlah (Indonesia)	**5.334.484**	**5.016.882**	**96,5**	**4.654.229**	**90,5**	**5.031.201**	**4.557.279**	**96,9**	**4.447.226**	**88,8**	**3.475.987**	**69,1**	**3.439.680**	**68,6**	**3.180.648**	**79,8**	**3.511.139**	**75,1**

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, Pk. 20 Kabupaten / Kota (2020)

Keterangan : [1] Cakupan K4 sama dengan indikator K24 [2] Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan [3] Cakupan K1 dan K6 sama dengan indikator K1KF

[*] Cakupan K1 ibu hamil, cakupan indikator K1KF [**] persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

KEMENKES RI

Lampiran 23.b

PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL, DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil		Puskesmas Melaksanakan P4K		Jumlah RTK
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	359	323	89,97	310	86,35	1
2	Sumatera Utara	601	596	99,17	586	97,50	187
3	Sumatera Barat	275	272	98,91	271	98,55	12
4	Riau	226	194	85,84	223	98,67	42
5	Jambi	204	204	100,00	204	100,00	0
6	Sumatera Selatan	342	340	99,42	340	99,42	0
7	Bengkulu	180	179	99,44	178	98,89	61
8	Lampung	310	310	100,00	310	100,00	21
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,00	64	100,00	5
10	Kepulauan Riau	86	83	96,51	71	82,56	0
11	DKI Jakarta	315	315	100,00	315	100,00	0
12	Jawa Barat	1.072	1.043	97,29	1.043	97,29	0
13	Jawa Tengah	978	853	97,15	846	96,36	0
14	DI Yogyakarta	121	121	100,00	121	100,00	0
15	Jawa Timur	968	965	99,69	947	97,83	10
16	Banten	243	242	99,59	242	99,59	0
17	Bali	120	120	100,00	120	100,00	40
18	Nusa Tenggara Barat	169	169	100,00	169	100,00	3
19	Nusa Tenggara Timur	402	411	102,24	411	102,24	0
20	Kalimantan Barat	246	231	93,90	233	94,72	16
21	Kalimantan Tengah	203	168	82,76	201	99,01	86
22	Kalimantan Selatan	235	231	98,30	222	94,47	6
23	Kalimantan Timur	186	184	98,92	184	98,92	42
24	Kalimantan Utara	56	54	96,43	53	94,64	22
25	Sulawesi Utara	195	193	98,97	193	98,97	0
26	Sulawesi Tengah	206	90	43,69	171	83,01	0
27	Sulawesi Selatan	458	455	99,34	442	96,51	171
28	Sulawesi Tenggara	290	257	88,62	290	100,00	128
29	Gorontalo	93	92	98,92	67	72,04	0
30	Sulawesi Barat	95	95	100,00	94	98,95	43
31	Maluku	209	181	86,60	176	84,21	7
32	Maluku Utara	148	143	96,62	143	96,62	0
33	Papua Barat	159	73	45,91	25	15,72	2
34	Papua	420	188	44,76	218	51,90	0
Indonesia		**10.134**	**9.439**	**93,14**	**9.483**	**93,58**	**905**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 1 Maret 2020)

* hanya Puskesmas terregistrasi

KEMENKES RI

Lampiran 24

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Imunisasi Td Pada Ibu Hamil											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td1+	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	126.964	23.234	18,3	23.840	18,8	21.502	16,9	14.869	11,7	12.047	9,5	72.166	56,8
2	Sumatera Utara	552.810	366	0,1	161	0,0	86	0,0	63	0,0	46	0,0	331	0,1
3	Sumatera Barat	123.174	14.005	11,4	17.397	14,1	14.909	12,1	12.599	10,2	11.428	9,3	56.073	45,5
4	Riau	170.566	7.298	4,3	9.868	5,8	13.388	7,9	13.221	7,8	14.855	8,7	33.824	19,8
5	Jambi	72.239	18.757	26,0	14.914	20,6	13.523	18,7	10.539	14,6	9.171	12,7	51.344	71,1
6	Sumatera Selatan	175.899	73.415	41,7	70.516	40,1	28.483	16,2	25.977	14,8	24.332	13,8	198.580	94,5
7	Bengkulu	48.611	8.373	17,2	7.091	17,3	5.403	13,4	5.586	13,4	5.871	14,4	23.863	58,5
8	Lampung	182.209	8.757	4,1	7.349	4,2	5.891	3,4	12.896	7,2	13.945	8,4	42.941	25,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	33.172	6	0,0	6	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	3	0,0
10	Kepulauan Riau	45.164	5.996	13,3	6.124	13,6	4.930	10,9	4.650	10,7	4.833	10,9	20.857	46,1
11	DKI Jakarta	163.346	33.391	18,2	37.195	20,3	38.172	20,8	34.699	19,9	38.311	20,9	146.099	89,9
12	Jawa Barat	980.932	103.340	17,6	111.804	19,1	116.122	19,9	142.212	14,8	105.806	11,0	989.762	101,0
13	Jawa Tengah	380.176	79.629	19,7	91.956	23,8	77.330	19,1	90.800	23,4	95.960	17,2	275.422	64,7
14	DI Yogyakarta	59.540	92	0,2	893	1,4	11.070	18,6	15.154	25,5	25.207	42,3	32.242	87,7
15	Jawa Timur	422.930	16.930	3,6	21.999	5,1	26.429	6,5	71.882	17,3	246.952	58,7	475.267	74,3
16	Banten	264.191	116.417	44,1	112.152	42,5	62.877	23,8	39.889	15,1	33.133	12,5	242.249	91,7
17	Bali	76.995	22	0,0	6	0,0	1.199	1,7	4.704	6,6	24.098	34,6	51.999	45,2
18	Nusa Tenggara Barat	113.646	31.659	27,7	31.654	27,9	21.901	19,3	17.200	15,1	12.813	11,3	83.373	73,4
19	Nusa Tenggara Timur	153.650	22.020	14,4	19.060	12,5	11.448	7,5	6.190	4,0	6.197	4,0	42.915	28,0
20	Kalimantan Barat	119.250	17.199	13,5	16.181	14,7	13.312	12,1	10.656	9,7	11.855	10,8	51.203	46,6
21	Kalimantan Tengah	59.184	17.220	29,1	12.270	21,8	6.241	11,1	4.095	7,3	3.650	6,5	30.859	54,8
22	Kalimantan Selatan	88.494	14.997	16,9	19.476	22,0	15.151	17,1	9.372	10,6	5.213	5,9	49.212	55,6
23	Kalimantan Timur	82.431	293	0,4	251	0,4	291	0,3	266	0,3	338	0,4	1.101	1,4
24	Kalimantan Utara	13.353	526	3,9	730	5,5	780	5,9	783	5,9	882	6,7	3.387	25,5
25	Sulawesi Utara	44.602	18.153	40,9	16.159	36,6	3.243	17,8	3.692	8,3	3.838	8,6	25.970	58,2
26	Sulawesi Tengah	68.970	23.950	34,7	25.429	36,9	22.591	32,8	17.683	25,6	14.868	21,6	80.472	116,7
27	Sulawesi Selatan	101.099	15.781	15,6	66.199	65,5	30.930	30,6	19.849	19,6	15.143	15,0	126.904	125,5
28	Sulawesi Tenggara	88.822	18.374	20,7	16.472	18,5	10.831	12,2	6.823	7,7	5.185	5,8	38.431	43,3
29	Gorontalo	26.242	15.264	58,2	14.161	54,0	5.813	22,1	959	3,7	1.954	7,4	17.894	68,2
30	Sulawesi Barat	36.136	7.800	21,6	6.867	19,0	4.823	13,3	2.965	8,2	2.017	5,6	14.772	40,9
31	Maluku	66.003	10.430	21,3	8.928	18,2	3.213	7,3	1.779	3,6	1.811	3,7	16.022	32,6
32	Maluku Utara	32.115	15.888	49,4	15.295	47,3	3.506	10,9	1.730	5,4	1.344	4,1	20.395	63,3
33	Papua Barat	24.035	786	3,3	760	3,2	713	3,0	721	3,0	440	1,8	3.189	13,3
34	Papua	76.472	13.979	17,0	10.757	13,7	5.874	7,5	3.298	4,1	2.962	3,8	22.810	29,1
	Jumlah (Indonesia)	5.256.482	1.260.655	24,0	1.214.304	23,1	734.440	14,0	662.825	11,1	609.059	10,3	3.466.387	66,7

Sumber : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan RI, 2019 (data per 11 April 2020)

KEMENKES RI

Lampiran 2.6

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah WUS Tidak Hamil (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	908.710	20.342	2,1	10.534	1,1	9.900	1,0	7.086	0,7	6.996	0,7
2	Sumatera Utara	2.503.713	306	0,0	161	0,0	86	0,0	43	0,0	41	0,0
3	Sumatera Barat	917.326	8.283	0,9	4.888	0,5	6.292	0,7	4.234	0,5	5.949	0,6
4	Riau	1.261.027	3.068	0,2	2.548	0,2	4.861	0,4	2.567	0,3	3.202	0,3
5	Jambi	671.265	7.261	1,1	4.664	0,7	4.131	0,6	3.463	0,5	4.123	0,6
6	Sumatera Selatan	1.526.033	24.819	1,6	20.482	1,3	11.232	0,7	7.268	0,5	12.042	0,8
7	Bengkulu	367.039	978	0,3	263	0,1	429	0,1	286	0,1	291	0,1
8	Lampung	1.669.941	2.595	0,2	2.760	0,2	4.788	0,3	3.624	0,2	3.357	0,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	266.307	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	422.910	3.906	0,9	2.120	0,5	2.302	0,5	1.646	0,4	1.827	0,4
11	DKI Jakarta	2.661.947	28.239	1,4	19.784	1,0	28.824	1,4	26.683	1,3	35.043	1,7
12	Jawa Barat	8.808.196	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13	Jawa Tengah	5.781.717	108.271	1,9	75.039	1,3	87.651	1,5	103.080	1,8	109.569	1,9
14	DI Yogyakarta	656.297	55	0,0	27	0,0	1.879	0,3	1.193	0,2	2.894	0,5
15	Jawa Timur	6.788.034	57.896	0,9	75.647	1,1	226.990	3,3	732.173	10,8	3.102.982	51,6
16	Banten	2.417.275	65.645	2,7	58.364	2,4	56.307	2,3	50.142	2,1	64.520	2,7
17	Bali	738.304	0	0,0	0	0,0	4	0,0	90	0,0	170	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	940.257	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	996.083	2.715	0,3	1.586	0,4	1.771	0,2	857	0,1	1.083	0,1
20	Kalimantan Barat	915.153	8.159	0,9	7.475	0,8	8.589	0,9	8.112	0,9	8.092	0,9
21	Kalimantan Tengah	693.881	5.823	1,0	2.366	0,3	1.169	0,2	747	0,2	640	0,1
22	Kalimantan Selatan	739.809	18.538	2,5	10.134	1,4	4.430	0,6	2.730	0,4	1.944	0,3
23	Kalimantan Timur	665.347	242	0,0	208	0,0	221	0,0	239	0,0	268	0,0
24	Kalimantan Utara	128.332	4.090	3,2	4.387	3,4	5.398	4,2	5.294	4,1	7.409	5,8
25	Sulawesi Utara	410.775	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	530.257	9.099	1,7	8.018	1,5	7.981	1,5	6.342	1,2	2.837	0,5
27	Sulawesi Selatan	1.598.214	22.089	1,4	6.689	0,4	5.264	0,3	2.850	0,2	2.314	0,1
28	Sulawesi Tenggara	468.535	2.896	0,6	787	0,2	555	0,1	293	0,1	328	0,1
29	Gorontalo	220.938	3.042	1,4	1.331	0,6	1.423	0,6	957	0,4	935	0,4
30	Sulawesi Barat	245.342	776	0,3	319	0,1	277	0,1	185	0,1	87	0,0
31	Maluku	312.142	5.462	1,7	4.834	1,5	2.885	0,9	2.334	0,8	1.904	0,6
32	Maluku Utara	237.993	7.054	3,2	5.368	2,4	5.370	2,3	3.783	1,7	4.419	2,0
33	Papua Barat	175.046	97	0,1	145	0,1	112	0,1	357	0,2	236	0,1
34	Papua	631.305	4.240	0,7	4.506	0,7	2.976	0,5	1.619	0,3	868	0,1
	Jumlah (Indonesia)	**47.215.973**	**425.299**	**0,9**	**316.349**	**0,7**	**491.857**	**1,0**	**382.427**	**0,8**	**3.787.949**	**8,0**

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pelaporan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 Data per 15 April 2020

KEMENKES RI

Lampiran 2e

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah WUS (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS									
			Td1		Td2		Td3		Td4		DT	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	1.116.440	43.290	3,9	34.402	3,1	31.282	2,8	23.955	2,1	19.063	1,7
2	Sumatera Utara	2.840.241	612	0,0	322	0,0	172	0,0	86	0,0	82	0,0
3	Sumatera Barat	1.038.287	22.388	2,2	22.285	2,1	21.201	2,0	16.373	1,6	17.277	1,7
4	Riau	1.430.854	10.356	0,7	11.408	0,8	18.249	1,3	16.788	1,2	18.017	1,3
5	Jambi	743.980	26.018	3,5	22.674	3,0	18.051	2,4	14.102	1,9	12.698	1,7
6	Sumatera Selatan	1.783.761	98.293	5,5	91.080	5,1	39.685	2,2	32.345	1,8	36.574	2,1
7	Bengkulu	407.852	7.931	1,9	7.314	1,8	5.884	1,4	5.772	1,4	6.262	1,5
8	Lampung	1.618.039	9.352	0,6	8.909	0,6	13.679	0,8	15.680	1,0	17.302	1,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	296.407	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	468.702	9.882	2,1	8.244	1,8	7.232	1,5	6.896	1,4	6.770	1,4
11	DKI Jakarta	2.248.238	61.631	2,7	56.893	2,5	66.994	3,0	61.582	2,7	73.354	3,3
12	Jawa Barat	9.774.513	553.340	5,7	511.494	5,2	230.125	2,4	142.313	1,5	105.808	1,1
13	Jawa Tengah	6.367.183	187.700	2,9	167.794	2,6	180.787	2,8	194.345	3,1	209.534	3,3
14	DI Yogyakarta	715.909	147	0,0	832	0,1	12.953	1,8	16.347	2,3	28.701	4,0
15	Jawa Timur	7.415.935	73.954	1,0	97.752	1,3	261.328	3,5	804.055	10,8	3.849.935	51,9
16	Banten	2.683.918	162.062	6,0	170.516	6,4	113.384	4,2	90.022	3,4	97.645	3,6
17	Bali	809.552	22	0,0	155	0,0	1.208	0,1	4.864	0,6	26.266	3,2
18	Nusa Tenggara Barat	1.054.860	31.459	3,0	31.684	3,0	21.905	2,1	17.202	1,6	12.611	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	1.041.569	25.035	2,4	22.646	2,2	13.243	1,3	7.047	0,7	7.280	0,7
20	Kalimantan Barat	1.026.303	25.294	2,5	23.656	2,3	21.902	2,1	18.766	1,8	19.147	1,9
21	Kalimantan Tengah	552.631	22.243	4,0	17.636	3,2	7.609	1,4	5.396	1,0	4.295	0,8
22	Kalimantan Selatan	829.235	33.535	4,0	29.610	3,6	19.581	2,4	12.102	1,5	7.157	0,9
23	Kalimantan Timur	747.741	335	0,1	501	0,1	504	0,1	507	0,1	603	0,1
24	Kalimantan Utara	141.686	4.616	3,3	5.117	3,6	6.110	4,3	6.077	4,3	8.301	5,9
25	Sulawesi Utara	464.013	18.154	3,9	16.154	3,5	5.293	1,1	2.693	0,6	1.858	0,4
26	Sulawesi Tengah	599.477	33.049	5,5	33.438	5,6	30.282	5,1	24.025	4,0	17.705	3,0
27	Sulawesi Selatan	1.784.342	97.870	5,5	70.888	4,0	35.564	2,0	21.850	1,2	17.479	1,0
28	Sulawesi Tenggara	537.160	738	0,1	17.259	3,2	11.306	2,1	6.316	1,2	5.425	1,0
29	Gorontalo	247.129	18.306	7,4	15.492	6,3	3.238	1,3	1.811	0,7	1.993	0,8
30	Sulawesi Barat	281.269	8.576	3,0	6.982	2,5	4.300	1,5	2.250	0,8	2.104	0,7
31	Maluku	361.026	15.900	4,4	13.752	3,8	6.320	1,8	4.313	1,2	3.715	1,0
32	Maluku Utara	250.040	22.814	9,2	18.761	7,5	8.878	3,5	5.523	2,2	5.985	2,4
33	Papua Barat	188.929	973	0,4	905	0,5	1.025	0,5	1.078	0,5	1.231	0,6
34	Papua	709.725	18.219	2,6	15.263	2,2	8.854	1,2	4.827	0,7	3.810	0,5
Jumlah (Indonesia)		52.506.926	1.664.422	3,2	1.552.700	3,0	1.228.296	2,3	1.585.110	3,0	4.646.107	8,8

Sumber : Data Penggabungan dari Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Data per 11 April 2020)

KEMENKES RI

Lampiran 27.a

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	TTD (90 Tablet)	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	126.964	71.977	56,7
2	Sumatera Utara	332.810	78.866	23,7
3	Sumatera Barat	120.374	92.689	77,0
4	Riau	170.366	137.149	80,5
5	Jambi	72.338	64.572	89,3
6	Sumatera Selatan	175.899	166.151	94,5
7	Bengkulu	40.813	34.463	84,4
8	Lampung	165.269	153.042	92,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.172	26.315	87,2
10	Kepulauan Riau	45.164	40.952	90,7
11	DKI Jakarta	183.366	16.199	8,8
12	Jawa Barat	960.932	842.968	87,7
13	Jawa Tengah	580.176	282.635	48,7
14	DI Yogyakarta	59.540	38.685	65,0
15	Jawa Timur	622.930	372.936	59,9
16	Banten	264.191	234.710	88,8
17	Bali	70.995	67.696	95,4
18	Nusa Tenggara Barat	113.646	104.596	92,0
19	Nusa Tenggara Timur	153.050	92.112	60,2
20	Kalimantan Barat	110.255	98.896	89,7
21	Kalimantan Tengah	59.184	3.850	6,5
22	Kalimantan Selatan	88.484	72.406	81,8
23	Kalimantan Timur	82.431	6.789	8,2
24	Kalimantan Utara	13.353	10.627	79,6
25	Sulawesi Utara	44.882	44.933	100,1
26	Sulawesi Tengah	68.978	53.538	77,6
27	Sulawesi Selatan	185.004	3.135	1,7
28	Sulawesi Tenggara	77.065	47.212	61,3
29	Gorontalo	26.242	21.785	83,0
30	Sulawesi Barat	36.136	24.064	66,6
31	Maluku	49.093	32.219	65,6
32	Maluku Utara	32.115	17.149	53,4
33	Papua Barat	24.035	-	-
34	Papua	78.473	14.339	18,3
Jumlah (Indonesia)		**5.264.725**	**3.369.664**	**64,0**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (Laporan Rutin Tahun 2019)

KEMENKES RI

Lampiran 27.b

PERSENTASE REMAJA PUTRI MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun) 2018			Remaja Putri (12-18 tahun) 2019		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%	Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	278.082	89.417	32,2	271.276	55.049	20,3
2	Sumatera Utara	563.074	112.411	20,0	466.466	246.944	52,9
3	Sumatera Barat	270.100	88.988	32,9	253.833	125.294	49,4
4	Riau	279.815	66.753	23,9	279.815	147.306	52,6
5	Jambi	121.988	68.979	56,5	177.500	154.644	87,1
6	Sumatera Selatan	533.562	125.729	23,6	567.889	192.807	34,0
7	Bengkulu	117.948	55.498	47,1	80.616	35.149	57,4
8	Lampung	410.653	277.323	67,5	293.577	285.100	98,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	58.397	41.856	71,7	79.922	57.523	72,0
10	Kepulauan Riau	149.653	52.951	34,8	707.882	330.541	46,7
11	DKI Jakarta	355.653	194.992	54,8	620.836	263.857	42,5
12	Jawa Barat	2.058.054	754.159	36,6	2.141.291	1.049.276	49,0
13	Jawa Tengah	1.642.446	928.261	56,5	1.785.966	1.310.332	74,2
14	DI Yogyakarta	144.860	79.101	54,6	157.043	131.298	83,2
15	Jawa Timur	5.882.538	3.791.759	64,5	1.007.272	634.956	63,0
16	Banten	488.006	148.036	30,3	465.567	189.921	40,8
17	Bali	193.541	179.231	92,6	187.585	187.067	99,7
18	Nusa Tenggara Barat	190.129	72.668	38,2	431.367	289.827	67,2
19	Nusa Tenggara Timur	341.677	121.869	35,7	324.100	199.452	61,5
20	Kalimantan Barat	250.272	24.077	9,6	3.240.636	422.281	13,0
21	Kalimantan Tengah	85.133	10.799	12,6	116.359	67.397	57,9
22	Kalimantan Selatan	253.947	110.306	43,1	226.317	123.431	54,5
23	Kalimantan Timur	270.570	46.020	17,0	121.993	43.875	36,0
24	Kalimantan Utara	33.973	13.650	40,2	41.842	9.834	23,5
25	Sulawesi Utara	732.871	195.001	26,7	321.272	47.098	14,7
26	Sulawesi Tengah	119.050	30.318	25,5	149.305	126.444	84,7
27	Sulawesi Selatan	371.746	223.596	60,1	381.511	222.024	58,4
28	Sulawesi Tenggara	177.926	107.520	60,4	106.274	86.192	80,7
29	Gorontalo	81.162	37.216	45,9	64.903	37.842	58,3
30	Sulawesi Barat	56.578	37.769	68,0	48.281	31.807	65,9
31	Maluku	143.016	31.794	22,2	139.642	70.905	50,8
32	Maluku Utara	35.706	28.743	58,1	29.157	11.158	38,2
33	Papua Barat	32.673	21.068	64,5	22.146	8.037	36,3
34	Papua	315.150	108.046	34,3	320.924	99.711	31,1
Indonesia		**17.040.966**	**8.267.722**	**48,5**	**15.615.759**	**7.273.092**	**46,6**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 2.5.c

PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2019

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan 2018		Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Kurus	Ibu Hamil Risiko KEK	Balita Kurus	Ibu Hamil Risiko KEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	75,54	77,91	96,03	87,15
2	Sumatera Utara	80,58	83,61	96,48	98,78
3	Sumatera Barat	89,95	95,22	89,32	95,80
4	Riau	96,89	97,53	97,05	98,33
5	Jambi	92,51	94,30	93,71	80,45
6	Sumatera Selatan	99,97	99,44	99,54	100,00
7	Bengkulu	99,44	98,60	99,65	99,52
8	Lampung	85,08	92,88	89,45	93,10
9	Kepulauan Bangka Belitung	96,68	94,61	96,68	98,80
10	Kepulauan Riau	81,14	92,41	96,13	99,19
11	DKI Jakarta	96,42	93,58	99,83	90,31
12	Jawa Barat	64,19	82,04	75,68	85,90
13	Jawa Tengah	89,92	92,29	97,52	93,53
14	DI Yogyakarta	98,13	98,41	99,19	98,74
15	Jawa Timur	80,92	93,58	100,00	93,04
16	Banten	98,19	96,76	99,55	98,28
17	Bali	99,72	100,00	99,91	99,91
18	Nusa Tenggara Barat	65,64	27,97	75,74	71,36
19	Nusa Tenggara Timur	72,49	72,49	71,73	75,83
20	Kalimantan Barat	88,13	87,19	89,79	100,01
21	Kalimantan Tengah	85,48	80,33	92,74	94,16
22	Kalimantan Selatan	93,53	94,24	99,57	96,81
23	Kalimantan Timur	93,94	91,69	97,58	96,39
24	Kalimantan Utara	84,84	90,73	69,53	97,46
25	Sulawesi Utara	85,42	90,08	95,26	95,50
26	Sulawesi Tengah	62,20	59,47	82,36	87,94
27	Sulawesi Selatan	90,21	87,41	83,43	88,16
28	Sulawesi Tenggara	91,98	74,41	82,33	87,12
29	Gorontalo	99,81	100,00	100,00	100,00
30	Sulawesi Barat	88,34	96,31	81,08	95,85
31	Maluku	93,73	84,56	96,78	90,35
32	Maluku Utara	81,67	89,60	94,72	95,55
33	Papua Barat	90,94	69,44	99,81	99,85
34	Papua	50,06	67,17	81,61	73,95
Indonesia		**83,88**	**86,41**	**89,64**	**90,52**

Sumber : Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

*KEK=Kekurangan Energi Kronik

KEMENKES RI

Lampiran 28.a

PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif															
			Kondom	%	Suntik	%	PIL	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	Jumlah	%
11	Aceh	965.966	9.617	1,0	257.884	71,0	69.619	19,2	13.639	3,8	493	0,1	5.219	1,4	10.752	3,0	359.251	14,1
12	Sumatera Utara	1.691.251	15.061	0,7	626.689	30,3	182.731	21,6	41.176	4,9	7.290	0,9	18.632	0,9	99.642	11,8	844.831	40,7
13	Sumatera Barat	739.812	10.967	1,6	243.442	40,1	58.811	11,9	16.956	3,2	1.847	0,4	13.232	2,1	46.234	10,8	417.251	77,0
14	Riau	786.356	11.275	1,8	293.147	44,3	67.269	21,6	13.924	2,4	1.892	0,3	5.248	1,4	22.209	5,6	404.734	51,3
15	Jambi	439.272	4.038	0,9	138.432	44,7	43.516	21,3	13.413	3,2	730	0,2	5.204	1,2	38.786	8,9	272.884	62,0
16	Sumatera Selatan	1.236.660	7.858	1,0	287.256	71,3	85.217	11,6	16.098	2,8	2.091	0,3	6.408	0,8	106.184	12,9	823.692	66,6
17	Bengkulu	316.248	4.102	1,3	149.511	44,4	27.996	12,4	7.721	2,4	771	0,2	5.107	1,6	21.222	13,8	215.746	71,4
18	Lampung	1.230.870	7.978	0,6	552.326	69,8	118.946	16,8	36.149	4,3	3.114	0,4	6.284	0,7	81.219	9,6	806.299	68,9
19	Kepulauan Bangka Belitung	232.994	3.704	1,2	97.197	40,7	13.824	20,2	4.082	2,8	331	0,2	1.958	1,3	6.243	4,3	143.642	61,2
20	Kepulauan Riau	369.993	2.898	2,3	68.732	18,6	12.462	27,1	3.688	8,2	422	0,9	2.424	2,8	8.874	2,4	123.470	41,8
31	DKI Jakarta	1.205.843	12.685	2,2	370.141	37,6	98.991	12,2	151.688	17,6	3.337	0,6	15.088	2,7	33.704	5,3	583.863	56,9
32	Jawa Barat	7.964.844	45.387	0,9	3.403.781	63,9	946.317	17,8	491.089	9,2	38.869	0,6	107.748	2,4	368.412	5,8	5.324.522	66,9
33	Jawa Tengah	5.951.837	51.798	1,9	3.441.389	67,9	797.348	17,2	381.232	7,2	32.281	0,6	143.693	3,7	321.739	8,9	5.089.982	85,3
34	DI Yogyakarta	539.881	18.127	5,7	168.994	44,6	32.646	10,2	79.299	25,9	5.190	1,8	29.674	6,1	28.445	6,6	320.357	59,3
35	Jawa Timur	6.362.259	29.467	1,8	1.071.626	62,5	351.236	18,3	295.713	7,2	23.609	0,7	148.217	3,6	247.934	6,0	4.111.591	64,6
36	Banten	2.723.718	10.519	0,9	842.261	75,6	112.866	13,9	56.067	5,1	3.903	0,3	13.494	1,2	51.619	4,6	1.113.653	99,8
51	Bali	553.005	5.226	1,0	177.931	47,7	76.897	9,8	123.742	33,0	2.084	0,6	10.948	2,9	11.451	3,1	371.232	67,1
52	Nusa Tenggara Barat	985.612	3.008	0,5	394.200	69,3	32.730	5,8	36.230	6,9	2.027	0,4	8.414	1,6	84.077	11,7	569.116	61,0
53	Nusa Tenggara Timur	966.994	851	0,2	183.614	38,3	14.317	8,8	15.613	9,6	1.178	0,7	8.285	4,8	31.222	17,5	170.313	38,3
61	Kalimantan Barat	605.163	2.108	0,6	249.630	68,8	35.711	10,3	8.327	2,3	333	0,2	1.815	0,5	7.695	3,2	249.378	99,3
62	Kalimantan Tengah	314.217	1.233	0,6	151.168	62,5	14.376	20,1	3.649	1,9	571	0,3	1.489	0,7	12.441	5,9	209.890	66,8
63	Kalimantan Selatan	651.238	3.265	0,7	310.141	51,8	(99.680	91,6	7.973	1,3	1.068	0,2	5.370	0,7	17.710	3,9	483.660	69,9
64	Kalimantan Timur	523.716	5.599	1,9	154.799	52,9	39.231	20,6	12.849	5,5	1.111	0,4	6.591	2,3	11.268	4,0	192.364	51,8
65	Kalimantan Utara	98.213	767	1,9	22.222	55,6	11.430	28,6	1.691	3,8	135	0,3	941	2,4	2.295	5,3	39.953	69,8
71	Sulawesi Utara	307.771	2.573	1,9	104.432	59,8	17.730	13,8	12.052	7,8	2.329	1,9	4.990	1,0	44.816	14,9	244.766	98,6
72	Sulawesi Tengah	470.870	889	0,2	232.698	72,9	48.938	20,6	13.661	4,6	773	0,2	4.231	1,4	22.493	7,6	254.857	62,5
73	Sulawesi Selatan	1.262.256	12.577	1,4	468.939	60,5	153.551	19,8	38.736	5,7	4.443	0,6	22.349	2,9	74.661	10,3	775.196	61,8
74	Sulawesi Tenggara	526.015	2.350	0,2	91.276	52,7	44.965	25,9	6.042	3,8	964	0,6	3.243	1,9	19.833	11,4	173.328	33,1
75	Gorontalo	179.164	241	0,2	53.651	44,9	18.344	14,8	7.049	6,8	317	0,4	1.842	2,4	10.473	13,5	118.236	66,8
76	Sulawesi Barat	197.755	963	0,8	57.239	51,8	19.669	24,9	3.852	3,2	331	0,3	1.345	1,1	9.332	8,4	118.241	59,8
81	Maluku	333.946	332	0,4	68.546	70,2	11.647	13,3	1.631	1,9	181	0,2	844	1,2	13.942	12,7	86.237	39,0
82	Maluku Utara	273.211	98	0,1	83.692	69,9	8.037	9,3	1.362	1,1	154	0,2	976	0,8	16.321	18,8	70.893	32,8
91	Papua Barat	123.963	225	0,7	29.585	73,1	3.954	12,4	519	1,6	136	0,5	340	1,4	3.230	9,6	21.972	23,4
94	Papua	811.259	600	0,4	10.449	68,4	4.233	19,8	782	3,8	76	0,3	329	2,2	1.871	6,3	20.648	29,1
	Jumlah (Indonesia)	**68.696.216**	**391.434**	**1,2**	**25.019.826**	**63,7**	**4.125.439**	**17,9**	**1.793.236**	**7,6**	**158.868**	**0,5**	**649.833**	**2,7**	**2.781.628**	**7,6**	**35.196.111**	**62,5**

KEMENKES RI

KEMENKES RI

Lampiran 29

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Ibu Bersalin	Peserta KB Pasca Persalinan															
			Kondom	%	Suntik	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	Jumlah	%
1	Aceh	122.193	9.062	6,2	43.[illegible]	30,9	23.[illegible]	16,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Sumatera Utara	217.683	4703	13,8	13.814	37,1	11.009	29,9	6.084	9,6	283	0,3	2.534	5,9	4.758	11,3	42.691	19,6
3	Sumatera Barat	114.909	1288	4,3	6.103	20,0	2.734	9,0	1.561	5,1	22	0,0	381	2,0	846	3,0	29.213	25,4
4	Riau	168.665	2669	3,8	14.376	20,2	13.979	20,0	7.879	2,9	140	0,2	1.038	3,4	3.129	6,9	45.233	27,0
5	Jambi	69.010	676	1,8	15.[illegible]	40,9	6.[illegible]	18,3	1.[illegible]	2,3	65	0,2	313	0,8	1.[illegible]	3,6	37.744	54,7
6	Sumatera Selatan	160.955	5042	5,0	46.754	46,2	19.[illegible]	19,3	1.867	2,3	38	0,0	332	0,3	4.273	4,2	100.879	60,1
7	Bengkulu	38.930	1027	4,2	13.346	47,0	5.[illegible]	13,0	814	2,2	24	0,1	186	0,8	1.487	6,1	25.004	59,1
8	Lampung	137.757	9803	9,2	49.[illegible]	36,0	22.[illegible]	18,9	4.756	3,9	222	0,2	799	0,7	15.[illegible]	10,9	121.231	78,8
9	Kep. Bangka Belitung	28.869	236	1,9	5.[illegible]	45,9	4.[illegible]	33,1	467	3,9	19	0,1	345	2,9	908	9,8	19.040	94,1
10	Kepulauan Riau	40.111	1239	3,0	15.[illegible]	38,6	3.[illegible]	15,2	1.044	5,8	31	0,2	668	3,4	1.283	6,7	19.236	48,7
11	DKI Jakarta	177.631	17827	10,0	95.[illegible]	49,1	22.[illegible]	17,9	16.[illegible]	9,3	866	0,5	957	1,2	18.[illegible]	24,9	77.[illegible]	44,3
12	Jawa Barat	917.254	8881	2,3	282.522	47,9	64.[illegible]	18,1	23.[illegible]	6,7	774	0,2	6.[illegible]	1,1	19.[illegible]	5,2	386.[illegible]	42,1
13	Jawa Tengah	553.680	34	9,5	161	43,6	69	12,9	49	11,6	1	0,3	4	1,1	40	10,3	364	0,1
14	DI Yogyakarta	36.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.[illegible]	-
15	Jawa Timur	599.615	9141	3,0	197.097	71,7	26.[illegible]	9,2	19.[illegible]	8,3	64	0,0	7.[illegible]	2,5	17.[illegible]	6,0	280.[illegible]	46,1
16	Banten	252.[illegible]	719	4,2	11.[illegible]	44,2	2.[illegible]	10,8	1.[illegible]	6,4	41	0,2	173	1,0	837	5,0	17.044	6,8
17	Bali	67.[illegible]	1691	4,4	10.[illegible]	59,1	2.[illegible]	6,8	[illegible]	23,4	32	0,1	1.[illegible]	3,3	1.[illegible]	3,9	[illegible]	12,5
18	Nusa Tenggara Barat	198.[illegible]	940	0,7	51.[illegible]	77,8	3.[illegible]	2,7	3.[illegible]	5,3	67	0,1	731	1,2	8.[illegible]	12,5	[illegible]	41,7
19	Nusa Tenggara Timur	196.[illegible]	119	1,2	4.[illegible]	54,9	[illegible]	9,6	[illegible]	10,0	9	0,0	111	0,2	1.[illegible]	17,3	[illegible]	5,2
20	Kalimantan Barat	185.294	239	0,9	18.[illegible]	61,8	6.[illegible]	21,3	337	1,8	3	0,0	118	1,0	749	2,5	30.503	29,0
21	Kalimantan Tengah	90.494	523	1,2	19.[illegible]	59,1	6.[illegible]	23,6	401	1,9	11	0,0	161	0,6	1.[illegible]	3,9	[illegible]	40,2
22	Kalimantan Selatan	86.652	1398	3,7	27.[illegible]	71,8	12.[illegible]	33,9	1.[illegible]	3,2	16	0,0	885	0,9	986	1,5	51.199	91,9
23	Kalimantan Timur	78.[illegible]	1285	3,9	19.[illegible]	58,7	3.[illegible]	16,9	3.[illegible]	9,3	14	0,0	930	2,9	3.[illegible]	6,2	[illegible]	63,3
24	Kalimantan Utara	12.746	702	19,6	3.225	68,6	199	9,3	298	9,4	9	0,0	237	6,6	999	5,7	5.[illegible]	60,9
25	Sulawesi Utara	62.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	65.[illegible]	728	2,2	13.[illegible]	41,5	7.[illegible]	19,1	3.[illegible]	9,7	[illegible]	4,0	2.[illegible]	6,7	3.[illegible]	11,1	[illegible]	99,6
27	Sulawesi Selatan	174.[illegible]	999	6,7	55.[illegible]	41,2	8.[illegible]	19,0	2.[illegible]	6,3	6	0,0	1.[illegible]	2,7	7.[illegible]	15,0	[illegible]	33,2
28	Sulawesi Tenggara	59.[illegible]	212	1,2	10.[illegible]	60,6	4.[illegible]	27,1	391	1,8	18	0,1	233	1,4	480	3,0	[illegible]	28,6
29	Gorontalo	15.[illegible]	33	0,2	2.[illegible]	40,7	1.[illegible]	30,8	412	7,9	0	0,0	50	0,9	[illegible]	17,2	[illegible]	28,6
30	Sulawesi Barat	36.[illegible]	151	1,9	3.[illegible]	39,6	2.[illegible]	27,2	225	2,7	9	0,1	274	3,4	328	7,7	6.[illegible]	39,8
31	Maluku	46.[illegible]	30	0,8	2.[illegible]	50,9	[illegible]	11,6	46	0,7	0	0,0	137	2,9	716	[illegible]	4.[illegible]	19,7
32	Maluku Utara	25.[illegible]	134	0,9	6.[illegible]	55,6	[illegible]	6,9	331	1,8	19	0,1	193	1,3	1.[illegible]	8,9	14.[illegible]	47,4
33	Papua Barat	12.[illegible]	32	1,3	2.[illegible]	71,1	[illegible]	16,7	79	2,3	3	0,1	64	1,2	170	3,4	3.[illegible]	13,7
34	Papua	76.[illegible]	721	3,4	12.[illegible]	64,6	2.[illegible]	17,2	686	8,9	6	0,1	23	0,1	1.[illegible]	7,8	21.[illegible]	38,1
	Jumlah (Indonesia)	5.853.[illegible]	78.748	4,1	1.095.[illegible]	40,7	290.[illegible]	17,4	129.[illegible]	5,5	4.[illegible]	0,2	35.[illegible]	1,8	125.[illegible]	7,2	4.715.[illegible]	56,2

KEMENKES RI

Lampiran 39a

JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil Dengan Komplikasi Kebidanan	Jumlah Lahir Hidup	Perkiraan Neonatal Komplikasi			Penanganan Komplikasi Neonatal	
				L+P	L	P	L+P	L+P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	126.964	25.393	125.422	8.710	8.357	17.067	5.667	33,2
2	Sumatera Utara	332.010	66.502	302.555	22.642	21.768	44.409	17.739	39,9
3	Sumatera Barat	120.374	24.075	109.431	8.208	7.879	16.087	567	3,5
4	Riau	170.360	34.073	154.879	11.602	11.120	22.722	4.382	19,3
5	Jambi	72.330	14.466	65.762	4.933	4.735	9.668	7.391	76,5
6	Sumatera Selatan	175.899	35.180	159.900	11.964	11.490	23.453	12.974	55,3
7	Bengkulu	30.013	6.003	27.303	2.065	2.056	5.421	2.602	48,0
8	Lampung	165.269	33.054	150.245	11.270	10.819	22.088	10.908	49,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.172	6.034	27.429	2.059	1.974	4.033	3.385	83,9
10	Kepulauan Riau	45.164	9.033	41.058	3.167	3.025	6.172	2.552	41,3
11	DKI Jakarta	103.366	20.673	160.696	12.917	12.394	25.311	24.030	95,0
12	Jawa Barat	960.932	192.186	873.075	66.186	63.266	129.452	107.503	83,1
13	Jawa Tengah	590.170	118.034	527.433	39.983	38.009	77.992	37.092	47,6
14	DI Yogyakarta	59.560	11.912	54.127	4.174	3.990	8.164	5.204	63,7
15	Jawa Timur	622.930	124.586	566.360	42.755	40.983	83.739	68.132	81,4
16	Banten	264.395	52.880	240.174	18.134	17.418	35.552	16.994	47,8
17	Bali	70.995	14.199	64.541	4.881	4.674	9.555	6.704	71,8
18	Nusa Tenggara Barat	113.646	22.729	103.333	7.810	7.506	14.917	11.295	75,7
19	Nusa Tenggara Timur	153.050	30.610	139.136	10.520	9.794	19.985	2.479	12,4
20	Kalimantan Barat	130.255	26.051	118.232	8.936	8.576	18.663	7.822	53,8
21	Kalimantan Tengah	99.169	19.837	90.154	6.842	6.612	13.760	4.573	33,5
22	Kalimantan Selatan	80.486	17.697	80.440	5.973	5.734	11.708	7.070	60,4
23	Kalimantan Timur	82.311	16.462	74.937	5.616	5.577	10.593	5.509	52,0
24	Kalimantan Utara	13.553	2.671	12.239	1.174	1.118	2.292	1.171	51,1
25	Sulawesi Utara	44.882	8.976	40.802	3.077	2.948	6.025	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	68.470	13.794	62.707	4.617	4.445	9.062	4.916	54,1
27	Sulawesi Selatan	185.004	37.001	168.180	12.578	12.053	24.631	14.620	59,4
28	Sulawesi Tenggara	68.825	13.765	64.906	4.655	4.454	9.109	3.176	34,9
29	Gorontalo	26.242	5.248	23.876	1.764	1.690	3.454	2.579	74,7
30	Sulawesi Barat	36.156	7.227	32.851	2.388	2.297	4.685	1.725	36,8
31	Maluku	49.093	9.819	44.630	3.252	3.126	6.378	1.857	29,1
32	Maluku Utara	32.115	6.423	29.195	2.155	2.068	4.223	0	0,0
33	Papua Barat	24.035	4.807	21.850	1.593	1.537	3.129	69	2,2
34	Papua	78.473	15.695	71.339	5.201	5.043	10.244	1.607	15,7
Jumlah (Indonesia)		**5.256.681**	**1.051.297**	**4.772.961**	**359.416**	**344.319**	**703.735**	**396.561**	**56,4**

Sumber: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

KEMENKES RI

Lampiran 30.b

PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	32.533	50	0,15
2	Sumatera Utara	48.026	231	0,48
3	Sumatera Barat	43.275	36	0,08
4	Riau	32.327	68	0,21
5	Jambi	21.319	2	0,01
6	Sumatera Selatan	62.464	73	0,12
7	Bengkulu	11.370	9	0,08
8	Lampung	61.503	25	0,04
9	Kepulauan Bangka Belitung	21.952	19	0,09
10	Kepulauan Riau	19.175	101	0,53
11	DKI Jakarta	150.362	384	0,26
12	Jawa Barat	345.276	751	0,22
13	Jawa Tengah	468.683	1.519	0,32
14	DI Yogyakarta	41.119	115	0,28
15	Jawa Timur	429.237	784	0,18
16	Banten	130.168	275	0,21
17	Bali	61.736	288	0,47
18	Nusa Tenggara Barat	35.232	171	0,49
19	Nusa Tenggara Timur	20.216	66	0,33
20	Kalimantan Barat	26.563	32	0,12
21	Kalimantan Tengah	12.048	26	0,22
22	Kalimantan Selatan	19.607	31	0,16
23	Kalimantan Timur	41.272	165	0,40
24	Kalimantan Utara	10.169	19	0,19
25	Sulawesi Utara	6.950	213	3,06
26	Sulawesi Tengah	26.835	23	0,09
27	Sulawesi Selatan	97.618	212	0,22
28	Sulawesi Tenggara	12.182	176	1,44
29	Gorontalo	9.022	4	0,04
30	Sulawesi Barat	6.699	3	0,04
31	Maluku	13.810	77	0,56
32	Maluku Utara	7.744	19	0,25
33	Papua Barat	11.813	112	0,95
34	Papua	32.168	360	1,12
Indone		2.370.472	6.439	0,27

Sumber : Direktur Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit, Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020 (Data SIHA per 12 Februari 2020)

KEMENKES RI

PERSENTASE IBU HAMIL HBsAg REAKTIF MENDAPATKAN PEMBERIAN OBAT ANTIVIRUS DENGAN MENGGUNAKAN TEST CEPAT HBsAg
MENURUT PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B	Kabupaten/Kota melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B (%)	Target Sasaran Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil diperiksa HBsAg	Ibu Hamil Positif HBsAg (%)	Jumlah Ibu Hamil HBsAg Reaktif	Ibu Hamil Reaktif HBsAg (%)	Jumlah Ibu Hamil HBsAg Reaktif yang Mendapat Obat Antivirus
1	Aceh	23	23	100,00	126.994	94.932	66,89	921	0,97	451
2	Sumatera Utara	33	18	54,55	382.810	33.587	7,06	413	1,76	295
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	120.374	60.567	50,32	643	1,06	368
4	Riau	12	12	100,00	170.366	33.243	19,51	487	1,46	212
5	Jambi	11	11	100,00	72.330	30.923	33,82	616	1,58	425
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	175.899	61.806	35,14	488	0,79	136
7	Bengkulu	10	10	100,00	40.813	18.279	44,79	292	1,60	230
8	Lampung	15	15	100,00	165.269	113.475	68,66	1528	1,35	1.319
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,00	30.372	21.471	71,16	553	2,58	307
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	45.364	17.510	38,77	341	1,95	209
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	182.366	126.630	69,05	1725	1,36	1.454
12	Jawa Barat	27	26	96,30	960.932	340.438	35,43	4385	1,29	3.015
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	580.176	416.525	71,76	9486	1,64	3.093
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	59.540	25.824	53,09	265	0,89	111
15	Jawa Timur	38	38	100,00	622.930	425.993	68,39	9842	2,03	6.087
16	Banten	8	8	100,00	284.191	130.680	45,46	2965	1,89	1.462
17	Bali	9	9	100,00	70.980	47.423	66,80	613	1,29	122
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	113.844	72.339	63,53	2348	3,22	690
19	Nusa Tenggara Timur	22	16	72,73	151.950	50.702	33,18	2637	5,19	958
20	Kalimantan Barat	14	12	85,71	110.223	8.550	7,79	72	0,84	72
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	74.184	25.282	42,72	615	3,22	586
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	88.404	40.584	32,65	989	1,95	410
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	82.431	42.589	55,51	1034	2,27	814
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00	13.203	9.898	74,97	224	2,29	145
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67	44.882	9.617	21,03	145	1,54	97
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	48.976	31.556	68,65	802	2,29	344
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	185.004	142.942	77,26	3540	2,48	3.044
28	Sulawesi Tenggara	17	13	88,24	77.065	17.352	22,52	693	3,99	419
29	Gorontalo	6	6	100,00	26.242	13.894	45,90	434	3,47	384
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33	36.136	19.829	54,87	422	2,13	211
31	Maluku	11	8	72,73	49.093	11.329	23,08	397	3,50	201
32	Maluku Utara	10	10	100,00	55.115	11.257	20,42	481	4,27	295
33	Papua Barat	13	9	69,23	24.035	6.868	28,57	304	4,43	159
34	Papua	29	16	55,17	78.473	24.420	31,12	1051	4,30	699
		514	464	90,27	5.264.725	2.246.158	46,33	46.364	2,81	26.734

Catatan

Pembilang: Target sasaran yang dimaksud pada kolom 4 adalah jumlah estimasi Ibu Hamil (dari Provinsi/dari Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B atau

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang menandakan adanya infeksi hepatitis B

Pemeriksaan HBsAg pada ibu hamil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

Ibu hamil reaktif HBsAg: Jumlah ibu hamil yang memberikan hasil positif HBsAg (Interpretasi Positif)

HBsAg (Hepatitis B surface antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang menandakan adanya infeksi hepatitis B yang berlangsung kronis (lama). Ibu dengan HBsAg reaktif (positif)

KEMENKES RI

Lampiran 31

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kematian			
		Neonatal	Balita		
			Bayi *	Anak Balita	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	734	924	71	995
2	Sumatera Utara	660	790	83	873
3	Sumatera Barat	582	788	111	899
4	Riau	374	480	47	527
5	Jambi	244	290	13	303
6	Sumatera Selatan	422	508	31	539
7	Bengkulu	196	263	34	297
8	Lampung	422	513	28	541
9	Kepulauan Bangka Belitung	143	188	21	209
10	Kepulauan Riau	213	269	25	294
11	DKI Jakarta	403	583	96	679
12	Jawa Barat	2.355	2.851	213	3.064
13	Jawa Tengah	3.111	4.450	758	5.208
14	D I Yogyakarta	236	316	52	368
15	Jawa Timur	3.032	3.855	333	4.188
16	Banten	1.039	1.292	147	1.439
17	Bali	236	327	39	366
18	Nusa Tenggara Barat	674	850	40	890
19	Nusa Tenggara Timur	649	933	137	1.070
20	Kalimantan Barat	429	539	56	595
21	Kalimantan Tengah	283	335	24	359
22	Kalimantan Selatan	460	602	68	670
23	Kalimantan Timur	519	688	77	765
24	Kalimantan Utara	103	149	22	171
25	Sulawesi Utara	199	250	24	274
26	Sulawesi Tengah	333	428	30	458
27	Sulawesi Selatan	714	919	72	991
28	Sulawesi Tenggara	324	436	50	486
29	Gorontalo	167	242	22	264
30	Sulawesi Barat	261	323	16	339
31	Maluku	167	234	28	262
32	Maluku Utara	211	276	49	325
33	Papua Barat	181	216	44	260
34	Papua	168	288	66	354
Indonesia		**20.244**	**26.395**	**2.927**	**29.322**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 27 Maret 2020)
Keterangan : - a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

KEMENKES RI

Lampiran 3.2

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)						Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan)							Penyebab Kematian Anak Balita (12/59 Bulan)						
		BBLR	ASFIKSIA	Tetanus Neonatorum	SEPSIS	Kelainan Bawaan	Lain-lain	Pneumonia	Diare	Malaria	Tetanus	Kelainan Saraf	Kelainan Saluran Cerna	Lain-lain	Pneumonia	Diare	Malaria	Campak	Demam	Difteri	Lain-lain
1	Aceh	193	209	2	17	93	160	22	13	1	1	3	7	145	3	5	0	0	0	0	63
2	Sumatera Utara	189	205	4	29	53	180	18	23	0	0	0	6	83	10	9	0	0	15	1	48
3	Sumatera Barat	152	146	0	7	81	108	17	12	0	0	5	6	166	6	9	0	0	3	0	93
4	Riau	125	86	1	5	35	122	5	5	0	0	0	4	92	1	3	0	0	1	0	42
5	Jambi	83	64	1	9	25	62	4	6	0	0	0	2	34	0	2	0	0	0	1	11
6	Sumatera Selatan	154	124	5	10	32	97	10	24	0	0	1	1	90	3	7	0	0	2	0	28
7	Bengkulu	61	44	0	3	42	42	2	11	3	0	0	2	52	1	3	0	0	1	0	29
8	Lampung	137	126	2	4	66	87	8	9	0	2	0	1	70	0	3	0	0	4	0	25
9	Kep. Bangka Belitung	57	36	0	3	21	36	7	4	0	0	0	1	31	2	2	0	0	0	0	17
10	Kepulauan Riau	84	59	0	1	17	46	3	13	0	0	0	2	36	2	3	0	0	1	0	19
11	DKI Jakarta	196	99	0	22	55	151	34	16	0	0	13	6	110	29	19	0	0	3	0	61
12	Jawa Barat	948	658	3	74	273	407	84	65	3	1	7	21	316	25	17	0	0	29	0	142
13	Jawa Tengah	1097	721	0	71	461	762	144	112	0	0	35	23	979	62	71	0	1	19	4	602
14	D I Yogyakarta	61	66	0	12	38	39	8	9	0	0	1	4	67	3	8	0	0	1	0	43
15	Jawa Timur	1239	920	5	91	474	991	134	113	1	0	6	23	346	42	38	0	0	36	0	213
16	Banten	371	277	11	56	138	385	46	17	0	2	0	3	185	7	11	0	0	32	0	97
17	Bali	108	38	0	9	53	96	14	5	0	0	0	5	67	4	1	0	0	1	0	33
18	Nusa Tenggara Barat	264	204	1	31	76	98	70	13	0	0	1	0	92	11	4	0	0	2	0	23
19	Nusa Tenggara Timur	143	105	3	29	61	109	83	17	2	0	4	7	171	11	13	3	0	27	0	83
20	Kalimantan Barat	116	136	2	24	98	113	23	13	0	0	0	1	73	2	4	0	0	2	0	48
21	Kalimantan Tengah	102	81	1	17	17	65	7	11	0	0	0	1	37	0	0	0	0	1	0	15
22	Kalimantan Selatan	109	98	0	19	46	94	14	29	0	0	1	3	83	4	6	0	0	0	0	33
23	Kalimantan Timur	197	141	1	15	61	80	30	30	0	0	0	2	99	4	5	0	0	9	0	57
24	Kalimantan Utara	39	26	0	1	14	13	8	6	0	0	1	0	31	3	0	0	0	0	0	19
25	Sulawesi Utara	72	44	0	13	36	34	8	4	1	0	0	0	30	1	3	0	0	1	0	19
26	Sulawesi Tengah	93	68	2	5	31	124	29	10	2	0	0	2	82	6	3	0	0	1	0	16
27	Sulawesi Selatan	262	211	1	24	58	148	29	25	0	0	5	5	141	0	4	0	0	9	0	69
28	Sulawesi Tenggara	92	76	2	9	41	104	20	9	0	1	0	3	77	3	6	0	0	3	0	39
29	Gorontalo	67	66	0	9	14	32	7	14	0	0	0	0	38	1	7	0	0	2	0	12
30	Sulawesi Barat	86	68	4	9	23	81	7	6	1	0	1	1	46	2	2	0	0	1	0	11
31	Maluku	47	51	0	12	10	47	16	15	1	0	0	1	34	0	2	0	0	0	0	17
32	Maluku Utara	62	57	5	13	14	60	6	17	1	0	0	1	48	1	12	0	0	1	0	33
33	Papua Barat	50	49	1	12	5	45	8	7	3	0	0	0	17	4	6	0	0	0	0	34
34	Papua	57	39	0	9	8	38	39	30	3	0	0	1	27	13	34	7	0	0	0	12
	Indonesia	7.150	5.444	56	703	2.531	4.340	979	746	18	7	63	181	4.117	277	314	22	1	215	6	2.092

Sumber : Riskesdas 2018 (Diolah sesuai dengan 17 Provinsi 2019)

KEMENKES RI

Lampiran 33

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi Baru Lahir Ditimbang		BBLR	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	118.422	82.553	71,3	2.381	2,9
2	Sumatera Utara	302.555	324.445	107,2	6.511	2,0
3	Sumatera Barat	109.431	88.001	80,4	2.887	3,3
4	Riau	154.878	TAD	TAD	TAD	TAD
5	Jambi	65.762	62.681	95,3	1.094	1,7
6	Sumatera Selatan	156.908	136.467	87,8	270	0,2
7	Bengkulu	37.103	33.663	90,7	1.197	3,6
8	Lampung	150.245	144.910	97,7	3.861	2,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.429	26.291	95,9	1.150	4,3
10	Kepulauan Riau	42.058	TAD	TAD	TAD	TAD
11	DKI Jakarta	166.696	28.958	16,2	147	0,5
12	Jawa Barat	873.575	873.575	100,0	18.656	2,1
13	Jawa Tengah	527.463	TAD	TAD	TAD	TAD
14	D I Yogyakarta	54.127	42.945	79,4	2.389	5,6
15	Jawa Timur	566.300	558.237	98,6	39.739	7,1
16	Banten	248.174	203.948	84,7	2.778	1,4
17	Bali	64.541	TAD	TAD	TAD	TAD
18	Nusa Tenggara Barat	103.215	TAD	TAD	TAD	TAD
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	90.441	65,0	4.954	5,5
20	Kalimantan Barat	100.232	83.113	82,9	3.162	3,8
21	Kalimantan Tengah	53.004	42.075	79,7	1.023	2,4
22	Kalimantan Selatan	88.440	74.513	84,6	3.800	5,1
23	Kalimantan Timur	74.937	67.798	90,4	3.292	4,9
24	Kalimantan Utara	12.129	9.327	76,9	879	9,2
25	Sulawesi Utara	40.802	33.024	80,9	668	2,0
26	Sulawesi Tengah	62.707	TAD	TAD	TAD	TAD
27	Sulawesi Selatan	168.185	146.990	87,4	6.478	4,4
28	Sulawesi Tenggara	62.568	46.921	75,0	1.815	3,9
29	Gorontalo	23.856	21.290	89,2	1.119	5,3
30	Sulawesi Barat	32.851	25.859	78,7	1.418	5,5
31	Maluku	44.630	44.630	100,0	492	1,1
32	Maluku Utara	29.195	TAD	TAD	TAD	TAD
33	Papua Barat	21.856	TAD	TAD	TAD	TAD
34	Papua	71.339	TAD	TAD	TAD	TAD
	Indonesia	4.778.621	3.312.029	69,3	111.927	3,4

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2020
Keterangan: TAD : Tidak ada data

KEMENKES RI

Lampiran 34

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 2 Kali (KN Lengkap)*	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.422	97.952	84,9	94.451	81,8
2	Sumatera Utara	302.535	265.209	87,7	255.698	84,5
3	Sumatera Barat	109.431	93.245	85,2	90.683	82,9
4	Riau	154.876	133.768	86,4	128.698	83,1
5	Jambi	65.762	67.638	102,9	66.605	101,3
6	Sumatera Selatan	159.909	156.922	98,1	152.583	95,4
7	Bengkulu	37.103	34.712	93,6	33.731	90,9
8	Lampung	150.245	147.962	98,5	144.410	96,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.429	26.154	95,4	25.934	94,5
10	Kepulauan Riau	41.058	32.087	78,2	38.694	94,2
11	DKI Jakarta	166.696	176.850	106,1	173.068	103,8
12	Jawa Barat	873.575	920.543	105,4	899.532	103,0
13	Jawa Tengah	527.433	526.176	99,8	285.990	54,2
14	D I Yogyakarta	54.127	39.968	73,8	38.477	71,1
15	Jawa Timur	566.500	567.638	100,2	548.660	96,9
16	Banten	240.174	249.393	103,8	248.987	103,7
17	Bali	64.541	66.557	103,1	65.357	101,3
18	Nusa Tenggara Barat	103.215	103.899	99,6	100.676	97,4
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	92.021	66,1	91.458	65,7
20	Kalimantan Barat	100.232	88.321	88,1	83.708	83,5
21	Kalimantan Tengah	53.804	47.534	88,3	46.282	86,0
22	Kalimantan Selatan	80.440	71.845	89,3	69.869	86,9
23	Kalimantan Timur	74.937	65.247	87,1	65.373	87,2
24	Kalimantan Utara	12.139	12.758	105,1	12.057	99,3
25	Sulawesi Utara	40.802	36.104	88,5	3.462	8,5
26	Sulawesi Tengah	62.707	52.185	83,2	56.239	89,7
27	Sulawesi Selatan	168.195	152.093	90,4	148.801	88,5
28	Sulawesi Tenggara	56.906	51.711	90,9	50.580	88,9
29	Gorontalo	23.856	22.230	93,2	21.199	88,9
30	Sulawesi Barat	32.851	25.642	78,1	25.053	76,3
31	Maluku	44.630	31.723	71,1	27.851	62,4
32	Maluku Utara	29.195	22.125	75,8	20.396	69,9
33	Papua Barat	21.858	13.676	62,6	12.461	57,0
34	Papua	71.339	37.867	53,1	31.237	43,8
Indonesia		**4.771.961**	**4.538.817**	**94,9**	**4.177.485**	**87,5**

Sumber : Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020
Hari Kunjungan Lahir dimaksudkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

KEMENKES RI

Lampiran 35

PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)

DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia 0-6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	82.559	59.668	72,28	79.008	43.642	55,24
2	Sumatera Utara	337.385	199.877	59,97	88.867	44.548	50,35
3	Sumatera Barat	88.163	73.506	83,38	60.047	31.659	75,92
4	Riau	143.685	101.098	70,36	102.730	75.438	73,44
5	Jambi	66.819	54.601	81,71	49.352	34.103	69,10
6	Sumatera Selatan	156.467	135.187	86,40	83.333	48.162	57,79
7	Bengkulu	33.463	23.178	69,26	14.124	10.192	72,16
8	Lampung	151.694	127.522	84,20	140.642	97.501	69,33
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.317	21.305	80,48	19.606	11.764	60,01
10	Kepulauan Riau	39.567	32.153	81,25	33.897	20.253	59,75
11	DKI Jakarta	15.472	14.610	94,43	51.271	36.000	70,22
12	Jawa Barat	897.959	707.894	78,81	576.682	366.495	63,53
13	Jawa Tengah	483.104	404.029	83,63	388.438	269.819	69,46
14	DI Yogyakarta	42.450	37.486	88,31	30.744	23.827	77,50
15	Jawa Timur	558.257	389.714	69,81	432.841	338.806	78,27
16	Banten	54.556	33.391	61,21	95.383	51.472	53,96
17	Bali	65.540	57.327	86,95	32.946	23.627	71,71
18	Nusa Tenggara Barat	103.033	86.052	83,50	99.995	86.253	86,26
19	Nusa Tenggara Timur	91.696	69.253	75,52	70.003	53.917	77,02
20	Kalimantan Barat	84.876	62.170	73,25	59.113	37.602	63,61
21	Kalimantan Tengah	48.816	38.548	78,97	27.859	15.977	57,35
22	Kalimantan Selatan	73.847	54.264	73,48	55.956	38.047	68,02
23	Kalimantan Timur	68.522	53.548	78,13	31.172	24.480	78,53
24	Kalimantan Utara	10.337	7.362	71,77	6.943	4.461	64,25
25	Sulawesi Utara	33.933	19.629	57,85	9.491	4.821	50,80
26	Sulawesi Tengah	62.707	46.371	73,95	35.254	19.280	54,69
27	Sulawesi Selatan	149105	126370	84,71	119471	84606	70,82
28	Sulawesi Tenggara	47867	45433	94,92	32830	21999	66,81
29	Gorontalo	21312	18439	86,52	13953	6877	49,29
30	Sulawesi Barat	25905	21951	84,74	16768	12827	76,50
31	Maluku	44630	15605	34,97	14463	6269	43,35
32	Maluku Utara	21125	16351	77,40	19768	11872	60,06
33	Papua Barat	13000	398	3,06	9303	3825	41,12
34	Papua	32204	11718	52,77	34422	14256	41,42
Indonesia		**4.162.546**	**3.144.025**	**75,58**	**2.943.415**	**1.994.097**	**67,76**

KEMENKES RI

Lampiran 37

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	% Desa/Kelurahan UCI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	6.507	1.546	23,8
2	Sumatera Utara	6.113	5.047	82,6
3	Sumatera Barat	4.120	2.852	69,2
4	Riau	1.872	1.255	67,0
5	Jambi	1.564	1.502	96,0
6	Sumatera Selatan	3.263	3.083	94,5
7	Bengkulu	1.516	1.400	92,3
8	Lampung	2.651	2.447	92,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	391	388	99,2
10	Kepulauan Riau	409	349	85,3
11	DKI Jakarta	267	267	100,0
12	Jawa Barat	5.957	5.585	93,8
13	Jawa Tengah	8.551	8.549	100,0
14	D I Yogyakarta	438	438	100,0
15	Jawa Timur	8.503	7.674	90,3
16	Banten	1.552	1.380	88,9
17	Bali	716	716	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	1.142	1.075	94,1
19	Nusa Tenggara Timur	3.351	2.555	76,2
20	Kalimantan Barat	2.136	1.510	70,7
21	Kalimantan Tengah	1.578	1.195	75,7
22	Kalimantan Selatan	2.006	1.796	89,5
23	Kalimantan Timur	1.030	881	84,9
24	Kalimantan Utara	479	336	70,1
25	Sulawesi Utara	1.030	1.020	88,5
26	Sulawesi Tengah	2.023	1.703	84,3
27	Sulawesi Selatan	3.040	2.912	95,8
28	Sulawesi Tenggara	2.262	2.029	89,7
29	Gorontalo	729	699	95,9
30	Sulawesi Barat	654	510	78,0
31	Maluku	1.235	911	73,8
32	Maluku Utara	1.200	1.029	85,8
33	Papua Barat	1.497	1.270	75,3
34	Papua	2.158	954	44,2
Indonesia		82.954	67.477	81,3

Sumber : Dirjen Pemerintahan dan Pengembangan Daerah, Kemendagri RI, 2019 (Update sampai dengan 18 Nov 2019)

KEMENKES RI

Lampiran 59

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS BO (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019

KEMENKES RI

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup			Hepatitis BO (0 -7 hari)						BCG					
					< 24 Jam				1 - 7 Hari							
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%	L	%	P	%	L+P	%
1	Aceh	57.711	57.700	115.422	33.672	58,3	31.962	55,4	65.634	56,9	12.950	22,5	12.338	21,3	25.288	21,9
2	Sumatera Utara	153.951	151.343	305.294	105.710	68,6	101.394	67,0	207.104	67,8	36.927	17,9	37.040	17,9	73.967	17,9
3	Sumatera Barat	54.041	54.647	108.688	38.750	71,7	39.903	73,0	78.653	72,4	8.691	16,1	8.251	15,1	16.942	15,6
4	Riau	79.419	75.439	154.858	52.210	65,7	49.416	65,5	101.626	65,6	7.266	9,1	7.687	9,4	14.953	9,2
5	Jambi	33.994	32.159	66.153	34.256	100,1	32.629	101,4	66.885	101,1	1.216	3,5	1.230	3,7	2.446	3,6
6	Sumatera Selatan	81.258	78.660	159.918	64.261	79,1	62.988	80,1	127.251	79,6	16.076	22,2	17.270	22,0	33.351	22,1
7	Bengkulu	18.017	18.184	37.101	14.490	80,4	14.987	82,4	29.481	81,3	4.150	23,7	4.456	22,4	8.606	23,1
8	Lampung	76.940	73.302	150.242	63.186	82,1	60.842	83,0	124.028	82,6	10.934	14,2	10.847	14,8	21.771	14,5
9	Kep. Bangka Belitung	14.273	13.734	28.009	13.221	92,6	12.973	94,5	26.194	93,5	162	1,1	186	1,4	348	1,2
10	Kepulauan Riau	20.423	18.118	38.541	19.189	94,0	19.033	94,5	38.222	94,4	940	4,5	884	4,6	1.824	4,6
11	DKI Jakarta	93.436	93.240	186.676	82.909	99,3	84.758	97,9	167.667	98,2	6.948	8,6	6.447	8,4	13.395	8,5
12	Jawa Barat	942.397	931.228	1.873.625	958.871	102,6	937.398	101,8	1.896.269	101,7	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD
13	Jawa Tengah	561.617	565.914	1.127.531	504.371	99,6	546.296	93,7	1.050.668	96,1	17.397	4,5	15.876	4,1	33.273	4,3
14	DI Yogyakarta	25.290	21.858	47.148	19.581	91,6	18.178	86,8	37.677	89,8	1.940	4,9	876	4,2	1.816	4,9
15	Jawa Timur	579.699	584.661	1.164.360	598.900	106,1	583.018	99,8	1.181.918	101,5	3.459	0,9	1.840	0,5	5.299	0,7
16	Banten	222.506	217.868	440.374	215.826	98,7	206.803	90,7	422.629	94,7	17.288	14,1	15.892	13,3	33.180	13,8
17	Bali	32.328	32.833	65.161	30.911	93,1	29.957	93,3	60.868	93,2	3.172	16,0	3.137	15,7	6.309	15,9
18	Nusa Tenggara Barat	80.190	75.237	155.427	47.213	99,0	46.969	90,8	94.182	94,9	3.695	8,2	3.546	8,4	7.241	8,3
19	Nusa Tenggara Timur	69.642	70.115	139.757	42.691	61,3	44.134	63,0	86.825	62,1	3.338	4,8	3.240	4,6	6.578	4,7
20	Kalimantan Barat	76.872	69.208	146.080	28.682	36,9	27.588	39,8	56.270	38,5	13.965	18,2	15.159	21,9	29.124	19,9
21	Kalimantan Tengah	38.163	35.639	73.802	18.369	48,2	16.580	46,5	34.949	47,4	3.332	8,7	3.344	9,4	6.676	9,0
22	Kalimantan Selatan	40.897	39.581	80.478	23.163	56,7	26.705	67,5	49.868	62,0	18.174	44,4	17.697	44,7	35.871	44,6
23	Kalimantan Timur	59.296	53.641	112.937	31.697	53,5	28.710	53,5	60.407	53,5	3.299	5,6	3.318	6,2	6.617	5,9
24	Kalimantan Utara	6.444	5.895	12.339	5.231	81,2	5.102	86,6	10.333	83,8	549	8,5	468	7,9	1.017	8,2
25	Sulawesi Utara	20.852	19.970	40.822	13.675	65,6	13.995	70,1	27.670	67,8	7.252	34,8	7.071	35,4	14.323	35,1
26	Sulawesi Tengah	32.001	30.706	62.707	19.445	60,8	20.259	66,0	39.704	63,3	7.307	22,8	7.353	23,9	14.660	23,4
27	Sulawesi Selatan	82.315	85.855	168.170	71.089	86,4	67.641	78,8	138.730	82,5	8.799	10,7	8.556	10,0	17.355	10,3
28	Sulawesi Tenggara	33.461	31.195	64.656	25.519	76,3	23.836	76,4	49.355	76,3	760	2,3	760	2,4	1.520	2,4
29	Gorontalo	12.992	12.962	25.954	9.856	75,9	9.929	76,6	19.785	76,2	619	4,8	553	4,3	1.172	4,5
30	Sulawesi Barat	16.589	15.262	31.851	10.693	64,5	10.042	65,8	20.735	65,1	2.247	13,6	1.994	13,1	4.241	13,3
31	Maluku	22.515	22.119	44.634	10.242	45,5	10.471	47,3	20.713	46,4	3.898	17,3	4.028	18,2	7.926	17,8
32	Maluku Utara	19.099	19.099	38.198	8.264	43,3	9.242	48,4	17.506	45,8	2.331	12,2	1.799	9,4	4.130	10,8
33	Papua Barat	13.911	10.549	24.460	4.089	29,4	4.879	46,2	8.968	36,7	4.411	31,7	4.103	38,9	8.514	34,8
34	Papua	37.922	33.930	71.852	7.162	18,9	8.861	26,1	16.023	22,3	12.372	32,6	11.471	33,8	23.843	33,2
Jumlah		3.398.191	3.366.669	6.764.860	2.272.571	66,9	2.305.300	68,5	4.563.337	67,5	221.196	6,5	216.732	6,4	437.928	6,5

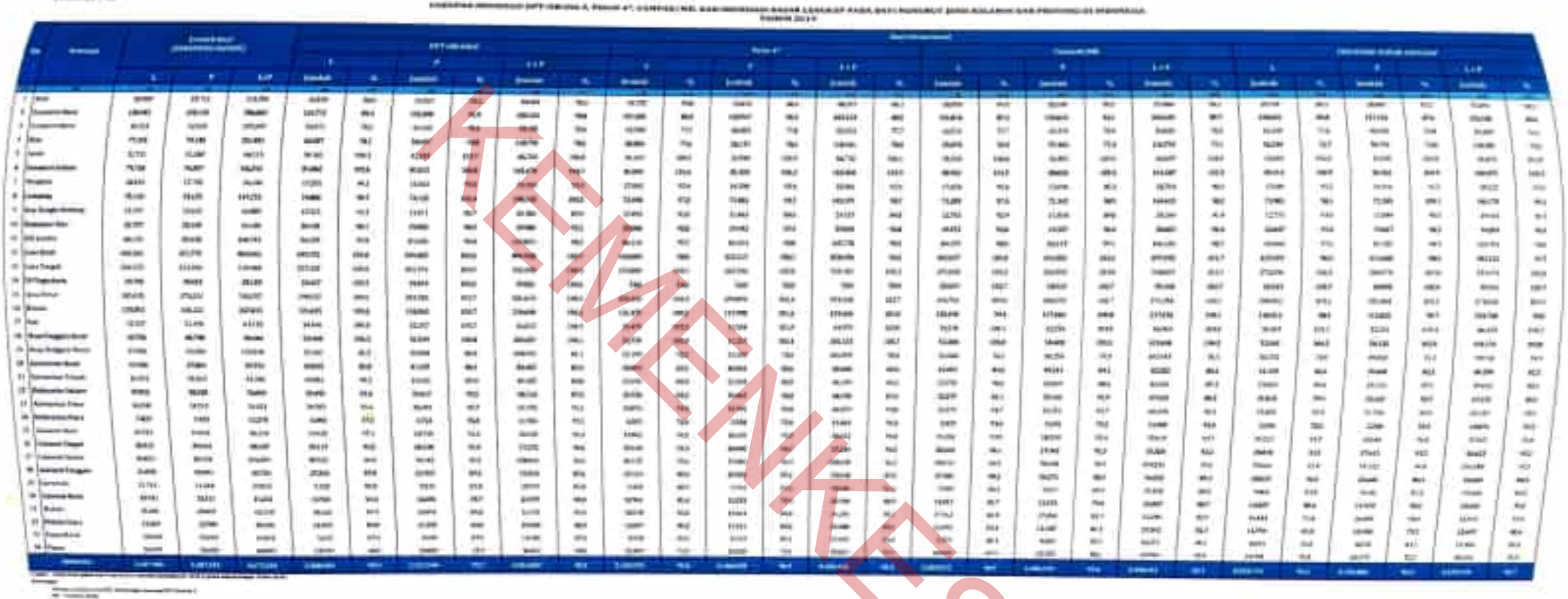

KEMENKES RI

Lampiran 39.b

DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HIB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HIB(1) - DPT/HB/HIB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019

No	Provinsi	2017		2018		2019	
		DPT/HB/HIB(1)-Campak	DPT/HB/HIB(1) - DPT/HB/HIB(3)	DPT/HB/HIB(1)-Campak	DPT/HB/HIB(1) - DPT/HB/HIB(3)	DPT/HB/HIB(1)-Campak	DPT/HB/HIB(1) - DPT/HB/HIB(3)
1	Aceh	4,2	5,5	13,7	7,1	14,7	9,0
2	Sumatera Utara	3,0	2,6	9,5	2,3	2,5	1,5
3	Sumatera Barat	2,1	3,0	2,9	3,2	5,0	5,2
4	Riau	5,8	2,9	4,4	3,2	3,6	3,9
5	Jambi	1,1	1,4	0,7	2,8	1,4	1,4
6	Sumatera Selatan	2,4	-0,3	-0,9	0,4	1,0	0,5
7	Bengkulu	1,8	1,9	-5,1	2,6	7,6	4,2
8	Lampung	-0,2	-0,1	-1,4	0,0	3,0	0,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	-0,7	0,9	1,5	3,9	3,0	4,5
10	Kepulauan Riau	2,3	0,5	-0,9	1,7	3,2	0,3
11	DKI Jakarta	17,1	1,4	1,1	0,6	-0,1	0,4
12	Jawa Barat	5,1	3,8	11,6	2,0	2,5	0,6
13	Jawa Tengah	4,4	0,3	-2,2	0,1	1,2	0,3
14	DI Yogyakarta	-1,5	0,5	1,4	0,3	1,3	0,4
15	Jawa Timur	4,3	2,7	1,7	1,3	2,1	1,1
16	Banten	8,6	4,3	4,6	3,1	4,0	3,0
17	Bali	0,6	2,8	1,6	2,0	4,9	4,0
18	Nusa Tenggara Barat	1,6	0,9	1,2	2,7	2,5	0,8
19	Nusa Tenggara Timur	3,4	1,5	-27,8	11,1	6,7	1,1
20	Kalimantan Barat	3,8	2,7	-4,3	3,0	6,4	4,4
21	Kalimantan Tengah	3,8	3,8	-12,6	2,6	5,5	5,0
22	Kalimantan Selatan	3,5	4,7	-2,8	7,5	2,8	1,8
23	Kalimantan Timur	2,5	2,7	2,2	2,4	5,2	4,2
24	Kalimantan Utara	7,7	4,3	9,6	6,4	9,9	6,1
25	Sulawesi Utara	2,5	1,2	-0,8	0,7	4,9	2,1
26	Sulawesi Tengah	1,8	2,5	-9,4	0,3	5,0	2,5
27	Sulawesi Selatan	2,0	2,7	-4,2	3,0	0,5	0,8
28	Sulawesi Tenggara	4,7	4,7	0,9	5,0	2,8	4,6
29	Gorontalo	-1,2	-1,2	-2,2	1,3	0,0	3,5
30	Sulawesi Barat	2,7	3,1	-8,6	4,6	2,9	3,8
31	Maluku	6,7	4,2	14,0	4,8	3,7	1,7
32	Maluku Utara	4,7	4,1	4,8	1,2	4,2	3,5
33	Papua Barat	2,1	0,8	-0,9	4,9	4,2	5,2
34	Papua	4,3	12,1	1,8	12,6	4,5	11,9
	Indonesia	4,1	2,6	2,5	2,3	3,1	1,8

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 28 Mei 2020)

KEMENKES RI

Lampiran 29.c

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2019

No	Provinsi	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	12	52,17	23	5	21,74	23	3	13,04
2	Sumatera Utara	33	25	75,76	33	20	60,61	33	20	60,61
3	Sumatera Barat	19	16	84,21	19	9	47,37	19	8	42,11
4	Riau	12	9	75,00	12	4	33,33	12	6	50,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	11	100,00	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	16	94,12	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	10	100,00	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	15	100,00	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	6	85,71	7	4	57,14
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	7	7	100,00	7	6	85,71
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	26	96,30	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	35	100,00	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00	38	37	97,37	38	37	97,37
16	Banten	8	7	87,50	8	7	87,50	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	10	100,00	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	12	54,55	22	6	27,27	22	6	27,27
20	Kalimantan Barat	14	13	92,86	14	6	42,86	14	6	42,86
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	11	78,57	14	9	64,29
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	13	11	84,62	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	9	90,00	10	9	90,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00	5	3	60,00	5	2	40,00
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67	15	9	60,00	15	11	73,33
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	13	12	92,31	13	12	92,31
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	21	87,50	24	21	87,50
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00	17	13	76,47	17	14	82,35
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	4	66,67	6	5	83,33
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33	6	2	33,33	6	3	50,00
31	Maluku	11	7	63,64	11	6	54,55	11	5	45,45
32	Maluku Utara	10	6	60,00	10	3	30,00	10	5	50,00
33	Papua Barat	13	9	69,23	13	10	76,92	13	8	61,54
34	Papua	29	7	24,14	29	10	34,48	29	13	44,83
Indonesia		**514**	**439**	**85,41**	**514**	**374**	**72,76**	**514**	**379**	**73,74**

Sumber : Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Update sampai dengan 18 Mei 2020)

KEMENKES RI

Lampiran 40.a

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH BIDA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019

KEMENKES RI

No.	Provinsi	Jumlah Baduta			DPT-HB-Hib 4						Campak/MR2					
		L	P	L+P	L		P		L+P		L		P		L+P	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	38.403	38.036	126.439	24.888	77,8	18.391	38,9	43.791	34,9	17.986	38,8	11.258	28,1	29.244	35,6
2	Sumatera Utara	102.071	144.713	246.784	146.134	69,8	103.867	70,8	250.021	70,3	87.279	69,8	90.958	68,1	178.238	69,9
3	Sumatera Barat	33.045	32.963	167.908	24.489	84,8	23.030	69,7	48.116	69,6	32.168	97,2	21.229	60,2	53.398	68,3
4	Riau	37.697	33.819	153.853	32.764	86,9	24.252	96,1	59.792	96,8	32.228	97,2	23.673	92,6	56.891	92,4
5	Jambi	32.886	32.302	64.598	28.709	87,3	17.930	55,9	46.639	86,7	27.183	82,7	26.126	82,5	53.311	83,8
6	Sumatera Selatan	80.497	73.332	153.829	73.238	91,4	73.429	99,9	147.017	95,5	76.483	95,5	74.815	96,3	149.298	96,3
7	Bengkulu	18.511	17.781	36.292	16.959	89,3	15.964	83,8	29.397	86,7	13.334	72,0	12.904	72,6	26.238	72,3
8	Lampung	76.284	72.245	148.529	65.874	86,4	64.183	87,9	130.057	87,3	48.717	79,6	39.348	84,6	120.065	80,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	13.685	13.126	26.809	8.379	61,2	8.236	62,8	16.715	62,5	7.166	53,2	6.842	52,1	14.009	52,2
10	Kepulauan Riau	21.295	20.481	41.776	16.042	75,3	15.818	75,3	31.466	75,3	15.896	74,3	14.679	71,7	29.582	73,1
11	DKI Jakarta	99.919	84.476	172.495	83.276	84,3	82.329	97,8	166.179	96,3	83.238	94,6	81.822	98,9	165.060	96,7
12	Jawa Barat	461.840	423.955	887.795	343.230	74,4	330.862	78,1	673.979	77,7	159.109	74,2	159.789	72,4	318.818	74,8
13	Jawa Tengah	368.871	350.466	719.487	261.341	89,8	272.328	77,7	474.671	90,3	231.017	85,9	222.588	87,2	453.605	86,3
14	DI Yogyakarta	39.864	38.248	87.212	19.841	49,2	18.209	100,3	37.449	100,9	18.739	98,2	17.599	97,2	36.479	97,8
15	Jawa Timur	387.240	371.823	762.913	259.916	99,3	249.819	93,2	509.734	95,6	250.662	96,8	252.674	91,7	513.537	93,2
16	Banten	121.855	117.866	238.919	99.808	88,3	96.479	82,9	195.078	85,7	93.398	95,8	90.685	78,8	185.247	77,8
17	Bali	32.644	31.301	63.946	26.898	77,8	23.206	73,1	49.841	76,6	25.242	77,5	23.830	75,8	48.439	76,3
18	Nusa Tenggara Barat	34.673	48.844	103.227	49.259	78,4	46.133	77,2	95.181	78,1	37.389	75,2	36.271	74,2	73.737	73,7
19	Nusa Tenggara Timur	87.295	84.991	161.988	28.332	42,7	25.211	41,7	56.949	42,2	27.141	88,6	26.076	88,8	53.211	88,6
20	Kalimantan Barat	39.243	48.271	98.414	29.788	58,3	28.633	61,1	59.218	60,2	27.329	54,9	26.223	54,6	53.553	54,8
21	Kalimantan Tengah	26.191	23.276	51.758	15.544	59,9	14.233	61,4	29.777	60,2	14.968	53,8	14.630	53,7	27.598	53,8
22	Kalimantan Selatan	46.189	50.096	96.774	22.241	53,3	23.551	46,2	45.791	48,7	18.236	43,4	21.126	34,8	39.362	38,9
23	Kalimantan Timur	36.158	34.278	70.758	24.761	68,5	23.791	69,8	48.553	69,6	19.971	58,8	18.699	58,9	38.670	58,6
24	Kalimantan Utara	7.713	7.890	15.852	4.271	55,4	3.942	54,9	8.213	54,9	3.387	46,3	3.465	47,2	7.852	46,8
25	Sulawesi Utara	23.668	23.797	46.837	14.443	63,9	13.236	58,9	27.681	58,8	10.299	39,2	11.751	39,2	22.943	39,2
26	Sulawesi Tengah	30.567	29.089	65.656	23.078	75,2	21.642	72,9	44.721	73,1	23.267	78,7	23.629	79,6	47.397	79,1
27	Sulawesi Selatan	66.250	60.746	154.996	70.669	82,9	68.516	84,9	139.185	84,6	67.753	80,4	66.271	81,3	134.024	81,4
28	Sulawesi Tenggara	33.899	29.566	63.465	29.859	68,8	28.096	65,2	58.326	65,6	16.996	54,9	15.950	54,0	32.926	54,3
29	Gorontalo	11.714	11.221	22.935	6.471	55,2	6.188	56,1	12.631	55,8	3.743	99,0	3.608	98,0	7.350	99,5
30	Sulawesi Barat	15.851	15.149	31.000	8.992	56,9	8.571	56,8	17.563	56,7	7.542	47,7	7.261	47,8	14.803	47,8
31	Maluku	11.536	10.791	22.257	14.602	97,9	13.329	94,9	27.932	95,1	13.471	94,9	14.393	97,3	28.066	97,2
32	Maluku Utara	14.329	13.799	28.091	8.569	89,7	7.674	93,8	16.237	91,8	7.968	93,1	6.609	96,9	14.577	98,2
33	Papua Barat	10.317	10.179	20.496	7.446	78,7	7.197	70,5	14.643	74,6	4.351	58,5	3.790	57,1	11.999	58,9
34	Papua	34.687	33.903	68.590	24.783	42,7	23.817	41,2	48.600	41,8	21.163	38,9	22.654	37,7	43.816	37,9
	Indonesia	**1.461.600**	**1.321.112**	**4.782.896**	**1.011.706**	**75,8**	**1.159.999**	**76,2**	**2.171.695**	**75,9**	**1.711.616**	**72,8**	**1.693.111**	**73,2**	**3.404.777**	**75,9**

Sumber: Hasil Pencatatan dan Pengumpulan Imunisasi Provinsi, Bulan Oktober 2019 (Update sampai dengan 14 Mei 2020)

Lampiran 6.6.b

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Sesarum (Siswa SD/Sederajat)*		Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)	
		Kelas 1	Kelas 2	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	112.055	111.297	31.732	28,32	46.873	41,83	48.150	43,26
2	Sumatera Utara	312.635	314.858	256.573	82,07	274.660	87,88	287.151	91,20
3	Sumatera Barat	108.795	109.109	80.658	74,14	81.299	74,73	86.718	79,48
4	Riau	142.356	140.538	118.802	83,60	124.070	87,31	123.757	88,06
5	Jambi	64.402	64.531	67.886	105,27	68.630	106,42	69.688	107,99
6	Sumatera Selatan	161.981	162.168	163.341	100,84	165.114	101,93	164.349	101,38
7	Bengkulu	36.787	36.744	34.637	94,16	34.679	94,27	35.515	96,60
8	Lampung	161.280	163.088	157.651	97,80	158.943	98,60	160.882	98,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.491	26.304	28.566	107,84	27.711	104,61	27.363	104,03
10	Kepulauan Riau	44.855	44.372	36.687	81,79	36.269	80,86	37.083	83,57
11	DKI Jakarta	191.164	191.186	134.449	80,79	161.956	84,67	157.658	82,46
12	Jawa Barat	872.748	873.827	815.998	93,48	801.875	91,88	807.181	92,36
13	Jawa Tengah	551.018	558.109	551.343	100,06	539.074	97,81	471.503	84,47
14	DI Yogyakarta	56.472	56.390	49.642	87,91	46.076	81,59	47.362	83,99
15	Jawa Timur	586.732	592.493	594.659	101,35	595.725	101,53	613.882	107,61
16	Bantan	251.192	251.536	225.161	89,64	226.490	90,17	226.720	90,13
17	Bali	65.936	66.127	65.552	99,48	69.570	105,52	71.292	107,81
18	Nusa Tenggara Barat	100.427	100.636	98.703	98,29	98.213	97,80	99.906	99,28
19	Nusa Tenggara Timur	122.297	121.636	114.467	93,68	121.049	98,98	117.039	96,38
20	Kalimantan Barat	99.583	99.630	97.260	97,67	98.194	98,61	95.951	96,31
21	Kalimantan Tengah	69.272	68.878	51.787	105,16	52.987	107,54	50.426	103,17
22	Kalimantan Selatan	82.982	83.646	70.688	85,18	71.349	85,98	71.246	85,18
23	Kalimantan Timur	67.874	67.425	69.031	102,96	70.838	104,37	69.682	103,33
24	Kalimantan Utara	15.009	14.909	12.291	81,90	13.124	90,78	12.309	82,52
25	Sulawesi Utara	42.585	42.976	36.714	86,21	37.913	89,79	36.062	83,91
26	Sulawesi Tengah	59.375	59.260	37.981	63,94	40.478	68,09	41.017	69,94
27	Sulawesi Selatan	166.852	167.111	151.545	90,83	152.434	91,36	156.310	93,54
28	Sulawesi Tenggara	58.378	57.912	56.224	96,83	56.127	96,87	48.368	83,52
29	Gorontalo	21.888	21.701	19.172	87,70	18.372	84,56	17.364	81,06
30	Sulawesi Barat	28.516	28.185	26.929	90,93	25.543	89,57	25.362	91,03
31	Maluku	39.376	39.047	33.966	86,26	33.655	86,47	31.423	80,47
32	Maluku Utara	111.067	27.282	21.703	19,54	20.945	18,86	22.038	80,77
33	Papua Barat	18.977	18.632	13.944	73,07	13.425	71,17	12.954	69,80
34	Papua	64.719	64.118	33.661	51,99	33.239	51,34	32.672	50,65
	Indonesia	**4.395.723**	**4.823.798**	**4.276.722**	**95,60**	**4.409.642**	**90,07**	**4.377.377**	**90,71**

Sumber : Dikutip dari Keputusan Menteri Kesehatan RI. 2019 (Diakses tanggal 18 Mei 2020)

Catatan :

Mengacu pada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pengelenggaraan Imunisasi, maka pemberian imunisasi pada Bulan Kesehatan pada kelas 1,2 dan 5 SD. Pada tahun 2017-2019, pemberian imunisasi pada Bulan Imunisasi dilakukan pada kelas 1 dan 2 saja. Sedangkan SD/MI dilakukan pada tahun 2019.

KEMENKES RI

Lampiran 41

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA

MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Kecamatan	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
			f	%		f	%		f	%
1	Aceh	105.706	96.541	91,3	395.680	282.146	94,9	395.700	276.687	91,2
2	Sumatera Utara	168.082	153.219	91,2	211.803	193.746	91,5	379.885	346.964	91,3
3	Sumatera Barat	106.223	91.191	87,5	363.978	317.827	87,3	469.101	409.018	87,4
4	Riau	156.836	134.865	87,1	605.347	488.646	81,0	750.181	623.599	83,2
5	Jambi	73.937	68.756	94,9	243.100	223.678	92,7	317.437	295.434	93,1
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	704.305	645.364	85,6
7	Bengkulu	37.995	35.237	86,0	105.205	96.820	91,0	143.091	131.857	92,1
8	Lampung	234.703	227.260	93,2	636.215	601.302	94,5	890.918	828.562	94,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	36.082	34.376	96,8	95.140	83.165	87,4	125.222	107.541	87,3
10	Kepulauan Riau	42.939	37.337	87,8	189.921	146.832	77,3	232.860	184.169	79,2
11	DKI Jakarta	118.222	107.102	90,5	365.896	338.964	92,6	484.206	446.066	92,1
12	Jawa Barat	807.613	688.914	87,5	3.304.171	1.642.202	49,7	4.201.733	2.248.116	53,5
13	Jawa Tengah	256.809	251.533	97,9	1.775.296	1.786.496	99,7	2.009.125	1.998.029	99,4
14	DI Yogyakarta	44.518	44.514	100,0	163.360	163.055	100,0	207.878	207.569	100,0
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	2.817.628	1.998.231	70,9
16	Banten	252.617	232.096	91,9	953.345	812.111	85,2	1.206.171	1.044.206	86,6
17	Bali	47.767	47.513	99,5	184.246	183.324	99,5	232.293	230.737	99,3
18	Nusa Tenggara Barat	112.437	111.278	99,0	376.598	367.488	97,6	489.035	478.766	97,9
19	Nusa Tenggara Timur	196.191	98.577	92,8	511.929	511.306	99,2	446.120	409.885	91,1
20	Kalimantan Barat	101.521	85.849	84,6	379.996	309.564	81,5	481.517	394.913	82,0
21	Kalimantan Tengah	58.690	42.840	73,0	170.322	140.259	84,0	235.192	191.843	81,2
22	Kalimantan Selatan	126.209	109.334	86,0	173.197	156.630	90,1	273.226	236.367	86,3
23	Kalimantan Timur	73.355	59.992	81,8	300.636	215.895	71,8	373.991	275.887	73,8
24	Kalimantan Utara	14.447	9.894	68,5	33.896	21.168	57,8	68.343	41.162	60,2
25	Sulawesi Utara	88.971	84.089	94,5	117.855	106.763	92,9	156.820	145.772	93,4
26	Sulawesi Tengah	48.263	42.319	88,8	176.796	162.564	91,8	224.849	204.683	91,8
27	Sulawesi Selatan	203.513	189.203	93,8	367.122	338.193	91,9	770.635	707.458	91,8
28	Sulawesi Tenggara	58.684	42.996	86,8	179.417	149.091	83,1	238.101	192.087	80,5
29	Gorontalo	18.869	17.914	94,9	68.441	61.966	90,5	87.214	79.882	91,5
30	Sulawesi Barat	27.624	23.435	84,8	93.965	77.333	83,2	135.589	100.768	85,8
31	Maluku	22.343	17.346	77,6	135.545	104.105	76,8	157.888	121.451	76,9
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	136.888	40.194	29,4	266.903	88.820	33,3	403.546	129.022	32,0
Indonesia		3.720.332	3.056.966	82,2	12.865.742	10.133.431	78,8	28.135.847	22.661.484	78,7

Sumber : Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020

Keterangan : Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun

A (yang dengan menggabungkan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.

Untuk balita di luar bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

KEMENKES RI

Lampiran 42

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI

TAHUN 2019

No	Provinsi	2018			2019		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	446.179	368.203	82,52	430.922	355.768	81,1
2	Sumatera Utara	2.543.829	2.006.023	78,86	429.601	415.398	96,7
3	Sumatera Barat	456.285	366.296	80,28	429.064	349.559	81,5
4	Riau	737.112	444.016	60,24	-	-	-
5	Jambi	92.224	67.058	72,71	-	-	-
6	Sumatera Selatan	932.567	563.856	60,46	785.423	603.637	76,9
7	Bengkulu	183.363	111.426	61,14	138.764	105.463	76,0
8	Lampung	761.172	605.508	79,55	677.602	540.927	79,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	123.352	84.208	67,46	119.761	82.669	69,0
10	Kepulauan Riau	207.465	123.148	59,36	359.111	209.011	58,2
11	DKI Jakarta	503.777	374.605	74,36	874.982	790.666	82,2
12	Jawa Barat	5.287.839	2.737.760	51,77	4.326.811	3.451.352	79,8
13	Jawa Tengah	2.523.131	2.085.387	82,57	-	-	-
14	DI Yogyakarta	199.708	161.439	80,86	195.540	158.391	81,0
15	Jawa Timur	2.870.423	2.273.426	79,2	2.817.659	2.195.689	77,7
16	Banten	879.907	662.045	75,24	1.111.622	814.213	73,2
17	Bali	222.703	188.649	84,71	227.010	185.375	81,7
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	435.676	345.857	79,38	643.079	356.770	55,4
20	Kalimantan Barat	354.041	190.925	53,93	412.415	364.567	88,4
21	Kalimantan Tengah	199.472	64.841	32,51	2.326.225	1.288.708	55,3
22	Kalimantan Selatan	399.384	252.007	63,1	378.741	247.229	65,3
23	Kalimantan Timur	349.792	173.365	49,56	278.672	157.452	56,5
24	Kalimantan Utara	85.537	33.477	51,08	86.457	38.954	44,6
25	Sulawesi Utara	165.719	132.380	79,88	155.361	123.732	79,6
26	Sulawesi Tengah	180.938	79.729	78,99	289.307	147.996	51,7
27	Sulawesi Selatan	1.000.492	560.696	56,04	648.089	493.286	76,0
28	Sulawesi Tenggara	267.570	185.841	69,46	237.130	180.615	76,2
29	Gorontalo	87.138	53.860	61,81	101.664	75.601	72,9
30	Sulawesi Barat	116.064	91.601	78,92	112.509	85.854	76,1
31	Maluku	0	0	-	196.422	123.743	63,0
32	Maluku Utara	105.197	78.396	74,52	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	235.253	180.956	76,1
Indonesia		22.616.854	15.462.966	68,37	18.447.987	13.625.298	73,86

Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 44.a

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018			
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih
1	Aceh	6,30	13,40	76,30	3,00
2	Sumatera Utara	5,80	12,90	76,50	4,90
3	Sumatera Barat	3,90	13,00	82,10	1,00
4	Riau	4,40	11,20	80,70	3,60
5	Jambi	4,00	8,20	81,90	5,10
6	Sumatera Selatan	3,90	8,40	83,60	4,00
7	Bengkulu	2,40	10,40	81,70	5,50
8	Lampung	2,70	10,20	84,70	2,40
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,60	12,50	80,30	2,50
10	Kepulauan Riau	2,70	8,80	84,40	4,10
11	DKI Jakarta	1,30	11,70	84,10	2,70
12	Jawa Barat	2,50	8,10	87,20	2,20
13	Jawa Tengah	3,50	14,50	83,00	2,10
14	DI Yogyakarta	1,40	9,90	87,50	1,20
15	Jawa Timur	3,60	11,60	82,20	2,60
16	Banten	3,00	10,60	83,30	3,10
17	Bali	1,60	11,20	85,00	2,10
18	Nusa Tenggara Barat	4,40	14,40	78,80	2,30
19	Nusa Tenggara Timur	6,90	17,60	74,00	1,50
20	Kalimantan Barat	5,20	14,30	77,50	3,00
21	Kalimantan Tengah	4,70	13,80	77,30	4,20
22	Kalimantan Selatan	3,90	14,50	80,30	1,30
23	Kalimantan Timur	3,40	7,40	85,90	3,30
24	Kalimantan Utara	1,70	13,80	80,60	2,00
25	Sulawesi Utara	6,30	10,90	80,00	2,80
26	Sulawesi Tengah	5,80	15,50	79,10	1,60
27	Sulawesi Selatan	4,80	14,80	77,50	2,90
28	Sulawesi Tenggara	6,30	13,20	78,80	1,70
29	Gorontalo	8,10	16,00	71,30	4,70
30	Sulawesi Barat	5,70	14,20	79,50	0,60
31	Maluku	10,30	12,50	74,40	2,80
32	Maluku Utara	6,50	14,40	74,80	4,30
33	Papua Barat	4,10	12,10	80,90	2,90
34	Papua	4,50	11,70	77,70	6,10
	Indonesia	**3,80**	**11,40**	**82,00**	**2,70**

Sumber: Riskesdas 2018

KEMENKES RI

Lampiran 4.8.5

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018			
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	6,70	16,80	73,60	2,90
2	Sumatera Utara	5,40	14,30	76,30	4,00
3	Sumatera Barat	3,50	15,40	79,50	1,60
4	Riau	4,30	14,00	78,10	3,50
5	Jambi	3,80	11,90	80,00	4,20
6	Sumatera Selatan	4,90	12,30	78,60	4,20
7	Bengkulu	2,80	10,40	82,30	4,50
8	Lampung	3,10	12,80	81,20	2,80
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,40	13,60	78,70	4,30
10	Kepulauan Riau	3,20	9,80	82,60	4,40
11	DKI Jakarta	2,30	12,00	80,90	4,80
12	Jawa Barat	2,60	10,60	84,30	2,50
13	Jawa Tengah	3,10	13,70	80,60	2,70
14	DI Yogyakarta	2,50	13,00	82,30	2,20
15	Jawa Timur	3,30	13,40	79,80	3,40
16	Banten	3,60	12,60	79,90	3,90
17	Bali	2,00	13,10	83,80	1,10
18	Nusa Tenggara Barat	5,90	20,50	71,50	2,10
19	Nusa Tenggara Timur	7,30	22,20	69,30	1,10
20	Kalimantan Barat	5,20	18,60	73,10	3,00
21	Kalimantan Tengah	5,50	16,30	74,10	4,10
22	Kalimantan Selatan	5,50	19,00	73,00	2,50
23	Kalimantan Timur	3,20	13,50	80,80	4,50
24	Kalimantan Utara	2,40	14,40	80,30	2,90
25	Sulawesi Utara	4,20	11,30	81,60	2,90
26	Sulawesi Tengah	4,80	18,60	74,70	1,80
27	Sulawesi Selatan	4,60	18,40	74,20	2,90
28	Sulawesi Tenggara	5,60	16,40	76,20	1,80
29	Gorontalo	6,00	19,30	69,10	4,70
30	Sulawesi Barat	6,30	18,40	74,10	1,20
31	Maluku	7,40	17,50	72,40	2,70
32	Maluku Utara	5,60	16,60	74,80	3,00
33	Papua Barat	5,10	14,10	77,50	3,20
34	Papua	5,10	11,40	76,00	7,40
Indonesia		**3,90**	**13,80**	**79,20**	**3,10**

Sumber: Riskesdas 2018

KEMENKES RI

Lampiran 44.c

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018		
		Sangat Pendek	Pendek	Normal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	18,90	19,00	62,10
2	Sumatera Utara	13,60	18,60	67,90
3	Sumatera Barat	10,60	18,20	71,10
4	Riau	9,80	15,00	75,20
5	Jambi	15,70	14,60	69,70
6	Sumatera Selatan	13,70	16,10	70,20
7	Bengkulu	10,40	18,60	71,00
8	Lampung	12,20	15,20	72,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,50	13,80	76,70
10	Kepulauan Riau	8,60	21,50	69,90
11	DKI Jakarta	7,00	9,20	83,80
12	Jawa Barat	13,20	15,90	70,90
13	Jawa Tengah	13,90	19,40	66,80
14	DI Yogyakarta	8,30	12,20	79,50
15	Jawa Timur	15,20	18,40	66,40
16	Banten	8,70	14,60	76,70
17	Bali	9,20	15,40	75,30
18	Nusa Tenggara Barat	8,10	17,00	74,90
19	Nusa Tenggara Timur	17,40	18,50	64,10
20	Kalimantan Barat	13,10	18,30	68,50
21	Kalimantan Tengah	15,90	18,30	65,90
22	Kalimantan Selatan	12,30	19,20	68,50
23	Kalimantan Timur	11,80	18,20	70,00
24	Kalimantan Utara	8,70	22,10	69,20
25	Sulawesi Utara	11,90	14,70	73,40
26	Sulawesi Tengah	11,70	16,10	72,20
27	Sulawesi Selatan	13,30	20,60	66,20
28	Sulawesi Tenggara	10,30	16,00	73,60
29	Gorontalo	13,10	15,40	71,60
30	Sulawesi Barat	12,60	24,50	62,90
31	Maluku	14,10	17,80	68,10
32	Maluku Utara	12,30	19,60	68,10
33	Papua Barat	12,50	17,70	69,70
34	Papua	15,10	18,90	66,00
Indonesia		**12,00**	**17,10**	**70,10**

Sumber : Riskesdas 2018

KEMENKES RI

Lampiran 4.4.4

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018		
		Sangat Pendek	Pendek	Normal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	16,00	21,10	62,90
2	Sumatera Utara	13,20	19,20	67,60
3	Sumatera Barat	9,60	20,30	70,10
4	Riau	10,30	17,10	72,60
5	Jambi	13,40	16,80	69,90
6	Sumatera Selatan	14,40	17,20	68,30
7	Bengkulu	9,80	18,20	72,00
8	Lampung	9,60	17,70	72,70
9	Kepulauan Bangka Belitung	7,30	16,10	76,60
10	Kepulauan Riau	8,50	15,10	76,40
11	DKI Jakarta	6,10	11,50	82,40
12	Jawa Barat	11,70	19,40	68,90
13	Jawa Tengah	11,20	20,10	68,80
14	DI Yogyakarta	6,30	15,10	78,60
15	Jawa Timur	12,90	19,90	67,20
16	Banten	9,60	17,00	73,40
17	Bali	5,60	16,30	78,20
18	Nusa Tenggara Barat	9,20	24,30	66,50
19	Nusa Tenggara Timur	16,00	26,70	57,40
20	Kalimantan Barat	11,40	21,90	66,70
21	Kalimantan Tengah	12,70	21,30	66,00
22	Kalimantan Selatan	12,00	21,10	66,90
23	Kalimantan Timur	10,20	19,00	70,80
24	Kalimantan Utara	6,80	20,10	73,10
25	Sulawesi Utara	9,80	15,70	74,50
26	Sulawesi Tengah	11,90	20,40	67,70
27	Sulawesi Selatan	12,50	23,20	64,30
28	Sulawesi Tenggara	10,10	18,60	71,30
29	Gorontalo	12,70	19,80	67,50
30	Sulawesi Barat	16,20	25,40	58,40
31	Maluku	12,50	21,50	66,00
32	Maluku Utara	11,00	20,40	68,60
33	Papua Barat	11,70	16,10	72,30
34	Papua	15,30	17,80	66,90
Indonesia		**11,50**	**19,30**	**69,28**

Sumber: Riskesdas 2018

KEMENKES RI

Lampiran 44.e

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018			
		Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	6,70	7,80	74,20	11,30
2	Sumatera Utara	6,30	8,30	74,70	10,70
3	Sumatera Barat	4,90	9,70	79,90	5,50
4	Riau	5,40	10,40	76,70	7,60
5	Jambi	7,20	7,00	73,60	12,20
6	Sumatera Selatan	5,90	5,40	77,50	11,20
7	Bengkulu	3,40	6,30	78,40	12,00
8	Lampung	4,90	6,90	79,30	8,90
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,40	8,40	82,30	6,00
10	Kepulauan Riau	3,40	5,70	82,00	8,80
11	DKI Jakarta	4,30	8,10	81,20	6,20
12	Jawa Barat	4,00	5,40	80,80	9,80
13	Jawa Tengah	3,50	6,10	80,20	10,20
14	DI Yogyakarta	0,70	7,40	88,30	3,60
15	Jawa Timur	3,60	7,10	70,60	10,60
16	Banten	7,20	6,30	79,10	7,40
17	Bali	2,40	4,60	84,70	8,30
18	Nusa Tenggara Barat	4,60	10,30	80,60	4,50
19	Nusa Tenggara Timur	6,60	8,20	79,90	5,20
20	Kalimantan Barat	4,90	11,00	75,10	8,10
21	Kalimantan Tengah	4,20	8,60	76,50	10,70
22	Kalimantan Selatan	3,40	8,70	80,60	7,30
23	Kalimantan Timur	3,70	5,10	82,30	9,00
24	Kalimantan Utara	1,30	3,50	89,50	5,70
25	Sulawesi Utara	4,10	8,00	78,90	9,00
26	Sulawesi Tengah	4,00	10,50	80,80	4,70
27	Sulawesi Selatan	4,00	8,30	79,20	8,50
28	Sulawesi Tenggara	5,40	8,50	79,00	7,20
29	Gorontalo	5,30	10,30	78,70	5,70
30	Sulawesi Barat	3,70	8,60	82,50	5,20
31	Maluku	6,30	11,10	77,10	5,50
32	Maluku Utara	3,90	10,20	78,10	7,70
33	Papua Barat	5,80	6,00	79,70	8,40
34	Papua	5,00	8,20	71,80	15,00
Indonesia		**4,50**	**7,20**	**79,20**	**9,00**

Sumber: Riskesdas 2018

KEMENKES RI

Lampiran 4.6.7

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2018

No	Provinsi	2018			
		Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk
1	Aceh	5,00	6,90	79,30	8,80
2	Sumatera Utara	4,60	7,50	79,10	8,90
3	Sumatera Barat	2,90	8,40	83,30	5,40
4	Riau	4,20	8,00	80,00	7,80
5	Jambi	5,70	6,30	77,10	10,80
6	Sumatera Selatan	4,70	6,70	77,80	10,80
7	Bengkulu	3,50	4,80	81,40	10,40
8	Lampung	3,90	6,80	82,20	7,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,00	7,10	82,20	8,00
10	Kepulauan Riau	4,50	6,70	79,50	9,20
11	DKI Jakarta	3,90	6,20	82,00	7,90
12	Jawa Barat	3,20	5,20	82,90	8,70
13	Jawa Tengah	2,70	5,80	83,90	7,60
14	DI Yogyakarta	1,20	7,20	86,90	4,70
15	Jawa Timur	2,90	6,30	81,60	9,20
16	Banten	4,60	5,90	81,00	8,60
17	Bali	1,90	4,40	85,90	7,90
18	Nusa Tenggara Barat	4,40	10,00	82,30	3,30
19	Nusa Tenggara Timur	4,60	8,20	83,40	3,80
20	Kalimantan Barat	4,00	10,30	77,70	8,00
21	Kalimantan Tengah	4,00	5,90	76,20	9,80
22	Kalimantan Selatan	3,90	9,20	79,70	7,10
23	Kalimantan Timur	2,00	5,50	83,00	9,40
24	Kalimantan Utara	1,10	3,50	87,80	7,60
25	Sulawesi Utara	2,90	6,70	82,80	7,70
26	Sulawesi Tengah	3,70	9,20	83,70	3,50
27	Sulawesi Selatan	2,50	7,50	82,90	7,10
28	Sulawesi Tenggara	3,40	8,50	81,90	6,10
29	Gorontalo	3,80	10,60	80,20	5,40
30	Sulawesi Barat	3,20	7,30	84,00	5,50
31	Maluku	4,00	9,10	81,80	5,00
32	Maluku Utara	4,00	7,90	82,50	5,70
33	Papua Barat	3,90	8,30	80,00	7,80
34	Papua	4,80	5,50	76,50	13,20
Indonesia		**3,50**	**6,70**	**81,90**	**8,00**

Sumber: Riskesdas 2018

KEMENKES RI

Lampiran 45

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019

No	Provinsi	SEKOLAH								
		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
1	Aceh	4.016	3.800	94,6	1.393	1.306	93,8	908	741	81,6
2	Sumatera Utara	10.343	9.634	93,1	3.290	3.054	92,8	2.299	2.134	92,8
3	Sumatera Barat	4.218	4.022	95,3	1.247	967	77,5	749	545	72,7
4	Riau	7.447	5.728	76,9	3.478	1.556	44,8	2.641	943	35,7
5	Jambi	2.749	2.697	98,1	1.074	974	90,7	618	549	88,8
6	Sumatera Selatan	5.285	4.994	94,5	1.837	1.808	98,4	993	930	93,7
7	Bengkulu	1.470	1.306	88,8	470	453	96,4	252	239	94,8
8	Lampung	5.449	5.215	95,7	1.971	1.799	91,3	1.153	1.022	88,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	861	857	99,5	261	259	99,2	157	157	100,0
10	Kepulauan Riau	1.022	1.021	99,9	428	428	100,0	258	255	98,8
11	DKI Jakarta	2.920	2.890	99,0	1.310	1.267	96,7	1.192	1.060	88,9
12	Jawa Barat	23.407	22.480	96,1	7.747	6.370	82,2	7.158	7.158	100,0
13	Jawa Tengah	22.724	21.712	95,5	6.993	6.319	90,4	2.914	2.626	90,1
14	D I Yogyakarta	2.063	2.063	100,0	520	520	100,0	284	270	95,1
15	Jawa Timur	26.105	25.919	99,3	7.902	7.546	95,5	4.980	4.742	95,2
16	Banten	5.634	5.474	97,2	2.601	2.347	90,2	1.440	1.130	78,5
17	Bali	2.362	2.349	99,4	446	446	100,0	240	224	93,3
18	Nusa Tenggara Barat	4.015	954	23,8	1.739	434	25,0	1.167	434	37,2
19	Nusa Tenggara Timur	5.215	787	15,1	1.704	446	26,2	829	38	4,6
20	Kalimantan Barat	4.773	1.751	36,7	1.577	521	33,0	756	284	37,6
21	Kalimantan Tengah	2.917	2.501	85,7	990	867	87,6	459	340	74,0
22	Kalimantan Selatan	3.588	3.177	88,5	970	797	82,2	477	389	81,6
23	Kalimantan Timur	1.964	1.821	92,7	736	655	89,0	462	413	89,4
24	Kalimantan Utara	503	503	100,0	197	197	100,0	107	107	100,0
25	Sulawesi Utara	2.315	2.059	88,9	782	634	81,1	494	344	69,6
26	Sulawesi Tengah	3.105	2.913	93,8	1.132	966	85,3	526	516	98,1
27	Sulawesi Selatan	7.122	6.674	93,7	2.394	2.123	88,7	1.399	1.094	78,2
28	Sulawesi Tenggara	2.557	1.886	80,0	872	756	86,7	486	480	98,8
29	Gorontalo	1.029	1.027	97,9	314	292	93,0	191	139	72,8
30	Sulawesi Barat	1.481	1.408	95,1	498	462	94,3	294	182	61,9
31	Maluku	1.963	1.346	68,5	758	346	52,2	641	292	44,7
32	Maluku Utara	1.643	1.250	86,6	635	513	80,8	387	330	85,3
33	Papua Barat	1.072	199	18,6	327	69	12,2	140	44	31,2
34	Papua	2.954	803	33,9	662	313	46,9	387	186	48,1
Indonesia		172.494	151.194	86,3	56.955	45.774	80,5	27.619	20.676	81,5

Sumber: Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Rekapitulasi Data Kesehatan Murid, 31 Desember 2019

KEMENKES RI

Lampiran 4R

PELAYANAN SKRINING USIA PRODUKTIF
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Sasaran	Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	3.493.780	39.315	1,1
2	Sumatera Utara	9.364.527	15.352	0,2
3	Sumatera Barat	3.514.210	1.522.268	43,3
4	Riau	4.647.818	1.047.460	22,5
5	Jambi	2.498.673	811.020	32,5
6	Sumatera Selatan	5.700.320	794.821	13,9
7	Bengkulu	1.361.087	115.460	8,5
8	Lampung	5.677.528	77.668	1,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.026.461	675.450	65,8
10	Kepulauan Riau	1.486.370	883.681	59,5
11	DKI Jakarta	7.459.408	2.391.081	32,1
12	Jawa Barat	33.524.868	9.072.413	27,0
13	Jawa Tengah	23.516.110	514.950	2,2
14	D I Yogyakarta	2.646.038	18.263	0,7
15	Jawa Timur	27.629.793	16.788.152	60,8
16	Banten	8.879.282	40.895	0,5
17	Bali	3.016.219	1.645.530	54,6
18	Nusa Tenggara Barat	3.325.110	103.025	3,1
19	Nusa Tenggara Timur	3.324.958	29.220	0,9
20	Kalimantan Barat	3.380.256	43.587	1,3
21	Kalimantan Tengah	1.887.438	27.239	1,4
22	Kalimantan Selatan	2.869.079	119.940	4,2
23	Kalimantan Timur	2.587.626	9.991	0,4
24	Kalimantan Utara	495.685	167.884	33,9
25	Sulawesi Utara	1.713.748	17.940	1,0
26	Sulawesi Tengah	2.038.940	12.855	0,6
27	Sulawesi Selatan	5.840.507	1.250.365	21,4
28	Sulawesi Tenggara	1.706.475	244.423	14,3
29	Gorontalo	816.686	284.735	35,0
30	Sulawesi Barat	895.455	33.500	3,7
31	Maluku	1.138.851	4.536	0,4
32	Maluku Utara	801.866	29.577	3,7
33	Papua Barat	650.276	2.724	0,4
34	Papua	2.341.572	810	0,0
Indonesia		**181.354.922**	**38.035.530**	**21,4**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Usia Lanjut (60 Tahun+)		
		Jumlah	Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	376.504	tad	0,0
2	Sumatera Utara	1.159.762	592.702	51,1
3	Sumatera Barat	533.528	392.711	73,6
4	Riau	402.731	168.477	41,8
5	Jambi	278.298	195.493	70,2
6	Sumatera Selatan	681.668	336.492	49,4
7	Bengkulu	149.832	84.525	56,4
8	Lampung	755.480	509.531	67,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	116.070	90.735	78,2
10	Kepulauan Riau	104.395	74.477	71,3
11	DKI Jakarta	842.872	670.722	79,6
12	Jawa Barat	4.598.470	2.697.384	58,6
13	Jawa Tengah	4.679.233	3.010.329	64,3
14	DI Yogyakarta	552.231	311.901	56,5
15	Jawa Timur	5.183.447	3.931.116	75,8
16	Banten	822.917	509.138	61,9
17	Bali	486.762	442.124	90,8
18	Nusa Tenggara Barat	429.738	239.105	55,6
19	Nusa Tenggara Timur	435.809	tad	0,0
20	Kalimantan Barat	398.948	244.561	61,3
21	Kalimantan Tengah	164.034	63.928	39,0
22	Kalimantan Selatan	321.633	151.897	47,2
23	Kalimantan Timur	239.166	96.475	40,3
24	Kalimantan Utara	49.361	29.068	58,9
25	Sulawesi Utara	280.162	227.303	81,1
26	Sulawesi Tengah	249.592	142.124	56,9
27	Sulawesi Selatan	849.960	511.220	60,1
28	Sulawesi Tenggara	545.806	53.630	10,2
29	Gorontalo	97.290	65.409	67,2
30	Sulawesi Barat	92.180	58.536	63,5
31	Maluku	130.122	63.460	48,8
32	Maluku Utara	79.987	78.015	97,5
33	Papua Barat	45.726	11.422	25,0
34	Papua	134.091	31.177	23,1
Indonesia		26.258.763	16.097.187	61,3

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2019

KEMENKES RI

Lampiran XIII

PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas									
			Melaksanakan Orientasi PAR		Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Remaja		Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Kelas 1		Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Kelas 7 Dan 10		Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Kelas 1, 7, 10	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	359	318	88,55	167	46,52	332	92,48	317	88,3	306	85,24
2	Sumatera Utara	601	586	97,5	348	57,9	573	95,34	566	94,18	566	94,18
3	Sumatera Barat	275	271	98,55	247	89,82	257	93,45	255	92,73	248	90,18
4	Riau	226	222	98,23	222	98,23	308	136,28	302	133,63	303	134,07
5	Jambi	204	204	100	193	94,61	204	100	204	100	204	100
6	Sumatera Selatan	342	340	99,42	242	70,76	308	87,72	298	84,8	288	81,87
7	Bengkulu	180	178	98,89	145	80,56	166	92,22	161	89,44	160	88,89
8	Lampung	310	310	100	289	93,23	309	99,68	306	98,71	303	97,74
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100	64	100	64	100	64	100	64	100
10	Kepulauan Riau	86	71	82,56	61	70,93	84	97,67	83	96,51	83	96,51
11	DKI Jakarta	315	315	100	206	65,4	315	100	315	100	315	100
12	Jawa Barat	1.072	1.033	96,36	670	62,5	1.065	99,35	1.035	96,55	1.035	96,55
13	Jawa Tengah	870	846	97,24	729	83	868	98,86	868	98,86	868	98,86
14	DI Yogyakarta	131	131	100	84	64,12	131	100	112	92,56	97	88,17
15	Jawa Timur	968	947	97,83	553	57,13	939	97	936	96,69	927	95,76
16	Banten	243	242	99,59	176	72,43	239	98,35	186	76,54	174	71,6
17	Bali	120	120	100	120	100	120	100	120	100	120	100
18	Nusa Tenggara Barat	169	169	100	169	100	169	100	169	100	169	100
19	Nusa Tenggara Timur	402	411	102,24	293	72,89	411	102,24	411	102,24	387	96,27
20	Kalimantan Barat	246	233	94,72	147	59,76	191	77,64	193	78,46	190	77,24
21	Kalimantan Tengah	303	291	96,04	188	62,2	178	87,78	177	87,19	177	87,19
22	Kalimantan Selatan	235	233	99,15	133	56,6	217	92,34	173	73,62	173	73,62
23	Kalimantan Timur	184	184	100	164	89,13	163	71,51	93	50	86	47,31
24	Kalimantan Utara	56	53	94,64	48	85,71	55	98,21	55	98,21	55	98,21
25	Sulawesi Utara	195	193	98,97	121	62,05	165	84,62	152	77,95	149	76,41
26	Sulawesi Tengah	206	171	83,01	64	31,07	183	88,35	174	84,47	174	84,47
27	Sulawesi Selatan	458	442	96,51	258	55,24	449	98,03	434	94,76	397	86,68
28	Sulawesi Tenggara	290	290	100	197	86,9	254	87,59	249	85,86	244	84,14
29	Gorontalo	98	67	72,04	69	68,82	93	100	94	100	93	100
30	Sulawesi Barat	95	86	98,95	57	60	84	88,42	84	88,42	84	88,42
31	Maluku	269	176	83,21	125	59,91	196	94,74	170	81,34	162	77,91
32	Maluku Utara	148	143	96,62	77	52,03	139	93,92	141	98,27	141	98,27
33	Papua Barat	159	25	15,72	61	38,36	42	26,42	34	21,38	37	23,27
34	Papua	439	258	53,9	138	32,86	273	61,67	189	33,1	121	28,01
	Indonesia	10.134	9.472	93,47	6.438	63,53	9.399	92,75	9.041	89,21	8894	87,8

Sumber : Direktorat Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesmas, 2019

KEMENKES RI

Lampiran 21.a

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN *CASE DETECTION RATE (CDR)* MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Memenuhan Persyaratan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Jumlah Tuberkulosis (Insiden Absolut) *)	Case Detection Rate (CDR%)	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)
						Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan					
						Jumlah	%	Jumlah	%						
1	Aceh	5.371.532	38.736	22.630	20,6	5.889	45,8	3.947	34,2	9.836	176	16.125	61,7	232	9,6
2	Sumatera Utara	14.262.549	205.273	69.894	34,2	19.827	62,8	10.483	37,2	29.940	206	62.745	47,7	2.889	25,2
3	Sumatera Barat	5.441.397	80.375	66.337	74,6	6.806	62,7	4.259	39,3	11.026	203	23.944	46,1	1.726	92,7
4	Riau	6.971.745	99.665	25.824	18,2	6.765	62,9	3.997	37,1	10.760	154	27.601	39,0	1.139	33,4
5	Jambi	3.624.579	26.254	14.717	39,8	3.011	66,3	1.806	39,7	4.807	133	13.665	34,4	398	56,9
6	Sumatera Selatan	8.478.681	161.249	61.845	45,2	11.894	60,8	7.720	39,2	19.723	233	33.753	58,5	1.956	48,3
7	Bengkulu	1.991.898	20.995	14.752	79,8	1.955	61,5	1.223	38,5	3.208	166	7.709	41,6	440	90,3
8	Lampung	8.447.737	84.819	73.279	87,2	9.183	57,4	6.811	42,6	15.994	189	29.873	54,3	1.602	96,8
9	Kep. Bangka Belitung	1.469.752	15.574	14.023	93,8	1.365	63,0	801	37,0	2.166	146	3.918	55,6	374	98,4
10	Kepulauan Riau	2.189.653	37.253	19.035	51,3	4.299	69,0	2.281	40,8	5.645	249	10.827	53,3	919	47,6
11	DKI Jakarta	10.557.810	256.045	110.754	48,1	25.664	57,1	17.788	42,9	41.644	393	61.573	67,5	5.461	95,0
12	Jawa Barat	49.316.712	621.621	248.511	40,0	67.060	54,8	55.981	45,5	123.021	249	127.988	96,2	20.914	126,3
13	Jawa Tengah	34.718.294	485.101	193.536	39,9	90.026	55,9	70.919	44,1	160.945	464	92.978	63,9	7.062	70,9
14	DI Yogyakarta	3.842.932	38.436	23.458	76,6	2.954	56,7	1.793	43,3	4.144	108	9.884	40,7	698	63,1
15	Jawa Timur	39.698.631	432.251	306.642	70,9	34.174	55,4	27.519	44,6	61.849	160	90.811	68,5	5.239	45,6
16	Banten	12.927.216	142.300	74.256	52,2	15.617	57,9	11.390	42,3	26.811	220	33.858	80,2	3.123	78,7
17	Bali	4.336.923	28.527	15.798	67,8	2.849	55,1	1.724	44,9	4.216	97	12.391	34,9	242	14,3
18	Nusa Tenggara Barat	5.075.385	51.902	17.872	34,4	4.450	61,2	2.826	38,8	7.276	143	17.713	41,3	894	23,2
19	Nusa Tenggara Timur	5.424.250	65.685	41.514	63,2	6.267	55,6	4.979	44,4	11.246	206	28.933	40,0	444	19,4
20	Kalimantan Barat	5.069.127	47.478	20.973	44,2	5.082	64,2	2.832	35,8	7.914	156	17.232	54,2	1.131	54,8
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	36.410	12.825	42,2	2.372	61,9	1.461	38,1	3.833	141	9.249	60,7	386	35,4
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	58.659	32.287	55,1	4.288	69,2	2.724	30,8	6.908	163	15.869	40,8	756	61,3
23	Kalimantan Timur	3.721.389	37.870	28.827	66,4	4.461	57,7	3.268	42,3	7.729	208	14.442	53,5	964	33,6
24	Kalimantan Utara	702.240	13.403	7.220	53,7	1.097	61,6	684	38,4	1.781	240	2.768	64,3	332	94,9
25	Sulawesi Utara	2.566.981	40.411	32.268	71,1	3.240	58,7	2.280	41,3	5.520	228	9.521	58,0	389	25,8
26	Sulawesi Tengah	3.054.833	44.332	41.798	94,3	3.272	62,2	1.975	37,8	5.247	189	10.207	56,3	214	17,5
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	140.956	99.927	27,2	11.495	58,1	8.073	41,9	19.568	221	38.985	65,2	1.107	24,4
28	Sulawesi Tenggara	2.784.737	30.720	27.852	90,6	2.660	61,6	1.655	38,4	4.315	159	8.992	47,9	141	13,1
29	Gorontalo	1.202.631	17.255	6.034	35,0	2.196	57,4	1.731	42,6	4.067	338	4.331	94,4	173	33,5
30	Sulawesi Barat	1.388.256	17.329	14.648	84,5	1.599	57,5	1.184	42,5	2.783	202	6.449	43,7	107	20,1
31	Maluku	1.882.870	31.574	12.681	40,4	2.529	57,8	1.846	42,2	4.374	243	6.579	66,5	146	43,8
32	Maluku Utara	1.255.773	16.871	6.581	37,5	1.299	58,8	906	41,0	2.203	175	4.388	52,6	117	23,3
33	Papua Barat	959.837	24.023	6.899	41,9	1.338	55,8	1.219	44,2	2.757	287	6.209	47,4	304	38,9
34	Papua	3.379.302	69.947	35.814	39,8	6.389	54,3	5.402	45,7	11.991	355	16.594	44,9	2.063	128,8
	Indonesia	269.874.565	3.416.130	1.749.449	51,2	311.642	57,7	230.232	42,3	541.874	203	843.000	64,5	63.111	62,4

Sumber : Diisi Pemrograman dan Pengolahan Pengisian Kuesioner RI
*) Berdasarkan Modelling Tahun 2019

Keterangan :
Kolo terdapat Tuberkulosis tahun berdasarkan data individu, saat ini masih ada data individu dan agregat, untuk Jambi dan Sumatera Selatan menggunakan data agregat sehingga tidak
Jumlah Insiden adalah estimasi pasien Tuberkulosis yang ada di berbagai kerja pemberantasan tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,
Rumah Tahanan, Unkar Praktek Mandiri, Klinik dll

KEMENKES RI

Lampiran XX.9

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																		
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Tidak diketahui*		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
1	Aceh	126	125	557	404	771	449	913	665	1.172	586	1.148	528	804	373	-	-	5.489	3.987	9.476
2	Sumatera Utara	1.107	872	2.299	2.062	3.011	1.749	3.382	1.512	3.001	1.803	3.649	1.588	2.033	864	75	41	19.457	10.483	29.940
3	Sumatera Barat	923	803	744	727	953	615	977	570	1.107	581	1.137	527	967	383	-	-	6.808	4.216	11.024
4	Riau	601	517	786	685	1.085	750	1.254	648	1.294	618	1.080	524	663	263	-	-	6.763	3.997	10.760
5	Jambi	312	283	372	337	427	341	519	318	517	322	496	253	365	138	3	-	3.011	1.966	4.997
6	Sumatera Selatan	1.100	955	1.205	1.025	1.712	1.260	1.819	1.258	2.101	1.270	2.306	1.181	1.730	788	1	-	11.994	7.729	19.723
7	Bengkulu	280	187	179	192	280	195	311	203	351	193	339	184	255	119	-	-	1.995	1.273	3.268
8	Lampung	918	739	834	984	1.263	1.134	1.434	1.165	1.739	1.155	1.678	925	1.329	639	-	-	9.195	6.811	16.006
9	Kep. Bangka Belitung	155	130	163	114	209	161	234	132	235	112	224	93	143	61	-	-	1.365	803	2.168
10	Kepulauan Riau	329	291	444	491	673	576	693	414	571	244	547	227	238	77	1	1	3.268	2.181	5.449
11	DKI Jakarta	2.073	2.691	3.550	3.552	4.242	3.079	4.009	2.774	3.823	2.554	3.181	2.010	1.993	1.120	-	-	23.864	17.780	41.644
12	Jawa Barat	11.159	10.457	9.851	11.878	10.542	8.838	9.695	7.972	10.045	7.326	8.660	5.563	6.346	3.217	742	638	67.040	55.981	123.021
13	Jawa Tengah	3.749	3.338	3.561	4.333	4.098	3.588	4.269	3.539	5.056	3.838	5.363	3.413	4.450	2.253	-	-	30.326	24.314	54.640
14	DI Yogyakarta	390	337	356	351	291	261	263	233	347	229	324	196	380	186	-	-	2.351	1.793	4.144
15	Jawa Timur	2.813	2.531	4.390	5.352	4.662	4.416	5.148	4.570	6.935	5.247	6.995	4.469	5.435	2.680	51	34	36.229	29.219	65.448
16	Banten	1.395	1.449	2.414	2.427	2.141	2.298	2.915	1.928	2.805	1.892	2.189	1.388	1.392	685	166	148	16.617	12.195	28.812
17	Bali	131	112	309	297	418	349	414	307	402	304	362	297	369	163	4	1	2.409	1.721	4.130
18	Nusa Tenggara Barat	243	251	478	437	485	481	756	467	869	555	784	411	635	225	-	-	4.650	2.820	7.470
19	Nusa Tenggara Timur	214	248	628	596	800	641	655	490	648	482	664	439	658	379	-	-	4.267	3.275	7.542
20	Kalimantan Barat	674	568	736	537	970	531	987	539	1.066	505	916	436	633	236	-	-	5.982	3.352	9.334
21	Kalimantan Tengah	132	157	208	194	193	250	456	282	502	262	399	197	282	119	-	-	2.372	1.461	3.833
22	Kalimantan Selatan	431	324	439	367	564	388	690	477	828	507	735	426	493	235	-	-	4.180	2.724	6.904
23	Kalimantan Timur	542	493	541	614	714	459	796	533	733	456	670	331	406	182	-	-	4.402	3.268	7.720
24	Kalimantan Utara	189	173	100	108	145	101	157	98	209	96	167	66	130	42	-	-	1.097	684	1.781
25	Sulawesi Utara	112	92	600	471	731	451	986	866	1.092	781	980	521	813	404	11	2	5.245	2.988	8.233
26	Sulawesi Tengah	116	98	398	404	612	382	648	361	680	392	618	329	495	289	-	-	3.572	2.175	5.747
27	Sulawesi Selatan	367	540	1.471	1.417	1.786	1.285	1.854	1.284	2.266	1.571	1.925	1.212	1.622	845	4	1	11.495	8.873	19.368
28	Sulawesi Tenggara	75	71	355	311	403	311	499	254	499	323	506	242	313	146	-	-	2.650	1.655	4.305
29	Gorontalo	89	89	354	305	343	221	398	293	467	345	393	313	296	165	-	-	2.336	1.731	4.067
30	Sulawesi Barat	62	46	243	238	252	280	279	186	388	237	229	158	226	119	-	-	1.599	1.184	2.783
31	Maluku	201	212	465	353	462	347	441	305	406	274	343	201	288	150	-	-	2.529	1.846	4.374
32	Maluku Utara	63	60	282	221	213	173	264	158	213	126	195	81	149	93	-	-	1.299	904	2.203
33	Papua Barat	181	151	333	328	357	282	274	202	177	133	127	89	89	34	-	-	1.539	1.219	2.757
34	Papua	1.554	1.446	1.627	1.419	1.317	1.187	825	697	648	388	375	249	163	104	-	-	6.509	5.482	11.991
	Indonesia	34.806	30.834	40.992	42.551	46.385	38.032	49.129	34.994	54.097	35.500	49.508	28.829	36.457	17.596	1.058	866	313.642	210.252	543.874
		11.82%		15.54%		15.89%		15.47%		16.47%		14.41%		9.94%		0.35%		100%		

Sumber: Unit Pelaporan dan Pengelolaan Pengguna Kemenkes RI

Keterangan: L : Laki-laki P : Perempuan T : Jumlah laki-laki dan Perempuan

* Data berdasarkan hasil pelaporan Aplikasi SITB RS Wilayah v3

KEMENKES RI

Lampiran 51.c

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																		
		0-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		≥65		Tidak diketahui*		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
1	Aceh	14	17	299	180	496	239	467	230	580	306	333	235	304	140	-	-	2.666	1.209	4.021
2	Sumatera Utara	160	124	1.200	973	1.705	914	2.023	843	2.278	1.040	1.989	832	971	414	72	42	10.998	5.181	15.177
3	Sumatera Barat	43	32	400	445	661	376	680	370	794	394	740	353	412	234	-	-	4.070	2.230	6.300
4	Riau	45	39	406	322	694	388	787	354	836	352	600	304	353	119	-	-	3.711	1.878	5.589
5	Jambi	33	31	271	224	335	238	368	233	419	259	301	194	265	101	-	-	2.115	1.291	3.406
6	Sumatera Selatan	184	132	706	537	991	715	1.139	733	1.227	734	1.242	598	666	340	1	-	6.595	3.811	10.117
7	Bengkulu	12	9	109	89	154	62	151	121	207	121	198	90	147	69	-	-	1.021	591	1.612
8	Lampung	76	78	521	669	844	728	998	695	1.141	747	1.122	662	855	883	-	-	5.047	3.602	9.379
9	Kep. Bangka Belitung	5	3	97	68	145	69	128	93	172	80	109	57	92	30	-	-	824	447	1.271
10	Kepulauan Riau	23	13	240	208	283	256	483	212	334	142	259	78	127	64	-	-	1.759	1.017	2.771
11	DKI Jakarta	155	177	1.878	1.669	2.279	1.524	2.294	1.325	2.298	1.090	1.634	929	956	398	-	-	11.174	7.112	18.286
12	Jawa Barat	621	385	4.895	3.199	5.289	3.667	6.994	3.491	5.288	3.553	4.668	2.865	2.879	1.349	111	114	27.247	16.662	47.040
13	Jawa Tengah	109	147	1.769	1.260	2.351	1.986	2.287	1.918	2.976	2.082	2.560	1.636	1.577	988	-	-	14.726	10.966	25.626
14	DI Yogyakarta	16	22	184	153	144	130	158	111	259	110	177	86	171	66	-	-	1.254	693	1.747
15	Jawa Timur	162	157	2.197	2.471	2.491	2.007	3.143	1.923	4.224	2.079	4.859	2.907	2.713	1.167	-	-	10.936	13.884	22.993
16	Banten	100	81	1.061	999	1.586	938	1.449	872	1.969	888	934	556	551	297	21	21	7.093	4.227	11.320
17	Bali	7	4	165	162	220	177	245	144	206	170	230	110	232	77	4	1	1.417	877	2.294
18	Nusa Tenggara Barat	20	28	290	282	457	289	512	253	669	413	539	289	416	147	-	-	2.993	1.799	4.792
19	Nusa Tenggara Timur	22	31	324	307	449	394	457	273	366	250	401	241	293	140	-	-	2.099	1.234	3.333
20	Kalimantan Barat	51	61	446	326	682	337	695	362	742	343	591	279	362	134	-	-	3.587	1.841	5.428
21	Kalimantan Tengah	7	8	117	80	228	139	240	103	247	140	223	99	156	53	-	-	1.246	689	1.935
22	Kalimantan Selatan	21	18	214	173	282	174	483	268	632	287	367	185	286	87	-	-	1.888	1.165	3.053
23	Kalimantan Timur	33	30	259	223	371	261	467	279	661	278	370	185	299	73	-	-	2.093	1.366	3.459
24	Kalimantan Utara	8	4	62	62	99	66	113	57	123	74	123	63	95	20	-	-	692	351	1.043
25	Sulawesi Utara	36	34	390	323	510	321	641	324	775	413	569	359	510	260	-	-	3.541	2.036	5.581
26	Sulawesi Tengah	18	23	227	254	388	294	440	247	434	231	327	196	270	99	-	-	2.159	1.314	3.473
27	Sulawesi Selatan	21	26	616	777	1.167	814	1.247	794	1.416	1.011	1.256	697	921	422	-	-	6.886	4.261	11.147
28	Sulawesi Tenggara	8	10	245	207	284	207	336	191	353	219	338	171	192	103	-	-	1.775	1.113	2.888
29	Gorontalo	40	40	253	207	259	149	283	202	333	220	259	205	196	103	-	-	1.599	1.126	2.725
30	Sulawesi Barat	14	11	184	149	188	149	193	122	233	166	173	105	138	87	-	-	1.124	788	1.912
31	Maluku	10	11	263	199	277	194	279	169	231	110	203	113	110	71	-	-	1.376	913	2.289
32	Maluku Utara	10	9	161	156	133	123	194	122	169	98	149	81	79	58	-	-	894	620	1.514
33	Papua Barat	16	20	173	154	193	139	160	112	101	70	81	51	38	18	-	-	760	562	1.322
34	Papua	46	43	698	744	769	610	662	351	352	272	217	152	93	46	-	-	2.969	2.128	4.977
Indonesia		2.035	2.247	21.619	21.192	27.233	16.937	29.120	16.196	23.879	14.629	27.525	16.655	12.867	7.741	212	221	157.862	105.338	260.099
		1,83%		16,83%		17,73%		18,09%		15,70%		16,19%		9,93%		0,17%		100%		

Sumber: Dikirim Perwakilan dan Program/Kabupaten/Kota/Provinsi, Kemenkes RI

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

* Kasus terkonfirmasi hasil penyelusuran kasus (DM RS Rujukan/Lab)

KEMENKES RI

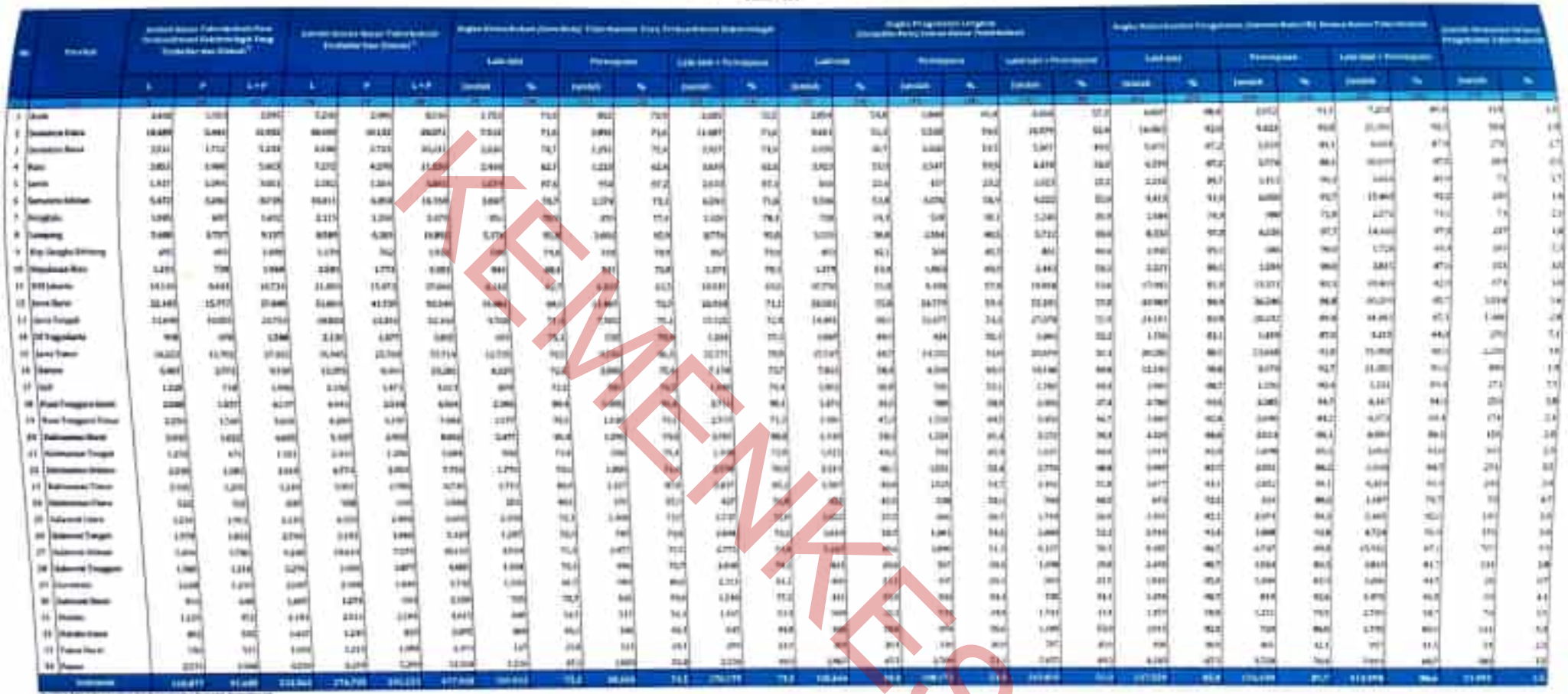

KEMENKES RI

Lampiran 53.a

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Balita	Perkiraan Pneumonia Pada Balita (%)	Perkiraan Pneumonia Balita	Penemuan Pneumonia Balita												Jumlah Kematian Balita karena Pneumonia				Total			CFR (%)
					< 1 Tahun		1-4 Tahun		< 1 Tahun		1-4 Tahun		Jumlah			%	< 1 Tahun		1-4 Tahun					
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P		L	P	L	P	L	P	L+P	
1	Aceh	488.041	6.46	21.767	648	571	1.336	1.313	19	14	40	39	1.859	1.427	3.285	15,0	4	4	0	0	4	4	8	0,46
2	Sumatera Utara	1.491.611	3,59	41.968	1.414	1.214	1.588	1.780	103	88	60	52	3.146	3.079	6.225	13,0	1	4	0	0	5	4	9	0,14
3	Sumatera Barat	551.694	3,91	20.767	1.021	1.377	2.007	1.274	96	69	118	117	3.144	4.662	10.235	49,3	1	2	0	0	3	2	5	0,02
4	Riau	681.843	3,67	17.661	992	447	1.718	1.066	33	38	62	37	2.804	1.588	4.273	24,2	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Jambi	360.022	3,11	11.342	469	334	1.267	1.110	36	34	49	36	1.966	1.214	3.225	31,1	0	1	1	0	1	1	2	0,06
6	Sumatera Selatan	874.326	3,81	31.563	1.742	1.478	3.765	3.255	107	54	46	43	5.660	5.831	10.402	33,8	0	0	2	1	2	1	3	0,03
7	Bengkulu	214.665	2,69	6.291	115	99	179	164	3	3	9	10	302	261	559	12,8	0	1	1	0	1	1	2	0,36
8	Lampung	955.292	2,23	18.582	1.339	1.348	3.416	2.888	147	141	176	126	5.078	4.466	9.544	51,3	1	5	1	0	2	5	7	0,07
9	Kep. Bangka Belitung	137.287	4,45	6.106	546	412	1.071	1.443	4	1	29	15	2.250	1.873	4.123	67,7	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Kepulauan Riau	137.287	3,98	5.464	486	339	989	898	8	8	16	14	1.247	715	1.962	36,0	0	0	1	0	1	0	1	0,05
11	DKI Jakarta	1.045.731	4,24	44.339	3.709	7.360	13.892	13.964	244	116	239	264	25.096	21.204	46.354	104,5	1	0	0	0	1	0	1	0,00
12	Jawa Barat	4.896.024	4,62	222.032	19.033	16.049	36.813	33.867	1.113	930	799	665	55.758	89.130	106.886	47,2	10	5	4	5	44	10	24	0,02
13	Jawa Tengah	3.651.731	3,81	93.764	7.383	6.302	18.434	14.520	842	511	896	601	27.871	21.108	50.263	52,5	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	DI Yogyakarta	282.871	4,32	12.211	1.455	908	2.392	1.857	56	56	97	99	4.800	2.912	6.912	56,6	2	0	0	2	2	0	2	0,03
15	Jawa Timur	3.926.277	4,45	174.698	11.544	11.088	30.009	31.080	442	278	389	323	44.036	33.227	99.561	73,1	12	8	6	7	30	17	35	0,04
16	Banten	1.186.549	4,13	48.630	4.072	3.755	11.994	10.802	202	109	150	120	16.319	14.961	35.251	72,5	5	5	2	1	11	6	17	0,05
17	Bali	436.997	2,91	12.715	1.961	639	1.963	1.304	18	14	13	13	3.819	2.051	5.994	59,3	4	13	2	4	6	17	23	0,49
18	Nusa Tenggara Barat	596.214	4,58	32.169	4.571	3.729	6.378	5.168	369	238	326	239	11.836	9.774	21.609	66,5	1	1	0	1	1	2	3	0,04
19	Nusa Tenggara Timur	727.727	4,28	22.998	1.288	984	1.491	1.291	298	295	201	142	3.330	3.052	6.625	28,8	1	2	9	10	10	12	22	0,33
20	Kalimantan Barat	468.747	2,12	9.929	381	242	335	402	24	11	13	18	973	756	1.729	17,4	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	Kalimantan Tengah	269.058	4,37	11.756	224	156	384	285	15	21	18	18	642	492	1.133	9,6	2	1	0	0	2	1	3	0,26
22	Kalimantan Selatan	414.388	5,53	22.909	2.191	1.274	4.625	3.643	94	62	78	67	6.988	5.568	12.279	53,6	0	1	0	0	0	1	1	0,01
23	Kalimantan Timur	370.991	3,86	10.610	1.038	596	1.465	1.479	34	16	23	28	3.016	2.124	5.140	48,4	1	1	0	0	1	1	2	0,04
24	Kalimantan Utara	71.443	3,86	2.043	309	189	498	368	19	8	19	9	836	457	1.307	67,9	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	Sulawesi Utara	198.276	3,48	6.896	144	97	309	192	6	1	2	2	410	316	722	11,8	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	Sulawesi Tengah	340.918	3,19	13.594	1.337	1.215	2.952	2.630	103	69	98	64	4.452	3.778	8.430	67,9	3	3	3	1	7	3	10	0,12
27	Sulawesi Selatan	717.711	3,79	27.201	981	652	1.769	1.379	85	63	84	51	2.812	2.181	5.198	18,8	1	1	2	1	1	4	15	0,29
28	Sulawesi Tenggara	267.729	3,64	10.281	838	597	1.196	952	30	8	17	18	2.856	1.825	4.681	45,5	4	4	5	4	4	13	22	0,50
29	Gorontalo	119.222	4,04	5.776	379	338	968	611	20	29	49	18	1.626	1.397	3.023	52,3	1	0	0	0	1	0	1	0,03
30	Sulawesi Barat	134.921	4,88	6.438	347	272	562	456	16	10	8	11	833	651	1.484	23,0	1	0	2	2	4	2	6	0,40
31	Maluku	153.195	3,74	5.729	249	156	579	296	10	3	19	12	856	442	1.298	19,3	21	80	68	130	90	170	260	23,23
32	Maluku Utara	118.716	3,29	3.719	183	108	384	287	9	6	7	8	668	574	1.242	33,7	0	1	0	0	0	1	1	0,08
33	Papua Barat	85.859	2,88	3.010	248	193	410	346	11	10	11	13	884	619	1.799	179,2	13	9	11	10	22	19	42	3,33
34	Papua	321.897	3,88	9.002	7	3	5	7	0	0	1	0	8	5	17	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Indonesia	24.045.887	4,01	964.231	75.474	67.607	161.606	143.282	4.510	3.052	3.809	3.200	353.149	317.023	666.172	53,9	113	138	119	181	282	369	651	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengelolaan Puskesda

Keterangan :

Jumlah balita adalah seluruh balita yang ada di wilayah kerja puskesmas (berdasarkan hasil proyeksi penduduk)

Perkiraan penemuan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, (sesuai Riskesdas)

KEMENKES RI

Lampiran 3.3.b

BALITA BATUK/KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Balita Batuk Atau Kesukaran Bernafas			Batuk Bukan Pneumonia			Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Yang Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%	Persentase Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Yang Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%
		Jumlah Kunjungan	Diberikan Tatalaksana Standar (Dihitung Napas/ Lihat TDDK*)	Persentase Yang Diberikan Tatalaksana Standar	L	P	L + P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	140.327	65.717	46,8	86.081	84.709	171.270	23	6	26,09
2	Sumatera Utara	182.752	143.567	78,7	122.360	120.886	243.246	33	16	48,48
3	Sumatera Barat	153.240	147.152	96,0	78.083	76.499	154.582	19	18	94,74
4	Riau	159.821	122.939	76,9	93.693	91.547	185.040	12	5	41,67
5	Jambi	147.642	128.550	87,1	71.862	68.350	140.212	11	10	90,91
6	Sumatera Selatan	231.781	211.491	91,2	122.905	123.895	246.800	17	13	76,47
7	Bengkulu	46.010	41.219	89,6	24.076	24.024	48.100	10	8	80,00
8	Lampung	265.850	215.469	81,0	139.492	138.118	277.610	15	13	86,67
9	Kep. Bangka Belitung	47.962	44.570	92,9	22.775	21.494	44.269	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	55.111	30.918	56,1	26.892	29.466	56.358	7	1	14,29
11	DKI Jakarta	520.669	524.520	99,2	253.799	234.559	488.358	6	6	100,00
12	Jawa Barat	1.361.229	1.008.795	74,1	678.327	667.320	1.345.947	27	17	62,96
13	Jawa Tengah	776.213	711.675	91,7	481.662	490.476	972.078	35	18	51,43
14	DI Yogyakarta	55.099	53.269	96,3	46.526	43.373	89.897	5	4	80,00
15	Jawa Timur	874.060	753.743	86,2	457.964	471.054	929.018	38	30	78,95
16	Banten	486.844	351.174	72,8	233.980	232.122	466.102	8	8	100,00
17	Bali	99.424	92.564	93,1	54.240	48.865	103.013	9	7	77,78
18	Nusa Tenggara Barat	252.052	190.863	75,7	126.117	118.637	244.754	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	208.217	190.809	91,6	119.740	118.118	237.866	22	18	81,82
20	Kalimantan Barat	52.905	45.757	86,5	61.109	56.133	117.242	14	4	28,57
21	Kalimantan Tengah	73.039	64.449	88,2	43.419	41.012	84.431	14	8	57,14
22	Kalimantan Selatan	134.134	120.540	89,9	66.931	62.205	129.136	13	5	38,46
23	Kalimantan Timur	144.351	112.679	78,2	85.423	79.132	164.555	10	5	50,00
24	Kalimantan Utara	30.595	30.329	99,1	21.815	19.112	40.927	5	3	60,00
25	Sulawesi Utara	42.052	27.234	64,8	38.029	38.103	76.232	15	8	53,33
26	Sulawesi Tengah	106.893	101.782	95,2	55.399	52.955	108.354	13	12	92,31
27	Sulawesi Selatan	101.919	67.068	65,8	72.154	69.178	141.332	24	9	37,50
28	Sulawesi Tenggara	33.696	44.723	83,3	33.830	30.229	64.059	17	6	35,29
29	Gorontalo	39.037	29.374	75,3	18.119	16.855	34.974	6	5	83,33
30	Sulawesi Barat	39.226	30.010	76,5	21.478	20.490	41.968	6	4	66,67
31	Maluku	66.695	42.454	63,7	37.956	35.869	73.825	11	3	27,27
32	Maluku Utara	41.736	35.707	85,6	33.892	32.050	65.942	10	4	40,00
33	Papua Barat	47.320	42.229	89,2	24.747	24.134	48.881	13	2	15,38
34	Papua	2.585	810	31,6	1.288	1.260	2.548	29	1	3,45
	Indonesia	7.847.814	5.824.163	82,7	3.818.216	3.781.391	7.629.507	514	294	57,20

Sumber: Ditjen Pengendalian Penyakit

Keterangan:

*TDDK : tarikan disubog dada ke dalam

Jumlah kasus adalah estimasi kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut di beberapa kab/kota terdapat kasus yang ditemukan di RS

KEMENKES RI

Lampiran 54

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
		4 < Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T			
1	Aceh	1	-	2	-	4	-	26	3	99	30	7	-	141	33	174	219.839	16.062	13,49
2	Sumatera Utara	16	14	10	6	17	5	279	93	1.389	457	126	56	1.832	631	2.463	558.271	72.922	13,06
3	Sumatera Barat	5	1	1	4	6	4	66	10	213	87	30	12	423	118	541	233.326	49.876	21,61
4	Riau	1	4	1	2	4	1	83	18	309	168	35	10	413	145	558	362.526	45.425	15,81
5	Jambi	1	4	1	1	3	1	16	4	58	33	8	3	82	49	131	135.766	23.219	17,10
6	Sumatera Selatan	4	6	4	2	6	-	68	21	321	127	41	4	444	160	604	384.438	78.875	25,49
7	Bengkulu	2	4	2	2	1	-	19	4	89	49	6	1	119	60	179	75.949	16.017	21,09
8	Lampung	7	5	4	3	6	7	90	23	309	122	10	3	409	164	568	299.464	69.402	23,18
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	2	4	2	1	17	6	89	82	25	5	136	100	231	58.590	25.709	43,87
10	Kepulauan Riau	15	13	3	4	6	3	78	19	411	236	85	19	568	286	854	93.561	25.510	27,27
11	DKI Jakarta	29	19	13	20	98	42	953	211	4.529	1.871	366	109	5.889	1.612	6.701	393.274	211.642	53,82
12	Jawa Barat	61	51	36	19	118	60	851	252	2.954	1.271	314	94	4.234	1.852	6.086	1.699.164	431.794	25,41
13	Jawa Tengah	58	44	26	21	81	39	340	251	2.366	1.579	347	275	3.418	2.212	5.630	1.014.402	529.197	51,91
14	DI Yogyakarta	8	6	4	4	13	2	136	10	315	139	29	12	501	183	734	112.867	44.619	39,71
15	Jawa Timur	42	46	44	40	71	77	565	430	3.523	2.761	693	611	5.148	3.787	8.935	1.125.152	489.955	43,55
16	Banten	11	10	4	7	17	21	224	94	891	366	58	13	1.222	511	1.643	474.564	153.086	32,26
17	Bali	20	13	4	4	27	25	253	142	1.042	598	127	39	1.428	855	2.283	134.656	77.889	57,84
18	Nusa Tenggara Barat	16	6	2	1	5	1	21	16	115	69	6	2	163	95	258	205.330	40.376	20,15
19	Nusa Tenggara Timur	14	7	5	4	8	6	65	35	376	247	35	25	503	324	827	235.709	23.304	9,14
20	Kalimantan Barat	9	9	9	1	19	11	51	28	345	172	34	15	467	236	699	206.894	33.671	16,28
21	Kalimantan Tengah	0	2	1	1	1	1	17	19	94	62	13	4	126	94	222	111.197	13.941	12,54
22	Kalimantan Selatan	14	10	3	2	6	5	46	56	224	100	22	9	315	161	476	172.630	24.701	14,31
23	Kalimantan Timur	17	7	4	7	10	10	120	65	614	317	93	29	866	435	1.301	193.099	40.897	21,18
24	Kalimantan Utara	0	1	-	-	2	0	13	15	95	61	6	1	126	73	199	28.166	12.565	44,61
25	Sulawesi Utara	1	0	1	3	17	23	79	50	263	159	37	21	401	272	673	96.619	16.996	17,59
26	Sulawesi Tengah	3	3	-	-	5	3	48	26	179	73	19	1	254	106	360	126.441	31.693	25,07
27	Sulawesi Selatan	12	9	12	7	21	11	219	89	671	250	61	15	1.196	381	1.577	347.201	122.987	35,42
28	Sulawesi Tenggara	1	5	-	1	1	3	18	10	89	41	9	2	118	62	180	122.513	14.503	11,84
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	6	3	32	7	-	-	38	10	48	47.360	11.905	25,14
30	Sulawesi Barat	-	2	-	-	-	-	6	2	41	16	1	1	48	21	69	62.499	7.751	12,40
31	Maluku	0	0	-	1	5	5	52	31	173	139	33	9	271	191	462	83.185	18.184	21,32
32	Maluku Utara	3	6	-	2	3	11	30	14	104	76	13	4	153	114	267	93.285	9.438	17,04
33	Papua Barat	16	25	3	4	9	24	44	114	182	240	18	5	275	422	697	62.669	14.663	34,22
34	Papua	58	41	21	17	75	310	329	586	1.063	1.110	85	63	1.628	2.125	3.753	133.055	41.341	30,89
Indonesia		501	405	235	204	694	758	6.979	3.712	23.978	12.415	3.033	1.345	32.443	17.889	50.282	9.698.773	2.877.264	29,29
		1,0		0,9		2,9		18,3		76,4		8,7		100					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

KEMENKES RI

Lampiran 23.a

JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2019

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2017	2018	2019
1	Aceh	111	155	174
2	Sumatera Utara	1.914	1.999	2.463
3	Sumatera Barat	563	624	541
4	Riau	711	539	558
5	Jambi	278	246	131
6	Sumatera Selatan	486	508	601
7	Bengkulu	95	107	177
8	Lampung	580	524	568
9	Kepulauan Bangka Belitung	268	205	234
10	Kepulauan Riau	1.105	1.033	854
11	DKI Jakarta	6.620	6.896	6.701
12	Jawa Barat	5.819	5,185	6.066
13	Jawa Tengah	5,425	5.400	5.630
14	DI Yogyakarta	723	833	714
15	Jawa Timur	8.204	8.608	8.935
16	Banten	1.315	1.334	1.643
17	Bali	2.441	2.211	2.283
18	Nusa Tenggara Barat	222	192	258
19	Nusa Tenggara Timur	837	842	821
20	Kalimantan Barat	608	692	699
21	Kalimantan Tengah	119	122	222
22	Kalimantan Selatan	572	297	474
23	Kalimantan Timur	1.202	1.126	1.301
24	Kalimantan Utara	172	168	199
25	Sulawesi Utara	516	555	673
26	Sulawesi Tengah	200	293	350
27	Sulawesi Selatan	1.366	1.174	1.537
28	Sulawesi Tenggara	134	106	180
29	Gorontalo	51	74	48
30	Sulawesi Barat	37	26	68
31	Maluku	688	462	462
32	Maluku Utara	145	200	267
33	Papua Barat	409	380	697
34	Papua	4.358	3.546	3.753
Indonesia		**48.300**	**46.659**	**50.282**

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 3.5.b

JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN , KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																					
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui Kelompok Umur		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	1	0	21	1	17	4	4	4	1	0	0	0	0	0	48	9	49
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	2	0	1	0	0	0	2	0	73	10	85	16	40	10	9	3	2	0	0	0	215	43	258
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Sumatera Selatan	0	0	0	1	1	0	1	0	31	8	67	17	32	9	16	3	2	3	0	0	150	37	207
7	Bengkulu	1	0	0	1	1	0	0	0	13	4	17	7	13	5	3	0	1	1	0	0	49	20	69
8	Lampung	0	0	1	2	1	1	2	0	30	4	81	9	29	9	9	1	2	0	0	0	158	25	183
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	1	0	0	10	3	13	0	3	3	2	1	1	1	0	0	31	13	44
10	Kepulauan Riau	4	1	0	0	2	3	3	1	77	19	100	44	47	20	24	7	10	3	0	0	289	102	411
11	DKI Jakarta	2	1	2	1	2	1	6	4	123	29	187	60	90	29	31	12	10	3	0	0	466	139	605
12	Jawa Barat	0	0	0	1	2	2	2	0	72	12	89	22	47	17	20	4	4	2	0	0	242	71	313
13	Jawa Tengah	1	1	1	2	0	5	0	4	141	46	386	181	230	133	132	70	63	13	0	0	1,164	509	1,673
14	DI Yogyakarta	1	0	0	1	2	3	0	0	13	3	22	3	11	3	10	4	0	0	0	0	59	19	78
15	Jawa Timur	0	1	14	1	0	0	1	1	137	54	327	142	158	72	116	60	5	0	0	0	656	332	988
16	Banten	0	0	0	3	1	1	2	0	36	12	58	12	33	9	7	3	1	0	0	0	138	40	178
17	Bali	2	1	2	1	2	2	10	4	44	15	79	16	54	11	11	12	5	3	0	0	160	75	235
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	1	1	0	0	0	4	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	4	14
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	6	4	0	2	1	1	1	1	0	0	12	10	22
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	4	2	17	7	37	15	22	2	6	3	2	0	0	0	84	29	113
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	0	0	1	0	0	9	5	12	7	7	4	4	1	1	0	0	0	35	18	53
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
23	Kalimantan Timur	0	0	1	1	2	3	1	0	39	15	60	22	24	13	12	6	4	0	0	0	137	60	197
24	Kalimantan Utara	0	0	2	0	0	1	2	0	7	2	29	13	11	3	2	0	2	1	0	0	46	20	66
25	Sulawesi Utara	1	0	0	0	1	1	2	2	19	9	27	7	15	6	5	3	3	2	0	0	77	29	106
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	0	0	0	18	10	13	1	6	0	1	0	2	0	0	0	40	12	52
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	2	12	4	14	4	8	1	5	0	0	0	0	0	39	13	52
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	5	0	1	1	2	1	1	0	0	0	21	6	27
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	1	1	1	11	13	10	3	14	2	0	0	1	1	0	0	37	21	58
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	1	2	2	3	10	23	10	216	260	140	110	67	30	22	12	3	1	0	0	528	426	1,054
Indonesia		16	11	48	28	37	47	79	122	1,365	629	1,677	690	1,003	428	474	211	123	60	0	0	4,829	2,206	7,035
		0.4		1.0		1.2		2.9		28.3		33.6		20.3		9.7		2.3		0.3		100		

Sumber : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020
Keterangan : L : Laki-laki P : Perempuan T : Jumlah Laki-laki dan Perempuan

KEMENKES RI

Lampiran XXX

JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																								
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		60 - 69 Tahun		≥ 70 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui	Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L+P
1	Aceh	1	0	0	1	0	1	3	2	112	32	169	36	64	23	22	2	4	0	0	1	2	407	137	544
2	Sumatera Utara	1	0	41	33	23	19	27	11	1301	381	1,221	426	439	147	133	43	31	4	33	11	18	3,443	1,064	4,507
3	Sumatera Barat	1	0	13	1	8	10	14	2	313	67	316	139	139	41	33	12	9	2	9	4	322	997	330	1327
4	Riau	1	4	23	28	22	11	35	18	384	163	678	360	287	99	111	39	23	3	8	1	3	1722	713	2,471
5	Jambi	1	1	6	1	2	0	3	3	190	73	317	68	83	32	23	7	1	3	3	1	28	761	271	1032
6	Sumatera Selatan	3	5	12	6	7	6	22	8	361	119	386	114	160	28	61	6	3	3	22	12	4	1,111	321	1,432
7	Bengkulu	11	14	6	11	2	4	3	0	93	34	94	31	37	14	11	4	3	1	0	2	3	311	121	434
8	Lampung	4	1	12	10	7	9	14	2	241	111	253	120	110	33	30	14	9	2	8	2	3	730	303	1,033
9	Kep. Bangka Belitung	1	2	4	3	1	0	1	4	88	40	149	88	62	24	22	6	11	3	44	9	2	359	181	547
10	Kepulauan Riau	19	7	19	11	8	8	14	6	938	224	476	338	381	134	108	38	45	18	6	3	2	1,259	576	1,836
11	DKI Jakarta	4	1	20	8	11	12	19	7	830	189	896	332	860	71	143	33	35	7	2	3	7,343	2,331	372	11,017
12	Jawa Barat	43	29	75	80	39	43	46	35	2,358	866	1,748	728	386	227	147	53	29	4	128	62	33	4,948	2,159	7,042
13	Jawa Tengah	43	12	133	102	70	73	19	44	1,714	1,038	1,606	1,470	1,721	601	644	370	241	65	59	47	31	7,872	4,231	11,724
14	DI Yogyakarta	1	0	39	8	146	51	6	1	127	62	379	189	124	47	78	32	17	4	337	180	9	1,240	488	1,837
15	Jawa Timur	53	40	166	186	134	107	161	136	6,466	3,476	4,677	2,918	2,741	1,194	1,210	549	247	102	7	7	1	12,103	7,431	21,797
16	Banten	61	16	39	27	56	19	66	32	829	181	813	314	249	79	71	34	19	6	18	9	32	2,230	843	3,147
17	Bali	34	44	144	99	51	51	30	35	1,543	868	2,162	951	990	390	440	134	127	41	44	44	23	6,233	2,547	8,731
18	Nusa Tenggara Barat	3	3	19	28	9	18	6	6	357	134	525	133	81	36	31	6	1	1	3	3	1	824	222	997
19	Nusa Tenggara Timur	1	1	20	14	8	6	9	11	421	130	511	187	194	66	72	33	33	7	3	1	111	1,247	773	2,120
20	Kalimantan Barat	6	4	11	15	11	12	18	129	630	169	719	141	154	42	80	19	18	6	0	1	4	1,809	1,007	2,809
21	Kalimantan Tengah	1	6	4	6	0	4	0	3	93	67	86	86	30	18	17	4	3	1	3	3	0	373	124	529
22	Kalimantan Selatan	5	2	6	5	4	3	3	3	71	67	159	51	33	12	14	7	3	1	0	2	0	242	169	411
23	Kalimantan Timur	5	10	17	17	11	11	10	16	345	169	541	194	183	69	74	17	23	1	3	1	2	1,196	670	1,773
24	Kalimantan Utara	6	0	24	18	9	3	7	9	89	36	177	68	90	22	39	6	33	1	0	0	0	457	183	640
25	Sulawesi Utara	1	1	24	14	11	7	24	16	473	159	445	184	172	64	92	31	14	4	0	0	0	1,177	551	1,728
26	Sulawesi Tengah	1	3	12	8	6	3	3	14	189	141	361	98	77	28	26	6	6	3	5	4	0	611	298	909
27	Sulawesi Selatan	5	8	20	24	23	19	56	17	1,033	401	905	449	338	98	98	33	20	5	85	55	14	2,559	844	3,403
28	Sulawesi Tenggara	0	5	2	0	1	3	0	0	80	46	86	44	33	7	12	3	3	0	169	91	6	568	222	790
29	Gorontalo	1	1	0	4	0	1	0	1	73	27	94	18	11	4	3	0	0	0	1	0	1	142	54	196
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	9	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	8	25
31	Maluku	0	1	2	1	1	0	1	0	191	113	156	104	74	30	30	11	11	3	0	0	0	561	214	775
32	Maluku Utara	0	1	1	5	0	4	1	0	132	111	169	80	77	28	34	6	7	1	1	1	0	428	270	698
33	Papua Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
34	Papua	28	17	234	146	93	179	716	1,911	3,599	3,846	3,321	1,637	1,199	403	530	142	280	109	0	0	174	13,847	10,719	24,566
Indonesia		403	251	1,216	911	745	670	1,415	2,326	22,969	15,665	26,861	12,930	11,291	4,999	5,614	1,710	1,148	447	1,044	527	11,016	76,292	59,866	136,158
		0.3		1.8		1.2		3.3		33.7		58.7		11.7		5.2		1.3		1.9					

Sumber : Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2019
Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan ; L+P = Laki-laki dan Perempuan

KEMENKES RI

Lampiran 55.d

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2019

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Dilaporkan		Total			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4	5
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	5	0	2	0	0	0	0	0	16	0	16
7	Bengkulu	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	10	2	12
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
10	Kepulauan Riau	1	1	0	0	0	1	0	0	8	1	6	9	4	7	2	0	1	0	0	0	24	19	43
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	13	5	7	6	1	2	1	1	0	0	26	15	41
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	1	1	0	2	0	0	0	15	1	16
13	Jawa Tengah	0	0	0	1	0	2	2	0	16	4	31	18	23	5	21	6	1	2	0	1	94	43	137
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6
15	Jawa Timur	0	0	1	0	1	0	0	0	19	7	42	17	31	17	21	9	0	0	0	0	120	50	170
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	9	5	14
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	6
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	9	6	15
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	1	1	0	1	1	0	1	3	6	2	2	4	1	2	2	0	0	0	17	13	30
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	2	0	0	1	0	0	0	9	5	14
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	2	13
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	5
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	1	1	0	0	1	0	0	10	4	3	3	1	3	1	0	1	0	0	20	23	43
Indonesia		2	1	4	3	1	4	4	7	86	39	149	62	98	58	64	31	18	5	0	1	418	196	614
		0,5		1,1		0,8		1,0		20,4		34,9		24,1		13,8		2,4		0,2				

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

KEMENKES RI

Lampiran 55.a

JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2019
		2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	78	89	49	546
2	Sumatera Utara	155	149	TAD	4.065
3	Sumatera Barat	267	347	258	2.217
4	Riau	383	269	TAD	2.470
5	Jambi	87	25	11	750
6	Sumatera Selatan	170	246	207	1.322
7	Bengkulu	29	55	69	404
8	Lampung	41	143	143	1.035
9	Kepulauan Bangka Belitung	57	30	44	547
10	Kepulauan Riau	288	289	411	1.994
11	DKI Jakarta	567	717	585	10.517
12	Jawa Barat	1.251	247	313	7.062
13	Jawa Tengah	1.719	1.041	1.613	11.724
14	DI Yogyakarta	50	48	78	1.537
15	Jawa Timur	741	1.506	958	20.787
16	Banten	512	207	158	3.147
17	Bali	736	549	240	8.230
18	Nusa Tenggara Barat	93	27	34	847
19	Nusa Tenggara Timur	11	94	29	2.080
20	Kalimantan Barat	110	95	113	2.808
21	Kalimantan Tengah	12	25	53	325
22	Kalimantan Selatan	16	0	5	410
23	Kalimantan Timur	350	171	201	1.775
24	Kalimantan Utara	55	267	66	605
25	Sulawesi Utara	127	112	125	1.924
26	Sulawesi Tengah	144	2	52	815
27	Sulawesi Selatan	220	337	TAD	3.416
28	Sulawesi Tenggara	92	113	52	613
29	Gorontalo	61	5	TAD	216
30	Sulawesi Barat	6	0	TAD	26
31	Maluku	88	60	45	774
32	Maluku Utara	34	100	61	698
33	Papua Barat	0	0	TAD	1.141
34	Papua	2.012	1.601	1.861	23.598
Indonesia		**10.488**	**10.190**	**7.036**	**141.181**

Sumber : SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 55.I

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
1	Aceh	47	0	0,00
2	Sumatera Utara	TAD	TAD	TAD
3	Sumatera Barat	258	10	3,88
4	Riau	TAD	TAD	TAD
5	Jambi	11	2	18,18
6	Sumatera Selatan	207	2	0,97
7	Bengkulu	69	0	0,00
8	Lampung	143	1	0,70
9	Kepulauan Bangka Belitung	44	0	0,00
10	Kepulauan Riau	411	0	0,00
11	DKI Jakarta	585	41	7,01
12	Jawa Barat	313	12	3,83
13	Jawa Tengah	1.613	5	0,31
14	DI Yogyakarta	78	0	0,00
15	Jawa Timur	958	5	0,52
16	Banten	158	6	3,80
17	Bali	240	1	0,42
18	Nusa Tenggara Barat	34	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	29	0	0,00
20	Kalimantan Barat	113	1	0,88
21	Kalimantan Tengah	53	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	5	0	0,00
23	Kalimantan Timur	203	0	0,00
24	Kalimantan Utara	66	0	0,00
25	Sulawesi Utara	125	1	0,80
26	Sulawesi Tengah	52	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	TAD	TAD	TAD
28	Sulawesi Tenggara	52	0	0,00
29	Gorontalo	TAD	TAD	TAD
30	Sulawesi Barat	TAD	TAD	TAD
31	Maluku	45	45	100,00
32	Maluku Utara	61	0	0,00
33	Papua Barat	TAD	TAD	TAD
34	Papua	1.061	1	0,09
	Indonesia	**7.036**	**133**	**1,89**

Sumber: SIHA, Ditjen Penyegahan dan Pengendalian Penyakit, Berbentuk 01, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 56

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Target Penemuan		Diare									
				Dilayani				Mendapat Oralit				Mendapat Zinc	
				Semua Umur		Balita		Semua Umur		Balita		Balita	
		Semua Umur	Balita	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	145.031	95.750	74.415	51,3	24.690	25,8	74.415	100,0	24.690	100,0	23.094	93,5
2	Sumatera Utara	393.189	253.211	215.259	54,7	66.594	26,3	201.309	93,5	65.789	98,8	50.242	75,4
3	Sumatera Barat	146.912	90.562	88.290	60,1	25.053	27,7	88.244	99,9	25.053	100,0	25.053	100,0
4	Riau	188.237	125.425	83.358	44,3	29.083	23,2	77.202	92,6	27.634	95,0	26.161	90,0
5	Jambi	97.864	54.814	70.023	71,6	25.337	46,9	64.282	91,8	24.024	94,8	23.427	92,5
6	Sumatera Selatan	228.708	133.482	173.537	75,9	63.585	47,6	165.937	95,6	61.614	96,9	59.443	93,5
7	Bengkulu	53.780	30.656	26.968	50,1	10.591	34,5	26.586	98,6	10.522	99,3	10.590	100,0
8	Lampung	228.089	127.443	114.536	50,2	36.656	28,8	114.407	99,9	36.647	100,0	36.636	99,9
9	Kep. Bangka Belitung	40.197	22.649	17.669	44,0	7.399	32,7	17.505	99,1	7.399	100,0	7.399	100,0
10	Kepulauan Riau	59.121	36.290	29.895	50,6	7.834	21,6	29.895	100,0	7.834	100,0	7.834	100,0
11	DKI Jakarta	285.061	149.859	298.293	104,6	98.478	65,7	298.293	100,0	98.478	100,0	98.478	100,0
12	Jawa Barat	1.331.551	729.500	881.093	66,2	347.078	47,6	753.695	85,5	330.595	95,3	338.108	97,4
13	Jawa Tengah	937.392	642.854	559.994	59,7	171.377	38,7	413.686	73,9	151.508	88,3	163.416	95,2
14	DI Yogyakarta	103.759	46.834	69.902	67,4	14.125	30,2	57.987	83,0	10.492	74,3	12.657	89,6
15	Jawa Timur	1.071.863	475.057	678.248	63,3	221.323	46,6	641.618	94,6	213.048	96,2	210.421	95,0
16	Banten	349.038	204.216	250.516	71,8	107.857	52,8	234.799	93,7	102.841	95,3	101.893	94,5
17	Bali	117.097	54.364	62.505	53,4	16.097	29,6	51.579	82,5	14.021	87,1	13.751	85,4
18	Nusa Tenggara Barat	136.900	83.531	127.151	92,9	57.264	68,6	127.151	100,0	57.264	100,0	57.264	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	147.317	108.687	27.597	18,7	13.824	12,7	26.376	95,6	13.298	96,2	13.014	94,1
20	Kalimantan Barat	136.866	82.869	59.061	43,2	24.104	29,1	57.289	97,0	22.508	93,4	24.104	100,0
21	Kalimantan Tengah	100.301	42.976	48.493	48,3	17.668	41,1	48.493	100,0	17.668	100,0	17.668	100,0
22	Kalimantan Selatan	114.591	66.820	66.532	58,1	26.450	39,6	55.971	84,1	24.151	91,3	25.977	98,2
23	Kalimantan Timur	106.470	58.977	68.256	67,9	24.715	41,9	55.713	81,6	21.946	88,8	21.514	87,0
24	Kalimantan Utara	20.041	12.759	16.387	81,3	6.956	54,5	11.287	68,9	5.091	73,2	5.409	77,8
25	Sulawesi Utara	67.600	34.373	19.435	28,7	7.624	22,2	17.032	87,6	7.624	100,0	6.987	91,6
26	Sulawesi Tengah	82.459	50.450	52.584	63,8	19.925	39,5	47.195	89,8	17.805	89,4	17.913	89,9
27	Sulawesi Selatan	238.983	139.047	145.456	60,9	47.932	34,5	102.479	70,5	37.639	78,5	40.355	84,2
28	Sulawesi Tenggara	73.028	50.611	27.212	37,3	11.483	22,7	23.862	87,7	11.031	96,1	10.728	93,4
29	Gorontalo	32.471	19.086	21.869	67,3	9.727	51,0	15.325	70,1	7.267	74,7	8.607	88,5
30	Sulawesi Barat	37.267	25.571	32.427	87,0	10.727	42,0	32.427	100,0	10.727	100,0	10.727	100,0
31	Maluku	48.677	34.877	15.332	31,5	8.063	23,1	15.332	100,0	8.063	100,0	8.063	100,0
32	Maluku Utara	33.906	23.473	19.861	58,6	10.435	44,5	17.883	90,0	9.548	91,5	9.914	95,0
33	Papua Barat	25.910	16.995	8.570	33,1	4.407	25,9	7.596	88,6	4.093	92,9	4.074	92,4
34	Papua	91.241	56.524	34.892	38,2	17.083	30,2	34.892	100,0	17.083	100,0	17.083	100,0
Indonesia		**7.265.013**	**3.979.790**	**4.485.513**	**61,7**	**1.391.944**	**40,0**	**4.007.752**	**89,3**	**1.504.995**	**94,5**	**1.508.804**	**94,7**
Angka Kesakitan Diare Per 1.000 Penduduk		**270**	**841**										

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020

KEMENKES RI

Lampiran 57

KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.371.532	37	40	77	180	97	277	217	137	354	6,59
2	Sumatera Utara	14.262.549	4	9	13	135	44	179	119	73	192	1,32
3	Sumatera Barat	5.441.197	12	8	20	45	26	71	57	34	91	1,67
4	Riau	6.971.745	7	3	10	62	35	97	69	38	107	1,53
5	Jambi	3.624.579	8	6	14	37	23	60	45	29	94	2,59
6	Sumatera Selatan	8.470.683	13	12	25	135	75	210	148	87	235	2,77
7	Bengkulu	1.991.038	1	1	2	11	7	18	12	8	20	1,00
8	Lampung	8.447.737	5	6	11	92	42	134	97	48	145	1,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.486.792	7	4	11	24	11	35	31	15	46	3,09
10	Kepulauan Riau	2.189.653	5	2	7	21	20	41	26	22	48	2,19
11	DKI Jakarta	10.557.810	60	30	90	319	153	472	380	183	570	5,40
12	Jawa Barat	49.316.712	108	86	194	1.253	653	1.906	1.361	739	2.100	4,26
13	Jawa Tengah	34.718.204	77	65	142	767	427	1.194	844	492	1.336	3,85
14	DI Yogyakarta	3.842.932	3	6	9	38	16	54	38	22	60	1,56
15	Jawa Timur	39.698.631	114	121	235	1.676	1.029	2.705	1.790	1.150	2.940	7,41
16	Banten	12.927.316	50	62	112	527	288	815	577	350	927	7,17
17	Bali	4.336.923	3	10	13	74	33	107	77	43	120	2,77
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	19	23	42	179	100	279	198	123	321	6,33
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	18	14	32	230	127	357	248	141	389	7,13
20	Kalimantan Barat	5.069.127	4	4	8	51	21	72	55	25	80	1,58
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	7	3	10	42	33	75	49	36	85	3,13
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	14	9	23	84	44	128	98	53	151	3,56
23	Kalimantan Timur	3.721.389	13	14	27	117	51	168	130	65	195	5,24
24	Kalimantan Utara	742.245	1	2	3	24	12	36	25	14	39	5,25
25	Sulawesi Utara	2.506.981	52	54	106	305	179	484	357	233	590	23,53
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	25	21	46	169	80	249	194	101	295	9,66
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	79	90	169	576	407	983	655	497	1.152	13,02
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	7	13	20	125	69	194	132	82	214	7,91
29	Gorontalo	1.202.631	4	7	11	124	83	207	128	90	218	18,13
30	Sulawesi Barat	1.380.256	24	14	38	101	43	144	125	57	182	13,19
31	Maluku	1.802.870	24	20	44	260	127	387	284	147	431	23,91
32	Maluku Utara	1.255.771	89	107	196	405	308	713	494	415	909	72,39
33	Papua Barat	959.617	220	311	531	502	237	739	722	548	1.270	132,34
34	Papua	3.379.302	180	189	369	752	412	1.164	932	601	1.533	45,36
Indonesia		268.074.565	1.302	1.366	2.668	9.439	5.332	14.771	10.741	6.698	17.439	6,51
Proporsi Jenis Kelamin			48,8	51,2		63,9	36,1		61,6	38,4		

Sumber: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, per Mei 2020

KEMENKES RI

Lampiran 3.9

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru										
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	5.371.532	354	324	91,53	15	4,24	2,79	35	9,89	0	0,00
2	Sumatera Utara	14.562.549	192	126	65,63	36	18,75	2,47	16	8,33	0	0,00
3	Sumatera Barat	5.441.197	91	33	36,26	10	10,99	1,84	5	5,49	0	0,00
4	Riau	6.971.745	107	95	88,79	6	5,61	0,86	9	8,41	0	0,00
5	Jambi	3.624.579	94	68	72,34	16	17,02	4,41	6	6,38	1	16,67
6	Sumatera Selatan	8.470.683	235	216	91,91	15	6,38	1,77	16	6,81	1	6,25
7	Bengkulu	1.991.858	20	13	65,00	4	20,00	2,01	2	10,00	0	0,00
8	Lampung	8.447.737	145	131	90,34	9	6,21	1,07	9	6,21	1	11,11
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.480.792	46	45	97,83	0	0,00	0,00	4	8,70	0	0,00
10	Kepulauan Riau	2.189.653	48	45	93,75	3	6,25	1,37	10	20,83	0	0,00
11	DKI Jakarta	10.557.810	370	487	85,44	36	6,32	3,41	36	6,32	3	8,33
12	Jawa Barat	49.316.712	2.100	1.598	76,10	161	7,67	3,26	169	8,05	3	1,78
13	Jawa Tengah	34.718.204	1.336	1.111	83,18	116	8,68	3,34	59	4,42	1	1,69
14	DI Yogyakarta	3.842.932	60	51	85,00	3	5,00	0,78	1	1,67	0	0,00
15	Jawa Timur	39.698.631	2.960	2.237	76,09	320	10,80	8,06	202	6,82	10	4,95
16	Banten	12.927.316	927	775	83,60	81	8,74	6,27	69	7,44	1	1,45
17	Bali	4.336.923	120	116	96,67	4	3,33	0,92	6	5,00	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	321	289	89,72	10	3,12	1,97	27	8,41	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	389	339	87,15	19	4,88	3,48	24	6,17	0	0,00
20	Kalimantan Barat	5.069.127	80	60	75,00	14	17,50	2,76	6	7,50	2	33,33
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	85	71	83,53	4	4,71	1,47	8	9,41	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	151	129	85,43	4	2,65	0,94	10	6,62	0	0,00
23	Kalimantan Timur	3.721.309	195	179	91,79	7	3,59	1,88	12	6,15	0	0,00
24	Kalimantan Utara	742.245	39	36	92,31	2	5,13	2,69	3	7,69	0	0,00
25	Sulawesi Utara	2.586.981	590	570	96,61	4	0,68	1,60	38	6,47	0	0,00
26	Sulawesi Tengah	3.034.023	295	263	89,15	18	6,10	5,89	23	6,47	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	1.152	950	93,16	79	6,86	8,93	86	7,47	0	0,00
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	214	195	91,12	8	3,74	2,96	5	2,34	0	0,00
29	Gorontalo	1.202.631	219	202	92,66	10	4,59	8,32	20	9,17	1	5,00
30	Sulawesi Barat	1.380.256	182	179	98,35	2	1,10	1,45	22	12,09	0	0,00
31	Maluku	1.802.870	431	399	92,34	22	5,10	12,20	61	14,15	1	1,64
32	Maluku Utara	1.255.771	909	875	96,26	13	1,43	10,35	201	22,11	0	0,00
33	Papua Barat	959.417	1.270	1.216	95,75	40	3,15	41,68	371	29,21	2	0,54
34	Papua	3.379.302	1.533	1.480	96,54	10	1,96	0,88	429	27,86	3	0,71
Indonesia		268.074.565	17.439	14.909	85,49	1.121	6,43	4,18	2.009	11,52	58	1,49

Sumber: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, per Mei 2020

KEMENKES RI

Lampiran 59

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
1	Aceh	5.371.532	36	303	339	0,63	Eliminasi
2	Sumatera Utara	14.562.549	7	195	202	0,14	Eliminasi
3	Sumatera Barat	5.441.197	12	59	71	0,13	Eliminasi
4	Riau	6.871.745	11	140	151	0,22	Eliminasi
5	Jambi	3.624.329	6	104	110	0,30	Eliminasi
6	Sumatera Selatan	8.470.683	15	228	243	0,29	Eliminasi
7	Bengkulu	1.991.830	1	19	20	0,10	Eliminasi
8	Lampung	8.447.737	7	186	193	0,23	Eliminasi
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.792	8	44	52	0,35	Eliminasi
10	Kepulauan Riau	2.189.653	6	61	67	0,31	Eliminasi
11	DKI Jakarta	10.557.810	132	908	1.040	0,99	Eliminasi
12	Jawa Barat	49.316.712	126	2.204	2.330	0,47	Eliminasi
13	Jawa Tengah	34.718.204	100	1.548	1.648	0,47	Eliminasi
14	DI Yogyakarta	3.842.932	11	83	94	0,24	Eliminasi
15	Jawa Timur	39.698.631	146	3.150	3.296	0,83	Eliminasi
16	Banten	12.927.316	45	1.008	1.053	0,81	Eliminasi
17	Bali	4.336.923	8	124	132	0,30	Eliminasi
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.380	24	313	337	0,66	Eliminasi
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	23	451	474	0,87	Eliminasi
20	Kalimantan Barat	5.069.127	6	135	141	0,28	Eliminasi
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	10	116	126	0,46	Eliminasi
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	12	162	174	0,41	Eliminasi
23	Kalimantan Timur	3.721.389	13	194	207	0,56	Eliminasi
24	Kalimantan Utara	742.245	1	42	43	0,58	Eliminasi
25	Sulawesi Utara	2.506.981	90	610	700	2,79	Belum Eliminasi
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	10	251	261	0,85	Eliminasi
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	112	1.018	1.130	1,28	Belum Eliminasi
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	16	230	246	0,91	Eliminasi
29	Gorontalo	1.202.631	7	212	219	1,82	Belum Eliminasi
30	Sulawesi Barat	1.380.256	17	184	201	1,46	Belum Eliminasi
31	Maluku	1.802.870	30	447	477	2,65	Belum Eliminasi
32	Maluku Utara	1.255.771	89	893	982	7,82	Belum Eliminasi
33	Papua Barat	959.617	567	1.010	1.577	16,43	Belum Eliminasi
34	Papua	3.379.302	186	1.416	1.602	4,74	Belum Eliminasi
Indonesia		268.074.565	1.950	18.048	19.938	0,74	Eliminasi

Sumber: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI

KEMENKES RI

Lampiran 59.b

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	KUSTA (PB) TAHUN 2018		KUSTA (MB) TAHUN 2017	
		PENDERITA PB[a]	RFT PB (%)	PENDERITA MB[b]	RFT MB (%)
1	Aceh	84	97,5	224	91,1
2	Sumatera Utara	13	-	138	-
3	Sumatera Barat	7	83,3	68	76,8
4	Riau	16	75,0	122	78,8
5	Jambi	12	100,0	53	98,3
6	Sumatera Selatan	44	100,0	253	100,0
7	Bengkulu	3	100,0	24	95,8
8	Lampung	1	100,0	159	94,8
9	Kep. Bangka Belitung	9	53,8	41	50,0
10	Kepulauan Riau	6	100,0	28	68,6
11	DKI Jakarta	43	83,7	275	80,9
12	Jawa Barat	194	83,4	1.623	90,6
13	Jawa Tengah	123	83,7	1.491	89,1
14	DI Yogyakarta	3	0,0	77	78,3
15	Jawa Timur	354	86,6	3.017	90,4
16	Banten	87	96,6	842	90,3
17	Bali	9	90,9	68	92,2
18	Nusa Tenggara Barat	39	96,8	194	57,6
19	Nusa Tenggara Timur	45	-	360	-
20	Kalimantan Barat	10	80,0	51	68,2
21	Kalimantan Tengah	3	70,0	31	67,5
22	Kalimantan Selatan	11	83,3	94	17,7
23	Kalimantan Timur	22	70,0	128	87,3
24	Kalimantan Utara	9	100,0	37	75,7
25	Sulawesi Utara	10	85,8	406	83,2
26	Sulawesi Tengah	35	97,1	207	96,1
27	Sulawesi Selatan	95	93,9	941	83,9
28	Sulawesi Tenggara	31	86,3	294	79,1
29	Gorontalo	18	84,0	192	91,2
30	Sulawesi Barat	43	93,1	159	89,5
31	Maluku	62	-	336	-
32	Maluku Utara	122	86,3	423	77,2
33	Papua Barat	405	65,5	552	65,5
34	Papua	496	-	731	-
Indonesia		2.474	83,8	13.701	84,9

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI

Keterangan:

a= Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang satu 1 tahun sebelumnya sesuaitnya untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang satu 2 tahun sebelumnya sesuaitnya untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2016 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

KEMENKES RI

Lampiran 60

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	18	54,55
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	26	96,30
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	16	72,73
20	Kalimantan Barat	14	12	85,71
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	13	86,67
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33
31	Maluku	11	8	72,73
32	Maluku Utara	10	10	100,00
33	Papua Barat	13	9	69,23
34	Papua	29	16	55,17
	Indonesia	514	464	90,27

Sumber: Dapat Pemegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI
Keterangan: target 2019 = 80%

KEMENKES RI